D.N. AIDIT

PILIHAN TULISAN

DJILID II

Pustaka
Dimpos Manalu
dimposmanalu@yahoo.com
08126431319 ; 081933400001

Jajasan „Pembaruan"
Djakarta 1960

Katapengantar

Pilihan Tulisan D.N. Aidit djilid kedua ini sedianja diterbitkan ber-sama2 dengan djilid pertama untuk menjambut Kongres Nasional ke-VI PKI, bulan September tahun 1959. Tetapi berhubung dengan kesulitan2 teknis maka penerbitan djilid kedua diundurkan dan ditudjukan untuk menjongsong *40 tahun PKI pada tanggal 23 Mei 1960.*

Seperti jang telah dikemukakan dalam *Katapengantar Pilihan Tulisan D.N. Aidit djilid pertama,* isi dari djilid kedua ini meliputi masa sedjak tahun 1956, terutama sesudah Sidang Pleno ke-IV CC PKI sampai masa mendjelang Kongres Nasional ke-VI Partai.

Komisi Pilihan Tulisan D.N. Aidit
dari CC PKI

Djakarta, Mei 1960

Djangan henti2nja memperbesar pengaruh „Harian Rakjat" adalah djudul pidato sambutan Kawan D.N. Aidit jang disampaikan pada ulangtahun ke-V „Harian Rakjat" pada tanggal 29 Djanuari 1956.

Pidato ini menekankan pentingnja tugas meluaskan penjebaran „Harian Rakjat" untuk mengembangi kemadjuan gerakan kemerdekaan Rakjat Indonesia. Ini merupakan bentuk terpenting dari pelaksanaan tugas urgen Partai untuk memperkuat front persatuan nasional dan melandjutkan pembangunan Partai chususnja untuk mempertinggi tingkat ideologi kaum Komunis dan Rakjat pekerdja. Selandjutnja sambutan itu menggarisbawahi suatu keharusan supaja setiap konferensi Partai dari tingkat paling atas sampai paling bawah membitjarakan „Harian Rakjat", terutama mengenai soal memperluas penjebaran dan mengintensifkan pemasukan uang langganan.

DJANGAN HENTI2NJA MEMPERBESAR PENGARUH „HARIAN RAKJAT"

Saja merasa berbahagia, karena sebelum saja meninggalkan Tanahair untuk menudju ke Kongres ke-XX Partai Komunis Uni Sovjet saja masih dapat menjampaikan utjapan selamat kepada semua pembatja dan pentjinta „Harian Rakjat" berhubung dengan ulangtahun ke-V hariannja.

Memperingati ulangtahun „HR" berarti memperingati ulangtahun harian terbesar ditanahair kita sekarang. Lebih daripada itu, berarti memperingati kemadjuan penting dalam kehidupan persuratkabaran negeri kita. Bukankah baru untuk pertamakali terdjadi, bahwa sebuah suratkabar jang dimulai dengan oplah hanja beberapa ribu, dan sering mendapat gangguan dari kekuatan reaksioner, dalam waktu 5 tahun telah muntjul sebagai harian terbesar dan jang paling erat hubungannja dengan pembatja dan dengan massa Rakjat pekerdja ? Dan djuga, „HR" adalah koran jang tegas2 berpihak, jang dengan kuat mempertahankan pendirian „zelfbedruipen" (mengongkosi diri-sendiri), djadi tidak sebagai kebiasaan koran2 partai jang mendjadi „verliespost" partai jang memilikinja.

Ada dua sebab jang terpenting jang membikin „HR" tjepat madju.

Pertama, karena „HR" setia pada garis jang tepat, jaitu garis jang disesuaikan dengan tugas urgen PKI, jaitu tugas memperkuat front persatuan nasional dan meneruskan pembangunan Partai. Politik persatuan nasional jang mendjadi isi dan djiwa „HR" telah menjebabkan „HR" mendapat pembatja jang tidak sedikit dikalangan kaum demokrat dan patriot jang bukan-Komunis. Dalam pembangunan Partai, terutama dalam memelihara dan memperkuat persatuan didalam Partai, „HR" sudah mendjadi satu kebutuhan jang mutlak.

Kedua, karena keuletan sebagian besar pekerdja2 „HR", mulai dari tenaga redaksi, administrasi sampai kepada agen2. Semuanja

karena kesedaran dan karena diorganisasi oleh comite Partai dipusat dan oleh comite² Partai jang tersebar diseluruh negeri.

Tetapi satu kenjataan jang sekedjappun tidak boleh kita lupakan, jaitu kenjataan bahwa penjebaran „HR" sekarang masih djauh ketinggalan djika dibanding dengan kemadjuan gerakan kemerdekaan Rakjat Indonesia sekarang. Penjebaran 55.000 exemplar „HR" saban kali terbit adalah belum besar artinja djika dibanding dengan djumlah kira² 20 djuta Rakjat Indonesia jang bisa membatja, dan masih ketjil djumlah ini djika dibanding dengan lebih dari 6 djuta pemilih PKI dalam pemilihan umum untuk DPR dan untuk Konstituante jl.

Untuk segera membikin agak harmonis antara kemadjuan gerakan kemerdekaan Rakjat dengan perkembangan harian sentralnja, maka tidak ada djalan lain ketjuali dalam waktu jang tidak lama melipatgandakan penjebaran „HR".

Pelaksanaan tugas meluaskan penjebaran „HR" berarti memperbesar pengaruh „HR". Ini adalah bentuk pelaksanaan jang terpenting dari tugas Partai, tugas memperkuat front persatuan nasional dan meneruskan pembangunan Partai. Oleh karena itu, sudah pada tempatnja diserukan, bahwa: *tidak boleh ada konferensi Partai dari tingkat paling atas sampai paling bawah jang tidak membitjarakan „HR", terutama membitjarakan soal memperluas penjebaran dan soal mengintensifkan pemasukan uang langganan. Harus disedari benar² bahwa rol „HR" banjak tergantung pada oplahnja.*

Soal memperbesar pengaruh „HR", dan ini terutama dengan djalan meluaskan penjebarannja, mendjadi lebih penting lagi berhubung dengan kewadjiban terpenting dalam hubungan dengan melandjutkan pembangunan Partai, jaitu *kewadjiban mempertinggi tingkat ideologis kaum Komunis dan massa Rakjat pekerdja.* Pelaksanaan tugas kewadjiban ini akan gagal samasekali djika tidak disertai oleh pekerdjaan meluaskan penjebaran „HR".

Pada kesempatan jang penting ini, pada tempatnjalah saja djuga menjampaikan beberapa patah kata kepada pekerdja² „HR", mulai dari tenaga² redaksi, administrasi sampai kepada agen² „HR". Dibanding dengan tenaga² redaksi dan administrasi dari koran² partai lain, saudara² hanja mendapat honorarium rata² 50%. Dibanding dengan agen² koran² partai lain saudara² terpaksa bekerdja dengan alat² jang djauh daripada sempurna. Kebanjakan agen² „HR" harus berdjalan kaki dan menempuh djarak jang djauh², ada kalanja melalui bukit², sungai², djalan² betjek, untuk menjampaikan „HR" kepada langganan. Penderitaan pekerdja² „HR", mulai dari tenaga² redaksi, administrasi sampai kepada agen², adalah sama dengan penderitaan aktivis² Komunis lainnja. Adalah keliru berfikir untuk mengetjualikan diri dari keadaan jang masih berlaku ini. Perbaikan pasti datang, tetapi ia tidak datang sebagai perketjualian. Perbaikan dan kemadjuan „HR" itulah perbaikan buat nasib pekerdja² „HR". Getaran perdjuangan kemerdekaan Rakjat harus mendjadi getaran perdjuangan semua pekerdja „HR", mulai dari tenaga² redaksi, administrasi sampai kepada agen². Pekerdja² „HR" adalah orang² jang berdiri dibarisan paling depan dalam melawan tekanan ideologis dari musuh² Rakjat, terutama dari koran² mereka.

Dengan „HR" jang tersebar lebih banjak kita akan madju lebih tjepat dalam melaksanakan tugas urgen kita, tugas memperkuat front persatuan nasional dan tugas melandjutkan pembangunan Partai.

Hidup „Harian Rakjat", Harian Rakjat pekerdja Indonesia.

Djakarta, 29 Djanuari 1956

Artikel *Hidup Kongres ke-XX PKUS!* ini adalah pidato Kawan D.N. Aidit sebagai ketua delegasi PKI dimuka Kongres ke-XX PKUS jang berlangsung bulan Februari 1956.

Seperti diketahui pengiriman delegasi PKI ke Kongres ke-XX PKUS ini merupakan pengiriman delegasi Partai jang per-tama2 keluarnegeri sesudah dilangsungkannja pemilihan umum di Indonesia untuk DPR dan Konstituante pada achir tahun 1955 dan PKI keluar sebagai salahsatu Partai jang terbesar dengan djumlah pemilih enam djuta lebih.

Dalam menjambut Rentjana Lima Tahun ke-VI untuk Perkembangan Ekonomi Nasional URSS tahun 1955-1960 Kawan Aidit menundjukkan bahwa Rentjana ini merupakan sumbangan penting untuk perdamaian, demokrasi dan Sosialisme. Dikemukakan pula tentang arti bantuan Uni Sovjet terhadap perdjuangan Rakjat Indonesia untuk mentjapai kemerdekaan nasional jang penuh.

Selandjutnja kami muat tulisan berdjudul *Kongres ke-XX PKUS* jang merupakan sebagian dari Laporan Perlawatan keluarnegeri dalam rangka kundjungannja ke Uni Sovjet untuk menghadiri Kongres ke-XX PKUS serta beberapa negeri sosialis lainnja. Laporan tsb. diutjapkan oleh Kawan Aidit dalam tjeramah umum pada tgl. 27 Djuni 1956.

Tentang hasil Kongres ke-XX PKUS dikemukakan oleh Kawan D.N. Aidit beberapa soal jang berhubungan dengan kehantjuran sistim kolonial imperialis, kemungkinan mentjegah perang, bentuk2 peralihan ke Sosialisme diberbagai negeri dan tentang kultus individu.

Ditandaskan oleh Kawan D.N. Aidit bahwa dalam mengolah apa jang dilihat dan didengar diluarnegeri selamanja diusahakan untuk berpokokpangkal pada keadaan Rakjat Indonesia dan ditambahkan bahwa beladjar dari Rakjat2 lain adalah sangat perlu, tetapi ia tidak ada gunanja djikalau tidak akan membawa kemadjuan bagi Rakjat kita sendiri.

HIDUP KONGRES KE-XX PKUS!

Kawan2, izinkanlah saja atasnama Comite Central PKI, atasnama satu djuta Komunis Indonesia dan atasnama semua pemilih PKI dalam pemilihan umum di Indonesia pada achir tahun jang lalu mengutjapkan selamat berkongres dan menjampaikan salam jang hangat dan dalam kepada Comite Central dan semua pengundjung Kongres ke-XX PKUS.

Adalah satu kehormatan jang besar bagi delegasi PKI untuk mendjadi tamu Kongres PKUS jang besar ini, Partai jang sudah memimpin Revolusi Sosialis Oktober Besar, pembuka zaman baru dalam sedjarah umatmanusia, jang sudah memimpin dan memenangkan perdjuangan melawan perbudakan fasis Djerman dan militeris Djepang, dan jang sedang memimpin Rakjat Sovjet dalam membangun masjarakat Komunis.

Dilihat dari djaraknja Indonesia adalah djauh dari Uni Sovjet, sedangkan adat-istiadat dari Rakjat kedua negeri ini adalah berlainan. Tetapi tudjuan dan perdjuangan jang sama untuk kebebasan umatmanusia telah mendekatkan Rakjat pekerdja Indonesia dengan Rakjat Uni Sovjet. Tudjuan dan perdjuangan ini pula telah membikin Rakjat pekerdja semua negeri saling mengerti dan saling membantu.

Adanja pengertian inilah jang menjebabkan Rakjat pekerdja Indonesia menjambut dengan hangat putusan Comite Central PKI untuk mengirimkan delegasi kekongres jang bersedjarah ini. Beribu-ribu surat dari kaum buruh, kaum tani, inteligensia dan pemuda Indonesia telah diterima oleh Comite Central PKI jang berisi harapan supaja delegasi PKI menjampaikan utjapan selamat mereka kepada Kongres ke-XX PKUS dan kepada Rakjat Sovjet. Ini adalah gedjala jang penting, jang menundjukkan bertambahnja pengertian Rakjat pekerdja Indonesia terhadap tudjuan dan perdjuangan Partai Komunis dan Rakjat Uni Sovjet. Dengan mempeladjari laporan Comite Central PKUS kepada Kongres ke-XX dan dengan

mempeladjari Petundjuk Kongres ke-XX PKUS tentang Rentjana Lima Tahun ke-VI untuk Perkembangan Ekonomi Nasional URSS tahun 1956-1960, maka pengertian Rakjat pekerdja Indonesia terhadap tudjuan dan perdjuangan Partai Komunis dan Rakjat Uni Sovjet akan banjak bertambah. Rentjana Lima Tahun ke-VI dan pelaksanaannja nanti pasti akan membangunkan perasaan kagum jang luarbiasa terhadap pekerdjaan pembangunan Rakjat Sovjet. Rentjana Lima Tahun ke-VI akan membikin Rakjat Indonesia lebih jakin lagi tentang keunggulan sistim sosialis daripada sistim kapitalis, tentang kesungguhan dan kedjudjuran perdjuangan Rakjat Sovjet untuk perdamaian dunia. Pelaksanaan Rentjana Lima Tahun ke-VI ini akan lebih mengeratkan kerdjasama setjara persaudaraan antara negeri² dari kubu sosialis, akan meningkatkan kekuatan dan kekuasaan kubu sosialis dan akan membikin perkembangan kekuatan tjintadamai diseluruh dunia berdiri diatas basis jang lebih kuat.

Kawan², Indonesia letaknja djauh terpentjil dari negara² sosialis dan demokrasi Rakjat, dan Indonesia masih berada dalam kepungan jang rapat dari kekuatan imperialis dunia. Dalam keadaan seperti itu Rakjat Indonesia berusaha terus-menerus untuk mematahkan rantai² jang mengepung dirinja. Segera sesudah perang dunia kedua, jaitu menggunakan keadaan jang baik di Asia jang ditjiptakan oleh kemadjuan jang tjepat dari Tentara Uni Sovjet dan Tentara Pembebasan Rakjat Tiongkok dalam mengusir tentara kaum imperialis Djepang dari daratan Asia, dalam bulan Agustus 1945 Rakjat Indonesia mengangkat sendjata, mengambil kemerdekaan didalam tangannja dengan mendirikan sebuah Republik. Republik Indonesia jang masih sangat muda ini harus membela diri terhadap serangan² tentara imperialis Djepang, Belanda dan Inggeris jang mendapat bantuan penuh dari imperialis Amerika. Adalah peristiwa jang takkan terlupakan bagi Rakjat Indonesia, bahwa atas inisiatif wakil Sovjet dalam PBB, masalah Indonesia untuk pertama kalinja dibitjarakan dalam Dewan Keamanan PBB dalam bulan Djanuari 1946. Dengan ini politik Sovjet jang membantu perdjuangan kemerdekaan nasional mendjadi sangat dikenal oleh Rakjat negeri kami. Politik Sovjet ini diteruskan setjara konsekwen sampai sekarang; Rakjat Sovjet jang besar memihak Rakjat kami

dalam perdjuangan memasukkan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia.

Sekarang kemerdekaan Indonesia jang belum penuh itu masih terus-menerus mendapat gangguan dan antjaman dari kaum imperialis Belanda dan kaum imperialis lainnja. Untuk mempertahankan dan menjempurnakan kemerdekaan nasional jang diperolehnja dengan mengorbankan putera-puteranja jang terbaik, dan untuk mengambil bagian dalam mengurangi ketegangan internasional, Rakjat Indonesia tidak henti-hentinja mentjari djalan. Dalam bulan April 1955 dilangsungkanlah Konferensi negara² Asia dan Afrika di Bandung, dimana Indonesia adalah salahsatu dari pengambil inisiatif dan jang mendjadi tuanrumah Konferensi. Sambutan jang hangat dari Rakjat² tjintadamai diseluruh dunia, terutama sambutan jang hangat dan djudjur dari Rakjat dan Pemerintah URSS, menambah kejakinan Rakjat Indonesia bahwa perdjuangan untuk kemerdekaan dan perdamaian adalah perdjuangan jang besar, jang tak mengenal batas negeri atau benua dan jang tak terkalahkan.

Kemerdekaan jang belum penuh serta gangguan dan antjaman jang terus-menerus dari fihak kaum kolonialis dan kaum imperialis menjebabkan Rakjat Indonesia belum dapat membangun ekonomi negerinja serta mengembangkan kebudajaan nasionalnja. Kekuasaan ekonomi kaum imperialis asing jang masih besar atas ekonomi Indonesia menjebabkan Rakjat Indonesia belum dapat menggunakan kekajaan negerinja jang besar untuk kepentingannja sendiri. Rakjat pekerdja Indonesia, terutama kaum buruh dan kaum tani, walaupun mereka bekerdja keras dan radjin, masih tetap hidup menderita di-tengah² kekajaan negerinja jang me-limpah² dan di-tengah² alam negerinja jang indah-permai.

Dibawah pimpinan jang ulet dari PKI, Rakjat pekerdja Indonesia sekarang berdjuang dengan tidak henti²nja untuk perbaikan nasib melawan penghisapan jang luarbiasa dari kaum kapitalis dan kaum tuantanah. Dalam perdjuangannja untuk kepentingan kaum pekerdja dan untuk memperkokoh persatuan nasional, PKI jang disinari oleh teori Marxisme-Leninisme jang djaja menemukan kemadjuan²nja.

Untuk perbaikan nasib dan untuk haridepannja jang lebih baik

Rakjat Indonesia membutuhkan kemerdekaan, demokrasi dan perdamaian. Keinginan jang sangat akan semuanja ini djuga dinjatakan oleh Rakjat kami dalam pemilihan umum pada achir tahun jang lalu; mereka menjambut dengan hangat tiap² usaha jang ditudjukan untuk memadjukan perdjuangan kemerdekaan, demokrasi dan perdamaian. Tidak bisa diragukan lagi, bahwa Rakjat Indonesia akan menjambut dengan antusiasme jang besar Rentjana Lima Tahun ke-VI sebagai sumbangan baru dari Rakjat Uni Sovjet guna kepentingan perdamaian, demokrasi dan Sosialisme.

Kaum Komunis dan Rakjat pekerdja Indonesia jakin, bahwa Rakjat Uni Sovjet jang heroik dan mempunjai pengalaman revolusioner jang kaja, dibawah pimpinan PKUS jang djaja dengan Comite Centralnja jang Leninis, pasti akan mentjapai sukses² dalam melaksanakan Rentjana Lima Tahun jang ke-VI, dalam membangun masjarakat Komunis. Sukses Rakjat Sovjet adalah sukses bagi semua orang jang menginginkan keamanan dan perdamaian didunia.

KONGRES KE-XX PKUS

Dalam kesempatan ini saja hanja hendak mengemukakan beberapa soal jang berhubungan dengan kongres ke-XX PKUS.

Kongres ke-XX PKUS ini mendapat perhatian jang luarbiasa besarnja dari semua golongan diseluruh dunia. Belum pernah kongres PKUS mendapat begitu besar perhatian seperti kongres ke-XX ini. Sampai hari ini, dan saja kira masih akan memakan beberapa waktu lagi, orang tidak habis²nja membitjarakan kongres PKUS. Karena itu apa jang mendjadi putusan kongres ke-XX PKUS mendjadi dikenal orang setjara luas, mendjadi bahan pembitjaraan setjara luas sehingga pengaruhnja djuga mendjadi sangat besar.

Kongres ke-XX PKUS telah menjimpulkan pengalaman² baru tentang hubungan internasional dan pembangunan dalamnegeri. Ia telah mengambil keputusan² jang penting tentang pelaksanaan jang konsekwen dari politik Leninis, jaitu bahwa negeri² jang berlainan sistim sosialnja dapat hidup berdampingan setjara damai, tentang pengembangan sistim demokrasi Sovjet, tentang ketaatan jang konsekwen pada prinsip pimpinan kolektif Partai, tentang kritik atas kekurangan² dalam Partai, tentang penetapan Rentjana Lima Tahun jang ke-VI jang bertudjuan mengembangkan ekonomi nasional dan lain².

Dalam kesempatan ini saja ingin mengemukakan beberapa soal jang berhubungan dengan soal kehantjuran sistim kolonial imperialis, tentang kemungkinan mentjegah perang dizaman sekarang, tentang bentuk² peralihan ke Sosialisme diberbagai negeri dan tentang kultus individu. Semuanja adalah soal² jang paling mendapat perhatian dinegeri kita dalam hubungan dengan laporan Comite Central PKUS kepada kongres ke-XX jang diutjapkan oleh Kawan Chrusjtjov.

Tentang Kehantjuran Sistim Kolonial Imperialis

Untuk mengerti soal ini penting kita perhatikan apa jang dikatakan oleh Kawan Chrusjtjov dalam permulaan laporannja mengenai „Kedudukan Internasional Uni Sovjet". Disitu a.l. dikatakannja: „Muntjulnja Sosialisme dari dalam batas² satu negeri dan perubahannja mendjadi suatu sistim dunia merupakan tjiri utama dari zaman kita. Kapitalisme telah terbukti tak berdaja membendung proses jang mempunjai arti bersedjarah sedunia ini" (1). Pengertian tentang kenjataan ini sangat membantu kita dalam memahamkan kedjadian² penting dizaman kita sekarang. Djadi, Sosialisme tidak lagi terbatas pada satu negeri, tetapi sudah meluas kebanjak negeri didunia.

Kita sama² mengetahui, bahwa Revolusi Oktober tahun 1917 telah memberikan pukulan jang sangat keras pada sistim kolonialisme. Dibawah pengaruh Revolusi Oktober Besar tahun 1917 perdjuangan pembebasan nasional dari bangsa² jang terdjadjah berkembang dengan istimewa kuatnja. Perdjuangan bangsa² terdjadjah ini telah membawa krisis jang mendalam pada seluruh sistim kolonial imperialisme. Dengan muntjulnja Sosialisme mendjadi sistim dunia, jaitu tjiri utama dari zaman kita sekarang, maka seluruh sistim kolonial imperialis mengalami krisis jang lebih dalam lagi.

Faktor kekalahan Djerman fasis dan Djepang imperialis dan faktor kemenangan revolusi Tiongkok jang djaja memberikan pukulan jang lebih menggojahkan lagi pada sistim kolonial imperialis. Faktor² ini menundjukkan kekalahan jang sangat berat bagi imperialisme.

Negeri² seperti Indonesia, India, Birma, Mesir, Siria, Libanon, dan beberapa negeri bekas djadjahan lainnja telah mentjapai kemerdekaan politik. Ini artinja, lebih dari 1.200 djuta Rakjat, atau hampir separoh dari penduduk dunia telah dibebaskan dari perbudakan kolonial dan setengah-kolonial selama 10 tahun jang lalu. Bajangkanlah betapa tjepatnja dan betapa besar sukses jang ditjapai perdjuangan kemerdekaan melawan kolonialisme di-tahun² belakangan ini. Kita jakin, bahwa kemadjuan jang telah ditjapai oleh bekas negeri² djadjahan dan setengah-djadjahan jang disebut diatas djuga akan ditjapai oleh sebagian besar negeri dari benua Afrika,

beberapa negeri Asia, Amerika Tengah dan Selatan jang sekarang masih berada dalam keadaan djadjahan atau setengah-djadjahan, negeri² jang sampai sekarang masih terus mendjadi embel² negeri² imperialis, jang berkewadjiban menjediakan bahan² mentah bagi negeri² imperialis.

Muntjulnja Sosialisme sebagai sistim dunia adalah sangat membantu kedudukan negeri² jang baru merdeka, walaupun negeri² itu tidak termasuk kedalam sistim dunia sosialis. Adanja dunia sosialis jang berindustri, jang menguasai ilmu dan teknik jang madju dan tinggi menjebabkan negeri² jang baru merdeka tidak perlu meminta², tidak perlu me-ngemis² perlengkapan jang modern untuk pembangunan ekonomi nasional kepada negeri² bekas penindas mereka. Mereka dapat memperolehnja dari negeri² sosialis, bebas dari sjarat politik atau militer apapun djuga.

Tepat apa jang dikatakan dalam laporan CC PKUS kepada kongres ke-XX jang berbunji: „Kenjataan sadja bahwa Uni Sovjet dan negeri² lainnja dari kubu sosialis itu ada, kesediaan mereka membantu negeri-negeri jang belum madju untuk memperkembangkan industri mereka atas sjarat² persamaan dan saling menguntungkan sudahlah merupakan perintang besar bagi politik kolonial. Kaum imperialis sudah tidak bisa lagi memandang negeri² jang belum madju se-mata² sebagai sumber² potensiil bagi pemerasan keuntungan² se-besar²nja. Mereka terpaksa memberikan konsesi² kepada negeri² itu (2).

Lihatlah, betapa besar artinja sistim dunia sosialis sekarang bagi Indonesia dan negeri² lain jang baru merdeka. Mau tidak mau, dikehendaki atau tidak dikehendaki, adanja sistim dunia sosialis sudah dan terus akan membantu kedudukan Indonesia dan semua negeri jang baru merdeka dalam menghadapi penipuan² dan intimidasi² negeri² imperialis.

Oleh karena itu adalah kebodohan jang sangat djika dalam kedudukan seperti Indonesia sekarang ada orang jang mau mengadakan hubungan politik dan ekonomi hanja dengan sebelah fihak, dengan fihak Barat sadja. Ini berarti tidak pandai menggunakan pertentangan² jang ada didunia sekarang untuk mengembangkan diri sendiri, untuk memperkuat kemerdekaan dan untuk mengembangkan ekonomi nasional. Dalam kedudukan Indonesia seperti

sekarang, PKI menjerukan kepada pemerintah Indonesia dan kepada siapa sadja jang pantas mendengar seruan ini supaja mengusahakan agar Indonesia, disamping mempunjai hubungan diplomatik dan kebudajaan jang normal dengan semua negeri, djuga mempunjai hubungan ekonomi tanpa mem-beda2kan sistim politik dan sosial, dan tanpa sjarat politik atau militer apapun. Pendeknja, gunakan pertentangan2 jang ada untuk mengembangkan diri sendiri, untuk mengembangkan Indonesia.

Di Indonesia masih ada orang2 jang takut berhubungan dengan negeri2 sosialis. Sedang Inggeris, Belanda, Perantjis berdagang dengan negeri2 sosialis, djuga Amerika berdagang melalui Hongkong dengan RRT, di Indonesia masih ada orang2 jang takut.

Kemungkinan Mentjegah Perang Dizaman Sekarang

Kongres ke-XX PKUS telah mendjawab pertanjaan jang penting jang diadjukan oleh ber-djuta2 Rakjat diseluruh dunia, jaitu pertanjaan: apakah perang baru benar2 tak dapat dielakkan, apakah umatmanusia jang telah mengalami dua perang dunia jang memusnahkan itu harus djuga mendjalani perang jang ketiga?

Kaum Komunis memang pernah berpendirian bahwa peperangan tak dapat dielakkan selama ada imperialisme. Pendirian ini tepat pada waktu imperialisme merupakan sistim dunia jang meliputi segala dan pada waktu kekuatan sosial dan politik jang tidak menghendaki perang masih dalam keadaan lemah, buruk organisasinja, dan karena itu tak mampu memaksa kaum imperialis untuk meniadakan perang.

Sekarang keadaan sudah lain. Didunia sudah ada kubu Sosialisme jang telah mendjadi kekuatan jang besar. Dan saudara2 tahu, bahwa negeri sosialis Uni Sovjet hanja membutuhkan waktu 30 tahun untuk mengembangkan industri, jang oleh negeri2 kapitalis ditempuh selama 300 tahun! Didalam Sosialisme kekuatan2 perdamaian tidak hanja mendapatkan alat2 moril sadja tetapi djuga mendapatkan alat2 materiil untuk mentjegah agresi. Tambahan pula sekarang sudah ada segolongan besar negeri2 diluar kubu sosialis dengan penduduk jang berdjumlah ratusan djuta jang ikut aktif untuk mentjegah peperangan. Gerakan buruh di-negeri2 kapitalis dewasa ini telah mendjadi kekuatan jang mahabesar. Gerakan2 pembela perdamaian telah timbul dan berkembang mendjadi faktor jang perkasa.

Dengan djelas digambarkan dalam laporan Comite Central kepada kongres ke-XX bahwa singkatnja kekuatan perdamaian adalah sbb.: Uni Sovjet jang dengan setia mendjalankan politik Leninis tentang ko-existensi setjara damai diantara berbagai negeri tak pandang sistim sosial mereka, ditambah dengan negeri2 kubu sosialis di Asia dan di Eropa, ditambah lagi dengan negeri2 Asia-Afrika dan benua2 lainnja jang berkepentingan akan perdamaian. dan diperkuat lagi oleh gerakan2 buruh dan gerakan2 pembela perdamaian di-negeri2 kapitalis jang sudah mendjadi kekuatan jang mahabesar dan perkasa. Lihatlah betapa terpentjilnja sekarang kedudukan kaum penghasut perang.

Tetapi apakah dengan ini berarti peperangan dengan sendirinja tidak akan meletus, apakah dengan ini berarti bahwa dasar untuk peperangan sudah tidak ada lagi, dan oleh karena itu kita bisa mengendorkan kewaspadaan kita terhadap bahaja perang? Samasekali bukan ini artinja. Adjaran Leninis jang mengatakan bahwa selama imperialisme masih ada, dasar ekonomi jang melahirkan peperangan tetap ada pula, masih tetap berlaku. Oleh karena itu kewaspadaan harus tetap dipertinggi. Kita harus dengan waspada mengikuti intrik2 dari kalangan2 jang tak menghendaki keredaan ketegangan internasional, harus tepat pada waktunja membongkar aktivitet2 subversif musuh2 perdamaian dan keamanan bangsa2, harus lebih dipergiat pengorganisasian gerakan2 buruh dan gerakan2 perdamaian dunia.

Tentang Bentuk2 Peralihan Ke Sosialisme Diberbagai Negeri

Tentang bentuk2 peralihan ke Sosialisme diberbagai negeri ingin saja bitjarakan dalam hubungan jang kongkrit dengan keadaan di Indonesia. Sudah banjak diadjukan orang pertanjaan kepada PKI: apakah mungkin di Indonesia peralihan ke Sosialisme ditjapai dengan melewati parlemen? Apakah dengan adanja rumusan tentang kemungkinan peralihan ke Sosialisme lewat parlemen seperti jang dimuat dalam laporan Comite Central PKUS kepada kongres

ke-XX berarti, bahwa PKI akan menindjau pendiriannja mengenai perdjuangan parlementer ? Tiap² orang Komunis harus dapat mendjawab pertanjaan² ini.

Per-tama² harus disedari bahwa adanja analisa tentang bentuk² peralihan ke Sosialisme diberbagai negeri dalam laporan CC PKUS berarti membuka perspektif² baru bagi Partai² Komunis dan Partai² Buruh jang belum berkuasa. Dinjatakannja bahwa ada kemungkinan peralihan ke Sosialisme lewat parlemen telah membukakan kemungkinan² baru bagi Partai² tsb. untuk menggalang kerdjasama jang lebih baik dengan partai² demokratis lainnja.

Dalam Program PKI jang disahkan oleh kongres nasional ke-V PKI, bulan Maret tahun 1954, a.l. dikatakan bahwa „PKI telah mengambil bagian dan terus akan mengambil bagian jang paling aktif dalam perdjuangan parlementer. PKI, sedar sepenuhnja akan tanggungdjawab politiknja, mendjalankan pekerdjaan parlementer dengan penuh ke-sungguh²an". Ini menundjukkan bahwa PKI tidak memandang parlemen hanja sekedar sebagai forum propaganda sadja. Dalam program PKI tsb. djuga dikatakan „bahwa perdjuangan parlementer sadja tidaklah tjukup untuk mentjapai tudjuan membentuk suatu pemerintah Demokrasi Rakjat". Ini adalah satu kebenaran, karena pekerdjaan PKI bukan pekerdjaan parlementer *sadja*, tetapi djuga dan terutama pekerdjaan² dikalangan kaum buruh, kaum tani, inteligensia dan massa pekerdja serta massa demokratis. PKI tidak mempropagandakan didalam kalangannja sendiri maupun diluar kalangannja bahwa peralihan ke Sosialisme harus dengan pertumpahan darah, harus dibarengi dengan perang dalamnegeri.

Djadi, kalau tergantung kepada PKI, maka bentuk jang sebaik-baiknja, bentuk jang ideal dari peralihan ke Sosialisme, jalah bentuk jang damai, bentuk parlementer. PKI memilih djalan damai, karena kaum Komunis memang bukan pembunuh.

Ketika pemerintah Sukiman melemparkan pandji² demokrasi parlementer dengan Razzia Agustusnja, bukankah PKI dan golongan² demokratis lainnja jang memungut pandji² tsb. dan mengibarkannja kembali ? Politik PKI ini disokong oleh Rakjat dan pemerintah Sukiman jang memperkosa demokrasi parlementer terpaksa gulung tikar.

Pengalaman di Guyana, pengalaman di Guatemala, pengalaman di Pakistan Timur dan pengalaman di Indonesia sendiri dengan pemerintah Sukiman, menundjukkan bahwa bukan kaum Komunis, bukan kaum revolusioner, jang tidak mau mentjapai tudjuan politiknja dengan melewati parlemen. Sebaliknja adalah kaum reaksioner, adalah kaum kepalabatu, adalah kaum komprador dan tuantanah jang bersekongkol dengan kaum imperialis, jang ketakutan melihat kemadjuan gerakan Rakjat dan kemadjuan Partai Komunis, jang ketakutan bahwa parlemen dan badan² negara lainnja dapat diberi isi jang benar² demokratis serta disusun sesuai dengan keinginan Rakjat. Kaum Komunis harus waspada dan harus mempersiapkan diri dalam segala hal dan pada tiap² saat agar kaum reaksioner tidak bisa memperkosa parlemen dan bertindak sewenang² terhadap Rakjat dan terhadap Partai Komunis.

Sekali lagi, kalau tergantung pada PKI, PKI akan berdjuang dengan tenang untuk mendapat majoritet parlementer jang stabil jang didukung oleh gerakan revolusioner dari proletariat dan dari gerakan seluruh Rakjat pekerdja, jang didukung oleh Partai Komunis dan partai² demokratis lainnja, agar parlemen dapat mendjamin perubahan² sosial jang fundamentil bagi klas buruh dan bagi golongan² Rakjat pekerdja lainnja.

Selandjutnja saja hendak menekankan, bahwa apapun djuga bentuk peralihan ke Sosialisme, namun faktor jang menentukan dan mutlak jalah pimpinan politik dari klas buruh jang dipimpin oleh pelopernja. Tanpa ini tak akan ada peralihan ke Sosialisme. Peralihan ke Sosialisme tidak mungkin kalau pimpinan politik ada pada kaum burdjuis atau pada kaum komprador dan tuantanah.

Tentang Kultus Individu

Masalah menentang kultus individu atau pemudjaan perseorangan mengambil tempat jang penting dalam kongres ke-XX PKUS. Kongres dengan sangat tadjam membahas soal ini, karena ia merupakan gedjala jang telah menimbulkan banjak kesalahan dalam pekerdjaan dan membawa akibat² jang buruk dalam kehidupan Uni Sovjet selama suatu masa jang pandjang. PKUS telah

mengadakan selfkritik jang berani mengenai soal ini. Kita menjampaikan salut kepada PKUS !

Sebetulnja persoalan besar ini tidak ruwet bagi Rakjat, djika pers burdjuis tidak menambah bumbu² pada persoalan ini. Soalnja jalah, Kawan Stalin sudah membikin kesalahan besar karena tidak menghidupkan pimpinan kolektif dalam Partai selama masa jang pandjang. Kesalahan Kawan Stalin ini telah dipergunakan setjara pandai oleh bandit Beria untuk menimbulkan kekatjauan² dalam PKUS dan didalam negara Sovjet untuk mengadakan pembunuhan² terhadap kader² Partai dan terhadap kader² negara, dan disamping itu merusak hubungan antara Uni Sovjet dan negeri² demokrasi Rakjat, dengan Republik Federasi Jugoslavia dan dengan kaum Komunis Jugoslavia. Sangat menjolok bahwa pers reaksi sengadja menghindari menjebut kedjahatan² jang telah dilakukan oleh Beria dengan mensalahgunakan nama Partai dan nama Stalin.

Dari selfkritik jang dilakukan oleh PKUS mengenai soal pemudjaan perseorangan, semua Partai Komunis dan Partai Buruh diseluruh dunia dapat menarik peladjaran jang penting. Tiap² Partai Komunis mendasarkan diri pada sentralisme-demokratis, mendasarkan diri pada sistim pemaduan pimpinan kolektif dengan tanggungdjawab perseorangan, mendasarkan diri pada ketjerdasan massa Rakjat. Sentralisme adalah penting supaja Partai dan gerakan Rakjat terpimpin dengan baik, tetapi sentralisme tanpa demokrasi bisa berarti kese-wenang²an beberapa orang atau seseorang. Demokrasi adalah penting supaja anggota² Partai dan Rakjat aktif memperbintjangkan persoalannja sendiri, tetapi demokrasi tanpa sentralisme, tanpa pimpinan jang memusat, bisa menimbulkan liberalisme, bisa menimbulkan kekatjauan didalam Partai dan didalam gerakan Rakjat. Oleh karena itu meninggalkan salahsatu berarti bentjana. Meninggalkan demokrasi berarti bekerdja tidak mendasarkan diri pada ketjerdasan massa Rakjat, sedangkan meninggalkan sentralisme berarti membiarkan massa Rakjat tidak terpimpin dalam perdjuangannja.

Bentuk pimpinan jang tertinggi dalam Partai Komunis jalah pimpinan kolektif. Meninggalkan pimpinan kolektif berarti meninggalkan massa, berarti meninggalkan kehidupan praktis, dan akibatnja menimbulkan fikiran² dan perbuatan² jang subjektif. Meninggalkan pimpinan kolektif berarti melanggar sentralisme-demokratis.

Stalin sebagai tokoh pertama dari Partai Komunis Uni Sovjet dan dari negara Uni Sovjet telah membikin kesalahan besar karena dalam memimpin Partai dan memimpin negara ia telah meninggalkan pimpinan kolektif, ia telah tidak bersandar pada sentralisme-demokratis, kesalahan Stalin ini berakibat sangat besar, tidak hanja karena disebabkan kedudukannja jang sangat penting, tetapi djuga karena sudah digunakan setjara pandai oleh Beria.

Saja berpendapat, bahwa memang sudah pada tempatnja djikalau Stalin disalahkan oleh kongres ke-XX PKUS. Bukanlah sesuatu jang luarbiasa djika sesuatu jang salah disalahkan. Menjalahkan jang salah adalah sangat perlu, sekalipun orangnja sudah meninggal, agar kesalahan itu tidak diulangi lagi.

Disamping itu saja djuga berpendapat adalah benar djika jang benar dibenarkan. Kelirulah djika jang benar tidak dibenarkan, karena mungkin jang benar itu orang anggap salah. Oleh karena itu saja sependapat dengan kongres PKUS jang tetap mengakui djasa² Stalin, mengakui Stalin sebagai Marxis jang besar dan menundjukkan perbuatan² Stalin jang benar dan menguntungkan Rakjat Sovjet dan proletariat sedunia. Saja berpendapat bahwa pers burdjuis sangat aktif mengemukakan hanja kesalahan Kawan Stalin, dan tidak hanja itu, mereka djuga menambah djumlah dan kwalitet kesalahan² Stalin sesukanja sendiri. Oleh karena itu saja berpendapat bahwa sudah pada tempatnja djikalau PKUS membikin keterangan jang djelas tentang kebaikan² jang sudah dibikin oleh Stalin selama hidupnja disamping menundjukkan kesalahannja. Dalam kongres ke-XX PKUS, tentang kebaikan² Stalin tidak banjak dikemukakan, karena memang kongres itu bukan ditudjukan untuk mengemukakan kebaikan² Stalin, tetapi ditudjukan untuk menundjukkan kesalahan² Stalin supaja kesalahan² tidak diulangi lagi oleh kaum Komunis. Tetapi sesudah kongres ke-XX selesai dan oleh pers burdjuis banjak persoalan disekitar Stalin jang diputarbalikkan, jang sengadja ditambah atau dikurangi, maka keterangan resmi dari PKUS mengenai kebaikan dan kesalahan Stalin sangat diperlukan. Djika hal ini *tidak* dilakukan oleh PKUS, maka adalah kewadjiban tiap² Partai Komunis, djuga kewadjiban PKI,

untuk menerangkannja dalam batas2 kemungkinan jang dipunjai oleh Partai2 tsb.

Saja setudju sepenuhnja dengan pendirian Partai Komunis Tiongkok jang menganggap „bahwa tulisan2 Stalin akan masih, seperti selama ini, dipeladjari setjara serius. Semua jang bermanfaat didalam tulisan2nja, teristimewa banjak dari tulisannja dalam mempertahankan Leninisme dan dalam menjimpulkan setjara tepat pengalaman Sovjet dilapangan pembangunan, haruslah kita pandang sebagai warisan sedjarah jang penting. Berbuat lain daripada ini akan merupakan suatu kesalahan." (3). Demikian Partai Komunis Tiongkok.

Sudah tentu tulisan2 Stalin tidak kita peladjari setjara dogmatis tetapi setjara Marxis. Tulisan2 Stalin, sebagaimana djuga tulisan2 lain harus kita peladjari dengan kritis.

Tulisan ini adalah katasambutan Kawan D.N. Aidit kepada Kongres ke-III Partai Buruh Korea, pada tgl. 25 April 1956, di Pjongjang. Atas nama kaum Komunis dan semua pemilih Palu Arit Indonesia Kawan Aidit menjampaikan salut kepada PBK beserta Rakjat Korea jang heroik jang telah berhasil memukul mundur agresi militer Amerika dan telah berhasil pula memenuhi Plan Tiga Tahun Pemulihan sesudah perang, serta mentjiptakan sjarat2 bagi pembangunan ekonomi nasional setjara besar2an dan persatuan seluruh negeri. Kundjungan Delegasi PKI jang dipimpin oleh Kawan D.N. Aidit tersebut sebagai delegasi Indonesia jang pertama telah meletakkan dasar bagi terkonsolidasinja persahabatan antara PKI dan PBK serta antara Rakjat Indonesia dan Rakjat Republik Rakjat Demokrasi Korea.

SAMBUTAN TERHADAP KONGRES KE-III PARTAI BURUH KOREA

Per-tama² izinkanlah saja atasnama Comite Central Partai Komunis Indonesia dan atasnama lebih dari satu djuta anggota Partai Komunis Indonesia menjampaikan salam jang hangat dan mesra kepada semua delegasi Kongres Ke-III Partai Buruh Korea, dan lewat kawan² kepada seluruh Rakjat Korea jang gagahberani dan perwira. Djuga dari sini kami sampaikan salut kami jang setinggi²nja kepada putera² Korea jang terbaik dan kepada anggota² Tentara Sukarela Rakjat Tiongkok jang gagah-perkasa jang gugur selama Perang Kemerdekaan Tanahair dalam membela kemerdekaan nasional Korea dan membela perdamaian.

Delegasi Partai Komunis Indonesia merasa mendapat kehormatan jang besar dapat hadir dalam Kongres Partai Buruh Korea, organisator dan inspirator semua kemenangan Rakjat Korea. Partai Buruh Korea adalah Partai sekawan kami jang sedjati dalam memimpin perlawanan terhadap musuh kita bersama, kaum imperialis Amerika jang agresif.

Dilihat dalam peta bumi memang ada djarak jang djauh jang memisahkan Indonesia dari Korea. Tetapi semangat internasionalisme proletar jang mendjadi semangat Partai Komunis Indonesia dan Partai Buruh Korea, dan jang mendjiwai Rakjat jang dibawah pimpinannja, telah sangat mendekatkan Rakjat Indonesia dengan Rakjat Korea dalam perdjuangan bersama untuk tjita² jang sama.

Dua hari sesudah bangsa Korea dibebaskan oleh Tentara Uni Sovjet jang gagah-perkasa, Rakjat Indonesia menjatakan kemerdekaan nasionalnja, jaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai akibatnja terdjadilah peperangan kemerdekaan melawan tentara imperialis Djepang, tentara imperialis Belanda dan Inggeris, jang semuanja ini mendapat bantuan penuh dari imperialisme Amerika. Dengan demikian terentanglah sebuah benang merah jang menghubungkan perdjuangan Rakjat Indonesia dengan Rakjat Korea.

Tidak ada djarak jang djauh, tidak ada lautan dan gunung jang dapat memisahkan perdjuangan kita jang sutji.

Rakjat Indonesia mengikuti perdjuangan Rakjat Korea melawan agresi bersendjata kaum imperialis Amerika, sebagaimana mereka mengikuti persoalannja sendiri. Rakjat Indonesia jang tjinta kemerdekaan dan tjinta perdamaian menjambut dengan hangat tiap² sukses jang ditjapai oleh Tentara Rakjat Korea dan Tentara Sukarela Rakjat Tiongkok, dan mereka mengutuk tiap² kebiadaban jang diperbuat oleh imperialisme Amerika. Sukses kawan² adalah sukses kami, dan penderitaan kawan² adalah penderitaan kami. Tidak terhitung banjaknja resolusi² jang dibikin oleh kongres², konferensi² dan rapat² umum dari partai², organisasi² buruh, tani, pemuda, wanita Indonesia jang menuntut supaja kaum imperialis Amerika menghentikan agresinja di Korea. Ketika pada tanggal 27 Djuli 1953, sebagai hasil tuntutan Rakjat tjintadamai sedunia ditandatangani Persetudjuan Gentjatan Sendjata, maka para pentjinta perdamaian di Indonesia menjambutnja dengan mengadakan rapat² umum dibawah pimpinan Komite Perdamaian Dunia untuk Indonesia.

Kami menjetudjui sepenuhnja apa jang dinjatakan dalam laporan Comite Central Partai Buruh Korea jang diutjakan oleh Kawan Kim Il Sung dalam Kongres ini, jaitu bahwa kemenangan Rakjat Korea dalam Perang Kemerdekaan Tanahair melawan kaum agresor bersendjata imperialis Amerika, merupakan satu diantara kemenangan besar bagi Rakjat² Asia dalam menentang kolonialisme, dan sangat mendorong Rakjat² negeri² tergantung dalam perdjuangan untuk kebebasan dan kemerdekaan. Kami sependapat, bahwa perang Korea telah memberi inspirasi kepada Rakjat² jang bangun untuk kebebasan dan kemerdekaan nasional melawan kolonialisme.

Dengan bukti jang njata perang Korea telah menerangkan kepada dunia, bahwa musuh kita bersama, jaitu kaum imperialis Amerika, bukan tidak ada batas kekuatannja. Kekuatan mereka terang ada batasnja ! Sebaliknja, kekuatan Rakjat, sebagaimana sudah dibuktikan oleh Rakjat Korea, tidak mengenal batas ! Bermatjam² bom, termasuk bom gas dan bom kuman sudah mereka tuangkan diatas bumi Korea untuk memusnahkan Rakjat Korea. Tetapi Rakjat Korea tidak musnah karenanja, malahan sekarang,

dibawah pimpinan Partai Buruh Korea, mereka sedang membangun semua lapangan dari negerinja jang kaja dan indah. Diatas runtuhan akibat peperangan, Rakjat Korea sudah mendirikan kota² dan pabrik² jang serba baru. (1)

Delegasi Partai Komunis Indonesia, setelah mempeladjari laporan Comite Central Partai Buruh Korea, mempunjai kejakinan bahwa Rakjat Korea sedang ada dalam perdjalanan menudju hari gemilangnja. Kami jakin, bahwa Rakjat Korea dibawah pimpinan Partai Buruh Korea jang sudah terudji dan dengan bantuan jang tidak mementingkan diri-sendiri dari Uni Sovjet, Republik Rakjat Tiongkok, dan negeri² demokrasi Rakjat lainnja, pasti akan mendapat sukses dalam melaksanakan Plan Lima Tahunnja jang pertama, sebagai dasar dari pembangunan Sosialisme dibagian Utara Republik.

Ketjintaan kami jang tidak terhingga akan kemerdekaan dan persatuan seluruh wilajah negeri kami, membikin kami tidak bisa berbuat lain ketjuali menjetudjui dan menjokong perdjuangan Rakjat Korea untuk mempersatukan bagian Utara dan bagian Selatan. Sebagaimana kami jakin, bahwa Irian Barat, wilajah negeri kami jang sah, jang sekarang masih diduduki oleh kolonialisme Belanda pada satu waktu akan masuk wilajah kekuasaan Republik Indonesia, demikian djuga kejakinan kami bahwa akan datang masanja dimana tidak ada satu kekuatan jang dapat mentjegah bersatunja bagian Utara dan bagian Selatan Korea.

Sukses Rakjat Korea berarti sukses bagi kubu Sosialisme dan sukses bagi peluasan daerah perdamaian di Asia.

Pada achir pidato sambutan kami ini, izinkanlah saja menjampaikan sedikit tentang keadaan politik di Indonesia. Berkat perdjuangan heroik Rakjat Indonesia dan berkat pengaruh kemadjuan² jang ditjapai oleh kubu Sosialisme dan perdamaian jang dipelopori oleh Uni Sovjet, maka pada achir bulan Maret jang lalu di Indonesia terbentuk suatu pemerintah jang programnja agak madju. Pemerintah ini sampai batas² tertentu mendapat sokongan Partai Komunis Indonesia. Mengenai politik luarnegeri, program pemerintah ini dengan tegas menjatakan akan mendjalankan keputusan Konferensi Asia-Afrika. Kenjataan ini menundjukkan, bahwa Indonesia selandjutnja akan mendjadi salahsatu daerah perdamaian di

Asia jang penting. Partai Komunis Indonesia akan berusaha dengan sekuat tenaga agar djalan jang benar jang sudah ditempuh dalam politik luarnegeri Indonesia ini, tetap akan mendjadi satu²nja djalan jang ditempuh oleh pemerintah dan Rakjat Indonesia.

Semua kenjataan diatas membuktikan bertambah luas dan bertambah kuatnja kubu Sosialisme dan kubu perdamaian. Kami jakin, bahwa dengan disinari oleh keputusan² jang diambil oleh Kongres ke-XX Partai Komunis Uni Sovjet dalam bulan Februari jang lalu, kemenangan² jang baru dan penting akan lebih banjak kita tjapai di-hari² jang akan datang. Kami jakin, bahwa Kongres kawan² jang djuga disinari oleh keputusan² Kongres Partai Komunis Uni Sovjet jang bersedjarah itu akan berachir dengan sukses jang besar.

Bersatu Untuk Menjelesaikan Tuntutan2 Revolusi Agustus 1945 adalah djudul Laporan Umum Kawan D.N. Aidit kepada Sidang Pleno ke-IV CC PKI jang diperluas, jang berlangsung pada achir bulan Djuli 1956.

Uraian ini dengan tandas menganalisa masalah2 penting dan pokok dari revolusi Indonesia dan mengadjukan sembojan *Menjelesaikan Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar2nja* sebagai sembojan strategis untuk menjelesaikan revolusi burdjuis-demokratis di Indonesia. Setelah menjimpulkan masalah tiga kekuatan dan tiga konsep dalam hubungan dengan penjelesaian Revolusi Agustus 1945, laporan menegaskan bahwa menghapuskan imperialisme dan feodalisme adalah konsep Rakjat sedang mereka2 jang tidak anti-imperialisme dan anti-feodalisme adalah anti-Rakjat, anti-Revolusi Agustus 1945.

Berdasarkan laporan umum ini Sidang Pleno ke-IV CC djuga telah mengambil keputusan bersedjarah untuk memimpin perkembangan Partai dengan mengadakan Plan Tiga Tahun Pertama mengenai Pendidikan dan Organisasi. Pelaksanaan Plan ini telah mendjadikan *bekerdja dengan plan* suatu tjarakerdja dalam Partai jang mempertinggi daja memobilisasi Partai.

BERSATULAH UNTUK MENJELESAIKAN TUNTUTAN2 REVOLUSI AGUSTUS 1945

Hampir satu tahun telah berlangsung sedjak Sidang Pleno ke-III Comite Central dalam bulan Agustus 1955 sampai Sidang Pleno ke-IV Comite Central ini. Politbiro Comite Central pernah mempertimbangkan untuk mengadakan sidang pleno Comite Central dalam bulan November 1955, djadi segera sesudah pemilihan umum untuk Parlemen. Tetapi hal ini tidak mungkin berhubung dengan kesibukan Partai kita dalam menghadapi pemilihan untuk Konstituante. Karena sidang pleno Comite Central tidak mungkin diadakan pada waktu itu, padahal Partai kita menghadapi berbagai masalah penting, terutama jang berhubungan dengan penjimpulan keadaan politik dan keadaan Partai sesudah pemilihan Parlemen dan berhubung dengan penetapan tugas2 Partai dalam menghadapi pemilihan Konstituante, maka dilangsungkanlah dalam bulan November 1955 sidang Politbiro jang diperluas dengan anggota2 Comite Central bukan-anggota Politbiro jang bertempattinggal di Djakarta.

Banjak perubahan jang sudah terdjadi sedjak Sidang Pleno ke-III Comite Central dalam situasi internasional maupun dalam situasi dalamnegeri kita.

Dalam situasi internasional kita melihat proses perkembangan jang sangat tjepat dan akan lebih dipertjepat lagi berhubung dengan sukses2 jang ditjapai oleh negeri2 kubu sosialis, dan berhubung dengan perkembangan2 baru dari gerakan kemerdekaan dan gerakan demokrasi, terutama di-negeri2 Asia-Afrika. Kongres ke-XX Partai Komunis Uni Sovjet (PKUS) jang dilangsungkan dalam bulan Februari jl. merupakan pendorong jang penting dalam mempertjepat perkembangan selandjutnja dari gerakan kemerdekaan, gerakan demokrasi dan gerakan perdamaian, serta perkembangan disegala lapangan di-negeri2 kubu sosialis, terutama perkembangan di Uni Sovjet sendiri.

Dalam situasi dalamnegeri kita djuga mengalami perkembangan² jang menggembirakan sesudah pemilihan umum jang bersedjarah untuk Parlemen dan Konstituante. Usaha² kaum reaksioner untuk menghalangi perkembangan ini, a.l. dengan ngotot mempertahankan kabinet Burhanuddin Harahap (BH) jang njata mengadakan tindakan² anti-demokratis dan melanggar azas² politik luarnegeri Indonesia jang anti-kolonialisme dan anti-perang, ditentang dengan keras oleh front Rakjat jang luas dan jang berakibat gulung tikarnja kabinet BH.

Sebagai pengganti kabinet BH jang reaksioner, jang mula²nja ngotot tidak mau turun panggung pada waktunja, maka berdirilah kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2 jang programnja agak madju dan dapat disokong oleh Partai kita. Pada saat² pembentukan kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2 terdjadilah gelombang pasang gerakan Rakjat jang menuntut duduknja orang² Komunis didalam kabinet. Politik kepalabatu dari sebagian pemimpin² Masjumi jang menolak turutnja orang² Komunis dalam kabinet, merupakan penghalang jang terutama bagi pelaksanaan tuntutan Rakjat jang adil ini.

Sudah mendjadi rahasia umum, bahwa Masjumi menerima program jang agak madju dari kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2 bukanlah karena sungguh² setudju pada program tsb., tetapi hanja se-mata² agar dirinja tidak terisolasi, supaja mendapat kedudukan dalam pemerintah dan supaja dimana mungkin menghalangi pelaksanaan bagian² jang madju dari program pemerintah. Dengan demikian terbentuklah satu kabinet jang programnja agak madju tetapi komposisi dan personalianja tidak mentjerminkan kemampuan dan kedjudjuran untuk melaksanakan program tsb.

Berkat desakan Rakjat dan Parlemen, dan berkat berhasilnja perdjuangan menteri² jang madju terhadap menteri² jang reaksioner, kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2 telah membatalkan seluruh persetudjuan KMB setjara sefihak, sedangkan rentjana kabinet BH adalah tanpa pembatalan apa jang dinamakan piagam „penjerahan kedaulatan". Disamping itu, walaupun pembatalan persetudjuan KMB oleh kabinet sekarang belum mempunjai akibat² jang langsung terhadap kedudukan ekonomi dari kaum kapitalis besar Belanda, tetapi ini adalah lebih baik djika dibanding dengan rentjana pembatalan persetudjuan KMB oleh kabinet BH jang didahului

oleh "statement of policy" (pernjataan politik) jang bukan sadja mendjamin keuntungan modal² imperialis tetapi djuga mengundangnja untuk mengadakan penanaman² baru di Indonesia. Peristiwa pembatalan persetudjuan KMB oleh kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2 membuktikan kebenaran politik jang menuntut pembatalan persetudjuan KMB jang selama 7 tahun didjalankan oleh PKI setjara konsekwen dan membuktikan kesetiaan Rakjat terhadap tjita² Revolusi Agustus 1945.

Setia pada programnja, Partai kita jang pada dewasa ini sudah mendjadi Partai Komunis jang besar, mengambil bagian jang penting dalam mendorong madju politik luarnegeri Indonesia, dalam mengeratkan kerdjasama antara Rakjat² Asia-Afrika atas dasar anti-kolonialisme dan untuk perdamaian, dan dalam mendorong perkembangan situasi dalamnegeri kearah jang menguntungkan Rakjat Indonesia.

Selama dalam waktu hampir satu tahun sedjak Sidang Pleno ke-III Comite Central, Partai kita sudah melakukan banjak pekerdjaan dan sudah dapat mengatasi banjak kesukaran, tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini masih sangat banjak pekerdjaan jang harus dilakukan oleh Partai kita dan masih banjak kesukaran² jang harus diatasi. Situasi sekarang mendesak supaja Partai kita lebih giat dan lebih sistimatis melakukan pekerdjaan² jang urgen untuk pelaksanaan tuntutan² politik, ekonomi, dan kulturil dari Rakjat Indonesia serta untuk mendidik anggota² Partai jang banjak itu agar mereka sungguh² memiliki ideologi Marxisme-Leninisme, agar mereka senantiasa mengetahui situasi politik negerinja dengan baik dan agar mereka mendjadi elemen jang aktif, jang mempunjai dajatjipta dan jang berdisiplin didalam organisasi Partai. Hanja dengan bekerdja demikian PKI akan tetap berdiri dibarisan paling depan dalam melaksanakan tuntutan² jang paling mendesak dari massa Rakjat dan dalam melaksanakan tututan² Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja.

I

Situasi Internasional dan Dalamnegeri

Sampai kemanakah Rakjat Indonesia dapat mengembangkan kekuatannja untuk mentjiptakan sjarat² guna melaksanakan tuntutan² ekonomi, politik dan kulturil jang paling mendesak dan untuk melaksanakan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja ? Ini tergantung pada kebangkitan, persatuan dan perdjuangan Rakjat Indonesia sendiri. Hal jang njata jalah, bahwa situasi internasional dan situasi dalamnegeri memberi kemungkinan jang luas bagi Rakjat Indonesia untuk mengembangkan kekuatannja.

Bagaimanakah situasi internasional sekarang ?

Untuk mengerti situasi internasional sekarang, laporan Comite Central PKUS kepada Kongres ke-XX sangat membantu kita. Laporan Comite Central PKUS tsb. telah membeberkan dengan djelas beberapa pokok mengenai perkembangan internasional masakini, telah menerangkan kepada kita djalannja kedjadian² internasional sekarang dan telah menundjukkan perspektif bagi masadepan.

Situasi internasional sekarang sangat dipengaruhi oleh politik Uni Sovjet dan negara² kubu sosialis jang dengan konsekwen mendjalankan politik Leninis tentang hidup berdampingan setjara damai diantara negara² jang sistim sosialnja ber-beda², oleh kebulatan dan kejakinan negara² kubu sosialis dan gerakan Rakjat tjintadamai diseluruh dunia untuk mewudjudkan dalil bahwa perang mungkin ditjegah dalam zaman sekarang dan oleh kebangunan Rakjat negeri² djadjahan, setengah-djadjahan dan Rakjat negeri² jang baru merdeka.

Masalah dunia dan umatmanusia masakini jang terpenting jalah masalah mempertahankan perdamaian dunia. Terutama berkat inisiatif jang sangat banjak dari Uni Sovjet untuk menormalkan hubungan² antara negara², termasuk hubungan antara Uni Sovjet dengan Inggeris, Perantjis dan djuga dengan Amerika Serikat, sekarang tertjipta keredaan tertentu dalam situasi internasional.

Memang benar, bahwa selama masih ada imperialisme dasar

ekonomi untuk timbulnja peperangan masih tetap ada. Hal ini tidak kita bantah. Oleh karena itu, selama masih ada imperialisme, sedikitpun tidak boleh ada kekendoran untuk mempertahankan perdamaian. Kita harus terus mempertinggi kewaspadaan kita, harus aktif mengambil bagian dalam mengawasi dan menggagalkan intrik² kalangan² jang tidak menginginkan adanja keredaan ketegangan internasional, kita harus menentang perluasan angkatan² bersendjata dari negara² besar, kita harus menentang dan mengutuk pertjobaan² sendjata atom. Ketjaman jang tidak tahu malu dari menteri luarnegeri Amerika Serikat Dulles dan wakil presiden Amerika Serikat Nixon baru² ini terhadap politik netral jang dianut oleh kebanjakan negara² Asia-Afrika sebagai sesuatu jang „immoril" (tidak bersusila) dengan djelas menggambarkan politik Amerika Serikat jang tidak menginginkan adanja keredaan ketegangan internasional.

Tetapi sekarang imperialisme sudah tidak lagi merupakan sistim dunia jang meliputi segala-galanja. Sekarang sistim sosialis sudah merupakan sistim dunia jang mempunjai alat² moril dan materiil untuk mentjegah agresi, sedangkan sedjumlah besar negeri² diluar kubu sosialis jang berpenduduk be-ratus² djuta dengan giat bekerdja mentjegah peperangan, demikian djuga gerakan buruh dan gerakan Rakjat untuk perdamaian di-negeri² kapitalis sendiri. Semuanja ini menundjukkan, bahwa sekarang sudah ada sjarat² sosial dan politik untuk mentjegah kaum imperialis mengobarkan peperangan. Kenjataan² ini memungkinkan ditjegahnja perang dalam zaman sekarang.

Dalam keadaan sekarang dapat kita simpulkan, bahwa timbulnja front persatuan internasional anti-perang dan anti-kolonialisme adalah merupakan pergeseran demokratis dan progresif jang menguntungkan perdamaian dan kemerdekaan dan jang mengisolasi politik perang dan politik membela negara² pendjadjah dari Amerika Serikat.

Dalam keadaan demikian, maka kaum imperialis Amerika Serikat terpaksa harus mengurangi sifat kepalabatunja, misalnja dengan bersedia berunding dengan RRT pada tingkat dutabesar, mengidjinkan djenderal²nja berkundjung ke Moskow, menjetudjui beberapa wakil Rakjat Sovjet berkundjung ke Amerika Serikat,

memberikan „bantuan ekonomi" seperti jang sudah ditawarkan kepada beberapa negeri netral, sikap pura² hendak bersahabat dengan negeri² Asia, meskipun difihak lain dengan sekuat tenaga mereka berusaha untuk menguasai negeri² ini lewat persekutuan² militer. Tentang ini djuga dibuktikan oleh konferensi kepala² pemerintah dari negara² Empat Besar jang dilangsungkan pada pertengahan tahun jang lalu, konferensi mana telah memberikan sumbangan² untuk mengurangi ketegangan internasional dan untuk mempertinggi saling pertjaja dan kerdjasama antara bangsa² sesuai dengan kehendak Rakjat² jang tjintadamai diseluruh dunia.

Berdasarkan keadaan seperti tsb. diatas itulah kita harus melihat dan mengertikan terdjadinja penerimaan jang setjara istimewa oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap Presiden Sukarno dalam kundjungannja baru² ini ke Amerika. Adalah satu hal jang bidjaksana bahwa Presiden Sukarno dan pemerintah Indonesia telah menggunakan situasi baik ini untuk membela dan memperdjuangkan tuntutan² demokratis dan perdamaian dari Rakjat Indonesia.

Indonesia adalah salahsatu negara jang paling berkepentingan dengan keredaan ketegangan² internasional, dengan terdjaminnja perdamaian dunia dan dengan dikalahkannja kekuatan² kolonial dimanapun djuga didunia. Indonesia adalah salahsatu negara jang samasekali tidak merasa diuntungkan dengan adanja persekutuan² militer seperti SEATO, NATO, Masjarakat Pertahanan Eropa dan Pakt Bagdad jang didirikan dengan paksaan golongan² jang berkuasa di Amerika Serikat. Blok² militer ini adalah faktor² kekuatan untuk memperuntjing ketegangan internasional, satu hal jang tidak diinginkan oleh sebagian besar negara² didunia. Bagi Indonesia dan bagi banjak negeri² lain, memasuki blok militer tidak hanja berarti memperkuat blok perang, tetapi djuga berarti mengorbankan kemerdekaan.

Dalam keadaan internasional seperti demikian, apakah tugas chusus Indonesia ?

Sebagai anggota jang terkemuka dari kerdjasama Asia-Afrika, Indonesia dengan politik luarnegerinja jang madju mempunjai sjarat² jang sangat baik untuk turut memperdjuangkan tudjuan² damai, seperti pengurangan persendjataan, pelarangan pertjobaan² sendjata atom, pemasukan RRT kedalam PBB, menjokong perdjuangan kemerdekaan bangsa² lain, memadjukan kerdjasama antara negara², mengembangkan kontak² perseorangan dan pertukaran delegasi² serta memadjukan kerdjasama antara organisasi² Rakjat seperti jang sudah terdjadi dengan pelaksanaan Konferensi Mahasiswa Asia-Afrika dalam bulan Djuni jang lalu. Dengan inisiatif jang lebih banjak dan kegiatan jang lebih besar dilapangan politik internasional, Indonesia tidak hanja akan berdjasa dalam usaha menggagalkan maksud² perang dari kaum imperialis, tetapi Indonesia djuga akan lebih bisa mendjamin kemerdekaannja dan lebih memungkinkan pembangunan ekonomi nasionalnja.

Dilihat dari sudut politik, kedudukan Indonesia dalam dunia internasional sekarang adalah kuat. Indonesia adalah anggota PBB jang sekarang suaranja tidak bisa diabaikan dan disamping itu Indonesia adalah salahsatu negara jang terkemuka diantara negara² Asia. Hubungan² diplomatik Indonesia sekarang sudah makin luas dan kundjungan² pemimpin² Rakjat dan tokoh² negara keluarnegeri, termasuk kundjungan presiden Sukarno ke Amerika dan negara² Barat lainnja jang kemudian akan disusul oleh kundjungan ke-negara² kubu sosialis, sangat memperkuat kedudukan internasional Indonesia.

Untuk lebih memperkuat kedudukan internasionalnja, Indonesia seharusnja dengan konsekwen melaksanakan putusan² Konferensi Asia-Afrika di Bandung jang disimpulkan dalam „Dasa Sila" („Sepuluh Prinsip") dan jang sesuai dengan lima prinsip mengenai hubungan² internasional, jaitu saling menghormati keutuhan wilajah dan kedaulatan, non-agresi, tidak tjampurtangan dalam urusan² dalamnegeri masing², memadjukan hubungan² internasional atas dasar persamaan dan saling menguntungkan serta hidup berdampingan setjara damai dan kerdjasama ekonomi.

Ada sementara orang jang mengartikan kedudukan internasional jang kuat hanja penting dalam hubungan dengan tindakan² Indonesia jang bersifat keluar. Sengadja atau tidak sengadja mereka mau memisahkan politik luarnegeri jang madju dengan politik dalamnegeri. Mereka mau bermukadua, keluar madju sedangkan kedalam reaksioner. Politik bermukadua ini ditentang oleh opini umum di Indonesia dan setjara tepat dikatakan oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dalam konferensi pers tanggal 12 Djuli jl.,

bahwa *„politik luarnegeri Indonesia jang bebas dan aktif adalah hasil saling pengaruh antara keadaan² dan kebutuhan² dalamnegeri serta sifat² nasional jang chusus jang diprojeksikan atas susunan internasional dari masalah² dunia"*. Politik luarnegeri dan dalamnegeri memang berbeda, tetapi bukanlah jang dapat dipisahkan.

Kedudukan internasional jang kuat dari Indonesia per-tama² harus digunakan dalam hubungan dengan tugas memenuhi tuntutan² ekonomi, politik dan kulturil dari Rakjat Indonesia. Djika kedudukan internasional jang kuat dipadu dengan adanja persatuan Rakjat didalamnegeri jang djuga kuat, maka Indonesia akan lebih bebas dalam menentukan politiknja jang berguna bagi Rakjat Indonesia.

Kewadjiban untuk membikin politik luarnegeri Indonesia langsung berguna bagi Rakjat dalamnegeri akan lebih dapat dipenuhi djika pemerintah Indonesia sungguh² konsekwen mendjalankan hubungan jang normal mengenai politik, ekonomi dan kebudajaan dengan semua negara, tanpa mem-beda²kan sistim politik dan sosial. Hubungan luarnegeri Indonesia jang sekarang pada umumnja masih berat ke-negara² Barat telah menjebabkan kurang kuatnja dorongan pemerintah untuk mengembangkan perdagangan dan untuk pertukaran para ahli dan peladjar dengan negara² kubu sosialis. Hal ini merugikan Rakjat Indonesia, chususnja para pedagang, industrialis, sardjana dan mahasiswa. Hubungan luarnegeri jang masih berat sebelah ini bertentangan dengan putusan² Konferensi Bandung dan tidak sesuai dengan kedudukan Indonesia sebagai penganut dan pengandjur politik luarnegeri jang bebas dan aktif.

Salahsatu alasan jang „klasik" jang sering dikemukakan oleh kaum reaksioner atau oleh kaum jang bimbang untuk tidak bertindak sesuai dengan keinginan Rakjat, untuk tidak bertindak sesuai dengan tuntutan² Revolusi Agustus, untuk tidak bertindak terhadap kekuasaan imperialisme Belanda dilapangan politik dan ekonomi, jalah kekuatiran akan mendapat tekanan² dari Amerika Serikat dan akan adanja serangan bersendjata kaum kolonialis Belanda jang datangnja dari Irian Barat. Kekuatiran ini dengan sangat pandai digunakan oleh kaum imperialis dan oleh kaum reaksioner didalamnegeri, sehingga dengan demikian belum ada satu pemerintah Indonesia jang berani mengadakan tindakan² jang penting dilapangan

ekonomi terhadap imperialisme Belanda. Dengan demikian, ekonomi Indonesia masih tetap dikuasai terutama oleh kaum kapitalis besar Belanda, perkembangan kebudajaan Indonesia tetap tertekan dan penghidupan Rakjat Indonesia masih tetap djelek. Alasan „klasik", jaitu kuatir akan mendapat tekanan² dari Amerika Serikat dan kuatir akan adanja serangan bersendjata Belanda, djuga digunakan oleh kaum reaksioner untuk membikin takut kaum jang bimbang supaja menolak duduknja orang² Komunis dalam satu pemerintahan jang programnja disetudjui oleh PKI. Dengan demikian kekuatiran jang tidak beralasan telah menjebabkan perbuatan jang melemahkan persatuan Rakjat didalamnegeri. Padahal dengan persatuan jang kuat didalamnegeri dan dengan kuatnja kedudukan internasional negeri kita, Indonesia akan dapat mengatasi tiap tekanan dari negeri manapun dan akan dapat membebaskan Irian Barat.

Singkatnja, pada waktu sekarang adalah mendjadi tugas penting dari Partai kita untuk mendorong agar Indonesia mendjalankan politik anti-kolonialisme dan politik perdamaian jang lebih aktif lagi, untuk lebih memperkuat kedudukan Indonesia diantara negara² didunia, terutama diantara negara² Asia dan Afrika. Bersamaan dengan itu kaum Komunis harus mendorong agar kedudukan internasional Indonesia jang kuat per-tama² ditudjukan untuk kepentingan Rakjat didalamnegeri, terutama dalam hubungan melikwidasi kekuasaan ekonomi kaum kapitalis besar Belanda.

Bagaimana situasi dalamnegeri Indonesia sekarang ?

Walaupun sudah hampir 11 tahun sedjak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, keadaan bagian terbesar dari Rakjat Indonesia masih tetap sengsara, sedangkan difihak lain kaum imperialis asing masih terus menguras kekajaan alam Indonesia dan menghisap Rakjat Indonesia. Bagian terbesar kaum tani masih tetap tidak mempunjai atau sedikit memiliki tanah dan tetap menderita dibawah penghisapan kaum tuantanah. Hanja kaum komprador, koruptor, tuantanah dan sebagian ketjil kaum kapitalis nasional dan pedjabat² pemerintah jang penting jang dapat menarik keuntungan buat diri sendiri dalam keadaan sekarang. Kenjataan² jang pintjang ini telah menjadarkan Rakjat Indonesia bahwa kemerdekaan jang di-tjita²kan belumlah tertjapai. Rakjat Indone-

sia bangun dan mengorganisasi diri kembali untuk meneruskan perdjuangannja, untuk melaksanakan tuntutan² Revolusi Agustusnja sampai ke-akar²nja, sampai ada manfaatnja untuk bagian jang terbesar dari Rakjat Indonesia. Menangnja kekuatan demokratis dalam pemilihan umum untuk Parlemen dan Konstituante jang lalu, dikutuknja kabinet Burhanuddin Harahap jang reaksioner oleh massa Rakjat jang luas, terbentuknja kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2, dibatalkannja persetudjuan KMB jang chianat setjara unilateral, dikutuknja perbuatan² kaum birokrat dan koruptor serta perbuatan orang-orang mesum lainnja oleh massa Rakjat dan oleh pemuda² Indonesia, makin banjaknja hasil² jang ditjapai dalam memberantas gerombolan DI-TII dan gerombolan subversif Belanda, makin ditentangnja tindakan se-wenang² orang² reaksioner terhadap Rakjat, adalah bukti² jang menondjol akan tumbuhnja kekuatan Rakjat Indonesia pada waktu achir² ini, dan djuga bukti tentang tetap setianja Rakjat Indonesia dan pemuda² Indonesia pada tjita² Revolusi Agustus. Dengan Rakjat dan pemuda Indonesia jang demikian ini kita meneruskan perdjuangan kita dan menjongsong haridepan kita jang gemilang.

Kaum reaksioner dalamnegeri jang bersekongkol dengan kaum imperialis asing tidak henti²nja berusaha untuk melemahkan kekuatan Rakjat Indonesia, terutama dengan djalan mentjegah adanja kerdjasama setjara revolusioner antara partai² Islam, partai² Nasionalis dan Partai Komunis seperti jang diinginkan oleh bagian jang sangat terbesar dari Rakjat Indonesia dan djuga jang diandjurkan oleh presiden Sukarno. Jang sangat melemahkan kekuatan nasional kita jalah politik anti-Komunis dan anti-persatuan dari orang² jang berkepalabatu dalam pimpinan partai Masjumi-PSI. Politik kepalabatu ini menimbulkan adanja pelanggaran² terhadap massa untuk perbaikan nasib dan persatuan serta perlawanan² massa terhadap kaum kapitalis besar Belanda, terhadap gerombolan DI-TII dan tuantanah, ditindas oleh orang² reaksioner jang dipengaruhi oleh politik kepalabatu itu. Dengan demikian djelaslah bahwa politik kepalabatu telah mendjadi penghalang jang pokok bagi perkembangan kekuatan nasional untuk mentjapai kemerdekaan ekonomi dan kebudajaan jang lebih luas bagi Indonesia, untuk membebaskan Irian Barat jang merupakan kira² 20%

dari wilajah Republik Indonesia dan untuk menutup samasekali kemungkinan diseretnja Indonesia kedalam blok militer. Dari pengalamannja sendiri Rakjat Indonesia sampai kepada kesimpulan, bahwa kalau dizaman pendjadjahan kaum kolonialis Belanda adalah kekuatan jang langsung menghalangi tertjiptanja persatuan Rakjat dari berbagai aliran politik, maka rol kaum kolonialis Belanda itu sekarang sudah dioper oleh orang² berkepalabatu dari kalangan pimpinan Masjumi-PSI. Hal ini makin lama makin terang dan achirnja pasti akan mendjadi sangat terang.

Tetapi, mengemukakan kenjataan adanja politik kepalabatu dari sebagian pemimpin² Masjumi-PSI, samasekali tidak berarti bahwa kaum reaksioner jang bersekutu dengan kaum imperialis berhasil dalam tiap² usaha memetjahbelah persatuan Rakjat dan dalam mempertahankan kekuasaan kaum kapitalis besar asing dan kaum tuantanah. Dalam melaksanakan maksud djahatnja mereka harus berhadapan dengan Partai Komunis Indonesia dan partai² demokratis lainnja, mereka harus berhadapan dengan Rakjat dan pemuda Indonesia jang sudah tergembleng dalam Revolusi Agustus dan dalam perdjuangan tahun² belakangan ini dan mereka harus menghadapi massa mereka sendiri jang makin lama makin sedar dan mulai menentang politik reaksioner mereka.

Diluar keinginan kaum reaksioner jang berkepalabatu, dalam bulan Agustus tahun jang lalu telah dilangsungkan kongres pertama dari Kongres Rakjat Seluruh Indonesia jang menghasilkan sebuah program jang berisi tuntutan² jang banjak persamaannja dengan tuntutan² Revolusi Agustus.(1) Djuga diluar keinginan kaum reaksioner jang berkepalabatu, dalam bulan Maret tahun ini telah terbentuk sebuah pemerintah jang programnja memuat tuntutan² jang paling mendesak dari Rakjat Indonesia. Program Kongres Rakjat dan program kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2, walaupun jang satu lebih madju daripada jang lain, ke-dua²nja dapat didjadikan pegangan dalam perdjuangan se-hari² Rakjat Indonesia sebagai program jang sudah disetudjui oleh sebagian besar massa Islam dan massa nasionalis dan oleh seluruh massa Komunis.

Sudah tentu, dua program tsb. diatas, jaitu program Kongres Rakjat dan program kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2, bukanlah program jang djika dilaksanakan bisa menjelesaikan tuntutan²

Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja. Tetapi adalah sesuatu jang tak dapat dibantah, bahwa djika pemerintah Indonesia sekarang konsekwen melaksanakan programnja dan djika partai², organisasi² dan perseorangan² jang sudah menjatakan menerima program Kongres Rakjat dengan konsewen melaksanakan program tsb., maka tidak bisa tidak ia akan membawa Rakjat Indonesia lebih dekat kepada tudjuan Revolusi Agustus jang bersifat nasional dan demokratis. Kaum Komunis Indonesia jang sudah menjatakan persetudjuannja terhadap program Kongres Rakjat dan terhadap program pemerintah Ali Sastroamidjojo ke-2 akan terus bekerdja supaja program ini dilaksanakan.

Demikianlah dengan singkat situasi internasional dan dalamnegeri pada dewasa ini. Situasi internasional dan dalamnegeri sekarang membukakan kemungkinan jang besar bagi Rakjat Indonesia untuk mengembangkan kekuatannja sendiri, untuk memperkuat persatuannja, untuk melaksanakan programnja jang madju atau agak madju, untuk dapat bertindak jang lebih menguntungkan buat Rakjat Indonesia sendiri dilapangan politik luar dan dalamnegeri, dilapangan ekonomi dan kebudajaan.

II

Tiga Kekuatan, Tiga Konsep Dalam Menjelesaikan Tuntutan² Revolusi Agustus 1945

Pemilihan umum untuk Parlemen dan Konstituante dalam tahun 1955 tidak hanja sudah berachir dengan kemenangan kekuatan demokratis, tetapi djuga telah sangat membantu dalam menganalisa kekuatan² berbagai klas di Indonesia. Mengetahui kekuatan klas² berarti mengetahui imbangan kekuatan, berarti mengetahui kekuatan sendiri, kekuatan sekutu dan kekuatan lawan. Diketahuinja hal ini adalah sangat penting untuk menetapkan politik dan taktik Partai dan untuk mengetahui perspektif bagi Partai dan bagi perdjuangan Rakjat kita.

Sesudah pemilihan umum dapat diketahui adanja 3 matjam kekuatan politik di Indonesia jang hampir berimbang besarnja. Kekuatan² itu jalah:

Pertama, kekuatan *kepalabatu,* jaitu kekuatan kaum feodal dan kaum komprador jang bersekongkol dengan imperialisme asing. Kekuatan ini masih agak besar.

Kedua, kekuatan *progresif,* jaitu kekuatan kaum buruh, kaum tani, burdjuasi ketjil kota dan intelektuil revolusioner. Kekuatan ini sudah agak besar.

Ketiga, kekuatan *tengah,* jaitu kekuatan burdjuasi nasional dan segala kekuatan patriotik dan anti-kolonialisme lainnja, termasuk tuantanah golongan kiri (agak madju). Kekuatan ini agak besar dan berada diantara kekuatan kepalabatu dan kekuatan progresif.

Dalam hubungan dengan Revolusi Agustus 1945, kekuatan² diatas menjatakan persetudjuannja pada revolusi tsb. dan menjatakan kesediaannja untuk melaksanakan tuntutan² Revolusi Agustus. Sama dalam kata², tetapi sangat berbeda dalam perbuatan. Oleh karena itu hampir sebelas tahun lamanja Rakjat Indonesia dibikin kabur pengertiannja tentang hakekat Revolusi Agustus. Sekarang sudah waktunja untuk melenjapkan kekaburan ini. Ini hanja mungkin dengan membuka dan membeberkan konsep ketiga kekuatan diatas mengenai penjelesaian tuntutan² Revolusi Agustus 1945.

Bagaimanakah konsep ketiga kekuatan diatas dalam hubungan dengan penjelesaian tuntutan² Revolusi Agustus ? Atau, lebih tepat, sebelum mendjawab pertanjaan ini: apakah hakekat Revolusi Agustus ? Apakah hakekat Revolusi Agustus setjara ilmiah ?

Revolusi Agustus seperti sudah disebut diatas dan seperti sudah sering diutjapkan oleh pemimpin² progresif Indonesia, adalah revolusi jang bersifat nasional dan demokratis. Revolusi ini bersifat nasional karena bertudjuan untuk membebaskan diri dari kekuasaan kaum imperialis asing, dan revolusi ini bersifat demokratis karena anti-feodalisme. Memang adalah kenjataan, bahwa pada permulaan revolusi banjak soal² jang berhubungan dengan sifat Revolusi Agustus belum diadjukan dan belum dirumuskan, djuga sembojan² dan tugas² revolusi ini belum diperlengkapi.

Kita sering mendengar utjapan² tentang „menjelesaikan Revolusi 1945". Tetapi kita tidak mendapat keterangan jang djelas tentang apa jang harus diselesaikan berhubung dengan Revolusi Agustus. Kita djuga sering mendengar utjapan bahwa untuk „menjelesaikan Revolusi 1945" kita harus menggalang „persatuan nasional

jang revolusioner". Tetapi apakah sebenarnja jang dimaksudkan dengan persatuan nasional jang revolusioner, klas² dan golongan² manakah jang harus dipersatukan, klas² manakah jang harus mendjadi basis persatuan, klas manakah jang harus memimpin persatuan, dan apakah jang mendjadi sasaran persatuan nasional jang revolusioner itu? Semuanja ini harus didjawab, harus didjelaskan dan harus mendjadi pengertian Rakjat.

Dalam kesempatan ini saja ingin mengemukakan beberapa kenjataan jang membuktikan bahwa Revolusi Agustus 1945 adalah revolusi jang bersifat nasional dan demokratis, artinja revolusi anti-imperialisme dan anti-feodalisme, revolusi jang menurut wataknja harus membawa Rakjat kesinggasana kekuasaan.

Kita mengetahui bahwa kira² satusetengah bulan sebelum proklamasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Djakarta diadakan sidang² „Badan Penjelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan".(2) Didalam sidang² ini anggota² „Badan Penjelidik" tsb. mengadakan pidato² tentang kemerdekaan Indonesia. Banjak diantara anggota jang berpidato menuruti irama seperti jang diingini oleh balatentara Djepang. Tetapi ada djuga diantara jang tidak seirama, dan malahan bertentangan dengan keinginan pembesar² Djepang ketika itu. Sangat menarik pidato Bung Karno dimuka „Badan Penjelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan" pada tanggal 1 Djuni 1945, jang a.l. berbunji sbb.:

„Apakah jang dinamakan merdeka? Didalam tahun 1933 saja telah menulis satu risalah, risalah jang bernama 'Mentjapai Indonesia Merdeka', maka didalam risalah tahun 1933 itu, telah saja katakan, bahwa kemerdekaan politik, politieke onafhankelijkheid, political independence, tak lain dan tak bukan jalah satu djembatan, satu djembatan emas. Saja katakan didalam kitab itu, bahwa diseberangnja djembatan itulah kita sempurnakan kita punja masjarakat". Selandjutnja dikatakan pula: *„diseberang djembatan, djembatan emas inilah, baru kita leluasa menjusun masjarakat Indonesia Merdeka jang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi."*

Djadi teranglah, bahwa dengan „Indonesia Merdeka" tidak hanja dimaksudkan merdeka dilapangan politik.

Indonesia merdeka jang bagaimana? Tentang ini selandjutnja dikatakan: *„apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia Merdeka jang namanja sadja Indonesia Merdeka, tetapi sebenarnja hanja untuk mengagungkan satu orang, untuk memberikan kekuasaan kepada satu golongan jang kaja, untuk memberikan kekuasaan pada satu golongan bangsawan? Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak! Baik saudara² jang bernama kaum kebangsaan jang disini, maupun saudara² jang dinamakan kaum Islam, semuanja telah mufakat, bahwa bukan negara jang demikian itulah kita punja tudjuan. Kita hendak mendirikan suatu negara 'semua buat semua'. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan jang kaja — tetapi 'semua buat semua'."*

Dari utjapan ini teranglah, bahwa dengan „Indonesia Merdeka" jang dimaksudkan bukan sistim negara jang anti-Rakjat, bukan sistim negara jang mendjamin kemerdekaan bagi kaum imperialis dan kakitangannja, bagi kaum kapitalis dan kaum feodal untuk berkuasa dan berbuat se-suka²nja terhadap massa Rakjat pekerdja. Kesimpulan ini diperkuat lagi oleh uraian selandjutnja sbb.: *„Djangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakjat sudah ada, kita dengan sendirinja sudah mentjapai kesedjahteraan ini. Kita sudah lihat, di-negara² Eropa ada Badan Perwakilan, ada parlementaire democratie. Tetapi tidakkah di Eropa djustru kaum kapitalis meradjalela? Di Amerika ada suatu Badan Perwakilan Rakjat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis meradjalela? Padahal ada Badan Perwakilan Rakjat! ..... Kalau kita mentjari demokrasi, hendaknja bukan demokrasi Barat, tetapi permusjawaratan jang memberi hidup, ja'ni politiek-economische democratie jang mampu mendatangkan kesedjahteraan sosial! Rakjat Indonesia sudah lama bitjara tentang hal ini".*

Dalam sidang „Badan Penjelidik" tsb. Bung Karno djuga berbitjara tentang „internasionalisme" a.l. sbb.: *„Kita harus menudju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan sadja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka tetapi kita harus menudju pula kepada kekeluargaan bangsa²".* Tetapi internasionalisme bukan kosmopolitanisme. Tentang ini dikatakan oleh Bung Karno: *„djikalau saja katakan internasionalisme, bukanlah saja bermaksud kosmopolitanisme, jang tidak mau adanja kebangsaan, jang mengatakan*

tidak ada kebangsaan, jang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Burma, tidak ada Inggeris, tidak ada Amerika, dll.nja".

Pidato tsb. diatas mendapat sambutan hangat dari para anggota „Badan Penjelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan". Kemudian ternjata, bahwa pokok² pikiran jang diadjukan dalam pidato tsb. banjak jang ditjantumkan didalam UUD Sementara Republik Indonesia tahun 1945.

Djadi, djika pidato Bung Karno tsb. dapat dikatakan mewakili perasaan, fikiran dan hasrat Rakjat Indonesia, dan djika UUD Sementara RI dapat kita anggap sebagai perumusan perasaan, fikiran dan hasrat Rakjat Indonesia ketika akan mentjetuskan Revolusi Agustus 1945, maka, walaupun dengan samar² dan tidak lengkap dirumuskan sembojan dan tugas revolusi, Revolusi Agustus adalah revolusi nasional dan demokratis atau revolusi anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa sembojan dan tugas revolusi belum dirumuskan setjara lengkap dan setjara ilmiah, maka adalah tugas kaum revolusioner untuk memperlengkapi sembojan dan tugas revolusi tsb.

Bahwa Revolusi Agustus memang berwatak anti-imperialisme dan anti-feodalisme dibuktikan pula dengan djelas oleh tindakan² massa diwaktu revolusi itu berlangsung, misalnja tindakan² jang mendjadikan perusahaan² penting milik asing sebagai „milik Republik Indonesia", tindakan menghapuskan pemerintahan perseorangan dengan membentuk dewan² jang diberi nama „Komite Nasional Indonesia" dan membentuk badan² keamanan Rakjat sampai ke-desa², mem-bagi²kan tanah² perkebunan asing kepada kaum tani dibeberapa daerah, dsb.

Sekarang sampailah waktunja untuk mendjawab pertanjaan tentang konsep tiga kekuatan diatas dalam hubungan dengan penjelesaian tuntutan² Revolusi Agustus.

Pengalaman Rakjat Indonesia selama hampir 11 tahun, dan terutama pada tahun² terachir ini, djelas sekali menundjukkan adanja tiga konsep.

Pertama, konsep kaum kepalabatu, jaitu kaum komprador dan feodal, jalah supaja Indonesia dikuasai oleh kaum komprador dan feodal, supaja Indonesia mendjadi satu negara jang hanja bentuknja sadja merdeka, tetapi hakekatnja tunduk kepada imperialisme, membela kepentingan kapitalis² besar asing dan tuantanah². Pembela² dari konsep ini, dengan bertameng „Revolusi 1945" dan „anti-kolonialisme", mendjalankan politik anti-Komunis dan anti-Rakjat jang tidak tahu malu, walaupun mereka tahu bahwa kaum Komunis berdiri dibarisan depan sedjak permulaan dan selama Revolusi Agustus sampai sekarang dalam perdjuangan melaksanakan tuntutan² Revolusi Agustus.

Kedua, konsep kaum progresif, jaitu kaum buruh, tani, burdjuasi ketjil kota dan intelektuil revolusioner, jang menuntut supaja hak² kaum imperialis dilapangan politik, ekonomi dan kebudajaan dihapuskan; mereka djuga menuntut penghapusan milik feodal atas tanah, supaja diadakan perubahan tanah untuk melaksanakan sembojan „tanah untuk petani"; semuanja ini sesuai dengan tuntutan² Revolusi Agustus.

Ketiga, konsep kekuatan tengah, jaitu konsep burdjuasi nasional jang mempunjai pertentangan dengan kaum imperialis, kaum komprador dan tuantanah, jalah supaja di Indonesia diadakan perubahan² dengan maksud membela kepentingan sendiri untuk perkembangan kapitalisme nasional jang menurut mereka sesuai dengan tudjuan revolusi 1945.

Djadi, didalam negeri kita sekarang ada pertentangan² diantara tiga kekuatan ini, pertentangan jang satu lebih tadjam daripada pertentangan jang lain.

Pada waktu sekarang kekuatan Rakjat, jaitu gabungan antara kekuatan progresif dan kekuatan tengah berusaha untuk membentuk negara jang merdeka dilapangan politik dan ekonomi. Tetapi usaha ini ditentang keras oleh klas² komprador dan feodal jang bersekongkol dengan kaum imperialis jang dengan ngotot berusaha untuk mengubah Indonesia mendjadi negara embel², jaitu negara jang hanja dalam bentuknja merdeka, tetapi jang pada hakekatnja menjerah pada imperialisme.

Kaum imperialis asing tidak henti²nja menusuk-nusuk kaum reaksioner dalamnegeri supaja lebih giat mengadakan intrik² dan tindakan² jang anti-Rakjat.

Garis politik PKI dalam menghadapi tiga kekuatan dan tiga konsep penjelesaian tuntutan² Revolusi Agustus seperti diterangkan

diatas jalah: dengan sekuat tenaga dan dengan tidak djemu²nja mengembangkan kekuatan progresif, bersatu dengan kekuatan tengah dan mementjilkan kekuatan kepalabatu.

Apakah dengan garis politik ini berarti bahwa kaum Komunis memukulrata dan menganggap semua anggota dan pemimpin partai² jang mewakili kekuatan kepalabatu, seperti partai² Masjumi dan PSI, sebagai orang² berkepala panas jang pikirannja siang dan malam hanja tertudju untuk menghantjurkan kaum Komunis dan meletakkan Indonesia dibawah kekuasaan kaum imperialis asing? Tentu tidak demikian. Ada diantara mereka jang mengatakan dan merasa bahwa mereka hanja anti-Komunis dan tidak pro-imperialis; mereka tidak sedar bahwa sikap anti-Komunis, jaitu anti golongan jang paling konsekwen anti-imperialis, berarti mengurangi sifat anti-imperialis mereka dan ini sedar atau tidak sedar berarti membantu imperialis. Tetapi disamping itu sebagian besar daripada anggota partai² ini dan sebagian daripada pemimpin partai² ini adalah berkepala dingin, tidak terlalu menondjolkan kepentingan sendiri, memandang imperialis asing sebagai lawan bersama dan sampai batas² jang tertentu tidak berkeberatan untuk bekerdjasama dengan kaum Komunis. Dengan orang² demikian ini kaum Komunis harus bersatu. Kaum Komunis djuga tidak memukulrata anggota² dan pemimpin² partai² jang mewakili kekuatan tengah. Diantara mereka tidak sedikit terdapat unsur burdjuasi ketjil dan intelektuil² revolusioner jang merupakan golongan kiri didalam partai² tengah, disamping unsur jang memang benar² mewakili kepentingan burdjuasi nasional dan unsur jang tjondong kepada kekuatan kepalabatu. Jang terachir ini merupakan golongan kanan didalam partai tengah.

Satu kenjataan jalah, bahwa didalam partai² jang mewakili kekuatan kepalabatu dan kekuatan tengah terdapat berbagai golongan, jang pada pokoknja dapat dibagi dalam golongan kiri, tengah dan kanan. Untuk dapat mempersatukan kekuatan jang se-banjak²nja, kaum Komunis harus menganalisa golongan² tsb. agar setiap waktu dapat menentukan sikap jang tepat supaja dapat mempersatukan semua jang bisa dipersatukan, dan supaja jang dipentjilkan hanja jang benar² berkepalabatu.

Mungkin ada orang jang bertanja: apa sebabnja kaum Komunis harus bersatu dengan burdjuasi nasional jang bertudjuan mengembangkan kapitalisme nasional? Apakah ini tidak berarti memupuk mereka jang kemudian hari akan mendjadi kapitalis² monopoli jang akan membinasakan negeri?

Pada tingkatan keadaan seperti sekarang kaum Komunis Indonesia tidak memandang kapitalisme nasional sebagai bahaja. Kita bukan hanja tidak melawan mereka, tetapi malahan kita menuntut kepada tiap² pemerintah supaja kepentingan pedagang dan industrialis nasional dilindungi, diberi proteksi dan fasilitet dalam melawan saingan dari kapitalis² besar asing. Kemelaratan Rakjat Indonesia sekarang bukan karena kebanjakan kapitalisme nasional, tetapi sebaliknja, antara lain karena kekurangan kapitalisme nasional dan kebanjakan imperialisme asing. Kaum Komunis Indonesia menjetudjui adanja warganegara² Indonesia jang madju dilapangan industri dan perdagangan sebagai hasil usahanja sendiri, tidak karena mendjadi komprador (agen) kapitalis monopoli asing dan tidak karena korupsi atau karena menggunakan saluran² birokrasi. Komprador, koruptor dan kapitalis birokrasi adalah anti-nasional dan oleh karena itu harus ditentang oleh seluruh Rakjat Indonesia, djuga oleh kapitalis² nasional.

Kaum Komunis tidak mempunjai kekuatiran bahwa kapitalis jang benar² nasional dikemudian hari akan mendjadi kapitalis monopoli. Mungkin diantara mereka ada jang mengimpikan hal ini, dan djika ada maka akan tetap tinggal impian belaka, sebab matahari sudah terlalu tinggi untuk sampai bisa mendjadikan impian ini satu kenjataan. Imbangan kekuatan dunia dan imbangan kekuatan dalamnegeri jang semakin menguntungkan kekuatan progresif sekarang ini mendjamin bahwa sekarang bukan masanja lagi untuk timbulnja monopoli kapitalis nasional. Tiap² usaha kearah itu akan mendapat tentangan keras.

Kapitalis nasional mempunjai kemungkinan untuk berkembang dan perkembangan ini sampai batas² jang tidak merugikan Rakjat akan disokong oleh kekuatan progresif, asal perkembangan ini didapat dari perlawanan terhadap imperialis asing dan terhadap feodalisme. Dengan kapitalis nasional jang menempuh djalan ini PKI harus bersatu. Kita sedar, bahwa politik ini tidak hanja akan dapat tentangan dari kapitalis besar asing dan agen²nja jang tidak ingin

melihat kaum kapitalis nasional berkembang dengan wadjar, tetapi djuga akan dipersulit oleh kapitalis nasional sendiri jang pura-pura anti-kapitalisme dan anti-penghisapan untuk menutupi penghisapan jang mereka lakukan terhadap kaum buruh.

PKI mendorong sifat progresif, sifat anti-kolonialisme dan anti-feodalisme dari burdjuasi nasional. PKI mengkritik sifat burdjuasi nasional jang setengah², jang tidak konsekwen dan pintjang. Politik anti-Komunisme dan politik memetjahbelah dari golongan sajap kanan burdjuasi nasional jang tempo² suka tampak, tentu djuga harus dikritik karena perbuatan ini adalah merusak persatuan nasional, persatuan antara kekuatan progresif dan kekuatan tengah. Perlu didjelaskan bahwa kaum Komunis menganggap tidak ada gunanja dan malahan merugikan untuk mengkritik hal² jang tidak prinsipiil, jang tetekbengek, jang tak mengenai kepentingan Rakjat banjak. Kritik hanja dilakukan kalau sangat perlu.

Djadi djelaslah bahwa konsep daripada PKI dan semua kaum progresif dalam menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus jalah: *Melaksanakan tuntutan² Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja, ini berarti menghapuskan imperialisme dan feodalisme sampai ke-akar²nja. Ini adalah konsep Rakjat. Berdasarkan konsep ini, mereka jang tidak anti-imperialisme dan tidak anti-feodalisme adalah bukan Rakjat tetapi anti-Rakjat, anti-Revolusi Agustus 1945.*

Konsep PKI hanja mungkin dilaksanakan djika ada front persatuan, djika proletariat mempunjai banjak sahabat. Berdasarkan apa jang diuraikan diatas, ada 2 matjam front persatuan dan 2 matjam sahabat:

1) proletariat dengan kaum tani dan burdjuasi ketjil kota. Ini adalah front persatuan atau persahabatan antara proletariat dengan orang² jang mempunjai sedikit milik (persekutuan proletariat dengan kaum tani dan kaum keradjinan tangan pada umumnja disebut persekutuan buruh dan tani).

2) proletariat dengan orang² jang mengexploitasi. Ini adalah persatuan atau persahabatan antara proletariat dengan madjikan atau orang² pemerintah jang mewakili kepentingan burdjuasi nasional.

Berdasarkan analisa tentang pengaruh partai² politik atas massa dinegeri kita, kita memperdjuangkan persatuan massa Islam (dan aliran keagamaan pada umumnja), massa Nasionalis dan massa

Komunis dalam perdjuangan melawan imperialisme dan feodalisme

Berdasarkan analisa tentang klas² dinegeri kita, kita memperdjuangkan persatuan antara kaum buruh, tani, burdjuasi ketjil kota, kaum intelektuil revolusioner dan burdjuasi nasional, jaitu persatuan antara kekuatan progresif dengan kekuatan tengah.

Inilah kuntji kemenangan daripada konsep Rakjat untuk menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus jang bersifat nasional dan demokratis sampai ke-akar²nja.

III

Politik Partai Komunis Indonesia

Kongres Nasional ke-V PKI antara lain sudah mensahkan sebuah dokumen jang penting, jaitu Program PKI. Program ini terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama jalah program umum atau program pokok. Bagian kedua jalah tuntutan PKI kepada pemerintah Ali Sastroamidjojo (jang pertama), jaitu pemerintah jang ketika program itu dibikin sedang memegang tampuk kekuasaan. Bagian kedua ini jalah tuntutan² sekarang, program chusus atau program tuntutan PKI. Program tuntutan ini dibikin berdasarkan Program Umum. Djadi, Program Umum dengan program tuntutan adalah berbeda, tetapi satusamalain ada hubungannja, tidak terpisah.

Dengan program umumnja PKI mengemukakan apa jang mendjadi tudjuannja, apa jang diperdjuangkannja dalam seluruh tingkat revolusi nasional dan demokratis, atau disebut djuga tingkat revolusi burdjuis-demokratis. Pokok² program umum ini tidak akan berubah selama tuntutan² Revolusi Agustus 1945 jang bersifat nasional dan demokratis belum dilaksanakan sampai ke-akar²nja. Djadi, program umum akan tetap mendjadi program PKI selama Demokrasi Rakjat belum mendjadi kenjataan. Program Umum PKI adalah program jang terus-menerus harus dipropagandakan oleh kaum Komunis dan simpatisan² Komunis sampai selesainja pelaksanaan tuntutan² Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja. Program Umum PKI adalah program djangka pandjang atas dasar kerdjasama taraf tinggi antara PKI dengan semua partai, dengan

semua golongan dan perseorangan jang demokratis dan patriotik lainnja dalam menjelesaikan seluruh tuntutan Revolusi Agustus.

Tetapi, PKI tidak hanja mempropagandakan program djangka pandjangnja, tidak hanja mempropagandakan program umumnja PKI djuga menundjukkan djalan untuk memetjahkan soal² kongkrit sekarang. Disamping mempropagandakan program umumnja. PKI mempersatukan Rakjat berdasarkan tuntutan² politik dan ekonomi jang kongkrit sekarang dan mendjadikan tuntutan kongkrit sekarang sebagai alas untuk bekerdjasama waktu sekarang dengan semua partai, semua golongan dan perseorangan jang demokratis dan patriotik.

Program Umum

Guna melaksanakan tuntutan Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja, guna memusnahkan samasekali kekuasaan kaum imperialis asing dan kaum tuantanah, guna membangun Indonesia baru jang merdeka dilapangan politik, ekonomi dan kebudajaan, guna membangun Indonesia jang demokratis, bersatu dan makmur, maka Rakjat Indonesia, PKI dan semua partai, semua golongan dan perseorangan jang anti-imperialisme dan anti-feodalisme sangat membutuhkan adanja sebuah program bersama jang dibikin atas persetudjuan bersama. Dengan tudjuan memenuhi kebutuhan akan program bersama inilah, PKI dalam Kongres Nasional ke-V mensahkan sebuah program, program jang tentu sadja masih bisa dirundingkan dengan partai² dan golongan² lain jang menginginkan musnahnja samasekali kekuasaan imperialisme dan feodalisme dari bumi Indonesia sebagaimana jang dituntut oleh Revolusi Agustus kita. Kesediaan PKI merundingkan programnja dengan partai² dan golongan² lain mengandung arti bahwa PKI, atas dasar perundingan bersama, bersedia menerima perubahan, menerima pengurangan dan penambahan, tentu sadja dengan tidak mengganggu-gugat inti program, jaitu anti-imperialisme, anti-feodalisme dan melaksanakan perubahan² demokratis.

Sebagaimana sudah disebut diatas, program bersama demikian dapat dibagi mendjadi dua bagian, jang umum dan jang chusus.

Lebih dulu kita akan membitjarakan program umum dan kemudian program chusus atau program tuntutan.

Pendirian pokok kaum Komunis Indonesia mengenai pelaksanaan tuntutan² Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja adalah sama dengan pendirian bagian terbesar Rakjat Indonesia. Pendirian pokok ini jalah:

Pertama, sistim negara Indonesia tidak seharusnja sistim negara anti-Rakjat jang dikuasai oleh tuantanah dan komprador. Sistim anti-Rakjat, terutama ketika kekuasaan pemerintah Hatta, pemerintah Natsir, pemerintah Sukiman dan pemerintah Burhanuddin Harahap, telah dibuktikan kebangkrutannja. Sistim jang wadjar jalah sistim negara Rakjat, sistim negara jang sumber kekuasaannja ada pada Rakjat, jaitu negara „dari Rakjat, oleh Rakjat dan untuk Rakjat", atau jang disebut oleh Bung Karno negara *„semua buat semua"*. Negara ini jalah negara front persatuan, jang mendasarkan diri atas massa dan jang bertudjuan kemerdekaan nasional jang penuh bagi Indonesia. Djadi, teranglah, mengingat terbelakangnja keadaan ekonomi Indonesia dan mengingat bahwa Rakjat Indonesia masih melawan penindasan imperialisme dan feodalisme, PKI tidak bermaksud mendirikan diktatur proletariat jang harus melaksanakan perubahan² sosialis. Hanja negara jang demikian inilah jang mampu mempersatukan semua tenaga anti-feodal dan anti-imperialis, jang mampu memberikan tanah dengan tjuma-tjuma kepada kaum tani, jang mampu mendjamin hak² demokrasi bagi Rakjat, jang mampu membela industri dan perdagangan nasional terhadap persaingan asing, jang mampu meninggikan tingkat hidup materiil kaum buruh, jang mampu menghapuskan pengangguran dan jang mampu mengembangkan pekerdjaan para sardjana dan seniman. Singkatnja, hanja negara jang demikian jang sesuai dengan watak Revolusi Agustus 1945, jang mampu mendjamin kemerdekaan nasional serta perkembangannja melalui djalan demokrasi, kemadjuan dan perdamaian.

Kedua, di Indonesia tidak seharusnja terus dipertahankan satu negara menurut resep demokrasi Barat atau diktatur demokrasi tipe lama. Seperti dikatakan oleh Bung Karno: *„Kalau kita mentjari demokrasi, hendaknja bukan demokrasi Barat, tetapi..... demokrasi jang mampu mendatangkan kesedjahteraan sosial"*. Alas-

an untuk tidak membangun negara demokrasi lama jang dikuasai oleh burdjuasi nasional adalah sangat kuat. Disatu pihak burdjuasi nasional mempunjai kedudukan jang sangat lemah dilapangan ekonomi dan tidak kuat dilapangan politik, sedang difihak lain proletariat Indonesia dengan pemimpinnja PKI telah terbukti mempunjai kesedaran klas jang tinggi dan terbukti mempunjai kemampuan jang tidak bisa diabaikan dilapangan politik, dan mereka memberi pimpinan kepada massa luas kaum tani, burdjuasi ketjil kota, kaum intelektuil revolusioner dan elemen demokratis lainnja. Djadi teranglah bahwa jang dapat mendatangkan kesedjahteraan sosial bukanlah sistim demokrasi lama jang dikuasai oleh burdjuasi, bukan demokrasi *„menurut resep revolusi Perantjis"* (djuga utjapan Bung Karno dalam „Badan Penjelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan"), tetapi demokrasi untuk semua golongan Rakjat dan mengenai semua lapangan (politik, ekonomi dan kebudajaan). Sistim demokrasi jang demikian itu jalah demokrasi tipe baru, demokrasi untuk seluruh Rakjat, demokrasi Rakjat.

Hanja dengan mendirikan kekuasaan Demokrasi Rakjat baru ada kemungkinan untuk mengachiri kekuasaan kaum imperialis, tuantanah dan burdjuasi komprador dinegeri kita, dan barulah bisa memulai dengan zaman baru dalam sedjarah kemadjuan Rakjat kita. Pemerintah demikian ini adalah sangat sesuai dengan tuntutan bagian terbesar sekali dari Rakjat Indonesia karena, *pertama*, ia pasti akan mendapat dukungan kira² 20 djuta kaum buruh dengan keluarganja (buruh industri, buruh keradjinan tangan, buruh perkebunan dan golongan buruh lainnja); *kedua*, ia pasti mendapat dukungan dari ber-puluh² djuta kaum tani dengan keluarganja jang merupakan 60 á 70% dari Rakjat Indonesia; *ketiga*, ia pasti akan mendapat dukungan dari banjak burdjuasi ketjil kota, kaum intelektuil, burdjuasi nasional, kaum ningrat (bangsawan) jang madju dan elemen patriotik lainnja.

Ketiga, politik pemerintah Rakjat jang kita perdjuangkan harus menghapuskan kekuasaan imperialis disegala lapangan dan menghapuskan penindasan feodal. Tetapi, kita tidak menghendaki kekuasaan imperialis asing dan tuantanah diganti dengan kekuasaan burdjuasi dalamnegeri atas Rakjat banjak. Kita ingin semua klas jang anti-imperialis dan anti-feodal sama² berkuasa, kita ingin

satu sistim politik front persatuan. Inilah sjarat untuk mewudjudkan Indonesia Merdeka jang *„bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan jang kaja, — tetapi 'semua buat semua'"*. Memang adalah aneh dan bertentangan dengan semangat Revolusi Agustus, djika kira² 20 djuta kaum buruh dengan keluarganja dan ber-puluh² djuta kaum tani dengan keluarganja mau disingkirkan dari kekuasaan negara, demikian djuga adalah tidak adil djika kaum burdjuis ketjil kota, kaum intelektuil dan kaum burdjuis nasional jang anti-imperialis dan anti-feodal disingkirkan dari kekuasaan negara.

Keempat, mengenai struktur pemerintah, PKI memperdjuangkan supaja dipakai sistim demokrasi jang memusat, artinja disatu fihak memberikan kekuasaan tertinggi untuk daerah-daerah kepada DPRD², sedangkan difihak lain harus ada pemerintah sentral jang kuat, jang mengurus urusan² umum, jang sepenuhnja tunduk pada DPR. Kekuasaan daerah harus memperkuat kekuasaan pusat dan kekuasaan pusat harus membantu perkembangan demokrasi, ekonomi dan kebudajaan daerah. Pada prinsipnja kita harus dengan teguh mewudjudkan Republik Kesatuan dengan pemerintah² daerah jang demokratis dan otonomi sukubangsa jang luas.

Kelima, tentara dan kekuatan bersendjata lainnja adalah pembela jang penting dari negara. Walaupun kaum reaksioner sudah berusaha keras untuk mengubah komposisinja dan mengubah semangatnja, tetapi majoritet anggota Angkatan Perang Republik Indonesia sekarang masih tetap bersemangat Revolusi Agustus 1945. Selama peperangan kemerdekaan melawan tentara kolonial Belanda Angkatan Perang Republik Indonesia telah sehidup semati dengan Rakjat. Oleh karena itu sudah sewadjarnja, bahwa perwira, bintara dan bawahan dari Angkatan Perang Republik Indonesia sekarang pada umumnja tetap setia kepada tjita-tjita Revolusi Agustus dan berdjuang untuk pelaksanaan tuntutan² revolusi ini. Oleh karena itu sukarlah membajangkan bahwa Angkatan Perang sekarang setjara bulat dapat didjadikan alat untuk menindas Rakjat, sebaliknja adalah wadjar djika Rakjat mengharapkan agar TNI dan kekuatan bersendjata RI lainnja mendjadi pelindung Rakjat. Seluruh Rakjat harus waspada terhadap pertjobaan² kaum reak-

sioner jang mau mengadu-domba tentara dengan Rakjat dan mau menempatkan suatu Junta Militer diatas pundak Rakjat.

Keenam, mengenai ekonomi. Dibagian atas sudah dikatakan bahwa jang harus ditentang sekarang bukannja industri dan perdagangan jang diselenggarakan oleh kapitalis nasional, tetapi jang harus ditentang jalah ekonomi imperialis dan feodal. Penghapusan sistim ekonomi imperialis dan feodal adalah djuga sjarat untuk perkembangan ekonomi kapitalis nasional. Dibawah kekuasaan kaum imperialis dan feodal tidak mungkin kaum kapitalis nasional mengembangkan diri setjara wadjar. Kaum Komunis sudah tentu akan lebih mengutamakan ekonomi negara dan membantu ekonomi individuil Rakjat pekerdja, tetapi disamping itu proteksi dan fasilitet harus diberikan kepada kapitalis nasional untuk berkembang dalam batas² jang tak dapat menguasai kehidupan Rakjat dan negara. Mengenai soal tanah harus dilaksanakan prinsip tanah untuk petani.

Demikianlah pendirian pokok kaum Komunis Indonesia tentang pelaksanaan tuntutan² Revolusi Agustus. Demikianlah pokok² program umum PKI jang setjara lengkap dimuat dalam Program jang disahkan dalam Kongres Nasional ke-V PKI. Sekarang mendjadi djelas bahwa dengan program umumnja PKI telah memperlengkapi tugas dan sembojan Revolusi Agustus. Sekali lagi perlu diterangkan bahwa pada waktunja PKI bersedia untuk merundingkan program ini dengan partai² dan golongan² demokratis lainnja, dengan pengertian bahwa PKI bersedia untuk menerima perubahan dimana perlu, untuk mengurangi dan menambahnja dengan tudjuan jang satu: menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus jang bersifat nasional dan demokratis sampai ke-akar²nja.

Berkat sukses perdjuangan Rakjat Indonesia, perdjuangan PKI dan partai² demokratis lainnja jang ditjapai sedjak Kongres Nasional ke-V PKI bulan Maret 1954 sampai sekarang, ada bagian² dalam program umum PKI jang sudah tidak tepat lagi, misalnja bagian supaja melepaskan Indonesia dari Uni Indonesia-Belanda, supaja mengembalikan MMB dari Indonesia, supaja membatalkan persetudjuan KMB dan supaja ada hakpilih bagi warganegara jang sudah mentjapai umur 18 tahun. Bagian² jang sudah lewat waktu demikian ini sudah tentu tidak perlu dipropagandakan lagi, dan sudah tentu pula djika bagian jang dipandang kurang dalam program umum ini harus ditambah, sedangkan jang tak begitu tepat harus diperbaiki. Hal ini harus mendjadi perhatian semua anggota dan terutama propagandis² PKI.

Program Umum ini djika dibanding dengan program masadepan atau program maximum sistim sosialis dan komunis, adalah program minimum. Tetapi djika dibanding dengan program chusus atau program tuntutan, program umum ini adalah program djangka pandjang.

Tuntutan² Sekarang

Diatas sudah dikatakan, bahwa berdasarkan program umum kita djuga sudah menjusun tuntutan² untuk waktu sekarang. Pada seluruh tingkat revolusi nasional dan demokratis, pada seluruh masa sebelum tuntutan² Revolusi Agustus diselesaikan sampai ke-akar²nja, program umum kita, program Demokrasi Rakjat kita, pada pokoknja tidak akan berubah. Sebelum terlaksana tuntutan² Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja kaum Komunis dan simpatisan² Komunis terus akan mempropagandakan program umum kita. Adalah lain halnja dengan program jang bersifat tuntutan. Program tuntutan kita ber-ubah² sesuai dengan perubahan dan perbedaan keadaan dalam berbagai tingkat ketjil jang berlaku dalam tingkat besar dari revolusi nasional dan demokratis.

Sedjak kita mempunjai program tuntutan seperti jang dimuat dalam Program PKI jang disahkan oleh Kongres Nasional ke-V Partai; kita pernah mengalami keadaan dimana di Indonesia masih ada MMB dan dimana misi militer ini sudah tidak ada lagi, dimana belum ada dan dimana sudah ada pemilihan umum untuk Parlemen dan Konstituante, dimana Partai menjokong pemerintah (Ali Sastroamidjojo ke-1 dan ke-2) dan dimana Partai beroposisi (terhadap kabinet Burhanuddin Harahap), dimana hak² demokrasi sangat sempit dan dimana hak² ini agak luas, dimana Indonesia masih terikat oleh Uni Indonesia-Belanda dan dimana Uni sudah dibatalkan, dimana masih ada persetudjuan KMB dan dimana sudah tidak ada lagi persetudjuan jang berat sebelah ini. Perubahan dan perbedaan keadaan menjebabkan kita mengubah program tuntutan kita disana-sini.

Demikian pula tuntutan² kita berbeda berhubung dengan keadaan dimana dan untuk apa tuntutan² kita adjukan. Tuntutan² kita jang dikemukakan sebagai program pemilihan umum (Program Pemerintah Koalisi Nasional) berbeda disana-sini dengan program jang kita perdjuangkan dalam „Kongres Rakjat Seluruh Indonesia", demikian djuga tuntutan² jang kita adjukan kepada kabinet BH jang reaksioner berlainan dengan tuntutan² jang kita adjukan kepada kabinet Ali Sastroamidjojo jang agak madju.

Walaupun program tuntutan kita ber-ubah² berhubung dengan keadaan, tempat dan waktu, program umum kita adalah tetap, ketjuali beberapa bagian ketjil jang sudah lewat waktu jang dianggap tidak perlu dipropagandakan lagi. Program tuntutan kita mengalami perubahan², tetapi ia tetap disusun dengan berpedoman kepada program tuntutan jang sudah disahkan oleh Kongres Nasional ke-V Partai, dan tugasnja djuga tetap jaitu untuk mempersatukan Rakjat dan untuk memenuhi tuntutan² ekonomi dan politik Rakjat jang sangat terbanjak pada tingkat² ketjil dalam tingkat besar dari revolusi nasional dan demokratis.

Berkat hasil² perdjuangan Rakjat, perdjuangan PKI dan Partai² demokratis lainnja, beberapa bagian dari program tuntutan jang disahkan dalam Kongres Nasional ke-V Partai sudah terlaksana, misalnja bagian jang mengenai pemilihan umum untuk Konstituante, tentang soal melepaskan Indonesia dari Uni Indonesia-Belanda dan tentang mengirim kembali MMB. Tentu sadja bagian² jang sudah lewat waktu ini tidak perlu dituntutkan lagi, sedangkan jang sudah mungkin, walaupun tidak tertjantum dalam Program PKI, supaja dituntutkan dan jang kurang tepat harus dibikin tepat.

Dewasa ini, Rakjat Indonesia berada dalam keadaan sbb.:

(1) Dengan dibatalkannja persetudjuan KMB, Rakjat Indonesia sudah mendapatkan kemerdekaan politik di 80% wilajah negerinja, sedangkan di Irian Barat jang merupakan 20% wilajah Indonesia belum ada kemerdekaan politik bagi Rakjat Indonesia, karena Irian Barat masih sepenuhnja dikuasai oleh kolonialisme Belanda; dilapangan ekonomi Indonesia masih sangat terbelakang dan sama sekali belum merdeka, karena masih bertjokolnja sisa² feodalisme dan masih berkuasanja kaum kapitalis besar asing; negeri² imperialis jang dipelopori oleh radja² perang Amerika berusaha keras untuk menarik Indonesia kedalam blok militer; (2) Rakjat Indonesia sangat membutuhkan persatuan dan sangat membutuhkan pelaksanaan perubahan² demokratis guna memperluas dan memperkuat persatuan nasional untuk merebut kemerdekaan ekonomi jang lebih besar dari tangan kaum kapitalis besar asing, untuk memasukkan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia dan untuk mentjegah masuknja Indonesia kedalam blok militer; (3) pemimpin² Masjumi-PSI jang berkepalabatu dan orang² reaksioner lainnja berusaha untuk memetjahbelah persatuan Rakjat dengan mendjalankan politik diktatur anti-Komunis dan menentang diadakannja perubahan² demokratis, terutama dengan djalan mempersempit kebebasan² demokratis untuk Rakjat dan organisasi² Rakjat, djuga dengan djalan melindungi dan membantu gerombolan DI-TII.

Apakah tuntutan² PKI dan tuntutan² Rakjat Indonesia dewasa ini, dalam keadaan² seperti sekarang ini?

Sesuai dengan Program PKI, sesuai dengan perimbangan kekuatan dan dengan keadaan jang berlaku sekarang, tuntutan² dibawah ini adalah tuntutan² Rakjat Indonesia jang paling mendesak, adalah tuntutan minimum dan tuntutan jang tepat.

*

Mobilisasi dan koordinasi seluruh kekuatan nasional untuk merebut kemerdekaan ekonomi jang lebih besar, untuk merebut Irian Barat dan untuk menjelamatkan perdamaian di Asia dan didunia.

Kalahkan politik anti-persatuan dan politik diktatur anti-Komunis dari sebagian pemimpin² Masjumi-PSI untuk pembentukan Pemerintah Koalisi Nasional dimana „4-Besar" (PKI, PNI, NU, Masjumi) dan partai² lain ikut didalamnja;

Beri kebebasan demokratis jang se-luas²nja kepada Rakjat dan organisasi² Rakjat dan batalkan semua undang² jang membatasi kebebasan gerakan patriotik;

Bentuk Undang² Dasar jang sesuai dengan semangat, djiwa dan sifat Revolusi Agustus 1945;

Djamin semua hak dan kebebasan kaum buruh dan pegawai negeri untuk membela kepentingan²nja jang sah dan batalkan

semua undang² dan peraturan² jang bersifat melarang atau membatasi hak mogok kaum buruh dan pegawai negeri;

Sokong kaum penganggur dan larang pemetjatan se-wenang²;

Perbaiki keadaan kaum tani dengan mewadjibkan tuantanah² menurunkan sewatanah, dengan mewadjibkan lintahdarat² mendaftarkan diri dan menurunkan bunga uang pindjaman, dengan meringankan padjak² negara dan dengan menghapuskan tunggakan padjak bumi;

Perbaiki nasib buruh tani dan perlindungi hak kaum tani penjewa tanah, beri pindjaman jang berbunga rendah kepada petani² miskin dan bantu petani² mengorganisasi diri untuk mengembangkan produksi pertanian;

Hapuskan setoran² paksa kaum tani, hapuskan sistim pologoro dan rodi serta perbaiki nasib pamongdesa;

Sahkan milik kaum tani atas tanah jang dulunja milik perkebunan² asing tetapi jang sudah lama dikerdjakan oleh kaum tani, dan larang perampasan tanah tersebut oleh fihak perkebunan asing;

Berikan dan bagikan dengan tjuma² tanah² kosong jang tak dikerdjakan kepada kaum tani tak-bertanah dan tani-miskin;

Djamin hak kaum tani dan organisasi² tani dalam menentukan sewatanah kaum tani jang disewa untuk ditanami rosela, tebu dan tembakau oleh perusahaan asing atau oleh siapapun;

Beli tanah² partikelir dengan harga dan tjara pembajaran jang ditentukan oleh pemerintah dan bagikan tanah² sawah dan ladang bekas tanah partikelir itu kepada kaum tani tak-bertanah dan tani-miskin;

Adakan djaminan pasar, perlindungan dan keringanan padjak bagi pengusaha² ketjil;

Bantu para nelajan dengan modal dan alat penangkap ikan serta perbaiki upah dan turunkan setoran buruhnelajan;

Adakan persiapan² jang pantas dalam melaksanakan transmigrasi, berikan tanah jang tjukup dan baik serta bantuan kredit dan alat² kerdja bagi para transmigran;

Tindas dan basmi gerombolan „Darul Islam" dan gerombolan² teroris lainnja;

Beri hak kepada kaum tani untuk dengan latihan dan pimpinan TNI mengangkat sendjata membela diri terhadap gerombolan

„Darul Islam" dan gerombolan² teroris lainnja jang membunuh kaum tani dan jang menghantjurkan desa²;

Beri bantuan kepada kaum pengungsi jang menjelamatkan diri dari gerombolan² teroris;

Adakan perbaikan sjarat hidup bagi para pradjurit dan perlakuan² istimewa terhadap pasukan², perwira² dan anakbuah² tentara jang sungguh² menindas dan membasmi gerombolan „Darul Islam" dan gerombolan² teroris lainnja;

Djamin pekerdjaan dan pendidikan kedjuruan bagi para bekas pedjuang bersendjata (veteran);

Hapuskan sistim swapradja dan adakan pemilihan² jang bersifat umum, rahasia dan bebas untuk DPRD² guna mendemokrasikan pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan desa, adakan perimbangan keuangan jang adil antara pusat dan daerah serta bantu perkembangan ekonomi daerah dan kebudajaan tiap² sukubangsa;

Hapuskan semua undang² dan peraturan² kolonial (Igo, Igob dll.) (3) untuk mendemokrasikan pemerintah desa;

Petjat dari djabatan² pemerintah pengchianat² bangsa, orang² reaksioner, penggelap² dan koruptor² dan supaja orang² ini dihukum, tidak perduli mereka anggota partai pemerintah atau bukan;

Tempatkan pada djabatan² pemerintah orang² jang bersedia mengabdikan dirinja kepada kepentingan Rakjat;

Adakan hubungan jang baik antara tentara dan Rakjat dan antara perwira dan anakbuah, singkirkan dari ketentaraan pengchianat² bangsa, koruptor² dan elemen² jang hendak merusak demokrasi parlementer dan mendirikan diktatur militer atau junta militer dinegeri kita;

Pertinggi panenan padi dan kapas dengan djalan menentukan kewadjiban² kepada pemilik² perkebunan asing untuk menanami sebagian dari kebunnja dengan padi atau kapas, dan dengan djalan memberikan bantuan jang berupa bibit, alat² pertanian, rabuk dan bimbingan teknis kepada kaum tani;

Perluas pembangunan industri nasional dan lindungi industri nasional terhadap persaingan barang² asing, adakan sistim tjukai jang bersifat melindungi dan kontrol harga barang² supaja tidak terus membubung;

Konsesi² tanah untuk pertambangan jang belum digunakan supaja segera ditjabut kembali dan dimana mungkin diusahakan oleh pemerintah sendiri;

Impor dan expor serta perusahaan² penting disegala lapangan harus sepenuhnja dikontrol oleh pemerintah;

Impor untuk keperluan negara dan expor barang² hasil perusahaan² negara supaja dilakukan langsung oleh pemerintah;

Plan Lima Tahun pemerintah tidak boleh memberatkan beban Rakjat, sebaliknja jang harus diberatkan jalah kapitalis² besar asing, tuantanah² dan hartawan² lainnja;

Djatuhkan hukuman jang berat kepada kakitangan Belanda dan siapa sadja jang melakukan gerakan² subversif dan jang mengadakan sabotase² di-djawatan² pemerintah atau di-lapangan² lain;

Tambah anggaran belandja untuk Kementerian „Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan", tambah djumlah sekolah dan gedung² sekolah, kembalikan gedung² sekolah jang dipakai untuk keperluan lain, djamin fasilitet² dilapangan pendidikan bagi murid² dan mahasiswa, perbaiki nasib guru dan pergiat usaha pemberantasan buta-huruf;

Hapuskan pendidikan kolonial serta laksanakan pendidikan nasional jang ilmiah dan kerakjatan;

Djamin kedudukan jang sama bagi wanita dan laki², dan diamin para pemuda dan anak² untuk mendapatkan pendidikan jang bermanfaat;

Adakan kesempatan kerdja jang lebih luas dan perlakuan² istimewa terhadap para ahli Indonesia jang dengan sungguh² bekerdja untuk kemadjuan ilmu dan kebudajaan;

Adakan gedung² atau rumah² untuk pertemuan² para seniman, untuk latihan² dan pertundjukan² kesenian;

Perbanjak klinik² pengobatan dan giatkan pemberantasan penjakit jang banjak terdapat dikalangan penduduk;

Batalkan pengakuan atas perdjandjian San Francisco dengan Djepang, tuntut penggantian kerugian jang adil dari Djepang dan lawan persendjataan kembali Djepang, karena ini membahajakan keamanan Indonesia dan perdamaian di Asia dan Pasifik;

Perhebat perdjuangan pembebasan Irian Barat dengan penjusunan kekuatan dalamnegeri dan dengan menarik solidaritet internasional;

Bantu Rakjat Indonesia jang berada di Irian Barat dalam mengorganisasi diri dan dalam semua bentuk perlawanannja terhadap pendudukan Belanda di Irian Barat;

Djalankan politik luarnegeri atas dasar mempertahankan perdamaian dunia, laksanakan putusan² konferensi Asia-Afrika dengan konsekwen dan lawan tiap² usaha jang mau menarik Indonesia kedalam blok perang dan agresi;

Luaskan hubungan ekonomi dan kebudajaan dengan semua negeri, tanpa memandang perbedaan sistim sosial dan politik, atas dasar kepentingan dan keuntungan bagi Indonesia, serta batalkan embargo keseluruhannja dalam perdagangan dengan Tiongkok.

*

PKI berpendapat bahwa tuntutan² diatas adalah tuntutan² jang sepenuhnja bisa dilaksanakan oleh pemerintah Ali Sastroamidjojo sekarang dan oleh pemerintah mana sadja jang menghendaki bantuan Rakjat, jang mau menempuh djalan kemerdekaan nasional, demokrasi, kemadjuan dan perdamaian.

Tuntutan² diatas pada pokoknja adalah sama dengan program chusus atau program tuntutan PKI kepada kabinet Ali Sastroamidjojo jang pertama, tuntutan² jang dirumuskan dan disahkan dalam Kongres Nasional ke-V PKI. Disana-sini diadakan perubahan², diadakan penambahan² dan bagian² jang sudah lewat waktu ditiadakan.

Program tuntutan diatas banjak jang sama dengan program kabinet Ali Sastroamidjojo jang ke-2 tetapi diformulasi lebih konkrit dan disana-sini lebih madju, terutama jang berhubungan dengan tuntutan² jang mengenai kebebasan² demokratis, mengenai perbaikan keadaan kaum tani, mengenai pendemokrasian alat² negara dan mengenai tuntutan² perbaikan ekonomi negeri. Mengenai politik luarnegeri boleh dikatakan hampir seluruhnja sama. Djika sudah ternjata bahwa program pemerintah Ali Sastroamidjojo ke-2 banjak persamaannja dengan tuntutan² PKI dan tuntutan² Rakjat pada dewasa ini, maka sekarang jang terpenting

jalah pelaksanaan program tersebut. Ini banjak tergantung pada kesungguhan fihak pemerintah dalam melaksanakan programnja dan pada kuatnja gerakan Rakjat dan persatuan Rakjat. Sudah tentu pelaksanaan program kabinet Ali Sastroamidjojo akan lebih lantjar djika dilaksanakan oleh Pemerintah Koalisi Nasional.

Program tuntutan diatas djuga banjak persamaannja dengan program „Kongres Rakjat Seluruh Indonesia" jang disahkan oleh Kongresnja jang pertama dalam bulan Agustus 1955. Kongres ini, sebagaimana dikatakan oleh Bung Karno, „mewakili bagian terbesar dari Rakjat Indonesia dan oleh karena itu Rakjat Indonesia supaja tunduk pada putusan² Kongres Rakjat".

Kenjataan bahwa tuntutan² PKI sekarang banjak persamaannja dengan program kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2 dan dengan program jang diputuskan oleh Kongres pertama dari „Kongres Rakjat Seluruh Indonesia", membuktikan bahwa tuntutan² PKI tersebut adalah sesuai dengan suara bagian jang sangat terbesar dari Rakjat Indonesia dan dengan opini umum di Indonesia. Oleh karena itu adalah sesuatu jang objektif djika PKI mendjadikan tuntutan² tersebut sebagai alas untuk berunding dan bekerdjasama dengan partai² lain, dengan golongan² dan perseorangan² jang anti-kolonialisme, jang demokratis dan patriotik. Djuga adalah objektif djika tuntutan² tersebut didjadikan dasar untuk berunding dalam pembentukan pemerintah, didjadikan tuntutan² kepada pemerintah jang berkuasa dan didjadikan sembojan² aksi massa. Bagi Rakjat di Irian Barat tuntutan² tersebut belum dapat didjadikan sembojan aksinja. Soal Irian Barat menghendaki pemetjahan tersendiri, dan disana jang terpenting jalah memperdjuangkan untuk adanja hak² azasi manusia, seperti kemerdekaan memeluk agama, berkejakinan, berfikir, memilih tempat tinggal dan surat menjurat, dan memperdjuangkan terwudjudnja hak² demokrasi seperti kebebasan berbitjara, menulis, berapat, berorganisasi, berpawai, berdemonstrasi dan mogok.

Mengenai beberapa soal dari program tuntutan diatas perlu ada pendjelasan. Dalam mendjelaskan soal² tersebut kita sekaligus akan mendjawab beberapa pertanjaan jang sering diadjukan kepada PKI dan akan mengkritik pendapat² sebagian orang jang

tidak tepat. Soal² jang perlu mendapat pendjelasan tersebut adalah sbb.:

1. Sikap terhadap kolonialisme Belanda

PKI berpendapat, karena kolonialisme Belanda sudah lama mendjadjah, memeras dan menghina Rakjat Indonesia setjara sangat kedjam dan kurangadjar, seluruh Rakjat Indonesia harus mengambil sikap jang lebih tegas dan lebih keras terhadap kolonialisme Belanda daripada terhadap imperialis² lainnja. Sikap demikian ini mendjadi keharusan jang lebih besar lagi berhubung dengan kekuasaan kaum kapitalis besar Belanda jang masih menguasai sebagian besar ekonomi Indonesia, berhubung kaum kolonialis Belanda sampai sekarang masih menduduki 20% wilajah Republik Indonesia, jaitu Irian Barat, dan masih melakukan kegiatan² subversif untuk merobohkan Republik Indonesia. Sudah pada tempatnja djika Rakjat Indonesia menganggap kaum kolonialis Belanda sebagai musuhnja jang nomor satu, dengan samasekali tidak melupakan untuk melawan bahaja jang datang dari kaum imperialis lainnja, terutama Amerika.

Adalah adil dan akan mendapat sokongan penuh dari Rakjat djika pemerintah Indonesia mengambil tindakan jang keras dilapangan ekonomi terhadap kaum kapitalis besar Belanda. Pada dewasa ini Rakjat Indonesia, PKI dan partai² demokratis lainnja menuntut supaja pemerintah Indonesia menghapuskan hutang Indonesia kepada Belanda menurut persetudjuan KMB, supaja pemerintah Indonesia bertindak jang keras untuk mengurangi keuntungan kaum kapitalis besar Belanda dan untuk membatasi pemindahan (transfer) keuntungan mereka keluarnegeri. Pemerintah harus mengoper semua perusahaan, bank, transpor, listrik dan telekomunikasi Belanda dengan tjara dan harga jang ditentukan oleh pemerintah menurut kemampuan negara. Mengenai tanah² konsesi untuk perkebunan dan pertambangan jang sekarang sudah habis kontraknja, supaja tidak diperpandjang lagi kontraknja dan kebun atau tambangnja supaja dioper oleh pemerintah. Kebun² Belanda jang tidak dirawat dengan pantas supaja djuga dioper oleh pemerintah. Tanah² jang sudah dikontrak oleh kapitalis² Belanda tetapi tidak dikerdjakan supaja diambil oleh pemerintah dan diberikan dengan

tjuma² kepada kaum tani miskin dan tani takbertanah. Tuntutan² ini adalah tuntutan² Rakjat jang kuat dalam hubungan merealisasi pelaksanaan pembatalan KMB.

2. *Kebebasan² demokratis untuk Rakjat dan organisasi² Rakjat*

Ini adalah tuntutan terpenting dari PKI kepada tiap² pemerintah. Adanja kebebasan² demokratis tidak hanja penting untuk PKI dan seluruh kekuatan progresif, tetapi djuga penting bagi seluruh bangsa kita. Orang bisa berbitjara tentang perdjuangan untuk merebut kemerdekaan ekonomi jang lebih besar, tentang memasukkan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia, tentang mengalahkan gerombolan² teror DI-TII dan tentang melaksanakan politik perdamaian, tetapi djika tidak ada kebebasan² demokratis bagi Rakjat dan organisasi² Rakjat untuk dapat menjatakan perasaan, fikiran dan hasratnja, maka semua pembitjaraan itu adalah omong kosong. Bung Karno sering mengatakan bahwa „politik jalah kekuasaan" dan kewadjiban Rakjat Indonesia jalah „membentuk kekuatan" („machtsvorming"). Bagaimana kekuatan akan dapat dibentuk kalau kepada Rakjat dan organisasi² Rakjat tidak diberikan kebebasan² demokratis jang seluas²nja. Sembojan „Irian Barat harus segera masuk kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia" tidak akan ada artinja djikalau Rakjat dan organisasi² Rakjat tidak diberi kesempatan se-luas²nja memperkuat dirinja dalam organisasi² dan untuk melatih diri dalam aksi². Ada sebagian orang jang berfikiran pendek mengira, bahwa pemerintah akan mempunjai kewibawaan djika berani mengerahkan alat²nja untuk bertindak keras terhadap demonstrasi² dan aksi² lainnja dari Rakjat.

Kenjataan², baik diluarnegeri maupun didalamnegeri, membuktikan bahwa tidak ada perbuatan „tangan besi" terhadap gerakan Rakjat jang demokratis jang menguntungkan fihak jang berbuat. Mulai Hitler sampai Hatta dan Sukiman mengalami kegagalan dengan politik „tangan besi" terhadap Rakjat. Politik „tangan besi" hanja memperbesar kebentjian Rakjat kepada tiap² pemerintah jang berbuat demikian, ada ataupun tidak ada Komunis jang memimpin perlawanan Rakjat. Politik „tangan besi" adalah daja terachir dari suatu penguasa jang bingung dan putus asa.

PKI mengusulkan kepada pemerintah dan pendjabat² pemerintah supaja dalam menghadapi aksi² Rakjat menempuh djalan berunding. Kehidupan berorganisasi Rakjat Indonesia sudah agak tinggi, oleh karena itu adalah mudah untuk berunding dengan Rakjat lewat pemimpin² organisasinja.

3. *Front Persatuan Nasional*

Front persatuan adalah sjarat untuk melaksanakan program tuntutan sekarang dan untuk melaksanakan tuntutan² Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja. Djuga dalam masjarakat sosialis front persatuan tetap diperlukan jaitu persatuan antara Komunis dan bukan-Komunis. Djadi teranglah, walaupun bagaimana besar dan banjaknja rintangan dari orang² jang berkepalabatu, terutama dari sementara pemimpin² Masjumi-PSI, PKI tidak akan henti²nja dan tidak akan djemu²nja bekerdja untuk front persatuan. PKI menghargai sembojan jang djuga diandjurkan oleh Bung Karno, jaitu sembojan tentang „kerdjasama kaum Agama, Nasionalis dan Komunis". Ini adalah sembojan jang tjotjok dengan kebutuhan jang mendesak dari Rakjat Indonesia sekarang, jaitu persatuan. PKI menghormati tiap² agama, tetapi PKI menentang digunakannja perbedaan agama untuk memetjahbelah persatuan nasional. Front persatuan jang diperdjuangkan oleh PKI bukan front persatuan jang berdasarkan keagamaan atau filsafat, tetapi jang berdasarkan kepentingan bersama seluruh Rakjat Indonesia pada masa jang tertentu.

Sebagaimana sudah dikatakan, kewadjiban PKI sekarang jalah bekerdja keras untuk mengembangkan kekuatan progresif, bersatu dengan kekuatan tengah dan mementjilkan kekuatan kepalabatu. Kaum Komunis tidak membantah bahwa memang ada pertentangan antara kekuatan progresif dan kekuatan tengah, terutama antara kaum buruh jang dihisap dengan kaum kapitalis nasional jang menghisap, antara PKI dan partai² burdjuasi nasional. Tetapi adalah keliru djika pertentangan ini dipertadjam. Sebaliknja, PKI berpendapat bahwa pertentangan² jang terdapat diantara kekuatan progresif dan kekuatan tengah, diantara kaum buruh dan kaum kapitalis nasional perlu dan bisa diselesaikan setjara berunding, setjara saling memberi konsesi, setjara saling menguntungkan. Dengan

demikian dapat ditjegah agar pertentangan antara kekuatan progresif dan kekuatan tengah tidak merugikan persatuan nasional, dan tidak menguntungkan kekuatan kepalabatu, kekuatan musuh² Rakjat, jaitu kekuatan komprador dan tuantanah jang bersekongkol dengan kaum imperialis.

Kaum Komunis berpendapat bahwa dalam keadaan seperti di Indonesia sekarang jang revolusioner bukan hanja klas proletar, tetapi djuga ada klas² dan golongan² lain. Kemerdekaan klas buruh tidak mungkin tertjapai kalau tidak ada kemerdekaan nasional, ini adalah satu hal jang njata. Disamping itu tiap² Komunis djuga berkejakinan bahwa front persatuan hanja bisa kuat djika berdasarkan persekutuan buruh dan tani dan dipimpin oleh klas buruh. Setengah orang berkeberatan dengan pendirian kaum Komunis ini dan bertanja: „Mengapa harus berdasarkan persekutuan buruh dan tani dan mengapa harus dipimpin oleh klas buruh?" Front nasional harus berdasarkan persekutuan buruh dan tani dan harus dipimpin oleh klas buruh, bukanlah keinginan subjektif kaum buruh dan kaum tani, dan bukanlah pula keinginan subjektif kaum Komunis. Adalah satu kebenaran bahwa kaum buruh dan kaum tani merupakan bagian jang terbesar dari Rakjat Indonesia dan sebagai klas atau golongan jang samasekali tidak mempunjai kepentingan untuk bersekutu dengan tuantanah dan imperialis. Klas buruh adalah klas jang berpandangan djauh, mempunjai semangat tidak mementingkan dirisendiri dan hanja mementingkan kepentingan umum serta paling konsekwen dan berdisiplin. Dalam tiap² perdjuangan kita membutuhkan pimpinan jang berpandangan djauh, tidak mementingkan dirisendiri, konsekwen dan berdisiplin. Front nasional, kalau tidak mau mengalami kegagalan, djuga harus mempunjai pimpinan klas jang demikian. Oleh karena itu sewadjarnjalah pimpinan djatuh pada klas buruh.

Kaum intelektuil revolusioner, tidak perduli dari mana asal klasnja, tidak perduli ia berasal dari burdjuasi nasional atau ningrat, tidak perduli ia berasal dari burdjuasi ketjil atau proletariat, mereka sama² bisa mengabdi kepentingan klas buruh, dan djika demikian mereka dimasukkan dalam kategori klas buruh, klas jang mempunjai kewadjiban sedjarah memimpin revolusi.

Burdjuasi ketjil kota, walaupun mempunjai sedikit milik, djuga

termasuk golongan jang menderita dan oleh karena itu merupakan sekutu proletariat jang dapat dipertjaja.

Berbeda dengan klas buruh, kaum tani dan burdjuasi ketjil kota, kaum burdjuis nasional karena hubungan dagang dan hubungan² lainnja merupakan klas dalam front nasional jang terdekat hubungannja dengan kaum imperialis dan tuantanah, walaupun setjara objektif mereka mempunjai sifat anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Sebagai klas penghisap, disamping mempunjai perusahaan dagang dan industri mereka djuga sering memiliki dan menjewakan tanah, djadi djuga menghisap kaum tani.

Djadi djelaslah, kalau kaum Komunis menginginkan front nasional jang berdasarkan persekutuan buruh dan tani dan jang dipimpin oleh klas buruh, samasekali bukan keinginan subjektif kaum Komunis dan samasekali tidak mengandung keinginan menghina burdjuasi nasional atau golongan² lain diluar kaum buruh atau diluar kaum buruh dan kaum tani. Sebaliknja, untuk kepentingan burdjuasi nasional sendiri, untuk perkembangan perekonomiannja, penting adanja front nasional jang berdasarkan persekutuan buruh dan tani dan jang dipimpin oleh klas buruh, karena hanja front nasional jang demikian jang dapat mengalahkan feodalisme dan imperialisme. Hanja kalau feodalisme dan imperialisme sudah dikalahkan maka burdjuasi nasional lebih mempunjai kesempatan untuk berkembang dan untuk mengabdikan diri kepada tanahair dan bangsa.

Untuk tidak mempertadjam pertentangan dalam kubu front persatuan, PKI tidak akan bertindak jang merugikan partai² lain jang demokratis. Tentu sadja djika partai² tersebut tidak berbuat jang merugikan kubu front persatuan. Kaum Komunis harus pandai membatasi diri dalam hal mengkritik utjapan² dan perbuatan orang² dari partai² jang demokratis. Utjapan² atau perbuatan² jang mungkin menusuk perasaan, tetapi sifatnja tidak penting, tidak perlu dikritik. Kaum Komunis hanja mengkritik utjapan² atau perbuatan² jang bersifat memetjah persatuan, memetjah kekuatan massa dan jang menundjukkan ke-ragu²an dalam melaksanakan politik anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Jang penting djuga ialah tjara mengkritik, harus benar² kena soalnja dan tidak mengumbar nafsu dan perasaan.

4. *Soal tanah dan gerakan tani*

Dalam program tuntutan² sekarang PKI tidak menuntut pensitaan atas tanah tuantanah dan pembagian tanah tersebut kepada kaum tani. Pada dewasa ini politik PKI jang terpenting untuk kaum tani jalah politik turun sewa (turun setoran) dan turun bunga. Dengan politik ini, disatu fihak PKI tetap memperdjuangkan kepentingan kaum tani, tetapi difihak lain memungkinkan ikutnja sebagian dari tuantanah, jaitu bagian jang agak madju untuk ikut memperkuat front persatuan dalam melawan kolonialisme, untuk ikut merebut kemerdekaan ekonomi jang lebih besar bagi Indonesia dan untuk mempertahankan perdamaian dunia. Tuntutan turun sewa dan turun bunga adalah tuntutan² jang sangat mendesak dan sangat adil serta tidak begitu berat untuk dapat dipenuhi oleh tuantanah dengan pensahan pemerintah, asal tuantanah dan pemerintah mempunjai sedikit rasa keadilan dan tidak lupa pada djasa² kaum tani selama Revolusi Agustus dan djasa² kaum tani sekarang dalam menghasilkan bahan makanan jang terpokok, jaitu beras. Djika dipenuhi tuntutan turun sewa dan turun bunga, apalagi djika disertai bantuan² untuk mengerdjakan tanah dari fihak pemerintah, maka tidak bisa tidak, sedikit atau banjak, akan meringankan penderitaan kaum tani dan ini akan menimbulkan kegembiraan bekerdja dikalangan kaum tani. Hal ini sangat penting dalam hubungan dengan soal memperbesar produksi beras, soal jang sangat urgen bagi Indonesia sekarang.

Disamping itu PKI djuga memperdjuangkan kenaikan upah bagi buruh tani.

Kaum Komunis Indonesia sudah dan terus akan mengutamakan pekerdjaan dikalangan kaum tani, jang berarti bekerdja dikalangan bagian terbesar dari Rakjat Indonesia, berarti memperkerat persekutuan buruh dan tani. Diatas se-gala²nja, djuga dikalangan kaum tani persatuan harus terus-menerus diperkuat.

Sikap PKI terhadap tanah² perkebunan asing jang tidak dikerdjakan berbeda dengan sikap terhadap tanah² tuantanah Indonesia. Pada waktu sekarang, PKI terus akan menuntut supaja tanah² perkebunan asing jang tidak dikerdjakan diambil kembali oleh pemerintah walaupun kontraknja belum habis, dan supaja tanah² itu diberikan dengan tjuma² kepada kaum tani tak-bertanah dan tani miskin. Untuk memperbesar produksi beras dan untuk meringankan beban kaum tani, PKI djuga menuntut supaja tanah² kosong jang dapat didjadikan tanah² pertanian dibagikan atau dapat dikerdjakan oleh kaum tani.

PKI akan bekerdja keras untuk mengorganisasi kaum tani dan memimpin kaum tani agar tanah² jang sudah mendjadi milik kaum tani sebagai hasil perdjuangannja terhadap perkebunan asing dan terhadap tuantanah² lainnja tidak djatuh lagi ketangan tuantanah. Untuk ini PKI akan menghidupkan kerdja gotongrojong dikalangan kaum tani atas dasar kepentingan bersama dan saling menguntungkan serta menuntut adanja bantuan² pemerintah kepada kaum tani agar dapat mengerdjakan tanahnja lebih baik, dapat mengembangkan keradjinan tangan, peternakan dan perikanan.

5. *Perekonomian nasional dan Plan Lima Tahun*

Dalam program kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2 maupun dalam program „Kongres Rakjat" ditjantumkan tentang penggantian ekonomi kolonial mendjadi ekonomi nasional. Ini adalah baik. Tetapi jang lebih penting adalah pelaksanaan program tersebut. Selama ini kita sering menemukan disalahgunakannja perkataan „ekonomi nasional" oleh sementara orang untuk memperkaja diri dan memperkaja partainja dengan merugikan kepentingan nasional, kepentingan seluruh bangsa. Orang² ini menjamakan arti „ekonomi nasional" dengan „ekonomi kapitalis nasional".

Sebagaimana sudah dikatakan diatas PKI sekarang tidak menentang pertumbuhan jang wadjar dari kapitalisme nasional, sebaliknja PKI memperdjuangkan supaja kaum kapitalis warganegara Republik Indonesia mendapat proteksi dan fasilitet dari pemerintah dalam melawan saingan kapitalis² besar asing. Tetapi, seharusnja istilah „ekonomi nasional" sekarang diberi arti jang lebih luas, jaitu ekonomi untuk kepentingan seluruh bangsa jang bebas dari kekuasaan kaum kapitalis besar asing, dimana ada djaminan peluasan sektor ekonomi negara dan adanja proteksi dan fasilitet kepada kapitalis² nasional. Diatas se-gala²nja ekonomi negara harus dinomorsatukan. Djadi adalah keliru sekali djika untuk kepentingan kapitalis² nasional digerowoti kekuatan ekonomi negara dengan

melalui saluran² birokrasi, dengan mendjalankan korupsi, dengan mengobral kredit dari bank negara kepada kawan separtai, padahal orang jang mendapat kredit itu belum tentu benar² pedagang atau industrialis. Djika hal ini diteruskan, maka jang dihadapi oleh Indonesia tidak lain daripada keruntuhan jang lebih dalam.

PKI berpendapat, djika misalnja ada perusahaan penting jang harus ditinggalkan oleh kapitalis asing, maka per-tama² perusahaan² penting jang mempengaruhi kehidupan ekonomi nasional harus dioper oleh negara dengan harga dan tjara pembajaran jang ditentukan negara berdasarkan kemampuan negara. Kalau ini tidak mungkin, maka harus ditempuh djalan milik bersama antara negara dan partikelir dengan tidak usah ada ketentuan bahwa negara harus mempunjai saham jang terbanjak, malahan djika keuangan negara tidak mengizinkan saham negara tjukup dalam bentuk djasa². PKI berpendapat, bahwa adalah merugikan kepentingan nasional dalam arti tidak memperkuat sektor ekonomi negara, djikalau perusahaan² penting dipegang oleh kapitalis² nasional, apalagi kalau kapitalis² nasional itu harus mendapat kredit dari negara buat mengoper perusahaan² asing.

Jang djuga berbahaja jalah usaha² sementara orang jang ingin membikin milik² negara seperti Radio Republik Indonesia, Perusahaan Film Negara, PTT dll. mendjadi perusahaan partikelir atau setengah-partikelir. Perbuatan ini tidak lain daripada usaha untuk memperlemah sektor ekonomi negara dan mengurangi atau meniadakan hak kontrol dan pimpinan langsung dari pemerintah. Usaha ini terang bertentangan dengan semangat dan tudjuan Revolusi Agustus, karena perusahaan² tersebut ketika revolusi direbut oleh kaum buruh dengan sembojan „Milik Republik Indonesia". Kita kuatir kalau usaha mempartikelirkan atau „me-jajasankan" djawatan² pemerintah ini akan dilandjutkan dengan „mempartikelirkan" atau „me-jajasankan" negara.

Pada pokoknja kewadjiban Rakjat Indonesia jalah mentjegah digerowotinja kekuasaan negara atas djawatan²nja atau atas perusahaan² jang sudah dimilikinja dan dengan sekuat tenaga memperbesar kekuasaan negara atas perusahaan² jang penting dan memperluas djawatan²nja. Usaha untuk mempartikelirkan milik² negara sering diberi alasan supaja dapat menaikkan upah buruh atau

pegawai agar mendekati kebutuhan kaum buruh atau pegawai. Dengan alasan ini diharapkan politik mempartikelirkan milik² negara akan mendapat sokongan dari kaum buruh atau pegawai. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan kaum buruh haruslah ditjarikan djalan lain, jaitu djalan jang tidak hanja memberi pemetjahan untuk satu atau beberapa perusahaan atau djawatan, tetapi untuk seluruh buruh atau pegawai negeri. Kalau satu djawatan bisa dipartikelirkan, maka ada alasan bagi djawatan² lain untuk djuga dipartikelirkan ! Apa djadinja Republik Indonesia kalau semua djawatannja atau bagian² dari djawatannja sudah dipartikelirkan ?

Sekarang ada usaha untuk membikin Plan Lima Tahun bagi Indonesia. Tentang ini belum banjak jang diumumkan sehingga bagi kita belum terang apa jang akan dibangun dan dari mana modal akan didapat untuk melaksanakan Plan Lima Tahun tersebut. PKI, sebagai Partai jang tidak duduk dalam pemerintah, tidak ikut merentjanakan Plan Lima Tahun ini.

Menurut apa jang sudah dimuat dalam suratkabar² Plan Lima Tahun diadakan dengan maksud untuk membangun ekonomi nasional. Agaknja dapat dipertjaja bahwa Plan Lima Tahun diadakan untuk membangun ekonomi nasional. Djuga kaum Komunis akan menjokong Plan Lima Tahun djika ditudjukan untuk membangun ekonomi nasional.

Plan Lima Tahun tentu membutuhkan modal. Sekarang timbul pertanjaan : dari mana modal didapat ? PKI mengusulkan supaja modal untuk Plan Lima Tahun diambilkan dari keuntungan kapitalis² besar asing, dengan djalan mengurangi keuntungan² mereka lewat undang² atau peraturan² pemerintah. Disamping itu tuan-tanah² dan hartawan² Indonesia harus diwadjibkan memodali Plan Lima Tahun dengan ber-matjam² bentuk jang harus diatur dalam undang² atau peraturan² pemerintah. Djika untuk Plan Lima Tahun harus diadakan pindjaman atau penerimaan bantuan dari luarnegeri, maka PKI dapat menjetudjui asal tanpa ikatan apapun, misalnja tidak seperti jang sudah pernah kita alami dengan pindjaman dari Eximbank.

PKI djuga mengusulkan supaja Plan Lima Tahun tidak berakibat bertambahnja beban Rakjat pekerdja, supaja tidak menimbulkan padjak² baru bagi Rakjat pekerdja, sebaliknja Plan Lima

Tahun supaja membuka lapangan² pekerdjaan baru bagi para penganggur jang sangat banjak itu. Rakjat pekerdja Indonesia pada waktu sekarang sudah tidak sepantasnja lagi mendapat beban² jang lebih berat diatas pundaknja, karena sekarang sudah terlalu berat. Sebaliknja, kaum kapitalis besar asing, kaum tuantanah dan hartawan² lainnja sudah sewadjarnja memikul lebih banjak beban negara, karena mereka mendapat keuntungan dari menguras kekajaan alam dan dari menghisap Rakjat negeri ini. Adalah sangat masuk akal djika kaum imperialis, tuantanah² dan hartawan² lainnja misalnja diwadjibkan membeli sedjumlah obligasi negara sesuai dengan besarnja kekajaan masing² untuk membelandjai Plan Lima Tahun.

Selandjutnja usul PKI jalah supaja Plan Lima Tahun ditudjukan pada usaha² persiapan industri berat milik negara, dan supaja dalam hubungan dengan Plan Lima Tahun ini pemerintah membuka kesempatan jang se-luas²nja untuk melatih kader² teknik dengan melatih mereka didalamnegeri atau dengan mengirim mereka keluarnegeri, dengan tidak memandang perbedaan sistim politik dan sosial dari negeri² tempat pemuda² kita beladjar.

6. *Perdjuangan Parlementer*

Kaum Komunis Indonesia sudah lama berpendirian, bahwa djalan jang harus ditempuh oleh Rakjat Indonesia dalam menudju ke Sosialisme tidak harus persis sama dengan djalan² jang sudah ditempuh oleh Rakjat Rusia, Rakjat Tiongkok atau Rakjat² negeri² lainnja jang sekarang sudah mendjadi keluarga kubu Sosialisme. Dalam pidato peringatan ulangtahun PKI jang ke-32 (23 Mei 1952) di Djakarta, jang diutjapkan atasnama CC PKI, a.l. dikatakan: bahwa „tiap² bangsa akan melalui djalannja sendiri menudju ke Sosialisme, berdasarkan perkembangan keadaan nasionalnja, keadaan politik, ekonomi dan kebudajaannja". Djuga dikatakan „bahwa klas buruh bisa memenuhi kewadjiban sedjarahnja dalam negara Rakjat jang demokratis, dimana Dewan Perwakilan Rakjat dan badan² negara lainnja diperbarui, artinja diberi isi jang benar² demokratis serta disusun sesuai dengan keinginan Rakjat".

Ada sementara orang jang sampai sekarang masih berpendirian, bahwa ikutnja Partai Komunis dalam pemilihan umum dan adanja fraksi PKI didalam Parlemen hanja sekedar untuk beragitasi

dan berpropaganda sadja. Tetapi, tiap² orang jang mengetahui pekerdjaan anggota² PKI didalam Parlemen, baik Parlemen sebelum pemilihan umum maupun jang sesudahnja dapat menarik kesimpulan bahwa kaum Komunis bekerdja dengan sungguh² di Parlemen, tidak hanja mengenai pidato² dirapat pleno terbuka jang dapat didengar atau dibatja oleh publik, tetapi djuga dalam rapat tertutup, didalam rapat seksi² dan bagian² kaum Komunis mentjurahkan perhatiannja untuk memenangkan fikiran² dan konsep²-nja jang madju. Semuanja ini menundjukkan, bahwa PKI tidak memandang Parlemen hanja sekedar sebagai forum propaganda sadja.

Dalam program PKI jang disahkan oleh Kongres Nasional ke-V PKI bulan Maret tahun 1954 a.l. dikatakan bahwa „PKI telah mengambil bagian dan terus akan mengambil bagian jang paling aktif dalam perdjuangan parlementer. PKI, sedar sepenuhnja akan tanggungdjawab politiknja, mendjalankan pekerdjaan parlementer dengan penuh ke-sungguh²an".

Kaum Komunis menganggap pelaksanaan pemilihan umum pada achir tahun 1955 sebagai hasil jang penting dari perdjuangan Rakjat. Demikian djuga anggapan dari seluruh kaum progresif Indonesia.

Seluruh kaum progresif menjatakan dalam berbagai bentuk agar Parlemen baru setia pada tjita² Revolusi Agustus 1945, dan djika ini terdjadi segala derita Rakjat tidak akan sia².

Hanja orang² jang berkepalabatu jang tetap ngotot mengatakan, bahwa kaum Komunis hanja melihat satu djalan untuk mentjapai tudjuannja, jaitu peperangan dalamnegeri. Untuk memperkuat dalilnja, mereka meng-ungkit² peristiwa Madiun, sesuatu jang sekarang bagi kebanjakan orang sudah djelas duduk perkara jang sesungguhnja. Bukan rahasia lagi bahwa tindakan terhadap kaum Komunis di Madiun dalam bulan September 1948 pada mulanja samasekali tidak berdasarkan putusan Parlemen (BP KNIP), tetapi kemudian sesudah dilakukan pengedjaran² guna membasmi kaum Komunis, barulah digunakan Parlemen sebagai stempel untuk mensahkan perbuatan jang sudah dilakukan terlebih dahulu.

Selain daripada itu orang jang sedikit sadja mempunjai ingatan tidak mungkin melupakan peristiwa² sbb.: Ketika Pemerintah Suki-

man dengan razzia Agustusnja dalam bulan Agustus 1951 melemparkan pandji² demokrasi parlementer, bukankah PKI dan tenaga² demokratis lainnja, jang memungut pandji² tersebut dan mengibarkannja kembali? Ketika terdjadi peristiwa 17 Oktober 1952, dimana sistim parlementer Indonesia mengalami krisis jang dalam, dengan adanja pertjobaan perebutan kekuasaan dari luar Parlemen, bukankah kaum Komunis berdiri dibarisan depan dalam mempertahankan sistim demokrasi parlementer ? Politik PKI jang mempertahankan sistim demokrasi parlementer mendapat sokongan dari Rakjat. demokrasi dapat diselamatkan, sebaliknja pemerintah Sukiman jang memperkosa demokrasi parlementer terpaksa gulung tikar dan pertjobaan kaum militeris pada 17 Oktober 1952 mengalami kegagalan total.

Berhubung dengan adanja dalil tentang kemungkinan peralihan ke Sosialisme lewat parlemen seperti jang dimuat didalam laporan Comite Central PKUS kepada Kongres ke-XX PKUS, maka banjak diadjukan pertanjaan kepada kaum Komunis, apakah mungkin di Indonesia peralihan ke Sosialisme ditjapai dengan tjara damai, dengan lewat parlemen ? Tiap² Komunis harus dapat mendjawab pertanjaan ini.

Per-tama² harus dikemukakan, bahwa soal jang dihadapi Indonesia sekarang bukanlah soal peralihan langsung ke Sosialisme. Soal Indonesia sekarang jalah soal peralihan dari keadaan sekarang kesuatu sistim kekuasaan Rakjat jang demokratis, suatu kekuasaan jang dengan konsekwen melaksanakan tuntutan² Revolusi Agustus 1945, melaksanakan penghapusan kekuasaan imperialisme dan kekuasaan feodalisme sampai ke-akar²nja serta mengadakan perubahan² demokratis. Apakah mungkin peralihan dari keadaan sekarang kekeadaan seperti jang disebutkan itu berdjalan dengan damai, berdjalan lewat parlemen ?

Mengenai pertanjaan jang terachir ini djawab kaum Komunis jalah: itu adalah satu kemungkinan, dan kemungkinan jang dengan sekuat tenaga harus kita djadikan kenjataan. Djadi, kalau tergantung kepada kaum Komunis, maka bentuk jang se-baik²nja, bentuk jang ideal dari peralihan kesistim kekuasaan Rakjat jang demokratis, jaitu tingkat persiapan kesistim sosialis, jalah bentuk jang damai, bentuk jang parlementer. Djadi djika tergantung pada kaum Komunis, djalan damailah jang dipilih, karena kaum Komunis memang bukan pembunuh.

Sekarang timbul pertanjaan, apakah golongan² dan partai² lain akan membiarkan peralihan kesistim kekuasaan Rakjat setjara damai, setjara parlementer ? Pertanjaan inilah jang harus didjawab oleh partai² lain sebelum menuduh jang bukan² terhadap kaum Komunis. Kaum Komunis tidak mengetahui semua jang sedang difikirkan dan sedang direntjanakan oleh kaum reaksioner, oleh karena itu kaum Komunis harus senantiasa waspada dan tidak henti²nja membikin Rakjat waspada terhadap rentjana² busuk kaum reaksioner. Jang sudah terang, kaum reaksioner bermaksud djelek terhadap Rakjat.

Pengalaman di Guyana, pengalaman di Guatemala, pengalaman di Pakistan Timur dan pengalaman di Indonesia sendiri dengan pemerintah Hatta dan pemerintah Sukiman, menundjukkan bahwa bukan kaum Komunis, bukan kaum revolusioner, bukan kaum progresif jang tidak mau mentjapai tudjuan politiknja dengan melewati parlemen. Sebaliknja, adalah kaum reaksioner, adalah kaum kepalabatu, adalah kaum komprador dan tuantanah jang bersekongkol dengan kaum imperialis jang kuatir melihat kemadjuan² gerakan Rakjat dan kemadjuan² Partai Komunis, jang ketakutan bahwa parlemen dan badan² negara lainnja dapat diberi isi jang benar demokratis serta disusun sesuai dengan keinginan Rakjat. Karena kuatir pada kekuatan Rakjat maka mereka mendjadi nekad, mereka melemparkan pandji² demokrasi parlementer dan bertindak dengan „tangan besi".

Kaum Komunis harus waspada dan harus senantiasa mempersiapkan diri dan mempersiapkan Rakjat disegala lapangan agar kaum reaksioner tidak bisa menghalangi keinginan Rakjat untuk mentjapai perubahan² sosial jang fundamentil setjara damai, setjara parlementer. Tindakan se-wenang² kaum reaksioner terhadap Rakjat dan Partai Komunis hanja dapat dipatahkan dengan kekuatan Rakjat jang lebih besar daripada kekuatan kaum reaksioner dan dengan pimpinan jang teguh dari Partai Komunis jang bersatu dengan partai² demokratis lainnja.

Satu hal jang sederhana perlu diperingatkan, jaitu, djika kita ingin mengadakan peralihan kekeadaan jang lebih baik setjara

damai, setjara parlementer, maka per-tama² parlemennja harus ada. Anak ketjil bisa mengerti, bahwa peralihan lewat parlemen tidak mungkin djika parlemennja tidak ada. Djadi salahsatu kewadjiban jang penting dari kaum Komunis, kaum demokrat dan patriot² sekarang jalah melawan tiap² kekuatan jang ingin menghapuskan Parlemen, melawan pertjobaan² jang mau membikin Undang² Pemilihan jang tidak demokratis dan memperdjuangkan undang² pemilihan jang lebih demokratis daripada jang sudah kita punjai sekarang.

Dalam Program PKI djuga dikatakan „bahwa perdjuangan parlementer sadja tidaklah tjukup untuk mentjapai tudjuan membentuk suatu pemerintah demokrasi Rakjat". Ini adalah satu kebenaran, karena pekerdjaan PKI bukan pekerdjaan parlementer *sadja,* tetapi djuga dan terutama pekerdjaan² dikalangan massa kaum buruh, kaum tani, inteligensia, dan massa pekerdja serta massa demokratis lainnja. Djadi pada pokoknja, pekerdjaan PKI jalah mengubah imbangan kekuatan antara kaum imperialis, klas tuantanah dan burdjuasi komprador disatu fihak, dan kekuatan Rakjat difihak lain dengan djalan membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa. Inilah sjarat untuk mewudjudkan kepertjajaan massa terhadap pimpinan politik klas buruh jang dipimpin oleh pelopornja, sebagai sjarat mutlak untuk peralihan kesistim kekuasaan Rakjat jang demokratis. Selama pimpinan politik ada ditangan burdjuasi atau lebih² djika ditangan komprador dan tuantanah, adalah tidak pada tempatnja untuk mengatakan adanja peralihan kesistim kekuasaan Rakjat atau Sosialisme, walaupun dalam kekuasaan jang sedang berlaku ada parlemen dan ada didirikan beberapa industri berat disana-sini.

7. *Pemerintah Koalisi Nasional*

Dalam rangka program tuntutan sekarang, mengenai bentuk pemerintahan jang diperdjuangkan oleh PKI jalah Pemerintah Koalisi Nasional, jaitu pemerintah demokrasi lama jang agak madju. Keadaan sekarang menempatkan Rakjat Indonesia dalam kedudukan sbb.: disatu fihak belum ada sjarat untuk membentuk pemerintah Rakjat jang demokratis jang bersedia dengan konsekwen melaksanakan tuntutan² Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja.

tetapi difihak lain PKI dan seluruh kaum progresif tidak suka djika terbentuk pemerintah jang reaksioner. Oleh karena itulah, dalam keadaan sekarang PKI menjetudjui pembentukan suatu pemerintah demokrasi lama jang agak madju.

Diadjukannja sembojan tentang pembentukan Pemerintah Koalisi Nasional oleh PKI dalam kampanje pemilihan umum dan waktu pembentukan kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2 tidak hanja menunudjukkan kesediaan kaum Komunis untuk ikut bertanggungdjawab terhadap segala keadaan di Indonesia ber-sama² dengan partai² lain, tetapi ia djuga menundjukkan kesungguhan kaum Komunis dalam memperdjuangkan persatuan nasional.

Diadjukannja slogan tentang pembentukan Pemerintah Koalisi Nasional, artinja pemerintah dimana duduk kaum Komunis, dipandang oleh massa sebagai sesuatu jang tepat dan adil. Pengalaman disekitar pembentukan kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2 menundjukkan bahwa slogan tentang pembentukan Pemerintah Koalisi Nasional sudah diterima oleh massa jang luas, tidak hanja massa kaum buruh, kaum tani, burdjuasi ketjil kota dan intelektuil revolusioner, tetapi djuga slogan ini sudah diterima oleh sebagian dari pemimpin² partai² tengah. Djika dalam pembentukan pemerintah Ali Sastroamidjojo ke-2 kaum Komunis tidak ikut, itu adalah terutama karena politik kepalabatu dari sebagian pemimpin² Masjumi dan karena intrik² dari wakil² kaum imperialis jang ada di Indonesia, djadi bukan karena slogan mengenai pembentukan Pemerintah Koalisi Nasional tidak tepat.

Umum sudah mengetahui, bahwa walaupun PKI tidak ikut dalam kabinet, tetapi karena program pemerintah Ali Sastroamidjojo ke-2 pada umumnja dapat dikatakan agak madju, maka PKI menjokong pemerintah ini agar ia dapat melaksanakan bagian² jang madju dari programnja. Ini menundjukkan sifat dari politik PKI jang mendasarkan diri pada prinsip dan tidak pada soal dapat atau tidaknja kursi dalam pemerintahan.

Mungkin ada jang bertanja, apakah hakekat Pemerintah Koalisi Nasional jang sekarang diperdjuangkan oleh PKI ? Pemerintah Koalisi Nasional jang sekarang diperdjuangkan PKI pada hakekatnja adalah pemerintah demokrasi lama, tetapi dimana semua klas revolusioner, termasuk proletariat jang diwakili oleh PKI, ikut di-

dalamnja. Tetapi, ikutnja satu atau beberapa Komunis dalam pemerintah tidak mengubah watak demokrasi lama dari pemerintah.

Suatu pemerintah bisa dinamakan pemerintah koalisi nasional djika ia memenuhi dua sjarat: (1) program jang mewakili kepentingan Rakjat dan (2) *semua* klas revolusioner ikut didalamnja, termasuk proletariat. Djika tidak memenuhi dua sjarat ini maka bukanlah Pemerintah Koalisi Nasional, pemerintah jang mewakili semua klas revolusioner. Pemerintah koalisi nasional ada dua matjam, jaitu demokrasi baru dan demokrasi lama. Jang dituntut oleh PKI berdasarkan program tuntutan sekarang jalah Pemerintah Koalisi Nasional jang bersifat demokrasi lama, dan jang ditudju PKI berdasarkan Program Umumnja jalah pemerintah koalisi nasional jang berdasarkan demokrasi baru.

Mungkin ada orang jang bertanja: bagaimana sikap PKI selandjutnja terhadap kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2, jang bukan pemerintah koalisi nasional, karena didalamnja tidak duduk PKI sebagai wakil proletariat, sebaliknja elemen² kepalabatu duduk didalamnja? Sebagaimana sudah dikatakan diatas, PKI dapat menjokong program kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2, tetapi PKI tidak jakin bahwa komposisi kabinet akan dapat melaksanakan programnja dengan sungguh². Oleh karena itu, sikap PKI menjokong kabinet Ali Sastroamidjojo disertai dengan kewaspadaan jang se-tinggi²nja terhadap kemungkinan sabotase dari orang² berkepalabatu jang duduk dalam pemerintah.

Tidak duduknja PKI dalam kabinet Ali Sastroamidjojo mempunjai dua arti. Pertama, Masjumi berhasil mentjegah terbentuknja persatuan nasional jang lebih kuat dengan tidak bulatnja persatuan itu ditjerminkan dalam kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2. Kedua, tidak ikutnja PKI dalam kabinet Ali Sastroamidjojo berarti, bahwa PKI hanja bertanggungdjawab terhadap Rakjat mengenai tindakan² jang madju dari pemerintah, karena PKI hanja menjokong programnja jang madju. Sedangkan mengenai tindakan² pemerintah jang merugikan Rakjat, PKI tidak mungkin dipersalahkan karena PKI tidak duduk dalam pemerintah dan PKI tidak menjokong duduknja orang² berkepalabatu dalam kabinet.

Bagaimana selandjutnja, apakah PKI akan terus menuntut pembentukan Pemerintah Koalisi Nasional? Ja, pada krisis² kabinet, PKI akan menuntut terbentuknja Pemerintah Koalisi Nasional, karena ini adalah sebagian dari perdjuangan PKI untuk memperkuat persatuan nasional dan menundjukkan kesediaan PKI untuk ikut bertanggungdjawab terhadap semua keadaan Rakjat dan bangsa Indonesia.

Tetapi, tentang ikut atau tidak ikutnja PKI tergantung kepada dua soal: Pertama, Program jang mewakili kepentingan Rakjat; kedua, komposisi kabinet jang sanggup mendjamin pelaksanaan program. Walau diadjak sekalipun, PKI pasti tidak akan mau ikut dalam kabinet jang programnja merugikan Rakjat, dan djuga belum tentu akan ikut dalam kabinet jang meskipun programnja madju tetapi komposisinja tidak mendjamin pelaksanaan programnja.

Dalam hal tidak ikut dalam kabinet, sikap PKI ada dua matjam. Pertama, PKI menjokong dengan sjarat² djika programnja madju, tetapi komposisinja tidak mejakinkan akan dapat melaksanakan program; kedua, jalah beroposisi, djika programnja reaksioner atau sangat tidak memenuhi tuntutan² politik dan ekonomi jang paling minimum pada waktu jang tertentu.

8. *Masalah sukubangsa dan minoritet keturunan asing*

Indonesia adalah negara kesatuan, disamping terdiri dari banjak pulau djuga terdiri dari banjak sukubangsa, ada sukubangsa jang besar dan banjak jang ketjil, mulai dari jang puluhan djuta sampai jang hanja beberapa ribu orang. Masalah sukubangsa² ini harus mendapat pemetjahan. Pemetjahan masalah ini hanja mungkin djika memakai politik haksama bagi semua sukubangsa, tidak perduli sukubangsa besar atau ketjil.

Pelaksanaan politik haksama bagi semua sukubangsa adalah politik hak otonomi bagi sukubangsa² dibawah pemerintah pusat jang bersifat kesatuan. Hak otonomi berarti hak mengurus soal² sendiri bagi sukubangsa², misalnja berhak mengurus soal² politik dan ekonomi dalam lingkungan sukubangsa masing², berhak memakai bahasa masing² disamping bahasa Indonesia dan berhak mengembangkan kebudajaan masing². Politik otonomi sukubangsa inilah satu²nja politik jang dapat memetjahkan masalah sukubangsa².

Kenjataan sekarang menundjukkan, bahwa soal otonomi jang sekarang banjak dibitjarakan bukanlah otonomi jang berdasarkan sukubangsa, akan tetapi berdasarkan daerah administratif dan disebut „otonomi daerah". Pembagian administratif pemerintahan sekarang pada pokoknja masih meneruskan pembagian administratif zaman kolonial dahulu. Dalam rangka program tuntutan² sekarang, PKI dapat menjetudjui „otonomi daerah", djadi belum otonomi sukubangsa, asal untuk daerah² itu diadakan pemilihan DPRD² setjara demokratis, dan dibentuk DPD² berdasarkan perwakilan berimbang. Tetapi ini adalah pemetjahan sementara selama belum dapat dibentuk otonomi² berdasarkan sukubangsa.

Djadi, kita tidak boleh berhenti sampai pada „otonomi daerah" sadja. Bersamaan dengan menerima „otonomi daerah", kita harus menjelidiki dan menjimpulkan persoalan² sukubangsa², misalnja soal batas² daerah dimana sesuatu sukubangsa hidup, soal kesatuan bahasa dan kebudajaan dari tiap² sukubangsa dsb. Berdasarkan hasil² penjelidikan dan kesimpulan ini ber-angsur² kita mendirikan otonomi² berdasarkan sukubangsa², sesuai dengan keinginan sukubangsa² dan sesuai dengan kepentingan seluruh bangsa.

Dalam memetjahkan masalah sukubangsa kita harus mentjegah timbulnja perasaan tinggihati pada sukubangsa jang besar, kita harus mentjegah sukubangsa-besar-isme. Djuga kita harus mentjegah sukubangsa jang besar dan jang sudah lebih madju memandang rendah sukubangsa² lainnja dan memaksakan keinginannja sekalipun mungkin dengan maksud untuk memadjukan sukubangsa² lainnja itu. Pendeknja, tiap² sukubangsa harus madju dengan tiada paksaan dari sukubangsa lain. Sukubangsa jang sudah madju harus mempunjai perasaan berkewadjiban membantu sukubangsa² lain, tetapi pelaksanaan kewadjiban ini tidak boleh dengan memaksa. Sukubangsa jang besar harus menghormati sukubangsa² jang ketjil. Djikalau ada kekurangan² didalam pekerdjaan mengatur negeri maka jang per-tama² harus mengadakan selfkritik jalah sukubangsa jang besar dan jang sudah madju.

Dikalangan sukubangsa² ketjil kita harus mentjegah timbulnja sukubangsa-isme sempit, jang sifatnja tidak mau menerima segala sesuatu dari sukubangsa lain. Sukubangsa-isme sempit membikin lambat kemadjuan sukubangsa itu sendiri. Disamping itu sukubangsa-isme sempit mudah digunakan oleh kaum imperialis untuk mengadu-domba antara sukubangsa² dan untuk memetjahbelah persatuan Rakjat Indonesia. Ini berarti memetjahbelah dan sangat memperlemah kedudukan Republik Indonesia jang bersifat kesatuan. Djuga perasaan merasa ketjil-diri harus ditjegah dikalangan sukubangsa² tersebut, karena perasaan ini djuga merupakan perintang bagi kemadjuan sukubangsa² jang bersangkutan.

Disamping masalah sukubangsa² ada lagi masalah lain jang hampir sama persoalannja, jaitu masalah minoritet keturunan asing, misalnja keturunan Arab, Eropa dan Tionghoa. Golongan minoritet ini berbeda dengan sukubangsa², karena minoritet keturunan asing ini walaupun mempunjai bahasa dan kebudajaan sendiri, tetapi tidak mempunjai daerah tempattinggal jang tertentu. Oleh karena itu pemetjahan masalah minoritet keturunan asing lebih sukar. Tetapi ini tidak berarti bahwa soal ini tidak bisa dipetjahkan. Pemetjahan soal ini djuga hanja bisa dengan politik haksama, jaitu haksama bagi semua warganegara. Djadi soalnja jalah, dengan konsekwen mendjalankan apa jang tertjantum dalam UUD tentang haksama bagi semua warganegara.

Berhubung dengan pemetjahan masalah minoritet keturunan asing, disatu fihak harus ditjegah timbulnja nasionalisme sempit dikalangan majoritet warganegara „bumiputera". Jang terachir ini harus menghormati minoritet warganegara keturunan asing. Difihak lain harus dihilangkan rasa superior (tinggi hati) digolongan atas dari minoritet keturunan asing jang dizaman pendjadjahan memang dipupuk oleh kaum pendjadjah untuk dapat diadudomba dengan majoritet „bumiputera". Pendidikan patriotisme Indonesia, pendidikan tjinta tanahair dan tjinta Rakjat Indonesia, harus diperdalam dan diperluas dikalangan minoritet keturunan asing. Ini tidak berarti bahwa pendidikan patriotisme Indonesia dikalangan warganegara „bumiputera" sudah tidak diperlukan.

9. *Masalah kebudajaan, pendidikan dan inteligensia*

Masalah kebudajaan harus kita kupas dengan pisau jang bermata dua. Disatu fihak sasaran kita jalah fikiran jang mau menolak semua jang datang dari luar dan difihak lain sasaran kita fikiran jang tidak menghargai kebudajaan kuno kita sendiri. Kita

memang harus menolak kebudajaan reaksioner jang datang dari luarnegeri, karena kebudajaan ini tidak ilmiah dan meratjuni fikiran Rakjat. Tetapi, kebudajaan dari luar jang progresif, jang ilmiah dan kerakjatan harus kita terima se-banjak²nja untuk memadjukan kebudajaan kita sendiri. Dalam menerima kebudajaan asing kita tidak mendjiplak, tetapi mengolah dan menjesuaikannja dengan kebutuhan Rakjat Indonesia. Kebudajaan kuno kita jang progresif, jang ilmiah dan jang kerakjatan harus terus kita kembangkan, tetapi jang reaksioner, jang tidak ilmiah dan tidak kerakjatan, tidak seharusnja kita pupuk dan kita kembangkan. Dalam menerima kebudajaan asing dan dalam mengembangkan kebudajaan kuno kita harus kritis. Kita harus mengambil dan mengembangkan kebudajaan jang sesuai dengan kebutuhan Rakjat dan harus menolak dan tidak melandjutkan jang bertentangan dengan kebutuhan Rakjat. Tudjuan kita jalah untuk mentjiptakan kebudajaan Rakjat Indonesia Baru.

Untuk mentjiptakan kebudajaan Rakjat Indonesia Baru kita banjak membutuhkan pendidik² dan guru² jang bersemangat kerakjatan. Kita membutuhkan banjak sardjana, teknikus, insinjur, dokter, ahli, wartawan, sastrawan, penulis, dalang dan seniman Rakjat serta pekerdja kebudajaan Rakjat lainnja. Permintaan PKI kepada semua pekerdja kebudajaan jalah supaja mereka dengan setia mentjintai tanahair dan Rakjat. Permintaan PKI kepada Rakjat dan pemerintah jalah supaja menghargai pekerdja² kebudajaan kita dan menghargai djasa² mereka. Mereka adalah kekajaan Rakjat jang berharga. Indonesia baru jang merdeka, bersatu, demokratis, madju dan makmur tidak mungkin ditjapai dengan tiada pekerdja² kebudajaan jang bersemangat kerakjatan, sebaliknja pekerdja² kebudajaan tidak mungkin berkembang dan mekar djika tidak ada Indonesia Baru, dimana Rakjat adalah satu²nja sumber kekuasaan.

Sedjarah perdjuangan Rakjat Indonesia membuktikan bahwa semangat kerakjatan terdapat tjukup besar dikalangan kaum intelektuil dan para seniman Indonesia, ini misalnja dibuktikan oleh sedjarah perguruan nasional „Taman Siswa" dan „Perguruan Rakjat". Pamong² perguruan² ini, jang disamping kaum intelektuil djuga terdiri dari seniman², tidak hanja menundjukkan bahwa mereka mempunjai semangat kerakjatan jang kuat, tetapi djuga

berani hidup menderita untuk mendidik anak² Rakjat dan untuk memperdjuangkan tjita² Rakjat.

Salahsatu pekerdjaan jang terpenting dalam meninggikan tingkat kebudajaan Rakjat jalah pekerdjaan memberantas butahuruf dikalangan Rakjat jang masih ber-puluh² djuta djumlahnja dan mengadakan wadjib-beladjar jang tjuma² sampai tamat Sekolah Rakjat.

IV

Persatuan Dalam Partai Adalah Sjarat Mutlak Untuk Melaksanakan Tugas2 Partai

Dalam bagian pendahuluan laporan ini dikatakan, bahwa selama hampir satu tahun sedjak Sidang Pleno ke-III Comite Central, Partai kita sudah melakukan banjak pekerdjaan dan sudah dapat mengatasi banjak kesukaran, tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini masih banjak pekerdjaan jang harus dilakukan oleh Partai kita dan masih banjak kesukaran jang harus diatasi.

Selama masa tersebut diatas kita sudah mentjapai hasil² dalam melaksanakan tugas² jang ditetapkan dalam Sidang Pleno ke-III Comite Central, jaitu tugas memenangkan Partai dan front persatuan dalam pemilihan umum dan tugas mengembangkan kritik dari bawah serta meninggikan tingkat ideologi Partai. Sukses² jang sudah kita tjapai ini harus kita anggap sebagai pangkalan dari mana kita bertolak untuk menudju sukses² baru. Sukses² jang sudah ditjapai harus kita kembangkan setjara maksimal.

Partai kita sekarang menghadapi pekerdjaan jang tidak kalah beratnja daripada jang sudah kita kerdjakan. Kita harus terus memperbaiki pekerdjaan kita dikalangan kaum tani, menjempurnakan pekerdjaan dikalangan kaum buruh, bekerdja lebih sungguh² dikalangan pemuda, wanita, inteligensia dan massa pekerdja lainnja. Kita harus bekerdja lebih baik didalam Parlemen dan harus lebih pandai mengkordinasi pekerdjaan² parlementer dengan pekerdjaan² diluar Parlemen. Kita harus berdjuang keras untuk memenangkan Partai dan kekuatan² demokratis lainnja dalam pemilihan untuk DPRD², kita harus memenangkan konsep kenegaraan Revolusi Agustus 1945 dalam sidang² Konstituante jang akan

datang. Diatas se-gala²nja kita harus memperkuat persatuan nasional dan mengkonsolidasi Partai dilapangan ideologi, politik dan organisasi.

Walaupun berdasarkan hasil² pemilihan Konstituante kekuatan² jang menentang konsep kenegaraan Revolusi Agustus sudah gagal, tetapi bukanlah sudah hilang samasekali kemungkinan bagi kaum reaksioner untuk menentang sifat² demokratis dan kerakjatan dari Undang² Dasar Republik Indonesia jang akan dibikin oleh Konstituante nanti. Untuk memenangkan didalam Konstituante nanti konsep Undang² Dasar jang demokratis dan kerakjatan, sesuai dengan semangat dan tudjuan Revolusi Agustus, Partai kita harus bekerdja lebih keras. „Panitia PKI Perantjang Konstitusi Republik Indonesia" jang dibentuk dalam Sidang Pleno ke-II Comite Central sudah bekerdja dan sebagian dari hasil pekerdjaannja, jang berupa pokok² fikiran mengenai Undang² Dasar Republik Indonesia, sudah dapat kita gunakan sebagai bahan kampanje untuk pemilihan Konstituante jang lalu. Tetapi masih banjak jang harus dikerdjakan oleh Panitia ini dalam membantu Comite Central dan seluruh Partai kita untuk memenangkan konsep kenegaraan Revolusi Agustus.

Sesudah mengadakan perdjuangan jang berat dan sengit untuk memenangkan Partai dalam dua pemilihan umum jang lalu dan untuk mengatasi berbagai kesukaran, maka kewadjiban kita jang terpenting sekarang jalah memeriksa kembali barisan Partai, mentjari dan menemukan kelemahan² Partai agar dapat melikwidasi kelemahan² itu dan dapat memperbaiki serta memperkokoh Partai.

Partai kita sekarang sudah mendjadi Partai Komunis jang besar jang mempunjai anggota dan tjalonanggota lebih dari satu djuta. Tidak banjak Partai Komunis jang besar didunia, dan didalam djumlah jang tidak banjak itu termasuk PKI. Seharusnjalah tiap² Komunis Indonesia merasa bangga dan merasa mendapat kehormatan mendjadi salahseorang anggota PKI jang besar, Partai jang sedjak berdirinja selalu berdiri digaris paling depan dalam perdjuangan jang adil dari bangsa dan Rakjat Indonesia untuk kemerdekaan nasional, dalam membela kepentingan se-hari² dari klas buruh dan seluruh Rakjat pekerdja, dalam menggali dan mengembangkan kebudajaan jang tinggi dan tradisi jang revolusioner dari Rakjat Indonesia jang djaja. Kemenangan PKI dalam pemilihan²

umum jang lalu telah mengubah pandangan orang terhadap Partai kita. Sekarang sikap Partai kita mengenai tiap soal diharapkan orang dan diperhatikan orang, sedangkan orang² jang progresif mengharapkan tuntunan lebih banjak dari Partai kita. Oleh karena itu, mendjadi anggota Partai Komunis jang besar harus diartikan bertambah besarnja tanggungdjawab terhadap bangsa dan Rakjat, bertambah banjaknja pekerdjaan dalam membela kepentingan se-hari² dari Rakjat, bertambah besarnja keberanian, kewaspadaan, ketabahan, kebidjaksanaan dan keuletan jang harus dimiliki.

Sesudah kita mendjalankan rentjana² peluasan keanggotaan dan organisasi Partai, sehingga Partai kita sekarang mendjadi Partai jang besar, maka pekerdjaan dilapangan organisasi jang sangat mendesak sekarang ini jalah mengkonsolidasi hasil² rentjana peluasan itu. Kita harus bisa mengorganisasi dan mendidik anggota² Partai kita jang sudah berdjumlah lebih dari 1 djuta itu. Untuk ini pembagian tiap anggota dalam grup dan menghidupkan grup itu mendjadi sjarat mutlak. Para tjalonanggota jang sudah melalui masatjalonnja dengan baik, harus ditingkatkan mendjadi anggota.

Untuk dapat mengorganisasi djumlah anggota jang sudah banjak itu, dan untuk bisa lebih memenuhi tugas memimpin perdjuangan Rakjat, maka comite² Partai dengan segala bagian²nja harus lebih diaktifkan dan diperteguh lagi. Untuk ini konferensi² dan rapat² anggota untuk memilih anggota² comite dan kepala grup harus ditepati sesuai dengan Konstitusi Partai dan harus dipergunakan dengan se-baik²nja. Dengan menepati ketentuan² dalam Konstitusi Partai mengenai konferensi² dan rapat² periodik dari comite dan dari grup, maka hal ini sekaligus berarti mengembangkan demokrasi intern Partai dengan lebih baik lagi.

Sebagai sjarat untuk melaksanakan pekerdjaan Partai jang semakin luas dan besar ini, maka masalah keuangan mendjadi masalah jang lebih penting lagi. Untuk ini pengumpulan uang iuran harus dikerdjakan dengan lebih rapi lagi, begitu djuga usaha memperluas donasi dan usaha² jang produktif.

Sebagaimana sudah disimpulkan dan ditetapkan dalam Kongres Nasional ke-V tugas² urgen jang pokok dari Partai sekarang jalah tugas menggalang front persatuan nasional disamping tugas meneruskan pembangunan Partai, dua tugas jang satu dengan lainnja

tidak bisa di-pisah²kan. Oleh karena itu adalah sangat penting bahwa Partai kita bersatu fikiran mengenai front persatuan nasional dan meletakkan titikberat pendidikan didalam Partai mengenai soal ini. Satunja fikiran kita mengenai front persatuan nasional akan sangat membantu dalam meneruskan pekerdjaan membangun Partai. Perlunja pendidikan tentang front persatuan nasional lebih dirasakan lagi karena masih ada anggota Partai, berhubung dengan berbagai sebab, tidak menjetudjui atau kurang mejakini benarnja politik front persatuan. Ini misalnja dibuktikan oleh siaran Kawan Alimin tertanggal 25 Maret 1956, siaran jang sudah didjawab dan dikritik oleh Sekretariat Comite Central tertanggal 3 Djuli 1956. Tetapi bukanlah karena ada siaran Kawan Alimin ini maka kita perlu menitikberatkan pendidikan dalam Partai mengenai front persatuan. Ada atau tidak ada siaran Kawan Alimin, pendidikan didalam Partai harus dititikberatkan pada front persatuan, karena kemenangan Rakjat Indonesia adalah tergantung pada berhasilnja penggalangan front persatuan. Tidak ada front persatuan berarti tidak ada kemenangan bagi Rakjat Indonesia. Maka itu kita harus setia pada politik front persatuan nasional jang harus kita lakukan setjara aktif, dengan kesupelan jang maximal dan dengan sopan-santun.

Tetapi Partai kita tidak hanja harus bersatu mengenai front persatuan. Partai kita djuga harus bersatu dalam soal² lain. Persatuan didalam Partai hanja mungkin djika didasarkan atas persatuan fikiran, persatuan ideologi, jaitu fikiran atau ideologi Marxisme-Leninisme. Hanja djika ada persatuan fikiran dari orang² Komunis, barulah ada persatuan jang sungguh² didalam politik dan organisasi Partai Komunis, barulah ada persatuan didalam aksi² Rakjat jang dipimpin oleh Partai Komunis.

Persatuan dalam fikiran tidak djatuh dari langit atau tumbuh dari bumi. Tiap² Komunis ketika ia disahkan mendjadi anggota PKI memang sudah menerima Konstitusi dan Program Partai, berarti menerima pendirian, pandangan dan metode klas buruh. Tetapi tidak boleh dilupakan, bahwa mereka berasal dari ber-matjam² klas, bahwa lingkungan keluarga mereka sekarang djuga ber-matjam² dan bahwa tingkat kebudajaannja serta pengalaman revolusionernja ber-beda². Maka tidak heran, bahwa masih terdapat dan terus akan terdapat ber-matjam² fikiran dikalangan kaum Komunis. Djadi soal persatuan dalam fikiran dikalangan kaum Komunis adalah soal pendidikan bagi seluruh anggota Partai. Oleh karena itulah dalam sidang ini pada tempatnja kita mendiskusikan dan memutuskan soal² pokok mengenai pendidikan bagi seluruh anggota Partai, misalnja jang mengenai tingkat² dan bentuk² pendidikan jang harus diadakan berhubung dengan tidak samanja tingkat kebudajaan dan pengalaman revolusioner anggota² Partai, berhubung dengan isi pendidikan dan berhubung dengan soal menghubungkan teori Marxisme-Leninisme dengan praktek revolusi Indonesia. Berdasarkan pengalaman² kita mengenai pendidikan dalam Partai dimasa jang lalu dan berdasarkan kemungkinan² jang ada kita membikin rentjana pendidikan kita.

Dalam rentjana pendidikan kita harus dimasukkan soal pendidikan untuk tjalonanggota jang masih butahuruf, soal mendirikan Sekolah² Politik untuk tjalonanggota dan anggota baru jang diselenggarakan oleh Comite Resort, soal mendirikan Sekolah² Partai jang diselenggarakan oleh Comite Central dan Comite Daerah Besar, soal mendirikan Kursus² Partai jang diselenggarakan oleh Comite² Seksi dan Subseksi. Demikian djuga soal konferensi² teori dan seminar², soal pendidikan untuk kader² tinggi dan soal mempeladjari tulisan² klasik Marxisme-Leninisme.

Comite Central mempunjai pengalaman dalam menjelenggarakan Sekolah Partai dan comite² bawahan mempunjai pengalaman tentang menjelenggarakan Kursus² Partai. Pengalaman² ini harus disimpulkan dan digunakan untuk memperbaiki pendidikan dalam Partai selandjutnja.

Salahsatu pengalaman dalam menjelenggarakan Sekolah² dan Kursus² Partai jalah bahwa matapeladjaran terlalu banjak dan bahwa pendidikan tidak digabungkan dengan tugas² kongkrit Partai. Akibatnja jalah, bahwa kader² jang tamat Sekolah atau Kursus Partai tidak tahu menggunakan pengetahuan jang sudah mereka terima dalam pekerdjaan mereka se-hari². Oleh karena itu, di-waktu² jang akan datang matapeladjaran untuk Sekolah dan Kursus Partai supaja dibatasi pada jang sangat perlu dan supaja dihubungkan dengan tugas² kongkrit Partai, misalnja matapeladjaran tentang sedjarah perkembangan masjarakat, tentang soal² pokok

revolusi Indonesia, tentang pembangunan Partai dan tentang front persatuan nasional. Mengenai soal² lain jang dianggap perlu bisa diadakan dalam bentuk tjeramah.

Pengalaman jang lain dalam menjelenggarakan Sekolah² dan Kursus² Partai jalah, bahwa para pendidik atau propagandis kita tidak memberikan semangat Komunis dan pandangan-dunia Komunis kepada para siswa. Dalam klas sering terdapat semangat anak sekolah atau semangat murid, bukan semangat pedjuang revolusioner. Hal ini harus diatasi! Sekolah² dan Kursus² Partai kita bukan mendidik anak² sekolah atau murid², tetapi mendidik pedjuang² revolusioner. Jang terpenting bukannja mengadjarkan huruf dan teks jang bisa dilupakan, tetapi memberikan semangat dan pandangan-dunia Komunis jang tidak bisa dilupakan. Pendidikan harus membikin anggota² Partai dalam keadaan bagaimanapun tetap jakin, bahwa djalan revolusioner jang sudah dipilihnja adalah djalan jang se-tepat²nja, djalan hidup baru untuk masjarakat baru.

Ada kalanja situasi politik berkembang dengan sangat tjepat dinegeri kita. Dalam keadaan demikian pendidikan tentang situasi kepada seluruh anggota dan tjalonanggota Partai adalah sangat penting. Bahan untuk pendidikan situasi jalah harian² Partai, resolusi² serta dokumen² lainnja dari Partai. Hanja dengan adanja pendidikan tentang situasi anggota² Partai bisa mengetahui situasi setjara tepat, dan hanja djika mereka mengetahui situasi setjara tepat mereka bisa memberikan pimpinan kepada massa setjara tepat pula. Tjeramah tentang situasi harus mendapat tempat jang chusus didalam Sekolah² dan Kursus² Partai. Tetapi, pendidikan tentang situasi sadja tentu tidak tjukup, ia harus dihubungkan dengan program umum Partai, karena hanja dengan mengerti program umum Partai tiap² anggota bisa mengetahui dalam tingkat revolusi bagaimana ia berada dan kemana revolusi menudju.

Djadi djelaslah, bahwa kita harus dengan rapat menggabungkan pendidikan Partai dengan tugas Partai dalam masa jang tertentu. Pendidikan dalam Partai harus dipandang sebagai persiapan ideologis dan sebagai usaha untuk menghilangkan rintangan² ideologis agar tugas Partai dapat dilaksanakan dengan baik. Tjara beladjar harus dihubungkan dengan praktek, harus dengan konsekwen menentang dogmatisme, karena hanja dengan demikian tiap² anggota tahu tingkat revolusi dan kemana revolusi menudju.

Mengenai isi peladjaran adalah tidak sama berhubung dengan keadaan² kongkrit jang berbeda, tetapi hakekatnja adalah tetap, jaitu pendidikan tentang prinsip² fundamentil Marxisme-Leninisme, dan pendidikan mempertahankan pendirian, pandangan dan metode klas buruh. Pendidikan sematjam ini harus dilakukan dengan mengadakan perlawanan terhadap segala matjam ideologi jang tidak sah, misalnja menentang ketjenderungan kekiri dan kekanan dalam front persatuan, menentang ilusi bahwa dengan perdjuangan parlementer sadja tuntutan² revolusi nasional dan demokratis dapat dilaksanakan sampai ke-akar²nja, menentang ideologi tuantanah dan burdjuis dikalangan anggota² Partai. Semuanja ini dinamakan melaksanakan pendidikan Marxisme-Leninisme dan melaksanakan pendidikan tentang pendirian, pandangan dan metode klas buruh dengan melalui perdjuangan.

Pendidikan harus kita mulai dengan mendidik kader² tinggi Partai karena mereka adalah tulangpunggung dalam melaksanakan tugas² Partai. Dengan tiada tulangpunggung jang terdiri dari kader² tinggi Partai jang menguasai prinsip² fundamentil Marxisme-Leninisme, jang mempunjai pendirian, pandangan serta metode klas jang tepat tidak mungkin kita melawan ideologi² jang tidak sah didalam Partai, tidak mungkin kita mendidik seluruh anggota Partai dan tidak mungkin ada kesatuan dalam Partai dilapangan ideologi, politik dan organisasi. Disinilah pentingnja Sekolah² Partai jang diselenggarakan oleh Comite Central dan oleh Comite² Daerah Besar.

Pada waktu² jang tertentu didalam Partai harus diadakan gerakan pembetulan untuk mengatasi fikiran² burdjuis ketjil jang berkedok Marxisme-Leninisme, fikiran² subjektivisme dan sektarisme. Gerakan demikian ini harus diikuti oleh seluruh anggota Partai. Sekarang gerakan demikian itu sedang kita lakukan dengan mempeladjari „Keterangan 3 Djuli 1956", jaitu keterangan jang dikeluarkan Sekretariat Comite Central berhubung dengan siaran Kawan Alimin tanggal 25 Maret 1956. Dari gerakan mempeladjari „Keterangan 3 Djuli 1956" anggota² Partai dapat menarik peladjaran betapa berbahajanja djika seseorang anggota Partai terlepas samasekali dari kehidupan praktis massa dan djika seorang anggota

Partai sudah mendjadi sangat ambisius jang didorong oleh individualisme jang ber-lebih2an. Djuga dari gerakan ini dapat ditarik peladjaran bagaimana seharusnja anggota Partai mengkritik politik dan pimpinan Partai, peladjaran tentang bahajanja oportunisme kiri dalam penggalangan front persatuan dan peladjaran tentang tjara menghadapi anggota Partai jang membikin kesalahan. Diwaktu jang lain, sesuai dengan kebutuhan Partai, kita harus mengadakan gerakan pembetulan jang lain.

Dalam hubungan dengan bahaja terlepasnja kehidupan Partai dari massa, waktu sekarang perlu diperingatkan adanja tanda2 dikalangan fungsionaris2 Partai jang hendak memisahkan pekerdjaan Partai dengan pekerdjaan massa, se-olah2 fungsionaris Partai hanja bertanggungdjawab mengenai pekerdjaan jang „se-mata2 pekerdjaan Partai", sedangkan pekerdjaan massa dianggap hanja pekerdjaan kawan2 jang memimpin organisasi2 massa. Sebaliknja perlu djuga diperingatkan tentang adanja tanda2 dikalangan kader2 Partai jang bekerdja memimpin organisasi massa, se-olah2 pekerdjaan mereka bisa pisah dari pekerdjaan dan garis politik umum Partai.

Untuk melaksanakan garis politik umum Partai dikalangan massa, maka kader2 Partai jang bekerdja didalam organisasi massa harus sungguh2 berusaha untuk menguasai persoalan2 massa dan untuk memimpin massa. Memang tidak bisa ditjampur-adukkan antara pekerdjaan organisasi Partai dengan pekerdjaan organisasi massa, tetapi tiap2 soal massa adalah soal kaum Komunis, djadi tidak ada apa jang dinamakan „se-mata2 pekerdjaan Partai". Fungsionaris2 Partai, sebagaimana djuga semua anggota Partai harus mau dan harus bisa memetjahkan semua masalah massa jang dibawah pimpinannja.

Gedjala jang mau memisahkan pekerdjaan Partai dari massa dan jang mau memisahkan pekerdjaan massa dari Partai harus segera dibasmi dengan djalan mengadakan kritik dan selfkritik tentang soal ini dalam comite2 jang bersangkutan.

Soal lain jang perlu ditjanangkan disini jalah tentang adanja gedjala kekendoran ideologi dikalangan beberapa kader Partai dalam bentuk keinginan memetik hasil perdjuangan Partai dan Rakjat untuk kepentingan sendiri. Mereka mengira, bahwa dalam keadaan jang relatif damai seperti sekarang ini orang2 Komunis

boleh mem-bagi2 hasil perdjuangan Partai dan Rakjat untuk kepentingan sendiri. Sebagai satu tjontoh, misalnja, adanja kurang pengertian jang bertjampur dengan perasaan irihati atau tidak senang dari sebagian kader2 Partai mengenai pentjalonan dalam pemilihan Parlemen dan Konstituante, dimana nama mereka tidak ditjantumkan. Karena pengertian dan perasaan jang tidak tepat ini sampai ada jang me-nusuk2 anggota2 Partai lainnja supaja membentji pimpinan Partai jang mereka katakan „tidak adil". Pada pokoknja, mereka lupa bahwa mereka adalah anggota Partai klas buruh, mereka lupa bahwa klas buruh adalah berbeda dengan produsen ketjil jang berdasarkan kerdja individuil. Mereka lupa bahwa klas buruh tidak mempunjai alat produksi jang dimiliki perseorangan, bahwa klas buruh bekerdja setjara terpusat didalam pabrik2, bahwa klas buruh bekerdjasama dan mengadakan pembagian pekerdjaan dengan mempunjai tanggungdjawab perseorangan menurut bagian pekerdjaannja masing-masing, menggunakan mesin-mesin dan mendjalankan produksi setjara kolektif. Dalam produksi besar-besaran terpeliharalah kebiasaan kaum buruh untuk bersatu, saling membantu, berorganisasi dan berdisiplin. Sebagai anggota Partai klas buruh, tiap-tiap Komunis harus memiliki sifat-sifat klas buruh, jaitu sifat jang tidak mementingkan diri sendiri, mengakui harus adanja pimpinan jang memusat, mengakui perlunja ada kerdja kolektif dan pembagian pekerdjaan, perlunja hidup berorganisasi dan berdisiplin. Pendeknja, tiap2 Komunis harus berpandangan djauh, mempunjai semangat tidak mementingkan diri sendiri dan hanja mementingkan kepentingan umum, dan menuntut pelaksanaan masjarakat Komunis. Kepada kawan2 jang waktu2 belakangan ini mengalami kekendoran ideologi kita mengharap supaja mereka ingat kembali, bahwa mereka adalah anggota Partai klas buruh. Hal ini lebih penting lagi diingatkan karena diwaktu2 dekat jang akan datang Partai kita akan mengisi tempat2 didalam DPRD2, DPD2 dan kedudukan2 lainnja. Sudah tentu dimasa datang jang djauh ingat akan hal ini adalah lebih penting lagi.

Dalam hubungan dengan pendidikan dalam Partai adalah sangat penting bagi kita untuk memahamkan kesimpulan Kongres ke-XX PKUS mengenai penentangan terhadap pemudjaan perse-

orangan. Memang ada perbedaan jang penting mengenai akibat pemudjaan perseorangan didalam Partai jang sudah memegang kekuasaan negara dan jang belum. Di-negeri² dimana Partai sudah memegang kekuasaan negara, sudah menguasai alat² keamanan dan alat² negara lainnja, maka kekuasaan seseorang dengan mudah berakibat perbuatan se-wenang² jang luas terhadap kader² Partai dan terhadap kader² negara. Tentu tidak demikian halnja dengan Partai Komunis jang belum memegang kekuasaan negara, tetapi ini tidak berarti bahwa pemudjaan perseorangan tidak merupakan bahaja buat Partai Komunis jang belum memegang kekuasaan negara.

Dinegeri kita, berhubung masih kuatnja sisa² feodalisme dan masih luasnja produksi ketjil²an perseorangan, pemudjaan perseorangan mempunjai tanah jang subur, baik jang datangnja dari massa jang ingin memudja maupun dari tokoh² jang ingin dipudja. Djika pemudjaan perseorangan terdapat didalam Partai kita, maka ia akan sangat menghambat perkembangan Partai dan perkembangan gerakan Rakjat, ia akan menimbulkan birokrasi didalam Partai, ia akan menimbulkan kese-wenang²an dan akan menekan dajatjipta anggota² Partai dan massa.

Oleh karena itu, beladjar dari Partai Komunis Uni Sovjet, dalam hubungan pendidikan dalam Partai supaja kita tidak djemu²-nja menekankan bahwa Partai kita harus senantiasa setia pada prinsip sentralisme-demokratis, pada prinsip pemaduan pimpinan kolektif dengan tanggungdjawab perseorangan, bahwa Partai kita harus senantiasa mendasarkan diri pada kesedaran dan ketjerdasan massa Rakjat. Sentralisme adalah penting supaja Partai dan gerakan Rakjat terpimpin dengan baik, tetapi sentralisme tanpa demokrasi bisa berarti kese-wenang²an beberapa orang atau seseorang, bisa berarti menekan dajatjipta massa. Demokrasi adalah penting supaja anggota² Partai dan Rakjat aktif memperbintjangkan persoalannja sendiri, supaja dajatjipta massa bisa berkembang, tetapi demokrasi tanpa sentralisme, tanpa pimpinan jang memusat, bisa menimbulkan liberalisme, bisa menimbulkan kekatjauan dalam Partai dan didalam gerakan Rakjat. Djadi djelaslah, bahwa sentralisme-demokratis samasekali tidak menjangkal adanja pimpinan, tidak menjangkal adanja peranan perseorangan dan peranan pemimpin jang tunduk kepada kemauan kolektif. Tunduk kepada kemauan kolektif berarti mengorbankan kepentingan perseorangan djika kepentingan perseorangan ini bertentangan dengan kepentingan kolektif.

Bentuk pimpinan jang tertinggi dalam Partai Komunis jalah pimpinan kolektif. Meninggalkan pimpinan kolektif berarti meninggalkan garis massa, berarti melemahkan kesatuan dalam organisasi dan ideologi, berarti meninggalkan kehidupan praktis, dan akibatnja menimbulkan fikiran² dan perbuatan² jang subjektif. Meninggalkan pimpinan kolektif berarti melanggar sentralisme-demokratis. Partai kita dimasa jang lampau telah mengalami banjak kerusakan² dan telah mendjalankan berbagai kesalahan jang besar sebagai akibat dari ketidaksetiaan kepada prinsip sentralisme-demokratis dan kepada pimpinan kolektif. Dimasa datang akan terdjadi lagi hal demikian djika kita tidak setia kepada dasar sentralisme-demokratis dan pimpinan kolektif. Dalam hubungan dengan tjarakerdja kolektif saja anggap penting untuk mengingatkan seluruh Partai kita pada sebuah kesimpulan jang kita ambil didalam Sidang Pleno ke-III Comite Central jang bunjinja sbb.:

„Dalam Sidang Pleno ke-II Comite Central kita menekankan tentang pentingnja tjarakerdja kolektif. Pengalaman kita menundjukkan bahwa tjarakerdja kolektif baru besar artinja djika disertai oleh diskusi² jang kritis. Sjarat untuk dari baik mendjadi lebih baik, sebagai sudah dikatakan diatas, jalah mengamalkan kritik dan selfkritik. Untuk perkembangan Partai klas buruh dan untuk perkembangan gerakan Rakjat, kritik adalah satu keharusan. Kita harus mengutjapkan 'selamat datang' pada tiap² kritik. Oleh karena itu kita harus mendjalankan saling kritik. Ini tidak hanja bukti bahwa kita kuat, tetapi djuga bukti bahwa kita ingin mendjadi lebih kuat, karena oleh kritik kita mendjadi lebih mampu untuk bekerdja dan berdjuang. Dengan mengamalkan kritik dan selfkritik didalam Partai kepertjajaan Rakjat kepada kita akan mendjadi lebih besar, karena mengetahui bahwa dalam pimpinan Partai duduk orang² jang mempunjai kesungguhan, jang dengan sungguh² mempeladjari semua persoalan dan mentjarikan pemetjahannja dilihat dari sudut keharusan dan kewadjiban jang dihadapi oleh seluruh Rakjat".

Dalam sidang pleno kali ini baik diingatkan, bahwa sampai sekarang masih ada comite2 dan fraksi2 Partai jang menganggap bahwa satu2nja sasaran kritik dan selfkritik jalah sifat2 dan tingkahlaku perseorangan, dan tidak menganggap bahwa sasaran jang utama dari kritik dan selfkritik adalah pekerdjaan kader Partai. Akibat daripada ini jalah, bahwa sering timbul ketegangan2 jang tidak seharusnja diantara kader2. Supaja maksud kritik dan selfkritik tertjapai, jaitu mengoreksi pekerdjaan jang salah dan membikin lebih baik jang kurang baik, maka selandjutnja kritik dan selfkritik harus terutama disasarkan pada pekerdjaan. Dengan demikian kritik dan selfkritik tidak lagi mendjadi „barang musiman" jang hanja diadakan kalau ada pemilihan badan pimpinan dan kalau ada ketegangan2 dalam sesuatu badan kolektif, tetapi ia benar2 mendjadi satu dengan Partai sebagai satunja kuku dengan daging. Kritik dan selfkritik harus dilakukan dengan tulus-ichlas untuk memperbaiki diri dan membantu kawan memperbaiki diri dengan tudjuan mempersatukan fikiran didalam Partai. Inilah jang kita namakan perdjuangan ideologi didalam Partai jang berpangkal pada persatuan dan melalui kritik-selfkritik menudju persatuan.

*

Dengan Partai jang bersatu dalam ideologi, bersatu dalam politik dan organisasi, kita jakin bahwa Partai kita akan dapat melaksanakan tugas2nja untuk mewudjudkan tuntutan2 Rakjat sekarang dan selandjutnja untuk melaksanakan semua tuntutan Revolusi Agustus, untuk melaksanakan sembojan „Hapuskan imperialisme dan feodalisme sampai ke-akar2nja".

Tulisan *Tidak Ada Agresi Sovjet Di Hongaria* adalah pernjataan Kawan D.N. Aidit atasnama seluruh anggota PKI terhadap peristiwa berdarah di Hongaria. Pernjataan tersebut mengutuk pemberontakan reaksioner jang hendak mengembalikan kapitalisme di Hongaria dan jang didalangi oleh imperialis Amerika. Dengan tandas Kawan Aidit menjatakan bahwa bantuan Tentara Merah Uni Sovjet *bukan* agresi, melainkan bantuan jang tidak mementingkan diri sendiri terhadap perdjuangan jang gagahberani dari klas buruh serta Partai Buruh Hongaria jang membela hasil2 sosialis di Hongaria. Bersamaan dengan pernjataan itu telah dikirimkan pula kawat utjapan selamat Kawan D.N. Aidit kepada Kawan Janos Kadar, Sekretaris Pertama Partai Buruh Hongaria jang telah dapat menindas pemberontakan kontra-revolusioner tersebut.

TIDAK ADA AGRESI SOVJET DI HONGARIA

Di-tengah² kesibukan nasional Rakjat Indonesia untuk dengan sekuat tenaga membantu perlawanan Mesir terhadap invasi militer jang dilantjarkan bersama oleh tiga negara agresor Inggeris, Perantjis, Israel, kaum reaksi di Indonesia jang diwakili oleh pemimpin² Masjumi-PSI beserta persnja mulai me-niup²kan hasutan tentang apa jang mereka namakan „serbuan militer oleh Uni Sovjet" terhadap Hongaria. Mereka mengatakan bahwa Uni Sovjet mengadakan tjampurtangan bersendjata dalam urusan dalamnegeri Hongaria dan bahwa oleh karenanja Uni Sovjet bertindak jang bertentangan dengan prinsip² konferensi Bandung dan Piagam PBB.

Dengan hasutannja itu kaum reaksi hendak menuduh se-olah² Uni Sovjet, jang sekarang sepenuhnja berdiri dibelakang pemerintah dan Rakjat Mesir, djuga mendjalankan suatu politik kolonial jang hendak mendjadjah bangsa² lain dan dengan demikian mereka hendak menjamakan politik luarnegeri Uni Sovjet dengan politik luarnegeri Amerika Serikat, Inggeris, Perantjis, dll.

Dalam pada itu mereka djuga mengatakan se-olah² Persetudjuan Warsawa adalah tidak berbeda dengan pakt² agresif kaum imperialis seperti NATO dan SEATO.

Perlu terutama sekali ditegaskan bahwa berbeda dengan politik luarnegeri negara² imperialis AS, Inggeris, Perantjis, Belanda dll. jang bermaksud mendjadjah negeri² lain dengan setjara menguasai sumber² ekonomi dan kekuasaan politik dan militer di-negara² lain tsb. maka politik luarnegeri Uni Sovjet bersifat kerdjasama internasional dan perdamaian dengan semua negara didunia, besar maupun ketjil, berdasarkan lima prinsip, jaitu saling menghormati keutuhan wilajah dan kedaulatan, non-agresi, non-intervensi dalam urusan dalamnegeri negara² lain, persamaan dan saling menguntungkan dan ko-eksistensi setjara damai.

Lima prinsip ini jang djuga merupakan prinsip² Bandung, oleh negara² anggota Persetudjuan Warsawa telah diterima sepenuhnja

sebagai dasar hubungan antara negara² didunia (lihat Pernjataan Bersama negara² Persetudjuan Warsawa pada tanggal 28 Djanuari 1956). Dasar hubungan antar-negara ini adalah djuga berlaku sepenuhnja antara Uni Sovjet dan negara² demokrasi Rakjat termasuk Hongaria.

Hubungan antara Uni Sovjet dan negara² demokrasi Rakjat di Eropa Timur disamping didasarkan atas lima prinsip tersebut diatas djuga didasarkan atas kebutuhan dan tudjuan bersama untuk membela dan mendjaga keselamatan hasil² sosialis jang sudah ditjapai terhadap maksud² dan usaha² kontra-revolusi dari kaum imperialis. Untuk inilah negara² tersebut telah mengadakan persetudjuan Warsawa pada tanggal 14 Mei 1955.

Pembelaan hasil² sosialis di-negara² demokrasi Rakjat terutama sekali bersifat pembelaan militer terhadap intervensi dan agresi bersendjata dari negara² imperialis AS, Inggeris dll., baik dalam bentuk peperangan baru di Eropa seperti jang mereka rentjanakan maupun dalam bentuk kegiatan² teror, sabotase dan usaha² kontra-revolusi lainnja jang mereka djalankan terhadap negara² demokrasi Rakjat.

Umum sudah mengetahui bahwa pemerintah AS dengan resmi mengorganisasi kegiatan² agresif anti-negara di-negeri² ini berdasarkan keputusan kongres AS dibulan September 1951 jang telah menjediakan dana sebesar 100 djuta dolar dibawah Mutual Security Act. Maksud pokok dari gerakan imperialis itu adalah untuk meniadakan hasil² sosialis jang telah ditjapai di-negeri² tersebut.

Djadi adalah pemerintah AS dan lain² negara imperialis jang telah melakukan tjampurtangan dalam urusan dalamnegeri di Hongaria. Di-negeri² ini pemerintah memang telah melakukan kesalahan² dalam mewudjudkan Sosialisme dan sedang melakukan pembetulan atas kesalahan² tersebut. Sebagaimana kita lihat dari provokasi² imperialis di Berlin Timur pada tanggal 17 Djuni 1953 dan di Poznan pada tanggal 28 Djuni 1956, maka djuga di Hongaria kaum imperialis telah menunggangi keadaan ini dan menggunakannja untuk maksud² kontra-revolusi.

Dalam intervensinja itu, kaum imperialis telah melakukan kudeta di Hongaria melalui agen²nja didalam Partai Buruh Hongaria seperti Imre Nagy jang untuk maksud²nja itu telah mensalah-

gunakan Partai dan Pemerintah untuk memulihkan kembali kekuasaan kaum kapitalis dan tuantanah jang sudah digulingkan oleh Rakjat. Hal ini dapat diketahui dari tindakan²nja mendirikan dan mengembalikan kekuasaan partai² kaum kapitalis dan tuantanah jang didahului dengan memetjat panglima tertinggi Angkatan Perang Hongaria. Ini pada hakekatnja adalah sama dengan agresi AS di Guatemala, hanja dalam bentuk dan tjara jang lain jaitu di Guatemala mereka mengadakan serbuan militer dari luar sedangkan di Hongaria dari dalam.

Dalam menindas gerakan² subversif imperialis tersebut itu, pemerintah Hongaria dibawah pimpinan Perdana Menteri Janos Kadar telah menggunakan fasal 4 dari Persetudjuan Warsawa untuk meminta bantuan militer dari Uni Sovjet tersebut antara lain berbunji seperti berikut:

„Dalam hal serangan bersendjata di Eropa terhadap satu atau lebih peserta Persetudjuan ini oleh sebuah negara atau golongan negara jang manapun maka setiap peserta Persetudjuan ini dalam melakukan haknja untuk mempertahankan diri setjara individu atau kolektif sesuai dengan fasal 51 Piagam PBB akan segera membantu negara atau negara² jang diserang itu baik setjara individu maupun atas Persetudjuan dengan peserta Persetudjuan lainnja, dengan segala tjara jang dianggap perlu, termasuk djuga kekerasan sendjata. Peserta² Persetudjuan akan segera mengadakan konsultasi tentang tindakan² jang perlu jang harus diambil oleh mereka bersama² supaja memulihkan dan memelihara perdamaian dan keamanan internasional".

Berdasarkan hal tersebut diatas maka bantuan militer Uni Sovjet kepada Hongaria adalah sah dan tidak bertentangan dengan kemauan negeri² jang dibantu. Soalnja adalah membela dan mempertahankan hasil² sosialis. Berdasarkan Persetudjuan Warsawa Uni Sovjet berkewadjiban memenuhi permintaan tersebut dan menggunakan pasukan²nja untuk membantu pemerintah dan Rakjat Hongaria untuk mempertahankan negara demokrasi Rakjat jang sudah dibangunkan itu. Djadi, bantuan militer Uni Sovjet adalah dimaksudkan untuk melawan dan menggagalkan aksi² sabotase dan kontra-revolusi dari kaum imperialis Amerika, Inggeris dll.nja jang hendak menumbangkan kekuasaan demokrasi Rakjat jang sah dan

merestorasi kekuasaan kaum kapitalis dan tuantanah di-negeri² tersebut

Djelaslah pula bahwa tindakan² tentara Uni Sovjet di Polandia dan Hongaria bukanlah suatu agresi jang bermaksud hendak mendjadjah dan menanamkan kekuasaannja sendiri di-negeri² tersebut melainkan suatu bantuan militer jang bersifat defensif dengan maksud menggagalkan intervensi dan agresi bersendjata imperialis terhadap negara² tersebut. Dengan teratasinja keadaan di Hongaria dengan bantuan tentara Uni Sovjet berantakanlah rentjana kaum imperialis untuk membuka dua front peperangan sekaligus, front di Mesir dan front di Eropa Timur (Polandia dan Hongaria).

Ini berbeda sekali dengan penjerbuan tentara Inggeris-Perantjis-Israel terhadap Mesir jang memang merupakan suatu agresi karena ditudjukan untuk menumbangkan kekuasaan Republik Mesir jang merdeka dan berdaulat dan merestorasi kekuasaan Inggeris dan Perantjis atas daerah Terusan Suez. Tidak pernah ada satu kekuasaan di Mesir jang meminta kedatangan tentara Inggeris-Perantjis-Israel ke Mesir.

Sikap PKI terhadap kedjadian² ini adalah: menjokong pembelaan terhadap hasil² sosialis dan demokrasi Rakjat di Hongaria jang sekarang sedang dilakukan oleh kaum buruh dan Rakjat di-negeri² tersebut dibawah pimpinan Partai Buruh Hongaria dengan dibantu sepenuhnja oleh tentara Uni Sovjet. (1)

PKI menjerukan kepada pemerintah dan seluruh Rakjat Indonesia agar waspada terhadap usaha kaum reaksioner jang, sesuai dengan siasat kaum agresor imperialis, memang bermaksud menjelewengkan perhatian dan perdjuangan Rakjat Indonesia dari perlawanan anti-kolonial Rakjat Mesir terhadap agresi militer dari Inggeris-Perantjis-Israel.

Dengan ini ternjata bahwa tindakan orang² reaksioner jang duduk dalam pimpinan Masjumi dan PSI memang sedjalan dan semaksud dengan politik imperialis untuk melemahkan bantuan dan perlawanan Rakjat sedunia kepada Rakjat Mesir didalam membela negerinja terhadap agresi Inggeris-Perantjis-Israel. Semua orang tahu bahwa semua negeri kubu sosialis terutama Uni Sovjet, sepenuhnja berdiri dibelakang Rakjat dan pemerintah Mesir !

Djakarta, 6 November 1956

Artikel ini jalah tulisan Kawan D.N. Aidit untuk memperingati genap 30 tahun pemberontakan Rakjat jang heroik jang dipimpin oleh PKI melawan kolonialisme Belanda. Ditandaskan bahwa pemberontakan 12 November 1926 itu, selain merupakan landjutan dari kebiasaan memberontak Rakjat Indonesia terhadap ketidakadilan, adalah pemberontakan nasional jang pertama di Indonesia, pelopor pemberontakan2 nasional anti-imperialisme jang timbul kemudian.

Dalam memberikan arti politiknja dikemukakan dengan mejakinkan bahwa pemberontakan 1926 telah meningkatkan kesedaran politik Rakjat Indonesia, terutama kesedaran anti-kolonialisme; bahwa pemberontakan itu telah menundjukkan kepada Rakjat Indonesia bahwa kekuasaan Belanda bisa dibikin gojah dan bahwa Rakjat Indonesia mampu untuk memberikan perlawanan sampaipun djalan kekerasan; bahwa pemberontakan 1926 telah pula memberikan sumbangan penting bagi perdjuangan Rakjat sedunia melawan imperialisme.

12 NOVEMBER DAN PERDJUANGAN NASIONAL ANTI KOLONIALISME

Hari 12 November tahun ini adalah hari pemberontakan nasional anti-kolonialisme jang pertama, pemberontakan 12 November 1926, genap berusia 30 tahun. Pemberontakan 12 November merupakan tonggak sedjarah jang penting dalam perdjuangan pembebasan Rakjat Indonesia. Ia adalah pemberontakan nasional jang pertama terhadap kolonialisme Belanda dalam abad ke-20, pemberontakan pertama dalam zaman imperialisme, zaman dimana kapital-bank dan kapital-industri sudah berpadu mendjadi kapital-finans, pendeknja dimana kaum monopoli sudah menguasai kehidupan ekonomi dan politik Indonesia. Ia adalah pelopor pemberontakan2 nasional anti-imperialisme jang timbul kemudian.

Tetapi, pemberontakan 12 November bukan pemberontakan Rakjat Indonesia jang pertama kali. Sebelum pemberontakan ini sudah banjak pemberontakan2 lain jang bersifat lokal, baik sesudah orang2 Belanda datang maupun sebelumnja. Rakjat Indonesia adalah jang tidak pernah berhenti memberontak terhadap ketidakadilan, terhadap tiap2 penghisapan ekonomi dan penindasan politik. Tiap2 pemberontakan jang dilakukan oleh Rakjat Indonesia sedjak zaman perbudakan dahulukala selamanja berachir dengan adanja perubahan2 sosial. Pemberontakan 12 November adalah landjutan dari kebiasaan memberontak Rakjat Indonesia terhadap ketidakadilan dan djuga telah menimbulkan perubahan sosial dalam masjarakat Indonesia.

Sedjarah Indonesia adalah sedjarah pemberontakan2 Rakjat, sedjarah jang ditulis dengan darah Rakjat dan oleh pahlawan2 pemimpin pemberontakan. Eksploitasi ekonomi dan penindasan politik jang luarbiasa telah membikin kaum tani Indonesia memberontak melawan kekuasaan kaum feodal (radja2, bangsawan2 dan punggawa2), seperti misalnja pemberontakan2 terhadap Keradjaan Mataram ke-I (abad ke-8 dan ke-9), pemberontakan2 ter-

hadap Keradjaan Kediri (awal abad ke-13) dibawah pimpinan anak petani Ken Arok, pemberontakan² terhadap Keradjaan Singosari (achir abad ke-13), pemberontakan² dalam Keradjaan Madjapahit (abad ke-14 dan ke-15) dan pemberontakan² lainnja. Pemberontakan² ini memang hanja berhasil dengan mendjatuhkan radja jang satu dan menaikkan radja jang lain, tidak berakibat naiknja kaum tani kesinggasana kekuasaan. Tetapi ini tidak mengungkiri, bahwa pemberontakan² itu adalah pemberontakan kaum tani. Bukan keinginan subjektif dari radja² jang tidak puas atau dari pemimpin² pemberontakan jang menjebabkan timbulnja pemberontakan², tetapi perlawanan kaum tani terhadap eksploitasi ekonomi dan penindasan² politik feodal jang menjebabkan adanja pemberontakan². Pemberontakan² kaum tani gagal, tidak berachir dengan kemenangan kaum tani dan hanja berakibat pergantian radja belaka, adalah karena pada waktu itu tidak ada tenaga produktif jang baru, tidak ada hubungan produksi jang baru, tidak ada partai politik jang madju dan mampu memimpin kaum tani menudju kemenangan. Tetapi adalah tidak benar djika dikatakan bahwa pemberontakan² tani jang gagal itu samasekali tidak membawa sekedar kemadjuan sosial. Satu²nja kekuatan sosial jang dapat mendatangkan perubahan keadaan pada waktu itu hanjalah pemberontakan² kaum tani.

Dalam tahun 1496 datanglah orang² Portugis di Indonesia dibawah pimpinan Vasco da Gama jang bermaksud berdagang dan menjebarkan agama Kristen di Indonesia. Kaum tani Indonesia dibawah pimpinan radja² Indonesia mengadakan perlawanan sengit terhadap orang² Portugis. Walaupun kapal² dan persendjataan orang² Portugis pada waktu itu adalah djauh lebih unggul.

Pada tanggal 22 Djuni 1596 berlabuhlah armada Belanda terdiri dari 4 buah kapal dibawah pimpinan Cornelis Houtman dipelabuhan Banten. Maksud orang² asing ini datang ke Indonesia mula² hanja untuk berdagang, tetapi kemudian menantjapkan kakinja dengan menduduki Djakarta (tgl. 4 maret 1621 oleh Belanda dengan resmi dinamakan Batavia). Dari Djakarta Belanda meluaskan kekuasaannja: tahun 1641 Belanda menguasai Malaka, benteng Portugis di Asia Tenggara, dengan demikian Belanda mengontrol selat Malaka; tahun 1667 Belanda menguasai Makassar, dengan

demikian Belanda mengontrol Indonesia Timur; tahun 1667 Belanda menguasai pantai Utara pulau Djawa sampai ke Djawa Timur, dengan demikian Belanda menutup keradjaan Mataram dari laut; tahun 1692 Belanda menguasai Banten, dengan demikian Belanda mengontrol pintu Barat Indonesia.

Tetapi, apakah sesudah dalam abad ke-17 Belanda dapat mengontrol banjak bagian dari Indonesia berarti Belanda bisa dengan aman melakukan penghisapan ekonomi dan penindasan politiknja ? Samasekali tidak, kekuasaan Belanda telah menimbulkan banjak pemberontakan² dan peperangan² kemerdekaan seperti jang dipimpin oleh Sultan Agung Mataram, Sultan Ageng Tirtajasa, Hasanuddin, Trunodjojo, Untung Surapati, Diponegoro, Si Singamangaradja, Pattimura, dll. Adalah kurang tepat apa jang sering dikatakan, bahwa Indonesia pernah „350 tahun didjadjah Belanda". Kenjataannja tidak demikian ! Kita mengenal watak² bangsa kita, sebagai bangsa pedjuang dan pemberani, jang nenekmojangnja kira² 3.500 sampai 4.000 tahun jl. masih mengembara didaratan Asia. Karena tidak mau diperbudak oleh bangsa lain jang menjerbu, nenekmojang kita mentjari tanahair jang baru, pergi menduduki pulau² di Selatan daratan Asia dan dengan perdjuangan jang sengit dapatlah nenekmojang bangsa Indonesia tanahair jang baru, jaitu Indonesia kita sekarang. Adakah mungkin bangsa jang begini militan, bangsa jang begini pemberani dan begini kuat fisiknja dapat didjadjah oleh bangsa lain selama 350 tahun ? Tidak masuk akal, dan memang tidak demikian !

Walaupun dalam abad ke-17 Belanda sudah menguasai banjak tempat² penting di-pantai², tetapi adalah tidak benar djika dikatakan bahwa pada waktu itu Indonesia sudah ditaklukkan oleh Belanda. Keradjaan Mataram baru menjerah dalam tahun 1749, di Lombok pertempuran penghabisan baru dalam tahun 1895, di Boni tahun 1908, di Bali tahun 1908, di Bandjarmasin tahun 1906, di Djambi tahun 1907, di Riau tahun 1913, di Tapanuli 1907, di Atjeh tahun 1908, dan banjak lagi bukti² jang menundjukkan bahwa Indonesia belum menjerah dalam abad ke-17 kepada Belanda. Djadi, utjapan bahwa Indonesia pernah didjadjah „350 tahun oleh Belanda", disamping tidak mengenakkan telinga, adalah djuga tidak ilmiah, tidak tjotjok dengan kenjataan. Memang pedagang²

Belanda mendjatuhkan sauh kapalnja dipantai Utara Banten pada achir abad ke-16, tetapi adalah tidak benar djika pendjadjahan Belanda atas Indonesia dihitung sedjak djatuhnja sauh kapal² para pedagang ini. Tentang ini sebaiknja direnungkan oleh ahli² sedjarah kita, karena pengakuan pernah „350 tahun didjadjah Belanda" samasekali tidak mempertjepat proses penghantjuran fikiran² kolonial dan feodal dikalangan sebagian angkatan lama dan membikin angkatan baru memberi nilai jang bukan² terhadap kekuatan kolonialisme Belanda dan menanamkan rasa ketidakmampuan bangsa sendiri.

Dengan uraian diatas samasekali bukan maksud saja mau mendalami soal sedjarah tanahair kita. Saja hanja hendak menundjukkan bahwa pemberontakan 12 November 1926 bagi bangsa Indonesia jang sudah biasa memberontak terhadap ketidakadilan bukanlah sesuatu jang luarbiasa. Begitu djuga pemberontakan² kemudian. Hanja orang² Indonesia jang tidak mengenal sedjarah bangsanja dan tidak tahu akan watak² bangsanja jang merasa kaget dan tidak bisa menerima dalam akalnja pemberontakan tahun 1926. Ber-sama² dengan Belanda mereka menjalahkan pemberontakan tahun 1926. Ada djuga jang menjalahkan dengan „alasan" waktunja belum tiba, oleh karena itu tidak mentjapai hasil dan banjak memakan korban. Mereka menjalahkan PKI, karena PKI, walaupun masih sangat muda usianja, berusaha se-dapat²nja untuk memberikan pimpinan pada pemberontakan tahun 1926. Djika fikiran orang² ini diikuti, maka mereka djuga menjalahkan pemberontakan petani dibawah pimpinan Ken Arok karena pemberontakan ini tidak membawa kaum tani jang memberontak kesinggasana kekuasaan, mereka djuga menjalahkan perlawanan Rakjat dibawah pimpinan Sultan Agung Mataram, Hasanuddin, Surapati, Diponegoro, Pattimura dan pahlawan² lainnja, karena perlawanan² ini memakan banjak korban dan tidak membawa Rakjat kesinggasana kekuasaan.

Hanja kaum reaksioner jang menjalahkan pemberontakan Rakjat ! Tiap² pemberontakan Rakjat melawan ketidakadilan, tidak perduli pemberontakan besar atau ketjil, terpimpin baik atau tidak terpimpin baik, mentjapai tudjuan atau tidak mentjapai tudjuan, adalah mendorong kemadjuan sosial, walaupun sedikit ia membawa masjarakat lebih madju dan membawa ketidakadilan lebih dekat

keliangkuburnja. Adalah tukang ngelamun dan tukang omong-kosong jang mengatakan, bahwa pemberontakan baru bisa dibenarkan djika „menurut perhitungan" 100% mesti berhasil. Siapa jang bisa menetapkan pemberontakan 100% mesti berhasil ? Tidak ada ! Djadi selamanja tidak akan memberontak, djadi pendjadjahan adalah abadi bagi orang² ini. Adalah lebih mentertawakan lagi, bahwa diantara orang² jang menjalahkan pemberontakan tahun 1926 tidak sedikit jang mengaku dirinja „pemimpin Rakjat". Adakah masih hak mereka untuk dinamakan „pemimpin Rakjat" kalau mereka tidak mampu mentjegah Rakjat memberontak sebelum waktunja tiba dan tahunja hanja menjalahkan Rakjat jang memberontak ? Adalah satu kenjataan, bahwa timbulnja pemberontak tidak hanja bergantung pada klas atau klas² jang memberontak, tetapi banjak djuga bergantung pada klas atau klas² jang menindas.

Dalam kita mengakui Sultan Agung Mataram sebagai pahlawan dan membenarkan Rakjat jang berdjuang dibawah pimpinannja, dalam kita mengakui Hasanuddin sebagai pahlawan dan membenarkan Rakjat jang berdjuang dibawah pimpinannja, dalam kita mengakui Surapati sebagai pahlawan dan membenarkan Rakjat jang berdjuang dibawah pimpinannja, dan banjak lagi tjontoh² lain, tidak pernah kita meng-hitung² apakah ketika mereka memberontak atau melantjarkan peperangan sudah dipenuhi sjarat² 100% harus berhasil. Pemberontakan² itu objektif adalah benar dan objektif membikin masjarakat lebih madju, dan oleh karena itu tidak ragu² kita membenarkannja. Kita harus menarik peladjaran dari pemberontakan². Ja, kita djuga mengkritik kekurangan²nja, agar kita bisa memberontak lebih baik dan lebih berhasil, tetapi walaupun bagaimana kritik kita, walaupun bagaimana besarnja kesalahan dari pimpinan pemberontakan, pada pokoknja pemberontakan² terhadap ketidakadilan tidak mungkin kita salahkan.

Apakah persamaan dan perbedaan antara pemberontakan² terhadap radja² feodal dan terhadap kekuasaan kaum kapitalis-dagang Belanda sebelum abad ke-20 djika dibanding dengan pemberontakan 12 November 1926 ?

Persamaannja jalah, bahwa pemberontakan² itu adalah adil, melawan ketidakadilan, oleh karena itu semua pemberontakan itu adalah benar.

Beberapa perbedaan: Pemberontakan sebelum orang² asing datang adalah pemberontakan terhadap kekuasaan kaum feodal (radja², bangsawan² dan punggawa²) dengan dipimpin oleh orang² dari klas feodal sendiri. Pemberontakan² sesudah orang² asing datang adalah pemberontakan terhadap penghisapan ekonomi dan penindasan politik jang dobel, jaitu dari kaum kolonialis asing dan dari kaum feodal sedangkan pimpinan masih ditangan kaum feodal. Pemberontakan 12 November 1926 adalah pemberontakan terhadap penghisapan ekonomi dan penindasan politik jang dobel, jaitu kaum feodal dan kaum kapitalis kolonial, tetapi sudah dengan unsur baru, jaitu pimpinan klas baru, pimpinan proletariat dengan PKI sebagai pelopornja.

Kegagalan pemberontakan 12 November bukanlah karena pengchianatan pemimpin pemberontakan, seperti jang sering kali terdjadi dengan orang² feodal jang memimpin pemberontakan kaum tani. Kegagalan pemberontakan 12 November adalah disebabkan karena masih mudanja klas proletar Indonesia jang mempunjai tugas sedjarah memimpin pemberontakan. Proletariat Indonesia masih muda, lahir ber-sama² dengan industri² jang didirikan oleh kaum imperialis pada awal abad ke-20. Proletariat Indonesia masih muda dalam se-gala²nja, muda dalam umur, muda dalam organisasi, muda dalam teori dan muda dalam politik. Partai klas proletar ketika petjah pemberontakan 12 November masih baji, baru berumur 6 tahun.

Tetapi walaupun masih sangat muda, proletariat Indonesia tidak mundur dan tidak tjutji-tangan ketika ia dipanggil oleh sedjarah untuk memimpin pemberontakan jang ditimbulkan oleh perasaan tidak puas jang merata dikalangan Rakjat pekerdja, terutama kaum tani Indonesia. Tiap² Komunis Indonesia wadjib berbangga hati, bahwa Partainja, Partai Komunis Indonesia, adalah Partai jang per-tama² memberikan didikan anti-kolonialisme setjara praktis kepada Rakjat Indonesia.

Pemberontakan 12 November adalah satu tindakan anti-kolonialisme pertama jang mempunjai pengaruh setjara nasional atas Rakjat Indonesia. Pemberontakan ini telah menundjukkan kepada Rakjat Indonesia djalan jang benar untuk mengenjahkan kolonialisme, jaitu djalan kekerasan. Pemberontakan ini telah menundjukkan kepada Rakjat Indonesia bahwa kekuasaan Belanda bisa dibikin kalangkabut, bahwa kekuasaan kolonial bisa digojangkan, bahwa kekuasaan ini bukan kekuasaan jang abadi. Pemberontakan 12 November mempunjai arti jang luarbiasa besarnja dalam meningkatkan kesedaran politik Rakjat Indonesia, terutama kesedaran anti-kolonialisme.

Pada waktu sekarang, 30 tahun sesudah pemberontakan 12 November, Rakjat Indonesia dan seluruh Asia-Afrika berada dalam puntjak semangat anti-kolonialisme. Ahli sedjarah bukanlah ahli sedjarah jang benar, djika dalam menerangkan semangat anti-kolonialisme jang sekarang ini membakar Rakjat dan pemuda Indonesia tidak mengemukakan pemberontakan 12 November sebagai faktor jang penting.

Djakarta, 12 November 1956

Tulisan ini adalah djawaban Kawan D.N. Aidit atas pertanjaan2 disekitar terpilihnja tjalon PKI mendjadi Wakil Ketua IV Konstituante. Hasil pemilihan tsb. membuktikan unggulnja sistim demokrasi jang berdasarkan perwakilan berimbang jang mewakili fikiran2 terpenting jang hidup dalam masjarakat Indonesia dan djatuhnja martabat tokoh2 kepalabatu dimata Rakjat. Adanja wakil PKI untuk pertama kalinja sedjak gagalnja Revolusi Agustus 45 dalam badan pimpinan lembaga2 demokrasi sentral jang penting sekaligus adalah bukti jang mejakinkan bahwa kedudukan itu samasekali mungkin dan masuk akal dan merupakan langkah kemenangan kekuatan demokrasi untuk mendorong situasi revolusioner di Indonesia lebih madju kedepan.

TENTANG KOMPOSISI PIMPINAN KONSTIIUANTE

Berhubung dengan pertanjaan2 jang diadjukan kepada Comite Central PKI dan kepada saja sendiri mengenai komposisi pimpinan Konstituante, maka dengan singkat saja djelaskan sbb.:

Pada pokoknja kaum Komunis berpendapat bahwa komposisi pimpinan Konstituante sekarang memenuhi hasrat Rakjat banjak, karena mentjerminkan aliran2 politik terpenting jang hidup didalam masjarakat Indonesia, seperti aliran Nasionalis, Islam, Komunis dan Keristen. Terpilihnja Hadji Njonja Hidajat Ratu Aminah (IP-KI) sebagai wakil ketua V tidak hanja berarti ditjerminkannja hasrat golongan2 ketjil dan pedjuang2 bersendjata jang tergabung didalam IP-KI, tetapi djuga berarti kemenangan tjita2 emansipasi wanita.

Dalam menghadapi pemilihan pimpinan Konstituante PKI memperdjuangkan tiga tudjuan: (1) supaja jang mendjadi Ketua dari golongan pembela Pantja Sila; (2) supaja komposisi keseluruhannja merupakan perwakilan berimbang dan golongan pembela Pantja Sila tidak minoritet dan (3) supaja PKI ikut duduk didalam pimpinan. Konsep PKI ini ditentang oleh konsep pimpinan Masjumi jang bertudjuan: (1) Ketua dari partai Islam; (2) dalam komposisi keseluruhannja golongan partai2 Islam harus majoritet dan (3) supaja PKI tidak masuk. Hasil pemilihan sepenuhnja sesuai dengan konsep PKI dan partai2 demokratis lainnja, konsep Masjumi mengalami kegagalan.

Berdasarkan tiga tudjuan tersebut diatas PKI menjetudjui saudara Wilopo dari PNI mendjadi Ketua Konstituante. Demikian djuga, ketika Masjumi mengadjukan saudara Prawoto untuk mendjadi Wakil Ketua I, PKI memberikan 80 suaranja untuk Masjumi sehingga saudara Prawoto terpilih dengan aklamasi. Ketika NU mengadjukan saudara Hadji Faturrachman Kafrawi sebagai Wakil Ketua II, PKI djuga memberikan 80 suaranja kepada NU sehingga

saudara Faturrachman terpilih dengan aklamasi. Ketika Parkindo mentjalonkan saudara Leimena sebagai Wakil Ketua III, PKI pun memberikan 80 suaranja kepada Parkindo sehingga saudara Leimena djuga terpilih dengan aklamasi. Sudah tentu umum mengharapkan ketika PKI mengadjukan tjalonnja untuk Wakil Ketua IV (Kawan Sakirman) Masjumi dan NU akan memberikan suaranja kepada PKI, atau se-kurang²nja abstain, tetapi kenjataannja tidak demikian. Golongan Keristen dan Katolik jang pro Pantja Sila memberikan suaranja kepada tjalon PKI.

Untuk menggagalkan tjalon PKI, supaja PKI tidak duduk dalam pimpinan Konstituante, Masjumi dan partai² Islam lainnja memberikan suaranja kepada „sosialis" Abidin dari Partai Buruh. Tetapi dalam pemilihan ternjata bahwa Abidin jang didjagokan oleh Masjumi menderita kekalahan. Dengan ini konsep djahat pimpinan Masjumi untuk mengisolasi PKI mendjadi berantakan samasekali. Ini sekaligus berarti kemenangan mutlak konsep PKI atas konsep Masjumi.

Sebagaimana sudah diketahui oleh umum, ketika membitjarakan rantjangan Tjara Memilih Ketua Dan Wakil² Ketua Konstituante, PKI mengamandemen salahsatu fasal dengan maksud agar pemilihan Ketua dan Wakil² Ketua dilakukan sekaligus dan menurut sistim suara terbanjak biasa atau suara terbanjak relatif. Amandemen ini ditudjukan untuk mendjamin agar pimpinan Konstituante mentjerminkan semua aliran jang terpenting didalam masjarakat, untuk menghindari „dagang sapi" dan „sikut²an" dalam menggunakan demokrasi, supaja pemilihan bisa tjepat dan ongkosnja murah. Djika amandemen PKI ini diterima, maka komposisi pimpinan Konstituante tidak akan banjak bedanja dengan hasil jang sudah ditjapai sekarang. Tetapi sajang sekali sistim jang mendjamin kerukunan ini ditolak oleh fihak Masjumi cs, sehingga terdjadilah „dagang sapi" jang meriah selama pemilihan, dan puntjaknja jalah Masjumi cs. mendjagokan „sosialis" Abidin dari Partai Buruh jang hanja mempunjai lima suara untuk melawan tjalon dari PKI jang mempunjai 80 suara didalam Konstituante.

Dengan hasil pemilihan Ketua dan Wakil² Ketua terbuktilah, bahwa walaupun amandemen PKI ditolak oleh sidang Konstituante, tetapi hasil pemilihan menundjukkan persesuaian dengan tudjuan

amandemen PKI. Dengan ini terbukti keunggulan dari sistim demokrasi jang berdasarkan perwakilan berimbang dan perwakilan fikiran² terpenting jang hidup didalam masjarakat, jaitu demokrasi jang mendjamin kerukunan antara partai² dan jang mengindahkan pilihan Rakjat.

Saja dan seluruh kaum Komunis Indonesia mengutjapkan banjak terimakasih kepada fraksi² besar dan ketjil dari golongan Nasionalis, kepada fraksi² Keristen dan Katolik serta kepada beberapa orang dari golongan partai² Islam jang sudah memberikan suaranja kepada tjalon PKI ketika pemilihan Wakil Ketua IV.

Komposisi pimpinan Konstituante jang mentjerminkan kehendak bagian terbesar dari Rakjat Indonesia akan membantu melantjarkan pekerdjaan Konstituante, karena segala persiapan dari fihak pimpinan sudah dengan memperhatikan dan memperhitungkan fikiran² jang hidup didalam masjarakat dan dikalangan anggota² pleno Konstituante. Hanja orang² jang berkepalabatu jang merasa dirugikan oleh komposisi pimpinan Konstituante sekarang.

Desember 1956

Djika pada ulangtahun ke-V HR dalam katasambutannja Kawan D.N. Aidit menekankan pentingnja memperbesar oplah HR dan menjerukan agar setiap konferensi Partai tidak melupakan mempersoalkan HR, dalam artikel ini untuk menjambut ulangtahun ke-VI HR dikemukakan tentang vitalnja rol HR membantu para organisator, propagandis dan agitator Rakjat untuk mengorganisasi dan memobilisasi Rakjat memperdjuangkan kepentingannja.

Untuk bisa memenuhi tugas tersebut didjelaskan tentang perlunja pendidikan bagi para redaktur HR untuk mengetahui masjarakat Indonesia dan soal2 pokok revolusi Indonesia serta tugas2 praktis lainnja.

Disamping itu supaja HR betul2 mendjadi sendjata ditangan Rakjat dan Partai serta demi kesempurnaannja Kawan D.N. Aidit menjatakan sangat dibutuhkannja kritik baik jang datang dari orang2 Komunis maupun bukan Komunis mengenai segala seginja.

„HARIAN RAKJAT" SENDJATA DITANGAN RAKJAT DAN PARTAI

Per-tama2 izinkanlah saja pada kesempatan ini atas nama Comite Central PKI mengutjapkan selamat kepada semua pembatja, semua pekerdja tangan dan pekerdja otak Harian Rakjat.

Enam tahun usia HR berarti 6 tahun HR mengabdi Rakjat Indonesia dan kemanusiaan. Selama itu HR berdiri dibarisan paling depan dalam melawan tekanan2 ideologis dari musuh2 Rakjat terutama dari koran2 mereka. Selama itu HR berdiri dibarisan paling depan dalam membawa tjita2 Rakjat Indonesia, tjita2 ingin hidup bebas dari imperialisme jang mana djuapun, tjita2 ingin hidup dalam Indonesia jang demokratis, tjita2 ingin hidup damai, bersaudara dan bersahabat dengan semua Rakjat dan bangsa didunia. HR telah mendjadi pembantu jang militan dalam melaksanakan dua tugas urgen PKI, jaitu tugas memperkuat front persatuan nasional dan meneruskan pembangunan Partai.

HR penjebar tjita2 Rakjat dan HR pembantu PKI, oleh karena itu madju mundurnja HR sangat tergantung pada kemadjuan gerakan Rakjat dan kemadjuan PKI, dan sebaliknja, kemadjuan HR membawa kemadjuan bagi gerakan revolusioner Rakjat dan bagi PKI. HR tidak bisa hidup tanpa gerakan revolusioner Rakjat, sebab HR lahir karena dan untuk gerakan Rakjat itu sendiri.

Disinilah perbedaan jang penting antara HR dengan koran2 kanan jang lahir karena dan untuk meladeni kepentingan musuh2 Rakjat, jaitu kaum imperialis, kaum burdjuasi komprador dan kaum tuantanah. Dilihat dari sudut materiil HR lemah djika dibandingkan dengan koran2 kanan, tetapi HR kuat karena didukung oleh gerakan revolusioner Rakjat. Selama ada gerakan revolusioner Rakjat Indonesia, maka hak-hidup HR tetap ada. Sedangkan haridepan HR adalah gemilang, sama gemilangnja dengan haridepan Indonesia dimana tidak terdapat lagi kaum imperialis, kaum komprador

dan kaum tuantanah jang mendjadi tempat bergantung koran² kanan. HR, Rakjat Indonesia dan PKI berdjuang untuk haridepan jang gemilang ini!

Adalah kebanggaan Rakjat dan adalah sangat dikuatirkan oleh musuh² Rakjat bahwa HR termasuk koran jang tjepat madjunja, baik dalam soal peningkatan oplah, dalam kemampuan berdiri sendiri, dalam mengatur djaring² koresponden maupun dalam memelihara rubrik²nja. Semuanja ini dapat ditjapai karena pekerdja tangan dan pekerdja otak HR didjiwai oleh dua tugas pokok jang diletakkan oleh Kongres Nasional ke-V PKI, jaitu tugas menggalang front persatuan nasional dan tugas pembangunan Partai. Dalam pesan ulangtahun ke-V HR telah saja kemukakan bahwa *„Politik persatuan nasional jang mendjadi isi dan djiwa HR telah menjebabkan HR mendapat pembatja jang tidak sedikit dikalangan kaum demokrat dan patriot bukan-Komunis. Dalam pembangunan Partai, terutama dalam memelihara dan memperkuat persatuan didalam Partai, HR sudah mendjadi kebutuhan jang mutlak"*. Pekerdja² tangan dan pekerdja² otak HR didjiwai oleh dua tugas ini, dan HR mendjiwai perdjuangan Rakjat dan anggota² PKI dengan dua tugas pokok ini.

Dalam mengemukakan sukses² jang sudah ditjapai oleh HR seperti diatas, apakah berarti tidak ada kritik dan tidak ada saran jang harus ditudjukan kepada HR? Kawan Njoto sering mengatakan kepada saja, bahwa salahsatu kesukarannja dalam memimpin HR jalah karena kekurangan kritik dari para pembatja, dari kader² dan comite² PKI.

Saja berpendapat bahwa tugas² HR dalam rangka melaksanadua tugas urgen diatas adalah berat. Tugas² HR jang berat ini tidak mungkin dilaksanakan dengan baik djika tanpa kritik.

Marilah kita periksa betapa besarnja pekerdjaan jang harus dilaksanakan oleh HR. HR harus membantu pekerdjaan organisator² Rakjat dalam mengorganisasi massa Rakjat jang luas dalam seribu-satu matjam organisasi dan membantu mengorganisasi anggota² PKI jang sudah sedjuta lebih djumlahnja. HR harus membantu propagandis² Rakjat dalam mempropagandakan, dalam menerangkan dan mejakinkan setjara tekun dan militan mengenai politik front persatuan sebagai sjarat mutlak untuk perbaikan ekonomi, politik dan kebudajaan Rakjat Indonesia. HR harus merangsang semangat Rakjat dan agitator² Rakjat untuk mengadjak berbuat sesuatu atas kesedaran dan untuk kepentingan Rakjat sendiri. Dalam melakukan tugas² ini masih banjak kekurangan HR hingga tidak djarang HR sampai ditangan pembatja tanpa melakukan tugas sebagai organisator, sebagai propagandis dan agitator kolektif.

Untuk mengatasi kekurangan² jang penting dan berat seperti disebutkan itu, maka tidak ada djalan lain ketjuali semua redaktur dan koresponden HR harus terdiri dari orang² jang mengerti benar tentang masjarakat Indonesia, jang tahu benar tentang soal² pokok dan penting dari revolusi Indonesia, jang se-hari²nja mengikuti dan mengetahui tugas² praktis jang berhubungan dengan taktik dan organisasi gerakan revolusioner. Tanpa mengetahui semuanja ini tidak mungkin mendjadi redaktur atau koresponden Rakjat jang baik, tidak mungkin HR memenuhi tuntutan² praktis perdjuangan Rakjat Indonesia. Adalah kewadjiban tiap² redaktur dan koresponden HR untuk mendidik diri agar mengetahui tentang semuanja ini, dan kewadjiban pimpinan Partai jalah membantu mereka dalam hal ini. Djadi soalnja jalah, pendidikan bagi para redaktur dan koresponden HR.

Dalam pesan ulangtahun ke-V antara lain saja katakan, bahwa *„tidak boleh ada konferensi Partai dari tingkat paling atas sampai paling bawah jang tidak membitjarakan HR, terutama membitjarakan soal memperluas penjebaran dan soal mengintensifkan pemasukan uang langganan. Harus disedari benar² bahwa rol HR banjak tergantung pada oplahnja"*. Hal ini belum dilakukan dengan sungguh², masih banjak konferensi Partai jang tidak membitjarakan soal HR, bukan karena HR sudah luas penjebarannja dan sudah intensif pemasukan keuangannja, tetapi karena comite Partai jang bersangkutan „lupa" mendjadikan soal HR sebagai atjara konferensi, karena kawan² comite tidak melihat djalan keluar untuk meluaskan penjebaran dan pemasukan keuangan HR. Kepada kawan² jang suka „lupa" itu ingin saja bertanja: apakah jang bisa dipetjahkan oleh Partai kalau soal penjebaran HR dan pemasukan keuangan HR tidak bisa dipetjahkan? Lagi pula bisakah Partai jang modern seperti Partai kita tanpa sedjumlah tertentu jang agak besar pembatja² HR jang setia, setia membatja dan setia membajar uang

langganan? Bisakah organisasi basis Partai dan tjabang² atau ranting² organisasi massa berdjalan baik djika pemimpin²nja tidak membatja HR? Bisakah massa diselamatkan dari bahaja ratjun² koran reaksioner djika HR tidak menjerbu ke-tengah² massa? Bisakah pekerdjaan organisasi berhasil djika massa pekerdja terus-menerus diombang-ambingkan dan diratjuni oleh koran² reaksioner jang membawa suara musuh² Rakjat, suara kaum imperialis, burdjuasi komprador dan tuantanah? Mau memperbesar Partai, mau mendjadikan gerakan Komunis jang besar mendjadi organisasi Komunis jang besar, adalah omongkosong djika tidak disertai merebut massa kefihak HR. Tentang ini belum tjukup disedari oleh comite² dan pemimpin² Partai. HR adalah tukang andjangsono jang djitu. Djika seorang kader bisa berandjangsono hanja beberapa djam HR bisa melakukannja lebih lama dan lebih sering dan ia berbitjara teratur kepada para pembatjanja. Tidak ada perkataan lain jang tepat ketjuali perkataan „dungu" untuk comite² dan pemimpin² Partai jang tidak melihat dan menjedari pentingnja HR sebagai pembantunja jang setia dalam pekerdjaannja se-hari².

Sebagai akibat jang logis dari kurangnja perhatian sedjumlah comite mengenai HR, maka sedjumlah agen HR bukannja mendjadi pembantu dalam menjebarkan HR, tetapi mereka mendjadi penghalang dan beban bagi HR karena hutangnja terlalu banjak. Dengan demikian comite² jang bersangkutan tidak hanja mendjadikan comitenja diskredit, tetapi djuga mendjadi penghalang perkembangan Partai di-daerah² lain, karena kematjetan pemasukan keuangan HR disatu tempat berarti memberatkan keuangan HR keseluruhannja. Sedar atau tidak sedar mereka telah berbuat merugikan perdjuangan Rakjat dan Partai, sama dengan perbuatan kaum penghisap.

Rentjana mengenai organisasi dan pendidikan jang diputuskan oleh Sidang Pleno ke-IV CC PKI jang dilangsungkan dalam bulan Djuli jang lalu hanja mungkin berhasil baik djika mendapat bantuan setjara sedar dan sungguh² dari redaktur², koresponden² dan semua pekerdja HR. Salahsatu tjiri penting pada awal tahun 1957 dan sebagai pelaksanaan putusan² Sidang Pleno CC tersebut jalah adanja gelombang naik dalam semangat beladjar kader² dan anggota² PKI. Di-mana² didirikan sekolah² dan kursus² Partai, sedangkan tidak lama lagi sekolah² politik untuk anggota dan tjalon-anggota akan dimulai. Dengan semangat jang tinggi, jang selama ini belum pernah dialami oleh PKI, kader² dan anggota² PKI mempeladjari matapeladjaran² jang sudah ditetapkan CC PKI. Semangat beladjar jang tinggi ini harus dipelihara. Dalam hal memelihara semangat beladjar ini besarlah seharusnja rol „Harian Rakjat".

Selandjutnja izinkanlah saja pada kesempatan ini mengritik pembatja² Komunis jang tidak mengritik HR. Saja mengerti sepenuhnja, bahwa pekerdjaan Kawan Njoto memimpin HR tidak dibantu oleh pembatja² Komunis jang tidak mengritik kekurangan HR. Dalam kehidupan Partai Komunis dan dalam kehidupan semua tjabang usaha Partai Komunis, kritik adalah sumber hidup. Kita membutuhkan kritik untuk menghidupkan seluruh tubuh Partai sebagaimana manusia membutuhkan udara untuk menjambung njawanja.

Kekurangan kritik pembatja² Komunis, terutama kader² Komunis terhadap kekurangan² HR telah menjebabkan pimpinan HR jang dipimpin Kawan Njoto kekeringan sumber hidup. Oleh karena itu pada kesempatan ini saja menjatakan harapan kepada semua pembatja Komunis supaja lebih banjak memberikan kritiknja kepada HR tentang apa sadja, mulai dari isi tulisan² sampai ketipografi, ja, djuga sampai kedistribusi. Hanja sadja, tiap² kritik harus disertai dengan usul² kongkrit untuk mengatasi kekurangan² jang ada. Ini adalah tjara kritik kita!

Dalam saja menjarankan supaja kritik diperbanjak dari pembatja² Komunis, samasekali tidak berarti bahwa HR harus menutup pintu untuk kritik orang² bukan-Komunis. Kritik dari orang² bukan-Komunis tidak kurang pentingnja dari kritik² pembatja Komunis. Saja hanja hendak menekankan, bahwa orang² Komunis *berkewadjiban* mengritik HR sedangkan orang² bukan-Komunis *berhak* penuh untuk mengritik HR karena mereka adalah djuga pembatja HR.

Saja jakin bahwa HR akan mentjapai sukses² jang lebih besar dan gerakan revolusioner serta PKI akan lebih dibantu oleh HR djika saran² diatas dilaksanakan. Sukses² bagi HR, inilah jang senantiasa mendjadi harapan CC PKI, mendjadi harapan tiap²

Komunis jang baik.

Hidup Harian Rakjat, sendjata ditangan Rakjat dan Partai!

Hidup kemerdekaan nasional, demokrasi dan perdamaian, politik jang mendjiwai dan jang dibela dengan teguh oleh Harian Rakjat!

31 Djanuari 1957

Tulisan ini adalah pidato Kawan D.N. Aidit didalam sidang DPR tanggal 11 Februari 1957 mendjawab keterangan anggota DPR Udin Syamsudin (Masjumi) jang mentjoba menutupi maksud2 kontra-revolusioner dari „dewan2 partikelir" di Sumatera dengan me-njinggung2 soal Peristiwa Madiun.

Dengan pidato Kawan D.N. Aidit ini masjarakat dapat mengetahui dengan lebih djelas lagi hakekat Peristiwa Madiun, suatu provokasi reaksi jang dilantjarkan oleh Hatta dan arti pemberontakan kontra-revolusioner gerombolan Simbolon dan Ahmad Husein jang satu tahun kemudian mentjapai puntjaknja dengan diproklamasikannja „Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia" di Padang oleh gembong2 Masjumi-PSI seperti Sjafruddin Prawiranegara dan Sumitro Djojohadikusumo.

Dengan tulisan ini Rakjat Indonesia sampai sekarang mempunjai tiga dokumen penting tentang Peristiwa Madiun jaitu: *Buku Putih tentang Peristiwa Madiun* jang diterbitkan oleh Departemen Agitprop CC PKI, *Menggugat Peristiwa Madiun* dan *Konfrontasi Peristiwa Madiun (1948) — Peristiwa Sumatera (1956).*

KONFRONTASI PERISTIWA MADIUN (1948) — PERISTIWA SUMATERA (1956)

Terlebih dulu saja ingin menjatakan bahwa pemerintah Ali-Idham dalam keterangannja pada tanggal 21 Djanuari dan dalam djawabannja pada pandangan umum babak pertama pada tanggal 4 Februari jl. bisa membatasi diri pada persoalannja, jaitu tentang kedjadian² di Sumatera dalam bulan Desember 1956. Hal ini dapat saja hargai dan tentang ini kawan² sefraksi saja sudah menjatakan pendapat fraksi PKI.

Pada pokoknja pendapat kami mengenai kedjadian² di Sumatera dalam bulan Desember tahun jl. adalah sbb.:

Pertama: Kedjadian² di Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan adalah rentetan kedjadian jang sengadja ditimbulkan oleh sebuah partai ketjil jang kalah dalam pemilihan umum jl. jang berhasil mendalangi sebuah partai besar dan oknum² liar, jang tidak melihat kemungkinan dengan djalan demokratis dapat duduk kembali dalam kekuasaan sentral, dan jang hanja melihat kemungkinan dengan djalan menggunakan saluran partai² lain, dengan djalan mempertadjam pertentangan antara partai² agama dengan PKI dan PNI, dengan bikin²an menimbulkan kemarahan Rakjat di-daerah² supaja memberontak terhadap Pemerintah Pusat, dengan djalan mengadudomba suku satu dengan suku lainnja dan dengan djalan menghasut orang² militer supaja memberontak kepada atasannja.

Kedua: Kedjadian² tersebut terang sedjalan dan berhubungan dengan rentjana kaum imperialis, jang dipelopori oleh Amerika Serikat untuk menarik Indonesia kedalam pakt militer SEATO. Rentjana² dari pemberontak di Sumatera untuk memisahkan Sumatera dan Kalimantan dari Pemerintah Pusat dan untuk mendirikan negara sendiri jang mempunjai peralatan sipil dan militer sendiri, jang mempunjai hubungan luarnegeri sendiri, adalah sepenuhnja

sedjalan dengan rentjana Amerika Serikat jang diatur oleh Pentagon (Kementerian Pertahanan) dan State Department (Kementerian Luarnegeri) Amerika Serikat, oleh „djenderal²" DI-TII dan oleh aparat² serta kakitangan² Amerika Serikat jang ada di Indonesia.

Djadi, persoalannja adalah djelas, jaitu kepentingan vital Rakjat Indonesia disatu fihak berhadapan langsung dengan kepentingan kaum imperialis asing difihak lain. Dalam hal ini pemerintah Ali-Idham menjatukan diri dengan kepentingan Rakjat Indonesia, dan oleh karena itu PKI tidak ragu² berdiri difihak pemerintah dan melawan kaum pemberontak serta aktor² intelektualisnja.

Demikianlah, kalau mengenai persoalannja. Djelas dimana kami berdiri, dan djelas pula dimana fihak lain berdiri.

Tetapi, disamping pemerintah dapat membatasi diri pada persoalan jang sedang dihadapi, anggota jang terhormat Udin Sjamsudin telah mem-bawa² Peristiwa Madiun, dengan maksud mengaburkan persoalan.

Dalam Soal Peristiwa Madiun Kaum Komunis Adalah Pendakwa

Anggota tersebut telah me-njebut² Peristiwa Madiun dalam hubungan dengan Peristiwa Sumatera, antara lain dikatakannja „pelopor pemberontakan di Indonesia ini setelah Indonesia Merdeka adalah Partai Komunis Indonesia", selandjutnja „kaum Komunislah jang mendjadi mahaguru pemberontakan" dan „bibitnja sudah menular keseluruh Indonesia". Maksud pembitjara tersebut djelas, jaitu supaja dalam soal pemberontakan Kolonel Simbolon dan Letnan Kolonel Ahmad Husein djuga PKI jang disalahkan. Lihatlah, betapa tidak tahu malunja orang mentjari kambinghitam, sama dengan tidak tahu malunja mereka menjalahkan PKI dalam hubungan dengan Peristiwa Madiun.

Saja tidak membantah, bahwa baik Peristiwa Madiun maupun Peristiwa Sumatera mempunjai satu sumber dan satu tudjuan, jaitu bersumber pada imperialisme Amerika dan Belanda dan bertudjuan untuk meletakkan Indonesia sepenuhnja dibawah telapak kaki mereka.

Berhubung dengan sebuah statemen Politbiro CC PKI tanggal 13 September 1953 saja pernah dihadapkan kemuka pengadilan. Dalam sidang pengadilan tanggal 27 Djanuari 1955, dengan berpegang pada ajat 3 fasal 310 KUHP jang ditimpakan pada saja, sudah saja njatakan kesediaan saja kepada pengadilan untuk membuktikan dengan saksi² bahwa Peristiwa Madiun memang provokasi dan bahwa dalam Peristiwa Madiun tersebut tangan Hatta-Sukiman-Natsir cs. memang berlumuran darah. Dengan ini berarti bahwa Hatta, ketika itu masih Wakil Presiden, harus tampil sebagai saksi berhadapan dengan saja. Kesediaan saja ini, jang djuga diperkuat oleh advokat saja, Sdr. Mr. Suprapto, tidak mendapat persetudjuan pengadilan. Djaksa menjatakan keberatannja akan pembuktian jang mau saja adjukan dengan saksi². Oleh karena djaksa menolak pembuktian jang mau saja adjukan, maka djaksa terpaksa mentjabut tuduhan melanggar fasal 310 dan 311 KUHP. Djelaslah, bahwa ada orang² jang kuatir kalau Peristiwa Madiun ini mendjadi terang bagi Rakjat.

Djadi, mengenai Peristiwa Madiun kami sudah lama siap berhadapan dimuka pengadilan dengan arsiteknja Moh. Hatta. Ini saja njatakan tidak hanja sesudah Hatta berhenti sebagai Wakil Presiden, tetapi seperti diatas sudah saja katakan, djuga ketika Hatta masih Wakil Presiden. Saja tidak ingin menantang siapa², tetapi kapan sadja Hatta ingin Peristiwa Madiun dibawa kepengadilan, kami dari PKI selamanja bersedia menghadapinja. Kami jakin, bahwa djika soal ini dibawa kepengadilan bukanlah kami jang akan mendjadi terdakwa, tetapi kamilah pendakwa. Kamilah jang akan tampil kedepan sebagai pendakwa atasnama Amir Sjarifuddin, putera utama bangsa Indonesia jang berasal dari tanah Batak, atasnama Suripno, Maruto Darusman, Dr. Wiroreno, Dr. Rustam, Harjono, Djokosujono, Sukarno, Sutrisno, Sardjono dan beribu-ribu lagi putera Indonesia jang terbaik dari suku Djawa jang mendjadi korban keganasan satu pemerintah jang dipimpin oleh burdjuis Minangkabau, Mohamad Hatta. Demikian kalau kita mau berbitjara dalam istilah kesukuan, sebagaimana sekarang banjak digunakan oleh pembela² kaum pemberontak di Sumatera, hal jang sedapat mungkin ingin kami hindari. Ja, kami djuga akan berbitjara atasnama perwira², bintara² dan pradjurit² TNI jang cwas

dalam „membasmi Komunis" atas perintah Hatta, karena mereka djuga tidak bersalah dan mereka djuga adalah korban perang saudara jang dikobarkan oleh Hatta.

Dalam pembelaan saja dimuka pengadilan tanggal 24 Februari 1955 telah saja katakan „bahwa diantara orang² jang karena tidak mengertinja telah ikut dalam pengedjaran 'terhadap kaum Komunis', tidak sedikit sekarang sudah tidak mempunjai purbasangka lagi terhadap PKI dan sudah berdjandji pada diri sendiri untuk tidak lagi mendjadi alat perang saudara kaum imperialis dan kakitangan". Alat² negara sipil maupun militer sudah mengerti bahwa dalam Peristiwa Madiun mereka telah disuruh memerangi saudara² dan teman²nja sendiri.

Sudah mendjadi rahasia umum, bahwa dalam pemilihan umum untuk Parlemen maupun untuk Konstituante lebih 80% dari anggota² Angkatan Perang memberikan suaranja kepada partai² demokratis, dan 30% dari suara jang diberikan anggota Angkatan Perang adalah diberikan kepada PKI. PSI dan Masjumi hanja mendapat kurang dari 20%, djadi kurang dari suara jang didapat oleh PKI sendiri atau PNI sendiri. PSI jang mempunjai pengaruh disedjumlah opsir tinggi adalah partai kelima didalam Angkatan Perang, sedangkan Masjumi, karena politik pro DI-nja, adalah partai kenam. Dengan ini, saja hanja hendak membuktikan bahwa memukul PKI dengan menjembur-njemburkan Peristiwa Madiun adalah tidak merugikan PKI, malahan memberi alasan pada kami untuk berbitjara dan men-djelas²kan tentang Peristiwa Madiun.

Apalagi sekarang, sesudah terdjadi pemberontakan kolonel Simbolon di Sumatera Utara dan pemberontakan „Dewan Banteng" di Sumatera Barat, menggunakan Peristiwa Madiun untuk memukul PKI adalah seperti menepuk air didulang, bukan muka PKI jang kena, tetapi muka Masjumi dan PSI sendiri jang sekarang membela pemberontak² di Sumatera itu dengan mati²an.

Hatta Bertanggungdjawab Atas Pentjulikan, Pembunuhan Dan Perang Saudara Tahun 1948

Mari, dalam menilai kebidjaksanaan pemerintah Ali-Idham sekarang, kita perbandingkan antara kebidjaksanaan pemerintah Hatta

tahun 1948 mengenai Peristiwa Madiun dengan kebidjaksanaan pemerintah Ali-Idham sekarang. Dari hasil penilaian ini saja akan menentukan sikap saja terhadap kebidjaksanaan pemerintah sekarang.

Peristiwa Madiun didahului oleh kedjadian² di Solo, mula² dengan pembunuhan atas diri Kolonel Sutarto, Komandan TNI Divisi IV, dan kemudian pada permulaan September 1948 dengan pentjulikan dan pembunuhan terhadap 5 orang perwira TNI, jaitu major Esmara Sugeng, kapten Sutarto, kapten Supardi, kapten Suradi dan letnan Muljono. Djuga ditjulik 2 orang anggota PKI, Kawan² Slamet Widjaja dan Pardijo. Kenjataan bahwa kawan² jang ditjulik ini pada tanggal 24 September dimasukkan kedalam kamp resmi di Danuredjan, Djokjakarta, membuktikan bahwa pemerintah Hatta langsung tjampurtangan dalam soal pentjulikan² dan pembunuhan² diatas. Ini tidak bisa diragukan lagi!

Dalam pidatonja tanggal 19 September 1948 Presiden Sukarno mengatakan bahwa Peristiwa Solo dan Peristiwa Madiun tidak berdiri sendiri. Ini sepenuhnja benar! Sesudah pentjulikan² dan pembunuhan² di Solo jang diatur dari Djokja, keadaan di Madiun mendjadi sangat tegang sehingga terdjadilah pertempuran antara pasukan² dalam Angkatan Darat jang pro dan jang anti pentjulikan² serta pembunuhan² di Solo, jaitu pertempuran pada tanggal 18 September 1948 malam. Dalam keadaan katjaubalau demikian ini Residen Kepala Daerah tidak ada di Madiun, Wakil Residen tidak mengambil tindakan apa² sedangkan Walikota sedang sakit. Untuk mengatasi keadaan ini maka Front Demokrasi Rakjat, dimana PKI termasuk didalamnja, mendesak supaja Kawan Supardi, Wakil Walikota Madiun bertindak untuk sementara sebagai pedjabat Residen selama Residen Madiun belum kembali. Wakil Walikota Supardi berani mengambil tanggungdjawab ini. Pengangkatan Kawan Supardi sebagai Residen sementara ternjata djuga disetudjui oleh pembesar² militer dan pembesar² sipil lainnja. Tindakan ini segera dilaporkan kepemerintah pusat dan dimintakan instruksi dari pemerintah pusat tentang apa jang harus dikerdjakan selandjutnja.

Nah, tindakan inilah, tindakan mengangkat Wakil Walikota mendjadi Residen sementara inilah jang dinamakan oleh pemerintah Hatta tindakan „merobohkan pemerintah Republik Indonesia", tindakan „mengadakan kudeta" dan tindakan „mendirikan pemerintah Sovjet".

Kalau dengan mengangkat seorang Wakil Walikota mendjadi Residen sementara bisa dinamakan merobohkan pemerintah Republik Indonesia, bisa dinamakan kudeta dan bisa dinamakan mendirikan pemerintah Sovjet, nama apakah lagi jang bisa diberikan kepada tindakan komplotan Simbolon dan „Dewan Banteng" di Sumatera? Selain daripada itu, djika memang demikian halnja, alangkah mudahnja merobohkan pemerintah Republik Indonesia, alangkah mudahnja mengadakan kudeta dan alangkah mudahnja mendirikan pemerintah Sovjet! Djika memang demikian mudahnja, saja kira sekarang sudah tidak ada lagi Republik kita, karena nafsu merobohkan Republik sekarang begitu di-kobar²kan dan begitu besarnja disementara golongan terutama dikalangan sebuah partai ketjil jang kalah dalam pemilihan umum jl. Tetapi saja kira, saudara Ketua, merobohkan Republik Indonesia tidaklah begitu mudah sebagaimana sudah dibuktikan oleh kegagalan Simbolon dan oleh makin merosotnja pamor „Dewan Banteng", disamping Republik Indonesia tetap berdiri tegak. Apalagi mendirikan pemerintah Sovjet, tidaklah semudah mengangkat seorang Wakil Walikota mendjadi Residen sementara. Rakjat Tiongkok dan Tentara Pembebasan Rakjat Tiongkok jang sudah berdjuang mati²an selama ber-puluh² tahun dibawah pimpinan Partai Komunis Tiongkok hingga sekarang belum sampai ketaraf mendirikan pemerintah Sovjet, artinja pemerintah sosialis di Tiongkok. Djadi, alangkah bebalnja, atau alangkah men-tjari²nja orang² jang menuduh PKI merobohkan Republik dan mendirikan pemerintah Sovjet di Madiun dengan mengangkat Wakil Walikota Supardi mendjadi Residen sementara.

Berdasarkan kedjadian pengangkatan Wakil Walikota Supardi mendjadi Residen sementara dan atas tanggungdjawab sepenuhnja dari pemerintah Hatta, maka pada tanggal 19 September 1948 oleh Presiden Sukarno diadakan pidato jang berisi seruan kepada seluruh Rakjat untuk ber-sama² membasmi „kaum pengatjau", maksudnja membasmi kaum Komunis dan kaum progresif lainnja setjara djasmaniah. Saja katakan sepenuhnja tanggungdjawab pemerintah Hatta, karena Hattalah jang mendjadi Perdana Menteri

ketika itu. Tetapi karena Hatta tahu bahwa pengaruhnja sangat ketjil dikalangan Angkatan Perang dan alat² negara lainnja, apalagi dikalangan masjarakat, maka Hatta menggunakan mulut Sukarno dan memindjam kewibawaan Sukarno untuk membasmi Amir Sjarifuddin dan be-ribu² putera Indonesia asal suku Djawa. Ini, sekali lagi, kalau kita mau berbitjara dalam istilah kesukuan jang sekarang banjak dilakukan oleh pembela² kaum pemberontak di Sumatera, sesuatu jang sedapat mungkin ingin kami hindari.

Demikianlah, „kebidjaksanaan" Hatta sebagai Perdana Menteri dalam menghadapi persoalan² masjarakat dan persoalan² politik jang kongkrit. Karena kepitjikannja dan kesombongannja sebagai burdjuis Minang jang ingin melondjak tjepat sampai keangkasa, karena kehausannja akan kekuasaan, karena kepalabatunja, karena ketakutannja jang keterlaluan kepada Komunisme, maka Hatta sebagai Perdana Menteri dengan setjara gegabah mengerahkan alat² kekuasaan negara untuk mentjulik, membunuh dan mengobarkan perang saudara. Orang sering² salah kira dengan menjamakan sifat kepalabatu Hatta dengan „kemauan keras" atau sikap jang „konsekwen". Tetapi saja jang djuga mengenal Hatta dari dekat berpendapat, bahwa sifat kepalabatu Hatta adalah disebabkan karena sempit pikirannja, dan karena sempit pikirannja ia tidak bisa bertukar fikiran setjara sehat, tidak pandai bermusjawarah, dan tahunja hanja main „ngotot", „mutung", „basmi" dan „tangan besi". Dan apa akibatnja permainan „basmi" dan „tangan besi" Hatta? Beribu-ribu pemuda dan Rakjat dari kedua belah fihak jang berperang mati karenanja. Seluruh Rakjat sudah mengetahui dari pengalamannja sendiri bahwa semua ini dilakukan hanja untuk melapangkan djalan bagi Hatta buat pelaksanaan Konferensi Medja Bundar dengan Belanda jang langsung diawasi oleh Amerika Serikat untuk membikin perdjandjian KMB jang chianat dan jang sudah kita batalkan itu.

Sifat gegabah dari tindakan Hatta lebih nampak lagi ketika ia meminta kekuasaan penuh dari BPKNIP (1), dimana didalam pidatonja dinjatakan bahwa *„Tersiar pula berita — entah benar entah tidak — bahwa Musso akan mendjadi Presiden Republik rampasan itu dan Mr. Amir Sjarifuddin Perdana Menteri"*. Lihatlah betapa tidak bertanggungdjawabnja tindakan Hatta. Ia bertindak atas dasar berita jang sifatnja „entah benar entah tidak" bahwa sesuatu „akan" terdjadi. Ja, Hatta bertindak atas berita jang masih diragukan tentang *akan* terdjadinja sesuatu. Tetapi, adalah tidak diragukan lagi bahwa tindakan Hatta *sudah* berakibat dibunuhnja ribuan orang jang tidak berdosa tanpa proses.

Hatta Ingin Berkuasa Sewenang-wenang Lagi

Berdasarkan pengalaman dengan Peristiwa Madiun, dimana Hatta menelandjangi dirinja sebagai manusia jang tidak berperikemanusiaan, maka saja seudjung rambutpun tidak ragu bahwa Hatta, seperti belum lama berselang dimuat dalam koran² pernah mengutjapkan kepada Firdaus A.N., hanja bersedia berkuasa djika tidak bisa didjatuhkan oleh Parlemen. Kalau mau tahu tentang Hatta, inilah dia! Inilah politiknja, inilah moralnja, inilah se-gala²nja! Jaitu, seorang jang mau berkuasa setjara se-wenang².

Hatta samasekali tidak menghargai djerihpajah Rakjat jang kepanasan dan kehudjanan antri untuk memberikan suaranja untuk Parlemen kita sekarang. Lebih daripada itu, ia djuga tidak menghargai suaranja sendiri jang diberikannja ketika memilih Parlemen ini. Orang jang tidak menghargai orang lain sering kita temukan didunia ini. Tetapi orang jang tidak menghargai suaranja sendiri, ini keterlaluan.

Hatta ingin berkuasa kembali tanpa bisa didjatuhkan oleh Parlemen, ia mengimpikan masa keemasannja ditahun 1948. Kali ini jang mau didjadikannja mangsa bukan hanja putera² Indonesia asal suku Djawa dan Batak, tetapi djuga putera² suku lain, termasuk putera² suku Minangkabau, karena PKI sekarang sudah tersebar diseluruh Indonesia dan disemua suku. Tetapi, sebelum Hatta sampai kesitu, perlu saja peringatkan bahwa dalam tahun 1948 ia hanja berhadapan dengan 10.000 Komunis jang hanja tersebar setjara sangat tidak merata dipulau Djawa dan Sumatera, karena PKI ketika itu dilarang berdiri didaerah pendudukan Belanda. Tetapi sekarang, Hatta harus berhadapan dengan lebih satu djuta Komunis jang tersebar disemua pulau dan disemua suku. Saja perlu menjatakan ini, hanja untuk menerangkan betapa besar akibatnja kalau Hatta bermain „tangan besi" lagi. Dan ..... besipun bisa

patah!

Saja jakin, bahwa tiap² orang jang mempunjai perasaan tanggungdjawab tidak ingin terulang kembali tragedi nasional seperti Peristiwa Madiun itu. Dari fihak Partai Komunis Indonesia, seperti sudah ber-ulang² kami njatakan, dan sudah mendjadi peladjaran didalam Sekolah² dan Kursus² Partai kami, kami ingin dan kami jakin bisa mentjapai tudjuan² politik kami setjara parlementer. Kami akan menghindari tiap² perang saudara selama kepada kami didjamin hak² politik untuk memperdjuangkan tjita² kami. Tetapi, kalau kepada kami disodorkan udjung bajonet dan didesingkan peluru seperti dalam Peristiwa Madiun, djuga seperti selama peristiwa itu, kami tidak akan memberikan dada kami untuk ditembus bajonet dan ditembus peluru kaum kontra-revolusioner.

Kami kaum Komunis tidak ingin mengganggu siapa² selama kami tidak diganggu. Kami ingin bersahabat dengan semua orang, semua golongan dan semua partai jang mau bersahabat dan bekerdjasama dengan kami untuk haridepan jang lebih baik bagi tanah-air dan Rakjat Indonesia. Walaupun dihadapan kantor pusat Masjumi di Kramat Raja 45, Djakarta, terpantjang dengan djelas papan „Front Anti-Komunis", djadi anti kami, anti saja dan anti kawan² saja, tetapi kami kaum Komunis tidak akan ikut gila untuk djuga memantjangkan papan „Front Anti-Masjumi", apalagi „Front Anti-Islam". Kami tidak akan membiarkan diri kami terprovokasi oleh pemimpin² Masjumi ini. Saja pribadi tidak mau diprovokasi oleh kenalan lama saja, saudara Mohamad Isa Anshari, pemimpin akbar „Front Anti-Komunis".

Ber-angsur² Rakjat Indonesia berdasarkan pengalamannja sendiri mendjadi makin jakin bahwa bukanlah kaum Komunis jang anti-agama, tetapi sebaliknja, sedjumlah pemimpin partai² agamalah jang anti-Komunis dan menghasut anggota²nja supaja anti-Komunis.

Rakjat Indonesia sudah mengetahui bahwa dalam soal pemerintahan kami menginginkan terbentuknja pemerintah persatuan nasional dimana didalamnja duduk 4-Besar, djadi termasuk PKI dan Masjumi, ber-sama² dengan partai² lain. Ini akan kami perdjuangkan terus walaupun sampai hari ini saja kira Masjumi belum mau, karena masih mengikuti apa jang dikatakan oleh pemimpin

Masjumi saudara Moh. Natsir dalam muktamar Masjumi di Bandung bulan Desember 1956. Dalam muktamar tersebut saudara Moh. Natsir mengatakan antara lain bahwa pimpinan partai Masjumi *„meletakkan strateginja menghadapi pembentukan kabinet kepada dua pokok pikiran jaitu: (a) Memulihkan kerdjasama antara partai² Islam. (b) Menggabungkan tenaga² non-Komunis dalam kabinet, Parlemen dan masjarakat serta mengisolir PKI atau para crypto-Komunis dari kabinet".* (Halaman 22 „Laporan Beleid Politik Pimpinan Partai Masjumi"). Tjobalah renungkan, bukan persatuan nasional jang mereka adjarkan dan amalkan, tetapi perpetjahan nasional. Mengisolasi PKI adalah identik dengan mengisolasi ber-djuta² Rakjat Indonesia. Bagaimana persatuan nasional akan bisa tertjapai dengan sikap jang a-priori sematjam ini. Sikap sematjam ini hanja mempertegang keadaan politik dinegeri kita, dan jang untung bukan bangsa Indonesia, tetapi kaum imperialis asing, jang memang menginginkan peruntjingan keadaan dan perpetjahan didalam tubuh bangsa kita.

Djadi, kapankah semua pemuka bangsa kita akan beladjar dari pengalaman Peristiwa Madiun jang tragis itu, supaja tidak lagi mengulangi kesalahan tindakan dan kebidjaksanaan agar persatuan bangsa kita terpelihara baik, supaja kita tidak gegabah dalam mengambil tindakan², apalagi tindakan² jang bisa berakibat luas? Saja berusaha dan terus akan berusaha untuk menarik peladjaran sebanjak²nja dari pengalaman sedjarah itu.

Kabinet Ali-Idham Ber-puluh² Kali Lebih Bidjaksana Daripada Kabinet Hatta

Dibanding dengan kebidjaksanaan pemerintah Hatta dalam menghadapi kedjadian di Madiun dalam bulan September 1948, kabinet Ali-Idham sekarang ber-puluh² kali lebih bidjaksana. Padahal kalau melihat kedjadiannja, pengangkatan seorang Wakil Walikota mendjadi Residen sementara karena dipaksa oleh keadaan, belumlah apa² kalau dibanding dengan pengoperan pimpinan pemerintah daerah Sumatera Tengah oleh orang² „Dewan Banteng", jang terang²an direntjanakan terlebih dulu dalam reunie ex-divisi Banteng bulan November 1956, dan jang terang²an sudah pernah

menolak dan menghina perutusan pemerintah pusat jang datang untuk berunding. Apalagi kalau dibanding dengan perbuatan komplotan kolonel Simbolon pada tanggal 22 Desember 1956, jang terang²an menjatakan tidak lagi mengakui pemerintah jang sah sekarang. Apalagi, kalau kita ingat bahwa maksud jang sesungguhnja dari semua tindakan itu jalah untuk memisahkan Sumatera dan Kalimantan dari Pemerintah Pusat, mendirikan negara Sumatera dan Kalimantan serta mengadakan hubungan luarnegeri sendiri. Apalagi kalau diingat bahwa ada maksud² untuk menjerahkan pulau We di Utara Sumatera kepada negara besar tertentu untuk didjadikan pangkalan-perang. Apalagi kalau diingat bahwa semua rentjana itu sesuai sepenuhnja dengan apa jang direntjanakan oleh Pentagon dan State Department Amerika Serikat, oleh „djenderal²" DI-TII dan aparat² serta kakitangan² Amerika lainnja jang ada di Indonesia. Djika diingat semuanja ini, maka pengangkatan Wakil Walikota Supardi mendjadi Residen sementara Madiun adalah hanja „kinderspel" (permainan kanak²).

Tetapi penamaan apa jang diberikan oleh Hatta kepada kedjadian² di Madiun bulan September 1948 dan penamaan apa pula jang diberikan orang kepada perbuatan² kaum pemberontak di Sumatera pada bulan Desember 1956? Peristiwa Madiun dinamakan „merobohkan Republik Indonesia", dinamakan „kudeta", tetapi pemberontakan di Sumatera jang sepenuhnja dan setjara terang²an disokong oleh kaum imperialis asing, terutama kaum imperialis Amerika dan Belanda, mereka namakan „tindakan konstruktif" demi „kepentingan daerah". Saja bertanja: Konstruktif untuk siapa? Untuk kepentingan daerah mana? Memang konstruktif sekali tindakan kaum pemberontak di Sumatera, konstruktif dalam rangka membangun pangkalan² perang SEATO! Memang untuk kepentingan daerah, kepentingan perluasan daerah SEATO! Djadi, samasekali tidak konstruktif untuk Rakjat Indonesia dan samasekali bukan untuk kepentingan daerah Indonesia!

Demikianlah, apa sebabnja saja katakan bahwa mengemukakan Peristiwa Madiun dalam keadaan sekarang untuk memukul PKI adalah seperti menepuk air didulang. Bukannja PKI jang ketjipratan, tetapi djustru si-penepuk air jang sial itu. Mengemukakan soal Peristiwa Madiun dalam menghadapi Peristiwa Sumatera

sekarang berarti memberi alasan jang kuat untuk mengkonfrontasikan kebidjaksanaan jang memang bidjaksana dari kabinet Ali-Idham sekarang dengan kebidjaksanaan jang tidak bidjaksana dari kabinet Hatta, dalam tahun 1948. Djika sudah dikonfrontasikan, maka akan merasa berdosalah orang² jang ber-teriak² ingin melihat naiknja Hatta kembali, ketjuali kalau orang² itu memang ingin melihat Hatta sekali lagi mempermainkan njawa umat Indonesia sebagai mempermainkan njawa anak ajam.

Kebidjaksanaan kabinet Ali-Idham dalam menghadapi Peristiwa Sumatera sekarang tidak disebabkan terutama karena Ali Sastroamidjojo seorang Indonesia dari suku Djawa jang toleran, tidak, tetapi karena pimpinan kabinet sekarang terdiri dari orang² jang mempunjai perasaan tanggungdjawab jang besar. Sukurlah, bahwa ketika terdjadi Peristiwa Sumatera Hatta tidak memegang fungsi dalam pimpinan negara, walaupun saja tidak ragu adanja sangkutpaut Hatta dengan kedjadian² itu. Kalau Hatta memegang fungsi penting, apalagi kalau Hatta memegang tampuk pemerintahan, entah berapa banjak lagi korban jang dibikinnja.

Dalam usaha menjelesaikan Peristiwa Sumatera ada orang² jang ingin supaja soal kolonel Simbolon „diselesaikan setjara adat", supaja soal „Dewan Banteng" diselesaikan „setjara musjawarat", setjara „potong kerbau" dan dengan „menggunakan pepatah dan petitih". Pendeknja, adat, kerbau serta pepatah dan petitih mau dimobilisasi untuk menjelesaikan soal kolonel Simbolon dan soal „Dewan Banteng". Sampai² orang² jang tidak beradat djuga berbitjara tentang „penjelesaian setjara adat".

Tetapi, orang² ini pada bungkam semua ketika Amir Sjarifuddin dengan tanpa proses ditembus oleh peluru atas perintah Hatta. Ketika Amir Sjarifuddin masih ditahan dipendjara Djokja sebelum dibawa ke Solo dan digiring kedesa Ngalian untuk ditembak, tidak ada seorang Batak atau siapapun jang tampil kedepan dan mengatakan: „Mari soal Amir Sjarifuddin kita selesaikan setjara adat tanah Batak", atau „Mari soal Amir Sjarifuddin kita selesaikan setjara Keristen".

Saja hanja ingin bertanja: Apakah Amir Sjarifuddin jang bermarga Harahap itu kurang Bataknja daripada kolonel Simbolon sehingga adat Batak mendjadi tidak berlaku bagi dirinja? Saja kira

Amir Sjarifuddin tidak kalah Bataknja daripada orang Batak jang mana djuapun, malahan ia tidak kalah Keristennja daripada kebanjakan orang Keristen. Amir Sjarifuddin meninggal sesudah ia menjanjikan lagu Internasionale, lagu Partainja, lagu kesajangannja, dan ia meninggal dengan Kitab Indjil ditangannja. Amir Sjarifuddin adalah putera Batak jang baik, jang patriotik, dan karena itu djuga ia adalah seorang putera Indonesia jang baik. Djadi tidak sepantasnja adat tanah Batak tidak berlaku baginja.

Bagaimana pula halnja ribuan orang Djawa jang didrel tanpa proses atas perintah Hatta itu? Apakah suku Djawa jang menderita dari abad keabad tidak mengenal musjawarat dan tidak mengenal pepatah dan petitih sehingga ketika dilantjarkan kampanje pembunuhan terhadap orang² Djawa selama Peristiwa Madiun tidak ada orang Djawa jang beradat dan tidak ada tjerdik-pandai Djawa jang tampil kedepan untuk menjelesaikan persoalan ketika itu setjara rembugan (musjawarat), setjara adat, dan dengan berbitjara menggunakan banjak paribasan (peribahasa), dengan potong sapi, potong kerbau, dan dengan mbeleh wedus (potong kambing)? Ataukah karena pulau Djawa sudah kepadatan penduduk maka pembunuhan atas orang² Djawa oleh tangan besi burdjuis Minang Mohammad Hatta boleh dibiarkan? PKI tampil kedepan untuk kepentingan „de zwijgende Javanen" („orang² Djawa jang berdiam diri") ini, baik mereka Komunis ataupun bukan-Komunis. Ja, djika soal ini dibawa kepengadilan, PKI djuga akan berbitjara atasnama pradjurit², bintara² dan perwira² dari suku Djawa jang mati karena melakukan tugas „membasmi Komunis" jang diperintahkan oleh Hatta. Pradjurit², bintara² dan perwira² jang mati dalam pertempuran melawan Komunis ketika itu adalah tidak bersalah, sama tidak bersalahnja dengan Komunis² jang mereka tembak. Mereka semuanja adalah korban permainan politik perang saudara Hatta. Tidak hanja kami, sebagai pewaris² dari pahlawan² Komunis dalam Peristiwa Madiun, tetapi djuga keluarga para pradjurit, bintara dan perwira TNI jang disuruh „membasmi Komunis" berhak untuk mendakwa Hatta sebagai pembunuh sanak-saudara mereka, djika soal ini dibawa kepengadilan.

Mari sekarang kita lihat bagaimana sikap pemerintah Hatta terhadap perwira jang belum tentu bersalah dalam Peristiwa Madiun, dan bagaimana sikap pemerintah Ali-Idham sekarang terhadap opsir² jang sudah terang bersalah dalam pemberontakan² di Sumatera.

Pemerintah Hatta dengan tanpa memeriksa lebih dulu kesalahan mereka terus sadja memetjat perwira², antara lain jang masih hidup sekarang bekas Djenderal Major Ir. Sakirman, bekas Letnan Kolonel Martono, bekas Major Pramudji, dan banjak lagi. Padahal perwira² ini belum pernah dipanggil untuk menghadap, apalagi diperiksa; djadi samasekali tidak ada dasar untuk memetjat mereka. Para perwira jang belum tentu bersalah tidak hanja dipetjat, tetapi banjak djuga jang disiksa diluar perikemanusiaan dan dibunuh tanpa dibuktikan kesalahannja terlebih dahulu.

Sekedar untuk mengetahui bagaimana pembunuhan² kedjam oleh alat² resmi ketika itu, bersama ini saja lampirkan 3 buah turunan laporan resmi dan pengakuan resmi tentang pembunuhan terhadap diri Sidik Aslan dkk. dan terhadap letnan kolonel Dachlan dan major Mustoffa (2). Untuk menghemat waktu tidak saja batjakan lampiran² ini. Lampiran² ini saja sampaikan lepas dari penilaian siapa dan bagaimana major Sabarudin, pembuat pengakuan² tersebut. Jang sudah terang major Sabarudin bukan simpatisan PKI, apalagi anggota PKI.

Kekedjaman pemerintah Hatta selama Peristiwa Madiun adalah ber-puluh² kali lebih kedjam daripada pemerintah kolonial Belanda ketika menghadapi pemberontakan Rakjat tahun 1926. Pemerintah kolonial Belanda masih memakai alasan² hukum untuk membunuh, memendjarakan dan mengasingkan kaum pemberontak, tetapi Hatta sepenuhnja mempraktekkan hukum rimba. Semuanja ini mengingatkan saja kembali pada tulisan Hatta jang berkepala „14 Djuli", dimuat dalam harian „Pemandangan" pada 14 Djuli 1941 dimana antara lain ia menulis tentang Petain, seorang Perantjis boneka Hitler, sebagai *„seorang serdadu jang berhati lurus dan djudjur"*. Hanja serigala mengagumi serigala, hanja fasis mengagumi fasis!

Bandingkanlah sikap pemerintah Hatta terhadap kedjadian di Madiun dengan sikap pemerintah sekarang terhadap kolonel Simbolon jang sudah terang bersalah karena merebut kekuasaan disebagian wilajah Republik Indonesia, jang sudah terang melanggar

disiplin militer atau jang oleh Presiden Sukarno/Panglima Tertinggi dalam amanatnja tanggal 25 Desember 1956 dirumuskan telah berbuat jang *„menggontjangkan sendi² ketentaraan dan kenegaraan kita, dan jang membahajakan keutuhan tentara dan negara kita pula"*. Kolonel Simbolon hanja diberhentikan sementara sebagai Panglima Tentara dan Teritorium I. Sedangkan terhadap pemimpin² pemberontakan militer di Sumatera Tengah sampai sekarang belum diambil tindakan apa².

Tentu ada orang² jang mengatakan: ja, karena Panglima Tertinggi, Pemerintah dan Gabungan Kepala Staf Angkatan Perang sekarang tidak mempunjai kewibawaan, maka mereka tidak menghukum perwira² tersebut seperti Hatta dulu menghukum perwira² jang disangka tersangkut dalam Peristiwa Madiun.

Istilah „wibawa" pada waktu belakangan ini banjak dipergunakan orang dengan masing² mempunjai interpretasinja sendiri². Kalau dengan istilah „wibawa" jang dimaksudkan jalah kemampuan pemerintah untuk bertindak, maka terang bahwa pemerintah sekarang sanggup bertindak, sanggup memerintah, artinja mempunjai kewibawaan. Apakah bukan tanda wibawa dari pemerintah sekarang dengan dapatnja digulingkan keradjaan sehari komplotan kolonel Simbolon dalam waktu jang sangat singkat?

Tanggal 22 Desember 1956 pemerintah memutuskan dan mengumumkan pemberhentian sementara kolonel Simbolon sebagai Panglima TT I dan menjerahkan tanggungdjawab TT I kepada letnan-kolonel Djamin Gintings atau letnan-kolonel A. Wahab Macmour. Dalam waktu hanja empat hari, jaitu pada tanggal 27 Desember 1956 komplotan kolonel Simbolon sudah dapat diturunkan dari keradjaan seharinja. Ini artinja bahwa seruan pemerintah dipatuhi, ini artinja pemerintah mempunjai kewibawaan.

Tentu ada orang² jang berkata lagi: ja, tetapi itu mengenai Sumatera Utara. Mengenai Sumatera Tengah pemerintah tidak mempunjai kewibawaan. Mengenai ini saja djawab sbb.: Tiap² orang jang tahu imbangan kekuatan didalam negeri tidak sukar memahamkan, bahwa kalau pemerintah pusat sekarang mau bertindak, apalagi kalau mau bertindak serampangan seperti Hatta, maka dengan pengerahan serentak seluruh kekuatan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dengan dibantu oleh

massa Rakjat, maka keradjaan „Dewan Banteng" djuga hanja akan merupakan keradjaan sehari. Soalnja bukanlah hanja menundjukkan kemampuan menggunakan kekuatan seperti jang pernah dilakukan oleh Hatta, tetapi djuga kebidjaksanaan. Pada pokoknja kami setudju bahwa pemerintah sekarang mengkombinasi kekuatan riilnja dengan kebidjaksanaan. Sikap ini merupakan dasar jang kuat bagi pemerintah, djika pada satu waktu pemerintah harus bertindak keras, karena djalan perundingan sudah tidak mempan lagi.

Walaupun kami kaum Komunis pernah diperlakukan setjara kedjam oleh pemerintah Hatta selama Peristiwa Madiun, tetapi kami tidak menjetudjui djika pemerintah sekarang mentjontoh perbuatan Hatta jang gegabah dan tidak bertanggungdjawab itu. Kita semua mengetahui bahwa politik „tangan besi" Hatta sepenuhnja menguntungkan kepentingan kaum imperialis asing. Ja, walaupun banjak perwira penganut tjita² PKI jang dibasmi setjara djasmaniah dalam Peristiwa Madiun, tetapi kami tidak menuntut supaja kolonel Simbolon, letnan-kolonel Ahmad Husein dll. dibasmi setjara djasmaniah. Apalagi kami tahu bahwa banjak opsir² jang tersangkut dalam pemberontakan² di Sumatera adalah karena hasutan² sebuah partai ketjil jang keok dalam pemilihan umum jl. Kami tidak menghendaki penumpahan darah jang disebabkan oleh kehampaan kebidjaksanaan.

Djadi apakah jang kami inginkan?

Kami hanja ingin, supaja disiplin militer berdjalan sebagaimana mestinja, supaja hierarchie ketentaraan ditaati dengan patuh, supaja Angkatan Perang tetap setia kepada tjita² Revolusi Agustus 1945, karena hanja dengan demikian kita dapat membangun Angkatan Perang jang mampu membantu menjelesaikan semua tuntutan Revolusi Agustus 1945. Hanja dengan penegakan tatatertib hukum dalam ketentaraan jang berdjiwa Revolusi Agustus 1945 Angkatan Perang kita akan setia kepada sumbernja, jaitu Revolusi dan Rakjat.

Sebagaimana sudah saja katakan diatas, ada sementara orang berteriak supaja diadakan penjelesaian „setjara adat", „dengan potong kerbau" dan „dengan menggunakan pepatah dan petitih". Tetapi, djika kita tidak waspada, apakah jang tersembunji dibelakang kata² ini semuanja? Tidak lain jalah untuk mentjairkan disiplin dalam Angkatan Perang kita, untuk mengatjau-balaukan hier-

archie dan tatatertib hukum didalam ketentaraan kita. Saja tidak berkeberatan djika djuga ditempuh djalan setjara adat, kerbau² dipotongi dan segala matjam pepatah dan petitih nenekmojang digali dan dipakai, karena semuanja ini memang warisan dan milik kita sendiri. Tetapi djangan lupa, bahwa semuanja ini hanjalah faktor tambahan. Jang primer bagi orang² militer jalah tatatertib hukum didalam ketentaraan. Kalau tidak demikian lebih baik perwira² jang bersangkutan menanggalkan epoletnja dan kembali kekampung untuk duduk dalam lembaga² adat dikampung. Disanalah barangkali mereka akan menemukan ketenteraman djiwanja.

Sesudah mengkonfrontasikan Peristiwa Madiun 1948 dengan Peristiwa Sumatera 1956, maka sampailah saja pada kesimpulan, bahwa pemerintah Ali-Idham sekarang ber-puluh² kali lebih bidjaksana daripada pemerintah Hatta ketika menghadapi kedjadian² di Madiun dalam bulan September 1948. Ini dilihat dari sudut kebidjaksanaan. Dilihat dari sudut kewibawaan pemerintah Ali-Idham mempunjai kewibawaan, dibuktikan oleh ketaatan alat²nja pada umumnja. Jang tidak mentaati pemerintah sekarang hanja minoritet jang sangat ketjil jang sudah diratjuni oleh sebuah partai ketjil dan oknum² liar jang tidak melihat haridepannja dalam demokrasi, tetapi dalam sesuatu kekuasaan militeris-fasis. Adalah djanggal dan tidak bertanggungdjawab djika pemerintah Ali-Idham menjerah kepada ambisi partai ketjil dan oknum² liar ini.

Selandjutnja dapat pula ditarik kesimpulan, bahwa adalah perbuatan jang tidak bertanggungdjawab untuk memberi kans sekali lagi kepada Mohammad Hatta, bapak perang saudara, seorang jang karena haus kekuasaan dan pendek akal telah menewaskan beribu-ribu Rakjat dan pemuda, baik orang² sipil maupun orang² militer kita jang baik².

Dwitunggal Tidak Pernah Ada

Sementara orang tentu akan bertanja: Tetapi bagaimana dengan „dwitunggal"? Per-tama² perlu saja njatakan bahwa dwitunggal tidak pernah ada, bahwa dwitunggal hanja ada dalam dunia impian orang² jang tidak mengerti seluk-beluk sedjarah perdjuangan kemerdekaan dan sedjarah pentjetusan Revolusi Agustus 1945.

Kalau orang mau tenang dan mau meng-ingat² kembali pada pertentangan pendapat jang sengit antara Sukarno dengan „Partai Indonesia" (Partindo) disatu fihak dan Hatta-Sjahrir dengan apa jang dinamakan „Pendidikan Nasional Indonesia" difihak lain, maka orang akan sependapat bahwa dwitunggal jang sungguh² memang tidak pernah ada. Untuk pertama kali, pada kesempatan ini ingin saja njatakan, bahwa saja sudah lama merasa ikut berdosa karena sudah ambil bagian aktif dalam gerakan memaksa Hatta menandatangani Proklamasi 17 Agustus 1945. Hatta sudah sedjak semula setjara ngotot menentang pentjetusan Revolusi Agustus. Ia menggantungkan kemerdekaan Indonesia sepenuhnja pada rachmat Saikoo Sikikan (Panglima Tertinggi Tentara Djepang di Indonesia) jang tidak kundjung tiba itu.

Saja merasa lebih² ikut berdosa lagi ketika membatja pidato Hatta waktu menerima gelar Dr. HC dari Universitas „Gadjah Mada" dimana dengan tegas dikatakannja bahwa revolusi harus dibendung. Kalau saja tidak salah Universitas „Gadjah Mada" sudah tiga kali memberikan gelar kehormatan, pertama kepada Presiden Sukarno, kedua kepada Hatta dan ketiga kepada Ki Hadjar Dewantara. Pemberian jang pertama dan ketiga, menurut pendapat saja, adalah tepat, karena Universitas „Gadjah Mada" jang dilahirkan oleh revolusi memberikan gelar kehormatan kepada orang² revolusioner, pengabdi² revolusi. Tetapi pemberian jang kedua, jaitu pada Hatta, maaf, adalah satu kekeliruan jang mungkin tidak disengadja. Betapa tidak keliru, sebuah universitas jang dilahirkan oleh revolusi memberikan gelar kehormatan kepada seorang jang ingin membendung revolusi, kepada seorang kontra-revolusioner.

Dwitunggal jang terdiri dari seorang revolusioner dan jang seorang lagi kontra-revolusioner samasekali bukan dwitunggal. Oleh karena itulah saja katakan, dwitunggal tidak pernah ada, ketjuali didalam dongengan dan impian. Dongengan tentang dwitunggal inilah jang antara lain telah membikin revolusi kita mendjadi matjet, karena dwitunggal jang di-bikin² itu, jang heterogin itu, telah membikin kita terdjepit diantara dua kutub, kutub revolusi dan kutub kontra-revolusi. Selama lebih sebelas tahun Rakjat Indonesia sudah ditipu dengan apa jang dinamakan dwitunggal.

Revolusi kita berdjalan terus, semua kekuatan revolusioner harus dipersatukan dan dimobilisasi untuk mengalahkan kekuatan2 kontra-revolusioner.

Demikianlah, penilaian saja mengenai kebidjaksanaan pemerintah sekarang, sesudah saja mengkonfrontasikan kebidjaksanaan pemerintah sekarang dengan kebidjaksanaan pemerintah Hatta ditahun 1948. Saja dipaksa untuk memberikan penilaian setjara ini, karena ada salahseorang anggota Parlemen kita jang dalam pemandangan umumnja mem-bawa2 Peristiwa Madiun.

Sebagai pembahasan atas tulisan Hatta jang tidak menjetudjui adanja Konsepsi Presiden Sukarno berikut ini adalah tulisan Kawan D.N. Aidit jang memberikan djawaban setjara tepat dan sekaligus menelandjangi kedjahatan Hatta sebagai otak kekuatan reaksi didalam-negeri.

Fakta2 jang mejakinkan antara lain tidak pernah memprotes kegiatan subversif, tidak pernah mengutuk pemberontakan kontra-revolusioner „PRRI"-Permesta, semangat anti-Komunisnja serta sikapnja jang tidak suka akan adanja persatuan nasional merupakan bukti kongkrit bahwa Hattalah jang sebenarnja mendjadi biangkeladi dalam usaha2 menggagalkan Konsepsi Bung Karno, mendjadi agen kolonialis Belanda dan imperialis Amerika.

Tetapi sedjarah berkembang berlawanan dengan alam fikiran Hatta. Gagasan Gotongrojong jang mendjadi tjiri dari Konsepsi Presiden Sukarno semakin tertanam dihati Rakjat hingga perundingan Tampaksiring antara Presiden Sukarno dengan pimpinan partai2 PKI-PNI-NU (tanggal 8-11 Maret 1960) menghasilkan terbentuknja DPR Gotongrojong tanpa Masjumi-PSI. Usaha2 untuk menggagalkan pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno jang dikemudikan oleh Hatta semakin gagal, bahkan sebaliknja usaha2 untuk melaksanakan Kabinet Gotongrojong tanpa Masjumi-PSI semakin mendjadi kenjataan.

HATTA BIANGKELADI DALAM MENGGAGALKAN KONSEPSI BUNG KARNO

Dalam harian sosialis kanan „Pedoman" tanggal 2 Maret 1957 dimuat sebuah tulisan Hatta jang berkepala *„Menindjau Konsepsi Bung Karno"*. Saja merasa perlu membahas tulisan Hatta ini, karena dalam tulisan tersebut Hatta djuga mempersoalkan PKI dan „kaum Komunis" dalam hubungan dengan Konsepsi Bung Karno. Hatta jang ketika mudanja banjak memberi djandji² jang muluk² kepada Rakjat, misalnja tentang persatuan nasional, tentang demokrasi ekonomi, kemakmuran dll., tetapi sekarang nampak dari tulisannja tersebut ia adalah „otak" dan tokoh utama dari kubu reaksi didalamnegeri. Dari tulisannja tersebut njata, bahwa Hatta belum puas dengan pembunuhan² jang sudah dilakukan dibawah pemerintahnja selama Peristiwa Madiun. Ia masih menjimpan fikiran untuk „menghantjurkan kaum Komunis" atau sekurang²nja „membendung arus Komunis" sebagai „tugas sedjarah jang sutji" seperti djuga jang mendjadi „tugas sedjarah" kaum milioner di Washington, Amsterdam, London, dll.

Dalam tulisan tersebut, untuk membikin pembatjanja mengetjilkan arti Konsepsi Bung Karno, Hatta pentingkan per-tama² menimbulkan purbasangka terhadap Sukarno dan mendjatuhkan prestise Sukarno dengan mengemukakan „analisenja" tentang „djiwa Bung Karno". Bung Karno disamping seorang politikus dan pemimpin, kata Hatta, adalah seorang jang berdjiwa artis jang ber-kobar² dalam dadanja dan oleh karena itu Bung Karno hidup dalam impian. *„Sebagai pentjinta seni ia ingin memandang semuanja dalam keindahan, dalam suasana jang harmonis, dalam kesatuan jang bulat. Djiwanja luka melihat keretakan. Sebab itu persatuan mendjadi pokok dan achir dari segala tudjuannja"*, demikian Hatta. Dengan ini tidak hanja terbukti bahwa Hatta tidak mengerti Sukarno, tetapi sekaligus ia mempertontonkan kekampaan pengertiannja tentang „seniman". Bagi Hatta pukul rata seniman bukan realis, seniman baginja adalah tukang ngelamun. Dan karena Sukarno berdjiwa seniman, maka Sukarno djuga adalah tukang ngelamun dan dengan sendirinja Konsepsinja adalah tidak realis. Dengan ini Hatta sudah menelandjangi dirinja sendiri sebagai „tukang analise djiwa jang mendalam".

Dalam tulisan tersebut Hatta djuga menjatakan tidak setudjunja dengan usaha Bung Karno mendirikan PPPKI dalam bulan Desember 1927. Hatta tidak setudju karena *„didalam PPPKI tidak boleh dikemukakan dasar² jang mengenai pertentangan faham jang prinsipiil diantara anggota²nja, seperti agama dan non-cooperation"*. Dari sini djelas betapa pitjiknja pengertian Hatta tentang politik persatuan nasional. Ia tidak mengerti atau tidak mau mengerti, bahwa dalam mendjalankan politik persatuan adalah kewadjiban jang mau bersatu untuk mentjari titik² pertemuan dan bukan untuk mentjari titik perbedaan dengan mengemukakan soal² prinsipiil jang bisa memetjahbelah.

Atas pengertian jang pitjik ini pulalah Hatta dalam tulisannja tersebut tidak menjetudjui adanja kerdjasama dalam kabinet antara partai² agama, nasionalis dan komunis. Dan lebih pitjik lagilah mereka jang menerima fikiran pitjik ini!

Kata Hatta Bung Karno hidup dalam impian dan inilah, menurut Hatta, jang sering menjebabkan Bung Karno *„terbentur dalam realitet, dahulu dan sekarang"*. Dengan ini mau dikatakannja bahwa djuga Konsepsi Bung Karno sudah terbentur dalam „realitet". Apa jang dimaksudkan Hatta dengan „realitet" jalah sikap kepalabatu pemimpin² Masjumi klik Natsir jang setjara ngotot menolak Konsepsi Bung Karno, artinja menolak persatuan. Djika ini jang dinamakan „realitet", maka hanja kaum imperialis asinglah jang menarik keuntungan dari „realitet" ini, dan dengan ini djelaslah realitet dari Hatta sendiri!

Setelah mengatakan Bung Karno bukan realis dan Konsepsi Bung Karno adalah lamunan, maka Hatta dalam tulisannja, sebagai seorang „realis" sudah tentu, mengusulkan supaja meng-indjak² UUD dengan membentuk Kabinet Presidentiil dan supaja praktek jang dulu dilakukan di Djokja selama tahun 1948 dapat dihidupkan kembali. Dengan ini Hatta mau menjatakan bahwa Dewan Nasional tidak perlu dan tjara² dia „membasmi Komunis" tahun

1948, itulah jang tepat. Hatta mengimpikan zaman keemasannja, zaman panen mentjabut njawa orang² Komunis.

Menurut „realis" Hatta Kabinet Gotongrojong hanja bisa dilaksanakan *„apabila partai² jang duduk didalam DPR semuanja sama tudjuannja"*. Djadi, selama PKI, PNI, NU, Parkindo, Katolik dll. tidak bertudjuan mendirikan Negara Darul Islam seperti tudjuan Masjumi, maka tidak bisa dilaksanakan Kabinet Gotongrojong. Inilah „realitet" menurut Hatta!

Supaja tidak tertjipta persatuan dan supaja gagal Kabinet Gotongrojong, maka Hatta sengadja membawa segala sesuatu kesoal prinsipiil dan mengalihkan perhatian dari kenjataan kongkrit sekarang, jaitu kenjataan bahwa Rakjat Indonesia jang bermatjam ragam agama dan kejakinan politiknja seluruhnja adalah anti-kolonialisme, tidak suka pada peperangan baru, dan oleh karena itu bisa bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan nasional, membela Republik Proklamasi dan membela perdamaian dunia.

Dari penolakan Hatta terhadap Konsepsi Bung Karno djelaslah, bahwa djika persatuan nasional tidak tertjapai, djika Kabinet Gotongrojong gagal, djika keadaan Rakjat tetap djelek seperti sekarang, djika gerakan separatis dan aksi² subversif asing tetap meradjalela, maka orang Indonesia jang pertama bertanggungdjawab adalah Hatta.

Selandjutnja, agar tidak terbentuk Kabinet Gotongrojong dengan sangat lantjar Hatta membeo fitnahan² van der Plas dan orang² State Department Amerika Serikat se-olah² kaum Komunis disemua negeri lebih mementingkan Uni Sovjet daripada mementingkan negerinja sendiri, se-olah² kaum Komunis tunduk se-mata² kepada pimpinan Moskow adalah hukum dasar hidup. Ini dikemukakan Hatta tanpa bukti. Oleh karena itu, apakah tidak sebaiknja Hatta memeriksa diri sendiri, bahwa usahanja menggagalkan persatuan Rakjat, dengan menggagalkan Konsepsi Bung Karno adalah bukti jang menjolok dari perbuatan agen kolonialis Belanda dan imperialis Amerika.

Hatta ngotot mempertahankan pendirian kolotnja, bahwa demokrasi mutlak harus dengan oposisi. Hatta menginginkan supaja PKI didudukkan sebagai oposisi sadja. Menurut Hatta, PKI supaja beroposisi sadja jang baik dan tegas didalam Parlemen agar a.l. dapat

mentjegah korupsi diantara partai² pemerintah, dan dengan begitu ikutserta memperbaiki moral politik jang sudah merosot sekarang ini. Djika memang dari PKI diharapkan supaja melakukan tugas jang begitu mulia dalam Parlemen, apa sebabnja dengan tudjuan itu djuga PKI tidak dimasukkan kedalam kabinet? Alangkah kusutnja fikiran realis jang tidak riil ini!

Kaum reaksioner Indonesia sudah mengerahkan segenap kekuatan djasmani dan rohaninja untuk menggagalkan Konsepsi Bung Karno. Djuga Hatta jang merupakan „otak" kaum reaksioner Indonesia sudah memobilisasi „alasan² ilmiahnja". Tetapi, walaupun demikian, kebenaran Konsepsi Bung Karno bukannja makin berkurang tetapi makin mejakinkan. Konsepsi Bung Karno adalah sesuatu jang setjara tepat mendjawab problim politik jang urgen jang sekarang dihadapi oleh Rakjat Indonesia. Konsepsi Bung Karno adalah satu kebenaran ilmiah. Djika misalnja Konsepsi ini belum bisa dilaksanakan, atau belum bisa dilaksanakan sepenuhnja pada waktu sekarang, bukanlah karena ia tidak benar, tetapi disebabkan oleh faktor lain, jaitu faktor imbangan kekuatan, termasuk faktor Hatta dan pemimpin² Masjumi klik Natsir. Halnja sama sadja seperti tuntutan *„Indonesia merdeka sekarang"* dari Rakjat Indonesia pada zaman pendjadjahan Belanda dulu. Djika pada waktu tuntutan itu dikeluarkan Indonesia tidak segera mendjadi merdeka, bukanlah karena tuntutan „Indonesia merdeka sekarang" salah atau tuntutan itu ngelamun, tetapi karena perimbangan kekuatan jang belum memungkinkan. Sebagaimana „Indonesia merdeka sekarang" sebagai tuntutan jang adil dan benar kini sudah mendjadi satu kenjataan, demikianlah Konsepsi Bung Karno djuga akan mendjadi satu kenjataan. Oleh karena itu, aksi Rakjat Indonesia jang menuntut dilaksanakannja Konsepsi Bung Karno adalah aksi jang adil dan benar. Oleh karena tuntutan dan aksi² itu adalah adil dan benar, maka kaum Komunis Indonesia bersama² dengan Rakjat Indonesia akan terus menuntut dan beraksi guna pelaksanaan Konsepsi Bung Karno 100%.

Untuk menakut-nakuti dirinja sendiri pemimpin² kaum reaksioner mem-bisik²kan bahwa Konsepsi Bung Karno itu adalah „berkat bisikan orang² negeri² Komunis", negeri² jang belum berapa lama dikundjungi oleh Bung Karno. Bagi mereka jang mungkin

pertjaja pada bisikan ini perlu diingatkan, bahwa dalam pidato dimuka *„Badan Penjelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan"*, kira² satu setengah bulan sebelum proklamasi 17 Agustus 1945, djadi terang lama sebelum Bung Karno berkundjung ke-negara² kubu sosialis, dan malahan lama sebelum RRT berdiri, Bung Karno sudah berkata bahwa kita harus mendirikan negara *„Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan kaja — tetapi 'semua buat semua!' "*. Sekarang negara „semua buat semua" mendapat perumusan „Kabinet Gotong-rojong". Djuga dalam pidatonja ini Bung Karno sudah mengatakan bahwa *„Kalau kita mentjari demokrasi, hendaklah bukan demokrasi barat, tetapi permusjawaratan jang memberi hidup, jakni politik-ekonomische democratie jang mampu mendatangkan kesedjahteraan sosial"*.

Djelaslah, bahwa Konsepsi Bung Karno adalah bukti kesetiaan Bung Karno pada djandji²nja jang menguntungkan Rakjat, jang diutjapkan ketika bangsa Indonesia akan memasuki Revolusi Agustus 1945. Kesetiaan pada djandji jang menguntungkan Rakjat adalah penting bagi tiap² pemimpin jang mau mendapat kepertjajaan dari Rakjat. Dari sudut ini sadja kita kaum Komunis sudah harus menghargai Konsepsi Bung Karno.

Djadi, Konsepsi Bung Karno samasekali tidak ada persamaannja, baik dalam isi maupun bentuknja, dengan apa jang dinamakan „Dewan Gadjah", „Dewan Banteng", „Dewan Garuda" dan „dewan²" kontra-revolusioner lainnja jang sepenuhnja dibangun menurut resep fasis, jang dibikin karena kaum reaksioner sudah tidak pertjaja lagi bahwa dengan djalan demokratis tudjuan politik mereka akan dapat ditjapai. „Dewan²" kontra-revolusioner dibentuk sebagai landjutan gerakan separatis, aksi² subversif asing dan gerakan meluaskan daerah SEATO, sedangkan Konsepsi Bung Karno adalah untuk memperkuat Republik Indonesia dan untuk melawan tiap² usaha asing jang ingin merusak kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.

Konsepsi Bung Karno harus terus dipropagandakan sampai konsepsi ini terlaksana 100%. Kekuatan Rakjat harus terus disusun dan imbangan kekuatan harus terus diubah — semuanja untuk melaksanakan Konsepsi Bung Karno 100%. Kita lakukan semuanja ini, karena dengan ini berarti kita mempersatukan Rakjat dan memobilisasi Rakjat untuk satu konsepsi politik jang menguntungkan Rakjat. Disamping itu tentu adalah djuga kewadjiban Partai kita untuk mempropagandakan Program Umum Partai, jaitu Program penjelesaian tuntutan² Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja. Inilah tugas sedjarah kita, tugas sedjarah Rakjat Indonesia jang tegas bertentangan dengan tugas sedjarah Mohamad Hatta, realis jang tidak riil itu.

Djakarta, 7 Maret 1957

Tulisan Kawan D.N. Aidit berikut ini dimaksudkan untuk memberikan pegangan kepada Rakjat dalam menghadapi pelaksanaan berlakunja Keadaan Darurat Perang diseluruh wilajah Indonesia termasuk semua teritorium perairan wilajah Republik Indonesia.

Disamping memberikan pengertian terhadap siapa sesungguhnja SOB itu ditudjukan keterangan Kawan D.N. Aidit djuga mentjanangkan kemungkinan pensalahgunaan keadaan darurat perang tersebut oleh orang reaksioner, kaum birokrat, kaum koruptor, kaum penggelap dan elemen2 fasis untuk kepentingan dirinja atas kerugian Rakjat. Ditandaskan bahwa usaha2 djahat itu hanja bisa digagalkan djika ada kontrol jang aktif dari Rakjat.

Selandjutnja diserukan pentingnja kerdjasama antara Rakjat pekerdja dan Angkatan Perang untuk mentjapai tudjuan positif dari pengumuman keadaan darurat perang itu.

RAKJAT DAN ANGKATAN PERANG HARUS BEKERDJASAMA DALAM MENTJAPAI TUDJUAN2 POSITIF DARI KEADAAN DARURAT PERANG

Pada hari Kemis tanggal 14 Maret jl. oleh Presiden/Panglima Tertinggi Sukarno telah dinjatakan seluruh wilajah Indonesia termasuk semua teritorium perairan wilajah Republik Indonesia dalam keadaan darurat perang (Staat van Beleg).

Setelah keadaan darurat perang dinegeri kita mendjadi kenjataan, bagaimanakah seharusnja sikap PKI dan sikap Rakjat pekerdja terhadapnja?

Per-tama2 harus kita ketahui apakah jang mendjadi *pertimbangan2* dan apakah jang mendjadi *tudjuan2* dari pengumuman keadaan darurat perang ini. Djadi, kita tidak boleh memudahkan persoalan dengan misalnja mengatakan: „SOB adalah peraturan bikinan kaum kolonialis Belanda untuk membela kepentingan Belanda, oleh karena itu harus ditentang oleh Rakjat Indonesia".

Peraturan SOB adalah alat untuk memusatkan segala kekuasaan didalam satu tangan. Soalnja sekarang jalah, ditangan siapa kekuasaan itu dipusatkan. Dizaman pendjadjahan Belanda dulu dengan SOB kekuasaan dipusatkan ditangan Gubernur Djenderal Hindia Belanda, djadi terang untuk kepentingan kaum kolonialis Belanda. Sekarang ditangan Presiden/Panglima Tertinggi Sukarno, seorang demokrat dan patriot Indonesia, oleh karena itu tudjuan pernjataan keadaan darurat perang seharusnja demokratis dan patriotik. Sampai kemana tudjuan ini dapat ditjapai sangat tergantung pada aparat negara jang harus melaksanakannja, terutama pada penguasa2 militer pusat maupun daerah.

Dalam bagian pertimbangan dari Perintah Harian Panglima Tertinggi dikatakan bahwa *„Pada saat2 keadaan internasional sekeliling kita me-ningkat2, pada saat kegiatan2 subversif asing masih meradjalela di-tengah2 wilajah kita, maka pada saat itu perpetjah-*

an², pertentangan² antara kita dan kita mengamuk pula. Malah peristiwa² kup telah ber-tubi² pula terhadap negara dipusat. Peristiwa² pengoperan kekuasaan telah ber-turut² didaerah".

Setengah djam sebelum Panglima Tertinggi menjatakan keadaan darurat perang, Kabinet Ali-Idham menjerahkan mandatnja kembali kepada Presiden, bukan sebagai akibat dari kekalahan suara di Parlemen tetapi sebagai akibat dari peristiwa² pengoperan kekuasaan di-daerah² jang anti-demokratis. Ini untuk keduakalinja Sdr. Ali Sastroamidjojo menjerahkan mandat tidak oleh karena oposisi parlementer, tetapi karena obstruksi² diluar Parlemen, obstruksi² jang sedjalan dengan kegiatan² subversif asing.

Dilihat dari sudut politik pengumuman keadaan darurat perang oleh Panglima Tertinggi adalah sangat kuat, sedangkan setjara hukum tindakan ini dibenarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Mr. Wirjono dan Ketua Parlemen Mr. Sartono.

Dalam Perintah Harian Panglima Tertinggi terang dikatakan bahwa pernjataan keadaan darurat perang ditudjukan antara lain untuk menjelesaikan Revolusi 17 Agustus 1945, untuk menegakkan kembali persatuan nasional, untuk melindungi negara sebagai organisasi perdjuangan Rakjat guna menjelesaikan Revolusi Agustus, untuk memelihara dan menghormati sendi² negara dan tatatertib negara dan untuk memelihara dan menghormati hierarchi negara. Pada pokoknja, tudjuan pengumuman keadaan darurat perang adalah positif, adalah baik! Apakah tudjuan positif ini dapat ditjapai banjak tergantung pada aparat jang mendjalankannja, dan terutama sekali pada pribadi² dalam Angkatan Perang dan pada kontrol Rakjat sebagai golongan jang paling berkepentingan akan pelaksanaan tudjuan² positif tersebut.

Oleh karena itu adalah penting sekali bagi pemimpin² Rakjat, Komunis dan bukan-Komunis, untuk men-djelas²kan kepada Rakjat apa jang mendjadi alasan² dan tudjuan² dari pengumuman keadaan darurat perang seperti jang dimuat didalam Perintah Harian Presiden/Panglima Tertinggi tanggal 14 Maret 1957. Djuga penting di-djelas²kan amanat Gabungan Kepala Staf dan Perintah Harian KSAD pada hari itu djuga. *Hanja djika Rakjat mengerti benar semuanja ini, maka Rakjat dapat aktif mengontrol pelaksanaan Perintah Harian Panglima Tertinggi.*

Mengingat pertimbangan² diatas maka saja menjerukan kepada seluruh Rakjat Indonesia, terutama kepada Rakjat pekerdja supaja dengan sekuat tenaga mengusahakan adanja kerdjasama dan salingbantu antara Rakjat dan Angkatan Perang serta aparat negara pada umumnja untuk mentjapai tudjuan² positif dari pengumuman keadaan darurat perang oleh Presiden/Panglima Tertinggi Sukarno. Sebaliknja, dengan sekuat tenaga pula tiap² pensalahgunaan dari keadaan ini oleh orang² reaksioner, oleh kaum birokrat, kaum koruptor dan kaum penggelap lainnja serta elemen² fasis harus digagalkan.

Djuga diserukan kepada kaum Komunis dan seluruh Rakjat supaja untuk tudjuan tersebut diatas mengusahakan kerdjasama dan salingbantu dengan perwira², jang karena tidak mengertinja telah ikut²an dalam perebutan kekuasaan daerah, tetapi sesudah pengumuman keadaan darurat perang tunduk kembali kepada Panglima Tertinggi, Pemerintah Pusat dan Gabungan Kepala Staf Angkatan Perang.

Keadaan darurat perang bukanlah untuk se-lama²nja. Keadaan harus dinormalkan kembali kalau situasi sudah mengizinkan, terutama kalau keutuhan Republik Indonesia sudah kembali dan kalau kegiatan² subversif asing pada pokoknja sudah dapat dipatahkan.

Pada hari Djum'at tanggal 15 Maret jl. Presiden Sukarno sudah menundjuk seorang formator kabinet baru, jaitu Sdr. Suwirjo. Ini adalah udjian pertama dalam melaksanakan Perintah Harian Panglima Tertinggi. Udjian ini akan berhasil baik djika formator Suwirjo dapat membentuk kabinet jang terdiri dari demokrat² dan patriot² jang bertekad kuat untuk mengutuhkan kembali Republik Indonesia dan mematahkan tiap² kegiatan² subversif asing. Jang terbaik jalah membentuk Kabinet Gotongrojong sesuai dengan Konsepsi Bung Karno, tetapi kita mengerti bahwa Sdr. Suwirjo akan tertumbuk pada sikap kepalabatu pemimpin² Masjumi klik Natsir.

Hidup kerdjasama dan salingbantu antara Rakjat dengan perwira², bintara² dan para bawahan Angkatan Perang dalam melaksanakan Perintah Harian Panglima Tertinggi, dalam mengutuhkan kembali Republik Indonesia dan dalam mematahkan semua kegiatan subversif asing!

Djakarta, 17 Maret 1957

Pidato ini adalah uraian Kawan D.N. Aidit berkenaan dengan perajaan kemenangan buruh sedunia pada tanggal 1 Mei 1957.

Bertentangan dengan propaganda kaum reaksioner, dalam menilai situasi politik, ia menandaskan bahwa perbuatan dewan2 partikelir di-daerah2, korupsi, birokrasi, penjelundupan dan sebagainja, bukanlah krisis, melainkan permulaan terbongkarnja tindakan2 djahat kaum reaksioner jang anti Republik berkat semakin tumbuhnja kekuatan2 Rakjat jang demokratis dan patriotik.

Dalam menghadapi musuh2 jang semakin nekad itu, selandjutnja diserukan kepada kaum Komunis supaja lebih bersatupadu dengan Rakjat serta lebih giat beladjar teori.

BUKAN KRISIS, TAPI BANDJIR BESAR KEKUATAN DEMOKRATIS DAN PATRIOTIK

1 Mei bukan perajaan biasa, tetapi demonstrasi dan manifestasi kekuatan persatuan klas buruh diseluruh dunia dan di-tiap2 negeri. Oleh karena itu adalah keliru sekali sikap sementara Komunis Indonesia jang atjuh-tak-atjuh terhadap hari 1 Mei. Sebagai anggota PKI, anggota Partai klas buruh Indonesia, tiap2 Komunis Indonesia harus menjambut tiap2 hari 1 Mei dengan penuh kegairahan dan kesedaran, sedar akan kekuatan persatuannja, sedar akan perdjuangannja jang mulia untuk haridepan umatmanusia jang gemilang.

Tentang situasi politik jang urgen di Indonesia sekarang saja sepenuhnja sependapat dengan Presiden Sukarno, bahwa jang terdjadi di Indonesia bukan krisis jang akan menenggelamkan Indonesia. Indonesia tidak akan tenggelam!

Perbuatan dari Dewan2 Partikelir di-daerah2 sekarang, terbongkarnja korupsi2, penjelundupan2, menondjolnja persoalan2 birokrasi, terbukanja kedok orang2 penggelap, tidak lain daripada permulaan penelandjangan se-telandjang2nja dari wadjah dan tubuh kaum reaksioner. Kaum reaksioner waktu2 belakangan ini sudah sukar menjembunjikan kedjahatannja terhadap kekuatan demokratis dan patriotik didalam masjarakat dan didalam Angkatan Perang. Kedok mereka makin lama makin terbuka, dan achirnja mereka akan dibikin oleh keadaan telandjang se-bulat2nja.

Sebagaimana djika ada bandjir atau air-bah maka segala kotoran jang berupa sampah2, bangkai2 tikus, bangkai2 ajam, nadjis2 dsb., semuanja pada ter-apung2 dipermukaan air dan hanjut. Demikianlah sekarang ini, bandjir kekuatan demokratis dan patriotik mulai mendobrak benteng reaksi, dan lihatlah segala matjam kotoran pada terapung dipermukaan masjarakat dan hanjut, kotoran2

jang berupa Dewan² Partikelir, korupsi, birokrasi, pemborosan, penjelundupan dan penggelapan² lainnja. Sampai² orang² jang tadinja dikira djudjur, dikira malaikat, mendjadi telandjang bulat dihadapan masjarakat, bahwa dia sebenarnja tidak lain daripada penumpuk kekajaan untuk kepentingan sendiri, bahwa ia diam² menjimpan ber-kilo² mas dan kekajaan² lainnja.

Apakah bandjir kekuatan demokratis dan patriotik itu? Jalah hasil pemilihan umum untuk Parlemen dan Konstituante jl. Jalah pembentukan Parlemen jang sedikit atau banjak mewakili kepentingan Rakjat, pembentukan Konstituante jang pasti dapat mentjegah dilikwidasinja Republik Proklamasi. Jalah pembentukan DPRD² dan DPD² Peralihan dimana wakil² Rakjat jang sedjati ikut duduk. Dan, djangan dilupakan lahirnja Konsepsi Presiden Sukarno, jang tidak lain daripada Konsepsi patriotik, jang mendapat sokongan luarbiasa dari massa Rakjat jang demokratis dan tjinta persatuan. Melihat perkembangan ini kaum reaksioner didalam dan diluarnegeri mendjadi ketakutan, dan menjeringailah mereka dengan wadjahnja jang se-djelek²nja.

Kaum reaksioner jang sekarang berbuat nekad bukanlah menundjukkan bahwa mereka sedang dalam keadaan kuat. Sebaliknja, perbuatan mereka jang busuk, jang mendirikan Dewan² Partikelir, jang melakukan korupsi, penjelundupan, birokrasi dan bermatjam² penggelapan, adalah menundjukkan kebobrokan mereka dan menundjukkan ketidakmampuan mereka menempuh djalan² jang normal, jang demokratis parlementer.

Saja bisa menjetudjui utjapan Presiden Sukarno jang mengatakan bahwa ribut² disementara daerah sekarang hanjalah „gatal² ketjil". Memang, bagi orang jang memikirkan kepentingan seluruh Indonesia, apalagi orang² jang ikut memikirkan soal² dunia, ribut² disementara daerah sekarang hanjalah „gatal² ketjil". Tetapi „gatal² ketjil" ini kalau tidak segera diobati bisa mendjadi infeksi dan membahajakan seluruh tubuh Republik Indonesia dan Revolusi Indonesia. Apalagi kalau mengingat keadaan kaum reaksioner jang nekad dan membabibuta.

Dalam keadaan dimana kita menghadapi kaum reaksioner jang makin nekad jang terpenting bagi tiap² Komunis jalah memperbesar amalnja terhadap Rakjat, lebih mempersatupadukan Partai

dengan Rakjat. Tiap² Komunis, baik dipusat maupun di-daerah² sampai ke-desa² dan kampung², baik jang duduk dalam Dewan² Pemerintah Daerah maupun tidak, harus bertekad dan bekerdja untuk mendjadi kampiun pembela kepentingan² Rakjat, sampai kepada kepentingan² jang se-ketjil²nja.

Kita mempunjai program, kita mempunjai manifesto untuk pemilihan umum, kita mempunjai sembojan² jang memang tepat dan memang diperlukan dalam perdjuangan, jang mendapat sambutan antusias dari massa. Tetapi djangan lupa massa tidak tjukup diberi program² dan sembojan², massa menghendaki bukti bahwa kaum Komunis sungguh² bekerdja untuk kepentingan mereka. Bahwa kaum Komunis djudjur terhadap mereka. Massa membutuhkan perbaikan keadaan, dan kaum Komunis harus membuktikan bahwa kaum Komunis berbuat sungguh² untuk memperbaiki keadaan, walaupun untuk sementara perbaikan keadaan itu ketjil²-an dulu.

Makin sedar massa, makin kritis mereka. Djika massa sudah tinggi kesedarannja, mereka tidak akan mau datang ke-rapat² jang tidak membitjarakan kepentingan mereka. Saja sepenuhnja membenarkan massa jang tidak mau datang ke-rapat² jang tidak membitjarakan kepentingan mereka itu.

Kaum reaksi masih mempunjai kekuatan, dan mereka masih merupakan benteng, tetapi pasti bukan benteng badja. Massa adalah benteng badja! Benteng badja inilah jang harus direbut oleh PKI, dengan djalan lebih mempersatupadukan PKI dengan massa.

Kaum Komunis harus bekerdja dengan berpedoman teori. Tanpa teori tidak ada pekerdjaan bisa beres. Kaum revolusioner Indonesia sedjak tahun 1908, jaitu tahun berdirinja Budi Utomo, berdjuang untuk mendapatkan teori revolusioner, teori untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka pada waktu itu gagal, karena dalam beladjar mereka berorientasi kepada burdjuasi Barat, padahal burdjuasi Barat tidak ingin Indonesia mendjadi merdeka.

Setelah PKI berdiri tahun 1920, maka mulailah kaum revolusioner Indonesia berorientasi keproletariat Barat, kepada Marx, Engels dan lain² pemimpin kaum proletar. Ini adalah tepat dan tidak akan gagal, karena kaum proletariat, tidak perduli ia ada di Barat atau di Timur, memang menghendaki kemerdekaan bagi

Indonesia dan kebebasan bagi Rakjatnja.

Hampir 37 tahun umur PKI. Selama itu adalah proses perpaduan ilmu Marxisme-Leninisme dengan praktek kongkrit revolusi Indonesia. Partai2 Komunis jang sudah pandai memadukan kebenaran umum Marxisme-Leninisme dengan praktek kongkrit revolusi dinegeri masing2 pasti mendapat kemadjuan2 jang besar dan pasti menang.

Maka itu, kaum Komunis Indonesia harus terus beladjar, tetapi bukan hanja beladjar untuk beladjar sadja, dan samasekali bukan untuk mendjiplak dari luarnegeri. Kita harus memadu kebenaran umum Marxisme-Leninisme dengan praktek kongkrit revolusi kita sendiri, karena kewadjiban kaum Komunis Indonesia adalah untuk memenangkan revolusi Indonesia. Dalam beladjar kita harus berpokokpangkal pada kita sendiri, pada keadaan kongkrit negeri kita sendiri, pada ekonomi negeri kita, pada politik negeri kita, pada kebudajaan, pada adat-istiadat dan lain2 sifat chusus negeri kita. Djika ini sudah kita lakukan dengan baik, revolusi Indonesia pasti akan madju lebih pesat. Inilah tanggungdjawab sedjarah kita, kaum Komunis angkatan sekarang.

Djakarta, 5 Mei 1957

Ini adalah pidato Ketua D.N. Aidit dimuka sidang pleno Konstituante pada tanggal 20 Mei 1957. Didjelaskan setjara terang pokok2 pendirian PKI jang harus dimasukkan kedalam Konstitusi Republik Indonesia untuk mendjamin kesatuan bangsa Indonesia.

Setelah mengupas kepribadian bangsa dan negeri Indonesia serta sedjarah perdjuangan konstitusionilnja, ia menjimpulkan bahwa konstitusi jang harus disusun bukannja konstitusi negara feodal, negara kapitalis ataupun negara proletar, melainkan konstitusi untuk negara kepunjaan seluruh Rakjat, konstitusi jang setia kepada Rakjat dan Revolusi.

UNTUK KONSTITUSI REPUBLIK PROKLAMASI 1945

Per-tama2 sebagai anggota Konstituante izinkanlah saja pada kesempatan pertama kali saja berbitjara dari mimbar ini menjatakan rasa terimakasih saja jang se-dalam2nja kepada Rakjat Indonesia jang sudah memilih saja mendjadi anggota Dewan jang mulia ini. Setia kepada djandji jang telah saja berikan pada Rakjat Indonesia dalam kampanje pemilihan anggota Konstituante, sesuai dengan djandji saja ketika menerima djabatan sebagai anggota Konstituante dan sesuai pula dengan isi pidato Presiden Republik Indonesia pada pembukaan Konstituante tanggal 10 November 1956 jang berkepala *„Susunlah Konstitusi Jang Benar2 Konstitusi Res Publica"*(1), sekali lagi saja menjatakan ketetapan hati dan kesungguhan hati saja untuk ber-sama2 semua anggota Dewan ini menjusun Konstitusi untuk negara Republik Indonesia jang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, satu Konstitusi untuk seluruh Rakjat Indonesia. Tepat sekali apa jang dikatakan oleh Presiden Sukarno pada pembukaan Dewan ini, bahwa negara jang konstitusinja harus kita susun *„bukan negara feodal, bukan negara kapitalis, bukan negara proletar .....*", tetapi *„negara milik seluruh Rakjat dan tudjuannja pun karena itu tidak boleh tidak haruslah keselamatan dan kesedjahteraan seluruh Rakjat"*(2).

Sebagai Komunis, saja dan semua anggota fraksi PKI tidak memperdjuangkan Konstitusi negara proletar dalam Dewan ini, tetapi kami djuga tidak akan menjetudjui usaha2 untuk menjusun Konstitusi negara feodal atau negara kapitalis, karena ini bertentangan dengan konsep kenegaraan Revolusi Agustus 1945.

Konstitusi negara feodal atau negara kapitalis sebenarnja buat kita sekarang bukanlah persoalan lagi, karena konsep tentang dua matjam negara ini sudah dikalahkan 12 tahun jang lalu, jaitu didalam *„Badan Penjelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan"* (3) jang dibentuk oleh pemerintah militer Djepang pada pertengahan

tahun 1945, djadi pada saat2 kita menghadapi meletusnja Revolusi Agustus 1945. Kalau dibawah antjaman bajonet kaum militeris Djepang konsep tentang negara feodal dan negara kapitalis sudah dikalahkan setjara definitif, maka adalah samasekali tidak masuk akal kalau pada waktu sekarang, sesudah Republik Indonesia berdiri hampir 12 tahun, masih ada orang jang mempunjai fikiran untuk membentuk negara feodal atau negara kapitalis.

Djadi soalnja bagi kita sekarang jalah, bagaimana membentuk Konstitusi untuk sebuah negara jang dilahirkan oleh Revolusi Agustus kita, tetapi Konstitusi jang lebih sempurna daripada Konstitusi2 Sementara jang pernah atau jang sampai sekarang masih mendjadi pegangan penting dalam kehidupan politik dinegeri kita.

Dengan tidak mengurangi penghargaan saja pada usaha2 Konstituante untuk mempeladjari konstitusi negara2 lain, dengan tetap menghargai usaha Ketua Konstituante, saudara Mr. Wilopo, jang sudah pergi keberbagai negara untuk mempeladjari persoalan konstitusi, saja menjetudjui sepenuhnja apa jang dikatakan oleh Presiden pada pembukaan Konstituante ini, jaitu bahwa kita harus menjusun konstitusi jang mempunjai kepribadian, kepribadian bangsa kita sendiri. *„Djangan dilupakan"*, kata Presiden Sukarno, *„bahwa konstitusi jang akan disusun itu adalah untuk bangsa Indonesia, pribadi bangsa Indonesia haruslah membajang dalam konstitusi itu .....*" Selandjutnja dikatakan oleh Presiden Sukarno bahwa *„persoalan Indonesia hanja dapat dipetjahkan dengan formule2 Indonesia sendiri"* dan *„kita perlu mempeladjari sendiri dan menjedari sendiri phenomen Indonesia sekarang ini, mempeladjari apa jang hidup di Indonesia sekarang ini dan apa jang tidak hidup di Indonesia sekarang ini"* (4).

Djadi, kita tidak hanja harus menjusun konstitusi jang bukan konstitusi negara feodal, dan jang bukan konstitusi negara kapitalis, tetapi kita harus dapat menjusun konstitusi untuk sebuah negara kepunjaan seluruh Rakjat, dan jang dapat mentjerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Untuk menjusun konstitusi sematjam itu kita harus mengerti benar2 keadaan negeri kita, keadaan Rakjatnja, ekonominja, politiknja, kebudajaannja, sedjarah konstitusionalismenja dan segala apa sadja jang berpengaruh pada kepribadian bangsa kita.

Pendeknja, kita harus menjusun konstitusi untuk negara kepunjaan seluruh Rakjat Indonesia dengan berpokokpangkal pada diri kita sendiri. Dengan ini tidak berarti, bahwa kita harus menutup pintu untuk segala apa jang datang dari luar. Samasekali tidak demikian. Tetapi, segala jang datang dari luar, termasuk apa jang kita dapat dari mempeladjari konstitusi negeri² lain, harus kita terima dengan kritis, sebagaimana djuga kita jang hidup dizaman kini harus kritis dalam menerima peninggalan² zaman lampau kita, karena kita harus menjusun konstitusi negara kita sendiri dan untuk kita sekarang.

Bangsa Indonesia Berasal Dari Satu Rumpun Bangsa

Di Indonesia sekarang tendapat lebih dari 100 sukubangsa, mulai dari jang berdjumlah puluhan djuta sampai jang hanja beberapa ribu orang.

Dilihat dari sudut sedjarah ribuan tahun jang lalu bangsa Indonesia bukanlah penduduk asli Indonesia. Kira² 1.500 tahun sebelum Masehi atau kira² 3.500 tahun jl. bangsa Indonesia jang sekarang ini belum ada di Indonesia, mereka masih bertempattinggal di India Belakang (sekarang Indotjina, Muangthai, Burma) dan pada waktu itu namanja „bangsa Mon Khmer", jang kini masih terdapat di Tongkin, Muangthai dan Kambodja. „Bangsa Mon Khmer" adalah salahsatu tjabang „bangsa Austro-Asia" (bangsa Asia Selatan), sedangkan tjabang² lainnja jalah tjabang² „bangsa Kasi" (Assam) dan „bangsa Munda" dan „bangsa Santali" (India). Bangsa Indonesia adalah salahsatu dari 4 tjabang „bangsa Mon Khmer" (tjabang² lainnja: Melanesia, Polinesia dan Mikronesia). Keempat tjabang dari „bangsa Mon Khmer" ini dinamakan „bangsa Austronesia" (bangsa pulau² Selatan).

Djadi, bangsa Indonesia jang sekarang ini walaupun terbagi dalam banjak sukubangsa (termasuk jang di Irian Barat dan Halmahera Utara, jang etnologis tergolong „bangsa Melanesia" tetapi politis tergolong Indonesia) adalah bangsa jang berasal dari satu rumpun (rumpun „bangsa Austria", kemudian rumpun „bangsa Austro-Asia" dan kemudian lagi rumpun „bangsa Mon Khmer") jang mempunjai sedjarah jang sangat pandjang dan mengalami

perdjuangan jang berat dalam peperangan² dan dalam melawan bentjana² alam.

Karena peperangan dan sebab² lain, seperti kekurangan makanan, bentjana alam, bandjir besar dan penjakit menular, dengan perahu² bersajap jang sederhana nenekmojang bangsa Indonesia meninggalkan daratan Asia, makin lama makin djauh. Mereka mengerti tentang pelajaran dan mereka adalah pemberani², tidak takut mengarungi lautan² jang luas sampai ke Madagaskar, Filipina, Kalimantan, Sumatera dan pulau² Indonesia lainnja. Dengan ber-angsur² dan ber-bondong² mereka berpindah ke-pulau² Selatan, achirnja seluruh pantai Indonesia dari udjung Barat sampai ke-udjung Timur mereka duduki. Mereka se-akan² balatentara jang menang dan menduduki daerah baru. Ditempat jang baru mereka bebas memilih tempat bertjotjok-tanam, berburu dan meneruskan kebiasaan berlajar. Rumah² mereka dirikan sepandjang pantai jang mereka duduki.

Djadi, bangsa Indonesia berasal dari satu rumpun bangsa, satu rumpun bahasa dan kebudajaan ketika masih didaratan Asia. Setelah sampai di Indonesia mereka ter-pisah² menurut pulau², dipisahkan lagi oleh gunung², sungai² dan rawa² jang besar, mereka mendjadi terisolasi satu dengan jang lainnja. Isolasi alam jang ber-abad² menjebabkan mereka tumbuh dalam keadaan sendiri², tumbuh mendjadi sukubangsa² dengan bahasa dan kebudajaannja sendiri².

Diantara sukubangsa² terdapat sukubangsa² Djawa, Sunda, Madura, Melaju, Atjeh, Minangkabau, Batak, Palembang, Lampung, Dajak, Bandjar, Minahasa, Bugis, Toradja, Makasar, Bali, Sasak, Ambon, Sabu, suku² Irian Barat dan banjak lagi. Diantara sukubangsa² ini, sukubangsa Djawa adalah jang terbesar, kemudian menjusul Sunda, Madura, Minangkabau, Batak, dll. Sukubangsa Melaju adalah sukubangsa jang paling luas daerah tersebarnja, jaitu dipesisir Timur pulau Sumatera, di-pulau² antara Sumatera dan Kalimantan dan diseluruh pesisir Kalimantan. Tiap² sukubangsa mempunjai keistimewaan² sendiri, mempunjai bahasanja sendiri², disamping semuanja menerima bahasa Indonesia, jang dasarnja adalah bahasa Melaju, sebagai bahasa persatuan. Tingkat kebudajaan dari sukubangsa² ini tidak sama, tetapi semuanja mempunjai sedjarah jang sudah tua.

Djadi, bangsa Indonesia adalah bangsa jang terdiri dari banjak sukubangsa, banjak bahasa, dan banjak tingkat kebudajaan, tetapi mereka berasal dari satu rumpun bangsa, bahasa dan kebudajaan. Mereka terpetjahbelah untuk sementara waktu, tetapi dalam proses perdjuangan untuk kemerdekaan nasional dan untuk Indonesia Baru mereka bersatu kembali.

Semua sukubangsa menganggap Indonesia sebagai tanahairnja, merasa berkebangsaan Indonesia, menganggap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan menganggap adanja satu kebudajaan Indonesia disamping kebudajaan sukubangsa². Jang sangat menarik jalah, bahwa bahasa Indonesia bukan bahasa jang berasal dari sukubangsa jang terbesar. Dalam sedjarah bahasa ini tidak pernah mendjadi bahasa kolonisator, sebaliknja ia adalah bahasa jang mempersatukan lebih dari 100 sukubangsa, ia adalah bahasa liberator.

Disamping warganegara² jang berasal dari berbagai sukubangsa, di Indonesia terdapat djuga beberapa djuta warganegara dari keturunan asing seperti keturunan Tionghoa, Eropa dan Arab, masing² mempunjai bahasa dan kebudajaan tersendiri disamping mengakui bahasa dan kebudajaan Indonesia sebagai kepunjaannja sendiri.

Djadi, ter-petjah²nja bangsa kita dalam suku² bukanlah sesuatu jang diinginkan oleh nenekmojang kita, tetapi jang untuk sementara tidak bisa kita hindari, karena pada mulanja kita tidak bisa mengatasi isolasi alam. Saja katakan untuk sementara, karena dengan kemadjuan teknik dan kemadjuan kebudajaan pada umumnja isolasi alam itu lambatlaun akan tidak ada artinja, dan lambatlaun akan tertjiptalah satu bangsa Indonesia jang homogen, walaupun disanasini masih tetap akan nampak perbedaan² sebagai akibat isolasi alam jang ber-abad² lamanja.

Dalam proses kehidupan bangsa kita, sudah ber-kali² sukubangsa² Indonesia dipersatukan dalam keradjaan² besar, misalnja dalam Keradjaan Sriwidjaja (abad ke-7 sampai ke-14) dan dalam Keradjaan Madjapahit (abad ke-14 sampai ke-15). Disamping segala kebusukan dan kemesumannja, kolonialisme Belanda dengan tidak sengadja telah ikut mengambil bagian dalam mempersatukan sukubangsa² dinegeri kita dalam perdjuangan menentang kebiadaban kolonialisme. Tetapi sudah tentu jang kita inginkan sekarang

bukanlah persatuan dibawah pandji² keradjaan feodal dan bukan pula didalam alam kolonial.

Setia pada sumber kita, jaitu bahwa semua sukubangsa berasal dari satu rumpun bangsa, bahwa semua sukubangsa selama ber-abad² ber-sama² menderita tindasan kolonialisme dan ber-sama² pula berdjuang melawan kolonialisme dan sekarang kita ber-sama² berdjuang untuk Indonesia Baru, maka dalam Konstitusi jang akan kita susun seharusnjalah kita beri tempat jang terhormat kepada unsur kesatuan bangsa jang modern (nasion), jang bersumber pada sumpah pemuda tahun 1928.(5)

Masjarakat Indonesia Sekarang Adalah Setengah-feodal Dan Belum Merdeka Penuh

Perdjuangan nasional revolusioner Rakjat Indonesia jang hampir 50 tahun sedjak 1908, jang sudah lebih dari 30 tahun sedjak pemberontakan tahun 1926, jang sudah hampir 30 tahun sedjak sumpah pemuda 1928 dan sudah lebih 11 tahun sedjak Revolusi Agustus 1945 belum melakukan tugas² sepenuhnja, jaitu kemerdekaan nasional jang penuh, perubahan² demokratis dan perbaikan penghidupan Rakjat. Revolusi Agustus belum selesai sampai ke-akar²nja, oleh karena itu adalah kewadjiban bagi seluruh Rakjat Indonesia untuk menggenggam dalam tangannja seluruh pertanggungandjawab guna *menjelesaikan Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja.*

Dengan dibatalkannja perdjandjian KMB jang chianat, maka berartilah bahwa Rakjat Indonesia sudah mendapatkan kemerdekaan politik di 80% dari wilajah negerinja, sedangkan di Irian Barat jang merupakan 20% dari wilajah Indonesia belum ada samasekali kemerdekaan politik bagi Rakjat, karena Irian Barat masih sepenuhnja dikuasai oleh kolonialisme Belanda. Kemerdekaan politik jang sekarang sudah dimiliki Rakjat Indonesia belumlah kemerdekaan politik jang penuh dan stabil, tetapi masih setengah² dan masih terus terantjam oleh kekuatan² reaksioner. Kaum reaksioner berusaha keras untuk membatasi dan menghapuskan kemerdekaan politik bagi Rakjat.

Bukti jang sangat djelas dari masjarakat Indonesia jang belum

merdeka penuh jalah masih belum merdekanja Indonesia dilapangan ekonomi. Kaum imperialis (kapitalis² besar asing) masih berkuasa di Indonesia dilapangan ekonomi. Dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh pemerintah Indonesia jang mana sadja, dengan kekuatan kaum imperialis dilapangan ekonomi dan dengan melewati orang² bajarannja kaum imperialis djuga ikut menentukan djalannja politik Indonesia. Politik kaum imperialis dilapangan perekonomian pada prinsipnja tidak berubah dari waktu Indonesia masih sepenuhnja djadjahan. Mereka meneruskan perusahaan² mereka jang lama dan mendirikan beberapa jang baru. Dengan demikian mereka dapat setjara langsung menggunakan tenaga buruh Indonesia jang murah. Dengan demikian pula langsung mereka menekan setjara ekonomi terhadap industri nasional, baik kepunjaan negara maupun kepunjaan kapitalis² nasional. Dengan demikian kaum kapitalis besar asing menghalangi perkembangan tenaga produktif negeri kita. Bank dan keuangan serta barangdagangan² jang ada didalam kekuasaan kaum imperialis, inilah jang mempunjai kedudukan menentukan didalam kehidupan ekonomi negeri kita dewasa ini. Kedudukannja jang menentukan dilapangan ekonomi memungkinkan kaum imperialis djuga ambil bagian jang menentukan dalam kehidupan politik Indonesia.

Disamping kekuasaan ekonomi kaum imperialis asing, di Indonesia sekarang masih berkuasa sisa² feodalisme jang penting dan berat, jaitu: (1) hak tuantanah besar untuk memonopoli milik tanah jang dikerdjakan oleh kaum tani jang bagian terbesar tidak mungkin memiliki tanah dan karena itu terpaksa menjewa tanah dari pemilik² tanah menurut sjarat² jang ditentukan oleh tuantanah; (2) pembajaran sewatanah dalam udjud barang kepada tuantanah jang merupakan bagian penting dari hasil panen kaum tani dan jang mengakibatkan kemelaratannja bagian terbesar kaum tani; (3) sistim sewatanah dalam bentuk kerdja ditanah tuantanah². jang menempatkan kaum tani dalam kedudukan hamba; jang terachir jalah (4) tumpukan hutang² jang mendjerat batang leher bagian terbesar kaum tani dan jang menempatkan mereka dalam kedudukan budak terhadap pemilik² tanah.

Masih bertjokolnja sisa² feodalisme telah menjebabkan terbelakangnja teknik pertanian, melaratnja bagian terbesar dari kaum

tani, susutnja pasar dalamnegeri dan tidak mungkinnja industrialisasi negeri.

Penindasan dobel dari imperialisme dan feodalisme telah menjebabkan massa luas dari Rakjat, terutama kaum tani, mendjadi makin lama makin melarat dan sedjumlah besar mendjadi bangkrut, hidup dalam keadaan lapar dan setengah telandjang. Penindasan dobel jaitu dari imperialisme dan feodalisme, djuga telah menjebabkan sangat tertekannja perkembangan industri nasional dan kebudajaan nasional.

Demikianlah kesimpulan² jang dapat kita tarik dari karakteristik² masjarakat Indonesia jang belum merdeka penuh dan jang masih setengah-feodal. Karakteristik² dan kesimpulan² ini tidak mempunjai perbedaan hakekat daripada karakteristik² dan kesimpulan² mengenai masjarakat Indonesia sebelum Revolusi Agustus 1945. Ini disebabkan karena Revolusi Agustus tidak diselesaikan dengan melaksanakan dua tugas pokok revolusi sekaligus, jaitu tugas revolusi nasional anti-imperialisme dan tugas revolusi demokratis anti-feodalisme. Dengan tidak diselesaikannja dua tugas pokok ini, maka berartilah bahwa Revolusi Agustus tidak diselesaikan sampai ke-akar²nja, sehingga sampai sekarang imperialisme masih bertjokol di Indonesia, sedangkan basis sosial jang terpenting dari kekuasaan imperialisme, jaitu feodalisme, tidak digulingkan.

Kenjataan seperti jang saja kemukakan diatas, jaitu kenjataan bahwa negeri kita belum merdeka penuh, karena ekonomi negeri kita masih tergantung pada kaum imperialis, dan bahwa negeri kita masih setengah-feodal, karena feodalisme walaupun sudah tidak utuh lagi masih belum dihapuskan, adalah bertentangan dengan konsepsi emansipasi ekonomi dan emansipasi sosial dari Revolusi Agustus 1945, adalah bertentangan dengan Bab „*Kesedjahteraan Sosial*" dalam UUD Republik Proklamasi. Dalam pidato pembukaan Dewan ini Presiden Sukarno antara lain meminta supaja kita menjusun Konstitusi „*dimana dengan sekelebatan mata sadja sudah bisa dilihat bahwa Republik kita adalah benar² Res Publica, adalah benar² Kepentingan Umum jang berarti Kepentingan Bersama. Dilapangan politik kita harus ber-res-publica, dilapangan ekonomi kita harus ber-res-publica, dilapangan kebudajaan kita harus ber-res-publica*" (6). Saja berpendapat bahwa permintaan Presiden Su-

karno ini sepenuhnja sesuai dengan permintaan bagian jang sangat terbesar dari Rakjat Indonesia.

Saja kira, walaupun kita berada dalam negeri jang belum merdeka penuh dan jang masih setengah-feodal adalah bukan kewadjiban kita untuk merumuskan Konstitusi negara jang tidak merdeka penuh dan jang setengah-feodal. Bukanlah kewadjiban kita untuk merumuskan Konstitusi sematjam itu, karena kita tidak menghendaki keadaan jang tidak kita inginkan sekarang ber-larut², kita menghendaki keadaan jang buruk sekarang dengan lekas dilikwidasi. Tetapi adalah keliru sekali, djika kita ingin melikwidasi keadaan jang buruk sekarang tanpa menjedari keadaan sesungguhnja dari kita sekarang. Mengetahui karakteristik² masjarakat kita sebelum kita mengubahnja adalah sjarat mutlak, agar kita tahu apa jang harus kita ubah dan sampai kemana perubahan² jang mungkin kita lakukan dalam masa jang tidak terlalu lama.

Saja menganggap berguna sekali peringatan Presiden Sukarno dalam pembukaan sidang Konstituante ini, jaitu bahwa *„kita ini hidup dalam alam perpindahan atau transisi: perpindahan dari alam kolonial kealam nasional, perpindahan dari alam perbudakan kealam kemerdekaan politis-ekonomis, perpindahan dari alam kemarin kealam besok"* (7). Selandjutnja dikatakan oleh Presiden Sukarno bahwa *„Bagi kita bangsa Indonesia, satu bangsa dalam revolusi, konstitusi dus harus merupakan satu alat perdjuangan"*, *„Konstitusi kita harus konstitusi perdjuangan, konstitusi jang memberi arah dan dinamik kepada perdjuangan"*, dan *„Konstitusi kita harus mendjawab kepada keperluan² Indonesia pada waktu sekarang dan waktu dekat jang akan datang"* (8).

Ja, kita memang hidup dalam alam transisi, transisi dari alam kolonial kealam nasional! Kita hidup dalam alam ini tidaklah baru sekarang, tetapi sedjak Rakjat kita bangun dan menjusun barisan dalam gerakan kemerdekaan nasional pada awal abad ini, sedjak itu kita sudah hidup dalam transisi dari alam kolonial kealam nasional. Tetapi satu hal jang tidak boleh kita lupakan, bahwa masa transisi ini mempunjai tjiri jang chas sesudah meletus Revolusi Agustus, jaitu bahwa pertumbuhan kekuatan pendorong dalam masjarakat berlangsung dengan lebih tjepat daripada sebelum Revolusi Agustus. Kenjataan ini menundjukkan bahwa tiap² usaha untuk

mengembalikan Indonesia kestatus jang lama, jaitu status kolonial dan perbudakan, pasti akan mendapat perlawanan keras dari seluruh Rakjat Indonesia. Dengan perkataan lain, alam kolonial dan perbudakan sudah pasti tidak mungkin lagi dikembalikan di Indonesia, sehingga dengan demikian satu²nja masadepan jang dekat dari Rakjat Indonesia jalah hidup dalam alam nasional jang demokratis, jang sepenuhnja bebas dari kekangan imperialisme dan dari tindasan feodalisme.

Djadi, Konstitusi jang harus kita susun per-tama² harus merupakan penjimpulan pengalaman perdjalanan sedjarah perdjuangan Rakjat Indonesia selama lebih setengah abad belakangan ini, penjimpulan bahwa Rakjat Indonesia sudah mentjapai taraf tertentu dalam perdjuangan nasionalnja, jaitu taraf sudah meninggalkan alam kolonial dan perbudakan jang lama dan sekarang sedang madju menudju kealam nasional jang merdeka penuh dan jang demokratis. Dengan demikian, Konstitusi jang kita susun adalah djuga Program Perdjuangan nasional kita, pemberi arah dan inspirasi pada perdjuangan nasional kita.

Sedikit Tentang Sedjarah Dan Beberapa Pengalaman Kehidupan Konstitusionil Kita

Perdjuangan bangsa Indonesia untuk memiliki sebuah Konstitusi, sebuah Undang² Dasar jang mendjadi sumber semua undang², bukanlah perdjuangan jang sangat baru. Perdjuangan ini boleh dikatakan sama tuanja dengan perdjuangan modern bangsa Indonesia untuk mengubah masjarakat Indonesia jang bersifat kolonial dan perbudakan mendjadi masjarakat nasional jang merdeka dan demokratis. Ini tidak mengherankan, karena pergerakan nasional kita jang lahir pada awal abad ini mempunjai tugas sedjarah untuk menghantjurkan struktur kolonial jang dipaksakan kepada kita dan sebagai gantinja, mendirikan struktur nasional jang kita susun menurut keinginan kita sendiri. Sjarat untuk membangun dan mengatur struktur nasional ini antara lain jalah Undang² Dasar, jalah Konstitusi Negara.

Mula² tuntutan mengenai Konstitusi tidak begitu djelas dirumuskan oleh pergerakan kemerdekaan kita. Dalam salahsatu mosi

Budi Utomo, jaitu jang dikeluarkan dalam rapatnja di Bandung bulan Agustus 1915 dinjatakan tentang perlunja ada Parlemen jang berhak membuat undang². Ini adalah pernjataan, bahwa bangsa Indonesia pada waktu itu pada hakekatnja sudah menolak segala matjam undang² dan peraturan² jang bukan bikinannja sendiri. Bangsa Indonesia menginginkan satu perumahan kenegaraan jang dibangun dan diaturnja sendiri. Hal ini sudah terang bertentangan dengan keinginan kaum kolonialis ketika itu, jang ingin terus „mengatur" bangsa Indonesia sebagai sumber keuntungan kolonialisme.

Pada pertengahan bulan November 1918 didirikan sebuah organisasi front persatuan nasional dengan nama *„Radicale Concentratie"* jang anggota²nja terdiri dari Serikat Islam, Budi Utomo, Insulinde, Pasundan dan Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV). Segera konsentrasi ini mengadjukan tuntutan kepada pemerintah Belanda supaja dibentuk *„sebuah Madjelis Nasional sebagai 'parlemen pendahuluan' untuk menetapkan hukum dasar (grondwet) sementara. Beberapa minggu kemudian konsentrasi ini mengadjukan keinginannja, supaja selekas mungkin diadakan parlemen"* (9).

Dimulai sedjak tahun² belasan dari abad ke-20 perdjuangan bangsa dan Rakjat Indonesia untuk memiliki sebuah Konstitusi tidak pernah henti²nja. Konstitusi negara senantiasa mendjadi program perdjuangan pergerakan politik kemerdekaan nasional Indonesia.

Tuntutan terachir kepada pemerintah Belanda supaja dibentuk sebuah Konstitusi jalah pada bulan Februari 1941, jaitu bersama dengan tuntutan Rakjat Indonesia supaja dibentuk Parlemen dan pemerintah jang bertanggungdjawab pada Parlemen. Tuntutan² ini diadjukan oleh GAPI (Gabungan Politik Indonesia) dimana didalamnja tergabung partai² politik jang penting ketika itu, jaitu Parindra, Gerindo, Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII, Partai Islam Indonesia (PII) dan Persatuan Politik Katolik Indonesia (PPKI). Mengenai tuntutan tentang Konstitusi antara lain dikatakan, supaja ditetapkan *„Konstitusi Negara, sedemikian rupanja, sehingga bukan sadja pembangunan politik, tetapi djuga keadaan masjarakat dalam hal sosial-ekonomi, akan berdasarkan demokrasi"*. Sikap kepalabatu pemerintah kolonial Belanda ketika itu tidak

menjambut baik tuntutan Rakjat Indonesia ini, walaupun Rakjat Indonesia sudah menjatakan kebulatan tekadnja untuk ber-sama² dengan fihak Belanda melawan penjerbuan kaum militeris Djepang. Akibat dari semuanja ini, Belanda sendiri harus ikut menanggungnja. Tentara penjerbu Djepang memasuki Indonesia dengan tanpa perlawanan jang berarti dari fihak Rakjat Indonesia.

Selama pendudukan Djepang, jaitu sedjak bulan Maret 1942 sampai bulan Agustus 1945, terutama pada tahun² pertama, perdjuangan untuk Konstitusi tidak mendapat bentuk² jang legal. Pada waktu² terachir dari masa pendudukan Djepang, ketika Djepang mendapat pukulan² berat dari fihak sekutu dihampir semua front peperangan, Djepang membutuhkan lebih banjak pengerahan tenaga, kekajaan dan djiwa Rakjat Indonesia guna kepentingan peperangannja. Untuk mendapatkan ini Djepang mendjandjikan kemerdekaan bagi Indonesia dan sebagai persiapan untuk ini dibentuklah pada awal tahun 1945 apa jang dinamakan *„Badan Penjelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan"*.

Sedar akan maksud Djepang jang tidak djudjur dalam hal mengadakan „Badan Penjelidik" tersebut dan jakin bahwa kemenangan pasti dari demokrasi atas fasisme sudah ada diambang pintu, maka setjara pandai anggota² „Badan Penjelidik Usaha Kemerdekaan" jang sedikit atau banjak ada bernjala api patriotisme didalam dadanja telah berdaja-upaja dan sampai batas² tertentu berhasil mengubah badan boneka bikinan Djepang tersebut mendjadi badan jang benar² guna persiapan kemerdekaan. Dalam pidatonja tanggal 1 Djuni 1945, Ir. Sukarno, jang pada waktu itu mendapat kesempatan untuk mendjelaskan pendiriannja mengenai „Dasar Negara" jang akan dibentuk, telah mengemukakan dasar² negara. Ternjata bahwa pokok-fikiran Ir. Sukarno tentang dasar² negara jang dikemukakan dalam „Badan Penjelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan" ini banjak jang dimasukkan kedalam Undang² Dasar Republik Indonesia 1945, misalnja jang mengenai bentuk kesatuan dari negara, jang mengenai tjita² emansipasi politik, ekonomi dan sosial dari semua warganegara, dsb.

Sedjak Agustus 1945 sampai sekarang kita telah memiliki 3 Konstitusi, jaitu Konstitusi Republik Indonesia 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan Konstitusi Sementara RI

1950.

Dalam memikirkan soal² pokok jang akan kita muat dalam UUD RI jang tetap, maka seharusnjalah kita mengambil peladjaran dari pengalaman² konstitusionil selama 11 tahun ini.

Dengan menarik peladjaran dari pengalaman mengenai kehidupan konstitusionil kita, maka berarti djuga kita mempeladjari pengalaman sedjarah perdjuangan kemerdekaan bangsa dan Rakjat kita, sebab ketiga UUD kita itu sedikit atau banjak memberikan gambaran tentang pasang atau surutnja perdjuangan Rakjat Indonesia, terutama perdjuangan revolusioner sesudah proklamasi kemerdekaan bulan Agustus 1945.

Dalam Konstitusi RI 1945 ada 3 soal pokok jang tertjantum sebagai hasil Revolusi Agustus kita, jaitu (a) soal organisasi negara, (b) soal² ekonomi dan soal jang merupakan tjita² dan tuntutan bangsa dan Rakjat Indonesia pada tingkat sedjarah jang tertentu, dan (c) soal hak² dan kebebasan² dasar manusia.

Sebagaimana kita ketahui, maka dalam UUD RI 1945 ditetapkan dengan djelas, bahwa negara Indonesia jalah Republik jang berbentuk Kesatuan. Perumusan ini bukanlah disusun atas keinginan atau kemauan seseorang, tetapi ini adalah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan merupakan realisasi tjita² dan kehendak Rakjat Indonesia jang diperdjuangkan selama setengah abad belakangan ini. Sebagai akibat persetudjuan KMB, maka UUD RI 1945 diganti dengan UUD RIS jang dalam berbagai hal penting banjak menuruti keinginan kaum kolonialis Belanda dan kakitangan-kakitangannja.

UUD RIS jang chianat ini telah mengubah salahsatu sendi dari negara Republik Proklamasi kita, jaitu negara kesatuan mendjadi negara federal jang bertentangan dengan tjita² Revolusi Agustus 1945. Bentuk federal adalah sepenuhnja pelaksanaan politik kaum kolonialis untuk memetjahbelah persatuan serta keutuhan negara dan bangsa Indonesia.

Sebagai hasil pendjuangan Rakjat menentang Republik Federal Indonesia, maka UUD RIS tidak mentjapai umur lebih dari 7½ bulan, dan sebagai penggantinja lahirlah Republik Indonesia Kesatuan dengan UUD-nja jang merumuskan kembali bentuk kesatuan dari Republik kita.

Ketjuali mentjantumkan dasar federasi UUD RIS djuga mengandung ketentuan² jang mengatur sistim perwakilan dua-madjelis jang terang bertentangan dengan tuntutan Revolusi Agustus dilapangan ketatanegaraan, jang terang bertudjuan untuk melemahkan persatuan bangsa dan Rakjat Indonesia.

Demikian djuga kita telah mengalami bahwa hak² dan kebebasan² dasar manusia serta hak² Parlemen sangat dibatasi oleh UUD RIS.

UUD RI 1950, jang masih bersifat sementara itu, lahir disatu fihak sebagai hasil perlawanan Rakjat terhadap usaha² kaum reaksioner untuk melikwidasi hasil² Revolusi Agustus dan difihak lain sebagai kesimpulan pengalaman Rakjat Indonesia mengenai masalah UUD dan pengalaman konstitusionil, atau dengan perkataan lain: UUDS RI 1950 mengandung isi esensiil dari UUD RI 1945 dan djuga beberapa perumusan jang lebih terperintji, jaitu dengan perintjian lebih landjut mengenai soal hak² dan kebebasan² dasar manusia, soal susunan dan tugas alat² perlengkapan negara, soal pembagian kekuasaan antara DPR, Pemerintah dan Presiden dll.

Djuga dalam hal sistimatik UUDS RI 1950 nampak lebih baik daripada UUD RI 1945.

Ini semuanja tidak berarti, bahwa UUDS RI 1950 tidak mempunjai kekurangan²nja dan bahwa dalam semua soal UUDS ini lebih baik daripada UUD RI 1945.

Ketentuan dalam UUDS RI 1950 bahwa „hakmilik adalah fungsi sosial" telah sangat mengurangi arti fasal 38 UUDS RI jang diambil dari UUD RI Proklamasi pasal 33. Atau dapat dikatakan, berdasarkan kenjataan selama ini, dengan adanja ketentuan bahwa hakmilik, termasuk hakmilik imperialis, adalah suatu fungsi sosial, maka fasal 38 UUDS RI tidak mungkin dilaksanakan.

Disamping itu djiwa anti-imperialisme dari UUD RI Proklamasi jang antara lain nampak dari kenjataan, bahwa hak² dan kebebasan² dasarnja hanja berlaku bagi warganegara Indonesia, dalam UUDS RI 1950 tidak begitu menondjol, karena menurut ketentuan dalam UUDS ini, hak² dan kebebasan² dasar berlaku untuk semua orang atau penduduk di Indonesia, djadi, djuga berlaku untuk orang² asing jang mewakili kepentingan kaum imperialis dan kaum kolonialis di Indonesia. Dari sini nampak lagi,

bagaimana kaum imperialis asing lewat kakitangan²nja menjelipkan kepentingan²nja dalam UUDS RI 1950.

Pendeknja, kelemahan² UUDS RI 1950 telah kita alami sendiri, jaitu bahwa beberapa fasal jang penting dan tepat mengenai soal² ekonomi, sosial, dan kebudajaan tidak dapat dipraktekkan. Sebabnja jalah karena ketentuan² pokok mengenai dasar² ekonomi, sosial dan kebudajaan jang dioper dari UUD RI Proklamasi dikebiri oleh fasal² lain jang bersumber pada UUD RIS (KMB). Selain daripada itu fasal² jang menguntungkan Rakjat jang dioper dari UUD RI Proklamasi tidak didjelaskan dan diperintji lebih landjut serta tidak ditetapkan garis² besar pelaksanaannja.

Selandjutnja, masih terdapat kekurangan² djuga dalam UUD RI Proklamasi dan dalam UUDS RI 1950 dalam memberikan isi kepada masing² mukadimahnja.

Mukadimah UUD RI Proklamasi maupun mukadimah UUDS RI 1950 belum tjukup menggambarkan, walaupun setjara singkat, sedjarah perdjuangan revolusioner bangsa dan Rakjat Indonesia dalam ber-bagai² bentuk melawan kaum kolonialis dan kaum reaksioner lainnja.

Demikian pula soal kedaulatan Rakjat belum dirumuskan setjara memuaskan dalam kedua UUD itu, karena belum djelas digambarkan, bahwa sumber segala kekuasaan adalah ditangan semua golongan dan lapisan Rakjat jang anti-imperialisme dan jang demokratis.

Dari pengalaman mengenai kehidupan konstitusionil kita selama hampir 12 tahun ini, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan, bahwa UUDS RI 1950 dapat kita djadikan sebagai pedoman untuk merumuskan soal² pokok serta bagian²nja, dengan tjatatan, bahwa:

(a) *tugas alat² perlengkapan negara perlu diperintji lebih landjut, sebagai garis besar pelaksanaan ketentuan² pokok mengenai dasar² negara diberbagai lapangan;*

(b) *hak² dan kebebasan² dasar² manusia diperintji mendjadi hak² dan kebebasan serta kewadjiban² azasi warganegara dan penduduk asing;*

(c) *soal² Pemerintah Daerah, terutama tentang otonomi jang luas, harus lebih djelas dirumuskan, dan*

(d) *soal² baru, misalnja Dewan Nasional sebagai badan penasehat Pemerintah, serta Kabinet berdasarkan perwakilan berimbang (Kabinet Gotongrojong), sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, sesuai dengan Konsepsi Presiden Sukarno dan jang mendjadi tuntutan Rakjat pada awal tahun 1957, perlu ditambahkan.*

Demikianlah sedikit sumbangan fikiran dari saja dalam diskusi mengenai soal² pokok jang perlu kita muatkan didalam Konstitusi kita. Perintjian tentang beberapa soal akan dikemukakan oleh kawan² sefraksi saja dalam sidang jang mulia ini.

Sebelum saja menutup pidato saja ini izinkanlah saja dari mimbar ini menjampaikan salam kepada hadirin, berhubung dengan Hari 20 Mei, Hari Kebangunan Nasional kita. Pada tanggal 20 Mei 1908, djadi 49 tahun jang lalu, generasi sebelum kita dengan dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo jang budiman, telah memulai pekerdjaan jang besar dan mulia. Semoga kita sekarang mendjadi penerus jang sedjati dari pekerdjaan nasional jang besar dan mulia itu.

Perpustakaan Dinas Pos Manado

Beladjar Lebih Banjak Untuk Lebih memperbaiki Praktek Revolusioner Kita! adalah djudul tulisan Kawan D.N. Aidit menjambut ulangtahun ke-37 PKI. Tulisan ini menjimpulkan tepatnja orientasi proletariat Indonesia kepada proletariat Barat dalam perdjuangan politik untuk pembebasan dan tidak tepatnja orientasi burdjuasi Indonesia kepada burdjuasi Barat jang sama sekali tidak mempunjai kepentingan akan kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme.

Dikemukakan lebih landjut bahwa pengalaman selama 37 tahun menundjukkan keharusan kita kaum Komunis Indonesia senantiasa berpedoman pada Marxisme-Leninisme dalam melakukan pekerdjaan revolusioner dengan berpokokpangkal pada diri sendiri, pada kenjataan2 politik, ekonomi, kebudajaan, adat-istiadat dan kebiasaan jang ada disekitar kita.

BELADJAR LEBIH BANJAK UNTUK LEBIH MEMPERBAIKI PRAKTEK REVOLUSIONER KITA !

Tanggal 23 Mei tahun 1957 ini kita memperingati ulangtahun ke-37 PKI. Pada hari ini kita tidak hanja memperingati ulangtahun sebuah Partai besar, tetapi djuga Partai jang mempunjai sedjarah perdjuangan jang revolusioner dan heroik, Partai jang martabatnja bertambah hari bertambah menaik dimata proletariat dan Rakjat Indonesia, Partai jang kegemilangan haridepannja sudah didjamin oleh hukum2 perkembangan masjarakat Indonesia.

Lahirnja PKI 37 tahun jang lalu adalah peristiwa jang wadjar, karena pada waktu itu sudah ada sedjumlah proletariat Indonesia, sudah ada sedjumlah kaum intelektuil Indonesia jang menerima Marxisme sebagai pandangan-dunia dan pedoman perdjuangan, dan sampai batas2 tertentu proletariat dan Rakjat Indonesia sudah mempunjai kemampuan berorganisasi.

Dengan lahirnja PKI 37 tahun j.l. maka lahirlah didalam masjarakat Indonesia satu kekuatan baru, jang bibit2nja sudah ada sedjak berdirinja ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereniging) dalam tahun 1914, jaitu kekuatan politik proletariat jang bersekutu dengan klas2 revolusioner lainnja, jang dalam beladjar dari Barat berorientasi kepada proletariat Barat, kepada Marx, Engels, Lenin, dll. Ini bertentangan dengan burdjuasi Indonesia jang sedjak berdirinja Budi Utomo tahun 1908 berorientasi kepada burdjuasi Barat, mengambil kaum burdjuis Barat sebagai guru dan teladan. Dalam proses dua orientasi ini diudji, dan kenjataan menundjukkan bahwa berorientasi kepada burdjuasi Barat tidaklah tepat bagi Rakjat Indonesia, karena burdjuasi Barat pada umumnja tidak menginginkan kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme.

Pengalaman menundjukkan bahwa tidak sedikit tjerdikpandai Indonesia jang tadinja murid2 burdjuasi Barat menentang guru2nja jang memusuhi kemerdekaan nasional Indonesia dan tidak sedikit pula jang berpindah orientasinja kepada proletariat. Sebaliknja, ber-

tambah hari bertambah terang kebenaran orientasi proletariat Indonesia. Proletariat Barat menganggap kemerdekaan nasion, Rakjat dan proletariat Indonesia sebagai kemerdekaannja sendiri.

Adalah bukan sesuatu jang harus dirahasiakan, bahwa proletariat Indonesia sedjak ia memasuki gelanggang politik untuk kebebasannja sudah berorientasi kepada proletariat Barat. Burdjuasi Indonesia djuga tidak merahasiakan, dan malahan membanggakan, bahwa mereka mempunjai guru² orang Barat, maksudnja orang² burdjuis Barat. Dibanding dengan proletariat Indonesia dan seluruh proletariat Timur, proletariat Barat adalah lebih tua umurnja, lebih banjak pengalaman perdjuangannja dan lebih dulu menjimpulkan setjara ilmiah pengalaman² perdjuangannja.

Djadi, bahwa proletariat Indonesia dan seluruh proletariat Timur berorientasi kepada proletariat Barat adalah sesuatu jang wadjar, sama wadjarnja dengan burdjuasi Indonesia dan seluruh burdjuasi Timur menundjukkan pandangan mata dan otaknja kepada burdjuasi Barat, karena burdjuasi Barat lebih tua umurnja, lebih banjak pengalaman perdjuangannja dan lebih dulu menjimpulkan pengalaman² perdjuangannja.

Perbedaan jang prinsipiil jalah, bahwa burdjuasi Barat pada umumnja bukan sahabat Rakjat Indonesia dalam perdjuangan untuk kemerdekaan nasional, sedangkan proletariat Barat adalah sahabat Rakjat Indonesia jang setia dan tepertjaja. Proletariat Barat tidak mempunjai kepentingan lain terhadap Indonesia ketjuali kemerdekaan dan kebebasan jang sepenuhnja, tidak hanja bagi proletariat Indonesia tetapi djuga bagi seluruh Rakjat Indonesia.

Setelah meletus Revolusi Oktober Besar tahun 1917 jang melahirkan Uni Sovjet, negara sosialis jang pertama, maka proletariat Indonesia mendjadi lebih jakin lagi akan kebenaran orientasinja. Dengan berdirinja Uni Sovjet maka terbuktilah dalam kenjataan, bahwa proletariat bisa memegang kekuasaan negara, bahwa proletariat bisa berkuasa tanpa burdjuasi, tetapi sebaliknja belum ada bukti dan tidak akan ada bukti bahwa burdjuasi bisa berkuasa tanpa proletariat.

Tetapi, apakah kalau orientasi proletariat Indonesia sudah tidak meleset terus berarti bahwa kemenangan sudah pasti ditangan proletariat dan Rakjat Indonesia? Proletariat Rusia membantah hal ini. Proletariat Rusia mengadjarkan, bahwa kemenangan hanja mungkin ditjapai setelah proletariat Rusia, terutama Partai politiknja mampu memadukan kebenaran umum Marxisme dengan keadaan masjarakat Rusia, dengan praktek kongkrit Revolusi Rusia. Lenin dan kaum Komunis Rusia berhasil memimpin revolusi Rusia bukan hanja karena mereka menguasai adjaran² Marx, tetapi karena mereka mengerti benar² keadaan dunia jang mereka hadapi dan mengerti benar² sifat² chusus dari negeri dan Rakjat dimana mereka melakukan pekerdjaan revolusioner mereka. Dengan praktek revolusionernja dan dengan kesimpulan²nja mengenai keadaan dunia jang dihadapi dan mengenai keadaan² chusus Rusia, Lenin sudah lebih memperkaja Marxisme. Leninisme adalah kebenaran umum bagi proletariat diseluruh dunia, ia adalah teori dan praktek Marxisme dizaman imperialisme dan revolusi proletar dunia.

37 tahun PKI pada hakekatnja adalah 37 tahun proses perpaduan Marxisme-Leninisme dengan praktek kongkrit revolusi Indonesia. Penjakit dogmatisme jang dalam waktu pandjang telah menghinggapi pemimpin² dan anggota² PKI telah berakibat dibikinnja kesalahan² dilapangan politik, organisasi dan ideologi. Hal² ini telah menjebabkan sangat lambatnja proses perpaduan Marxisme-Leninisme dengan praktek revolusi Indonesia. Setelah PKI dibangun kembali sesudah mengalami pukulan kontra-revolusi tahun 1948, maka salahsatu perdjuangan jang terpenting didalam PKI jalah perdjuangan melawan dogmatisme.

Pengalaman revolusi² jang sudah menang di-negeri² Timur sesudah perang dunia ke-2, misalnja revolusi Tiongkok, sangat membantu PKI dalam berperang melawan dogmatisme. Pengalaman revolusi² jang sukses di-negeri² Timur ini memberi peladjaran jang sangat banjak pada PKI. Dikalangan kader² PKI timbul kegairahan jang sangat besar untuk beladjar dari pengalaman revolusi negeri² Timur jang sukses itu. Tetapi, pada tingkat pertama dalam beladjar dari revolusi negeri² Timur itu ada ketjenderungan untuk setjara tidak kritis, djadi setjara dogmatis lagi, mengambil oper kesimpulan² dan dengan setjara tidak wadjar pula memaksakan kesimpulan revolusi negeri² Timur jang sudah menang itu supaya djuga berlaku untuk revolusi Indonesia. Se-olah² problim revolusi

Digitized by Dimpos Manalu

Indonesia sama persis dengan problim revolusi negeri² Timur lainnja, se-olah² tiada sedikit djuapun bedanja dengan revolusi negeri² Timur jang sudah menang. Padahal tidak ada dua barang jang sama persis, walaupun barang² itu keluar dari satu pabrik jang banjak menggunakan mesin² presisi.

Tjepat atau lambatnja kemenangan revolusi Indonesia, sedikit atau banjaknja kesalahan jang kita bikin, bisa atau tidaknja kita mengatasi berbagai kesulitan, sangat tergantung pada kemampuan Partai kita, terutama kader²nja, dalam memadukan kebenaran umum Marxisme-Leninisme dengan praktek kongkrit revolusi di-negeri kita, di-pulau² kita, di-provinsi² kita, di-kabupaten² kita dan di-desa² kita, pendeknja dimana sadja Partai kita bekerdja. Dengan berpedoman Marxisme-Leninisme kita melakukan pekerdjaan revolusioner kita dengan berpokokpangkal pada diri kita sendiri, pada kenjataan² politik, ekonomi, kebudajaan, adat-istiadat dan kebiasaan² jang ada disekitar kita.

Marxisme-Leninisme adalah pedoman, dan pedoman jang sudah diudji kebenarannja. Tetapi pedoman ini akan tidak ada gunanja djika tidak kita pergunakan untuk menerangi keadaan disekitar kita. Keadaan atau kenjataan disekitar kita, itulah jang harus didjadikan pokokpangkal. Kita tidak boleh bekerdja dengan berpokokpangkal pada „kemestian²" menurut pengalaman² ditempat lain. Dengan berpedoman Marxisme-Leninisme dan dengan berpokokpangkal pada kenjataan² jang kita hadapi sendiri, kita harus membikin „kemestian²" untuk tiap² keadaan dan tempat dimana kita berada guna memadjukan gerakan revolusioner kita.

Hanja djika kita radjin mempeladjari Marxisme-Leninisme, pandai menggunakannja sebagai pedoman, radjin menjelidiki apa jang sudah terdjadi untuk mendapat peladjaran daripadanja, maka tahun² depan dari Partai kita adalah tahun² jang akan lebih memperpadukan Marxisme-Leninisme dengan praktek kongkrit revolusi Indonesia.

Terutama mengingat sangat tidak samanja perkembangan ekonomi, politik dan kebudajaan di-pulau² dan daerah² negeri kita, hendaklah kebenaran² umum mengenai revolusi Indonesia, jaitu hasil analisa dan kesimpulan Marxis-Leninis tentang revolusi Indonesia, jang diadjarkan setjara sentral oleh Partai, dipeladjari dengan

sepenuh hati, dan pergunakanlah semuanja itu sebagai pedoman untuk mempeladjari keadaan chusus setempat, dan berdasarkan ini bikinlah langkah² jang praktis dan pasti dilapangan politik, organisasi dan ideologi, sesuai dengan keadaan setempat.

Djika kita sudah bisa menggunakan Marxisme-Leninisme sesuai dengan keadaan pulau kita masing², dengan daerah kita masing², pendeknja sesuai dengan tempat dimana kita melakukan praktek revolusioner kita, maka barulah Partai kita mendjalankan salahsatu prinsip pokok dari Marxisme-Leninisme, jaitu kesatuan teori dengan praktek. Pelaksanaan tugas penting ini, jaitu tugas beladjar Marxisme-Leninisme dengan sasaran revolusi Indonesia, sangat tergantung pada kader² tinggi dan kader² menengah Partai kita. Dengan sekuat tenaga harus kita achiri langgam jang keliru selama ini jaitu langgam beladjar teori revolusioner „berdjalan sendiri" dan revolusi Indonesia „berdjalan sendiri".

Singkatnja, tahun² jang akan datang haruslah didjadikan tahun² penjelenggaraan setjara besar²an sekolah² dan kursus² Partai, penjelidikan² mengenai keadaan sekarang dan sedjarah, memperhebat pekerdjaan dilapangan politik dan organisasi. Lewat sekolah² dan kursus² Partai beladjarlah tentang logika revolusi kita, tentang sifat² chusus ekonomi negeri kita, tentang taktik revolusi kita dan tentang apa sadja jang dibutuhkan oleh revolusi kita. Tetapi ingatlah senantiasa, bahwa memiliki semua pengetahuan itu tidak dengan sendirinja bisa mengubah keadaan negeri kita jang setengah-djadjahan dan setengah-feodal sekarang. Praktek revolusioner, pekerdjaan revolusioner, inilah jang menentukan dalam mengubah keadaan negeri kita. Perbanjaklah praktek, perbesarlah produksi dalam pekerdjaan revolusioner, karena ini berarti menimbun kekuatan jang sangat dibutuhkan oleh Rakjat Indonesia.

Pekerdjaan Partai kita harus kita ratakan keseluruh negeri. Kelemahan Partai disatu daerah atau satu pulau mengantjam keselamatan Partai dan Rakjat di-daerah² atau pulau² dimana Partai sudah kuat. Di-daerah² atau pulau² dimana Partai sudah madju harus dibikin lebih madju lagi, dan di-daerah² atau pulau² dimana Partai masih ketinggalan supaja ber-lomba² mengedjar pulau² dan daerah² jang sudah madju. Tidak boleh ada satu pulau atau satu daerah jang tidak mengambil bagian dalam perlombaan besar ini.

Perpustakaan Dinpos Manado

Sekali Lagi Sembojan „Tanah Untuk Kaum Tani" adalah djudul tulisan Kawan D.N. Aidit jang dimuat di Harian Rakjat bulan Djuni 1957 jang ditulis untuk mendjawab pemimpin sementara partai jang dalam kampanje pemilihan DPRD (Dewan Perwakilan Rakjat Daerah) memfitnah PKI jang menggambarkan se-olah2 PKI tidak setia kepada djandji pelaksanaan sembojan „Tanah Untuk Kaum Tani".

Dipaparkan oleh Kawan D.N. Aidit bahwa sesuai dengan watak revolusi Indonesia, jaitu burdjuis demokratis, sebenarnja kaum burdjuis mempunjai kepentingan akan terwudjutnja sembojan tersebut. Tetapi karena mereka disatu fihak tidak berani terhadap tuantanah dan dilain fihak takut terhadap kaum tani dan proletariat, karena mereka ada hubungan2 tertentu dengan tuantanah atau dikalangan mereka ada jang djuga tuantanah, maka adalah mendjadi kewadjiban PKI untuk memungut pandji2 demokratis anti feodal dan mengibarkannja tinggi2.

Karena adilnja dan sedjalan dengan perkembangan sedjarah tuntutan revolusi kita kaum Komunis berkejakinan penuh bahwa sembojan itu pasti dapat dilaksanakan.

SEKALI LAGI SEMBOJAN „TANAH UNTUK KAUM TANI"

Ada pemimpin2 sementara partai jang didalam kampanje pemilihan DPRD menjatakan se-olah2 PKI tidak setia pada programnja, tidak setia pada djandjinja jaitu djandji akan melaksanakan sembojan „Tanah Untuk Kaum Tani". Disamping untuk memukul PKI didalam kampanje pemilihan DPRD mereka bertudjuan untuk membikin diskredit sembojan „Tanah Untuk Kaum Tani". Pokoknja, mereka tidak suka pada sembojan ini, apalagi pelaksanaan sembojan ini.

Djika jang tidak suka pada sembojan „Tanah Untuk Kaum Tani" hanja pemimpin2 partai2 tuantanah dan komprador, tidaklah mengherankan. Tetapi, jang mengherankan jaitu bahwa jang ikut2 membentji sembojan ini jalah tokoh2 dari partai2 burdjuis nasional. Padahal djika mereka mau mengerti dan djika mereka setia pada wataknja sendiri, mereka se-kurang2nja harus ikut mempropagandakan sembojan „Tanah Untuk Kaum Tani", karena pelaksanaan sembojan ini berarti penghapusan sistim feodal jang mendjadi tudjuan tiap2 revolusi burdjuis. Pelaksanaan sembojan ini berarti perkembangan jang demokratis, perkembangan perdagangan dan industri nasional.

Diantara tokoh2 partai2 burdjuis banjak jang mengira bahwa program anti-feodalisme dan sembojan „Tanah Untuk Kaum Tani", adalah program dan sembojan Sosialisme, sembojan Komunis. Padahal, sedjarah menundjukkan bahwa program anti-feodalisme dan sembojan „Tanah Untuk Kaum Tani" adalah program dan sembojan tiap2 revolusi burdjuis, karena dengan pelaksanaan program ini berarti *pemberian hakmilik* jang berupa alat produksi (jaitu tanah) kepada kaum tani, djadi *bukan penghapusan hakmilik* atas alat2 produksi seperti jang terdjadi dalam revolusi sosialis.

Revolusi Amerika tahun 1776, jang dikatakan oleh Lenin sebagai salahsatu *„peperangan besar, jang sungguh2 membebaskan,*

Perpustakaan Dimpos Manado

jang sungguh² revolusioner" (1) djuga berwatak anti-feodalisme. Revolusi ini tidak hanja telah menegakkan kemerdekaan nasional Amerika, tidak hanja telah menghantjurkan restriksi² jang diletakkan oleh Inggeris pada kekuatan² produktif kolonial, tidak hanja telah membebaskan pasar didalamnegeri dan membuka djalan untuk perkembangan jang tjepat dari perdagangan dan industri, tetapi djuga telah menghapuskan sistim sewatanah feodal, telah memberikan hak² politik jang terbatas kepada Rakjat, ketjuali kepada budak² Negro.

Revolusi Amerika tahun 1776 berpengaruh atas bagian² lain dari dunia. Revolusi ini memberi inspirasi kepada Rakjat Perantjis untuk melemparkan tirani feodal dari atas pundaknja, dan ia djuga telah mendorong Rakjat² Amerika Latin untuk membebaskan dirinja dari tindakan Spanjol dan Portugal jang bersifat feodal. Revolusi burdjuis besar Perantjis tahun 1789 jang mendapat inspirasi dari revolusi burdjuis Amerika berhasil melemparkan kekuasaan feodalisme, sistim tuantanah pada pokoknja dihapuskan, keradjaan diganti dengan Republik.

Djadi, djelaslah bahwa program anti-feodalisme dan sembojan „Tanah Untuk Kaum Tani" adalah program dan sembojan revolusi burdjuis, bukan program, dan sembojan revolusi sosialis. Tentu timbul pertanjaan: kenapa sementara pemimpin burdjuis Indonesia menentang keras program dan sembojan ini? Djawabnja jalah: kedudukan politik dan ekonomi jang lemah dari burdjuasi nasional Indonesia membikin mereka tidak berani kepada tuantanah dan takut kepada kaum tani dan proletariat. Atau, diantara tokoh² partai² burdjuis terdapat tuantanah². Atasnama burdjuasi tokoh² ini membela tuantanah.

Mengingat, bahwa partai² burdjuis Indonesia tidak tampil dengan program tanah jang revolusioner, djadi tidak melakukan tugas sedjarahnja setjara konsekwen sebagai klas burdjuis, maka adalah mendjadi kewadjiban Partai Komunis Indonesia untuk memungut pandji² revolusi anti-feodalisme jang sudah dilemparkan oleh burdjuasi itu dan mengibarkannja tinggi². Kita lakukan ini, karena kita sedar bahwa Sosialisme tidak mungkin dibentuk djika feodalisme masih bertjokol, djika kaum tani masih sangat melarat. Pembangunan ekonomi atau jang lazim dikatakan perubahan dari ekonomi kolonial keekonomi nasional tidak mungkin tanpa membebaskan tenaga produktif di-desa², dimana sebagian besar Rakjat Indonesia bertempattinggal.

Mengenai program agraria kita tidak mengharap jang berlebih-lebihan dari pemimpin² partai² burdjuis nasional. Tjukup asal mereka mau menempuh djalan jang sudah ditempuh oleh Thomas Jefferson, salahseorang pemimpin utama Revolusi Amerika tahun 1776. Sjukur kalau mereka suka berbuat jang lebih banjak lagi daripada orang tua jang hidup hampir dua abad jang lalu ini, untuk kepentingan kaum tani dan demokrasi Indonesia.

Kepada seluruh kaum Komunis saja serukan:

Djangan hiraukan pemimpin² burdjuasi nasional jang tidak melakukan tugas sedjarahnja. Kita kaum Komunis dan seluruh proletariat ber-sama² dengan kaum tani akan melakukannja untuk mereka. Ini menundjukkan kematangan kita dalam politik.

Djangan henti²nja mempropagandakan program tanah jang revolusioner, mempropagandakan sembojan „Tanah Untuk Kaum Tani". Dengungkan sampai kesemua gubuk kaum tani bahwa program dan sembojan ini achirnja akan dapat dilaksanakan, karena adilnja dan karena sedjalannja dengan perkembangan sedjarah dan tuntutan revolusi demokratis kita.

Djakarta, Djuni 1957

Perpustakaan Universitas Gadjah Mada

Tulisan ini adalah analisa Kawan D.N. Aidit tentang hasil sementara pemilihan DPRD Djakarta Raya tanggal 22 Djuli 1957. Dari kenaikan djumlah pemilih PKI disimpulkan bahwa kemenangan PKI itu adalah objektif dan mendjadi bukti jang djelas bahwa Rakjat Indonesia sekarang sedang bergeser kekiri.

Oleh karena itu diperingatkan kepada tiap2 partai jang ingin mendapat kemadjuan, bahwa djalan jang seharusnja ditempuh jalah djalan persatuan dan demokrasi serta dengan lebih keras lagi menggempur reaksi dan bukannja meleburkan diri kedalam kubu reaksi jang dipimpin Masjumi-PSI jang anti-Rakjat dan jang melawan arus perkembangan masjarakat.

RAKJAT INDONESIA SEDANG BERGESER KEKIRI

Kubu Reaksi Dengan Kombinasi Masjumi-NU-PNI Bukan Keinginan Rakjat Indonesia

Hasil sementara pemilihan DPRD Djakarta tanggal 22 Djuni jl. untuk Empat Besar adalah sbb.: PKI 135.038 (Konstituante 89.699), PNI 123.069 (K. 173.651), NU 101.077 (K. 124.866) dan Masjumi 151.556 (K. 180.348).

Walaupun penghitungan suara belum selesai samasekali, karena masih ada beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara) jang belum masuk, tetapi sekarang sudah dapat dipastikan, bahwa diantara Empat Besar hanja PKI jang mendapat kenaikan dalam segala hal, dan kenaikan jang tidak ketjil. Dari Partai No. 4 PKI dalam waktu hanja satusetengah tahun naik mendjadi Partai No. 2, djumlah pemilihnja naik dengan kira² 45% djika dibanding dengan pemilihan Konstituante (pemilihan satusetengah tahun jl., jang terachir sebelum pemilihan DPRD). Djika kieskosien kira² 15.000, maka djumlah kursi PKI dalam DPRD akan naik dengan 50%, jaitu dari 6 kursi mendjadi 9 kursi, walaupun djumlah kursi DPRD jang akan datang (41) kurang daripada DPRD demisioner sekarang (45).

Hasil pemilihan DPRD jang baru lalu boleh dikatakan sesuai dengan plan jang dibikin oleh Comite PKI Djakarta Raja (CDR), plan jang dibikin berdasarkan diskusi² mereka jang mendalam dengan Comite² dan kader² bawahan. Sukses ini menundjukkan adanja pimpinan kolektif jang objektif dan realis dari CDR. Oleh karena itu, sukses² jang sudah ditjapai pasti akan menimbulkan antusiasme jang lebih besar dikalangan anggota² PKI di Djakarta dan diseluruh negeri, dan sudah tentu harus didjauhi kesombongan dan rasa puas diri sebagaimana kita harus mendjauhi tiap² penjakit dan ratjun.

Perpustakaan Dimpos Manado

Pemilihan DPRD Djakarta Raja tidak hanja mempunjai arti Djakarta se-mata², tetapi djuga mempunjai arti nasional. Per-tama² kemenangan ini terdjadi diibukota negeri, dan selain itu ia mendahului pemilihan DPRD² diseluruh negeri. Oleh karena itu kemenangan PKI di Djakarta Raja djuga mempunjai arti nasional. Hal ini membikin kaum reaksioner jang dipelopori oleh Masjumi-PSI sangat marah lewat koran² mereka. Pada mereka sudah terbajang pergeseran kekiri dari Rakjat Indonesia diseluruh negeri, dan terbajanglah apa kira² jang akan mendjadi hasil pemilihan DPRD² di-daerah² lain nanti. Dalam „menganalise" hasil pemilihan DPRD Djakarta Raja, koran² reaksi seperti *Indonesia Raja, Abadi, Pedoman, Keng Po,* dll. menjebut segala matjam, ketjuali satu kenjataan jang besar dan begitu menjolok, jaitu bahwa Rakjat Indonesia sekarang sedang bergeser kekiri. Walaupun hati ketjilnja sangat mejakini hal ini, tetapi kaum reaksi kuatir sekali kalau kenjataan ini diketahui setjara luas oleh pengikut² mereka dan membawa pengikut² mereka djuga tjenderung kekiri.

Fihak Masjumi kuatir benar kalau ketahuan, bahwa banjak pemilih mereka berpindah ke PKI. Untuk menutupi kekuatirannja mereka katakan, kalau toh ada perpindahan dari Masjumi, maka perpindahan itu bukannja ke PKI, tetapi ke NU, atau „paling djelek" ke PNI. Ini adalah pernjataan dari mereka jang menutupi kenjataan. Periksalah hasil berbagai TPS, maka akan diketemukan situasi sbb.: pemilih boleh dikatakan tetap, pemilih PNI boleh dikatakan tetap, demikian djuga pemilih NU, tetapi pemilih Masjumi banjak merosot, sedangkan PKI dari nomor 5 atau 4 mendjadi nomor 1. Dalam keadaan demikian ini tidak bisa disangkal bahwa pemilih Masjumi berpindah ke PKI. Periksalah hasil PPS Kebajoran Baru. PKI naik dengan 48%, PNI naik dengan 1,5%, NU hanja turun dengan 3%, sedangkan Masjumi turun dengan 23%. Apakah dengan kenjataan ini masih ada orang jang tidak mau mengakui bahwa banjak pemilih Masjumi sudah pindah mentjoblos Palu-Arit? Dinamik Rakjat tidak membutuhkan "tussenstation" PNI atau NU untuk pergi dari Masjumi ke PKI. „Teori tussenstation" ini adalah lamunan, tidak realis, tidak objektif, oleh karena itu tidak mungkin digunakan untuk menghasut PNI dan NU supaja membentji PKI selama kedua partai ini masih realis

dan objektif.

Untuk menutupi kemerosotan² suaranja, baik fihak Masjumi ataupun PSI mengatakan bahwa Rakjat „lesu" atau „malas" datang ke TPS. Mereka belum kapok menjalahkan Rakjat. Kenjataan bahwa pemilih memang kurang jang datang membikin sementara orang pertjaja pada „analise" mereka. Tetapi benarkah Rakjat lesu? Benar, tetapi bukan lesu terhadap PKI, karena pemilih PKI ternjata bertambah. Djadi apakah arti kelesuan Rakjat ini? Tidak lain jalah tingkat permulaan dari sikap kritis pemilih² sementara partai jang menentang kepentingan Rakjat atau jang ragu² membela kepentingan Rakjat. Sikap kritis ini untuk sebagian pemilih sudah lebih tinggi tarafnja, jaitu sudah sampai tingkat kesedaran untuk memilih PKI, sedangkan untuk sebagian lagi baru sampai pada tingkat berdemonstrasi tidak datang ke TPS. Diantara jang ikut berdemonstrasi tidak datang ke TPS ini terdapat djuga beberapa tokoh PSI.

Mereka katakan lagi, bahwa kemenangan PKI jalah karena „hebatnja kampanje PKI" dan karena „kedatangan tamu agung Worosjilov". Sebagian daripada kesimpulan ini benar, tetapi sebagian lagi lamunan. Ia benar karena memang PKI tidak pernah dan tidak akan mengetjilkan arti kampanje dalam pemilihan. Tetapi jang menentukan kemenangan PKI bukan hanja kampanje. Amal PKI jang kongkrit kepada Rakjat selama ber-bulan² dan ber-tahun², itulah jang mendjadi kuntji dari semua kemenangan PKI.

Karena bersandar kepada massa, kampanje PKI adalah orisinil, kreatif dan tanpa ongkos² mahal. Tetapi kampanje ini tidak akan banjak artinja djika tidak didahului oleh amal kongkrit jang terus-menerus kepada Rakjat, djika tidak terus-menerus PKI membuktikan satunja program dan perbuatan Komunis, baik didalam Dewan Perwakilan maupun di-tengah² massa.

Kedatangan tamu agung Worosjilov memang merupakan demonstrasi jang besar dari kegagalan politik anti-Sovjet dan anti-Komunis dari kaum imperialis asing dan kaum reaksioner dalam-negeri. Tetapi djangan dilupakan bahwa di-tempat² jang tidak langsung merasakan kedatangan tamu agung karena terpentjilnja tempat itu, PKI mendapat prosentase tambahan suara lebih banjak. Ditempat jang terpentjil seperti Pulogadung PKI mendapat kenaik-

an 99%, sedangkan ditempat jang lebih terpentjil lagi seperti Pulau Seribu PKI mendapat kenaikan 385%.

Karena PNI dan NU mengalami kemerosotan suara pemilih, kaum reaksi buru² menerkam kesempatan jang dikiranja baik ini untuk menarik kedua partai ini kedalam kubu reaksi. Mereka mau „djual kojok" se-olah² djalan menentang arus massa, djalan memusuhi Rakjat jang selama ini ditempuh oleh Masjumi-PSI adalah obat untuk mentjegah kemerosotan suara dalam pemilihan² jang akan datang. Kalau benar djalan anti-Rakjat jang mereka tempuh bisa menambah djumlah pemilih, barulah ada kemungkinan bahwa PNI dan NU mau mengikuti djedjak mereka. Tetapi buktinja adalah sebaliknja. Djalan jang mereka tempuh sudah terbukti djalan jang tjelaka. Bukankah dengan djalan menentang arus kekiri PSI tidak mendapat suara jang lebih banjak? Bukankah djalan menentang arus kekiri jang ditempuh oleh Masjumi adalah djalan kehantjuran bagi Masjumi sendiri? Ini dibuktikan oleh angka² pemilih Masjumi jang merosot dengan deras sebagai berikut: dalam pemilihan parlemen di Djakarta Raja Masjumi mendapat suara 200.478. dalam pemilihan Konstituante merosot mendjadi 180.348 suara dan dalam pemilihan DPRD Djakarta Raja baru² ini lebih merosot lagi, jaitu mendjadi 151.556 suara.

Teranglah, bahwa bagi partai² jang benar² mau mendapat tambahan suara bukanlah djalan Masjumi-PSI jang anti-Rakjat, jang melawan arus perkembangan masjarakat, jang harus ditempuh. Tetapi mereka harus menempuh djalan bersatu dengan Rakjat dan ber-sama² Rakjat melalui djalan persatuan dan demokrasi menggempur kubu reaksi dan pemetjahbelah.

Andjuran koran² Masjumi-PSI untuk membentuk blok reaksi jang lebih luas dengan kombinasi Masjumi-NU-PNI dengan tudjuan menghantjurkan PKI jang ternjata mendapat kepertjajaan lebih besar dari Rakjat, dengan sendirinja adalah djalan anti-Rakjat, anti-demokratis dan bertudjuan untuk mendudukkan kekuasaan reaksi jang dipelopori oleh Masjumi-PSI. Sedjarah politik dinegeri kita pada tahun² achir ini belum pernah menundjukkan, bahwa kekuasaan Masjumi-PSI dapat menguntungkan partai² seperti PNI dan NU, apalagi menguntungkan Rakjat.

Kita berpendapat, bahwa kemerosotan suara jang dialami oleh PNI dan NU bukanlah karena tidak menempuh djalan reaksi dan perpetjahan jang selama ini ditempuh oleh Masjumi, tetapi sebaliknja karena kurang teguh menempuh djalan bersatu dengan Rakjat dan ber-sama² Rakjat melalui djalan persatuan dan demokrasi menggempur kubu reaksi dan pemetjahbelah. Padahal hanja dengan menempuh djalan ini kekuasaan politik kedua partai ini dapat didudukkan, sedangkan djalan lain berarti kekuasaan politik Masjumi-PSI dengan korban dari fihak PNI-NU.

Mengenai djalan mana jang akan ditempuh oleh PNI selandjutnja, adalah penting sekali arti dari peringatan ulangtahun ke-30 PNI tanggal 3 Djuli jad. di Bandung. Dalam pidato² ulangtahun ini kita sangat mengharapkan adanja ketegasan dari fihak Dewan Pimpinan Pusat PNI djalan mana jang selandjutnja akan mereka tempuh, terutama dalam menghadapi kenjataan pergeseran kekiri dari Rakjat Indonesia sekarang. Kita mengharap supaja PNI tetap setia pada djalan kiri atau djalan Rakjat, djalan anti-kolonialisme dan anti-feodalisme jang digariskan oleh pemimpin² PNI tigapuluh tahun jang lalu.

Singkatnja, kesimpulan kita jalah bahwa hasil pemilihan DPRD Djakarta Raja menundjukkan pergeseran kekiri dari Rakjat Indonesia. Hanja partai² jang dapat menangkap kenjataan ini, dan mau bersatu dengan Rakjat menempuh djalan persatuan dan demokrasi untuk menggempur kubu reaksi, akan mendapat kepertjajaan Rakjat. Djalan jang ditundjukkan oleh Masjumi-PSI untuk membentuk kubu reaksi jang diperluas dengan kombinasi Masjumi-NU-PNI adalah djalan jang menentang arus perkembangan jang diinginkan oleh Rakjat, dan ini berarti mengulangi bentjana jang sudah². Zaman ada difihak mereka jang sungguh², teguh dan berani memihak Rakjat!

Djakarta, 27 Djuni 1957

Pustaka Dimpos Manatu

Ubah Imbangan Kekuatan Untuk Melaksanakan Konsepsi Presiden Sukarno 100% adalah djudul laporan umum Kawan D.N. Aidit kepada Sidang Pleno ke-V CC PKI pada permulaan Djuli 1957. Dalam laporan umum ini antara lain diuraikan bahwa Kabinet Gotongrojong jang mendjadi inti dari Konsepsi Presiden Sukarno merupakan satu konsep jang mentjerminkan perasaan, fikiran, kehendak dan tuntutan Rakjat jang wadjar dalam membela keutuhan dan mempertahankan kemerdekaan nasional Republik Indonesia, serta dalam memberikan tjorak demokrasi jang tjotjok bagi masjarakat Indonesia taraf sekarang.

Konsepsi Presiden Sukarno telah membikin sederhana pertentangan jang ada jang membikin garis pemisah antara kekuatan pro-persatuan anti-kolonialisme disatu fihak dan kekuatan anti-persatuan pro-kolonialisme difihak lain, jaitu garis antara Rakjat jang setudju Konsepsi Presiden dan bukan-Rakjat jang menentang Konsepsi Presiden. Oleh karena itu tugas politik jang terpenting sekarang jalah terus mendidik dan memobilisasi massa untuk mengubah lebih landjut imbangan kekuatan guna terlaksananja Konsepsi Presiden Sukarno 100%. Terlaksananja Konsepsi Presiden 100% akan berarti suatu lompatan besar didjalan penjelesaian Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja.

UBAH IMBANGAN KEKUATAN UNTUK MELAKSANAKAN KONSEPSI PRESIDEN SUKARNO 100%!

Kawan²! Sidang Pleno Ke-V Comite Central ini seharusnja sudah diadakan dalam bulan Djanuari jang lalu, tetapi kesibukan seluruh Partai kita, baik dipusat maupun di-daerah², jang telah menambat sebagian besar anggota² CC, menjebabkan Sidang Pleno kita tidak dapat dilangsungkan tepat pada waktunja.

Pada tanggal 20 Februari jang lalu telah dilangsungkan rapat Politbiro jang diperluas dengan semua anggota CC jang bertempat tinggal di Djakarta. Dalam Sidang Politbiro jang diperluas ini, jang dihadiri oleh sebagian besar anggota² CC, telah didiskusikan situasi politik jang sedang berdjalan, terutama jang berhubungan dengan Konsepsi Presiden Sukarno. Sidang dengan suara bulat memutuskan menjetudjui Konsepsi Presiden Sukarno sebagai sumbangan jang penting dalam menggalang Front Persatuan Nasional dan sebagai sesuatu jang dapat mendjawab problim politik jang urgen jang dihadapi oleh Rakjat Indonesia sekarang. Tentang Konsepsi Presiden Sukarno akan kita bitjarakan lebih djauh dibagian lain laporan ini.

Disamping kita akan mendiskusikan situasi politik jang terachir, dalam Sidang Pleno ini kita djuga akan menindjau persiapan² Partai mengenai pemilihan DPRD² diseluruh negeri (ketjuali Djakarta Raja jang sudah selesai), memeriksa tjara² pelaksanaan Plan Tiga Tahun Pertama Tentang Organisasi dan Pendidikan jang diputuskan oleh Sidang Pleno Ke-IV Comite Central bulan Djuli tahun jang lalu dan memeriksa hasil pekerdjaan „Panitia PKI Perantjang Konstitusi Republik Indonesia". Djuga kita akan menindjau sampai dimana mungkinnja melaksanakan Konferensi Nasional Wanita Komunis dan Konferensi Nasional Tani dalam waktu jang tidak terlalu lama.

Pustaka Dimpos Manatu

I

Situasi Politik

Kawan², dalam situasi internasional dan dalamnegeri jang bagaimana sidang CC kita sekarang dilangsungkan?

Sepuluh bulan jang lalu Sidang Pleno ke-IV CC sudah menjimpulkan tentang adanja pergeseran² demokratis dan progresif jang menguntungkan perdjuangan untuk perdamaian dan kemerdekaan dan jang mengisolasi politik perang dan politik pendjadjahan. Kita mengkonstatasi adanja dan tumbuhnja front persatuan internasional anti-perang dan anti-kolonialisme.

Periode dari Sidang Pleno ke-IV CC sampai sekarang ditandai oleh kenjataan makin eratnja hubungan dan kerdjasama antara kekuatan² anti-kolonial di Asia dan Afrika dengan negeri² kubu sosialis, meskipun pemerintah beberapa negara Asia-Afrika, jaitu jang mendjadi anggota Pakt Bagdad (1), berusaha keras untuk mengingkari prinsip² dan semangat Konferensi Bandung dan untuk merusak hubungan baik antara negara² Asia-Afrika satu sama lain dan hubungan antara negara² ini dengan negara² kubu sosialis. Kekuatan front persatuan internasional anti-kolonial dan anti-perang tidak hanja tetap terpelihara, tetapi baik di-negeri² kubu sosialis maupun didalam barisan negara² Asia-Afrika jang anti-kolonial ada perkembangan² baru dalam usaha memperkuat kedudukan masing².

Untuk merusak kerdjasama internasional antara negara², termasuk antara negara² Asia-Afrika dengan kubu sosialis, kaum imperialis jang dipelopori oleh Amerika Serikat berusaha untuk mendjatuhkan prestise negara² kubu sosialis. Djuga dengan maksud ini kaum imperialis mengadakan agresi jang berbentuk intervensi bersendjata dan pemberontakan kontra-revolusi di Polandia dan Hongaria dalam tahun 1956. Di Polandia agresi imperialis ini bisa lekas digagalkan berkat kewaspadaan dan kebidjaksanaan politik dari Partai Persatuan Buruh Polandia. Tetapi di Hongaria intervensi dan agresi imperialis banjak menimbulkan kerusakan² dan kesukaran² pada penghidupan dan kekuasaan Rakjat pekerdja. Peristiwa ini kemudian oleh kaum imperialis didjadikan soal besar. Lewat pers dan radio mereka menghasut seluruh dunia dengan tudjuan

untuk merusak hubungan baik jang ada antara Uni Sovjet dengan negara² lain, terutama dengan negara² anti-kolonial di Asia-Afrika dan di Amerika Latin. Padahal adalah terang benderang bahwa bantuan militer jang diberikan oleh Uni Sovjet atas permintaan Pemerintah Janos Kadar jang sah guna membela hasil² sosialis di Hongaria dari intervensi negara² imperialis adalah sepenuhnja sesuai dengan ketentuan² dalam „Persetudjuan Warsawa" (2) dan sesuai pula dengan semangat Bandung jang anti-intervensi asing.

Berkat ketabahan Rakjat pekerdja Hongaria, berkat bantuan negara² kubu sosialis dan berkat solidaritet proletariat internasional, intervensi dan pemberontakan kontra-revolusi di Hongaria dapat dipatahkan samasekali dan keadaan serta penghidupan normal sekarang sudah mulai pulih kembali. Berlawanan sekali dengan maksud jang mau ditjapai dengan intervensi tersebut, jaitu untuk mendjatuhkan prestise negara² kubu sosialis, terutama prestise Uni Sovjet, prestise negara dan Rakjat Sovjet jang telah berkorban untuk kepentingan Sosialisme di Hongaria tidak mendjadi djatuh, tetapi malahan telah mendjadi lebih meningkat dimata negara² kubu sosialis dan dimata Rakjat pekerdja diseluruh dunia.

Dengan kampanje djahatnja tentang „peristiwa Hongaria" kaum imperialis dan kaum reaksioner di-tiap² negeri sekaligus bertudjuan untuk membikin diskredit Partai Komunis di-negeri² jang bersangkutan. Tetapi kenjataannja adalah djuga sebaliknja. Kemenangan² gemilang Partai² Komunis di Italia dan di India dalam pemilihan umum belum berapa lama jang lalu, dan kemenangan PKI jang gemilang dalam pemilihan DPRD Djakarta Raja baru² ini, adalah bukti jang se-njata²nja dari kegagalan kampanje kaum imperialis.

Sekarang, dengan melalui laporan dari apa jang dinamakan Panitia Hongaria PBB dan dengan menggunakan forum Sidang Umum PBB, kaum imperialis sekali lagi mentjoba untuk mengobarkan semangat „anti-Sovjet" dan „anti-Komunis". Sudah dapat dipastikan, bahwa djuga kali ini hasutan ini akan digagalkan oleh kekuatan² demokratis disemua negeri.

Hubungan dan kerdjasama antara negara² sosialis satu sama lain bukannja mendjadi retak, malahan mendjadi lebih erat dan lebih kokoh. Hal ini telah dinjatakan dengan resmi antara lain

Perpustakaan Dimpos Manalu

oleh Pernjataan² Bersama antara PM Bulganin (Uni Sovjet) dengan PM Cyrankiwitj (Polandia) dan antara PM Bulganin dengan PM Tjou En-lai jang dikeluarkan di Moskow masing² pada tanggal 18 November 1956 dan 18 Djanuari 1957. Hubungan dan kerdjasama jang makin erat antara negara² kubu sosialis djuga dibuktikan oleh suksesnja Konferensi Budapes antara Bulgaria, Rumania, Uni Sovjet, Tjekoslowakia dan Hongaria pada permulaan tahun ini. Makin eratnja kerdjasama dan kokohnja persatuan antara negara² kubu sosialis berarti makin kuatnja basis front persatuan internasional anti-perang dan anti-kolonial.

Besarnja kekuatan² anti-kolonial di Asia-Afrika dibuktikan terutama sekali oleh luas dan banjaknja aksi² massa di-negeri² ini jang menentang dan mengutuk agresi Inggeris-Perantjis-Israel terhadap Mesir. Di Jordania, Suriah dan Libanon kaum buruh antara lain mengadakan pemogokan umum selama 24 djam setjara serentak. Di Pakistan para mahasiswa, kaum buruh dan massa Rakjat lainnja, bertentangan dengan politik pemerintah Pakistan, mengadakan demonstrasi² memprotes agresi Inggeris dan menuntut supaja Pakistan keluar dari Pakt Bagdad. Di India kaum demonstran memprotes Inggeris dan mengadjukan tuntutan supaja India keluar dari Persekemakmuran Inggeris.

Di Irak, dimana berkuasa satu pemerintah boneka dibawah PM Nuri es Said jang sangat memihak Inggeris dan Israel dan memusuhi bangsa² Arab, tidak sadja kaum buruh dan mahasiswa, tetapi djuga anggota² Parlemen mengadakan demonstrasi² dan aksi² protes setjara besar²an menjokong Mesir dan dengan keras menuntut supaja Irak keluar dari Pakt Bagdad dan supaja pemerintah Nuri es Said turun panggung. Pemerintah Nuri es Said tidak berdaja mentjegah aksi² Rakjat Irak jang telah menghantjurkan pipa² dan instalasi² minjak milik imperialis dinegeri ini, sekalipun ia dengan tjepat dapat bantuan sendjata dari Amerika Serikat untuk mempertahankan kekuasaannja. Pemerintah Irak terang²an telah mengchianati kepentingan bangsa² Arab, mengchianati kepentingan Rakjat Irak sendiri, dan telah mendjual diri kepada negara Barat jang mengepalai Pakt Bagdad.

Tetapi negara² Arab lainnja, terutama Mesir dan Suriah, bersama² dengan Rakjatnja tetap setia kepada prinsip² dan semangat

Bandung dan makin kokoh bersatu dan bekerdjasama melawan agresi imperialis serta membela kemerdekaan dan perdamaian di Timur Tengah.

Dalam soal membantu Mesir dan melawan agresi Inggeris-Perantjis-Israel pemerintah Ali Sastroamidjojo jang berkuasa ketika itu dan Rakjat Indonesia mempunjai sikap jang sama, jaitu sikap menjokong Mesir dan menentang agresi kolonial. Demonstrasi² menjokong Mesir dari massa pemuda, peladjar dan veteran bersama² dengan kaum buruh, kaum tani dan golongan² Rakjat lainnja merupakan manifestasi anti-kolonialisme jang besar dari Rakjat Indonesia. Pemogokan² jang dilakukan oleh kaum buruh Indonesia di-perusahaan² kaum kapitalis Inggeris dan Perantjis jang ditudjukan untuk menjokong perdjuangan Rakjat Mesir telah meningkatkan kesedaran politik kaum buruh dan telah sangat membantu dalam mempertebal semangat persatuan dan solidaritet internasional kaum buruh Indonesia.

Berkat kesedaran politik jang tinggi dari kaum buruh dan Rakjat Indonesia, pertjobaan² kaum reaksioner didalamnegeri jang dipelopori oleh pemimpin² Masjumi dan PSI untuk mengalihkan perhatian Rakjat dari soal Mesir ke „soal Hongaria" dapat digagalkan, baik didalam maupun diluar Parlemen.

Sangat menarik perhatian jalah demonstrasi besar²an Rakjat Muangthai dikota Bangkok pada achir tahun 1956, jang tidak hanja ditudjukan untuk membantu Mesir menentang agresi Inggeris-Perantjis-Israel, tetapi jang sekaligus meningkat mendjadi demonstrasi jang menuntut bubarnja pakt militer SEATO. Bukti lain tentang meningkatnja perdjuangan Rakjat Muangthai jalah demonstrasi ribuan mahasiswa di Bangkok pada awal Maret jang lalu menentang ketjurangan² jang telah dilakukan oleh Partai Pemerintah, partai Phibul Songram, dalam pemilihan umum bulan Februari jang lalu. Desakan² kekuatan progresif makin lama makin keras supaja Muangthai mendjalankan politik luarnegeri jang bebas, mengadakan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan RRT, melarang pembikinan pangkalan² perang asing diwilajah Muangthai. Semua ini dilakukan dibawah kekuasaan fasis jang didirikan dengan sendjata Amerika Serikat.

Djuga di Djepang dibawah kekuasaan sendjata Amerika, aksi²

Perpustakaan Dimpos Manalu

perlawanan Rakjat makin meluas, misalnja aksi² menuntut dihapuskannja pangkalan² perang Amerika, dihentikannja pertjobaan² bom A dan H dan dinormalkannja hubungan dagang dan diplomatik dengan RRT. Dalam perdjuangannja ini Rakjat Djepang mentjapai sukses² jang penting.

Dari kenjataan² diatas djelaslah bahwa agresi militer imperialis jang dibantu oleh pemerintah² „nasional" jang pro-imperialis dibeberapa negeri di Asia dan Timur Tengah terbukti tidak mampu untuk membendung menghebatnja gelombang anti-kolonial dan anti-perang di Asia dan Afrika. Kenjataan² ini diperkuat oleh demonstrasi² anti-Amerika seperti jang terdjadi di Taiwan baru² ini. Bukti jang sangat menjolok bahwa semangat anti-kolonialisme tidak bisa ditindas dengan kekuatan sendjata.

Front internasional anti-perang dan anti-kolonial ini makin diperkuat lagi oleh kundjungan² dan pertemuan² pribadi antara para pemimpin tertinggi dari berbagai negara, dan antara perutusan² resmi dan tidak resmi seperti misalnja misi parlementer, misi kebudajaan, misi para ahli, misi dagang dan misi² persahabatan lainnja. Kundjungan Presiden Sukarno ke Uni Sovjet, RRT dan negeri² sosialis lainnja beserta pernjataan bersama Indonesia-Uni Sovjet pada tanggal 11 November 1956 (3) merupakan peristiwa dan sumbangan bersedjarah bagi hubungan persaudaraan antara Indonesia dengan Uni Sovjet dan bagi perdamaian dunia. Dalam hubungan ini penting pula disebut dinormalkannja kembali hubungan diplomatik antara Djepang dengan Uni Sovjet dan hubungan dagang antara Djepang dengan RRT dan negeri² kubu sosialis lainnja. Penghapusan embargo terhadap RRT oleh makin banjak negeri adalah djuga tanda makin kuatnja front internasional anti-perang dan anti-kolonial. Semuanja ini penting artinja bagi usaha melawan hasutan² imperialis dan bagi usaha memperkokoh saling pengertian serta hubungan persaudaraan antara bangsa² didunia.

Sambutan Rakjat Indonesia jang sangat meriah terhadap kundjungan Ketua Presidium Sovjet Tertinggi URSS Worosjilov membuktikan besarnja semangat tjintadamai dan hasrat persahabatan antara bangsa² dari Rakjat Indonesia. Ini sekaligus membuktikan kegagalan kampanje anti-Sovjet jang sudah ber-puluh² tahun dilantjarkan di Indonesia, dan jang achir² ini mentjapai puntjaknja

dengan „peristiwa Hongaria".

Disamping makin terkonsolidasinja front persatuan internasional anti-kolonial dan anti-perang, didalam kubu imperialis keadaan menundjukkan perpetjahan dan pertentangan jang makin mendalam dan jang dalam periode achir² ini sudah merupakan permusuhan jang terang²an dan terbuka antara negara² imperialis satu sama lain, terutama antara Inggeris dan Amerika.

Pada achir² ini pertentangan jang paling sengit antara Inggeris dan Amerika terdjadi di Timur Tengah. Kegagalan total jang dialami oleh Inggeris di Mesir merupakan kesempatan jang sangat baik bagi Amerika Serikat untuk mengusir Inggeris samasekali dari daerah minjak jang sangat kaja dan strategis ini. Untuk segera dapat menguasai Timur Tengah dan untuk politik agresifnja terhadap Uni Sovjet, Amerika Serikat membuat apa jang mereka namakan *„teori kekosongan kekuasaan di Timur Tengah"*, padahal pemerintah negara² Arab beserta lebih dari 70 djuta orang² Arab di Timur Tengah tidak pernah meninggalkan tanahairnja. Atas dasar ini maka dibuatlah rentjana agresi jang diberi nama *„Doktrin Eisenhower"* (4).

Sekalipun Amerika Serikat sudah dapat menggeser dominasi Inggeris dalam Pakt Bagdad, tetapi pelaksanaan doktrin agresif ini tidaklah begitu mudah. Harian berpengaruh *„New York Times"* telah mengakui bahwa *„untuk bisa berhasil doktrin membutuhkan sokongan Nasser dan sekutu²nja"*. Padahal ini hanja bisa ditjapai, demikian *New York Times,* apabila Amerika Serikat melepaskan Israel, sesuatu jang bagaimanapun djuga tidak mungkin terdjadi.

Jordania telah didjadikan sasaran pertama dari pelaksanaan Doktrin Eisenhower. Intrik² AS dikalangan istana radja Husein dan segolongan opsir² reaksioner jang dibarengi dengan intimidasi² dan antjaman² militer oleh armada ke-6 angkatan laut AS jang diperlengkapi dengan sendjata² atom diwilajah perairan Arab, telah dapat memaksa djatuhnja Pemerintah Nabulsi jang demokratis. Sekarang elemen² feodal-militeris sedang memimpin kekuasaan fasis dinegeri tersebut. Jordania telah ditarik selangkah lebih dekat kepada Pakt Bagdad.

Dalam hubungan dengan perdjuangan anti-kolonialisme, keadaan di Aldjazair sekarang meminta perhatian chusus. Dinegeri ini

Dimpos Manalu

sekarang sedang berlangsung suatu perang kolonial setjara besar²an jang dilantjarkan oleh kaum kolialis Perantjis. Kebiadaban jang tidak ada taranja ini diselimuti dengan nama „gerakan pasifikasi", jang prakteknja sama seperti pembunuhan besar²an jang pernah dilakukan oleh bandit Westerling di Sulawesi Selatan (5). Praktek² politik Pemerintah Sosialis Perantjis ini mendapat perlawanan luas dan gigih dari gerakan kemerdekaan nasional Aldjazair. Kekuatan anti-kolonialisme diseluruh dunia berkepentingan untuk memenangkan perdjuangan Rakjat Aldjazair dengan aksi² solidaritet.

Belakangan ini politik intervensi dan subversif kaum imperialis kelihatan menimbulkan kesukaran² dalam hubungan antar-negara di Timur Tengah, tetapi ini bukanlah alasan untuk mengatakan bahwa kerdjasama berdasarkan prinsip² dan semangat Bandung sudah petjah. Kenjataan menundjukkan bahwa masih terdapat tjukup persamaan kepentingan jang kuat untuk kerdjasama dan mengadakan hubungan persahabatan atas dasar putusan² dan semangat Bandung. Radja Ibnu Suud dari Saudi Arabia dan Radja Faisal dari Irak misalnja telah bersama menjatakan tetap mendjundjung tinggi putusan² Bandung dan akan terus memelihara persatuan dan solidaritet Arab untuk menghadapi antjaman agresi Israel. Tuntutan umum sedunia untuk segera menghentikan semua pertjobaan² bom nuklir adalah suatu titik pertemuan jang luas dan riil bagi negeri² Asia-Afrika. Titik² pertemuan inilah jang harus diketemukan dan dipelihara sebagai dasar bagi Konferensi ke-II Asia-Afrika jang akan datang.

Dalam hubungan dengan soal Timur Tengah perlu ditjatat politik luarnegeri Uni Sovjet jang menundjukkan pengertian dan pembelaan jang djudjur serta tegas terhadap kepentingan bangsa² Arab. Peringatan keras Uni Sovjet telah dapat dengan segera menghentikan agresi Inggeris cs. di Mesir dan telah pula dapat memaksa Irak untuk mengurungkan niatnja melakukan agresi militer terhadap Suriah pada achir tahun jang lalu. Uni Sovjet djuga dengan keras menentang „Doktrin Eisenhower" dan mengusulkan agar negara² besar ber-sama² menjatakan tidak akan tjampurtangan dalam soal² intern Timur Tengah dan menjerahkan persoalannja kepada bangsa² Arab di Timur Tengah sendiri. Pembelaan setia dan tidak mementingkan diri sendiri dari Uni Sovjet terhadap kepentingan nasional

bangsa² Arab merupakan faktor jang paling kuat dan paling efektif dalam menggagalkan rentjana² agresi imperialis didaerah ini. Oleh karena itu tidaklah mengherankan, bahwa segala hasutan tentang „infiltrasi Sovjet" tidak mendapat pasaran di Timur Tengah. Pengalaman bangsa² Arab sendiri telah membuktikan benarnja utjapan Presiden Nasser jang menegaskan bahwa *„musuh² bangsa Arab bukanlah komunisme tetapi imperialisme"*.

Di Eropa pertentangan antara Inggeris dan Amerika Serikat berbentuk perdjuangan sengit untuk merebut seluruh pasar di-negeri² dibenua ini. Dalam rangka usahanja untuk mempertahankan kebebasannja sendiri, Inggeris telah menolak permintaan Amerika Serikat untuk menghentikan pembuatan sendjata² nuklir dan untuk menjerahkannja sadja kepada Amerika Serikat. Untuk memungkinkan pembiajaan politik persendjataan nuklir ini, dan bertentangan dengan kemauan Amerika Serikat, Inggeris akan mengurangi pasukan²nja dibenua Eropa dan dengan ini akan menghemat lebih dari £ 100 djuta setiap tahun. Djadi, rentjana penarikan pasukan² ini se-kali² bukanlah didorong oleh maksud² damai, tetapi didorong oleh kesulitan ekonomi Inggeris dan oleh politik persendjataan nuklir jang setjara lebih aktif didjalankan oleh Inggeris. Penarikan pasukan² Inggeris tersebut sangat tidak disukai oleh Amerika Serikat, karena Amerika Serikat membutuhkan serdadu² sewaan bagi rentjana² agresinja. Dalam rangka politik ini Inggeris dibulan Mei jang baru lalu telah dua kali ber-turut² mengadakan pertjobaan bom zat air buatannja sendiri dipulau Christmas di Samudera Pasifik. Dengan terus terang madjalah *„Economic Digest"*, pembawa suara pembela² imperium Inggeris dalam Partai Konservatif, mengatakan bahwa *„sekali kita melakukan pertjobaan bom H, maka Inggeris akan mempunjai kebebasan jang lebih besar didalam persekutuan"* (jang dimaksud didalam persekutuan Inggeris dengan Amerika Serikat).

Dari pertentangan² antara negara² imperialis satu sama lain, Djerman Barat banjak mendapat hasil dan sekarang sudah merupakan kekuasaan imperialis jang kuat di Eropa. Ini terutama sekali adalah hasil politik Amerika Serikat sesudah perang jang ditudjukan kepada membangunkan kembali ekonomi dan potensi perang imperialis Djerman. Hasil dari politik ini sekarang jalah, bahwa

Dimpos Manalu

modal Amerika sudah menguasai seluruhnja atau sebagian perusahaan² besar di Djerman Barat sebanjak tidak kurang dari 500 buah. Industri Djerman Barat ini telah didjadikan djembatan bagi kaum monopoli AS untuk meluaskan kekuasaannja atas tjabang² industri di-negara² lain di Eropa.

Dalam hubungan ini penting ditjatat penandatanganan Persetudjuan Pasaran Bersama Eropa dan Persetudjuan Euratom pada achir bulan Maret jang lalu oleh enam negara pesertanja, jaitu Djerman Barat, Perantjis, Italia, Nederland, Belgia dan Luxemburg (6). Persetudjuan² ini akan lebih mempermudah kelandjutan expansi modal Djerman dan AS di Eropa Barat dan daerah² djadjahan jang dikuasainja. Baik pula diperhatikan bahwa oleh Nederland sebagian dari wilajah Republik Indonesia, jaitu Irian Barat, djuga dimasukkan dalam daerah Persetudjuan Pasaran Bersama Eropa ini. Pemerintah Nederland sedang mentjari teman untuk diadjak meng-exploitasi Irian Barat dan untuk kemudian diadjak membela kekuasaan kolonial mereka diwilajah tersebut. Sajang bahwa Pemerintah Indonesia sampai kini belum djuga memadjukan protesnja atas perbuatan Nederland itu.

Melalui Persetudjuan Euratom, imperialis Djerman bisa menggunakan potensi kekuatan nuklir Eropa Barat untuk menandingi Inggeris dalam memperlengkapi angkatan perangnja dengan sendjata² nuklir.

Dalam situasi demikian, maka telah dilangsungkan sidang Dewan NATO di Bonn pada permulaan bulan Mei jang baru lalu. Pers Barat sendiri tentang ini mengatakan bahwa dengan sidang Dewan NATO di Bonn ini telah terdjadi pergeseran persekutuan kekuatan didalam NATO, jaitu jang dulu berintikan AS dan Inggeris, sekarang telah berubah dan mendjadi berintikan Amerika-Djerman Barat.

Di Asia, Amerika terpaksa tidak bisa menentang atau mentjegah tindakan Inggeris untuk memperlunak embargonja terhadap RRT. Tetapi disamping itu AS makin agresif di Asia.

Pangkalan atom telah didirikan AS dipulau Taiwan, terutama buat peluru² jang bisa dikendalikan. Ini adalah suatu kekurangadjaran jang tak ada taranja. Disamping itu, aksi² subversif terus mereka lakukan terhadap negeri² Asia jang tak mau tunduk padanja. Sidang Dewan SEATO di Canberra dibulan Maret jang lalu menundjukkan bahwa jang didjadikan sasaran utama dari kegiatan² subversif dan intervensi SEATO adalah negara² netral. Di Indonesia, Amerika tidak berhasil untuk menaikkan suatu pemerintah jang reaksioner, berkat kekuatan Rakjat jang demokratis, tetapi di Laos intervensi AS telah dapat memaksa djatuhnja Pemerintah Souvana Phouma jang demokratis dan sekarang berusaha keras untuk menaikkan kompradornja sendiri, Sosarith, keatas singgasana kekuasaan negara.

Tetapi bersamaan dengan itu, makin meluap pula amarah dan perlawanan Rakjat Asia terhadap kebiadaban kekuasaan tentara pendudukan Amerika diberbagai negeri seperti Taiwan, Djepang, dan lain². Protes dan aksi² Rakjat Asia terhadap dilakukannja pertjobaan² bom zat air di Pasifik makin meluas. Tuntutan untuk menghentikan pertjobaan bom zat air djuga makin keras kedengaran di Eropa dan diseluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat sendiri seperti ternjata diantaranja dari seruan demokratis 2.000 sardjana AS baru² ini. Sidang Dewan Perdamaian Dunia di Kolombo baru² ini adalah sidang jang sangat besar artinja dalam merumuskan perasaan dan fikiran Rakjat sedunia jang mengutuk sendjata nuklir.

Walaupun fihak negara² imperialis jang dipelopori oleh Amerika Serikat dengan keras berusaha untuk memperhebat perang dingin dan untuk mentjetuskan perang panas, suasana ingin damai tetap menguasai dunia sekarang. Usul Uni Sovjet belum lama berselang supaja diadakan penghentian sementara semua pertjobaan bom nuklir selama 2 a 3 tahun terpaksa tak dapat ditolak mentah² oleh Amerika Serikat. Dalam hubungan ini perlu ditjatat dan diikuti dengan tjermat djalannja sidang² Komisi Perlutjutan Sendjata PBB jang dewasa ini sedang berlangsung di London, dibawah tekanan jang kuat dari gelombang pasang anti-sendjata nuklir diseluruh dunia.

Dengan terpeliharanja dan diperkuatnja front anti-kolonial dan anti-perang diseluruh dunia, maka terbukalah kemungkinan² baik bagi Rakjat Indonesia untuk lebih mengembangkan perdjuangan nasional guna merealisasi pembatalan KMB, memperbaiki ekonomi negerinja dan memasukkan Irian Barat kedalam kekuasaan Repu-

Dimpos Manalu

blik Indonesia.

Harus terus mendjadi perhatian, bahwa dengan diperhebatnja politik imperialis, terutama sekali imperialis AS, untuk meneruskan perang dingin dan djuga meletuskan perang panas, maka kita harus lebih² waspada terhadap intrik² dan aksi² subversif kaum imperialis dan harus berdjuang untuk mematahkan tiap² usaha tjampurtangan imperialis dalam urusan dalamnegeri Indonesia. Perdjuangan untuk melawan intrik² dan untuk mematahkan aksi² subversif asing merupakan bagian jang penting dari perdjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan nasional dan perdamaian.

Sumbangan Rakjat Indonesia untuk mempertahankan perdamaian harus lebih diperbesar. Pemerintah Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip² dan semangat Bandung. Gerakan untuk membela perdamaian dunia dinegeri kita harus diperbaiki, digiatkan dan diluaskan. Soal perdamaian harus didjadikan soal seluruh Rakjat Indonesia, karena ia langsung mengenai kepentingan seluruh Rakjat, tanpa melihat perbedaan agama, aliran politik dan kedudukan sosial.

Bagaimana situasi dalamnegeri Indonesia sekarang?

Dalam Sidang Pleno ke-IV CC telah dikonstatasi adanja 3 kekuatan pokok didalam masjarakat Indonesia, jaitu kekuatan kaum kepalabatu, kekuatan kaum progresif dan kekuatan kaum tengah. Djuga dikonstatasi adanja pertentangan jang tadjam antara 3 kekuatan ini. Garis politik Partai dalam menghadapi 3 kekuatan ini jalah: *dengan sekuat tenaga dan dengan tidak djemu²nja mengembangkan kekuatan progresif, bersatu dengan kekuatan tengah dan mementjilkan kekuatan kepalabatu.* Garis ini dengan setia dipegang oleh Partai dalam memimpin perkembangan keadaan dalamnegeri sedjak Sidang Pleno ke-IV CC sampai sekarang. Kebenaran konstatasi dan garis ini sudah diudji didalam praktek revolusioner Rakjat.

Situasi politik dalamnegeri selama periode jang ditindjau ini ditandai oleh kenjataan² jang menundjukkan perkembangan demokrasi dan gerakan revolusioner Rakjat, makin bersatunja kekuatan progresif dengan kekuatan tengah dan makin terpentjilnja kekuatan kepalabatu.

Parlemen pilihan Rakjat telah menundjukkan kemampuan jang

djauh lebih besar daripada Parlemen Sementara atau Parlemen angkatan berdasarkan persetudjuan KMB bikinan Hatta dan Belanda. Ini a.l. dibuktikan oleh kenjataan sudah disahkannja dalam bulan Djuli 1956 *Undang² Pembentukan DPRD Peralihan dan DPD Peralihan,* jang kemudian disusul dengan pensahan *Undang² Pemilihan DPRD* dalam bulan September 1956, pensahan *Undang² Pokok Tentang Pemerintah Daerah* dalam bulan Desember 1956, pensahan *Undang² Perimbangan Keuangan* dalam bulan Desember 1956 dan pensahan *Undang² Tentang Penjelesaian Perselisihan Perburuhan* dalam bulan Maret 1957 sebagai pengganti Undang² Tedjasukmana jang sangat reaksioner. Berdasarkan Undang² jang pertama maka dilikwidasilah pemerintahan tunggal atau pemerintahan jang samasekali tidak demokratis di-daerah² dan dibentuklah DPRD² Peralihan dengan DPD²nja jang agak demokratis. Kekuasaan monopoli Masjumi dibanjak daerah dihapuskan.

Terbentuknja *DPRD² Peralihan* adalah peristiwa politik jang sangat penting dalam perdjuangan Partai untuk mengembangkan dan mengkonsolidasi demokrasi. Dewan² Perwakilan tersebut telah mengachiri pemerintah tunggal atau pemerintah jang samasekali tidak demokratis di-daerah². Dari kedudukan jang hanja menerima perintah² dan samasekali tidak berhak ikut tjampur dalam soal² pemerintahan, dengan melewati wakil-wakilnja, terutama melewati orang² Komunis, Rakjat mendapat kesempatan untuk ikut menentukan dalam soal² pemerintahan di-daerah².

Pemilihan DPRD² merupakan dorongan jang penting bagi kader² Partai untuk mengenal lebih baik keadaan Provinsinja, Pulaunja, Kabupaten atau Kotanja, sebagai sjarat untuk dapat membikin Manifes Pemilihan jang objektif, realistis dan sesuai dengan perasaan serta fikiran massa Rakjat. Mengenal keadaan daerah masing² adalah penting untuk memperbaiki pekerdjaan Partai di-daerah² jang bersangkutan.

DPRD² Peralihan merupakan alat jang penting untuk mengeratkan kerdjasama antara PKI dengan partai² serta golongan² lain melewati hubungan² pribadi para pemimpin setempat dan melalui aksi² bersama mengenai hal² jang disetudjui bersama didalam dan diluar dewan. Adanja dewan² tersebut membukakan kesempatan bagi Partai untuk membuktikan kepada Rakjat bahwa bagi PKI

Digitized by Arsip Nasional

program dan perbuatan adalah satu, untuk mengkombinasikan pekerdjaan dikalangan massa dengan pekerdjaan di-dewan², untuk mengkonfrontasikan partai² dengan para pemilih. Djika wakil² Partai bekerdja baik di Dewan², kepertjajaan Rakjat kepada Partai akan mendjadi lebih besar, kedok kaum jang ragu membela kepentingan Rakjat akan terbuka dan kaum kepalabatu akan lebih terpentjil.

Dengan terbentuknja DPRD² Peralihan dan DPD² Peralihan tersedialah bagi Rakjat sendjata baru jang dapat digunakan untuk memperkuat persatuannja dan untuk memperdjuangkan kepentingannja se-hari². Oleh pengalaman²nja sendiri Rakjat dididik mengenal siapa wakil²nja jang sedjati dan siapa wakil² jang palsu, siapa pemimpin jang sedjati dan siapa pemimpin jang palsu, siapa pembelanja jang berani dan siapa pembelanja jang ragu², mana partai pembela Rakjat dan mana partai jang anti-Rakjat. Pengalaman² dengan DPRD² Peralihan dan DPD² Peralihan selama ini membuktikan bahwa kaum Komunis adalah pembela jang setia dan sungguh² dari kepentingan Rakjat di-daerah². Sebaliknja, kaum separatis, termasuk pemimpin² Masjumi dan PSI, jang ber-teriak² „membela kepentingan daerah" adalah mentjiderai kepentingan Rakjat di-daerah².

Pembentukan DPD² Peralihan jang berdasarkan perwakilan berimbang telah mendobrak politik isolasi kaum reaksioner jang dipelopori oleh Masjumi terhadap PKI didalam pemerintahan² daerah. Terbentuknja pemerintahan² sematjam ini telah memperkuat kejakinan Rakjat tentang mungkinnja Kabinet Gotongrojong sebagai jang diinginkan oleh Konsepsi Presiden Sukarno. Semuanja ini membikin Rakjat lebih antusias dalam menghadapi pemilihan DPRD² jad.

Terbentuknja badan² legislatif dan eksekutif peralihan, disahkannja Undang² Pokok Tentang Daerah Otonomi dan akan dilangsungkannja pemilihan DPRD² jang baru (di Djakarta sudah berlangsung) telah menimbulkan kegiatan politik dikalangan massa jang luas dan telah meningkatkan kesedaran politik Rakjat. Hal ini sangat dikuatirkan oleh kaum reaksioner, dan oleh karena itulah mereka berusaha keras untuk memperlambat terbentuknja DPRD², untuk membekukan jang sudah ada atau untuk tidak

membentuknja samasekali dengan djalan mengadakan kudeta² militer seperti jang sudah terdjadi di Sumatera dan Sulawesi.

Dilantiknja Konstituante pada tanggal 10 November tahun jl. serta dipilihnja pimpinan Dewan ini jang boleh dikatakan mentjerminkan imbangan kekuatan dalam Konstituante telah menimbulkan kepertjajaan jang lebih besar dari Rakjat kepada demokrasi. Perdjuangan jang sengit sedang dihadapi oleh Rakjat Indonesia untuk tersusunnja sebuah Konstitusi jang demokratis, jang mendjamin hak² Rakjat dan dapat lebih memperkuat persatuan Rakjat. Dalam menghadapi sidang² Konstituante jad. adalah sangat penting kegiatan Partai untuk menimbulkan antusiasme massa Rakjat dalam menuntut tersusunnja sebuah Konstitusi jang isi dan djiwanja sesuai dengan tudjuan Rakjat Indonesia mentjetuskan Revolusi 1945, jaitu Konstitusi negara Republik Indonesia jang bersatu, jang merdeka penuh dan jang demokratis.

Kemadjuan gerakan revolusioner Rakjat djuga dibuktikan oleh naiknja gelombang semangat anti-kolonialisme dikalangan pemuda dan peladjar serta massa Rakjat lainnja dalam bentuk demonstrasi² anti-subversif asing, dalam bentuk menjokong perdjuangan Rakjat Aldjazair dan melawan perang kolonial Perantjis, dalam bentuk demonstrasi² dan pemogokan² menjokong Mesir dan melawan Inggeris-Perantjis-Israel.

Kuatir akan meluasnja kemadjuan demokratis dan terus naiknja semangat anti-kolonialisme dan semangat patriotisme Rakjat, maka kaum reaksioner jang dipelopori oleh Hatta, pemimpin² Masjumi klik Natsir dan pemimpin² PSI berusaha untuk membendung semua kemadjuan ini.

Karena mereka tahu bahwa Parlemen pilihan Rakjat sudah dan akan menghasilkan hal² jang dapat mendorong perkembangan demokrasi dan kemadjuan gerakan revolusioner, maka kaum reaksioner berusaha untuk mengetjilkan arti dan mendjatuhkan prestise Parlemen sekarang, sedangkan bersamaan dengan itu mereka memudji² Parlemen Sementara jang sudah tidak ada lagi jang dulu dibentuk berdasarkan persetudjuan KMB dimana duduk kakitangan Belanda lewat „dewan² perwakilan" negara² bagian bikinan Belanda.

Karena tidak adanja penghargaan pada Parlemen sekarang,

Dimpos Manalu

artinja tidak adanja penghargaan pada 40 djuta Rakjat pemilih dan pada alat² negara jang menjelenggarakan pemilihan, sampai² Hatta berani mengatakan bahwa Parlemen sekarang lebih djelek daripada Parlemen Sementara, bahwa ia ingin berkuasa asal Parlemen sekarang tidak berhak mendjatuhkannja, artinja Parlemen sekarang dibekukan. Untuk membekukan Parlemen kaum reaksioner mengusahakan terbentuknja Kabinet Presidentiil. Semuanja ini membuktikan bahwa kaum reaksioner dalamnegeri sudah tidak pertjaja lagi pada sistim demokrasi parlementer, sistim jang pernah mereka ikut perdjuangkan. Kejakinan politik mereka sudah berpindah dari demokrasi parlementer kefasisme. Usaha² kaum reaksioner ini sudah tentu ditentang oleh segenap kekuatan demokratis, oleh persekutuan kekuatan progresif dengan kekuatan tengah.

Untuk membendung perkembangan demokrasi, kaum reaksioner dengan segala matjam djalan berusaha memetjahbelah persatuan Rakjat, antara lain dengan djalan mengadudomba suku dengan suku, pasukan tentara jang satu dengan pasukan tentara jang lain, Partai Komunis dan Partai Nasionalis dengan partai² agama, antara pusat dengan daerah, pendeknja antara apa sadja jang bisa mereka adu untuk memetjah kekuatan nasional supaja dapat mendudukkan kekuasaan reaksioner mereka. Bagi mereka tidak ada kerdjasama atau gotongrojong antara sesama bangsa buat mengalahkan kolonialisme sampai ke-akar²nja. Bagi mereka jang ada jalah kerdjasama dan gotongrojong antara mereka dengan kaum kolonialis dan imperialis untuk memetjahbelah dan menguasai Rakjat Indonesia guna kepentingan politik reaksioner mereka.

Sesuai dengan keinginan kaum imperialis luarnegeri, kaum reaksioner didalamnegeri bekerdjasama dengan kekuatan² subversif asing serta menggunakan orang² militer jang dibawah kontrol mereka untuk membendung arus demokrasi dan gerakan revolusioner Rakjat. Kombinasi kekuatan subversif asing dengan kegiatan kaum reaksioner dalamnegeri dan orang² militer dibawah kontrol mereka antara lain telah mentjetuskan „Peristiwa 13 Agustus 1956", telah menimbulkan pertjobaan kudeta Lubis tanggal 16 November 1956, telah menimbulkan perebutan kekuasaan oleh „Dewan Banteng" dibawah pimpinan Letkol Ahmad Husein di Sumatera Barat, telah menimbulkan perebutan kekuasaan oleh komplotan Simbolon di

Sumatera Utara, telah membentuk apa jang mereka namakan „Dewan Garuda" di Sumatera Selatan, telah mentjetuskan peristiwa 2 Maret 1957 di Sulawesi Selatan dan telah memproklamasikan Provinsi Sulawesi Utara tanpa keputusan Pemerintah Pusat (7). Untuk membenarkan perbuatan² chianat ini kaum reaksioner memobilisasi segala matjam alasan, termasuk alasan² keagamaan dan adat, disamping alasan² politik reaksioner mereka.

Dengan tindakan² destruktif dari kaum reaksioner, baik jang berbadju sosialis, Islam maupun trotskis, maka kekatjauan dalamnegeri makin men-djadi². Dengan demikian maka tidaklah mungkin ada ketenteraman untuk memperbaiki ekonomi negeri dan untuk menjehatkan aparat² negara. Dengan demikian kuranglah kesempatan untuk membangun dan mendidik angkatan² bersendjata Republik, sebagai sjarat² jang tidak boleh tidak untuk mengkonsolidasi kekuatan nasional agar lebih mampu menghadapi kemungkinan² serangan bersendjata dari fihak negara² imperialis dan menghadapi aksi² subversif asing serta gerombolan² bersendjata DI-TII. Pelaksanaan pembatalan persetudjuan KMB, penjusunan dan pelaksanaan Plan V Tahun Pemerintah jang sedikit atau banjak dapat menguntungkan kepentingan nasional, pembasmian korupsi tanpa pandang bulu, penjehatan djawatan² pemerintah, pentjegahan pemborosan keuangan negara dan usaha² konstruktif lainnja mendjadi terbengkalai karena perebutan² kekuasaan lokal jang membahajakan kedudukan Republik Indonesia seperti jang terdjadi di Sumatera dan Sulawesi. PKI ber-sama² dengan partai² demokratis lainnja menentang dengan keras perbuatan² kaum pemberontak separatis. Sikap tegas PKI ini mendapat simpati jang luas dari massa Rakjat pekerdja dan dari semua pentjinta Republik.

Sudah sedjak semula berdirinja kabinet Ali Sastroamidjojo, dimana didalamnja duduk menteri² reaksioner, PKI sudah mentjanangkan bahwa duduknja menteri² reaksioner didalam kabinet ini bukannja untuk dengan sungguh² melaksanakan program pemerintah jang sudah disetudjui dengan suara bulat oleh Parlemen, tetapi sebaliknja, untuk mengadakan sabotase² terhadap pelaksanaan program pemerintah dari dalam Kabinet. Kenjataan² membuktikan benarnja apa jang ditjanangkan oleh PKI. Dengan adanja menteri² reaksioner mereka mengkombinasi kegiatan reaksioner mereka

Dimpos Manalu

jang ada didalam dan diluar kabinet, termasuk kegiatan² separatis dan kegiatan² gerombolan² DI-TII. Seorang menteri keuangan jang reaksioner, misalnja, telah mendjalankan politik kontjo-sistim untuk menguras keuangan negara dengan mem-bagi²kannja dalam bentuk kredit² kepada anggota² partai² tertentu, kepada famili² atau kenalan² baiknja. Apakah bedanja politik menteri ini dengan politik „warlords" (radja² perang) jang ada di-daerah² dan jang menuntut djumlah uang jang besar dari pemerintah pusat, padahal mereka tidak tunduk pada pemerintah pusat? Ke-dua²nja sama berbuat menguras keuangan negara untuk membikin Republik Indonesia mendjadi negara jang bangkrut dan tidak berdaja samasekali. Djika sudah bangkrut dan tidak berdaja, maka menurut fikiran mereka, mudahlah menggiring Republik Indonesia kedalam kandang jang sudah disediakan oleh Amerika Serikat dengan alasan, bahwa politik menggabung keblok AS „terpaksa" dilakukan, karena untuk melandjutkan umur Republik, kita harus memindjam uang, dan kalau perlu djuga memindjam kewibawaan dari Amerika Serikat. Bagi kaum reaksioner berlaku sembojan „Lebih baik Republik hantjur-lebur daripada menjerah kepada demokrasi dan kehendak Rakjat".

Tindakan menguras keuangan negara mereka kombinasikan dengan merusak sumber² keuangan negara dengan kegiatan² gerombolan² bersendjata mereka, dengan mengorganisasi penjelundupan², dengan membiarkan birokrasi dan korupsi meradjalela didalam perusahaan² negara, dengan mejajasankan, meng-NV-kan dan achirnja mempartikelirkan 100% perusahaan² negara jang kiranja bisa memberi keuntungan jang lumajan, demi keuntungan beberapa gelintir orang jang mereka tempatkan dalam direksi perusahaan² tersebut. Jang sudah masuk dalam rentjana sementara pendjabat beberapa kementerian antara lain jalah soal mengubah status DKA, PTT, Radio, Pelabuhan, Pelajaran, Perusahaan Soda dan Garam, dan DAMRI. Pelaksanaan daripada rentjana² ini bertentangan dengan usaha mengubah imbangan kekuatan antara ekonomi nasional dengan ekonomi kolonial. Penggerowotan kekuatan ekonomi Republik Indonesia akan sangat memperlemah kedudukan Republik Indonesia, oleh karena itu harus mendapat tentangan jang kuat dari tiap² patriot.

Untuk mentjegah kehantjuran daripada Republik Indonesia adalah sangat penting tindakan Presiden Sukarno mengumumkan Konsepsinja pada tanggal 21 Februari 1957. Demonstrasi², rapat² raksasa, dan aksi² lain untuk mendukung Konsepsi Presiden Sukarno jang terdjadi dibanjak tempat diseluruh negeri, termasuk di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan jang dikuasai oleh kaum pemberontak separatis, adalah manifestasi dari hasrat persatuan jang patriotik dan anti-kolonialisme jang hebat, jang dalam sedjarah perdjuangan kemerdekaan Rakjat Indonesia hanja dapat dibandingkan dengan aksi² Rakjat pada bulan² pertama mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945. Beda jang penting jalah, bahwa pada waktu aksi² mendukung Konsepsi Presiden Sukarno massa Rakjat sudah dalam keadaan lebih sedar, lebih terorganisasi dan lebih terpimpin, djika dibanding dengan ketika bulan² pertama mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Aksi² mendukung Konsepsi Presiden Sukarno merupakan gelombang naik dari semangat anti-kolonialisme massa Rakjat jang luas.

Diumumkannja Konsepsi Presiden Sukarno jang menghendaki terbentuknja kabinet Gotongrojong atau kabinet jang berdasarkan perwakilan berimbang dan terbentuknja Dewan Nasional, serta disambutnja Konsepsi ini setjara besar²an dan antusias oleh massa Rakjat beserta alat² negara, termasuk Angkatan Perang dan Kepolisian, merupakan kemenangan besar bagi kekuatan progresif dan front persatuan. Kekuatan jang ditimbulkan oleh pengumuman Konsepsi ini telah sangat membantu dalam mentjegah pergeseran keadaan kekanan ketika krisis kabinet Ali-Idham, telah sangat membantu dalam memusatkan kekuasaan ditangan Presiden (pernjataan KDP) dan dalam membentuk kabinet Djuanda (8), semuanja adalah tindakan jang sangat penting untuk mengatasi kekatjauan² didalamnegeri jang ditimbulkan oleh gerakan separatis dan subversif asing, untuk membasmi korupsi tanpa pandang bulu, untuk menghantjurkan gerombolan DI-TII dan gerombolan² teroris lainnja.

Pengumuman Konsepsi Presiden Sukarno telah lebih mendekatkan kekuatan tengah kepada kekuatan progresif dan telah lebih mementjilkan kekuatan kepalabatu. DPP PNI menjatakan menjokong Konsepsi ini, artinja resmi menjetudjui masuknja Komunis

Dimpos Manalu

didalam kabinet, sedangkan hampir disemua daerah ada kerdjasama antara PKI dan PNI dalam mendukung Konsepsi Presiden Sukarno. Tokoh2 NU, PSII dan Perti banjak jang menjetudjui Konsepsi ini, ada jang menjetudjui sepenuhnja dan ada pula jang menjetudjui hanja sebagian. Didalam partai2 kepalabatu timbul pertentangan antara jang pro dan jang anti-Konsepsi.

Pada tanggal 9 April jl. dilantik oleh Presiden Sukarno kabinet Djuanda, sebagai pengganti kabinet Ali-Idham jang djatuh tidak oleh karena mosi tidak pertjaja di Parlemen, tetapi oleh rongrongan kaum pemberontak separatis dan oleh intrik2 sementara tokoh2 reaksioner didalam partai2 pemerintah. Kabinet Djuanda dibentuk oleh Presiden sendiri dan programnja : 1) Membentuk Dewan Nasional, 2) Normalisasi keadaan Republik, 3) Melandjutkan pelaksanaan pembatalan KMB, 4) Perdjuangan Irian Barat, dan 5) Mempergiat pembangunan.

Kabinet Djuanda bukanlah kabinet „Gotongrojong" atau kabinet jang berdasarkan perwakilan berimbang seperti jang diinginkan oleh Konsepsi Presiden Sukarno. Kegagalan membentuk kabinet „Gotongrojong" disebabkan oleh karena sikap kepalabatu dari partai Masjumi dan sikap jang bimbang dari partai NU. Walaupun kabinet ini bukan kabinet „Gotongrojong", tetapi tudjuan kaum reaksioner untuk membentuk kabinet kanan dengan Hatta sebagai Perdana Menteri mengalami kegagalan total. Lebih daripada itu, karena sikap kepalabatunja Masjumi mendjadi terisolasi samasekali dari kabinet.

Sikap Partai terhadap kabinet Djuanda jalah: *menjokong tanpa reserve tindakan2 kabinet jang menguntungkan Rakjat, mengkritik tindakan2nja jang ragu2 dan menentang tindakan2nja jang merugikan Rakjat.* Titikberatnja jalah menjokong kabinet ini dan djika ada tindakan2 jang terlandjur bertentangan dengan kepentingan Rakjat supaja ditjari penjelesaian setjara berunding agar ber-sama2 mentjari djalan keluar supaja Rakjat tidak dirugikan dan pemerintah bisa berdjalan terus dengan dukungan Rakjat.

Dibawah kabinet Djuanda, dengan bantuan jang giat dari pimpinan Angkatan Perang, sedjumlah koruptor2 besar sudah ditahan dan diperiksa. Berbagai komplotan jang mau merobohkan Republik sudah digulung. Keamanan ber-angsur2 mendjadi lebih baik dengan menjerahnja berbagai gerombolan bersendjata di Djawa Barat, Sumatera Timur, Kalimantan dll.

Beberapa soal mengenai pemberontakan militer di-daerah2 sudah mulai diselesaikan, terutama soal2 militer di Indonesia bagian Timur. Penjelesaian ini, walaupun masih ada kesukaran2 jang perlu diatasi, adalah sangat penting artinja bagi penjelesaian keseluruhannja. Tindakan penjelesaian ini adalah sangat menggembirakan Rakjat. Demikian pula tindakan pemerintah Djuanda jang ber-sama2 dengan Presiden Sukarno sudah menjusun anggota2 Dewan Nasional.

Selama dibawah pemerintah Djuanda ada tanda2 jang menundjukkan bahwa situasi politik dan militer akan mendjadi lebih baik. Kekuatan demokratis dan kekuatan revolusioner pada umumnja berkembang, ketjuali dibeberapa tempat mengalami tekanan2 karena adanja pensalahgunaan pernjataan KDP, terutama di-daerah2 jang dikuasai oleh kaum pemberontak separatis.

Situasi terachir di-daerah2 jang dikuasai oleh kaum pemberontak separatis menundjukkan bahwa djuga disana sedang berkembang kekuatan demokratis dan kekuatan revolusioner Rakjat. Kekuatan kepalabatu memang masih besar, tetapi kekuatan progresif dan kekuatan tengah serta persatuan antara dua kekuatan ini makin tumbuh.

Walaupun orang seperti Hatta mengadakan pembelaan terhadap „Dewan Banteng" dan „dewan2 partikelir" lainnja, seolah-olah „dewan2" itu berhasil dengan apa jang mereka namakan *„pembangunan daerah"*, tetapi kenjataan menundjukkan bahwa Rakjat tidak bisa diabui. Kekosongan demagogi tentang *„pembangunan daerah"* dan *„otonomi daerah jang luas"* makin hari makin dirasakan oleh Rakjat. Oleh karena itu mereka gagal samasekali dalam menarik massa kaum buruh dan kaum tani. Pemogokan umum politik kaum buruh di Sumatera Selatan pada tanggal 18 Maret jl. membuktikan kematangan politik kaum buruh dalam menghadapi kaum pemberontak separatis. Para pegawai negeri di-daerah2 jang dikuasai oleh kaum pemberontak separatis makin berani menjatakan sikapnja jang tidak setudju dengan kaum pemberontak. Makin lama makin bertambah djelas, bahwa gerakan2 „dewan2 partikelir" adalah gerakan jang tidak berakar, jang mula2-nja banjak orang jang meragukannja berhubung mereka untuk se-

Dimpos Manalu

mentara dapat mengexploitasi setjara maximal ketidakpuasan Rakjat terhadap keadaan ekonomi negeri jang buruk.

Dengan banjaknja djandji² jang tidak ditepati dan tidak mungkin ditepati oleh „Dewan Banteng" dan „Dewan Garuda" membikin Rakjat mendjadi kritis terhadap demagogi mereka. Perpetjahan didalam „dewan² partikelir" makin men-djadi², djuga perpetjahan didalam partai² dan organisasi² jang mendukung „dewan²" tersebut. Dari dalam „dewan²" tersebut dan dari partai² dan organisasi² pendukungnja timbul sajap kiri jang berorientasi kepada pemerintah pusat. Kekuatan tengah, terutama pemuda²nja, makin berani dan makin mudah diadjak bersatu dengan kekuatan progresif.

Dari kenjataan² diatas mendjadi djelas, bahwa situasi politik dalamnegeri selama sepuluh bulan belakangan ini ditandai oleh perkembangan demokrasi dan gerakan revolusioner Rakjat, oleh makin berkembangnja kekuatan progresif, makin bersatunja kekuatan tengah dengan kekuatan progresif dan makin terpentjilnja kekuatan kepalabatu.

Pemberontakan² kaum separatis di-daerah² adalah merupakan reaksi terhadap kemadjuan demokrasi dan perkembangan gerakan revolusioner Rakjat. Sikap PKI jang tegas melawan kaum pemberontak separatis ini telah sangat menaikkan prestise PKI dimata Rakjat. Ini antara lain dibuktikan oleh kemenangan gemilang jang ditjapai oleh PKI dalam pemilihan DPRD Djakarta Raja baru² ini. Partai² jang membela kaum pemberontak separatis, atau jang tidak tegas melawan kaum pengchianat ini mengalami kemerosotan jang tidak sedikit.

Dari kenjataan² bahwa gerakan separatis dan subversif asing jang sudah berupa pemberontakan belum dapat ditindas seluruhnja, terutama jang di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Tapanuli dan Sulawesi Utara harus ditarik kesimpulan bahwa kekuatan kaum imperialis asing jang bersatu dengan kekuatan reaksioner didalamnegeri samasekali tidak boleh diremehkan. Mengingat kenjataan² ini Partai harus terus-menerus meningkatkan kewaspadaan politik dan organisasinja, meningkatkan keberanian, keteguhan dan militansi anggota²nja.

Sebagaimana sudah terbukti dari politik PKI terhadap pemberontakan² di-daerah², PKI menjetudjui untuk dimana mungkin diadakan penjelesaian setjara berunding, mengingat bahwa diantara jang memberontak ada djuga orang² jang hanja ikut²an karena naifnja atau karena melihat ada keuntungan materiil bagi pribadinja, tanpa ada maksud² jang sedar untuk menghantjurkan Republik. Tetapi, karena jang duduk dalam pimpinan pemberontakan, terutama jang berdiri dibelakang kegiatan ini, terang bertudjuan untuk menegakkan kekuasaan politik jang bertentangan dengan azas² Republik Proklamasi 1945, maka sudah seharusnja Partai kita dan seluruh Rakjat jang patriotik menuntut supaja pemerintah Djuanda, dan pemerintah mana sadja jang ingin dapat sokongan Rakjat, *tahu batas* dalam menempuh djalan berunding. Sikap tidak tahu batas menundjukkan kelemahan, dan sikap ini akan membikin kekatjauan ber-larut² sehingga achirnja bertambah berat untuk diatasi.

Dapatnja pemberontakan Kolonel Simbolon di Sumatera Utara digagalkan dalam waktu jang singkat, dan dapatnja kekuatan Angkatan Perang menggagalkan pertjobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno dan K.J. Worosjilov di Radjamandala, adalah bukti dari kemampuan kekuatan patriotik dalam Angkatan Perang (9). Tindakan jang diambil oleh pemerintah Djuanda dengan bantuan jang sangat besar dari pimpinan Angkatan Perang mengenai persoalan militer di Indonesia bagian Timur, tidak hanja menundjukkan bahwa pemerintah tahu batas, tetapi djuga membuktikan bahwa keadaan dapat diatasi. Perkembangan situasi jang makin baik, termasuk situasi di-daerah² jang dikuasai oleh kaum pemberontak separatis, menebalkan kejakinan bahwa keadaan dapat diatasi, asal fihak pemerintah tahu batas dalam menempuh djalan berunding.

Dalam rangka mengatasi kesukaran² didalamnegeri, disamping soal² militer, soal² keuangan dan ekonomi meminta perhatian chusus dari siapa sadja jang berkemauan baik terhadap Republik, dan terutama sekali dari fihak pemerintah. Dalam hubungan dengan ini kita tidak menuntut jang ber-lebih²an dari pemerintah. Kita hanja menuntut supaja pemerintah dengan sungguh² melaksanakan salahsatu dari programnja, jaitu melandjutnja pelaksanaan pembatalan KMB. Kita menuntut kepada pemerintah supaja mengambil tindakan² jang menguntungkan Rakjat Indonesia terhadap kaum

Dipindai Manalu

kapitalis besar Belanda dalam rangka pelaksanaan pembatalan KMB.

Sekarang mendjadi djelas, bahwa sukses pemerintah Djuanda terutama bergantung pada dua hal, pertama pelaksanaan program *„normalisasi keadaan Republik"* jang titikberatnja ada pada persoalan militer, dan kedua pelaksanaan program *„melandjutkan pelaksanaan pembatalan KMB"* jang titikberatnja terletak pada persoalan keuangan dan ekonomi. Djika pemerintah Djuanda mendapat sukses dalam dua hal ini, maka boleh dikatakan pasti bahwa pemerintah Djuanda djuga akan mendapat sukses dalam melaksanakan bagian² lain dari programnja.

Sesuai dengan sikap Partai kita jang pada pokoknja menjokong kabinet Djuanda, adalah kewadjiban seluruh anggota PKI untuk membantu dengan sekuat tenaga pelaksanaan program pemerintah.

Terutama dalam soal mengatasi kesukaran² dilapangan keuangan dan ekonomi Partai kita harus lebih banjak mengambil bagian, kita harus tampil dengan usul² jang kongkrit dan realis dan harus terus menuntut supaja pemerintah mempunjai keberanian bertindak terhadap kapitalis² besar Belanda. Dalam menghadapi keadaan keuangan dan devizen negara jang serba sukar sekarang ada baiknja djika kabinet Djuanda ingat kembali pengalaman politik impor-expor jang sampai batas² tertentu berhasil memperbaiki keuangan dan devizen negara seperti jang didjalankan oleh kabinet Ali Sastroamidjojo jang pertama. Politik ini pada pokoknja didasarkan pada prinsip mengontrol dan mengatur impor-expor kita dengan melalui sistim perdjandjian² perdagangan bilateral dengan negara² lain, termasuk negara² kubu sosialis, disamping politik mengadakan hubungan dagang jang langsung tanpa melalui pusat² transito Singapura dan Nederland. Dengan pelaksanaan dan kontrol jang lebih baik, politik impor-expor ini akan dapat membantu kabinet Djuanda dalam mengatasi kesukaran keuangan dan devizen sekarang ini. Djika sistim ini didjalankan, jang harus ditjegah oleh kabinet Djuanda jalah praktek² lisensi istimewa jang memang sangat merugikan dan merusak. Karena menguntungkan kepentingan nasional, sistim impor-expor ini dihapuskan oleh kabinet Burhanuddin Harahap (BH) dan diganti dengan sistim jang liberal, jang bertentangan dengan kepentingan Rakjat Indonesia.

II

Konsepsi Presiden Sukarno

Sidang Politbiro jang diperluas pada tanggal 20 Februari 1957 menjatakan *„persetudjuan pada Konsepsi Bung Karno dan menjerukan kepada seluruh Rakjat Indonesia supaja dengan sepenuh hati menjokong konsepsi ini dan bekerdja keras untuk pelaksanaannja. Konsepsi Bung Karno adalah adil, demokratis, mendjamin persatuan dan melawan perpetjahan"*. Konsepsi Presiden Sukarno adalah konsepsi untuk mempersatukan semua kekuatan jang dapat dipersatukan guna penjelesaian revolusi nasional.

Sebagaimana diterangkan setjara resmi oleh Presiden Sukarno di Istana Negara pada tanggal 21 Februari 1957, Konsepsinja mengandung 2 isi pokok, jang pertama mengenai Kabinet dan jang kedua mengenai Dewan Nasional. Mengenai kabinet dikatakan supaja dibentuk kabinet Gotongrojong dimana *„didalamnja duduk semua partai² atau fraksi² didalam Parlemen jang tjukup mempunjai kiesquotient"*. Dari sini djelaslah bahwa Konsepsi Presiden Sukarno menghendaki terbentuknja kabinet berdasarkan perwakilan berimbang.

Konsepsi Presiden Sukarno adil, realis dan mendjamin persatuan, karena Konsepsi ini tidak a priori menolak salahsatu golongan untuk duduk dalam kabinet. Tentang perlunja PKI duduk dalam Pemerintah Pusat dikatakan oleh Presiden Sukarno dalam Konsepsinja, bahwa *„tidak dapat terus-menerus mengabaikan satu golongan jang didalam pemilihan umum mempunjai suara enam djuta manusia"* dan adalah satu kenjataan *„bahwa PKI mempunjai banjak pengikut dikalangan kaum buruh"* jang sangat penting untuk pembangunan.

Dalam rangkaian usaha menggagalkan Konsepsi Presiden Sukarno kaum reaksioner jang dikepalai oleh Hatta dan Natsir memfitnah se-olah² konsepsi ini bertentangan dengan demokrasi. Se-olah² merekalah „demokrat² sedjati". Padahal Rakjat Indonesia sudah kenal betapa „demokratisnja" mereka. Rakjat Indonesia sudah mempunjai pengalaman sendiri, bahwa Hatta dan Natsir adalah tukang meng-indjak² demokrasi. Djika konsepsi ini benar² bertentangan

Dimpos Manalu

dengan demokrasi, maka PKI dan Rakjat pekerdjalah jang pertama² dan jang paling berhak untuk menentangnja, karena golongan ini jang paling membutuhkan demokrasi. Tetapi kenjataannja, kaum buruh dan Rakjat pekerdja lainnja adalah pendukung utama dari konsepsi. Sebabnja jalah, karena Konsepsi Presiden Sukarno tidak menghapuskan demokrasi, tidak mengganggu-gugat sistim Parlementer dan sistim kepartaian. Sebaliknja Konsepsi ini menginginkan demokrasi jang lebih sehat.

Bertentangan dengan Hatta jang mau membekukan Parlemen pilihan Rakjat, Presiden Sukarno mengatakan bahwa *„Parlemen tetap berdjalan terus dan Parlemen sekarang ini memang adalah hasil daripada pemilihan umum jang telah didjalankan oleh segenap Rakjat Indonesia. Tetapi jang hendak kita susun djanganlah kabinet stijl tua sebagai jang kita alami sebelas tahun lamanja, tetapi satu kabinet stijl baru. Kabinet stijl baru jang menteri²nja terdiri daripada orang² daripada partai², semua partai² atau semua fraksi² didalam Parlemen jang mentjapai kiesquotient" (dikutip dari Konsepsi)*. Inilah jang dinamakan oleh Presiden Sukarno *„demokrasi gotongrojong"* atau *„demokrasi terpimpin"* dan jang menurut Presiden Sukarno sendiri sesuai dengan inti djiwa ikrar pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Tentang Dewan Nasional diusulkan oleh Presiden Sukarno supaja *komposisinja* terdiri dari wakil kaum buruh, karena kaum buruh, menurut Presiden Sukarno dalam Konsepsinja, adalah *„satu golongan fungsionil jang hebat"*, dari wakil kaum tani, oleh karena kaum tani adalah *„satu golongan fungsionil jang hebat pula"*, dari golongan inteligensia, golongan pengusaha nasional, golongan Protestan dan Katolik, golongan Islam, golongan pemuda, golongan Angkatan '45, orang jang dapat mengemukakan persoalan² daerah. Disamping itu diusulkan supaja duduk didalam Dewan Nasional: KSAD, KSAL, KSAU, Kepala Kepolisian Negara, Djaksa Agung dan beberapa menteri jang penting. Kemudian dinjatakan lagi oleh Presiden Sukarno, bahwa djuga wakil seniman dan minoritet warganegara keturunan asing akan diminta duduk dalam Dewan Nasional. Presiden Sukarno mengusulkan supaja Dewan Nasional dipimpinnja sendiri. Kewadjiban Dewan Nasional ialah *„memberi nasehat kepada kabinet, nasehat jang diminta atau nasehat jang tidak diminta"*.

Apa sebabnja kita menjetudjui Konsepsi Presiden Sukarno, artinja menjetudjui kabinet Gotongrojong dan Dewan Nasional?

Dalam hubungan dengan kabinet Gotongrojong, Partai kita sudah lama menuntut supaja dibentuk Pemerintah Persatuan Nasional atau Pemerintah Koalisi Nasional sebagai sjarat untuk mempersatukan seluruh kekuatan nasional dan agar dapat memobilisasinja setjara maximal. Dalam Sidang Pleno ke-IV CC bulan Djuli 1956 dengan djelas kita rumuskan salahsatu tuntutan politik kita sbb.: *„Kalahkan politik anti-persatuan dan politik diktatur anti-Komunis dari sebagian pemimpin Masjumi-PSI untuk pembentukan Pemerintah Koalisi Nasional dimana '4-Besar' (PKI, PNI, NU dan Masjumi) dan partai² lain ikut didalamnja"*. Tuntutan ini adalah tuntutan politik tingkat sekarang, tingkat mempertahankan kemerdekaan nasional dan meluaskan demokrasi. Ini adalah manifestasi dari perasaan, fikiran dan keinginan bagian sangat terbesar dari Rakjat Indonesia sekarang.

Dewan Nasional dapat kita setudjui, karena dengan adanja Dewan Nasional Presiden akan dapat mendengar setjara langsung perasaan, fikiran dan keinginan massa Rakjat serta membitjarakan semuanja ini setjara kolektif. Sebagai badan penasehat Dewan Nasional akan sangat membantu pekerdjaan pemerintah, terutama dalam mendjaga supaja garis pokok mengenai politik anti-kolonialisme, politik meluaskan demokrasi dan membela perdamaian dunia tidak mendjadi kabur karena tenggelam dalam detail pekerdjaan² exekutif. Dewan Nasional merupakan alat politik jang baru ditangan Rakjat dalam perdjuangan anti-kolonialisme, membela demokrasi dan perdamaian.

Konsepsi Presiden Sukarno telah menggugah semangat Rakjat setjara besar²an, setjara mendalam dan meluas. Ia djuga telah menarik garis pemisah antara kubu pro-persatuan anti-kolonialisme disatu fihak, dan kubu anti-persatuan dan pro-kolonialisme difihak lain. Konsepsi ini telah membikin sangat djelas siapa sahabat Rakjat dan siapa musuh Rakjat, siapa mementingkan kepentingan nasional dan siapa memusuhi kepentingan nasional, siapa demokrat dan siapa bukan-demokrat, siapa jang berdjuang untuk persatuan

Dimpos Manalu

dan siapa pemetjahbelah. Konsepsi ini telah memberikan didikan politik jang sangat besar kepada massa Rakjat. Walaupun belum dilaksanakan, diumumkannja sadja Konsepsi ini telah menimbulkan pergeseran² didalam imbangan kekuatan masjarakat. Sebagian besar kekuatan tengah setjara terang²an telah memihak kubu progresif dan didalam partai² kepalabatu telah timbul keretakan² jang lebih besar.

Konsepsi Presiden Sukarno adalah begitu masukakal, begitu adil dan begitu demokratis sehingga pernjataan „tidak setudju" dari pemimpin² kepalabatu bisa membikin mereka terisolasi samasekali dari massa mereka sendiri. Oleh karena itu mereka mentjoba merumuskan penolakannja dengan kalimat misalnja: „*Setudju Konsepsi Bung Karno, tetapi tanpa PKI*" atau „*Setudju Konsepsi Bung Karno tetapi Hatta harus Perdana Menteri*". Ke-dua² perumusan ini pada hakekatnja menolak Konsepsi. Menolak PKI dalam kabinet berarti menolak prinsip gotongrojong, jang djusteru mendjadi inti Konsepsi. Sjarat supaja Hatta mendjadi PM berarti menolak duduknja PKI didalam kabinet, karena Hatta dengan tegas dan dengan tidak tahu malu menolak PKI.

Hatta, pemimpin² Masjumi klik Natsir dan tokoh² sosialis kanan tegas mengusulkan supaja dibentuk kabinet Presidentiil jang sudah terang bertentangan dengan UUD Sementara dan bertentangan dengan Konsepsi Presiden jang menghendaki supaja kabinet mendasarkan diri pada Parlemen. Dengan usulnja ini setjara integral mereka mau menggagalkan Konsepsi Presiden, dan meletakkan dasar untuk suatu pemerintah jang tidak bersendikan Parlemen, jang tanpa kontrol samasekali dari Rakjat.

Ada orang bertanja: Apakah program kabinet Gotongrojong jang diusulkan oleh Presiden Sukarno? Tentang program kabinet memang tidak dibitjarakan dalam Konsepsi. Kita berpendapat sebaiknja Program kabinet tidak ditjantumkan, karena djika ditjantumkan sangat mungkin akan mengalihkan perhatian dari soal² pokok, jaitu soal kabinet Gotongrojong dan Dewan Nasional, ke-soal² program jang dapat dibitjarakan pada kesempatan lain. Tetapi djelas, bahwa seluruh Konsepsi Presiden Sukarno berdjiwakan persatuan nasional anti-kolonialisme, menghendaki „*agar Bangsa Indonesia ini hidup sebagai satu keluarga besar jang merdeka dan berdaulat, tidak sebagai keluarga jang terpetjahbelah*" *(dikutip dari Konsepsi)*. Jang sudah terang jalah, bahwa djika kabinet Gotongrojong terbentuk programnja tidak mungkin kurang dari kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2, kabinet jang disokong oleh PKI tetapi tanpa PKI duduk didalamnja. Dengan terbentuknja kabinet Djuanda, walaupun belum kabinet Gotongrojong, terbukti bahwa programnja tidak kurang dari kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2.

Konsepsi Presiden Sukarno jang berdjiwakan persatuan nasional revolusioner ini terang tidak mengandung unsur jang akan mengurangi kebebasan menjatakan pendapat didalam Parlemen, didalam kabinet, didalam Dewan Nasional dan dimana sadja. Lebih daripada itu, tentang perlunja ada perbedaan pendapat diakui oleh Konsepsi Presiden dengan mengatakan bahwa „*perlainan pendapat selalu ada, malahan perlainan pendapat itulah jang membawa kita kepada kemadjuan*" dan bahwa „*daripada pergosokan perlainan pendapat inilah timbul kebenaran*". *(dikutip dari Konsepsi)*.

Djadi, Konsepsi Presiden Sukarno samasekali tidak ada persamaannja, baik isi maupun bentuknja, dengan konsepsi pembela² „Dewan Gadjah", „Dewan Banteng", „Dewan Garuda" dan „dewan²" kontra-revolusioner jang sepenuhnja dibangun menurut resep fasis, jang dibikin karena kaum reaksioner sudah tidak pertjaja lagi bahwa dengan djalan demokratis tudjuan politik mereka akan dapat ditjapai. „Dewan²" kontra-revolusioner dibentuk sebagai landjutan gerakan separatis dan gerakan meluaskan daerah SEATO, sedangkan Konsepsi Presiden Sukarno adalah untuk memperkuat Republik Indonesia dan untuk melawan tiap² usaha asing jang ingin merusak kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.

Untuk menakut-nakuti dirinja dan golongannja pemimpin² kaum reaksi mem-bisik²kan bahwa Konsepsi Presiden Sukarno lahir „*berkat bisikan orang² negeri² Komunis*", negeri² jang belum berapa lama dikundjungi oleh Presiden Sukarno. Bagi mereka jang mungkin pertjaja pada bisikan ini perlu diingatkan, bahwa dalam pidato dimuka „*Badan Penjelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan*", kira² satu setengah bulan sebelum proklamasi 17 Agustus 1945, djadi terang lama sebelum Presiden Sukarno berkundjung ke-negeri² kubu sosialis, Bung Karno sudah berkata bahwa kita harus mendirikan negara „*Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik*

Dinpos Manado

golongan bangsawan, maupun golongan kaja — tetapi 'semua buat semua' ". Dalam Konsepsi Presiden Sukarno negara „semua buat semua" mendapat perumusan „kabinet Gotongrojong". Djuga dalam pidatonja ini Bung Karno sudah mengatakan bahwa *„kalau kita mentjari demokrasi, hendaklah bukan demokrasi Barat, tetapi permusjawaratan jang memberi hidup, jakni politik-economische democratie jang mampu mendatangkan kesedjahteraan sosial"*.

Dalam harian² kanan jang terbit pada awal Maret 1957 dimuat sebuah tulisan Hatta jang berkepala „Menindjau Konsepsi Bung Karno". Kita perlu membahas tulisan Hatta ini, karena Hatta, walaupun ketika mudanja memberi banjak djandji² jang muluk² kepada Rakjat, misalnja tentang kesediaannja berdjuang untuk persatuan nasional, tentang demokrasi ekonomi, kemakmuran dll., tetapi sekarang ia disamping terkenal sebagai „otak" reaksi, djuga menondjol sebagai tokoh politik jang utama dari kaum reaksioner Indonesia dengan dibantu oleh Natsir dan Sjahrir. Dari tulisannja tersebut njata, bahwa Hatta belum puas dengan pembunuhan² jang sudah dilakukan dibawah perintahnja dan atas tanggungdjawab penuh dari pribadinja selama Peristiwa Madiun. Ia masih menjimpan fikiran untuk menimbulkan perang saudara model Peristiwa Madiun, untuk „menghantjurkan kaum Komunis" atau se-kurang²-nja „membendung arus Komunis", ia tetap menganggap tugas imperialis ini sebagai tugasnja sendiri. Ia ingin satu kali lagi menumbukkan kepalanja pada tembok sedjarah.

Dalam tulisan tersebut, untuk membikin pembatjanja mengetjilkan arti Konsepsi Presiden Sukarno, Hatta pentingkan per-tama² mendjatuhkan prestise Sukarno dengan mengemukakan „psiko-analisanja" tentang „djiwa Bung Karno". Bung Karno disamping seorang politikus dan pemimpin, kata Hatta, adalah seorang jang berdjiwa artis jang ber-kobar² dadanja dan oleh karena itu Bung Karno hidup dalam impian. *„Sebagai pentjinta seni ia ingin memandang semua dalam keindahan, dalam suasana jang harmonis, dalam kesatuan jang bulat. Djiwanja luka melihat keretakan. Sebab itu persatuan mendjadi pokok dan achir dari segala tudjuannja"*, demikian Hatta. Dengan ini Hatta ingin mendemonstrasikan sifat „kekanak-kanakan" dari Sukarno jang tidak dapat membedakan antara alat dan tudjuan. Padahal tidak lain daripada Sukarnolah

jang sering mengatakan bahwa persatuan adalah alat untuk mentjapai tudjuan. Dengan ini tidak hanja terbukti bahwa Hatta tidak mengerti Sukarno, tetapi sekaligus ia mempertontonkan kepitjikan pengetahuannja tentang „seniman". Bagi Hatta asal jang bernama seniman bukan realis, sehingga baginja seniman sama dengan tukang ngelamun. Dan karena Sukarno berdjiwa seniman, maka Sukarno djuga adalah tukang ngelamun, dan dengan sendirinja Konsepsinja adalah tidak riil, lamunan belaka. Dengan ini Hatta sudah membikin dirinja telandjang bulat sebagai „tukang analisa jang mendalam"!

Hatta djuga dalam tulisan tersebut menjatakan tidak setudjunja dengan usaha Bung Karno mendirikan PPPKI, jaitu badan kerdjasama antara partai² dan organisasi² politik, dalam bulan Desember 1927. Hatta tidak setudju karena *„didalam PPPKI tidak boleh dikemukakan dasar² jang mengenai pertentangan faham jang prinsipiil diantara anggota²nja, seperti agama dan non-cooperation"*. Dari sini djelas betapa pitjiknja pengertian Hatta tentang politik persatuan. Ia tidak mengerti atau sengadja tidak mau mengerti, bahwa dalam mendjalankan politik persatuan adalah kewadjiban bagi jang mau bersatu untuk mentjari titik² pertemuan dan bukan mengemukakan soal² prinsipiil jang bisa memetjahbelah. Atas pengertian jang pitjik inilah Hatta dalam tulisannja tersebut tidak menjetudjui adanja kerdjasama dalam kabinet antara partai² agama, nasionalis dan Komunis. Dan lebih pitjik lagilah mereka jang menerima fikiran pitjik ini !

Kata Hatta, Bung Karno hidup dalam impian, dan inilah jang sering menjebabkan Bung Karno *„terbentur dalam realitet, dahulu dan sekarang"*. Dengan ini mau dikatakannja bahwa djuga Konsepsi Bung Karno sudah terbentur dalam „realitet". Apa jang dimaksudkan Hatta dengan „realitet" jalah sikap kepalabatu pemimpin Masjumi klik Natsir dan sikap kepalabatu Hatta sendiri jang setjara ngotot menolak Konsepsi Presiden Sukarno, artinja menolak persatuan anti-imperialis. Djika ini jang dinamakan „realitet", maka hanja kaum imperialis asinglah jang menarik keuntungan dari „realitet" ini, dan dengan ini djelaslah realitet Hatta sendiri.

Setelah mengatakan Bung Karno bukan realis dan Konsepsi Bung Karno adalah lamunan, maka Hatta dalam tulisannja, sebagai

seorang „realis" sudah tentu, mengusulkan supaja meng-indjak² UUD dengan membentuk Kabinet Presidentiil dan supaja praktek jang dulu dia lakukan di Djokja selama tahun 1948 dapat dihidupkan kembali. Dengan ini Hatta mau menjatakan bahwa Dewan Nasional tidak perlu dan tjara² dia „membasmi Komunis" tahun 1948, itulah jang tepat. Hatta mengimpikan zaman keemasannja, zaman panen mentjabuti njawa orang² Komunis dan patriot² non-Komunis, putera² Indonesia jang terbaik dari suku Djawa, suku Batak, suku Madura dll.

Menurut „realis" Hatta kabinet Gotongrojong hanja bisa dilaksanakan *„apabila partai² jang duduk didalam DPR semuanja sama tudjuannja"*. Djadi, selama PKI, PNI, NU, Parkindo, Partai Katolik dll. tidak bertudjuan mendirikan Negara „Darul Islam" seperti tudjuan Masjumi, maka tidak bisa dilaksanakan kabinet Gotongrojong. Inilah „realitet" menurut Hatta! Supaja tidak tertjapai persatuan dan gagal kabinet Gotongrojong, maka Hatta sengadja membawa semua ke-soal² prinsipiil dan mengalihkan perhatian dari kenjataan kongkrit sekarang, jaitu bahwa Rakjat Indonesia jang bermatjam ragam agama dan kejakinan politiknja semua adalah anti-kolonialisme, tidak suka pada peperangan baru, dan oleh karena itu bisa bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan nasional, membela Republik Proklamasi dan membela perdamaian.

Dari kenjataan² diatas djelaslah, bahwa djika persatuan nasional belum tertjapai, djika kabinet Gotongrojong belum dapat dilaksanakan, djika keadaan Rakjat tetap djelek seperti sekarang, maka orang pertama jang bertanggungdjawab adalah Hatta.

Selandjutnja, agar tidak terbentuk kabinet Gotongrojong, dengan lantjar Hatta membeo fitnahan² van der Plas dan orang² State Department Amerika Serikat tentang „kaum Komunis disemua negeri lebih mementingkan Sovjet Rusia daripada mementingkan negerinja sendiri". Ini dinjatakan Hatta tanpa memberi bukti. Oleh karena itu, apakah tidak sebaiknja Hatta memeriksa diri sendiri, dan menjedari bahwa usahanja untuk menggagalkan persatuan Rakjat, menggagalkan Konsepsi Presiden Sukarno adalah bukti jang menjolok dari perbuatan agen kolonialis Belanda dan imperialis Amerika.

Hatta ngotot mempertahankan pendirian kolotnja, bahwa dalam

demokrasi mutlak harus ada oposisi. Saking sulitnja menghindari kenjataan, bahwa PKI adalah faktor politik jang tidak mungkin diabaikan, Hatta terpaksa menulis bahwa ia „menginginkan" supaja PKI didudukkan sebagai oposisi sadja. Menurut Hatta, PKI supaja beroposisi jang baik dan tegas didalam Parlemen agar a.l. dapat mentjegah korupsi diantara partai² pemerintah, dan dengan begitu ikutserta memperbaiki moral politik jang sudah merosot sekarang ini. Djika sungguh² Hatta mengakui hakhidup PKI dan djika memang dari PKI diharapkan supaja melakukan tugas jang demikian mulianja dalam Parlemen, apa sebabnja dengan tudjuan jang mulia ini djuga PKI tidak dimasukkan kedalam kabinet, sedangkan partai² jang djauh lebih ketjil dari PKI dibenarkan masuk? Alangkah kusutnja fikiran realis jang tidak riil ini!

Kaum reaksioner Indonesia sudah dan terus akan mengerahkan segenap kekuatan djasmani dan rohaninja untuk menggagalkan Konsepsi Presiden Sukarno. Djuga Hatta jang merupakan „otak" kaum reaksioner Indonesia sudah memobilisasi „alasan² ilmiahnja". Walaupun demikian, kebenaran Konsepsi bukannja makin berkurang tetapi makin mejakinkan. Kenjataan bahwa konsepsi ini ditentang oleh Hatta dan klik Natsir dalam Masjumi adalah salah-satu bukti bahwa konsepsi ini pasti baik untuk Rakjat Indonesia.

Konsepsi Presiden Sukarno adalah sesuatu jang setjara tepat mendjawab problim politik jang urgen jang sekarang dihadapi oleh Rakjat Indonesia. Konsepsi ini adalah satu kebenaran ilmiah. Djika Konsepsi ini belum bisa dilaksanakan sekarang, atau belum bisa dilaksanakan sepenuhnja sekarang, bukanlah karena ia tidak benar, tetapi disebabkan oleh faktor lain jaitu faktor imbangan kekuatan. Halnja sama sadja seperti tuntutan *„Indonesia merdeka sekarang"* dari Rakjat Indonesia pada zaman pendjadjahan Belanda dulu. Djika pada waktu tuntutan itu dikeluarkan Indonesia tidak sekonjong² mendjadi merdeka, bukanlah karena tuntutan „Indonesia merdeka sekarang" jang salah, tetapi karena perimbangan kekuatan jang belum memungkinkan. Sebagaimana „Indonesia merdeka" sebagai tuntutan jang adil dan benar sekarang sudah mendjadi satu kenjataan, demikianlah Konsepsi Presiden Sukarno pasti akan mendjadi satu kenjataan. Oleh karena itu, aksi² Rakjat Indonesia jang menuntut dilaksanakannja Konsepsi Bung Karno adalah aksi²

Dipindai Manual

jang adil dan benar. Oleh karena tuntutan² dan aksi² itu adalah adil dan benar, maka kaum Komunis Indonesia ber-sama² dengan Rakjat Indonesia akan terus menuntut dan beraksi guna pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%.

Konsepsi Presiden Sukarno harus terus dipropagandakan, kekuatan Rakjat harus terus disusun dan imbangan kekuatan harus terus diubah sebagai sjarat untuk pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%. Kita lakukan semuanja ini, karena dengan ini berarti kita mempersatukan Rakjat dan memobilisasi Rakjat untuk satu Konsepsi politik jang menguntungkan Rakjat. Disamping itu tetap djuga mendjadi kewadjiban Partai kita untuk mempropagandakan Program Umum Partai, jaitu Program penjelesaian tuntutan² Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja.

Dalam hubungan dengan taktik revolusi Indonesia, Konsepsi Presiden Sukarno mempunjai arti jang sangat penting. Pelaksanaan Konsepsi ini sepenuhnja merupakan lompatan jang besar dalam mentjapai tudjuan strategis dari revolusi, jaitu penjelesaian tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja.

Situasi internasional dan dalamnegeri berada difihak Konsepsi Presiden Sukarno. Zaman membantu mereka jang bekerdja untuk realisasi Konsepsi ini!

III

Mengembangkan Pekerdjaan Massa

Kawan²! Dalam Program kita dikatakan bahwa djalan keluar dari situasi jang tidak kita ingini sekarang *„terletak dalam mengubah imbangan kekuatan antara kaum imperialis, klas tuantanah dan burdjuasi komprador disatu fihak, dan kekuatan Rakjat difihak lain. Djalan keluar terletak dalam membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa, terutama kaum buruh dan kaum tani."* Oleh karena itu, disamping pekerdjaan Partai jang banjak ragamnja, dalam keadaan bagaimanapun pekerdjaan Partai jang terpenting adalah tetap, jaitu membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa. Hal ini dalam kesibukan pekerdjaan organisasi dan pendidikan se-hari² sering dilupakan oleh sementara kader Partai. Apalagi berhubung sekarang Partai kita sedang sibuk melaksanakan Plan Tiga Tahun Organisasi dan Pendidikan. Pelaksanaan Plan ini tidak mungkin berhasil baik djika tidak dipadu dengan pekerdjaan massa.

Kawan², kita tidak boleh lupa, bahwa pekerdjaan organisasi dan pendidikan Partai tidak mempunjai tudjuan lain daripada untuk memperbaiki pimpinan Partai terhadap massa guna mengubah imbangan kekuatan. Djuga tidak boleh lupa, bahwa hanja dengan kekuatan progresif jang besar, sebagai hasil dari pekerdjaan massa jang tekun, kekuatan tengah akan dapat ditarik kedalam front persatuan setjara ber-angsur² dan kekuatan kepalabatu akan makin terisolasi. Djuga untuk pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100% soal mengubah imbangan kekuatan adalah kuntjinja.

Dalam kesempatan ini marilah kita memeriksa dalam garis² besarnja apa² jang sudah dan jang harus dikerdjakan oleh Partai untuk pekerdjaan mengubah imbangan kekuatan.

1. Massa Kaum Buruh

Massa kaum buruh atau serikatburuh² pada saat sekarang menghadapi a.l. persoalan² pensalahgunaan KDP, ontslagrecht, peraturan upah terendah dan peraturan djaminan sosial. Dalam menghadapi berbagai soal ini persatuan kaum buruh mengalami kemadjuan² penting dengan terbentuknja RKS (Rapat Kerdjasama) dan BKS (Badan Kerdjasama) serikatburuh² dari kalangan kaum buruh negeri dan dari kalangan kaum buruh perusahaan² asing. (10)

Aktivis² serikatburuh² revolusioner pada umumnja sudah menjedari benar tentang pentingnja menggalang persatuan buruh dengan melewati aksi², tetapi mereka masih mengalami banjak kesulitan dan harus terus dibantu oleh pimpinan Partai untuk mengatasinja. Adalah penting sekali, bahwa pada waktu belakangan ini, dalam menggalang kerdjasama antara serikatburuh soal besar atau ketjilnja serikatburuh tidak dipersoalkan lagi. Semua serikatburuh, tidak pandang besar atau ketjil, asal mau bersatu maka dipersatukanlah untuk melaksanakan program bersama jang kongkrit.

Menurut pengalaman, ada kalanja suatu serikatburuh memang ketjil kalau dilihat dari djumlah anggotanja, tetapi politis rolnja tidak bisa diabaikan, dan oleh karena itu penting untuk diadjak

Dimpos Manalu

bersatu didalam aksi². Dengan garis persatuan jang tepat ini, maka tiap² usaha kaum pemetjahbelah pada pokoknja sudah dapat digagalkan dan persatuan kaum buruh mendjadi lebih kuat.

Djika beberapa waktu jang lalu penggunaan hak mogok pada umumnja asing bagi serikatburuh² pegawai negeri jang tidak tergabung dalam SOBSI, maka sekarang, karena pengalaman² jang pahit berhubung tuntutan² sosial-ekonomi tidak digubris oleh pemerintah, penggunaan hak mogok tidak asing lagi bagi serikatburuh² pegawai negeri diluar SOBSI. PGRI, misalnja, sudah mempunjai pengalaman melakukan aksi mogok, sedangkan SSKDN, SB Kempen, Persadja (11) dan lain² sudah pernah mengadakan antjaman² aksi. Semua ini adalah penting bagi peningkatan kesedaran kaum buruh.

Aksi² mogok jang bersifat politik, misalnja dalam menjokong Mesir dan melawan Inggeris-Perantjis-Israel telah sangat meningkatkan kesedaran politik kaum buruh dan telah sangat membantu mempersatukan kaum buruh Indonesia serta meningkatkan kesedarannja. Demikian djuga aksi² kaum buruh dalam melawan UU Darurat No. 16, aksi² mengenai Irian Barat, aksi² anti-subversif asing, aksi² menggagalkan pertjobaan kudeta kolonel Simbolon di Sumatera Utara, pemogokan umum politik melawan kekuasaan kaum pemberontak separatis di Sumatera Selatan, antjaman aksi kaum buruh untuk mentjegah pembentukan kabinet kanan dan aksi² lain telah mempersatukan kaum buruh dan meningkatkan kesedaran politiknja. Dalam semua aksi ini dapat ditjiptakan front buruh jang luas dan persatuan kaum buruh dengan massa Rakjat lainnja.

Dalam menghadapi tugas² sosial-ekonomi dan tugas² politik kaum buruh di-waktu² jang akan datang adalah sangat penting masalah mempertinggi pengertian dan kesedaran dengan djalan pendidikan, masalah peluasan organisasi kaum buruh keseluruh tanahair, masalah mengkordinasi lebih baik aksi² kaum buruh, mentjegah pensalahgunaan KDP, membela kebebasan hak² serikatburuh², perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, memperkokoh persatuan pimpinan serikatburuh² dengan organisasi² basis dan dengan massa kaum buruh. Di-masa² jang akan datang, sesuai dengan kedudukannja jang sudah agak kuat, klas buruh Indonesia harus mengambil bagian jang lebih aktif dalam usaha memperkuat solidaritet klas buruh internasional, terutama solidaritet klas buruh Asia-Afrika.

2. *Massa Kaum Tani*

Dalam perdjuangannja untuk mendapatkan tanah garapan, kaum tani Indonesia sekarang harus berhadapan dengan perkebunan² asing, djawatan² kehutanan dan dengan tuantanah² bumiputera.

Terhadap tanah² perkebunan asing pada taraf sekarang kaum tani hanja menuntut agar dapat menggarap bagian² tanah perkebunan jang tidak dikerdjakan atau jang diterlantarkan. Ini adil, tidak hanja dilihat dari sudut bahwa kaum tani harus mempunjai tanah garapan, tetapi djuga dari sudut kebutuhan nasional untuk memperbesar produksi bahan makanan.

Mengenai tanah² partikelir harus terus diperdjuangkan agar dibeli pemerintah dengan harga dan tjara pembajaran jang ditentukan oleh pemerintah, sesuai dengan kemampuan pemerintah. Tanah² sawah dan ladang bekas tanah² partikelir supaja dibagikan kepada kaum tani tak-bertanah dan tani-miskin.

Mengenai tanah kehutanan kaum tani hanja menuntut supaja dapat menggarap tanah² jang tidak diperlukan untuk kepentingan hidrologi dan jang tidak diperlukan oleh djawatan kehutanan untuk didjadikan tempat penanaman kaju expor. Kaum tani hanja menuntut tanah² kehutanan jang memang bisa digarap oleh kaum tani. Kaum tani pada umumnja mengerti bahwa tanah² jang benar² diperlukan untuk hidrologi harus dihutankan. Mengenai tanah² kehutanan jang sudah lama ditempati atau digarap oleh kaum tani, akan tetapi kemudian ternjata benar² diperlukan untuk hidrologi, kaum tani bersedia meninggalkan tanah tersebut setelah ada ketentuan tempat baru dan beaja pemindahan. Soal hidrologi adalah langsung mengenai kepentingan kaum tani, karena kaum tani sendiri tidak menjukai terdjadinja tanah longsor dan bandjir. Mengenai tanah² kehutanan jang benar² diperlukan untuk ditanami dengan pohon² kaju expor, kaum tani hanja menuntut supaja selama pohon² itu masih ketjil mereka diperbolehkan menanam polowidjo di-sela² pohon² itu tanpa sjarat² jang bersifat pemerasan dari fihak orang²

Dimpos Manalu

tertentu dari djawatan kehutanan. Tuntutan ini tidak merugikan djawatan kehutanan, tetapi terang memberi penghidupan kepada kaum tani dan memperbesar produksi bahan makanan.

Tetapi tuntutan kaum tani jang sederhana dan langsung menguntungkan kepentingan nasional karena memperbesar produksi bahan makanan, sering tidak dimengerti oleh pedjabat² setempat dan sering menghadapkan kaum tani dengan alat² kekuasaan pemerintah setempat, dan sampai² djuga dengan pemerintah pusat. Karena oleh sebagian pembesar² pemerintah tuntutan kaum tani jang adil itu tidak dimengerti, disamping memang ada pedjabat² jang memusuhi kaum tani, maka atas usul Menteri Agraria (dari Partai Katolik Republik Indonesia) oleh pemerintah Ali Sastroamidjojo kedua telah dikeluarkan Undang² Darurat No. 1 tahun 1956 jang reaksioner. Menurut Undang² Darurat jang reaksioner ini, semua pemakaian tanah perkebunan dan kehutanan dianggap pelanggaran hukum, dengan tidak mempertimbangkan bahwa kaum tani memang membutuhkan tanah garapan, bahwa tanah jang diambil oleh kaum tani memang dapat diberikan dan bahwa tambahnja garapan tanah kaum tani berarti memperbesar produksi. Adalah kewadjiban wakil² Rakjat di Parlemen dan DPRD², kewadjiban gerakan massa Rakjat dan gerakan massa kaum tani chususnja untuk menuntut dibatalkannja Undang² Darurat No. 1/1956 jang reaksioner ini dan menuntut diadakannja Undang² Agraria jang demokratis.

Aksi² kaum tani menuntut turunnja setoran dan bunga uang kepada tuantanah, serta aksi² buruh tani menuntut kenaikan upah pada waktu² belakangan ini sudah mulai agak meluas. Pada tingkat permulaan, karena setoran dan bunga uang memang terlalu tinggi, fihak tuantanah sendiri di Djawa dan Sumatera sering berpendapat lebih baik meluluskan tuntutan kaum tani daripada terdjadi „ribut² aksi". Tetapi ada tempat² dimana tuantanah bersikap kepalabatu dan meminta bantuan alat negara untuk menekan kaum tani jang menuntut turunnja setoran dan bunga uang. Karena sangat adilnja tuntutan kaum tani, tidak selamanja kaum tuantanah kepalabatu berhasil menggunakan aparat negara untuk menindas kaum tani.

Di-daerah² luar Djawa dan Sumatera, dimana gerakan tani

belum begitu madju dan pengaruh tuantanah masih agak besar terhadap alat² negara, kaum tuantanah masih sering berhasil menggunakan aparat negara untuk menindas kaum tani, seperti misalnja di Sumba, Flores, Makale Rantepao (Sulawesi), dll. Dalam keadaan demikian kaum tani berlawan dengan sengit dan dalam perlawanan ini kaum tani mendapat pengalaman², kesedarannja meningkat dan organisasinja bertambah besar dan kuat. Dalam aksi² melawan tuantanah organisasi kaum tani mendjadi besar dan dibadjakan!

Untuk mengachiri pemerintahan tunggal di-desa², maka aksi² kaum tani menuntut terbentuknja DPR dan Dewan Pemerintah Desa jang agak demokratis lewat pemilihan² perlu dikembangkan, sebagai langkah penting untuk pembentukan pemerintah otonom tingkat III, jang Undang²nja harus terus diperdjuangkan oleh fraksi PKI didalam Parlemen.

Untuk mendjalankan tugas² jang makin berat ini mendjadilah lebih penting lagi soal penjelidikan jang teliti mengenai hubungan² agraria didesa, soal pendidikan politik dan organisasi untuk kader² tani, soal mendidik banjak kader jang benar² mengerti persoalan desa dan kaum tani, soal menemukan bentuk² organisasi jang sederhana dan bisa memobilisasi massa kaum tani jang luas setjara tjepat, soal meluaskan keanggotaan dan organisasi tani revolusioner, soal memperbaiki pimpinan sentral dari organisasi tani revolusioner, soal mengadakan konferensi² regional bagi daerah² jang mempunjai persamaan objek buat tukar menukar pengalaman mengenai aksi² kaum tani.

Hendaknja tetap mendjadi pendirian segenap anggota Partai kita, bahwa tanpa bagian terbesar kaum tani ikutserta front persatuan tidak mungkin kuat dan Partai tidak mempunjai sandaran jang bisa dipertjaja.

3. *Massa Kaum Wanita*

Kegiatan politik jang makin bertambah dari massa Rakjat telah menimbulkan kegiatan pula dalam gerakan massa wanita. Dalam aksi² anti-kolonialisme dan aksi² membela perdamaian, walaupun belum tjukup banjak, kaum wanita tidak ketinggalan. Tetapi di-

Dimpos Manalu

samping tuntutan² jang sering bersifat nasional dan umum, sebagaimana djuga sektor² lain dari massa Rakjat, kaum wanita Indonesia mempunjai tuntutan²nja sendiri, jang sebenarnja djuga tuntutan seluruh gerakan progresif dan demokratis.

Dalam waktu² belakangan ini massa kaum wanita giat menuntut hapusnja PP 19 (12), menentang kawin paksa dalam hubungan dengan „peristiwa Maisuri", menentang perbuatan mesum jang luarbiasa dari Attamimi, bekerdja dalam „Badan Penjelesaian Perselisihan Perkawinan dan Pertjeraian", bekerdja dalam berbagai lapangan sosial dan pendidikan, dan mempropagandakan serta memperdjuangkan adanja Undang² Perkawinan jang demokratis.

Untuk melaksanakan tugas²nja seperti diatas adalah penting soal pendidikan kader² organisasi wanita, soal pemberantasan buta-huruf dikalangan wanita, soal menemukan bentuk² organisasi jang sederhana dan militan, soal meluaskan organisasi wanita progresif keseluruh tanahair dan soal menggalang persatuan dikalangan organisasi² wanita tanpa memandang perbedaan kejakinan agama dan politik, tanpa memandang besar atau ketjilnja organisasi.

Untuk memperbaiki pekerdjaan Partai dikalangan kaum wanita diberbagai provinsi sudah dilaksanakan Konferensi² Wanita Komunis dan dalam waktu jang tidak terlalu lama lagi akan dilangsungkan Konferensi Nasional Wanita Komunis jang pertama.

4. Inteligensia, Massa Pemuda dan Peladjar

Dalam hubungan dengan pekerdjaan dikalangan inteligensia perlu dikemukakan, bahwa dilapangan kesenian, filsafat dan ilmu kita mentjatat beberapa kemadjuan. Djika 2 a 3 tahun jl. masih banjak di Indonesia ini penganut aliran „seni untuk seni", „filsafat untuk filsafat" dan „ilmu untuk ilmu" didalam segala variasinja, sekarang sudah sangat kurang djumlah orang jang menjangkal hubungannja antara kesenian, filsafat dan ilmu dengan kehidupan, dengan Rakjat. Bahkan, sekarang sudah ada pengakuan umum, bahwa kesenian, filsafat dan ilmu itu harus berguna bagi Rakjat. Pendeknja, azas kerakjatan, azas pengabdian kepada Rakjat, sudah mentjapai kemenangannja. Ini adalah berkat pekerdjaan jang tekun dari kader² intelektuil dan pekerdja² kebudajaan kita umumnja.

Partai mengharap, hendaknja pekerdja² kebudajaan kita terus mendjundjung-tinggi azas kerakjatan ini, dan dengan tangkas dan djalan jang mejakinkan, menentang setiap azas jang merugikan Rakjat didalam kesenian, filsafat maupun ilmu. Kemenangan jang sudah ditjapai ini hendaknja mereka amalkan dalam wudjud tjiptaan² jang tinggi nilainja. Dalam hal ini mereka wadjib mendasarkan diri pada perkembangan kesenian Rakjat, kebudajaan Rakjat umumnja, jang didalam perdjuangan kita achir² ini membuktikan dajadjuangnja jang besar. Penggalian terhadap kesenian² kuno kita agar dapat memilih dan mengembangkan kesenian² jang berguna bagi Rakjat, harus lebih banjak dan lebih sungguh² dikerdjakan oleh seniman² kita.

Sidang Pleno ke-IV CC mengkonstatasi tentang tetap setianja massa pemuda dan peladjar Indonesia pada tjita² Revolusi Agustus 1945 dan tentang kegiatan para pemuda dan peladjar menentang perbuatan² kaum komprador dan kaum koruptor. Periode sesudah Sidang Pleno ke-IV CC membenarkan konstatasi ini dan menundjukkan perkembangan lebih djauh dari sifat² progresif para pemuda dan peladjar. Inilah keterangannja apa sebabnja golongan pemuda dan peladjar, tentu sadja terketjuali mereka jang sudah diratjuni oleh kaum reaksioner, termasuk golongan jang paling antusias menjambut Konsepsi Presiden Sukarno, konsepsi jang memberi harapan kepada mereka akan dapat membawa tanahair menempuh djalan baru, djalan persatuan nasional anti-kolonialisme, djalan demokrasi dan perdamaian, dimana kaum komprador, kaum koruptor dan birokrat tidak bisa meradjalela lagi.

Walaupun sudah ada kemadjuan² jang ditjapai oleh Partai dalam memimpin dan membantu para pemuda dan peladjar, baik dalam memperdjuangkan kepentingan ekonomi dan kulturil mereka, maupun dalam meningkatkan kesedaran politiknja, tetapi sangat terasa bahwa apa jang sudah dilakukan Partai masih djauh daripada tjukup.

Sjarat² objektif jang baik jang terdapat didalam gerakan pemuda dan peladjar, terutama dalam masa naiknja gelombang semangat anti-kolonialisme, baik jang berbentuk gerakan anti-subversif asing, gerakan menjokong perdjuangan Aldjazair dan Mesir, menjokong Konsepsi Presiden Sukarno atau jang berbentuk apa sadja, belum

Dinpos Manalu

dapat dipimpin, dikonsolidasi dan digunakan sepenuhnja untuk memperbesar kekuatan progresif. Pekerdjaan Partai dikalangan massa pemuda dan peladjar masih banjak jang harus diperbaiki, baik dipusat dan terutama di-daerah². Terutama dalam waktu² kaum kontra-revolusioner mau memaksakan sistim fasisme, faktor pemuda dan peladjar adalah sangat penting dan menondjol.

Sering terdjadi bahwa anggota² Comite Partai agak berat sebelah dalam mentjurahkan perhatiannja, jaitu hanja kepada kaum buruh dan tani, dan meremehkan pekerdjaan di-kalangan² lain, termasuk kalangan pemuda dan peladjar. Mereka belum menarik peladjaran dari pengalaman revolusi² di-negeri² djadjahan dan setengah-djadjahan, dari pengalaman revolusi Indonesia sendiri, jaitu bahwa pemuda dan peladjar adalah faktor sangat penting dalam memenangkan revolusi.

Pekan Pemuda jang dilangsungkan di Surabaja pada awal Februari tahun ini adalah sangat penting bagi perkembangan gerakan pemuda dan peladjar kita. Peristiwa ini hendaklah mendjadi dorongan bagi Partai kita untuk bekerdja lebih baik dikalangan pemuda dan peladjar. Organisasi² kern dan kerdjasama diantara organisasi² pemuda, organisasi² kepanduan, organisasi² peladjar sekolah² menengah, organisasi² mahasiswa universitas² dan akademi² harus mendapat perhatian penuh dari Comite² Partai. Sjarat² objektif untuk perkembangan disemua lapangan ini adalah baik. Kaum sosialis kanan jang di-tahun² jang lampau boleh dikatakan memegang „monopoli" didalam gerakan peladjar dan mahasiswa, sudah terbukti tidak bisa mempertahankan kedudukannja, karena tidak mampu menundjukkan djalan jang benar, jang sesuai dengan perasaan, fikiran dan tuntutan para peladjar dan mahasiswa jang patriotik, demokratis dan tjinta perdamaian dunia.

Pemuda Rakjat, organisasi pemuda progresif jang organisatoris berdiri sendiri tetapi jang tanpa reserve menerima politik Partai untuk menjelesaikan semua tuntutan Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja, harus setjara serius dibantu oleh Partai, terutama dalam soal² pendidikan dan kesulitan² praktis jang dihadapi oleh organisasi ini. Ada tanda² bahwa hal ini belum tjukup disedari oleh pemimpin² Partai kita. Problim lain jang djuga sangat penting untuk dipetjahkan jalah problim kerdjasama Pemuda Rakjat dengan organisasi² pemuda lain.

5. *Massa Veteran*

Salahsatu golongan massa Rakjat jang ratusan ribu djumlahnja, tetapi jang masih kurang tjukup mendapat perhatian Partai jalah massa veteran, jaitu bekas pedjuang bersendjata. Padahal masalah veteran bukanlah masalah jang baru timbul, dan pula bukanlah masalah jang bisa selesai dalam waktu singkat. Sedjak pemerintah Hatta jang berkedudukan di Djokjakarta dulu melakukan massa-onslah besar²an terhadap pedjuang² bersendjata tanpa lebih dahulu menjiapkan badan² penampungan kaum veteran, masalah veteran sudah timbul. Sampai sekarang belum ada konsepsi resmi untuk memetjahkan masalah veteran setjara integral, walaupun pada achir² ini memang usaha² fihak jang berwadjib mengenai veteran mulai memperlihatkan hasil² jang sedikit kongkrit.

Tuntutan² kaum veteran pada waktu sekarang a.l. jalah untuk mendapatkan SKBT (Surat Keterangan Bekas Tentara); untuk mendapat hak memakai pakaian seragam dan pangkat terachir pada waktu upatjara² nasional dan upatjara² militer, hak mendapat perawatan dengan tjuma² apabila mereka sakit dan hak beladjar dengan tjuma²; untuk mendapat uang pemulihan, tundjangan, pensiun dan onderstand; hak pensiun para penderita tjatjad supaja paling sedikit disamakan dengan hak pensiun bekas² KNIL. Tuntutan² ini adalah adil, dan pemerintah jang sedikit mempunjai kemauan baik pantas memperhatikannja.

Akan tetapi, sampai kemana tuntutan para veteran jang adil itu akan diperhatikan oleh pemerintah, terutama bergantung pada perdjuangan dan persatuan kaum veteran. Oleh karena itulah, sedjak semula politik Partai kita jalah menjederhanakan atau memperketjil djumlah organisasi² veteran, selama fusi belum mungkin. Kaum veteran jang tidak bersatu akan mudah dipermainkan oleh kaum avonturir politik, oleh kaum koruptor dan pendjahat² lainnja. Demi persatuan kaum veteran ini, Partai kita menjambut dengan gembira kongres organisasi² veteran tahun 1951 jang telah berhasil memfusikan 149 organisasi² veteran sentral dan lokal dengan melahirkan Perbepbsi (Persatuan Bekas Pedjuang Bersen-

Dipindai oleh Manalu

djata Seluruh Indonesia). Tetapi dengan fusi ini belum berarti semua organisasi veteran sudah dilebur. Haruslah disambut baik sukses jang ditjapai oleh Kongres Veteran Seluruh Indonesia pada achir Desember tahun jang lalu, jang melahirkan „*Legiun Veteran Republik Indonesia*". Dengan adanja „Legiun Veteran" ini berartilah lebih sempurna alat kaum veteran untuk memperdjuangkan tuntutan²nja, dan tidak begitu mudah lagi mereka diperalat oleh kaum aventurir politik, oleh kaum koruptor dan pendjahat² lainnja.

Masalah veteran akan tetap mendjadi masalah selama masih ada tentara tetap. Pradjurit jang sekarang masih dalam dinas pada waktunja akan mendjadi veteran. Oleh karena itu adalah keliru sekali djika soal veteran tidak mendapat perhatian jang pantas dari fihak jang berwadjib, dari pemuka² masjarakat, dari kaum Komunis.

Kewadjiban Partai kita memimpin massa tidak hanja terbatas pada memimpin massa kaum buruh, kaum tani, wanita, pemuda, peladjar dan veteran. Masih banjak lagi sektor² lain, seperti kaum seniman, kaum pedagang ketjil, massa miskin kota, kaum nelajan, kaum tukang keradjinan tangan dsb. jang harus dibantu dan dipimpin oleh Partai dalam perdjuangannja se-hari² untuk mendapatkan hak² ekonomi, politik dan kulturilnja. Djuga untuk golongan anggota aparat negara, termasuk untuk pradjurit² Angkatan Perang, harus lebih banjak perhatian mengenai perbaikan nasib mereka dan agar mereka tetap setia pada Revolusi Agustus 1945, tetap bersikap patriotik, demokratis dan anti-kolonialisme. Kedudukan Partai didalam Parlemen harus digunakan se-baik²nja untuk ini.

Semua aparat Partai, baik jang ada didalam organisasi massa, maupun jang ada di Parlemen, DPRD² dan dimana sadja harus digerakkan untuk mengembangkan pekerdjaan massa dari Partai. Tidak boleh ada satu golongan dari Rakjat jang tidak mendapat tjurahan perhatian dari Partai. Inilah sjarat untuk mengubah imbangan kekuatan jang ada, sjarat untuk pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%, sjarat untuk terbentuknja Kabinet Gotong-rojong dan pemerintah² daerah jang demokratis.

IV

Plan Tiga Tahun Pertama Mengenai Organisasi Dan Pendidikan

Kawan², soal memperbaiki pimpinan Partai terhadap massa tidak bisa dipisahkan dari soal memperbaiki Partai sendiri, soal mengkonsolidasi Partai dilapangan ideologi, politik dan organisasi, soal mendjadikan Partai kita Partai jang tersebar merata diseluruh negeri dan jang mempunjai karakter massa jang luas. Semua anggota harus mengambil bagian dalam membangun Partai jang demikian ini.

Putusan Sidang Pleno ke-IV CC tentang Plan Tiga Tahun Pertama Mengenai Organisasi dan Pendidikan sangat membantu dalam membangun Partai jang demikian itu. Adanja plan jang harus dilaksanakan dalam djangka jang agak pandjang, seperti Plan Tiga Tahun kita ini, merupakan pengalaman baru bagi Partai kita, dan ternjata pengalaman jang sangat menggembirakan dan sangat baik. Adanja plan ini memberi didikan kepada kader² Partai supaja tidak hanja pandai bekerdja dengan plan² jang pendek, seperti jang sudah biasa kita lakukan, tetapi djuga bisa dan harus bisa bekerdja dengan plan jang agak pandjang. Plan jang agak pandjang membawa kader² Partai melihat agak djauh kedepan dalam hubungan dengan perkembangan Partainja, dimana mereka sendiri mengambil bagian dalam memimpin perkembangan itu sehari² menudju sasaran plan. Plan Tiga Tahun meliputi banjak soal, dengan titikberat soal² organisasi dan pendidikan. Plan ini mendidik kader² Partai bekerdja banjak segi sekaligus dalam djangka waktu jang tertentu, jang setjara ber-angsur² akan membikin mereka tidak berat sebelah lagi dalam mengerdjakan tugas² Partai, akan mendidik mereka supaja tidak bingung djika harus mengerdjakan banjak ragam pekerdjaan sekaligus.

Plan Tiga Tahun kita belum lagi berdjalan satu tahun dan kita belum menarik kesimpulan² mengenai hasil² plan ini setjara nasional. Jang sudah kita lakukan jalah mengadakan pemeriksaan terhadap tjara² pelaksanaan plan dengan mengadakan diskusi² jang mendalam dengan hampir semua Comite Partai jang langsung di-

Dimpos Manalu

bawah pimpinan Comite Central. Pemeriksaan terhadap tjara² pelaksanaan plan pada tingkat permulaan pelaksanaan adalah sangat penting artinja agar pengalaman² jang baik pada permulaan pelaksanaan disesuatu daerah segera dapat disimpulkan untuk diratakan keseluruh Partai, sebaliknja kekeliruan² disesuatu daerah pada awal pelaksanaan segera dapat diperbaiki sehingga kekeliruan² tersebut tidak perlu diulangi oleh daerah² lain.

Adanja Plan Tiga Tahun disambut dengan gembira dan antusias oleh para anggota dan tjalonanggota Partai jang sudah mendapat pendjelasan tentang plan ini, terutama oleh kader² Partai jang bertanggungdjawab memimpin Comite² Partai. Dengan adanja plan nasional ini seluruh Partai kita sampai kesatuan² jang terketjil berusaha menjesuaikan diri dengan plan sentral ini, masing² berusaha membikin plan untuk kesatuannja sendiri dalam rangka plan nasional. Semua mempunjai kejakinan, bahwa pelaksanaan plan ini berarti akan bertambah besarnja kewibawaan dan bertambah tingginja martabat Partai, jang djuga berarti kewibawaan dan martabat daripada Rakjat Indonesia.

Pada umumnja Comite² sudah mampu memperintji plan nasional menurut pembagian kewadjiban dan kemampuan daerah masing². Umumnja plan sudah diperintji sampai ke Comite Subseksi, dan ada djuga jang sudah sampai ke Comite Resort. Dengan ini berarti bahwa CSS² dan CR² jang bersangkutan sudah mempunjai plan chususnja sendiri dalam rangka pelaksanaan plan nasional. Comite² Daerah Besar dan Comite² Pulau sudah mempunjai antjer² apa jang harus ditjapai untuk djangka waktu tiga tahun, CS² dan CSS² pada umumnja sudah memerintji plan daerah besar atau plan pulau lebih djauh, sehingga mereka sudah mempunjai antjer² apa jang harus ditjapai dalam 6 bulan atau tiga bulan dalam hubungan melaksanakan seluruh plan. Disana-sini ada tanda² bahwa sementara Comite masih subjektif dalam membikin plan, umumnja plan terlalu besar, diluar kemampuan, disamping ada djuga jang terlalu ketjil.

Plan jang terlalu besar, jang pelaksanaannja diluar kemampuan, berakibat pekerdjaan dikerdjakan dalam suasana ter-buru², dalam „suasana dikedjar hantu", sehingga pekerdjaan dilakukan setjara tjeroboh dan tidak intensif. Djika „suasana dikedjar hantu" ini

sudah ada sedjak permulaan pelaksanaan plan, maka sudah terang akan banjak kesalahan² jang dibikin. Dengan demikian waktu² kemudian akan banjak dipakai untuk mengoreksi kesalahan² jang dibikin, dan akibatnja sudah terang bahwa plan tidak akan dapat dipenuhi. Dalam melaksanakan tiap² plan soal awalan (start) adalah sangat penting. Awalan jang benar jang berdasarkan hasil diskusi jang mendalam dan matang, dengan sudah memperhitungkan kemampuan para kader bawahan dan massa anggota, dengan disertai kepertjajaan penuh pada daja kreatif Rakjat, berartilah bahwa bagian terpenting dari plan sudah dilaksanakan. Bekerdja dengan plan bukanlah berarti bekerdja untuk mentjapai hal² jang adjaib, jang tidak mungkin ditjapai. Plan adalah pembantu untuk mentjapai sesuatu jang memang mungkin ditjapai dengan bekerdja setjara teratur.

Ada Comite² jang bekerdja dalam „suasana dikedjar hantu", jang dalam masa belum sampai waktunja sudah dua kali melaksanakan Sekolah Partai, tetapi kedua kali angkatan ini boleh dikatakan gagal. Ini tidak berarti bahwa samasekali tidak ada gunanja. Formilnja Comite ini sudah berbuat lebih daripada plan, jaitu dua kali angkatan Sekolah Partai dalam tempo jang kurang dari jang sudah ditentukan. Tetapi dalam kenjataannja, Comite ini tidak memenuhi djatah jang harus ditjapainja dalam tempo jang sudah ditentukan. Kita bukan formalis, oleh karena itu kita berpegang pada kenjataan, pada hasil jang sesungguhnja. Comite tersebut sudah tertinggal dalam melaksanakan salahsatu bagian daripada plannja. Tidak hanja itu, Comite ini harus bekerdja keras untuk mengoreksi akibat² kesalahannja. Comite ini harus menanggung akibat jang djelek terhadap siswa² lepasan Sekolah Partai jang terlalu di-paksa²kan ini, misalnja bahwa peladjaran jang didapat tidak mendarah-daging, padahal mereka sudah merasa lepasan Sekolah Partai; misalnja bahwa mereka merasa tjemas beladjar Marxisme-Leninisme karena menurut pengalaman mereka dalam Sekolah Partai jang di-paksa²kan itu beladjar Marxisme-Leninisme adalah sangat sukar; misalnja bahwa mereka djuga mengadakan tekanan² kebawah dalam melaksanakan plan jang pelaksanaannja berada dibawah pimpinannja. Sebaliknja, djika plan terlalu ketjil, maka berkuasalah „suasana tidak ada apa²" sehingga akibatnja tidak

Dimpos Manalu

menimbulkan „suasana sibuk dan tekun bekerdja" didalam Partai, tidak menimbulkan kegairahan dan daja mobilisasi. Djadi, harus sungguh² diperhatikan soal awalan dalam pelaksanaan plan, harus bebas dari „suasana dikedjar hantu", harus bebas dari „suasana tidak ada apa²", dan harus ditjiptakan „suasana sibuk dan tekun bekerdja".

Dalam hubungan dengan pelaksanaan plan bukan djarang terdjadi, bahwa djika Comite² sedang menghadapi pekerdjaan penting jang datangnja mendadak, plan terlupakan, tersisihkan untuk sementara waktu dan baru teringat kembali sesudah pekerdjaan mendadak itu selesai. Pelaksanaan plan jang ter-putus² ini sudah tentu tidak dapat dibenarkan, karena pasti akan gagal. Pekerdjaan² mendadak diluar plan, tetapi penting untuk dilaksanakan agar Partai dapat memimpin perkembangan situasi, pasti akan sering terdjadi. Oleh karena itu semua Comite Partai harus mendjaga agar pelaksanaan plan tidak ter-putus². Terutama Departemen Organisasi CC dan Bagian² Organisasi Comite² bawahan harus memberi perhatian chusus dalam hal ini.

Dalam hubungan dengan pelaksanaan plan organisasi adalah sangat penting soal pentjurahan perhatian kepada penggrupan anggota² dan tjalonanggota², kepada penggrupan wanita² Komunis dan peningkatan tjalonanggota mendjadi anggota. Dalam penggrupan anggota² perhatian jang besar harus diberikan kepada CR², agar CR² mampu berdiri sendiri sebagai badan pimpinan. Harus ada pedoman² praktis untuk menghidupkan grup, misalnja pedoman jang memuat tentang tjara memilih kepala grup, tentang grup wanita dan grup tjampuran, tentang peningkatan tjalonanggota mendjadi anggota, tentang ketentuan kader² atasan menghadiri diskusi² grup, tentang perlunja ada instruksi² dan tjontoh² praktis dari Comite² atasan mengenai pekerdjaan jang harus dilakukan, tentang atjara² diskusi grup jang dapat menarik perhatian anggota² (umpamanja tentang salahsatu tulisan didalam koran Partai, tentang situasi). Grup² harus mengambil bagian dalam aksi² massa ditempatnja dan lambatlaun harus ditingkatkan sehingga mampu mengambil inisiatif untuk menggerakkan massa dilingkungannja.

Berkat plan organisasi penggrupan anggota² umumnja sudah berdjalan, walaupun belum merata benar. Sudah disedari oleh

kader² Partai, bahwa sukses atau tidaknja pekerdjaan dilapangan organisasi banjak bergantung pada soal penggrupan. Pengalaman di-daerah² dimana berkuasa teror putih, seperti di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, rol grup adalah sangat penting, disamping bahwa di-daerah² teror putih ini pekerdjaan organisasi dari Partai harus benar² disesuaikan dengan keadaan setempat.

Dari beberapa laporan dapat diketahui bahwa pernah ada kesalahan jang serius dalam penggrupan, jaitu jang dilakukan hanja dari belakang medja. Nama² anggota² didaerah Resort dikumpulkan oleh Comite Resort, di-bagi² menurut apa jang dikiranja baik dan sesudah selesai pembagian dari belakang medja itu maka dianggap selesailah penggrupan, dan sampailah waktunja untuk dilaporkan kepada Comite atasan. Kawan² jang bekerdja sematjam ini, jaitu kawan² formalis ini, samasekali tidak mengorganisasi anggota² Partai. Sebaliknja, mereka membikin ketjewa massa anggota jang ditelantarkan pengorganisasiannja sehingga tidak mungkin terpimpin, dan mereka telah berbuat memberikan laporan jang tidak benar kepada Comite² atasan. Djika masih ada „organisator² medja" demikian ini hendaklah segera diachiri.

Dalam Plan Organisasi termasuk djuga soal menggiatkan pemasukan uang iuran dari anggota dan tjalonanggota kepada Comite jang bersangkutan, dan penjetoran iuran jang diterima kepada CSS², dan oleh CSS² langsung dikirimkan ke CDB² dan ke CC, sesuai dengan ketentuan² pembagian. Plan ini sudah mulai berdjalan, tetapi masih sangat belum merata. Pengertian bahwa sumber keuangan Partai jang utama adalah dari anggota², masih harus lebih banjak ditanamkan. Umumnja, djika grup sudah benar² hidup, pemasukan iuran dan sokongan² sukarela atau sokongan² wadjib tidak mengalami kesukaran. Apa jang sudah kita mulai ketika kampanje pengumpulan uang untuk dana pemilihan Parlemen jang pertama, jaitu apa jang kita namakan „pohon Partai", „kebun Partai", „ajam Partai", „kambing Partai", dsb. harus diteruskan dan diluaskan sehingga lambatlaun mendjadi tradisi didalam Partai kita. Ini tidak hanja merupakan sumber keuangan bagi Partai, tetapi djuga membantu dalam menebalkan semangat Partai, tidak hanja bagi anggota jang bersangkutan, tetapi djuga bagi orang² disekitarnja, terutama keluarganja.

Dimpos Manalu

Pada waktu belakangan ini kita sangat djarang dan tidak teratur mengorganisasi kompetisi² untuk memperbesar prestasi kerdja Partai. Dalam hubungan dengan pelaksanaan Plan Tiga Tahun, kompetisi² harus kita adakan lagi, kompetisi² antara daerah dengan daerah, antara kesatuan dengan kesatuan dan antara anggota dengan anggota.

Kawan², dalam Sidang² Pleno CC kita jang sudah² kita telah menekankan tentang pentingnja pimpinan kolektif kalau kita mau mendapat sukses dalam pekerdjaan kita. Pada umumnja Comite² Partai kita sudah menjelenggarakan pimpinan kolektif. Dalam menjelenggarakan pimpinan kolektifnja anggota² Comite telah melakukan diskusi² jang kritis, telah melakukan kritik dan selfkritik. Mereka sudah mengutjapkan „selamat datang" pada tiap² kritik, kritik dan selfkritik sudah tidak lagi mendjadi „barang musiman" dan kritik sudah mengenai sasarannja jang terpenting, jaitu pekerdjaan masing² anggota kolektif dan pekerdjaan pimpinan kolektif sebagai kesatuan. Pendeknja, Comite² pada umumnja sudah bekerdja menurut apa jang kita andjurkan. Tetapi kenapa pimpinan² kolektif itu masih ada jang membikin kesalahan² jang serius dalam memimpin pelaksanaan Plan Tiga Tahun? Djika kita selidiki, maka akan kita ketahui bahwa pimpinan kolektif jang membikin kesalahan serius itu adalah pimpinan kolektif jang subjektif, jang tidak realis dan tidak berdasarkan garis massa. Dalam mereka menetapkan djatah untuk Plan daerahnja mereka memang sibuk mengadakan diskusi², sibuk mengadakan ber-matjam² rapat. Tetapi dalam diskusi² mereka tidak memperhitungkan atau sangat kurang memperhitungkan fikiran² dan kemampuan² daripada kader² bawahan dan daripada massa anggota. Padahal, bukankah kader² bawahan dan massa anggota ini jang langsung akan mendjadi pelaksana Plan? Makaitu tidaklah salah djika kita namakan bahwa pimpinan kolektif kawan² itu adalah subjektif, adalah tidak realis. Djadi, untuk suksesnja Plan dan untuk suksesnja semua pekerdjaan massa daripada Partai, pimpinan kolektif dan garis massa tidak boleh di-pisah²kan, harus dihubungkan setjara erat sehingga mendjadi perpaduan jang laras. Inilah pimpinan kolektif jang objektif dan realis, pimpinan kolektif jang sempurna dan kuat, jang kemampuan dan kewibawaannja akan terus meningkat.

Demikian beberapa kesimpulan mengenai pelaksanaan bagian organisasi dari Plan Tiga Tahun Pertama. Pokoknja, plan ini sudah mulai dilaksanakan sebagaimana jang kita inginkan, dengan disanasini ada pengalaman² istimewa jang harus dikembangkan, ada kesalahan² jang harus diperbaiki dan ada saran² baru agar pelaksanaan selandjutnja lebih baik.

Dalam hubungan dengan pelaksanaan bagian pendidikan dari Plan Tiga Tahun Pertama, kita perlu ber-kali² lagi menekankan, bahwa pelaksanaan plan ini harus sesuai dengan keputusan Sidang Pleno ke-IV CC. Oleh karena itu harus sungguh² dipeladjari dokumen² Sidang Pleno ke-IV CC, terutama jang berhubungan dengan soal pendidikan. Saja kemukakan hal ini, kawan², karena saja mempunjai kesan bahwa hal ini belum tjukup difahamkan, dan kesan ini saja dapat dari kenjataan² bahwa masih ada kawan² kita jang bertanggungdjawab dengan mudah sadja mengubah tanpa alasan jang kuat ketentuan² jang diputuskan Sidang Pleno ke-IV CC itu mengenai pendidikan, misalnja ketentuan tentang urutan matapeladjaran untuk Sekolah² Partai dan Kursus² Partai, tjara² menjelenggarakan Sekolah dan Kursus Partai, tjara mengadjar, tjara beladjar dan sebagainja. Djadi, walaupun sudah ada plan dan kawan² jang bersangkutan mengatakan bahwa mereka melaksanakan plan pendidikan, tetapi pada hakekatnja mereka bekerdja seperti waktu² sebelum ada plan. Baiknja, setelah didiskusikan dengan kawan² jang bersangkutan, segera kawan² tersebut mengetahui kesalahan²nja dan kembalilah mereka kepada keputusan Sidang Pleno ke-IV CC dan kepada plan jang sesungguhnja.

Kawan², soal pendidikan didalam Partai boleh dikatakan sama tuanja dengan umur Partai kita sendiri. Sedjak Partai kita berdiri sudah ada pendidikan didalam Partai. Tetapi pendidikan jang pernah ada itu tidak tjotjok dengan kebutuhan Partai kita, baik untuk waktu dulu dan apalagi djika sistim pendidikan itu kita pakai untuk waktu sekarang. Djadi, soalnja sekarang bukannja mengadakan pendidikan didalam Partai, tetapi mengadakan pendidikan jang isi dan sistimnja jang tjotjok, jang sesuai dengan kebenaran, kemampuan dan kebutuhan Partai kita sekarang. Kita harus mensistimatiskan pendidikan Partai kita agar tertjapai apa jang mendjadi tudjuan kita dengan pendidikan, jaitu supaja pendidikan merupa-

Dimpos Manalu

kan persiapan ideologis, agar tugas² Partai dapat dilaksanakan dengan baik, dengan tanpa rintangan² ideologi.

Dalam Laporan Umum jang disahkan oleh Sidang Pleno ke-IV CC mengenai pendidikan antara lain dikatakan, bahwa *„pendidikan didalam Partai harus dipandang sebagai persiapan ideologis dan sebagai usaha untuk menghilangkan rintangan² ideologis agar tugas Partai dapat dilaksanakan dengan baik"*. Djika kawan² kita ingat akan peringatan ini, maka tidak akan mudah kawan² kita mengambil langkah, misalnja untuk lebih dulu mengadjarkan tentang Pembangunan Partai kepada grup² mahasiswa Komunis dan kemudian menugaskan mahasiswa² ini mengadjar tentang Pembangunan Partai kepada kader² bawahan dari Partai, tanpa terlebih dulu memberi peladjaran kepada mereka tentang Sedjarah Perkembangan Masjarakat dan tentang Soal² Pokok Revolusi Indonesia. Ini logis, karena bagaimana kawan² mahasiswa itu akan sungguh² mejakini tentang pentingnja Pembangunan Partai, djika mereka belum diberi kejakinan bahwa revolusi pada umumnja adalah satu keharusan, adalah sesuatu jang logis, bahwa revolusi Indonesia adalah djuga suatu keharusan, djuga sesuatu jang logis, dan djika mereka belum mengetahui tentang taktik dan perspektif daripada revolusi Indonesia? Untuk mengetahui dan mejakini logika dari revolusi pada umumnja, logika dari revolusi Indonesia pada chususnja, mereka harus diberi peladjaran tentang Sedjarah Perkembangan Masjarakat, sedangkan untuk mengetahui taktik² dan perspektif dari revolusi Indonesia mereka harus diberi peladjaran tentang Soal² Pokok Revolusi Indonesia. Malahan akan lebih baik lagi kalau mereka djuga terlebih dulu diberi peladjaran tentang Front Persatuan Nasional, jaitu peladjaran tentang taktik Partai jang terpenting sekarang, sebelum mereka mendapat peladjaran dan diberi tugas untuk mengadjar tentang Pembangunan Partai. Ini hanja sebagai tjontoh sadja, untuk menundjukkan betapa pentingnja kita memegang teguh urutan dari matapeladjaran untuk Sekolah Partai, Kursus Partai dan Sekolah Politik.

Walaupun disana-sini terdapat kesalahan² besar atau ketjil dalam tjara² melaksanakan Plan Pendidikan, tetapi laporan² dari hampir semua Comite Daerah Besar dan Comite Pulau menundjukkan bahwa ada gelombang naik dalam semangat beladjar dan

kegiatan beladjar didalam Partai sesudah Plan Pendidikan mulai dilaksanakan. Plan Pendidikan telah membuka halaman baru dalam sedjarah Partai kita. Sudah sedjak sekarang dapat kita bajangkan bahwa pelaksanaan jang baik dari Plan Pendidikan akan mendatangkan pengaruh jang luarbiasa pada perkembangan Partai kita, pada usaha membulatkan fikiran didalam Partai kita, pada politik Partai dan tjara bekerdja Partai. Semuanja ini akan mendatangkan sukses² baru bagi Partai dan bagi Rakjat Indonesia dalam perdjuangan untuk melaksanakan Konsepsi Presiden Sukarno sepenuhnja dan selandjutnja dalam perdjuangan untuk menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja.

Plan Pendidikan tidak hanja akan memperkuat ideologi Partai, tidak hanja akan memperbaiki pekerdjaan politik dan organisasi Partai, pendeknja tidak hanja akan dapat memenuhi kebutuhan² praktis dari Partai pada waktu sekarang, tetapi djuga membikin makin berpadunja teori Marxisme-Leninisme dengan praktek revolusi Indonesia. Perpaduan antara Marxisme-Leninisme dengan praktek revolusi Indonesia akan merupakan sumber jang melahirkan ahli² teori dan ahli pendidik jang baik dari Partai kita. Ini merupakan faktor jang penting dalam usaha menjempurnakan Partai kita.

Pada umumnja perhatian pada pendidikan untuk kader² tinggi dan kader² menengah dari Partai sudah agak tjukup. Tetapi pada penjelenggaraan pendidikan untuk massa anggota dan tjalonanggota, djadi pada penjelenggaraan Sekolah Politik, masih djauh daripada tjukup. Massa anggota dan tjalonanggota masih banjak jang merasa belum dipenuhi keinginannja dalam soal pendidikan, padahal hasrat untuk mendapat pendidikan dari Partai adalah sangat besar dikalangan massa anggota dan tjalonanggota. Oleh karena itu, disamping meneruskan dan menjempurnakan pendidikan untuk kader² tinggi dan kader² menengah dari Partai, di-waktu² jang akan datang harus dipentingkan soal mendidik seluruh anggota dan tjalonanggota Partai. Terbitnja buku Tuntunan Untuk Pemberantasan Butahuruf serta Obor Pemberantasan Butahuruf jang ditulis oleh sebuah komisi jang dibentuk oleh Sidang Pleno ke-IV CC adalah sangat penting artinja bagi usaha raksasa mendidik massa tjalonanggota jang butahuruf, jang djumlahnja tidak sedikit. Buku ini djuga penting untuk memperbesar kegiatan Partai memberantas

Dinpos Manah

butahuruf dikalangan massa luar Partai.

Demikian beberapa kesimpulan tentang Plan Tiga Tahun Pertama mengenai Organisasi dan Pendidikan. Pokoknja, Plan ini sangat berguna bagi Partai kita, bagi perluasan dan pendalaman pertumbuhannja.

* * *

Kawan², dengan Partai jang makin meluas dan makin ditjintai oleh massa Rakjat karena politiknja jang tepat dan karena amalnja kepada Rakjat, dengan kader² jang terdidik tentang prinsip² fundamentil Marxisme-Leninisme, tentang pendirian klas buruh, tentang pandangan dan metode klas buruh, kita jakin bahwa Partai kita akan mampu bekerdja dengan baik untuk Rakjat dan tanahair, untuk perdamaian dan kemanusiaan. Dengan adanja Partai jang demikian di-tengah² Rakjat Indonesia jang besar dan heroik, kita jakin bahwa Konsepsi Presiden Sukarno jang sekarang belum dilaksanakan sepenuhnja, pada waktunja ia pasti akan dapat dilaksanakan, sebagai lompatan jang besar dalam perdjuangan untuk menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja.

Marilah terus kita perkuat persatuan didalam Partai kita, sesuatu jang selama ini dan jang seterusnja akan mendjadi kebanggaan kita semua, sjarat untuk makin teguhnja persatuan klas buruh, persatuan massa Rakjat pekerdja, persatuan seluruh Rakjat dan persatuan seluruh nasion Indonesia. Persatuan inilah sendjata kita jang ampuh untuk mengubah imbangan kekuatan masjarakat sebagai sjarat jang tidak boleh tidak untuk pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno, djembatan emas untuk penjelesaian tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja, untuk haridepan jang lebih baik dan lebih indah bagi Rakjat dan tanahair Indonesia. Zaman bersama kita!

Tulisan *Masjarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia,* jaitu tulisan tentang „pengenalan diri" Indonesia, jang disusun oleh Kawan D.N. Aidit, telah disahkan oleh Sidang Pleno ke-V CC PKI, bulan Djuli 1957, sebagai diktat mengenai „Soal2 Pokok Revolusi Indonesia" dan merupakan bahan peladjaran bagi Sekolah2 Partai.

Tulisan ini tidak hanja memberi pengetahuan dan pengertian jang benar dan lebih mendalam tentang Indonesia dan masjarakat Indonesia, tetapi djuga kedjelasan tentang masalah2 jang penting dan pokok dari revolusi Indonesia, kechususan2 revolusi Indonesia serta perspektifnja. Ia merupakan sendjata ditangan kader PKI dan semua kaum revolusioner Indonesia untuk memahami masalah2 strategi dan taktik2 pokok dari revolusi Indonesia.

Dimpos Manalu

MASJARAKAT INDONESIA DAN REVOLUSI INDONESIA

Kongres Nasional Ke-V Partai Komunis Indonesia (PKI) jang dilangsungkan dalam bulan Maret 1954 sudah memberi djawaban mengenai semua masalah penting dan pokok dari revolusi Indonesia. Tetapi sampai sekarang masih banjak anggota Partai jang belum mengetahui dengan djelas apa jang dimaksudkan dengan „masalah² penting dan pokok dari revolusi Indonesia".

Soal² pokok revolusi kita penting diketahui. Mengetahui soal² pokok revolusi Indonesia berarti mengetahui sasaran² dan tugas² revolusi Indonesia, kekuatan² jang mendorongnja, karakternja dan perspektifnja. Untuk mengetahui soal² pokok revolusi Indonesia, per-tama² kita harus mengetahui masjarakat Indonesia.

BAB I

INDONESIA DAN MASJARAKATNJA

Fasal 1

Kedudukan Geografis Indonesia

Indonesia adalah negeri kepulauan jang terdiri dari ribuan buah pulau ketjil dan besar, dan meliputi daerah daratan seluas hampir dua djuta km² (luasnja Indonesia kira² 57 × Nederland, 5 × Djepang, 3½ × Perantjis, 2 × Pakistan). Pulau² jang pokok ada 5 buah, jaitu Djawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Barat. Djarak antara udjung Indonesia jang paling Timur sampai udjung jang paling Barat kira² sama dengan djarak antara pantai Timur dan pantai Barat Amerika Serikat, atau kira² sama dengan djarak antara Kaukasus dan Inggeris.

Indonesia dikelilingi oleh tiga lautan besar, jaitu samudera Pasifik, sámudera India dan lautan Tiongkok Selatan. Ia merupakan djembatan antara benua Asia dan benua Australia. Dari kenjataan² ini mudah difahamkan mengapa Indonesia sedjak ribuan tahun jang lalu sampai sekarang memegang peranan jang penting dalam lalulintas dunia, dalam ekonomi dan dalam politik dunia.

Sebagai negeri katulistiwa (equator), iklim Indonesia adalah tropik. Temperatur (suhu) Indonesia rata² 26 deradjat Celsius (Djakarta rata² 26,4, Bandung 22,6, Semarang 26,9, Ambon 27,2 deradjat C). Sebagai negeri tropik di Indonesia hanja ada dua musim, jaitu musim kemarau dari bulan Maret sampai bulan September, dan musim hudjan dari bulan September sampai bulan Maret. Turunnja hudjan tidak sama banjaknja, disatu daerah lebih banjak dari daerah jang lain.

Pulau² Indonesia tanahnja sangat subur. Pulau Djawa termasuk jang paling subur didunia. Oleh karena itu sudah sedjak zaman dahulukala perladangan dan persawahan banjak dilakukan. Gunung dan bukit, lembah dan ngarai, sungai dan airterdjun banjak terdapat di Indonesia. Didalam bumi Indonesia terdapat banjak matjam pelikan. Didalam lautan Indonesia terdapat banjak kekajaan. Ditanah jang subur dan kaja ini, jang lalulintasnja dipermudah oleh lautan² dan sungai², nenekmojang bangsa Indonesia berkembang biak.

Indonesia termasuk salahsatu negeri jang besar, dilihat dari sudut luas negerinja, maupun dilihat dari sudut besarnja djumlah penduduk. Sebagai negeri jang kaja dan sebagai negeri kepulauan jang menghubungkan 2 benua serta dilingkungi oleh 3 lautan besar, maka ada hal² jang menguntungkan dan jang merugikan Indonesia sekarang.

Indonesia diuntungkan oleh kedudukan geografisnja, karena Indonesia tidak mungkin terisolasi dari dunia ramai. Indonesia mempunjai sjarat² untuk sepandjang masa mendjadi negeri jang ramai dikundjungi orang. Indonesia mempunjai sjarat² jang tidak terbatas untuk mempunjai perhubungan laut jang luas didalamnegeri dan dengan luarnegeri.

Tetapi difihak lain, djika Indonesia sendiri bukan negeri jang kuat, adalah sangat sulit mentjegah desakan² dari kaum penjerang jang sangat berkepentingan untuk menguasai Indonesia jang kaja-

raja. Pantai² Indonesia jang sangat pandjang sukar didjaga dari serbuan² militer asing dan dari kaum penjelundup.

Pengalaman Revolusi Agustus 1945 mengadjar kita, bahwa untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia adalah sangat penting rol dari peperangan gerilja. Indonesia tidak memenuhi semua sjarat jang sangat diperlukan untuk peperangan gerilja, misalnja tidak tjukup mempunjai daerah² luas jang didiami manusia, tidak mempunjai daerah² pegunungan serta hutan² jang luas dan djauh letaknja dari kota² dan djalan² perhubungan. Keadaan mendjadi lebih sukar lagi karena sekarang disekitar Indonesia berderet benteng² imperialis jang berupa tanah² djadjahan atau setengah djadjahan. Disebelah Utara ber-deret² Malaja, Singapura, Muangthai, Vietnam Selatan, Serawak, Kalimantan Utara dan Filipina. Disebelah Selatan ada Australia dan ada pulau Christmas dan kepulauan Cocos jang dikuasai oleh Inggeris. Disebelah Timur ada Irian Timur jang dikuasai oleh Australia, sedangkan Irian Barat masih sepenuhnja dikuasai oleh kaum imperialis Belanda. Indonesia sekarang tidak berbatasan dengan negeri jang sudah bebas samasekali dari kekuasaan imperialis. Semua kenjataan ini lebih mengharuskan kaum revolusioner Indonesia untuk menempuh djalannja sendiri dalam menjelesaikan revolusi Indonesia.

Peladjaran jang dapat kita tarik dari pengalaman² Revolusi Agustus 1945 jalah, bahwa di Indonesia dapat dilakukan peperangan gerilja. Tetapi, karena negeri kita tidak memenuhi semua sjarat untuk peperangan gerilja, maka revolusi kita pada waktu itu akan lebih berhasil djika seandainja dapat dikombinasi setjara baik tiga bentuk perdjuangan, jaitu perdjuangan gerilja di-desa² (terutama terdiri dari kaum tani), aksi² revolusioner oleh kaum buruh di-kota² dan pekerdjaan jang intensif dikalangan tenaga bersendjata musuh.

Fasal 2

Bangsa Indonesia

Penduduk Indonesia pada tahun 1955 berdjumlah lebih dari 84 djuta. Walaupun penduduk Indonesia terdiri dari banjak sukubangsa, mereka semua merupakan kesatuan, jaitu bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia termasuk bangsa besar jang ke-6 didunia (1. Tiongkok, 2. India, 3. Uni Sovjet, 4. Amerika Serikat, 5. Djepang).

Penduduk Indonesia tersebarnja sangat tidak rata. Pulau *Djawa*, jaitu pulau jang terketjil dari „Lima Besar" (Kalimantan, Irian Barat, Sumatera, Sulawesi dan Djawa), berpenduduk kira² 54 djuta (sudah termasuk penduduk Madura). *Sumatera,* jang hampir 3½ × Djawa besarnja berpenduduk kira² 12 djuta. *Sulawesi* jang 1½ × Djawa besarnja berpenduduk kira² 6 djuta. *Kalimantan* (bagian Indonesia) jang 4 × Djawa besarnja, hanja berpenduduk kira² 3,5 djuta. Selainnja tersebar di-pulau² Nusatenggara (5,5 djuta) dan di-pulau² Maluku (0,7 djuta).

Pulau Djawa termasuk salahsatu tempat didunia jang paling padat penduduknja, jaitu kira² 393 orang tiap² km persegi (tahun 1952), sedang ditempat jang terpadat sampai mentjapai 460 orang tiap² km persegi (di Djawa Tengah).

Di Indonesia terdapat lebih dari 100 sukubangsa, mulai jang berdjumlah puluhan djuta sampai jang hanja beberapa ribu.

Diantara sukubangsa² itu terdapat sukubangsa² Djawa, Sunda, Madura, Melaju, Atjeh, Minangkabau, Batak, Palembang, Lampung, Dajak, Bandjar, Minahasa, Bugis, Toradja, Makasar, Bali, Sasak, Maluku, Timor, Sabu, sukubangsa² di Irian Barat dan banjak lagi. Diantara sukubangsa² ini, sukubangsa Djawa adalah jang terbesar, kemudian menjusul Sunda, Madura, Minangkabau, Batak dll. Sukubangsa Melaju adalah sukubangsa jang sudah sedjak lama paling luas daerah tersebarnja, jaitu dipesisir Timur pulau Sumatera, di-pulau² antara Sumatera dan Kalimantan dan diseluruh pesisir Kalimantan. Tiap² sukubangsa mempunjai bahasanja sendiri², disamping semuanja menerima bahasa Indonesia, jang dasarnja adalah bahasa Melaju, sebagai bahasa persatuan. Tingkat kebudajaan sukubangsa² ini tidak sama, tetapi semuanja mempunjai sedjarah jang sudah tua.

Djadi, bangsa Indonesia adalah bangsa jang terdiri dari banjak sukubangsa, banjak bahasa, dan banjak tingkat kebudajaan, tetapi mereka berasal dari satu rumpun bangsa, bahasa dan kebudajaan. Mereka terpetjahbelah untuk sementara waktu, tetapi dalam proses perdjuangan untuk kemerdekaan nasional dan untuk Indonesia

Dinas Manajemen

Baru mereka bersatu kembali. Semua sukubangsa menganggap Indonesia sebagai tanahairnja, merasa berkebangsaan Indonesia, menganggap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan menganggap adanja satu kebudajaan Indonesia disamping kebudajaan sukubangsa². Jang sangat menarik jalah bahwa bahasa Indonesia bukan bahasa jang berasal dari sukubangsa jang terbesar. Dalam sedjarah bahasa ini tidak pernah mendjadi bahasa kolonisator, sebaliknja ia adalah bahasa jang mempersatukan lebih dari 100 sukubangsa. Bahasa Indonesia adalah bahasa jang digembleng dalam perdjuangan untuk kemerdekaan nasional, ia adalah bahasa liberator.

Disamping warganegara² jang berasal dari ber-bagai² sukubangsa, di Indonesia terdapat djuga beberapa djuta warganegara dari keturunan asing seperti keturunan Tionghoa, Eropa dan Arab, masing² mempunjai bahasa dan kebudajaan tersendiri disamping mengakui bahasa dan kebudajaan Indonesia sebagai kepunjaan sendiri.

Perkembangan ekonomi diberbagai pulau dan daerah adalah tidak sama. Hal ini nampak dalam soal industri, pertanian, apalagi dalam transpor, dimana dipulau Djawa telah terdapat djaring² djalan kereta-api dan mobil jang luas, sedangkan di-pulau² lain masih sedikit atau samasekali belum ada. Malahan diberbagai pulau dan daerah masih terdapat sisa² sistim ekonomi jang lebih terbelakang. Berdasarkan perbedaan keadaan ekonomi ini, dinegeri kita terdapat tingkat² dan tjiri² perkembangan masjarakat jang tidak sama.

Dilihat dari sudut sedjarah ribuan tahun jang lalu bangsa Indonesia sekarang bukanlah penduduk asli Indonesia. Kira² 1.500 tahun sebelum Masehi atau kira² 3.500 tahun jl. bangsa Indonesia jang sekarang ini belum berada di Indonesia, mereka masih bertempattinggal di India Belakang (sekarang Indotjina, Muangthai, Birma) dan pada waktu itu namanja „bangsa Mon Khmer", jang kini masih terdapat di Tongkin, Muangthai dan Kambodja. „Bangsa Mon Khmer" adalah salahsatu daripada tjabang „bangsa Austro-Asia" (Asia Selatan), tjabang² lainnja jalah „bangsa Kasi" (Asam), „bangsa Munda" (India) dan „bangsa Santali" (India). Bangsa Indonesia adalah salahsatu dari 4 tjabang „bangsa Mon

Khmer" (tjabang² lainnja: Melanesia, Polinesia dan Mikronesia). Ke-empat tjabang dari „bangsa Mon Khmer" ini dinamakan „bangsa Austronesia" (bangsa pulau² Selatan). „Bangsa Mon Khmer" bukanlah penghuni asli India Belakang, mereka adalah pendatang dari Junan (Tiongkok Selatan) dan ketika masih di Junan mereka termasuk „bangsa Austria" (bangsa Selatan).

Djadi, bangsa Indonesia jang sekarang ini walaupun terbagi dalam banjak sukubangsa (termasuk jang di Irian Barat dan Halmahera Utara, jang etnologis tergolong „bangsa Melanesia" tetapi politis tergolong Indonesia) adalah bangsa jang berasal dari satu rumpun (rumpun „bangsa Austria", kemudian rumpun „bangsa Austro-Asia" dan kemudian lagi rumpun „bangsa Mon Khmer") jang mempunjai sedjarah jang sangat pandjang dan mengalami perdjuangan jang berat dalam peperangan dan dalam melawan bentjana alam.

Kira² 3.500 tahun jang lalu nenekmojang bangsa kita masih mengembara di India Belakang, mereka bertjotjoktanam di-lembah² sungai Mekong (Indotjina), Irawadi dan Salwin (Birma). Desakan² jang kuat dari bangsa² jang datang dari Utara dan Barat jang menduduki tanah² mereka, jang merampas dan mengatjau ketenteraman hidup mereka, memaksa mereka harus memilih salahsatu: diperlakukan sebagai budak atau mentjari kediaman lain. Mereka berpendirian lebih baik menjingkir dan hidup merdeka daripada diperbudak.

Karena peperangan dan sebab² lain, seperti kekurangan makanan, bentjana alam, bandjir besar dan penjakit menular, dengan perahu² bersajap jang sederhana nenekmojang bangsa Indonesia meninggalkan daratan Asia, makin lama makin djauh. Mereka mengerti tentang pelajaran, tegap² tubuhnja dan pemberani². Mereka mengarungi samudera² raja, ada jang sampai ke Madagaskar, Filipina, Kalimantan, Sumatera dan pulau² Indonesia lainnja. Dengan ber-angsur² dan ber-bondong² mereka berpindah kepulau² Selatan, achirnja seluruh pantai Indonesia dari udjung Barat sampai keudjung Timur mereka duduki. Mereka se-akan² balatentara jang menang dan menduduki daerah baru. Ditempat jang baru mereka bebas memilih tempat bertjotjoktanam, berburu dan meneruskan kebiasaan berlajar. Rumah² mereka dirikan sepan-

Digitized by Universitas Sebelas Maret

djang pantai jang mereka duduki.

Tetapi pulau² Indonesia tidaklah kosong ketika nenekmojang bangsa kita tiba. Mereka mendjumpai penghuni „asli". Penghuni „asli" ini tergolong ras² Negrito dan Wedda jang sudah ribuan tahun bertempat-tinggal dikepulauan Indonesia. Penghuni „asli" ini tidak suka didesak oleh pendatang² dari Utara, mereka mula² mengadakan perlawanan². Nenekmojang bangsa kita, disamping terpaksa harus mentjari penjelesaian dengan penghuni „asli" untuk mendapat tempat-tinggal dan nafkah, mereka djuga harus berdjuang melawan binatang² buas, airbah dan lain². Dibanding dengan penghuni „asli" persendjataan nenekmojang bangsa kita sudah lebih sempurna, mereka sudah menggunakan sendjata tadjam jang terbuat dari besi (pisau, lembing, busur panah). Penghuni „asli" hanja bersendjatakan sumpit dengan panah ketjil jang berbisa. Nenekmojang bangsa kita sudah pandai bertjotjoktanam, sedangkan penghuni „asli" hidupnja tergantung dari hasil hutan. Setelah ber-abad² lamanja penghuni „asli" dan kaum pendatang dapat hidup bersama, sedangkan jang tetap tidak mau mentjampurkan diri lari ke-tempat² jang terasing. Pendeknja, nenekmojang bangsa kita mendapatkan tanahair Indonesia tidak begitu sadja, mereka harus berdjuang mati²an, dengan gagahberani mereka harus mengarungi samudera raja, melawan binatang² buas, airbah dan lain².

Bangsa Indonesia jang berasal dari satu rumpun bangsa, satu rumpun bahasa dan kebudajaan ketika masih didaratan Asia, setelah sampai di Indonesia mereka ter-pisah² menurut pulau² dan di-pulau² di-pisah²kan lagi oleh gunung², sungai² dan rawa² jang besar, mereka mendjadi terisolasi satu dengan jang lainnja. Isolasi alam jang ber-abad² menjebabkan mereka tumbuh menurut keadaan sendiri², tumbuh mendjadi sukubangsa² dengan bahasa dan kebudajaannja sendiri.

Sesampainja dikepulauan Indonesia nenekmojang bangsa kita meneruskan tjarahidup seperti ketika mereka masih berada didaratan Asia, jaitu hidup ber-kelompok², mendirikan rumah² diatas tiang berdjadjar ber-hadap²an, bertjotjoktanam, berlajar dan memburu. Perkakas² produksi mereka jang sangat primitif mengharuskan adanja kerdja jang kolektif. Alat² produksi adalah milik bersama, tidak ada penghisapan atas manusia oleh manusia dan semua

penduduk berhak atas kekajaan alam. Pada waktu itu belum ada klas² dalam masjarakat. Mereka memilih pemimpin² desanja, mereka belum mengenal radja jang ditetapkan dari atas dan belum mengenal kekuasaan negara. Negara tidak dibutuhkan pada waktu itu. Ketertiban masjarakat ketika itu diatur berdasarkan kebiasaan, adat-istiadat, kewibawaan, penghargaan dan kekuasaan jang dimiliki oleh pemimpin² atau pengetua². Nenekmojang bangsa kita pada waktu itu hidup dalam masjarakat komune primitif. Restan² dari masjarakat komune primitif sampai sekarang masih bisa kita temukan dinegeri kita, misalnja dalam bentuk milik bersama desa atas tanah, bentuk kebiasaan gotongrojong, sisa² gens matriarkal (seperti di Minangkabau dan pulau Enggano), sisa² gens patriarkal (seperti di Batak dan Maluku), dll.

Dengan makin madjunja perkakas produksi dan dengan makin meningkatnja tenaga produktif, maka hubungan produksi jang lama sudah menghalangi perkembangan lebih landjut dari tenaga produktif. Kerdjasama setjara komune primitif sudah tidak tjotjok lagi dengan kemadjuan perkakas² produksi, pembagian kerdja kemasjarakatan timbul dan berkembang. Dengan demikian, maka mau tidak mau hakmilik bersama atas alat² produksi perlu diganti dengan hakmilik perseorangan. Ternak dan perkakas produksi lainnja mendjadi milik perseorangan. Tetapi sawah dan tegalan, hutan² dan padang² rumput serta pengairan masih milik bersama.

Hakmilik perseorangan atas alat² produksi tertentu dan atas kekajaan perseorangan menimbulkan nafsu untuk mengumpulkan alat² produksi dan kekajaan se-banjak²nja dari mereka jang mempunjai kesempatan untuk itu, jaitu mereka jang berkuasa (pengetua² jang dibantu oleh panglima² perang dan pendjabat² keagamaan). Milik² umum didjadikan milik sendiri oleh jang berkuasa. Djuga timbul nafsu untuk mengadakan expansi, mengadakan peluasan daerah, menaklukkan desa² lain dan dengan demikian timbullah gabungan² desa jang dikepalai oleh satu pengetua. Peperangan berlangsung dengan tiada henti²nja, karena tiap² pengetua desa (daerah ketjil) ingin meluaskan daerahnja agar dapat lebih banjak menguasai alat produksi dan kekajaan. Mereka jang ditawan dalam peperangan tidak lagi dibunuh, tetapi didjadikan budak dan dipaksa bekerdja agar hasil pekerdjaannja dapat dimiliki oleh

Limbos Manalu

golongan jang berkuasa untuk menambah kekajaannja. Mereka jang tenggelam dalam hutang dan tidak dapat membajar hutangnja djuga didjadikan budak. Tuanbudak² bebas berbuat segala sesuatu terhadap budak²nja, termasuk bebas memperdjual-belikan dan membunuh budak²nja. Nenekmojang bangsa kita dengan demikian memasuki masjarakat perbudakan.

Perpetjahan dalam masjarakat perbudakan makin lama makin djelas antara dua klas pokok dalam masjarakat, jaitu klas tuanbudak dan klas budak, antara jang berkuasa dengan jang dikuasai. Dengan demikian mulailah perdjuangan klas dalam masjarakat nenekmojang bangsa kita. Kekuasaan pengetua desa makin lama makin besar sampai ia berhak menundjuk penggantinja sendiri (tadinja pengetua dipilih). Daerah kekuasaan dari pengetua² ini makin lama makin luas, desa jang dikuasainja dan keluarga jang dibawah kekuasaannja makin bertambah banjak. Pengetua² jang sudah kaja ini kemudian hidup memisahkan diri dari Rakjat, mereka dengan keluarga dan pembantu²nja hidup menjendiri dan bermewah dalam keraton (ke-ratu-an) atau kedaton (ke-datu-an). Disamping sebagai pemimpin, mereka djuga dianggap sebagai wakil nenekmojang jang harus dihormati dan ditaati. Karena adanja perlawanan² dari fihak budak, kaum penguasa budak membutuhkan alat untuk menindas perlawanan budak dan untuk menguasai budak. Dengan demikian lahirlah untuk pertama kalinja negara, suatu aparat jang memberikan kekuasaan kepada kaum pemilik budak dan memungkinkan mereka untuk memerintah para budak. Restan² masjarakat perbudakan dinegeri kita masih terdapat diberbagai pulau pada awal abad ke-20 ini, misalnja tuanbudak boleh menjuruh bunuh budaknja tanpa hukuman, tuanbudak („mramba" seperti dipulau Sumba) berhak atas seluruh hasil dari tanah jang dikerdjakan oleh budak² („atta"), anak jang lahir dari perkawinan budak mendjadi kepunjaan tuanbudak.

Tetapi adanja negara ditangan tuanbudak untuk menindas para budak tidaklah menghentikan perlawanan para budak, baik setjara terang maupun tidak. Kerdja perbudakan jang pada mulanja mendorong kemadjuan tenaga produktif djika dibanding dengan kerdja setjara komune primitif, lama kelamaan terbukti tidak produktif lagi karena orang jang diperbudak tidak mungkin mempunjai minat

atas pekerdjaannja dan oleh karena itu tidak mungkin kreatif.

Sebagian dari orang² merdeka jang hidup dalam masjarakat perbudakan, jaitu kaum tani dan kaum keradjinan tangan, karena tidak tahan memikul beban untuk beaja peperangan, mendjadi bangkrut dan djatuh mendjadi budak; sebagian melarikan diri ke-tempat² pesisir atau ke-tempat² lain jang tidak bisa didjangkau oleh kekuasaan tuanbudak dan ikut ambil bagian dalam perlawanan terhadap negara budak. Peperangan jang terus-menerus untuk mempertahankan kekuasaan tuanbudak ditambah lagi oleh makin merosotnja produksi serta makin mundurnja perdagangan, menjebabkan kekuasaan perbudakan makin mendjadi lemah dan kebudajaan makin mundur.

Kemadjuan tenaga produktif sudah tidak sesuai lagi dengan hubungan produksi jang berdasarkan perbudakan, masjarakat perbudakan sudah mendjadi belenggu, oleh karena itu achirnja diganti dengan masjarakat feodal. Di Indonesia, terutama Djawa, nenekmojang bangsa kita memasuki masjarakat feodal kira² sedjak awal tarich Masehi. Dalam masjarakat feodal bekas² budak dapat mengerdjakan tanah „untuk sendiri" dengan sjarat harus menjetorkan sebagian jang penting dari hasil kepada tuantanah feodal. Disini pembagian antara hasil kerdja-perlu bagi kaum tani dan hasil kerdja-lebih jang dirampas oleh tuantanah feodal mendjadi djelas. Pertentangan jang pokok dalam masjarakat feodal jalah pertentangan antara tuantanah² feodal (radja², bangsawan², pendeta² dan punggawa²) dengan kaum tani. Kekuasaan negara ada ditangan tuantanah² feodal sedangkan jang dikuasai jalah kaum tani. Kedudukan kaum tani sedikit „bebas" djika dibanding dengan kaum budak, oleh karena itu kaum tani lebih produktif djika dibanding dengan kaum budak. Pada umumnja kaum tani sudah tidak bisa dibunuh setjara se-wenang². Kaum tani bukan budak, tetapi hamba dan bekerdja untuk tuan² feodal dalam bentuk bekerdja tjuma² (rodi, corvee), menjetorkan bagian jang sangat terbesar dari hasil panen.

Disamping kaum tani, djuga tukang² keradjinan tangan dan para pedagang termasuk klas² jang dikuasai dan dirintangi perkembangannja oleh feodalisme.

Sedjarah peradaban bangsa Indonesia menundjukkan, bahwa pertanian dan keradjinan tangan sudah berumur sangat tua, bahwa

Indonesia mempunjai filosof²nja sendiri, sardjana², seniman² besar, ahli² negara dan ahli² militernja sendiri. Lama sebelum Masehi, djadi djauh sebelum orang² Hindu datang, Indonesia sudah memproduksi setjara besar²an perkakas kerdja dan sendjata jang terbikin dari batu dan besi; kalender jang sangat dibutuhkan untuk mengatur pekerdjaan disawah djuga sudah dikenal, sistim irigasi sudah dilaksanakan. Dalam tahun 150 sesudah Masehi ahli ilmubumi dan ahli bintang² bangsa Junani dari abad ke-2 jang bernama Ptolomeus menulis, bahwa pulau Djawa sangat subur dan banjak menghasilkan emas (maksudnja barang² dari emas). Dari masa jang sama kita dapat membatja dalam kitab Hindu (Ramajana): *„periksalah dengan teliti Djawadwipa (Djawa) jang mempunjai tudjuh keradjaan, pulau emas dan pulau perak, dimana terdapat kemasan²"*. Tahun 132 dari Djawa dikirim utusan ke Tiongkok jang membawa tanda-keradjaan (zegel) dari emas. Kedudukan Indonesia jang berada diantara India dan Tiongkok membikin Indonesia sedjak permulaan Masehi mendjadi pusat perdagangan dunia. Diterangkan bahwa dalam tahun 414 sesudah Masehi bertolaklah dari Djawa Barat seorang saudagar Tionghoa dengan 200 orang lain lagi, kebanjakannja saudagar² Hindu, menudju Kanton.

Dari kenjataan diatas djelaslah bahwa sudah sedjak sebelum orang asing datang bangsa Indonesia adalah bangsa jang sudah berkebudajaan, djadi adalah tidak benar pendapat orang bahwa bangsa Indonesia baru berkebudajaan sesudah bangsa asing datang untuk mengadjar bangsa Indonesia. Kemudian, sesudah orang² Hindu datang, timbullah tjandi² jang megah dan indah, seni-tari dan seni-wajang jang tersohor. Semuanja ini adalah tjiptaan bangsa Indonesia sendiri, kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Kedudukan orang² Hindu hanja sebagai pembantu dan penasehat. Dari hasil² kebudajaan ini djelaslah bahwa sudah sedjak zaman dahulukala bangsa Indonesia tidak segan untuk menerima jang baik dari luar, jang berupa fikiran maupun bantuan para ahli tetapi dengan samasekali tidak melepaskan kepribadiannja.

Dalam perdagangan dan politik luarnegeri bangsa Indonesia mempunjai peranan jang aktif dan pandai menggunakan kedudukan geografis Indonesia jang sangat baik. Politik ini jang telah membikin Indonesia dimasa lampau mendjadi salahsatu pusat perdagangan dunia.

Tetapi bangsa Indonesia tidak hanja terkenal sebagai bangsa jang radjin dan ulet, jang beradab dan berkebudajaan, tetapi djuga terkenal sebagai bangsa pedjuang dan revolusioner. Sudah sedjak masih didaratan Asia bangsa Indonesia sudah biasa berdjuang. Ketika akan mendapatkan tanahair Indonesia mereka djuga harus berdjuang, demikian djuga untuk mempertahankan tanahairnja dari serangan² asing. Bangsa Indonesia adalah bangsa jang tjinta merdeka dan bertradisi revolusioner. Hal ini terbukti sampai abad² belakangan ini, sampai abad ke-20, sampai hari ini. Sedjarah Indonesia sedjak zaman dahulukala adalah sedjarah pemberontakan tani, sedjarah pahlawan², sedjarah revolusi², sedjarah Rakjat pekerdja. Abad ke-20 adalah abad dimana perdjuangan bangsa Indonesia mendapat bentuk² jang modern, jang pada hakekatnja tidak lain daripada melandjutkan tradisi revolusioner jang sudah belasan abad lamanja.

Fasal 3

Masjarakat Feodal

Walaupun Indonesia adalah negeri jang besar, mempunjai kedudukan geografis jang sangat baik, tanahnja sangat subur, penduduknja banjak, mempunjai sedjarah kebudajaan jang sudah tua, kaja dengan tradisi revolusioner, tetapi karena berlakunja sistim feodalisme jang sudah lebih dari 1.500 tahun lamanja, sampai sekarang Indonesia masih terbelakang dilapangan ekonomi, politik dan kebudajaan.

Sistim ekonomi dan politik didalam masjarakat feodal Indonesia adalah sbb.:

1. Dalam masjarakat feodal ekonominja adalah ekonomi alamiah, jaitu ekonomi dimana produksi dipakai untuk keperluan sendiri, bukan produksi untuk didjual atau untuk pasar. Sistim irigasi sudah madju sedjak permulaan zaman feodalisme dinegeri kita; ini dibuktikan oleh perintah radja Purnawarman dari keradjaan Taruma Negara (di Djawa Barat, meliputi kira² daerah Djakarta,

Universitas Warmadewa

Bogor dan Krawang) dalam abad ke-4 Masehi untuk membikin kanal sepandjang 15 km. Tukang² keradjinan tangan pasti sudah ada sedjak permulaan zaman ini, karena sudah sedjak sebelum orang Hindu datang orang² Indonesia sudah pandai membikin barang dari besi, tembaga, kulit penju, tanduk dan emas. Tetapi barang² ini bukan dibikin terutama untuk pasar. Pertukaran memang sudah ada, jaitu pertukaran diantara penduduk maupun dengan orang luar, misalnja antara radja dan pembesar² Indonesia lainnja dengan saudagar² dari Tiongkok, India dan lain², tetapi ini tidak bersifat menentukan.

2. Dalam masjarakat feodal jang berkuasa jalah klas feodal jang terdiri dari radja² jang bertempat-tinggal di keraton², bangsawan², pendeta² dan punggawa² (pegawai², amtenar²). Dasar kekuasaan kaum feodal jalah hakmilik mereka atas tanah dan hakmilik mereka jang terbatas atas kaum tani. Radja adalah kekuasaan tertinggi, ia berhak mengangkat pembesar² untuk pemerintahan pusat dan pembesar² lokal untuk mengurus angkatan perang, pengadilan, perbendaharaan negara dan gudang² makanan. Radja² hanja menguasai sebagian ketjil dari daerah kekuasaan setjara langsung, sedangkan selebihnja dikuasakan kepada orang² bangsawan lainnja dan punggawa² sebagai wakil radja. Wakil² radja inilah jang berkewadjiban mengumpulkan setoran hasil panen kaum tani untuk keperluannja sendiri dan untuk radja (Pemerintah Pusat). Disamping harus menjetorkan hasil panennja, kaum tani djuga diwadjibkan bekerdja dengan tjuma² (rodi, corvee) untuk para bangsawan dan punggawa, diwadjibkan bekerdja untuk membangun keraton² dan tjandi², untuk membikin saluran² dan bendungan², dan dalam keadaan perang harus mengerahkan segala jang ada padanja, djuga sampai mendjadi pradjurit untuk memenangkan peperangan. Sesudah ada tentara tetap, dan ini terutama terdjadi sesudah berdiri keradjaan² Islam, kaum tani djuga diwadjibkan mengongkosi tentara, jang digunakan terutama untuk menindas kaum tani dan djarang² untuk melawan serangan musuh dari luar. Atas nama radja para bangsawan dan punggawa mendjalankan kekuasaan pemerintahan, pengadilan dan pembuat undang². Untuk memperdalam „kebaktian" Rakjat kepada radja, rasa keagamaan dipertebal (misalnja radja Darmawangsa dari abad

ke-10 dan ke-11 memerintahkan kepada para pudjangga keraton untuk menterdjemahkan tjeritera² wajang dari Mahabarata jang berbahasa Sanskerta kedalam bahasa Djawa Kuno).

Djadi djelaslah, bahwa masjarakat feodal berdasarkan hakmilik tanah oleh tuantanah, sedangkan kaum tani bekerdja sebagai hamba (kaum tani „hanggaduh" tanah atau „memindjam" tanah untuk dikerdjakan). Tanah jang merupakan alat produksi pokok dalam masjarakat feodal dimiliki oleh tuantanah² feodal. Kaum tani-hamba memang berbeda dengan kaum budak jang dapat dibunuh begitu sadja. Kaum tani pada umumnja tidak dapat dibunuh seperti dalam zaman perbudakan, tetapi mereka bisa diperdjualbelikan.

Negara feodal adalah kepunjaan tuantanah² untuk mempertahankan exploitasi feodal mereka. Disamping menderita exploitasi feodal jang berat kaum tani djuga menderita tindasan² politik. Kaum tani tidak mempunjai hak politik dan tidak mempunjai kemerdekaan perseorangan, tuantanah berhak memukul dan menjiksa mereka, malahan djuga membunuh mereka, walaupun jang belakangan ini tidak lagi umum berlaku.

Kemelaratan dan keterbelakangan dari kaum tani sebagai akibat dari exploitasi ekonomi dan penindasan² politik feodal jang luarbiasa, adalah alasan pokok jang mendjadi sebab ekonomi dan kehidupan sosial negeri kita terbelakang ber-abad² djika dibanding dengan negeri² jang sudah madju sekarang. Dalam masjarakat feodal klas² pokok jang mentjiptakan kekajaan dan kebudajaan jalah kaum tani dan tukang² keradjinan tangan, sedangkan tuantanah dan kliknja (radja², bangsawan², pendeta² dan punggawa²) adalah samasekali tidak produktif, sebaliknja mereka menghisap dan menindas golongan jang sangat terbesar dari Rakjat.

Exploitasi ekonomi dan penindasan politik jang luarbiasa telah membikin kaum tani Indonesia memberontak melawan kekuasaan tuantanah seperti misalnja pemberontakan terhadap keradjaan Mataram ke-I (abad ke-8 dan ke-9), pemberontakan terhadap keradjaan Kediri (awal abad ke-13) dibawah pimpinan anak petani Ken Arok, pemberontakan terhadap keradjaan Singasari (achir abad ke-13), pemberontakan² dalam keradjaan Madjapahit (abad ke-14 dan 15), dan lain² pemberontakan kaum tani. Pemberontakan² ini memang hanja berhasil dengan mendjatuhkan radja jang

satu dan menaikkan radja jang lain, dengan tidak berakibat perbaikan nasib kaum tani. Tetapi kenjataan ini tidak mengungkiri bahwa pemberontakan² itu adalah pemberontakan² kaum tani. Perlawanan kaum tani terhadap exploitasi ekonomi dan penindasan² politik feodal menjebabkan adanja pemberontakan².

Pemberontakan² kaum tani gagal, tidak berachir dengan kemenangan kaum tani dan hanja berakibat penggantian radja² belaka, adalah karena kaum tani sebagai pemilik² perseorangan ketjil tidak mewakili hubungan produksi jang baru. Pemberontakan² meletus setjara spontan karena kebentjian mereka terhadap tuan-tanah, tetapi mereka tidak mampu menjusun program agraria jang revolusioner. Djuga belum ada klas dan partai politik jang madju, jang mampu memimpin kaum tani menudju kemenangan. Djadi, pemberontakan dan peperangan² tani ketika itu dengan sendirinja berachir dengan kegagalan, sehingga tidak mengubah hubungan ekonomi dan sistim politik feodal. Tetapi, adalah tidak benar djika dikatakan bahwa pemberontakan² tani jang gagal itu samasekali tidak membawa sekedar kemadjuan sosial. Jang sudah terang, kaum tani mendjadi lebih terlatih dalam berperang dan ada djuga radja² baru jang mereka naikkan keatas tachta terpaksa meringankan ataupun menghapuskan beberapa bentuk penghisapan jang paling kedjam. Pemberontakan² itu bersifat menentukan dalam melemahkan dan achirnja akan meruntuhkan samasekali feodalisme.

Fasal 4

Masjarakat Kolonial

Dengan bertambah luasnja perdagangan luarnegeri Indonesia dalam abad ke-14, terutama perdagangan rempah² dengan Eropa, maka kedudukan kota² pesisir Indonesia mendjadi sangat penting dan perdagangan dengan Eropa mendjadi lebih penting daripada perdagangan dengan India dan Tiongkok. Rempah² sangat dibutuhkan oleh apotik² dan dapur² orang Eropa. Dalam perdagangan jang ramai ini Malaka dan Banten memainkan rol jang sangat penting.

Di Malaka dan Banten banjak bertempat-tinggal pedagang

asing, terutama pedagang² Islam jang datang dari India dan Persia, jang mempunjai pengaruh besar atas radja² lokal. Pedagang² ini menjediakan barang² mewah untuk para radja. Mereka djuga mengislamkan radja² lokal jang beragama Hindu dan mendorong keradjaan² lokal mendjadi keradjaan Islam jang berdiri sendiri, terpisah dari kekuasaan Maharadja Madjapahit jang berpusat dipedalaman. Untuk mendapat pengaruh, saudagar² Islam itu djuga mengawinkan anak²nja dengan radja² lokal. Dengan bertambahnja pengaruh mereka atas radja² lokal bertambah pula keuntungan mereka dalam perdagangan. Gerakan Islam ini kemudian dipimpin oleh guru² jang terkenal dengan nama Wali Songo (Wali Sembilan).

Dengan makin madjunja perdagangan dunia maka bertambah besarlah nafsu radja² lokal dipesisir untuk menguasai daerah pedalaman jang berada dibawah kekuasaan Maharadja Madjapahit. Persatuan radja² Islam dibawah pimpinan keradjaan Demak merebut Madjapahit dalam tahun 1521. Perebutan ini adalah akibat dari pertentangan antara keradjaan feodal Islam jang sudah berdjalin dengan kepentingan kapital-dagang (saudagar²) melawan keradjaan feodal Hindu jang masih sepenuhnja agraris.

Dalam keadaan terpetjahbelah didalamnegeri, dalam keadaan meruntjingnja pertentangan antara keradjaan² pesisir jang sudah ambil bagian didalam perdagangan dunia dengan keradjaan pedalaman jang berdasarkan upeti hasil bumi dan pologoro (kebaktian² feodal), datanglah orang² Eropa dengan kapal² dan persendjataan jang lebih sempurna daripada jang dimiliki oleh keradjaan² Indonesia.

Mula² datanglah orang² Portugis (1496) dibawah pimpinan Vasco da Gama, jang datang disamping untuk mentjari untung dengan berdagang djuga untuk menjebarkan agama Keristen jang sedang berkembang di Eropa. Untuk mentjapai tudjuannja orang Portugis menggunakan pertentangan² antara „keradjaan² Islam" dengan „keradjaan² Hindu". Untuk melawan serangan orang² Portugis dan untuk menindas pemberontakan kaum tani serta melawan keradjaan² Hindu, keradjaan² Islam seperti Demak membangun tentara tetap, sesuatu jang tidak dilakukan oleh keradjaan² Hindu.

Dalam tahun 1512 orang² Spanjol datang di Tidore dengan 2 buah kapal dari mengelilingi dunia. Di Tidore orang² Spanjol berusaha memperkuat kedudukannja dengan mengadakan persekutuan dengan radja Tidore jang pada waktu itu sedang berdjuang melawan orang² Portugis jang bersekutu dengan radja Ternate. Latarbelakang pertentangan Spanjol-Portugis jalah soal monopoli tjengkeh. Pertempuran² terdjadi antara orang² Spanjol dan keradjaan Tidore disatu fihak dengan orang² Portugis dan keradjaan Ternate difihak lain, dengan achirnja kekalahan fihak Spanjol. Dalam tahun 1529 orang² Spanjol meninggalkan Indonesia sesudah menerima ganti kerugian uang 350.000 „crusado".

Tentara tetap keradjaan² Islam lebih baik perlengkapan dan persendjataannja djika dibanding dengan tentara keradjaan² Hindu jang berdasarkan wadjib-bela-umum kaum petani. Tetapi keunggulan teknik kapal² perang dan persendjataan Eropa adalah melebihi keunggulan teknik kapal dan persendjataan keradjaan² Islam. Inilah sebab² pokok jang membikin Angkatan Laut Keradjaan Demak dibawah pimpinan Adipati Unus harus mundur dalam peperangan melawan orang² Portugis (1513). Bukan karena kurang keberanian, bukan karena kurang semangat dan ketjakapan jang menjebabkan orang² Indonesia harus kalah, tetapi karena keunggulan teknik Eropa, dan terutama sekali karena kelemahan² keradjaan² Indonesia jang disebabkan oleh perpetjahan.

Tanggal 22 Djuni 1596 berlabuhlah armada Belanda terdiri dari 4 buah kapal dibawah pimpinan Cornelis Houtman dipelabuhan Banten.

Maksud Belanda datang ke Indonesia mula² hanja untuk berdagang. Untuk mengatur perdagangan Belanda di Indonesia dibentuklah dinegeri Belanda dalam tahun 1602 sebuah perkumpulan dagang bernama VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie — Persatuan Perkongsian Dagang Hindia Timur). Untuk menguatkan dan mengkordinasi segala usaha Belanda di Indonesia diangkat Gubernur Djenderal (jang pertama tahun 1610) dengan sebuah Dewan Hindia terdiri dari 5 orang. Pada mulanja Belanda sangat sukar bergerak karena harus berhadapan dengan bangsa Portugis jang masih berkuasa di Asia Tenggara dan dengan bangsa Indonesia jang masih menguasai laut² Indonesia.

Untuk mempertahankan monopoli dagangnja atas rempah², VOC dengan kedjam melangsungkan „hongitochten" (pelajaran hongi) ke Indonesia bagian Timur (hongi adalah sedjenis kapal jang sangat ladju dan digunakan didaerah Maluku. Mengadakan pelajaran „hongi" berarti merampok, merompak dan membinasakan musuh). Dengan mengadakan pelajaran „hongi" ini VOC menjerang, menjiksa, menawan, bahkan membinasakan penduduk di-pulau² Indonesia bagian Timur, apabila mereka melanggar ketentuan² monopoli VOC. Penduduk pulau Banda hampir binasa samasekali. Tetapi Rakjat Maluku tidak pernah diam menerima nasib terus di-„hongi". Pada tahun 1635 di Ambon terdjadi pemberontakan umum jang dipimpin oleh Kakiali melawan kekedjaman kompeni.

Dalam meletakkan dasar² kolonialisme Belanda di Indonesia adalah sangat besar djasa J.P. Coen, Gubernur Djenderal jang memulai meluaskan kekuasaannja dengan merebut Djakarta (tanggal 4 Maret 1621 oleh Belanda dengan resmi dinamakan Batavia) dan mendjadikan Djakarta pusat perniagaan di Asia Tenggara. Dengan demikian perdagangan berpindah dari tangan keradjaan² Indonesia dan orang² Portugis ketangan Belanda. Dari Djakarta Belanda meluaskan kekuasaan keseluruh Indonesia: tahun 1641 Belanda menguasai Malaka, benteng Portugis di Asia Tenggara, tahun 1667 Belanda menguasai Makasar, tahun 1677 menguasai pantai utara Djawa sampai ke Djawa Timur, tahun 1692 menguasai Banten. Dengan menguasai Banten dapatlah Belanda mengontrol pintu Barat Indonesia, dengan menguasai Malaka mengontrol Selat Malaka, dengan menguasai Makasar mengontrol Indonesia Timur dan dengan menguasai pantai Djawa dapatlah Belanda menutup keradjaan Mataram (ke-II) dari laut.

Dengan terkurungnja keradjaan Mataram, dengan menggunakan pertentangan² jang ada diantara keradjaan² Islam dengan keradjaan² Hindu dan pertentangan² didalam keradjaan Hindu sendiri, kaum pendjadjah Belanda dengan persendjataan lebih unggul telah memaksa Mataram menjerah dalam tahun 1749.

Dasar penghisapan kolonial VOC, djadi penghisapan dalam periode kapital-dagang berkuasa dinegeri Belanda, jalah sistim padjak tanah jang sangat tinggi (contingenten) dan kewadjiban

menjerahkan sebagian hasil dengan harga jang sangat rendah (dwangleveringen). Politik dalamnegeri VOC berdasarkan exploitasi organisasi² feodal jang sudah ada. Dengan sistim ekonomi dan politik ini kaum tani menderita dua matjam tindasan, dari radja² dan dari VOC.

Didaerah kekuasaan VOC hubungan klas jang lama tidak berubah, bedanja hanja pergantian nama radja dengan nama bupati jang diangkat oleh VOC. Bupati² angkatan VOC ini djika meninggal dunia umumnja dapat digantikan oleh anaknja jang laki² jang dianggap tertjakap. Penderitaan kaum tani sangat berat, karena disamping VOC menuntut pembagian maximal dari hasil penghisapan, djuga bupati² memeras Rakjat untuk kepentingan sendiri.

Sistim paksaan dan monopoli VOC menjebabkan rontoknja VOC, karena sistim ini tidak memungkinkan berkembangnja tenaga produktif, memerosotkan ekonomi penduduk, jang berarti mengantjam keuntungan VOC sendiri. Korupsi meradjalela dikalangan aparat pemerintah, baik oleh orang² Belanda maupun oleh orang² Indonesia. Pemberontakan² dan perlawanan kaum tani jang sangat menderita karena dua matjam tindasan terdjadi di-mana² dalam abad ketudjuhbelas dan kedelapanbelas. Karena sudah tidak menguntungkan lagi, dalam tahun 1800 VOC dibubarkan dan selandjutnja negara Belanda memerintah Indonesia setjara langsung (1).

Masa VOC merupakan periode penting dalam penimbunan primitif kapital. Kekajaan² jang luarbiasa didapat oleh saudagar² Belanda dengan segala djalan kekedjaman, seperti jang dikatakan oleh Karl Marx:

„Sedjarah ekonomi kolonial Belanda — dan negeri Belanda adalah nasion kapitalis jang terkemuka pada abad ke-17 — memperlihatkan pengchianatan, penjuapan, penjembelihan dan kekedjian² jang tiada taranja" (2).

Kekuasaan langsung pemerintah Belanda tidak membawa perbaikan dalam masjarakat Indonesia. Sebaliknja, ketika negeri Belanda diduduki oleh Perantjis dikirimlah ke Indonesia seorang Gubernur Djenderal jang sangat kedjam, jaitu Daendels (tahun 1808 — 1811). Dibawah Gubernur Djenderal Daendels tentara Belanda diperluas dari 4.000 mendjadi 18.000. Untuk kepentingan strategi militernja Belanda mendirikan benteng² jang memakan

banjak korban djiwa orang Indonesia. Djuga dibangun djalan-pandjang kira² 1.000 km, jang menghubungkan udjung Barat dengan udjung Timur dari pulau Djawa, dalam waktu satu tahun lebih sedikit, dengan pengeluaran uang jang sangat sedikit dan dengan korban manusia Indonesia jang sangat banjak. Padjak tanah jang tinggi dan penjerahan hasil panen dengan paksaan masih berdjalan terus, malahan ditambah lagi dengan monopoli beras oleh pemerintah dan pendjualan „tanah² partikelir" kepada hartawan² Eropa dan Tionghoa. Penghisapan luarbiasa ini menjebabkan timbulnja pemberontakan² baru, terutama di Banten dan Tjirebon. Ketika dalam tahun 1811 tentara Inggeris menjerang kedudukan Belanda di Djawa, maka mudah dimengerti mengapa Belanda tidak mendapat bantuan dari Rakjat Indonesia; djuga radja² dan bupati² jang ketjewa karena kese-wenang²an Daendels menolak untuk melawan Inggeris.

Selama kekuasaan Inggeris antara tahun 1811 — 1814, Letnan Djenderal Thomas Stamfort Raffles mentjoba melaksanakan prinsip politik kolonial Inggeris di Djawa atas dasar kepentingan kapital-industri Inggeris jang sedang madju tjepat, politik seperti jang dikenalnja di Benggala (India), jaitu politik persaingan bebas jang dilakukan oleh Inggeris terhadap perkembangan kapital-industrinja di India. Inggeris berusaha untuk mengubah sistim ekonomi dan politik Belanda jang bersifat lintahdarat dan perampokan, jaitu tjiri² sistim kapital-dagang Belanda, dengan jang lebih tjotjok dengan politik Inggeris jang industrinja sudah madju. Tetapi usaha Inggeris ini tidak banjak hasilnja, karena mereka hanja berkuasa 3½ tahun. Kekuasaan Inggeris telah meletakkan beban² baru diatas pundak Rakjat Indonesia dengan mengadakan monopoli negara atas garam dan dengan mendjual „tanah² partikelir" ber-sama² dengan hak feodal diatas tanah itu demi keuntungan pembeli dan demi penderitaan kaum tani.

Negara Inggeris mengumumkan bahwa semua tanah adalah kepunjaan negara (staatsdomein) dan atas dasar ini menarik padjak tanah tidak kurang dari $^2/_5$ hasil panen jang baik dan ¼ sampai $^1/_3$ hasil panen tanah jang kurang baik. Politik tanah dari Inggeris djuga telah menimbulkan pemberontakan² dikalangan kaum tani, seperti misalnja di Banten, Tjirebon, Djokja dan lain². Keadaan ini memaksa Raffles membeli kembali atasnama negara sedjumlah

„tanah² partikelir" jang sudah didjualnja.

Setelah dalam tahun 1814 Napoleon kalah, maka tahun itu djuga oleh Inggeris ditandatangani perdjandjian pengembalian koloni² Belanda, termasuk Indonesia. Dengan demikian Belanda mendapatkan kembali kekuasaannja di Indonesia. Pelaksanaan pengembalian ini baru terdjadi dalam tahun 1816.

Perang Dipo Negoro tahun 1825—1830 telah menumpaskan kas negara Belanda dengan F. 20.000.000.—. Djuga perlawanan Belgia terhadap Belanda tahun 1830—1839 mengharuskan negara Belanda mengeluarkan banjak ongkos. Keadaan ekonomi negara Belanda sangat djelek dan mendekati kebangkrutan. Untuk mengatasi kebangkrutan ini diadakan apa jang dinamakan „cultuurstelsel" (sistim tanam-paksa, 1830—1870).

„Cultuurstelsel" adalah kombinasi dari sistim kolonial model VOC, model Daendels dan Raffles. Semua jang paling djahat didjadikan satu dan diberi nama „cultuurstelsel". Menurut sistim ini kaum tani tidak mempunjai kebebasan samasekali. Kaum tani diwadjibkan menanam tanaman untuk pasar Eropa (tebu, kopi, nila, kapas, tembakau), dan diwadjibkan menjerahkannja kepada pemerintah kolonial dengan harga jang ditentukan sendiri oleh pemerintah kolonial.

Dalam prakteknja „cultuurstelsel" telah mewadjibkan kaum tani menanami $^1/_3$ sampai $^2/_3$ dan ada kalanja seluruh tanahsawah dengan tanaman untuk pasar Eropa. Tenagakerdja jang dipergunakan untuk tanaman buat pasar Eropa djauh lebih banjak daripada untuk padi. Padjak tanah, termasuk djuga tanah jang harus ditanami dengan tanaman buat pasar Eropa, dinaikkan. Djika harga hasil tanaman untuk pasar Eropa melebihi djumlah padjak jang harus dibajar petani, maka kelebihannja tidak dikembalikan kepada kaum tani, tetapi sebaliknja kaum tani sering harus mendjual padinja jang sudah tidak tjukup itu buat membajar kekurangan padjak tanah. Kegagalan panen adalah mendjadi tanggungan petani, djuga djika gagal karena bentjana alam. Petani harus mengantarkan hasil jang wadjib diserahkannja sampai ke-gudang² dengan tidak dibajar. Kaum tani harus bekerdja tanpa dibajar untuk pekerdjaan umum dan pembangunan benteng².

Dalam 40 tahun „cultuurstelsel" Belanda dapat mengeduk kira² 800 djuta florin (rupiah Belanda), jaitu hampir sama banjaknja dengan jang dapat dikeduk kapital-dagang Belanda selama dua abad dibawah VOC. Tetapi, djumlah jang sama besarnja dalam zaman imperialisme abad ke-20 sebelum krisis tahun 1929 dapat diperoleh kaum imperialis Belanda hanja dalam waktu satu tahun.

Dalam mendjalankan sistim perampokan „cultuurstelsel" kaum feodal berkedudukan sebagai orang perantara, jang djuga menarik upeti² dan menikmati pologoro untuk dirinja sendiri. Amtenar² dari jang rendah sampai jang tinggi mempunjai tugas² pribadi jang tidak ada batasnja, sampai² menjediakan rombongan² orkes dan gadis² penari untuk menghibur residen² selama dalam turnenja. Amtenar² ini gadjinja sangat ketjil, tetapi dengan menggunakan kedudukannja mereka dapat memperkaja diri dengan hasil kerdja kaum tani jang tidak dibajar.

Penderitaan jang berat menjebabkan meratanja perlawanan dan pemberontakan kaum tani, menjebabkan banjaknja kaum tani jang berpindah dari tempat jang satu ketempat jang lain, walaupun oleh fihak jang berkuasa diadakan peraturan bahwa kaum tani tidak boleh meninggalkan desanja tanpa izin (sistim surat pas). Perlawanan², pemberontakan² dan perpindahan² kaum tani ini merupakan faktor jang penting dalam mengobrak-abrik „cultuurstelsel".

Seorang Belanda, Douwes Dekker jang dalam tahun 1856 mendjadi assisten-residen di Lebak (Banten) telah mengeluarkan dalam tahun 1860 bukunja jang terkenal „Max Havelaar", jang ditulis dengan nama samaran „Multatuli". Dalam bukunja „Multatuli" mendakwa kolonialisme dan orang² Belanda sebagai fihak² jang bertanggungdjawab atas penindasan politik dan penghisapan ekonomi jang tidak kenal perikemanusiaan dibawah „cultuurstelsel". Tulisan² „Multatuli" banjak dibatja oleh kaum intelektuil generasi muda dan pemimpin² gerakan klas buruh jang mulai berkembang dinegeri Belanda; ia djuga telah memberi tjanang kepada burdjuasi Belanda bahwa zaman perampokan model „cultuurstelsel" harus diachiri, sudah tidak perlu dan merugikan.

Zaman „cultuurstelsel" adalah zaman jang paling djelek bagi kaum tani Indonesia. Semangat memberontak kaum tani tetap tidak bisa dipadamkan, pemberontakan² terus-menerus terdjadi di-mana².

Tetapi sesudah mengalami kekalahan dalam perang Dipo Negoro (1825—1830), kaum feodal jang biasanja „memimpin" pemberontakan kaum tani sudah sepenuhnja menjerah kepada kaum penghisap kolonial dan sudah tidak mempunjai kemauan melawan lagi. Diluar Djawa perlawanan² masih dilakukan, tetapi bagi kaum kolonialis Belanda kedudukan diluar Djawa bukan kedudukan jang paling penting. Pada waktu itu pimpinan dari burdjuasi nasional atau dari proletariat Indonesia pada pemberontakan² tani belum mungkin diharapkan.

Perkembangan industri modern dinegeri Belanda adalah terlambat, karena Belanda memiliki Indonesia jang sangat kaja. Dengan memiliki Indonesia mudahlah keuntungan ber-djuta² mengalir kekantong kaum kapitalis Belanda. Baru dalam tahun 1870 oleh pemerintah kolonial diadakan apa jang dinamakan undang² agraria, undang² jang mendjamin didapatnja tanah di Indonesia untuk kepentingan kapital partikelir Belanda. Dengan undang² ini terbukalah setjara definitif bagi kapital partikelir Belanda untuk ambil bagian didalam penghisapan kolonial. Ini berarti perpindahan dari politik kolonial jang bersifat monopoli dari kapital-dagang kepolitik kolonial „baru" dari kapital-industri, perpindahan dari sistim monopoli kesistim persaingan bebas. Masa persaingan bebas jang berlangsung dari tahun 1870 sampai 1895, ditandai oleh bertambah besarnja rol dari bank² kolonial.

Dalam krisis hebat tahun 1895 sebagian besar dari kapitalis² partikelir dinegeri Belanda mengalami kehantjuran, sehingga mengakibatkan kapital-finans berkuasa penuh. Djadi, zaman kapital-industri jang berdasarkan persaingan bebas tidak lama di Indonesia, hanja kira² 25 tahun (1870—1895). Kapital-industri jang berdasarkan persaingan bebas segera disusuli oleh zaman imperialisme jang dimulai tahun 1895, jaitu zaman dimana kapital-finans, jaitu perpaduan antara kapital-bank dengan kapital-industri, memegang monopoli atas kehidupan ekonomi dan politik Indonesia.

Untuk menjelamatkan dan mendjamin haridepan kapital jang diexpor dari Eropa, maka kaum imperialis Belanda melakukan dua tindakan penting: menundukkan seluruh daerah Indonesia, setjara politik dan militer, dan mengadakan penjelidikan² mengenai kemungkinan perkembangan kapital jang tak terbatas. Tindakan kaum

imperialis Belanda ini sesuai dengan perpindahan kapitalisme pra-monopoli ketingkat kapitalisme monopoli, jaitu zaman kekuasaan kapital-finans. Perpindahan ini takterpisahkan dengan makin intensifnja perdjuangan kaum imperialis untuk mem-bagi² dunia. Kapital-finans berusaha pada umumnja untuk merebut tanah se-banjak²-nja dari matjam apa sadja, dimana sadja dan dengan semua djalan, karena memperhitungkan sumber² potensiil akan bahan² mentah dan takut ketinggalan dalam perdjuangan sengit untuk mendapat djengkal² terachir dari wilajah jang belum dibagikan atau untuk membagi kembali tanah² jang sudah dibagi.

Untuk menundukkan seluruh Indonesia dibawah kekuasaan Belanda maka dilakukanlah peperangan kolonial besar²an pada achir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20 sehingga dapatlah Belanda meluaskan kekuasaannja ke Bali, Lombok, Sumbawa, Dompo, Flores, Bone, Bandjarmasin, Djambi, Riau, Tapanuli, Atjeh, dan lain². Untuk mendjamin keuntungan jang luarbiasa, pemerintah Belanda mengadakan pemeriksaan dilapangan ilmu tanah, ilmu bumi, ilmu tumbuh²an, ilmu chewan dsb. Djuga adat-istiadat, bahasa, agama, kesenian dan sedjarah sukubangsa² dipeladjari oleh orang² Belanda.

Djadi, imperialisme telah menghantjurkan monopoli negara jang berbentuk „cultuurstelsel", tetapi bersamaan dengan itu telah mendatangkan monopoli jang baru, jaitu monopoli kapital-finans. Karena kaum imperialis Belanda lemah kedudukannja dalam militer dan tidak mampu sendirian membela Indonesia dengan sendjata, maka sedjak tahun 1905 kaum imperialis Belanda terpaksa mendjalankan politik pintu-terbuka (opendeur politiek), artinja Indonesia dibuka mendjadi lapangan exploitasi kaum kapitalis dari segala negara kapitalis, terutama negara² Inggeris dan Amerika. Dengan mendjalankan politik pintu-terbuka kaum imperialis Belanda memperhitungkan dua keuntungan: 1) berupa kenaikan hasil padjak jang didapat dari perusahaan² imperialis; 2) berupa pertahanan bersama antara negara² imperialis untuk melindungi kepentingan²nja di Indonesia, dan bersamaan dengan itu kaum imperialis Belanda djuga dapat mendjalankan politik keseimbangan antara negara² imperialis agar Indonesia tidak ditjaplok oleh negara imperialis jang lain. Imperialisme telah mengganti perbudakan

model „cultuurstelsel" dengan perbudakan model „baru" jang antara lain berbentuk „poenale sanctie", jaitu peraturan jang berisi ketentuan hukuman bagi mereka jang menjalahi kontrak sebagai alat pendjamin tenagakerdja murah bagi onderneming² asing.

Karena dalam zaman sebelum-imperialisme, Indonesia sudah dikuras dan dirusak habis²an, maka imperialisme harus memulai dengan mentjiptakan dasar² elementer untuk suatu sistim penghisapan modern, penghisapan jang lebih intensif dan sistimatis terhadap Rakjat dan kekajaan Indonesia. Sudah sedjak permulaan zaman imperialisme pemerintah Hindia Belanda mendjalankan apa jang dinamakan „politik ethik" („politik susila"), jaitu politik jang antara lain mengurangi rodi, mereorganisasi dinas² kesehatan, sedikit meluaskan irigasi, dan mendirikan sekolah² rendah, sekolah² guru normal, sekolah² teknik, sekolah² menengah umum dsb. untuk memenuhi kebutuhan imperialisme akan kaum buruh dan pegawai bumiputera jang murah tetapi berpendidikan.

Dalam zaman imperialis Indonesia merupakan sumber bahan mentah jang murah buat negeri² imperialis, sumber tenagakerdja jang sangat murah, pasar untuk mendjual hasil produksi negeri² imperialis dan tempat penanaman kapital asing (Belanda, Inggeris, Amerika, Djepang, Perantjis, Italia, dan lain²).

Politik kolonial kaum imperialis samasekali bukan untuk memadjukan industri Indonesia, tetapi untuk memadjukan industri negeri imperialis sendiri. Kaum imperialis menentang se-keras²nja perkembangan industri jang luas di Indonesia, dan inilah sebabnja keradjinan tangan dari Rakjat tidak berkembang mendjadi industri modern seperti jang terdjadi di Eropa.

Perusahaan² bangsa Indonesia sangat terbatas perkembangannja, misalnja hanja meliputi perusahaan menganjam topi, tikar, kerandjang, batik, dan rokok kretek. Jang agak madju jalah perusahaan² batik, diantaranja ada jang mempunjai puluhan sampai ratusan kaum buruh. Perusahaan² ini sangat tergantung pada importir² asing jang mendatangkan keperluan² perusahaan batik. Perusahaan² rokok kretek djuga sangat tergantung pada importir² asing dan mendapat saingan berat dari industri² rokok Eropa jang modern. Perusahaan² batik atau rokok kretek jang agak besar umumnja dimiliki oleh orang² Arab, Tionghoa dan Eropa.

Industri nasional dizaman imperialis sangat dihalangi oleh politik imperialis untuk berkenalan dengan mesin² modern. Hal inilah jang terutama menetapkan Indonesia dalam kedudukan jang sangat sukar dalam memenuhi kebutuhannja akan barang² hasil industri selama perang dunia ke-2 dan selama revolusi 1945—1948.

Indonesia mempunjai sjarat jang tjukup untuk mendjadi negeri industri jang modern dan kuat, karena Indonesia adalah negeri jang kaja dengan pelikan seperti batubara, besi, minjaktanah, timah, bauxit, mangaan, tembaga, chrom, air-rasa, jodium, aspal, emas, perak, seng, uranium dan lain². Tetapi kaum imperialis tidak mendjadikan Indonesia negeri industri. Kaum imperialis mendirikan perusahaan² pengangkutan seperti kereta-api, mobil dan kapal serta mendirikan pelabuhan² untuk mengangkut barangdagangan² jang berupa hasilbumi² tropis, atau untuk memudahkan gerak-gerik militer guna mengontrol dan guna keamanan pendjadjahan mereka. Mereka mendirikan industri²-pembantu untuk keperluan² reparasi dan untuk mengerdjakan bahan² mentah buat expor. Industri jang termasuk agak madju jang didirikan oleh kaum imperialis jalah industri pertambangan (minjak, timah, bauxit, batubara, dsb.), pabrik gula, pabrik remeling, pabrik teh, pabrik kopi, pabrik minjak-kelapa, penggilingan beras, pabrik tembakau, dsb.

Dengan berkuasanja imperialisme di Indonesia seperti diterangkan diatas maka masjarakat kolonial Indonesia mempunjai karakteristik sbb.:

Dasar dari ekonomi alamiah untuk-sendiri (self-sufficing natural economy) sudah rusak, artinja produksi sudah ditudjukan untuk pasar, tetapi exploitasi atas kaum tani oleh klas tuantanah — basis sosial dari exploitasi feodal — masih tetap berlaku. Exploitasi ini malahan sudah berdjalin dengan exploitasi kapital asing, kapital komprador dan lintahdarat jang berkedudukan menentukan dalam kehidupan sosial-ekonomi Indonesia. Indonesia jang feodal sudah mendjadi Indonesia jang semi-feodal (3).

Kemungkinan berkembang bagi kapitalisme nasional sangat dibatasi sehingga tidak mempunjai rol jang penting didalam kehidupan politik, ekonomi dan kebudajaan Indonesia. Dalam masa pendudukan Djepang burdjuasi nasional dapat sedikit memperkuat diri, karena orang² Djepang terpaksa banjak menggunakan tenaga

mereka sebagai pembantu. Tetapi walaupun demikian, klas burdjuis nasional Indonesia tetap sangat lemah didalam hal politik, ekonomi dan kebudajaan.

Dalam Indonesia modern kekuasaan radja² jang otokratis sudah digulingkan, tetapi ini tidak berarti bahwa kaum feodal tidak memegang rol dalam kekuasaan kolonial. Kaum feodal, jaitu kaum bangsawan dan tuantanah², merupakan alat jang penting ditangan kaum imperialis untuk melangsungkan penghisapan ekonomi dan penindasan politik terhadap Rakjat. Kekuasaan kolonial jalah diktatur burdjuasi besar asing dan kaum feodal dalamnegeri. Dengan diktatur ini kaum burdjuis asing tidak hanja menguasai sektor² keuangan dan ekonomi Indonesia, tetapi mereka djuga menguasai keadaan politik dan militer Indonesia.

Kaum imperialis asing djuga menggunakan alat kebudajaan untuk mematahkan semangat perlawanan Rakjat Indonesia. Dengan alat kebudajaan ini mereka menanam rasa rendah-diri dikalangan Rakjat dan men-dewa²kan orang asing dan kakitangannja. Mereka menanamkan rasa tidak mampu pada Rakjat Indonesia, dan mentjekokkan bahwa segala jang baik dan pandai ada pada orang asing. Mereka tanamkan, bahwa beladjar ke Eropa, terutama kenegeri Belanda, berarti pangkat, prestise dan harta-benda bagi jang dapat kesempatan.

Penindasan oleh imperialisme dan feodalisme dizaman kekuasaan Belanda, dan lebih² lagi dizaman kekuasaan Djepang, telah membikin Rakjat Indonesia, terutama kaum tani, mendjadi makin lama makin melarat dan kebanjakannja mendjadi bangkrut, hidup dalam keadaan lapar, asing dari perumahan jang pantas dan pakaian jang tjukup.

Fasal 5

Masjarakat Indonesia Sekarang Adalah Setengah-Djadjahan dan Setengah-Feodal

Sebagai salahsatu puntjak dari pertentangan jang pokok dalam masjarakat Indonesia dizaman modern, jaitu pertentangan antara imperialisme dan nasion Indonesia, maka petjahlah dalam bulan

Agustus 1945 revolusi nasional di Indonesia. Dengan ini bangsa Indonesia mengambil kemerdekaan didalam tangannja sendiri. Dalam revolusi ini dengan gagah Rakjat Indonesia berdjuang melawan musuhnja jang terpokok, jaitu imperialisme. Tetapi musuh pokok jang lain, jaitu klas tuantanah feodal, jang merupakan basis sosial jang terpenting bagi kekuasaan imperialisme, tidak digulingkan. Ini berarti bahwa tenaga pokok revolusi Indonesia, jaitu kaum tani, tidak tjukup dibangunkan dan ditarik kedalam revolusi. Terpisahnja pelaksanaan dua tugas pokok, jaitu tugas revolusi nasional anti-imperialisme dan tugas revolusi demokratis anti-feodalisme adalah merupakan sebab pokok dari kegagalan revolusi Agustus.

Didalam Program PKI a.l. dikatakan bahwa: *„Tugas pembebasan nasional dan perubahan² demokratis di Indonesia belum lagi terlaksana. Hasrat Rakjat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan nasional jang penuh, untuk kebebasan² demokratis dan untuk memperbaiki penghidupannja masih belum terpenuhi".*

Selandjutnja Program PKI mengatakan, bahwa „Persetudjuan KMB jang ditandatangani oleh pemerintah Hatta dan pemerintah Belanda pada tanggal 2 November 1949 menetapkan kedudukan Indonesia sebagai setengah-djadjahan. Apa jang dinamakan penjerahan kedaulatan jang terdjadi pada tanggal 27 Desember 1949, sesuai dengan persetudjuan tersebut diatas, adalah bertudjuan untuk menimbulkan lamunan dikalangan Rakjat Indonesia bahwa Indonesia telah diberi kemerdekaan jang penuh dan bahwa 'penjerahan kedaulatan' itu adalah 'njata, penuh dan takbersjarat' ". Keadaan jang sebenarnja jalah, bahwa dengan penandatanganan persetudjuan KMB pemerintah Hatta merestorasi kekuasaan kaum imperialis Belanda atas ekonomi Indonesia.

Dengan persetudjuan KMB kaum reaksioner Indonesia, jang sepenuhnja berkapitulasi kepada kaum imperialis, berusaha untuk mengekang dan menindas gerakan pembebasan nasional dan gerakan demokratis Rakjat Indonesia. Tetapi, jang terdjadi adalah sebaliknja! Atas desakan massa Rakjat jang kuat dan luas, maka dalam bulan April 1956 setjara sefihak (unilateral) persetudjuan KMB dibatalkan dan kemudian djuga „hutang" kepada negara Belanda dihapuskan setjara unilateral oleh pemerintah Indonesia. Walaupun tindakan² ini adalah tindakan² politik jang penting dan sesuai

dengan semangat anti-imperialisme dari Rakjat jang sedang naik, tetapi ia tidak membawa perubahan jang penting dalam masjarakat Indonesia.

Dengan dibatalkannja persetudjuan KMB, Rakjat Indonesia pada pokoknja sudah mendapatkan kemerdekaan politik di 80% dari wilajah negerinja, sedangkan di Irian Barat jang merupakan 20% dari wilajah Indonesia belum ada samasekali kemerdekaan politik bagi Rakjat. Irian Barat masih sepenuhnja dikuasai oleh kolonialisme Belanda. Kemerdekaan politik jang sekarang sudah dimiliki Rakjat Indonesia belumlah kemerdekaan politik jang penuh dan stabil, tetapi masih setengah² dan masih terus terantjam oleh kekuatan² reaksioner. Kaum reaksioner didalamnegeri jang bekerdjasama dengan kaum imperialis Belanda, Amerika, dll. berusaha keras untuk membatasi dan menghapuskan kemerdekaan politik bagi Rakjat, dan disamping itu burdjuasi nasional djuga berusaha untuk membatasi kemerdekaan politik bagi klas buruh dan Rakjat progresif lainnja.

Bukti jang sangat djelas dari masjarakat Indonesia jang setengah-djadjahan jalah masih belum merdekanja Indonesia dilapangan ekonomi. Kaum imperialis (kapitalis² besar asing) masih berkuasa di Indonesia dilapangan ekonomi. Dengan kekuasaannja dilapangan ekonomi dan dengan melewati orang² bajarannja kaum imperialis djuga ikut menentukan djalannja politik Indonesia. Maskapai² imperialis seperti B.P.M., Caltex dan Stanvac menguasai minjaktanah dinegeri kita. Perusahaan² perkebunan asing masih menguasai tanah² onderneming dan sebagian jang penting dari pengangkutan diatas laut masih dikuasai oleh K.P.M. Perdagangan impor, expor dan perdagangan dalamnegeri masih dikuasai oleh apa jang biasa disebut *"Big Five" („Lima Besar")*, jaitu N.V.² Internatio, Borsumy, Jacobson van den Berg, Lindeteves-Stokvis dan Geo Wehry. Alat² penting dalam perdagangan seperti transpor sebagian atau seluruhnja masih dikuasai oleh kapitalis² besar asing. Bank² jang besar jang menguasai ekonomi Indonesia seperti Factory, Handelsbank, Escompto, Chartered Bank, Great Eastern Bank dll., adalah kepunjaan kaum kolonialis Belanda dan kaum imperialis lainnja (4).

Politik kaum imperialis dilapangan perekonomian pada prinsipnja tidak berubah dari waktu Indonesia masih sepenuhnja djadjahan. Mereka meneruskan perusahaan² mereka jang lama dan mendirikan beberapa jang baru. Dengan demikian mereka dapat setjara langsung menggunakan bahan² mentah Indonesia, menggali kekajaan pelikan Indonesia dan menggunakan tenaga buruh Indonesia jang murah. Setjara ekonomi mereka langsung menekan industri nasional, baik kepunjaan negara maupun kepunjaan burdjuasi nasional. Dengan demikian kaum kapitalis besar asing menghalangi perkembangan tenaga produktif dinegeri kita. Bank dan keuangan serta barangdagangan² jang ada didalam kekuasaan kaum imperialis inilah jang mempunjai kedudukan menentukan didalam kehidupan ekonomi negeri kita dewasa ini.

Untuk mendjamin keselamatan kapitalnja dan memudahkan exploitasinja terhadap massa luas petani dan golongan² Rakjat lainnja, kaum imperialis menggunakan komprador² dan lintahdarat² untuk membikin djaring² exploitasi jang menjebar dari pelabuhan² dagang di-pantai² jang ramai, dari kota² sampai ke-desa² jang terbelakang djauh dipedalaman. Klas komprador adalah kreasi kaum imperialis, pembantu² mereka dalam mengexploitasi massa luas Rakjat. Kaum komprador tidak hanja mengabdi kepentingan satu imperialis, tetapi mereka masing² melajani kepentingan imperialis² jang tertentu. Untuk mendapatkan kekuatan politik kaum imperialis menempatkan komprador²nja didalam partai² burdjuis, dan partai² ini mereka djadikan alat pengabdi mereka jang setia. Dengan menggunakan partai² burdjuis dan dengan berkedok untuk kepentingan „agama" dan „ideologi" mereka menggunakan badan² exekutif dan legislatif serta alat² birokrasi pemerintahan untuk melajani kepentingan-kepentingan kaum imperialis jang mereka pertuan, untuk memetjahbelah persatuan Rakjat dan untuk menghalangi perkembangan kekuatan progresif jang dipimpin oleh Partai Komunis.

Disamping kekuasaan ekonomi kaum imperialis asing, di Indonesia sekarang masih berkuasa sisa² feodalisme jang penting dan berat, jaitu:

(1) hak tuantanah besar untuk memonopoli milik tanah jang dikerdjakan oleh kaum tani jang bagian terbesar tidak mungkin memiliki tanah dan karena itu terpaksa menjewa

tanah dari pemilik² tanah menurut sjarat² jang ditentukan oleh tuantanah;

(2) pembajaran sewatanah dalam udjud barang kepada tuantanah² jang merupakan bagian penting dari hasil panen kaum tani dan jang mengakibatkan kemelaratan bagian terbesar kaum tani;

(3) sistim sewatanah dalam bentuk kerdja ditanah tuantanah², jang menempatkan kaum tani dalam kedudukan hamba;

(4) jang terachir jalah tumpukan hutang² jang mendjerat batangleher bagian terbesar kaum tani dan jang menempatkan mereka dalam kedudukan budak terhadap pemilik² tanah.

Masih bertjokolnja sisa² feodalisme telah menjebabkan terbelakangnja teknik pertanian, melaratnja bagian terbesar dari kaum tani, susutnja pasar dalamnegeri dan tidak mungkinnja mengindustrialisasi negeri.

Penindasan dobel dari imperialisme dan feodalisme telah menjebabkan massa luas Rakjat, terutama kaum tani, mendjadi makin lama makin melarat dan sedjumlah besar mendjadi bangkrut, hidup dalam keadaan lapar dan setengah telandjang. Penindasan dobel, jaitu penindasan imperialisme dan feodalisme, djuga telah menjebabkan sangat tertekannja perkembangan industri nasional dan kebudajaan nasional.

Dalam masjarakat Indonesia modern sekarang, pertentangan antara imperialisme dengan nasion Indonesia dan pertentangan antara feodalisme dengan massa Rakjat jang terbesar, terutama kaum tani, adalah pertentangan² pokok. Sudah tentu ada pertentangan² lain, seperti pertentangan antara burdjuasi dengan proletariat, pertentangan antara klas² reaksioner sendiri dan pertentangan antara imperialis jang satu dengan imperialis jang lain. Tetapi, walau bagaimanapun, pertentangan antara imperialisme dengan nasion Indonesia adalah pertentangan jang terpokok dari semua pertentangan. Perdjuangan jang meningkat dari pertentangan² dan makin dalamnja pertentangan² didalam masjarakat setengah-djadjahan dan setengah-feodal sekarang tidak bisa tidak pasti membawa perkembangan dari gerakan revolusioner. Revolusi Indonesia timbul dan mengembangkan diri atas dasar pertentangan² jang

ada dan jang makin tadjam didalam masjarakat Indonesia sekarang.

Demikianlah kesimpulan² jang dapat kita tarik dari karakteristik² masjarakat setengah-djadjahan dan setengah-feodal. Karakteristik² dan kesimpulan ini tidak mempunjai perbedaan hakekat daripada karakteristik² dan kesimpulan² mengenai masjarakat Indonesia sebelum Revolusi Agustus 1945. Ini disebabkan karena Revolusi Agustus tidak diselesaikan dengan melaksanakan dua tugas pokok revolusi sekaligus, jaitu tugas revolusi nasional anti-imperialisme dan tugas revolusi demokratis anti-feodalisme.

Dengan belum diselesaikannja dua tugas pokok Revolusi Indonesia, maka berartilah bahwa Revolusi Agustus 1945 belum diselesaikan sampai ke-akar²nja. Sampai sekarang imperialisme masih bertjokol di Indonesia, sedangkan basis sosial jang terpenting dari kekuasaan imperialisme, jaitu klas tuantanah, belum digulingkan.

BAB II

REVOLUSI INDONESIA

Fasal 1

Gerakan Revolusioner di Indonesia Dalam Abad ke-20

Pemerintah Belanda setjara langsung dan resmi berkuasa di Indonesia mulai tahun 1800, jaitu sesudah pembubaran perkumpulan dagang Belanda „VOC". Sedjak tahun 1800, dengan interupsi kekuasaan Inggeris tahun 1811-1814, sampai diusirnja kekuasaan Belanda oleh balatentara Djepang pada 9 Maret 1942, pemerintah Belanda setjara langsung dan resmi berkuasa dengan sewenang² di Indonesia.

Proses transformasi Indonesia mendjadi sepenuhnja dibawah kekuasaan kolonialisme Belanda adalah sekaligus proses perdjuangan Rakjat Indonesia melawan kolonialisme Belanda dan kakitangannja. Dengan bersusah-pajah pemerintah Belanda memadamkan pemberontakan² bersendjata Rakjat di Ambon, Djawa, Sumatera,

Bali, Lombok, Kalimantan, Sulawesi dan banjak lagi. Diantara perlawanan² jang sengit itu termasuk perang di Maluku dalam tahun 1817 jang dipimpin oleh Pattimura, perang di Djawa tahun 1825-1830 jang dipimpin oleh Dipo Negoro, perang di Minangkabau tahun 1830-1839 jang dipimpin oleh Imam Bondjol. Perang di Atjeh baru berachir setelah berlangsung terus-menerus selama kira² 40 tahun, jaitu dari tahun 1873 sampai 1913.

Pada permulaan abad ke-20, karena dorongan klas² baru jaitu klas proletar dan burdjuasi nasional, timbullah bentuk² baru dalam gerakan revolusioner Rakjat Indonesia. Revolusi Rusia tahun 1905 jang dipimpin oleh kaum Komunis Rusia dengan Lenin sebagai pemimpin utamanja sangat berpengaruh pada tumbuhnja bentuk² baru dari gerakan kemerdekaan nasional Rakjat Indonesia. Revolusi Rusia tersebut memberi pukulan pada kekuasaan Tsar Rusia, sehingga sangat melemahkan kedudukannja. Kuatir melihat perkembangan revolusioner dalamnegeri, Tsar Rusia buru² mengadakan persetudjuan damai dengan Djepang, agar dengan demikian dapat memperkuat kedudukannja untuk menghadapi revolusi didalamnegeri. Revolusi Rusia tahun 1905 telah mempunjai peranan jang sangat penting dalam membangunkan bangsa² Asia. Djuga bangsa Indonesia bangun dan klas² jang tertindas mengorganisasi diri.

Dalam tahun 1905 berdirilah serikatburuh pertama dikalangan buruh kereta-api dengan nama SS-BOND (Staatsspoor-Bond). Dalam tahun 1908 berdiri VSTP (Vereniging van Spoor en Tramweg Personeel), suatu serikatburuh keretaapi jang militan. Dalam tahun itu djuga sedjumlah orang² intelektuil di Djawa mendirikan organisasi „Budi Utomo". Organisasi² pemuda dan peladjar jang bersifat kedaerahan timbul di-mana².

Peladjar² Indonesia dinegeri Belanda dalam tahun 1908 mendirikan „Indische Vereniging" jang dalam tahun 1922 diganti dengan nama „Indonesische Vereniging", dan dalam tahun 1925 berganti nama lagi mendjadi „Perhimpunan Indonesia". „Perhimpunan Indonesia" adalah organisasi jang mempunjai karakter politik jang tegas dan menuntut kemerdekaan bagi Indonesia.

Dalam tahun 1911 kaum burdjuis dagang Indonesia mendirikan „Serikat Dagang Islam", jang dalam tahun 1912 berganti

nama dengan „Serikat Islam". Dalam bulan Mei 1914 di Surabaja didirikan „Indische Sociaal-Democratische Vereniging" (ISDV, Perkumpulan Sosial-Demokratis Indonesia), organisasi politik jang pertama dari kaum Marxis Indonesia. Revolusi Oktober Besar Rusia tahun 1917 sangat berpengaruh pada proletariat Indonesia terutama pada ISDV. Pada pertengahan bulan November 1918 didirikan sebuah organisasi front persatuan nasional dengan nama „Radicale Concentratie" jang anggota²nja terdiri dari Serikat Islam, Budi Utomo, Insulinde, Pasundan dan ISDV. „Radicale Concentratie" ini segera menuntut adanja Undang² Dasar dan Parlemen.

Pada tanggal 23 Mei 1920 ISDV berganti nama mendjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dalam waktu jang singkat pengaruh PKI mendjadi meluas dikalangan Rakjat jang sedang menderita kemelaratan akibat exploitasi ekonomi dan penindasan politik imperialisme Belanda. Krisis makin memuntjak di Indonesia, penghidupan Rakjat makin lama makin merosot dan perlawanan² Rakjat jang tidak terorganisasi terhadap alat² pemerintah makin banjak. Dalam keadaan demikian inilah provokasi² dari pemerintah kolonial Belanda datang ber-tubi² dalam bentuk pemetjatan terhadap kaum pemogok, penangkapan terhadap kaum tani, pembubaran sekolah² jang didirikan oleh PKI dan Serikat Rakjat, pelarangan terhadap suratkabar² kaum buruh, penangkapan terhadap pemimpin² kaum buruh, dll. Dalam menghadapi kaum tani, Belanda membikin gerombolan² teroris seperti misalnja „Sarekat Hedjo". Semuanja ini menjebabkan timbulnja pemberontakan Rakjat pada achir tahun 1926 di Djawa dan awal tahun 1927 di Sumatera terhadap kekuasaan imperialisme Belanda. PKI berusaha dengan sekuat tenaga untuk memberikan pimpinan pada pemberontakan ini. Karena tidak tjukupnja persiapan, karena kurangnja pengalaman dan belum tepatnja politik proletariat Indonesia dan Partai politiknja, pemberontakan mengalami kekalahan, PKI di-ilegalkan dan teror putih meradjalela.

Setelah PKI dilarang oleh pemerintah Belanda, burdjuasi nasional Indonesia jang dipelopori oleh kaum intelektuil jang revolusioner mendirikan ber-matjam² organisasi dan partai politik, meneruskan perdjuangan revolusioner jang sudah dimulai oleh PKI. Dengan mendapat inspirasi dari perdjuangan Rakjat Indonesia jang

revolusioner, dalam tahun 1928 lahirlah *Sumpah Pemuda,* jaitu kebulatan tekad pemuda Indonesia dari berbagai sukubangsa dan berbagai aliran politik, jang menjatakan bahwa mereka adalah berbangsa, berbahasa dan bertanahair satu, jaitu Indonesia. Peristiwa ini sangat penting bagi pembentukan nasion Indonesia. Ini adalah djawab jang tepat pada politik petjahbelah kaum imperialis Belanda.

Laksana halilintar dipanas terik dalam tahun 1933 meletuslah pemberontakan didalam kapalperang Belanda „De Zeven Provincien", jang selama pemberontakan dipimpin dan dikemudikan bersama² oleh kelasi² Indonesia dan Belanda. Bom jang didjatuhkan oleh pemerintah kolonial pada kapal jang memberontak ini tidak berhasil mematahkan semangat dan solidaritet kelasi² Indonesia dan Belanda. Pemberontakan ini, walaupun kemudian dapat dipadamkan, telah menjalakan harapan dan kepertjajaan pada kekuatan diri sendiri dihati ber-puluh² djuta Rakjat Indonesia jang tertindas.

Dalam bulan Maret 1942 kekuasaan Belanda terpaksa angkat kaki dari Indonesia, karena diserbu oleh imperialisme Djepang. Selama pendudukan tentara Djepang, Rakjat Indonesia meneruskan perdjuangan revolusionernja dengan mengadakan sabotase² di-perusahaan² (a.l. menggulingkan keretaapi² jang mengangkut tentara Djepang, meledakkan bangunan² penting), mengadakan pemberontakan² tani (a.l. di Singaparna, Indramaju dan ditanah Karo), pemberontakan² dikalangan militer (a.l. di Blitar) dan perlawanan² dikalangan inteligensia, mahasiswa, pemuda dan peladjar. Segera sesudah diumumkan bahwa Djepang menjerah kalah kepada negeri² sekutu dalam perang dunia ke-2, Rakjat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan nasionalnja pada tanggal 17 Agustus 1945 dan mendirikan sebuah Republik.

Republik Indonesia jang masih muda ini harus menghadapi musuh² jang kuat dan sedang naik prestisenja karena baru kembali sebagai pemenang dari medan perang dunia ke-2, jaitu tentara² Inggeris dan Belanda jang dibantu oleh imperialisme Amerika. Disamping menggunakan sendjata militer jang djauh lebih baik perlengkapannja daripada angkatan perang Republik Indonesia, kaum imperialis djuga menggunakan sendjata politik dan diplomasi. Mereka mendirikan negara² boneka untuk mengepung revolusi Indonesia dan berusaha memetjah kekuatan revolusi dari dalam

dengan menggunakan orang² reaksioner jang berkedudukan penting didalam Republik.

Dengan intrik² dan intimidasi² berhasillah kaum imperialis dengan bantuan klik Hatta dalam bulan Djanuari 1948 menggulingkan pemerintah Republik jang revolusioner dan membentuk sebuah pemerintah reaksioner jang dikepalai oleh Hatta, ketika itu Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemerintah Hatta inilah jang kemudian mendjalankan politik pengedjaran dan pembunuhan terhadap kaum Komunis dan orang² progresif lainnja. Sesudah kekuatan revolusioner dapat dipatahkan dalam peristiwa berdarah jang terkenal dengan nama „Peristiwa Madiun", maka leluasalah pemerintah Hatta mengadakan kompromi dengan pemerintah Belanda dibawah pengawasan wakil Amerika Serikat. Pada tanggal 2 November 1949 ditandatanganilah oleh pemerintah Hatta dengan pemerintah Belanda persetudjuan Konferensi Medja Bundar (KMB), jang pada hakekatnja tidak lain daripada menetapkan kedudukan Indonesia sebagai negeri setengah-djadjahan.

Perdjuangan nasional revolusioner Rakjat Indonesia jang sudah hampir 50 tahun sedjak tahun 1908, jang sudah lebih dari 30 tahun sedjak pemberontakan tahun 1926, jang sudah hampir 30 tahun sedjak Sumpah Pemuda tahun 1928 dan sudah lebih dari 11 tahun sedjak Revolusi Agustus 1945 belum melakukan tugas² sepenuhnja, jaitu kemerdekaan nasional jang penuh, perubahan² demokratis dan perbaikan penghidupan Rakjat. Revolusi Agustus belum selesai sampai ke-akar²nja. Oleh karena itu, adalah kewadjiban bagi seluruh Rakjat Indonesia, dan terutama sekali bagi proletariat Indonesia dan PKI, untuk menggenggam dalam tangannja seluruh pertanggungandjawab guna menjelesaikan Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja.

Untuk menghindari atau mengurangi kesalahan² dalam melakukan pekerdjaan guna penjelesaian tugas² Revolusi Agustus sampai rampung samasekali, maka wadjiblah kita mengenal benar² apakah jang mendjadi sasaran² revolusi ini? Apakah tugas²nja? Apakah kekuatan² jang mendorongnja? Apakah watak atau karakternja? Apakah perspektif²nja? Inilah soal² pokok revolusi Indonesia dan tentang inilah jang akan dibitjarakan dibawah ini.

Fasal 2

Soal2 Pokok Revolusi Indonesia

Berdasarkan analisa bahwa masjarakat Indonesia adalah masjarakat setengah-djadjahan dan setengah-feodal, maka PKI dalam Kongres Nasionalnja jang ke-V (Maret 1954) telah menetapkan apa jang mendjadi sasaran2 revolusi Indonesia pada tingkat sekarang, apa jang mendjadi tugas2nja, kekuatan2 pendorongnja, karakter dan perspektif2nja. Pengertian jang djelas tentang masjarakat Indonesia adalah sjarat mutlak untuk mengerti semua soal pokok dan penting dari revolusi Indonesia. Salahsatu arti jang terpenting dari Kongres Nasional ke-V PKI jalah, bahwa kongres ini, berdasarkan pengertian jang tepat tentang masjarakat Indonesia, telah dapat memetjahkan masalah2 pokok dan penting dari revolusi Indonesia, jaitu sbb.:

A. *Tentang Sasaran2 Pokok* atau musuh2 pokok revolusi Indonesia pada tingkat sekarang dinjatakan dalam program PKI adalah imperialisme dan feodalisme. Tentang sasaran2 pokok revolusi Indonesia Program PKI antara lain mengatakan: *„Selama keadaan di Indonesia masih tetap tidak berubah, artinja, selama kekuasaan imperialisme belum digulingkan dan sisa2 feodalisme belum dihapuskan, Rakjat Indonesia takkan mungkin membebaskan diri dari keadaan melarat, terbelakang, pintjang dan tak berdaja dalam menghadapi imperialisme. Kekuasaan imperialisme dan sisa2 feodalisme tidak akan hapus di Indonesia selama kekuasaan negara dinegeri kita dipegang oleh tuantanah2 dan komprador2 jang berhubungan erat dengan kapital asing karena mereka mau mempertahankan penindasan imperialisme dan sisa2 feodalisme dinegeri kita, karena mereka paling takut kepada Rakjat Indonesia".*

Dengan menjatakan bahwa sasaran2 pokok revolusi Indonesia adalah imperialisme dan feodalisme, maka berartilah bahwa musuh2 pokok Rakjat Indonesia dalam tingkat revolusi sekarang adalah burdjuasi besar negeri2 imperialis dan klas tuantanah didalamnegeri. Klas2 inilah jang berkomplot menindas Rakjat Indonesia. Karena penindasan oleh imperialisme atas Rakjat Indonesia adalah jang paling kedjam, maka imperialisme adalah musuh jang paling penting dan paling sengit dari Rakjat Indonesia.

Revolusi Indonesia tidak hanja harus melawan burdjuasi besar negeri2 imperialis dan klas tuantanah didalamnegeri, tetapi djuga harus melawan kaum komprador atau agen2 imperialisme asing jang terdiri dari orang2 Indonesia sendiri. Melawan imperialisme asing dengan tidak melawan kaum komprador jang mendjadi kakitangannja adalah pekerdjaan sia2, karena kaum imperialis asing tidak akan mungkin berkuasa di Indonesia sekarang djika tidak mempunjai djaring2 kakitangan2 jang diselundupkan di-mana2, seperti didalam pemerintahan pusat dan daerah, didalam djawatan2, didalam badan2 ekonomi dan keuangan, didalam partai2 politik, didalam organisasi2 massa, didalam pers, didalam badan2 kebudajaan, universitas2, angkatan perang dan kepolisian, didalam matjam2 panitia resmi dan tidak resmi, didalam badan2 penjelidik, dikalangan keagamaan dan dikalangan gerombolan2 bandit. Diantara agen2 imperialisme asing ini ada jang mempunjai persekutuan kapital dengan kaum kapital besar asing, tetapi ada djuga jang tidak, dan jang demikian ini mendapat bajaran dari dana2 istimewa atau bentuk2 suapan lainnja dari kaum imperialis.

Djadi teranglah, bahwa revolusi Indonesia mempunjai musuh2 jang masih kuat, jang masih sangat berbahaja, jaitu kombinasi dari kaum imperialis, kaum komprador dan kaum tuantanah feodal jang memandang Rakjat Indonesia sebagai musuhnja. Keadaan musuh2 revolusi Indonesia jang masih kuat ini tidaklah berarti bahwa mereka dalam keadaan berkembang, tetapi sebaliknja, mereka dalam keadaan runtuh dan sekarat. Meskipun demikian, adalah keliru djika kita mengetjilkan kekuatan musuh2 revolusi Indonesia ini.

Karena musuh2 revolusi Indonesia masih kuat, maka perdjuangan untuk mengalahkan musuh2 ini adalah perdjuangan jang sengit, berat dan makan waktu pandjang. Menganggap enteng perdjuangan revolusioner Rakjat Indonesia adalah keliru, demikian djuga adalah keliru menganggap bahwa perdjuangan ini bisa dilakukan dalam waktu singkat dan dalam suasana jang ter-buru2.

Dalam memimpin perdjuangan Rakjat jang sengit, berat dan makan waktu pandjang ini, kita harus mendjalankan taktik membawa madju perdjuangan revolusioner Rakjat Indonesia dengan pelahan dan ber-hati2, tetapi pasti. Dalam melakukan perdjuangan

jang makan waktu pandjang ini, kita harus tidak henti²nja melawan dua ketjenderungan, jaitu ketjenderungan² menjerahisme dan avonturisme jang bersumber pada ketidakuletan burdjuis ketjil.

Karena musuh² Rakjat menggunakan semua bentuk perdjuangan, maka kita djuga harus pandai menggunakan semua bentuk perdjuangan. Kita harus pandai menggunakan semua bentuk kegiatan jang terbuka dan legal, jang diperbolehkan oleh undang² dan peraturan², oleh kebiasaan² dan adat-istiadat didalam masjarakat. Sidang Pleno ke-IV CC PKI antara lain memperingatkan, bahwa kita *„harus waspada dan harus senantiasa mempersiapkan diri dan mempersiapkan Rakjat disegala lapangan agar kaum reaksioner tidak bisa menghalangi keinginan Rakjat untuk mentjapai perubahan² sosial jang fundamentil setjara damai, setjara parlementer"*. Dengan sendirinja pekerdjaan PKI bukan hanja pekerdjaan parlementer sadja, tetapi djuga dan terutama pekerdjaan² dikalangan massa, jaitu massa kaum buruh, kaum tani, inteligensia, dan massa pekerdja serta massa demokratis lainnja. Semua pekerdjaan ini, jang didalam maupun diluar Parlemen, ditudjukan untuk mengubah imbangan kekuatan antara kaum imperialis, klas tuantanah dan burdjuasi komprador disatu fihak, dan kekuatan Rakjat difihak lain. Dalam menggunakan bentuk² perdjuangan ini, agar tudjuan² Partai dapat ditjapai, kita harus mendasarkan diri pada prinsip² keadilan, menguntungkan dan tahu-batas. Jang terpenting bukannja besarnja hasil, tetapi bahwa perdjuangan itu berhasil, dan bahwa hasil itu merupakan basis untuk mentjapai hasil² jang lebih besar dan lebih banjak.

Pendeknja, dalam pekerdjaan menumpuk kekuatan jang makan waktu pandjang untuk mengalahkan musuh² jang masih kuat, djeritan² jang keras² dan aksi² jang keburu nafsu tidak akan membawa revolusi Indonesia kepada penghantjuran sasaran²nja. Keuletan dan ketekunan bekerdja jang terus-menerus, inilah jang dituntut oleh Partai kita dari tiap² anggotanja, terutama dari kader²nja.

B. *Tentang Tugas² Revolusi Indonesia* dikatakan dalam program PKI bahwa tugas revolusi Indonesia jalah mentjiptakan pemerintah Rakjat jang *„bukannja harus melaksanakan perubahan² sosialis melainkan perubahan² demokratis. Ia akan merupakan suatu pemerintah jang mampu mempersatukan semua tenaga anti-feodal dan anti-imperialis, jang mampu memberi tanah dengan tjuma² kepada kaum tani, jang mampu mendjamin hak² demokrasi bagi Rakjat; suatu pemerintah jang mampu membela industri dan perdagangan nasional terhadap persaingan asing, jang mampu meninggikan tingkat hidup materiil kaum buruh dan menghapuskan pengangguran. Dengan singkat, ia akan merupakan suatu pemerintah Rakjat jang mampu mendjamin kemerdekaan nasional serta perkembangannja melalui djalan demokrasi dan kemadjuan"*.

Djelaslah, bahwa tugas² terpenting jalah berdjuang terhadap dua musuh, jaitu mendjalankan revolusi nasional untuk menggulingkan kekuasaan imperialisme, musuh dari luar, dan mendjalankan revolusi demokratis untuk menggulingkan kekuasaan tuantanah² feodal didalamnegeri. Jang primer dari dua tugas terpenting ini jalah revolusi nasional untuk menggulingkan imperialisme.

Dengan mengatakan bahwa tugas primer jalah menggulingkan imperialisme, tidaklah berarti bahwa dua tugas penting dari revolusi Indonesia dapat berdjalan sendiri². Tidak! Dua tugas penting ini saling berhubungan. Tanpa menggulingkan kekuasaan imperialisme, kekuasaan klas tuantanah tidak mungkin diachiri, karena imperialisme adalah penjokong jang terpenting dari klas tuantanah. Difihak lain, karena kaum tuantanah feodal adalah basis sosial jang terpenting dari kekuasaan imperialisme atas Indonesia, maka kekuasaan imperialisme tidak mungkin digulingkan tanpa menggulingkan kekuasaan kaum tuantanah feodal. Jang terachir ini hanja dapat digulingkan djika proletariat mampu membangunkan kekuatan pokok dari revolusi, jaitu massa kaum tani, dengan djalan membantu mereka menggulingkan tuantanah² feodal. Dengan demikian djelaslah, bahwa front buruh dan tani anti-feodalisme adalah basis dari front persatuan nasional anti-imperialisme. Djadi, dua tugas pokok revolusi Indonesia adalah berbeda, tetapi bersamaan dengan itu ia djuga saling berhubungan satu dengan lainnja.

Fikiran ingin *„menjelesaikan revolusi nasional lebih dulu"* dan kemudian *„sesudah revolusi nasional selesai"*, baru melaksanakan *„revolusi demokratis anti-feodalisme"* adalah fikiran jang keliru dan berbahaja. Fikiran ini keliru dan berbahaja, karena *„ingin menjelesaikan revolusi nasional"* tanpa memperdjuangkan pembebasan kaum tani dari penindasan sisa² feodalisme, berarti tanpa menarik

kaum tani kefihak revolusi. Fikiran jang keliru ini pada hakekatnja didorong oleh maksud supaja kedudukan tuantanah² feodal tidak diganggu-gugat. Mereka berdalih, bahwa kalau diganggugugat kaum tuantanah akan meninggalkan front nasional anti-imperialisme dan akan menentang revolusi. Tetapi apakah benar demikian? Samasekali tidak benar! Djika fikiran ini diterima maka hasilnja tidak lain jalah, bahwa fihak tuantanah tetap tidak akan memperkuat front nasional setjara sungguh²; sedangkan kaum tani, kekuatan pokok revolusi kita, tidak akan dapat dibangkitkan dan dimobilisasi untuk melawan imperialisme, karena musuh pokok dan langsung dari kaum tani, jaitu kaum tuantanah feodal, tidak diapa²kan dan tetap bebas melandjutkan penghisapan ekonomi dan penindasan politik terhadap kaum tani. Tanpa membangunkan dan menarik kaum tani kedalam revolusi, tidak mungkin revolusi nasional diselesaikan sampai ke-akar²nja!

Untuk menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja Partai telah mempunjai Program Umum, jaitu dasar kerdjasama antara PKI dengan semua partai, dengan semua golongan dan perseorangan jang demokratis dan patriotik dalam menjelesaikan seluruh tuntutan Revolusi Agustus. Disamping mempropagandakan program umumnja, PKI mempersatukan Rakjat berdasarkan tuntutan² politik dan ekonomi jang kongkrit sekarang dan mendjadikan tuntutan kongkrit sekarang sebagai alas untuk bekerdjasama waktu sekarang dengan semua partai, semua golongan dan perseorangan jang demokratis dan patriotik. Tuntutan politik jang urgen untuk sebanjak mungkin mempersatukan Rakjat pada tingkat sekarang jalah tuntutan pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%, sebagai langkah jang penting dalam mentjapai tudjuan strategis dari revolusi Indonesia, jaitu pelaksanaan Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja.

C. *Tentang Tenaga² Penggerak atau Kekuatan² Pendorong* Revolusi Indonesia didalam Program Umum Konstitusi Partai Komunis Indonesia (PKI) dikatakan bahwa *„tenaga penggerak revolusi Indonesia adalah klas buruh, kaum tani, klas burdjuis ketjil dan elemen² demokratis lainnja jang dirugikan oleh imperialisme"*. Semuanja ini merupakan kekuatan progresif dalam masjarakat Indonesia. Persoalan kekuatan² pendorong atau tenaga² penggerak dari

revolusi jalah persoalan klas² dan lapisan² manakah didalam masjarakat Indonesia jang merupakan kekuatan² jang konsekwen berdjuang melawan imperialisme dan feodalisme. Problim taktik-taktik pokok revolusi Indonesia hanja bisa setjara tepat dipetjahkan djika ada pengertian jang djelas tentang soal itu.

Program PKI menjatakan bahwa *„klas buruh, kaum tani, burdjuasi ketjil dan burdjuasi nasional harus bersatu dalam satu front nasional"*. Front nasional adalah gabungan antara kekuatan progresif dan kekuatan tengah. Kekuatan tengah pada pokoknja jalah kekuatan burdjuasi nasional.

Dalam Program PKI djuga dikatakan bahwa djalan keluar dari keadaan setengah-djadjahan dan setengah-feodal terletak *„dalam mengubah imbangan kekuatan antara kaum imperialis, klas tuantanah dan burdjuasi komprador disatu fihak, dan kekuatan Rakjat difihak jang lain. Djalan keluar terletak dalam membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa, terutama kaum buruh dan kaum tani"*. Dalam Sidang Pleno ke-IV Comite Central (achir Djuli 1956) a.l. dinjatakan, bahwa didalam masjarakat Indonesia sekarang ada tiga kekuatan, jaitu kekuatan kepala batu, kekuatan tengah dan kekuatan progresif. Selandjutnja dikatakan, bahwa pada waktu sekarang kekuatan Rakjat, jaitu gabungan antara kekuatan progresif dan kekuatan tengah berusaha untuk membentuk negara Indonesia jang merdeka dilapangan politik dan ekonomi. Tetapi usaha ini ditentang keras oleh klas² komprador dan feodal jang bersekongkol dengan kaum imperialis jang dengan ngotot berusaha untuk mengubah Indonesia mendjadi negara embel², jaitu negara jang hanja dalam bentuknja merdeka, tetapi pada hakekatnja menjerah kepada imperialisme. Garis politik PKI dalam menghadapi tiga kekuatan ini jalah: *dengan sekuat tenaga dan dengan tidak djemu²-nja mengembangkan kekuatan progresif, bersatu dengan kekuatan tengah dan mementjilkan kekuatan kepala batu.* Pelaksanaan garis politik ini adalah sangat penting dalam mengubah imbangan kekuatan didalam masjarakat.

Didalam masjarakat Indonesia sekarang ada klas tuantanah dan klas burdjuis; klas tuantanah lapisan atas dan burdjuasi lapisan atas adalah klas² jang memerintah. Jang diperintah jalah klas proletar, kaum tani dan semua tipe burdjuasi ketjil diluar kaum tani;

semuanja ini merupakan golongan jang sangat terbesar didalam masjarakat Indonesia. Djadi, dapat djuga dikatakan bahwa djalan keluar dari keadaan setengah-djadjahan dan setengah-feodal di Indonesia jalah mengubah imbangan kekuatan klas² jang memerintah disatu fihak, dan kekuatan klas² jang diperintah difihak lain.

Sikap dan posisi dari semua klas, baik jang memerintah maupun jang diperintah adalah seluruhnja ditentukan oleh kedudukan sosial dan kedudukan ekonominja. Djadi karakter dari masjarakat Indonesia tidak hanja menentukan sasaran² dan tugas² revolusi tetapi djuga menentukan tenaga² pendorong revolusi. Klas² apakah jang dapat dimasukkan kedalam tenaga² pendorong revolusi Indonesia? Untuk mengetahui ini kita perlu menganalisa klas² jang ada didalam masjarakat Indonesia.

Klas tuantanah jang menghisap dan menindas kaum tani dan jang lebih banjak menentang perkembangan politik, ekonomi dan kebudajaan dari masjarakat Indonesia daripada memainkan rol jang progresif, bukanlah tenaga pendorong revolusi, tetapi sasaran revolusi.

Klas burdjuis ada jang berwatak komprador dan ada jang berwatak nasional. Burdjuasi besar jang berwatak komprador langsung mengabdi kepentingan² kaum kapitalis besar asing dan oleh karena itu dibikin gendut olehnja. Dalam revolusi Indonesia burdjuasi komprador bukannja tenaga pendorong revolusi, tetapi penghalang revolusi, oleh karena itu ia adalah sasaran revolusi. Sedangkan burdjuasi nasional mempunjai dua watak. Sebagai klas jang djuga ditindas oleh imperialisme dan dikekang perkembangannja oleh feodalisme klas ini adalah anti-imperialisme dan anti-feodalisme, dan dalam hal ini klas ini merupakan satu dari kekuatan² revolusioner. Tetapi difihak lain, klas ini tidak mempunjai keberanian dalam menentang imperialisme dan feodalisme setjara mendalam karena dilapangan ekonomi dan politik klas ini lemah dan djuga mempunjai tali-temali dengan imperialisme dan feodalisme. Karakter dobel dari burdjuasi nasional ini menjebabkan kita mempunjai dua pengalaman dengan mereka, jaitu pada periode jang tertentu dan sampai batas² jang tertentu klas ini bisa mengambil bagian dalam revolusi melawan imperialisme, melawan kaum komprador dan tuantanah (misalnja dalam Revolusi Agustus), tetapi

dalam periode lain mereka bisa mengekor burdjuasi komprador dan mendjadi sekutunja didalam kubu kontra-revolusi (misalnja dalam „Peristiwa Madiun" 1948 dan dalam Razzia Agustus 1951).

Mengenai burdjuasi Indonesia ini didalam Kongres ke-V PKI, berdasarkan pengalaman² dalam beberapa periode perdjuangan Rakjat Indonesia (periode 1920-1926, 1935-1945, periode 1945-1948, periode 1948-1951 dan periode 1951-.....) antara lain disimpulkan bahwa:

„Burdjuasi nasional Indonesia, karena djuga tertekan oleh imperialisme asing, dalam keadaan tertentu dan sampai batas² tertentu, dapat turutserta dalam perdjuangan melawan imperialisme. Dalam keadaan tertentu demikian proletariat Indonesia harus menggalang persatuan dengan burdjuasi nasional dan mempertahankan persatuan itu dengan sekuat tenaga. Dalam keadaan jang lebih tertentu lagi, djika politik Partai pada suatu waktu hanja ditudjukan kepada sesuatu imperialisme, maka sebagian dari burdjuasi komprador bisa djuga merupakan tambahan kekuatan dalam melawan imperialisme jang tertentu itu. Tetapi walaupun demikian, burdjuasi komprador masih tetap sangat reaksioner dan masih tetap bertudjuan untuk menghantjurkan Partai Komunis, menghantjurkan gerakan proletariat dan gerakan demokratis lainnja.

„Karena lemahnja burdjuasi nasional Indonesia dilapangan ekonomi dan politik, maka dalam keadaan sedjarah jang tertentu burdjuasi nasional jang wataknja bimbang itu bisa gojang dan menghianat. Oleh karena itu proletariat Indonesia dan Partai Komunis Indonesia harus ber-djaga² akan kemungkinan bahwa dalam keadaan jang tertentu burdjuasi nasional tidak ikut dalam front persatuan, tetapi dalam keadaan lain lagi mungkin ikut kembali".

Dalam menghadapi sifat gojang burdjuasi nasional Indonesia, perlu diperhatikan, bahwa djustru karena lemah dilapangan ekonomi dan politik, klas ini tidak begitu sukar ditarik kekiri dan bisa dibikin mantap berdiri difihak revolusi, asal sadja kekuatan progresif besar dan politik serta taktik Partai Komunis tepat. Dengan demikian kegojangan klas ini adalah tidak fatal, adalah bukan tak terhindarkan. Tetapi sebaliknja, djika kekuatan progresif tidak besar dan politik serta taktik Partai Komunis tidak tepat, burdjuasi nasional jang lemah dilapangan ekonomi dan politik ini mudah lari

kekanan dan memusuhi revolusi.

Burdjuasi ketjil diluar kaum tani, jaitu kaum miskin kota, kaum intelektuil, pedagang² ketjil, tukang² keradjinan tangan, nelajan², pekerdja² merdeka dsb. mempunjai status hampir seperti kaum tani sedang. Mereka djuga menderita tindasan imperialisme, feodalisme dan burdjuasi besar dan saban hari terus didesak kearah kebangkrutan dan kehantjuran. Oleh karena itu mereka merupakan satu dari kekuatan² pendorong revolusi dan merupakan sekutu proletariat jang bisa dipertjaja. Mereka hanja bisa mentjapai kebebasannja dibawah pimpinan proletariat. *Kaum intelektuil dan pemuda² mahasiswa* tidak merupakan klas didalam masjarakat, tetapi ditentukan oleh asal-usul kefamiliannja, oleh sjarat² hidupnja dan oleh pandangan politiknja. *Pedagang² ketjil* umumnja mempunjai warung atau toko ketjil dan menjewa beberapa atau samasekali tidak mempunjai pembantu, mereka terus-terusan diantjam kebangkrutan karena penghisapan imperialisme, burdjuasi besar dan lintahdarat². *Tukang² keradjinan tangan* dan *kaum nelajan* mempunjai alat produksinja sendiri, mereka tidak menjewa atau hanja menjewa satu atau dua orang pembantu. *Kaum pekerdja merdeka* adalah orang² dari berbagai lapangan pekerdjaan, seperti dokter dan advokat partikelir, mereka bekerdja sendiri, tidak menghisap atau sedikit sekali menghisap orang lain. Semua burdjuasi ketjil diluar kaum tani ini umumnja bisa menjokong revolusi dan adalah sekutu jang baik dari proletariat. Kekurangan mereka jalah, bahwa sebagian dari mereka mudah kena pengaruh burdjuasi, oleh karena itu harus ada perhatian chusus dalam hal mengadakan propaganda dan pekerdjaan² organisasi revolusioner dikalangan mereka.

Kaum tani merupakan 60%-70% dari penduduk Indonesia, merupakan golongan terbesar jang bersama keluarganja berdjumlah ber-puluh² djuta orang. Kaum tani pada pokoknja terbagi dalam tanikaja, tanisedang dan tanimiskin. *Kaum tanikaja* memang ada jang menjewakan sebagian dari tanahnja, mendjalankan praktek lintahdarat, dengan kedjam menghisap kaum buruhtani dan wataknja adalah semi-feodal, tetapi disamping itu mereka pada umumnja mengambil bagian sendiri didalam kerdja, dan dalam artian ini mereka merupakan sebagian dari kaum tani. Aktivitet produktif mereka akan tetap berguna untuk beberapa waktu jang

akan datang dan mereka djuga bisa membantu perdjuangan anti-imperialisme. Mereka bisa bersikap netral terhadap perdjuangan revolusioner melawan tuantanah. Oleh karena itu kita tidak menganggap mereka sebagai tuantanah. *Kaum tanisedang* setjara ekonomi berdiri sendiri, umumnja tidak menghisap orang lain dan tidak membungakan uang, sebaliknja mereka menderita penghisapan dari kaum imperialis, kaum tuantanah dan burdjuasi. Sebagian dari mereka tidak mempunjai tanah jang tjukup untuk dikerdjakan sendiri. Kaum tanisedang tidak hanja bisa memasuki revolusi anti-imperialisme dan revolusi agraria, tetapi djuga bisa menerima Sosialisme. Oleh karena itu mereka adalah tenaga pendorong jang penting dari revolusi dan merupakan sekutu proletariat jang dapat dipertjaja. Sikap mereka terhadap revolusi adalah faktor jang menentukan menang atau kalahnja revolusi, karena kaum tanisedang merupakan majoritet di-desa² sesudah revolusi agraria. *Kaum tanimiskin* ber-sama² dengan buruhtani sebelum revolusi agraria merupakan majoritet di-desa² negeri kita. Kaum tanimiskin tidak mempunjai atau tidak tjukup mempunjai tanah untuk dikerdjakan sendiri, mereka adalah kaum semi-proletar didesa, mereka adalah tenaga pendorong revolusi jang terbesar, dan sudah sewadjarnja mereka merupakan sekutu proletariat jang tepertjaja dan merupakan bagian pokok dari kekuatan revolusi Indonesia.

Kaum tanimiskin dan tanisedang hanja mungkin mentjapai kebebasannja dengan pimpinan proletariat, dan proletariat hanja mungkin memberikan pimpinan pada revolusi djika sudah mengadakan persekutuan jang teguh dengan kaum tanimiskin dan kaum tanisedang. Jang kita maksudkan dengan „kaum tani" terutama jalah kaum tanimiskin dan tanisedang, jang merupakan djumlah terbesar dari penduduk desa. Dalam memimpin perdjuangan Rakjat didesa Partai harus selalu berusaha untuk bisa menarik dan mengerahkan 90% dari penduduk desa, dan dengan sungguh² bersandar pada kaum tanimiskin dan buruhtani serta berserikat dengan kaum tanisedang.

Proletariat Indonesia terdiri dari kira² 500.000 buruh industri modern (buruh transpor, pabrik, bengkel, tambang, dll.). Buruh industri ketjil dan keradjinan tangan di-kota² berdjumlah lebih dari 2.000.000. Proletariat agrikultur dan kehutanan serta golongan²

buruh lainnja merupakan djumlah jang besar. Semuanja berdjumlah lebih dari 6.000.000 atau bersama dengan keluarganja kira² 20.000.000 atau hampir 25% dari seluruh penduduk Indonesia. Disamping proletariat kota dan desa ini, di-desa² Indonesia terdapat ber-djuta² buruhtani, jaitu penduduk desa jang pada umumnja tidak mempunjai tanah dan alat² pertanian serta hidup dari mendjual tenagakerdjanja didesa. Kaum buruhtani merupakan golongan jang paling menderita didesa, dan dalam gerakan tani kedudukannja sama pentingnja dengan kaum tanimiskin.

Sebagaimana djuga proletariat di-negeri² lain, proletariat Indonesia mempunjai kwalitet jang sangat baik. Pekerdjaannja membikin mereka bersatu dengan bentuk ekonomi jang termadju, membikin mereka mempunjai pengertian tentang organisasi dan disiplin jang kuat, dan karena mereka tidak mempunjai alat produksi sendiri mereka tidak berwatak individualis, selain daripada itu, karena proletariat Indonesia ditindas oleh tiga matjam penindasan, jaitu imperialisme, kapitalisme dan feodalisme jang sangat kedjam, maka mereka mendjadi lebih tegas dan lebih mendalam didalam perdjuangan revolusioner daripada klas² lain. Karena Indonesia bukanlah tanah subur untuk sosial-reformisme seperti Eropa, maka sebagai keseluruhannja proletariat Indonesia adalah sangat revolusioner, tentu dengan perketjualian sebagian ketjil jang sudah mendjadi sampah. Karena sudah sedjak muntjulnja dipanggung perdjuangan revolusioner proletariat Indonesia sudah dipimpin oleh partai politiknja jang revolusioner, jaitu Partai Komunis Indonesia, maka proletariat Indonesia setjara politik adalah klas jang paling sadar didalam masjarakat Indonesia. Karena proletariat Indonesia sebagian besar adalah terdiri dari kaum tani jang bangkrut, maka ia mempunjai hubungan² jang wadjar dengan kaum tani jang luas, jang memudahkan persekutuannja.

Walaupun proletariat Indonesia mengandung beberapa kelemahan jang tidak bisa dihindari, seperti misalnja djumlahnja jang ketjil djika dibanding dengan kaum tani, umurnja jang masih muda djika dibanding dengan proletariat di-negeri² kapitalis dan tingkat kebudajaannja jang masih rendah djika dibanding dengan burdjuasi, proletariat Indonesia mau tidak mau telah mendjadi tenaga pendorong jang pokok dari revolusi Indonesia. Revolusi

Indonesia tidak akan berhasil tanpa pimpinan proletariat Indonesia. Sebagai tjontoh jang belum lama kedjadian, Revolusi Agustus telah mentjapai sukses pada awalnja sebab proletariat sedikit atau banjak sudah setjara sadar mengambil bagian jang penting didalamnja, tetapi kemudian revolusi menderita kekalahan karena rol proletariat didesak kebelakang dan lapisan atas daripada burdjuasi mengchianati persekutuan dengan proletariat („Peristiwa Madiun"), disamping karena proletariat Indonesia dan Partai politiknja belum tjukup mempunjai pengalaman revolusioner. Tanpa proletariat mengambil bagian penting tidak ada jang bisa berdjalan beres didalam masjarakat Indonesia. Ini sudah dan terus akan dibuktikan oleh sedjarah dan pengalaman.

Harus mendjadi pengertian bahwa proletariat Indonesia, walaupun ia merupakan klas jang mempunjai kesedaran politik dan pengertian organisasi jang paling tinggi, tetapi kemenangan revolusi tidak mungkin tertjapai djika tanpa persatuan revolusioner didalam matjam² keadaan dengan klas² serta golongan² revolusioner apa sadja. Proletariat harus menggalang front persatuan jang revolusioner. Diantara klas² didalam masjarakat, kaum tani adalah sekutu jang teguh dan tepertjaja dari klas buruh, burdjuasi ketjil kota adalah sekutu jang bisa dipertjaja, dan burdjuasi nasional adalah sekutu didalam periode² tertentu dan sampai batas² tertentu; demikianlah hukum fondamentil jang sudah dan sedang dibuktikan oleh sedjarah modern Indonesia.

Kaum gelandangan adalah salahsatu hasil dari masjarakat setengah-djadjahan dan setengah-feodal, berhubung masjarakat inilah jang telah menimbulkan orang² penganggur di-desa² dan di-kota², dan kaum pengganggur inilah jang kemudian hidup bergelandangan, tak tahu apa jang harus diperbuat dan achirnja tersesat menempuh djalan jang tidak sah, mendjadi pentjuri², perampok², gangster², pengemis², pelatjur² dan semua tjara hidup atau pekerdjaan² jang tidak normal. Golongan ini gojang wataknja dan sebagian dari mereka bisa dibeli oleh kaum reaksioner, sedangkan sebagian lagi bisa memasuki revolusi. Dalam keadaan memasuki barisan revolusi mereka bisa mendjadi sumber ideologi dari barisan pengatjau jang berkeliaran dan dari anarkisme didalam barisan revolusi. Mereka mudah dibikin gojang, baik dengan suapan² mate-

riil maupun dengan hasutan² untuk membentji dan merusak sesuatu jang konstruktif. Mereka mudah dihanjutkan oleh adjakan² dengan kata² jang keras² dan galak². Oleh kaum kontra-revolusioner mereka mudah disuruh mengutjapkan istilah² revolusioner untuk melawan dan merusak Partai klas buruh, gerakan buruh dan gerakan revolusioner pada umumnja. Oleh karena itu kita harus pandai mengubah sifat² mereka, terutama sifat² destruktifnja.

Berdasarkan analisa klas dalam masjarakat Indonesia seperti diatas, maka mendjadi djelaslah klas² dan golongan² mana jang merupakan sandaran imperialisme dan feodalisme, jaitu klas tuantanah dan kaum komprador. Mereka adalah penghalang² revolusi dan oleh karena itu mereka adalah musuh² Rakjat Indonesia. Dengan analisa diatas djuga mendjadi djelas klas² dan golongan² mana jang merupakan tenaga² pokok penggerak revolusi, jaitu klas buruh, kaum tani dan burdjuasi ketjil. Demikian djuga mengenai klas mana jang bisa ikutserta dalam revolusi, jaitu klas burdjuis nasional. Oleh karena itu, kaum buruh, kaum tani, burdjuasi ketjil dan burdjuasi nasional adalah Rakjat, dan merupakan kekuatan revolusioner, kekuatan front persatuan nasional.

D. *Tentang Watak Revolusi Indonesia* dikatakan dalam Program PKI antara lain sbb.: *„Mengingat terbelakangnja ekonomi negeri kita, PKI berpendapat bahwa pemerintah ini (pemerintah Demokrasi Rakjat) tidak merupakan pemerintah diktatur proletariat melainkan pemerintah diktatur Rakjat. Pemerintah ini bukannja harus melaksanakan perubahan² sosialis melainkan perubahan² demokratis"*. Dengan perkataan lain, watak (karakter) revolusi Indonesia pada tingkat sekarang bukanlah revolusi proletar-sosialis, tetapi revolusi burdjuis-demokratis.

Kita dapat menentukan watak revolusi kita setelah kita mengerti keadaan chusus masjarakat Indonesia jang masih setengah-djadjahan dan setengah-feodal, setelah kita mengetahui bahwa musuh² revolusi Indonesia pada waktu sekarang adalah imperialisme dan kekuatan² feodal, bahwa tugas² revolusi Indonesia jalah menjelesaikan revolusi nasional dan revolusi demokratis untuk menggulingkan dua musuh pokok (imperialisme dan feodalisme), bahwa burdjuasi nasional djuga bisa mengambil bagian didalam revolusi ini dan bahwa apabila burdjuasi besar mengchianati revolusi dan mendjadi musuh revolusi, pukulan revolusi jang langsung harus tetap ditudjukan lebih kepada imperialisme dan feodalisme daripada kepada kapitalisme dan milik perseorangan kaum kapitalis nasional pada umumnja.

Tetapi, revolusi burdjuis-demokratis Indonesia sekarang tidak lagi termasuk jang bersifat umum, bukan lagi termasuk tipe lama jang usang itu, tetapi sudah sesuatu jang spesial, sudah tipe baru. Revolusi burdjuis-demokratis tipe baru ini, disebut djuga revolusi demokrasi baru atau revolusi demokrasi Rakjat. Ia adalah bagian dari revolusi proletar-sosialis dunia jang teguh menentang imperialisme, jaitu kapitalisme internasional. Dalam zaman sekarang tidak mungkin lagi ada revolusi burdjuis-demokratis jang tidak merugikan kaum kapitalis internasional dan jang tidak menguntungkan revolusi proletar dunia jang sudah dimulai dengan Revolusi Sosialis Oktober Besar Rusia tahun 1917.

Revolusi demokrasi Rakjat setjara politik berarti diktatur bersama dari klas² revolusioner atas kaum imperialis, kaum komprador, kaum tuantanah dan kaum reaksioner lainnja, dan menentang transformasi masjarakat Indonesia mendjadi suatu masjarakat dibawah diktatur burdjuasi seperti jang terdjadi dengan revolusi burdjuis Perantjis 1789. Setjara ekonomi revolusi demokrasi Rakjat berarti menasionalisasi semua kapital dan perusahaan kepunjaan kaum imperialis, kaum komprador dan kaum reaksioner lainnja, membagi tanah kaum tuantanah dengan tjuma² kepada kaum tani, dan bersamaan dengan itu melindungi pada umumnja perusahaan² perseorangan kapitalis² nasional dan tidak mengganggu kaum tanikaja. Bersamaan dengan pada umumnja melindungi perusahaan² kapitalis² perseorangan, revolusi demokrasi Rakjat mentjiptakan sjarat² persiapan untuk Sosialisme. Masa kekuasaan demokrasi Rakjat adalah masa peralihan ke Sosialisme, dan bukan bentuk masjarakat tersendiri jang terlepas dari Sosialisme.

Tingkat revolusi Indonesia sekarang adalah tingkat transisi (perpindahan) antara pengachiran masjarakat setengah-djadjahan (Irian Barat masih sepenuhnja djadjahan) dan setengah-feodal dan mendirikan masjarakat sosialis. Proses transisi ini sudah dimulai dengan adanja gerakan² untuk kemerdekaan nasional pada awal abad ke-20. Salahsatu puntjak dari proses transisi ini jalah Revolu-

si Agustus 1945. Tetapi Revolusi Agustus tidak dapat menunaikan tugas²nja, jaitu menggulingkan kekuasaan imperialisme, musuh dari luar, dan menggulingkan kekuasaan tuantanah² feodal didalamnegeri, karena dichianati oleh lapisan atas dari burdjuasi dan karena kekurangan pengalaman revolusioner dari proletariat Indonesia.

Dalam tahun 1948 lapisan atas dari burdjuasi Indonesia telah melemparkan pandji² Revolusi Agustus, mereka mengchianati persekutuan dengan proletariat dan berkapitulasi kepada imperialisme. Adalah satu kehormatan dan kebanggaan bagi proletariat, untuk dalam keadaan demikian klas ini tetap setia kepada Revolusi Agustus, memungut kembali pandji² revolusi jang telah dilemparkan itu, mengibarkannja tinggi² dan menjerukan kepada seluruh Rakjat Indonesia supaja tidak berhenti didjalan, supaja bersatu kembali dan berdjuang terus untuk menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja, untuk merampungkan samasekali revolusi ini, jaitu mengachiri samasekali kekuasaan kaum imperialis dan kaum tuantanah dibumi Indonesia.

Pengalaman dengan Revolusi Agustus dan pengalaman dengan perdjuangan Rakjat Indonesia dalam melawan kolonialisme dan untuk demokrasi di-tahun² belakangan ini menundjukkan bahwa siapa sadja atau klas mana sadja akan gagal dalam menentukan nasib Indonesia djika meremehkan dan meninggalkan proletariat, meninggalkan kaum tani dan bagian² lain dari burdjuasi ketjil. Republik demokratis jang diperdjuangkan oleh revolusi Indonesia pada tingkat sekarang hanja mungkin terwudjud djika kaum buruh, kaum tani dan bagian² lain dari burdjuasi ketjil menempati tempat jang menentukan dan memainkan rol jang menentukan. Republik demokratis jang tidak mau gagal haruslah bersandar pada persekutuan revolusioner dari kaum buruh, kaum tani, burdjuasi ketjil kota dan Rakjat anti-imperialisme dan anti-feodalisme lainnja.

Pengalaman Rakjat Indonesia menundjukkan bahwa Republik Indonesia dibawah pimpinan burdjuasi tidak mampu mengachiri kekuasaan kaum imperialis dan kaum tuantanah. Hanja dibawah pimpinan proletariat Republik Indonesia bisa mendjadi Republik jang benar² demokratis, jang dapat mengachiri kekuasaan kaum imperialis dan kaum tuantanah feodal.

E. *Tentang Perspektif Revolusi Indonesia* mendjadi terang sesudah djelas sasaran², tugas², kekuatan² pendorong dan watak revolusi Indonesia pada tingkat sekarang. Dengan mengetahui semuanja ini maka mendjadi teranglah problim perspektif revolusi Indonesia, problim hubungan antara revolusi burdjuis-demokratis dan revolusi proletar-sosialis Indonesia atau antara tingkat sekarang dan haridepan revolusi Indonesia. Karena revolusi Indonesia pada tingkat sekarang adalah ditandai oleh kebangunan Sosialisme dunia dan kehantjuran kapitalisme dunia, maka tidak bisa diragukan lagi, bahwa haridepan revolusi Indonesia bukanlah kapitalisme, tetapi Sosialisme dan Komunisme. Mau tidak mau, disetudjui atau tidak disetudjui, ditentang atau tidak ditentang, inilah perspektif revolusi Indonesia.

Tetapi apakah perspektif „Sosialisme" dan „Komunisme" tidak bertentangan dengan tudjuan revolusi tingkat sekarang jang „bukannja harus melaksanakan perubahan² sosialis melainkan perubahan² demokratis"? Samasekali tidak bertentangan. Memang, djika hanja dilihat dari satu segi, sesudah kemenangan revolusi demokrasi Rakjat ekonomi kapitalis akan berkembang sampai batas² jang tertentu berhubung perintang² bagi perkembangan kapitalisme akan disingkirkan. Tetapi hal ini tidak perlu mengagetkan, dan samasekali tidak perlu dikuatirkan. Perkembangan kapitalisme nasional sampai batas² jang tertentu hanjalah satu segi dari kemenangan revolusi Indonesia. Segi jang lain jalah, bahwa dengan kemenangan revolusi demokratis berarti djuga ada perkembangan *faktor² sosialis* seperti pengaruh politik proletariat jang terus bertambah; pimpinan proletariat jang makin lama makin diakui oleh kaum tani, inteligensia dan elemen² burdjuis ketjil lainnja; perusahaan² negara dan koperasi² kaum tani, kaum keradjinan tangan, nelajan dan koperasi² Rakjat pekerdja lainnja. Semua ini adalah faktor² sosialis jang mendjadi djaminan bahwa haridepan revolusi Indonesia adalah Sosialisme dan bukan kapitalisme.

Djika kita sudah tahu bahwa perspektif revolusi Indonesia adalah Sosialisme dan Komunisme, maka djelas apa jang mendjadi tugas Partai kita pada tingkat revolusi sekarang dan dikemudian hari. Partai kita mempunjai tugas dobel dalam memimpin revolusi Indonesia. Pertama, dibawah sembojan „Menjelesaikan tuntutan²

Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja" kita merampungkan tugas² revolusi jang berwatak burdjuis-demokratis; kedua, jaitu sesudah selesai jang pertama, kita merampungkan tugas² revolusi jang berwatak proletar-sosialis. Inilah keseluruhan tugas revolusi Indonesia. Tiap² anggota PKI harus siap-sedia untuk menunaikan keseluruhan tugas revolusi ini, dan harus bertekad pantang berhenti ditengah djalan. Gerakan revolusioner Indonesia jang dipimpin oleh PKI adalah gerakan revolusioner jang tidak setengah², tetapi gerakan revolusioner jang komplit, oleh karena itu ia merangkul dua tingkat revolusi, jang demokratis dan jang sosialis, dua proses revolusioner jang berbeda dalam watak, tetapi jang satu dengan lainnja berhubungan. Tingkat pertama jalah persiapan jang diperlukan untuk tingkat kedua, dan tingkat kedua tidak mungkin sebelum tingkat pertama selesai.

Untuk melakukan tugas² jang besar dan berat tetapi mulia ini, kita harus terus berdjuang untuk mendjadikan Partai kita partai jang meliputi seluruh nasion, jang mempunjai karakter massa jang luas, jang sepenuhnja terkonsolidasi dilapangan ideologi, politik dan organisasi. Semua anggota PKI harus mengambil bagian aktif dalam membangunkan Partai demikian ini. Bagi Partai jang demikian ini tidak ada benteng jang tidak bisa direbut, baik benteng Republik Demokratis maupun benteng Republik Sosialis.

Mentjoblos Palu-Arit Berarti Mengalahkan Kaum Teroris adalah semboyan jang diserukan Kawan D.N. Aidit dalam pidatonja d'muka Rakjat Semarang tanggal 6 Djuli 1957 dalam rangka kampanje pemilihan DPRD2.

Setelah mengupas bahwa pelemparan granat jang gagal terhadap kantor CC PKI adalah perbuatan teror musuh2 revolusi jang matagelap untuk membunuh pemimpin2 PKI, Kawan D.N. Aidit menundjukkan bahwa perbuatan itu sekaligus menjatakan kelemahannja. Kepada seluruh Rakjat Indonesia selandjutnja diserukan agar lebih waspada dan agar tiap teror dikalahkan dengan djalan Rakjat, djalan demokrasi.

dimpostmanalu@yahoo.com

MENTJOBLOS PALU-ARIT BERARTI MENGALAHKAN KAUM TERORIS

Saja datang ke Semarang, bukan untuk menambah suara buat PKI, karena suara PKI di Semarang pasti akan tambah, walaupun saja tidak datang. Saja datang supaja tambahannja lebih besar. Saja tidak sangsi², bahwa pendirian Rakjat Semarang adalah tetap, jaitu „Sekali Palu-Arit, tetap Palu-Arit", apalagi sesudah Rakjat Djakarta menundjukkan djalan jang benar, djalan Rakjat, djalan kekiri, kepada seluruh Rakjat Indonesia.

Berita pertama jalah berita kemenangan PKI dalam pemilihan DPRD Djakarta Raja baru² ini. Djalan kekiri, djalan kemenangan Palu-Arit, jang ditempuh Rakjat Djakarta bukan hanja djalan untuk Djakarta, tetapi untuk seluruh Indonesia. Djalan kiri berarti djalan anti-kolonialisme dan djalan demokrasi. „Kekiri", inilah djawaban jang tepat dari Rakjat terhadap kaum kepalabatu dan kaum separatis jang sudah menggerowoti Republik dibeberapa daerah. Djuga „kekiri" adalah djawaban jang tepat terhadap orang² jang bimbang dalam melawan kolonialisme dan membela demokrasi, terhadap orang² dan partai² jang ngular-kambang, jang „ikan bukan dagingpun bukan". Rakjat harus memilih djalannja sendiri, dan djalan itu sudah ditundjukkan oleh Ibukota Republik.

Berita kedua jalah tentang pertjobaan pembunuhan terhadap pemimpin² PKI jang gagal. Tidak semua orang suka dan senang melihat PKI madju. Ada orang jang sakit mata dan sakit hatinja melihat pertumbuhan PKI. Mereka tidak suka melihat Rakjat Indonesia makin sedar akan hak²nja, makin ladju menempuh djalan anti-kolonialisme dan demokrasi. Kemadjuan Rakjat mereka anggap mempersempit djalan mereka, djalan kekanan, djalan anti-Republik Kesatuan, djalan korupsi, birokrasi, subversi. Mereka mendjadi matagelap, mendjadi kalap, dan achirnja menempuh djalan anti-demokratis, djalan teror. Inilah latar belakang penggeranatan terhadap kantor CC PKI.

Mereka kira kalau saja mati karena penggeranatan, PKI akan mandek, Rakjat Indonesia akan mudah diseret kekanan. Dalam kekalapannja, mereka lupa mempertimbangkan, bahwa kalau saja mati karena geranat mereka akan lebih dikutuk oleh Rakjat, dan Rakjat akan lebih tjinta pada PKI dan akan lebih jakin akan djalan kiri jang sudah dipilihnja. Saja dan CC PKI menerima ratusan surat, sedjumlah telegram dan puluhan delegasi Rakjat jang menjatakan solider dengan PKI dan mengutuk kaum teroris. Inilah djawaban Rakjat pada kaum teroris dan kaum kepalabatu.

Ledakan geranat dikantor CC PKI menundjukkan bahwa kaum kontra-revolusioner sudah makin matagelap dan oleh karena itu masih berbahaja, tetapi difihak lain sekaligus peristiwa ini menundjukkan kelemahan mereka, mereka akan lebih dikutuk lagi oleh Rakjat, mereka akan lebih terisolasi lagi. Saja harap supaja kaum Komunis dan kaum demokratis lainnja lebih mempertinggi kewaspadaan dan lebih memperkuat persatuannja. Teror djangan dibalas dengan teror. Ini samasekali tidak berarti bahwa kita takut.

Tidak ada alasan bagi kaum Komunis untuk takut kepada kepalabatu jang sudah kalap, jang sudah melakukan praktek teror. Adanja teror kaum kepalabatu membuktikan bahwa kita kuat. PKI dan Rakjat adalah kuat, oleh karena itu kita samasekali tidak membutuhkan tjara² teror, ja, kita mengutuk tjara² teror. Kita memilih djalan demokrasi, dan kita jakin bahwa dengan djalan ini kita bisa mentjapai tudjuan kita.

Praktek teror adalah praktek orang jang lemah, jang sudah hilang kepertjajaannja kepada kekuatan sendiri. Rakjat Semarang, Rakjat Djawa Tengah dan seluruh Rakjat Indonesia bertekad bulatlah untuk mengalahkan kaum kontra-revolusioner, untuk mengalahkan kaum teroris. Mentjoblos Palu-Arit dalam pemilihan DPRD jang akan datang, adalah salahsatu tjara untuk mengalahkan kaum teroris dan untuk memenangkan demokrasi. Teror tidak bisa dikalahkan dengan teror, tetapi kalahkanlah dengan demokrasi, dengan organisasi dan disiplin badja.

Semarang, 6 Djuli 1957

dimpostmanalu@yahoo.com

Usaha PKI untuk menggalang front persatuan dengan kekuatan demokratis senantiasa mendjadi persoalan praktis se-hari2. *Sedikit tentang kerdjasama PNI-PKI* adalah keterangan Kawan D.N. Aidit sebagai reaksi atas pendapat Ketua Umum PNI Suwirjo soal kerdjasama partai2. Keterangan Suwirjo dinjatakan realis, karena tidak a priori menolak kerdjasama dengan salahsatu partai, menghendaki kerdjasama didasarkan atas soal2 jang kongkrit dan menegaskan bahwa PNI tetap memperdjuangkan pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno.

SEDIKIT TENTANG KERDJASAMA PNI — PKI

Keterangan Sdr. Suwirjo jang dimuat dalam sementara pers tentang kerdjasama partai2, walaupun nampaknja agak oportunis, menurut pendapat saja adalah realis. Saja katakan realis karena Sdr. Suwirjo tidak a priori menolak kerdjasama dengan salahsatu partai, menekankan supaja kerdjasama didasarkan atas soal2 praktis (kongkrit) dan bahwa PNI tetap memperdjuangkan pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno.

Saja berpendapat, bahwa tidak seharusnja PNI a priori beroposisi dimana PKI mendapat kemenangan mutlak. Djuga dalam keadaan seperti ini, sebaiknja tetap diadakan kerdjasama atas dasar soal2 kongkrit. Dari fihak PKI, akan mengusahakan, djustru ditempat2 dimana PKI menang mutlak, supaja kerdjasama antara partai2, terutama antara PNI-PKI mendjadi lebih baik. Di-tempat2 dimana PKI mutlak atau leading, PKI senantiasa bersedia merundingkan bagaimana selandjutnja harus diatur kerdjasama jang saling menguntungkan antara partai2 demokratis jang mendukung Konsepsi Presiden Sukarno.

Selandjutnja baik direnungkan apakah jang selama ini dinamakan „kerdjasama PNI-PKI". Dalam prakteknja ini berarti sokongan PKI pada kabinet2 jang dipimpin oleh PNI, atau dimana PNI mengambil bagian penting, karena PKI menjetudjui politik kabinet2 itu. Selama PNI tetap mendjalankan politik anti-kolonialisme dan demokratis PKI tetap akan menjokong kabinet PNI, walaupun seandainja PNI mengatakan tidak mau bekerdjasama dengan PKI. Tetapi kalau PNI melepaskan politiknja jang wadjar itu, dan kembali menempuh politik anti-demokratis dan anti-Rakjat dari kabinet Sukiman jang dulu disokong oleh PNI, dengan sajang sekali PKI tidak mungkin menjokongnja. Dalam keadaan seperti itu, PKI terpaksa sekali lagi berdiri sendiri ber-sama2 dengan seluruh kekuatan progresif dan demokratis melawan kolonialisme dan

dimpsmanalu@yahoo.com

fasisme, melawan pemerintah jang mengabdi sistim2 terkutuk ini.

Saja tetap berpendapat, bahwa kerdjasama atau tidak kerdjasama antara PNI-PKI bukan hanja soal anggota2 PNI dan PKI, tetapi soal seluruh Rakjat Indonesia, terutama soal mereka jang membela demokrasi dan Republik Kesatuan dan soal mereka jang menginginkan supaja konstituante menghasilkan Undang2 Dasar Republik Indonesia jang demokratis.

Djakarta, 13 Agustus 1957

Berikut ini adalah tulisan Kawan D.N. Aidit berkenaan dengan peringatan Ulangtahun ke-12 Revolusi Agustus. Ulangtahun Revolusi Agustus kali ini diadakan dalam situasi dimana kekuatan demokratis dan persatuan sedang berkembang, tetapi difihak lain kaum kontra-revolusioner sudah menempuh djalan2 fasis dan teror, jang djustru menundjukkan kelemahannja.

Oleh kawan Aidit ditundjukkan bahwa pelaksanaan sepenuhnja Konsepsi Presiden Sukarno adalah merupakan pelaksanaan sistim politik jang sesuai dengan keadaan objektif Indonesia sekarang, sesuai dengan kebulatan tekad Rakjat Indonesia, untuk menumpas pemberontakan separatis dan kaum teroris serta menjelesaikan Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar2nja.

Dimpos Manalu
dimposmanalu@yahoo.com

RAKJAT INDONESIA BERTEKAD BULAT UNTUK MENUNAIKAN TUGAS² REVOLUSI AGUSTUS

Semua Djalan Menudju Ke Pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno

Sebagaimana tahun jang lalu 17 Agustus tahun ini (1957), jaitu ulangtahun ke-12 Revolusi Agustus, diperingati oleh Pemerintah dan Rakjat Indonesia setjara besar²an dan meriah.

Peringatan ulangtahun Revolusi Agustus kali ini ditandai oleh bertambah eratnja kerdjasama Pemerintah dengan Rakjat, jang diwakili oleh organisasi² massanja. Memang, pada waktu² belakangan ini, sedjak diumumkan Konsepsi Presiden Sukarno jang memberi tempat terhormat kepada tokoh² golongan² fungsionil atau orang² jang berpengaruh dalam organisasi² massa untuk duduk dalam Dewan Nasional Republik Indonesia, rol dari organisasi² massa makin besar didalam kehidupan politik di Indonesia. Baik dalam pelaksanaan berbagai pekerdjaan Pemerintah, maupun didalam Dewan Nasional Republik Indonesia jang diketuai oleh Presiden Sukarno orang² jang berpengaruh dalam organisasi² massa memegang peranan.

Didalam Panitia Negara Peringatan 17 Agustus jang biasanja hanja terdiri dari pegawai² tinggi Pemerintah, kali ini atas putusan Pemerintah Djuanda djuga duduk orang² jang berpengaruh didalam organisasi² massa. Dibanjak kota dan desa sekarang berdiri Panitia² Peringatan 17 Agustus jang pimpinannja terdiri dari wakil Pemerintah setempat dan „Empat Besar" (PNI, PKI, NU dan Masjumi) dengan dibantu oleh pemimpin organisasi-organisasi massa.

Selain daripada itu ulangtahun Revolusi Agustus tahun ini tidak hanja diperingati dengan rapat² dan pidato², tetapi djuga dengan gerakan jang akan didjalankan segera sesudah tanggal 17 Agustus, jaitu „Gerakan Hidup Baru". Gerakan ini diadakan atas nasehat Dewan Nasional Republik Indonesia. Nasehat ini sudah diterima

dan akan didjalankan oleh kabinet Djuanda dengan bantuan Rakjat. Tudjuan gerakan ini jalah untuk memperbaharui tekad Rakjat Indonesia guna menjelesaikan Revolusi Agustus dan melaksanakan usaha jang kongkrit dilapangan sosial, ekonomi dan politik jang berfaedah bagi Rakjat. Comite Central PKI sudah menginstruksikan kepada seluruh anggota PKI supaja mengambil bagian aktif dalam gerakan ini.

* * *

Dalam situasi politik jang bagaimanakah ulangtahun Revolusi Agustus ke-12 diadakan?

Dua pemilihan umum tahun 1955, jaitu pemilihan untuk Parlemen dan Konstituante, merupakan titikbalik dalam kehidupan politik di Indonesia dan mempunjai konsekwensi² jang banjak dan djauh. Dengan hasil dua pemilihan umum ini lenjaplah pengharapan kaum imperialis dan kaum reaksioner dalamnegeri untuk setjara legal mendirikan pemerintah kanan jang „stabil" dan untuk menjusun Konstitusi „Negara Islam" jang reaksioner.

Hasil dua pemilihan umum tersebut tidak hanja terbatas pada menutup kemungkinan setjara legal membentuk pemerintah kanan jang „stabil" dan menjusun konstitusi „Negara Islam" jang reaksioner, tetapi djuga mempunjai kelandjutan² jang lebih djauh lagi. Prestise PKI dan organisasi² massa pekerdja mendjadi semakin naik sehingga politik kaum reaksioner untuk mengisolasi PKI dan organisasi² massa pekerdja mendjadi politik jang sangat sulit dilaksanakan. Rasa keadilan massa mendjadi tersinggung djika PKI dan organisasi² massa pekerdja ditinggalkan dalam berbagai pekerdjaan jang mengenai urusan umum.

„Empat Besar", jaitu penamaan untuk empat partai besar jang menang dalam pemilihan umum, mendjadi istilah jang sangat populer dikalangan Rakjat. Dalam perasaan massa jang luas tidak ada pekerdjaan dapat diselesaikan tanpa PKI jang mendjadi salahsatu dari „Empat Besar". Dengan demikian, politik mengisolasi kekuatan progresif jang dipimpin oleh PKI mendjadi politik jang paling tidak masuk akal Rakjat, sebaliknja politik persatuan mendjadi lebih mudah diterima oleh Rakjat. Politik perpetjahan mudah

dimpostmanalu@yahoo.com

menimbulkan kemarahan massa.

Hasil dua pemilihan umum tersebut diatas tidak hanja telah memerosotkan „prestise" partai Masjumi jang anti-Komunis, tetapi djuga telah mendjatuhkan „prestise" partai² anti-Komunis lainnja, antara lain Partai Sosialis Indonesia dan Partai Murba. Kedua partai ini sebelum pemilihan umum menepuk dada sebagai partai jang mempunjai banjak pengikut dikalangan Rakjat, tetapi pemilihan umum telah menelandjangi mereka sebagai partai jang tidak disukai Rakjat. PSI adalah partai anti-Komunis jang menggunakan sembojan² kanan untuk memukul kaum kiri, sedangkan Partai Murba adalah partai anti-Komunis jang mengobral sembojan² „kiri" untuk memukul kaum kiri. Terhadap kaum pemberontak anti-Republik di Sumatera Barat dan di Sumatera Selatan tjabang² kedua partai ini di-tempat² tersebut mempunjai sikap jang sama, jaitu terang²an berdiri difihak kaum pemberontak anti-Republik. Kedua partai ini tidak pernah menjatakan sikap jang terang menentang gerombolan „Darul Islam" dan „Tentara Islam Indonesia", jang sudah bertahun² berusaha menghantjurkan Republik Indonesia dari dalam dengan bantuan kaum imperialis, terutama kaum imperialis Belanda dan Amerika.

Dengan dibentuknja Dewan² Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan² Pemerintah Daerah berdasarkan hasil² pemilihan Parlemen, maka dilikwidasilah Dewan² Perwakilan Rakjat Daerah Sementara dan Dewan² Pemerintah Daerah Sementara tjiptaan menteri² Masjumi dimasa jang lampau, dan oleh karena itu pada umumnja dimonopoli oleh Masjumi-PSI dengan disana-sini PNI diikutsertakan, sedangkan PKI-NU tidak mendapat tempat. Sekarang dihampir semua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, baik di Djawa maupun diluar Djawa duduk orang² Komunis, dan disebagian besar Dewan² Pemerintah Daerah duduk orang-orang Komunis.

Konsepsi Presiden Sukarno lebih memakukan lagi kemenangan kekuatan demokratis dalam pemilihan umum jang lalu, karena Konsepsi ini menginginkan dibentuknja satu pemerintah pusat dimana partai² diwakili didalam kabinet berdasarkan djumlah kursi jang dimilikinja dalam parlemen. Walaupun konsepsi ini sekarang belum dilaksanakan sepenuhnja, tetapi ia telah berdjasa dalam

membantu menghimpun kekuasaan demokratis jang sangat diperlukan oleh Rakjat Indonesia untuk melawan maksud² djahat kaum imperialis, dan ini sekaligus berarti mendekatkan perdjuangan Rakjat Indonesia kepada pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%.

Perkembangan kekuatan demokratis seperti tersebut diatas telah membikin kaum reaksioner kehilangan kepertjajaan pada djalan² parlementer, dan telah membikin mereka mendjadi kalap. Dengan Hatta sebagai tokoh mereka jang terpenting, mereka melakukan berbagai usaha diluar parlemen dan jang bertentangan dengan undang² untuk menghalangi perkembangan demokratis. Dengan menggunakan rasa kurang puas Rakjat berhubung dengan buruknja keadaan ekonomi, jang notabene disebabkan karena perbuatan dan ketidakmampuan mereka sendiri, mereka mengorganisasi pemberontakan-pemberontakan militer dibeberapa tempat di Sumatera dan Sulawesi.

Di-daerah² dimana PKI dan PNI merupakan gabungan kekuatan demokratis jang besar, seperti di Djawa, Sumatera Utara dan lain² pertjobaan² pemberontakan mereka dapat dikalahkan. Berkat perlawanan kekuatan demokratis, termasuk elemen² patriotik dalam Angkatan Perang, kekuasaan salah seorang kepala pemberontak, jaitu kolonel Simbolon, dapat digulung hanja dalam empat hari. Di-tempat² seperti di Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Sulawesi Utara mereka mengadakan praktek² militeris Djepang, mereka menangkapi dan menjiksa a la fasis pemimpin² kaum buruh, kaum tani, kaum veteran dan pemuda serta pemimpin² PKI. Djuga pemimpin² PNI mereka tangkapi. Elemen² patriotik dalam Angkatan Perang terus mereka awasi dan djika kira² akan membahajakan kedudukan mereka, orang² ini mereka geser kekedudukan jang tidak penting. Mereka djuga mengadakan kerdjapaksa terhadap Rakjat dengan demagogi untuk „pembangunan daerah".

Pada pertengahan tahun ini Hatta mengadakan kampanje dengan berkedok „koperasi". Dia menghasut Rakjat supaja membentji demokrasi jang sedang berkembang dan mengadjak Rakjat memudji² perbuatan kaum fasis ditempat kelahirannja, jaitu di Minangkabau (Sumatera Barat). Hatta mengadakan tjelaan² jang

dimasmanalu@yahoo.com

tadjam terhadap politik persatuan nasional dan demokratis jang didjalankan oleh Presiden Sukarno dan oleh kabinet Djuanda. Sebagaimana biasa, untuk mengalihkan perhatian massa dari djalan revolusioner jang sudah ditempuhnja dalam melawan imperialisme, jaitu kesatuan aksi massa dan persatuan nasional, Hatta berdemagogi mengenai „koperasi". Dikatakannja bahwa „koperasi" adalah satu²nja djalan keluar untuk menjelamatkan Indonesia dari segala matjam malapetaka. Padahal jang dinamakan „koperasi" oleh Hatta dalam prakteknja sering tidak lain daripada perusahaan² kaum tengah, jang notabene tidak dapat berkembang karena tekanan² ekonomi dari kaum kapitalis besar asing. Makin lama makin terbuka mata Rakjat, bahwa „koperasi" sudah mendjadi kuda tunggangan Hatta untuk menjerang politik Presiden Sukarno, untuk menjerang kabinet Djuanda jang didukung oleh kekuatan progresif dan sudah tentu terutama untuk menjerang PKI dan organisasi² massa jang revolusioner. Pendeknja, untuk menjerang apa sadja jang bersifat madju, demokratis dan patriotik.

Bukan rahasia lagi, bahwa maskapai² besar asing, terutama maskapai² minjak jang beroperasi di Sumatera, berdiri dibelakang gerakan Hatta. Dengan terang²an Hatta mengandjurkan supaja ada hubungan ekonomi jang langsung antara Pemerintah Daerah, tentu maksudnja jang dikuasai oleh kaum pemberontak, dengan luarnegeri, jang mudah diraba bahwa jang dimaksudkannja jalah negeri² imperialis. Dengan ini Hatta dan pengikut²nja setjara politik mau memetjahbelah bangsa Indonesia, dan setjara ekonomi mau mengatjaukan ekonomi Indonesia agar dengan demikian diharapkannja dapat melumpuhkan Pemerintah Pusat jang berkedudukan di Djakarta.

Dengan demikian djelaslah bahwa gerakan Hatta dengan Dewan² ilegalnja dan warlord²nja (1) tidak lain daripada reaksi terhadap perkembangan demokratis dan terhadap sukses² jang didapat oleh Rakjat progresif Indonesia. Djadi, Dewan² ilegal jang di-pudji² oleh Hatta itu pada hakekatnja tidak lain daripada sampah² dan kotoran² jang ter-apung² diatas arus kekuatan demokratis jang sedang mengalir dengan derasnja. Inilah jang dibela oleh Hatta, dan inilah jang ingin ditiadakan oleh Rakjat Indonesia.

Kegiatan kaum reaksioner pada waktu belakangan ini tidak

hanja terbatas pada agitasi² menentang demokrasi dan merebut kekuatan di-daerah² dengan kekuatan militer, tetapi djuga sudah meningkat ke-perbuatan² teror jang berupa pelemparan granat kekantor CC PKI dan kekantor SOBSI pada tanggal 4 Djuli jang lalu. Pada tanggal 30 Djuli disusuli lagi dengan pelemparan² granat ke-sasaran² lain di Djakarta.

Djadi, ulangtahun ke-12 Revolusi Agustus dilangsungkan dalam situasi dimana kekuatan demokratis sedang berkembang, tetapi difihak lain kaum kontra-revolusioner sudah menempuh djalan² jang paling kotor dan paling kasar, djalan fasis dan teror. Ini menundjukkan bahwa kaum kontra-revolusioner mendjadi semakin berbahaja bagi gerakan Rakjat Indonesia dan bagi keutuhan Republik Indonesia, tetapi ini djuga menundjukkan kelemahan mereka karena mereka sudah menempuh djalan² jang dikutuk oleh Rakjat.

Kenjataan bahwa salahseorang kepala pemberontak, kolonel Simbolon, hanja dapat berkuasa empat hari di Sumatera Utara, bahwa pertjobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno dan Presiden Worosjilov dapat digagalkan, bahwa soal Indonesia Timur dapat diatasi sehingga didaerah ini sekarang hanja tinggal lagi soal Sulawesi Utara, dan bahwa gerombolan² kaum subversif dan teroris dapat digulung di Djakarta dan di Bandung, sangat memperkuat kejakinan Rakjat Indonesia, bahwa betapapun sukarnja keadaan, dengan keuletan dan tekad jang kuat semua kesukaran pasti akan dapat diatasi.

Disamping terus berdjuang untuk mengalahkan kaum imperialis dan kaum reaksioner dalamnegeri, berdjuang melawan pemberontak² separatis dan kaum teroris, Rakjat Indonesia dengan tidak henti²nja berusaha mentjari sistim politik jang sesuai dengan sjarat² sedjarah jang ada sekarang dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

PKI sudah ber-kali² menjatakan pendiriannja, bahwa kalau tergantung pada PKI maka djalan parlementerlah jang dipilih. Selama tjara² perdjuangan parlementer masih dimungkinkan untuk PKI, maka PKI akan menempuh djalan ini dan jakin bahwa djalan ini bisa menudju kepenjelesaian Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja, menudju kesatu kekuasaan Rakjat Indonesia dalam satu Republik Indonesia jang merdeka penuh, demokratis dan progresif. Sebagai

dimpos manalu@yahoo.com

langkah politik jang penting untuk sampai pada tudjuan strategis ini PKI telah mengusulkan supaja dibentuk Pemerintah Koalisi Nasional dimana „Empat Besar" dan partai² lain duduk didalamnja, dan jang politiknja mempertahankan kemerdekaan nasional, meluaskan demokrasi dan membela perdamaian.

Presiden Sukarno tidak henti²nja mentjari sistim politik jang sesuai dengan keadaan objektif sekarang dan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam mentjari ini Presiden Sukarno menemukan djawabannja seperti jang dimuat didalam Konsepsinja, jaitu Pemerintah Gotongrojong dimana partai² mendapat djumlah kursi menteri setjara proporsionil berdasarkan djumlah kursi masing² dalam Parlemen, dan disamping itu dibentuk Dewan Nasional Republik Indonesia jang mendjadi penasehat Pemerintah, dimana didalamnja duduk djuga tokoh² dari organisasi² massa. PKI, PNI serta seluruh kekuatan progresif dan demokratis menjokong konsepsi ini. Pelaksanaan sepenuhnja dari konsepsi ini merupakan langkah jang penting dalam mentjapai tudjuan strategis Revolusi Indonesia, jaitu menjelesaikan Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja.

Dengan terbentuknja Dewan Nasional Republik Indonesia jang diketuai oleh Presiden Sukarno sendiri, sebagian dari konsepsi Presiden Sukarno sudah dilaksanakan. Tetapi jang paling penting dari konsepsi ini, jaitu penggabungan semua kekuatan nasional dalam pemerintah pusat, jaitu kabinet Gotongrojong, belum dilaksanakan. Tugas politik Rakjat Indonesia jang terdekat pada waktu sekarang jalah melaksanakan konsepsi ini sepenuhnja, sebagai sjarat untuk lebih mempersatukan seluruh kekuatan nasional jang sangat dibutuhkan oleh Rakjat Indonesia dalam perdjuangan untuk mengalahkan imperialis asing, untuk mengembangkan sistim demokrasi, untuk perdamaian dunia dan persahabatan dengan semua negeri dan semua Rakjat didunia.

Bahwa Rakjat Indonesia sedang menudju kepelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100% tidaklah meragukan, dan hal ini dengan djelas dibuktikan oleh hasil² pemilihan Dewan² Perwakilan Rakjat Daerah di Djawa baru² ini. PKI sebagai Partai jang teguh mendukung Konsepsi Presiden Sukarno, artinja teguh mendjalankan politik persatuan nasional, mendapat kepertjajaan jang lebih besar dari Rakjat. Ada kemungkinan besar, djika penghitungan

semua suara sudah selesai, bahwa kepertjajaan besar jang diberikan Rakjat kepada PKI akan menempatkan PKI sebagai partai pertama di Djawa. Sebaliknja partai² jang menentang Konsepsi ini atau jang ragu² melaksanakan Konsepsi ini mengalami kemerosotan suara jang tidak ketjil. Semua djalan menudju kepelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%.

dimpasmanalu@yahoo.com

Ini adalah keterangan Kawan D.N. Aidit sekitar hasil2 Musjawarah Nasional jang diselenggarakan oleh Kabinet Karya dari tanggal 10 sampai 16 September 1957 di Djakarta.

Tentang resolusi Musjawarah Nasional jang mempunjai tudjuan untuk menormalisasi keadaan Republik dikatakan bahwa ia merupakan satu kemenangan dari persatuan dan demokrasi atas separatisme dan fasisme.

Diperingatkan oleh Kawan D.N. Aidit selandjutnja bahwa sukses atau tidaknja pelaksanaan putusan2 tersebut sangat tergantung kepada tindakan2 tjepat, tepat dan tegas dari Kabinet Karya, terutama dalam hubungan dengan pembubaran „Dewan2 Partikelir, penjelundupan dan barter bar."

Achirnja diserukan agar Rakjat Indonesia lebih waspada, lebih merapatkan barisannja dan lebih teguh lagi membantu Presiden, Kabinet dan Angkatan Perang melaksanakan putusan2 MN jang menguntungkan.

MUSJAWARAH NASIONAL BERACHIR DENGAN KEMENANGAN NASIONAL

Sudah sedjak semula saja menjatakan bahwa PKI menjetudjui diadakannja Musjawarah Nasional. Tentang apakah MN ini berachir dengan sukses, dapat saja katakan bahwa MN sudah sukses sedjak adanja kenjataan bahwa Musjawarah ini dikundjungi oleh pembesar2 sipil dan militer dari semua daerah, tanpa perketjualian. Ini menundjukkan kewibawaan Kabinet Karya sebagai pengundang, dan menundjukkan pentingnja peranan Dewan Nasional dalam kehidupan politik Rakjat Indonesia, karena Kabinet Karya mengadakan MN atas nasehat Dewan Nasional.

Mengenai resolusi jang disahkan MN pada tanggal 15 September jl. pada pokoknja dapat dikatakan, bahwa resolusi tersebut merupakan kemenangan nasional, ia mengandung unsur2 jang kuat untuk menormalisasi keadaan dan menegakkan hukum di Republik Indonesia. Tetapi normalisasi keadaan dan menegakkan hukum ini banjak tergantung pada putusan panitia militer jang sampai pada tanggal 16 September ini belum selesai. Djika putusan2 panitia militer sedjiwa dengan putusan2 jang lain, artinja berdjiwakan normalisasi keadaan Angkatan Darat, terutama menegakkan hierarchi dan disiplin, maka dapatlah kita katakan bahwa MN sukses sepenuhnja. Memang masih ada putusan2 MN jang harus dibahas setjara mendalam dan diputuskan oleh Parlemen, sebagai satu2nja badan pembuat Undang2, tetapi imbangan didalam Parlemen sekarang tidak akan merintangi pelaksanaan putusan2 MN jang menguntungkan Rakjat dan Republik Indonesia.

Dalam hubungan dengan pelaksanaan putusan2 MN, Kabinet Karya harus bertindak tjepat, tepat dan tegas. Untuk suksesnja pelaksanaan, Pemerintah djangan sampai terlibat dalam „perang interpretasi" jang mau diadakan oleh orang2 jang tidak menginginkan adanja perdamaian dan ketenangan didalamnegeri kita. Interpretasi Pemerintah harus tetap seperti ketika putusan2 MN dirumuskan dan disahkan.

Tindakan Pemerintah jang tjepat, tepat dan tegas terutama diharapkan dalam hubungan dengan pembubaran Dewan² Partikelir jang setjara tidak sah berkuasa di-daerah², dalam hubungan dengan mengachiri perdagangan barter liar dan penjelundupan² jang sangat merugikan negara, menegakkan hierarchi dan disiplin tentara, dan mengachiri penangkapan² se-wenang² terhadap pembela² Kabinet Karya di-daerah² jang dikuasai Dewan² partikelir. Penilaian terachir daripada Rakjat mengenai manfaat MN bergantung terutama pada tindakan² penjelesaian pemerintah mengenai hal² tersebut. Adalah sangat bertentangan dengan djiwa Musjawarah Nasional, bahwa sedang MN berlangsung di Djakarta, pada tanggal 14 September jang lalu di Palembang diadakan penangkapan² baru oleh fihak kekuasaan militer terhadap orang² jang setia membela Kabinet Karya dan membela keutuhan Republik Indonesia.

Mengenai pernjataan bersama antara Presiden Sukarno dan Mohamad Hatta, dimana kedua tokoh ini menjatakan bahwa mereka berkewadjiban mutlak untuk tetap turutserta dengan seluruh Rakjat, Pemerintah Republik Indonesia serta segenap alat² kekuasaan Negara, membina dan membela dasar² Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam keadaan apapun, saja anggap baik. Malahan akan lebih baik lagi, kalau pernjataan demikian itu djuga diadakan antara tokoh² dari semua partai, organisasi dan golongan.

Untuk melaksanakan putusan² MN jang menguntungkan Rakjat dan Republik Indonesia, saja menjerukan supaja seluruh Rakjat Indonesia lebih mempertinggi kewaspadaan nasional, lebih merapatkan barisannja dan lebih teguh membantu Presiden/Panglima Tertinggi, Kabinet Karya dan Pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia. Normalisasi keadaan Republik berarti mengkonsolidasi hasil utama daripada Revolusi Agustus 1945. Oleh karena itu, pekerdjaan ini tidak ringan, tetapi berat dan menghendaki keuletan.

Segenap kekuatan untuk menormalisasi keadaan Republik Indonesia!

Djakarta, 17 September 1957

Tulisan berikut adalah keterangan Kawan D.N. Aidit sebagai djawaban terhadap suara kaum reaksi jang menghendaki supaja PKI dilarang. Didjelaskan oleh Kawan Aidit bahwa usaha2 reaksi itu memang disengadja oleh kaum imperialis untuk memetjahbelah kekuatan revolusioner. Usaha jang djahat ini selainnja bertentangan dengan perikemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial dari Pantjasila memperlihatkan dengan njata bahwa sembojan anti-Komunisme mereka hanja kelandjutan belaka dari pembelaan mereka terhadap feodalisme, imperialisme dan kapitalisme.

dimpsmanalu@yahoo.com

MELARANG PKI BERARTI MENENTANG 4 SILA DARIPADA PANTJASILA

Berhubung adanja suara², walaupun tidak begitu lantang, jang menuntut supaja ada pelarangan terhadap PKI karena katanja „Komunisme bertentangan dengan sila pertama Pantjasila dan kepribadian Indonesia", saja merasa perlu untuk sekedar memberi pendjelasan tentang ini. Dengan pendjelasan ini sekaligus saja mendjawab pertanjaan-pertanjaan jang banjak disampaikan kepada Comite Central PKI dan kepada saja sendiri tentang soal ini.

Per-tama² saja berpendapat bahwa suara² jang menghendaki supaja PKI dilarang samasekali tidak mewakili kepentingan agama manapun atau kepentingan nasional Rakjat Indonesia. Ribut² supaja PKI dilarang adalah sangat erat hubungannja dengan perang uratsjaraf jang sengadja dilantjarkan oleh kaum imperialis untuk memetjahbelah kekuatan revolusioner Rakjat Indonesia.

Selandjutnja perlu saja kemukakan, bahwa adalah tidak benar bahwa Komunisme mau memaksakan orang meninggalkan ke-Tuhanan jang Maha Esa dan memaksa orang menerima materialisme, sehingga dianggap „bertentangan dengan sila pertama Pantjasila dan kepribadian Indonesia". Jang diinginkan oleh kaum Komunis jalah, supaja tidak ada seorangpun jang dipaksa menganut atau dipaksa tunduk pada peraturan² salahsatu agama. Malahan Konstitusi PKI tidak menetapkan, bahwa seseorang harus melepaskan agamanja untuk mendjadi anggota PKI. Dalam soal keagamaan jang kami perdjuangkan jalah supaja soal² kenegaraan tidak ditjampur-adukkan dengan soal² keagamaan. Dalam hal ini kami memang tidak sependirian dengan orang² jang setjara sah atau tidak sah memperdjuangkan berdirinja Negara Darul Islam, tetapi sebaliknja saja kira kami sefaham sepenuhnja dengan semua nasionalis jang sedjati, dengan semua penganut agama Keristen, dengan

sebagian besar penganut² agama Islam, dengan semua penganut agama Hindu Bali dan agama² lainnja.

Dalam hubungan dengan kesetiaan pada Pantjasila, saja berpendapat bahwa djustru mereka jang menuntut supaja PKI dilarang pada hakekatnja adalah orang² jang dengan terang²an menolak Pantjasila, terutama menolak 4 sila daripada Pantjasila. Tuntutan melarang PKI adalah bertentangan dengan sila² peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial.

Mereka jang menuntut supaja PKI dilarang pada hakekatnja menolak *sila peri-kemanusiaan,* karena sedjak berdirinja 37 tahun jang lalu, djadi lama sebelum Masjumi dan partai² lain lahir di Indonesia, PKI sudah memperdjuangkan terlaksananja azas² kemanusiaan dalam bentuk² perdjuangan melawan kolonialisme, melawan eksploitasi dan mentjiptakan persaudaraan antara sesama manusia. Adalah djuga kenjataan bahwa sampai sekarang PKI tetap memperdjuangkan azas² kemanusiaan ini.

Mereka pada hakekatnja menolak *sila kebangsaan,* karena lama sebelum Masjumi dan partai² lain lahir, PKI sudah berdjuang dibarisan depan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Adalah djuga kenjataan, bahwa untuk kemerdekaan bangsa orang² Komunis djuga telah mendjadi pendorong jang penting daripada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bahwa orang² Komunis djuga pengambil bagian jang penting dalam melawan tentara kolonial Belanda, dan sekarang kaum Komunis djuga berdiri dibarisan depan untuk menjempurnakan kemerdekaan Indonesia dilapangan politik, untuk kesatuan Republik Indonesia dan untuk kemerdekaan seluruh wilajah Indonesia, serta untuk memerdekakan Indonesia dilapangan ekonomi dan kebudajaan. Djadi, dalam membela kepentingan bangsa atau nasion Indonesia, PKI tidak hanja tidak pernah ketinggalan, tetapi ia memang didirikan untuk itu. PKI adalah partai jang tidak hanja nasional dalam omongan, tetapi djuga dan terutama nasional dalam perbuatan.

Mereka pada hakekatnja menolak *sila kerakjatan,* mereka sebenarnja tidak menerima bahwa sumber segala kekuasaan ada ditangan Rakjat, karena djustru merekalah jang bertindak diluar bidang Parlemen dan demokrasi. Lama sebelum Masjumi dan partai² lain lahir, PKI sudah berdjuang menentang otokrasi kolonial

dimpos manalu@yahoo.com

dan feodal, supaja hak² demokrasi didjamin bagi Rakjat. Sekarang PKI berdjuang untuk pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%, artinja supaja terbentuk Kabinet Gotongrojong sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, dimana semua partai jang mentjapai quorum duduk dalam satu kabinet untuk melaksanakan tjita² Revolusi Agustus 1945. Ini berarti, bahwa PKI berdjuang untuk melenjapkan diktatur beberapa partai besar jang selama ini sering terdjadi. Dari sini mendjadi sangat terang, bahwa PKI djauh lebih demokratis daripada orang², golongan² dan partai² jang menuntut dibentuknja kekuasaan diktatur anti-Komunis, jaitu kekuasaan diktatur jang memusuhi lebih dari duapuluh djuta djiwa Rakjat Indonesia jang mendjadi pengikut² PKI sekarang.

Mereka pada hakekatnja menolak *sila keadilan-sosial,* karena dengan menolak PKI berarti, bahwa mereka menolak Partai jang lama sebelum Masjumi dan partai² lain lahir di Indonesia, sudah memperdjuangkan adanja pembagian rezeki jang adil (Sosialisme) di Indonesia, dan sampai sekarang PKI dengan teguh meneruskan perdjuangan untuk hapusnja ketidakadilan feodalisme, imperialisme dan kapitalisme. Sebaliknja, dari mereka jang anti-Komunis suara jang menuntut hapusnja ketidakadilan ini tidak begitu kedengaran, malahan ada tanda² jang kuat, bahwa sembojan anti-Komunisme mereka hanjalah kelandjutan belaka dari pembelaan mereka terhadap feodalisme, imperialisme dan kapitalisme.

Bagi mereka jang belum mengetahui, adalah baik sekali membatja Maklumat Pemerintah tentang Pendemokrasian tanggal 14 November 1945 jang antara lain mengemukakan: *„Baik Djepang, maupun Belanda bertindak keras terhadap Komunis dan partai² politik jang menghendaki kemerdekaan se-sempurna²nja"* dan bahwa *„Republik Indonesia tidak akan melarang organisasi² politik selama dasar-dasarnja atau aksi²nja tidak melanggar azas² demokrasi jang sah".*

Dari Maklumat Pendemokrasian tersebut djelas sekali bahwa legalitet Partai Komunis Indonesia adalah salahsatu tjiri jang penting dari demokrasi Indonesia, bahwa Partai Komunis Indonesia berdjuang untuk kemerdekaan jang se-sempurna²nja, dan bahwa jang harus dilarang sekarang bukanlah PKI, tetapi djustru partai² jang bertindak melanggar azas² demokrasi. Maklumat Pendemokrasian ini tidak pernah ditjabut oleh kabinet jang manapun, djuga tidak oleh kabinet Hatta, kabinet Natsir atau kabinet Sukiman. Oleh Perdana Menteri Djuanda Maklumat Pendemokrasian 14 November 1945 ini diingatkan kembali dalam keterangannja dimuka Parlemen pada tanggal 4 Oktober baru² ini.

Djakarta, 8 Oktober 1957

dimposmanalu@yahoo.com

Revolusi Oktober dan Rakjat2 Timur adalah tulisan Kawan D.N. Aidit menjambut hari jang luarbiasa, hari jang bersedjarah, jaitu genap 40 tahun Revolusi Sosialis Oktober Besar tahun 1917.

Tulisan ini ketjuali memberi penilaian bagaimana perkasanja pandangandunia proletar bagi perdjuangan kemanusiaan djuga menundjukkan bagaimana besar pengaruhnja Revolusi Oktober bagi perdjuangan Rakjat di Asia untuk merebut kemerdekaan nasional dari kekuasaan kolonialisme.

Achirnja dalam situasi dimana didunia sekarang semua djalan menudju Sosialisme dan Komunisme jang dikumandangkan oleh Revolusi Oktober, Kawan Aidit menekankan chususnja kepada kaum Komunis Indonesia untuk mengkombinasi mempeladjari pengalaman revolusi Tiongkok dan pengalaman perdjuangan parlementer Partai Komunis di Eropa terutama Partai Komunis Perantjis dan Italia, sedangkan jang terpenting jalah soal mengenakan kebenaran2 umum Marxisme-Leninisme dengan praktek kongkrit revolusi Indonesia sendiri, dengan keadaan2 chusus Indonesia.

REVOLUSI OKTOBER DAN RAKJAT2 TIMUR

Empat puluh tahun jang lalu terdjadilah peristiwa besar jang menggemparkan dunia, jang belum pernah ada bandingannja dalam sedjarah umatmanusia, jaitu meletusnja Revolusi Sosialis Oktober Besar. Dentuman meriam jang ditembakkan dari kapal perang Aurora sebagai tanda mulai menjerbu benteng2 burdjuasi Rusia se-olah2 mendenging ditelinga semua orang. Hirukpikuk menjerbu Istana Musim Dingin se-olah2 hirukpikuk balatentara revolusi jang sedang menjerbu semua benteng reaksi diseluruh dunia. Semuanja ini terdjadi di Rusia, tetapi diseluruh dunia proletariat dan Rakjat tertindas lainnja bergembira, bersorak-sorai sebagai tanda kemenangan ada difihak mereka semua. Semuanja ini terdjadi di Rusia, tetapi diseluruh dunia kaum burdjuis dan tuantanah serta semua kakitangannja mengerek bendera setengah tiang, tanda mereka sedang berdukatjita, berkabung.

Revolusi Sosialis Oktober Besar telah mematahkan salahsatu matarantai imperialisme. Sedjak itu untuk selama-lamanja matarantai ini tidak akan bersambung kembali, malahan ini adalah permulaan pemutusan matarantai2 jang lain. Peristiwa ini telah membagi dunia mendjadi dua sistim, telah menimbulkan lukaparah pada kapitalisme dunia sehingga ia terus merana, tidak akan sembuh2 kembali. Dengan meletusnja Revolusi Oktober mulailah zaman keruntuhan kapitalisme, dan zaman mulai menudju Sosialisme dan Komunisme.

Revolusi Oktober mempunjai watak istimewa, jang tidak terdapat pada revolusi2 sebelumnja. Revolusi2 sebelumnja, termasuk djuga Revolusi Amerika tahun 1776 dan Revolusi Perantjis tahun 1789, hanja berhasil dengan mengganti kekuasaan klas penghisap jang lama dengan kekuasaan klas penghisap jang baru. Djadi samasekali tidak menghapuskan penghisapan. Revolusi Oktober telah menimbulkan masjarakat baru diseperenam permukaan bumi dimana penghisapan oleh manusia atas manusia dikutuk dan menurut undang2 maupun menurut kenjataan sudah tidak sah lagi. Sedjak me-

dimposmanalu@yahoo.com

letusnja Revolusi Oktober, dunia sudah tidak sepenuhnja lagi dikuasai oleh kaum penghisap dan penindas.

Revolusi Oktober telah mengubah imbangan kekuatan dunia setjara radikal. Dengan peristiwa ini sedjarah telah menempatkan proletariat Rusia sebagai pelopor proletariat dan Rakjat tertindas lainnja diseluruh dunia dalam perdjuangan mengachiri kekuasaan kaum penghisap dan penindas. Revolusi Besar jang menghapuskan penghisapan dan penindasan ini sudah tentu mempunjai dajatarik jang kuat bagi Rakjat² jang sudah berabad-abad tertindas dan terhina dibawah telapakkaki perbudakan feodal dan kapitalisme kolonial di-negeri² Timur.

Bagi Rakjat negeri² Timur jang terhisap dan terhina, Revolusi Sosialis Oktober Besar pasti bukan hanja sebagai barang tontonan jang menarik, jang hanja untuk dikagumi dan dipudji-pudji. Revolusi Oktober berarti pembuktian kebenaran pandangandunia jang baru bagi perdjuangan untuk kemanusiaan. Tepat sekali sambutan pemimpin Rakjat Tiongkok, Kawan Mau Tje-tung, jang mengatakan, bahwa salvo Revolusi Oktober menjedarkan orang² progresif diseluruh dunia akan Marxisme-Leninisme, bahwa Revolusi Oktober telah membantu orang² progresif diseluruh dunia untuk menerima pandangandunia proletar sebagai alat meramalkan masadepan suatu nasion dan alat memikirkan kembali masalah-masalahnja sendiri.

Adalah satu kenjataan, bahwa tidak hanja proletariat negeri² Timur jang menerima pandangandunia proletar jang dibawa oleh salvo Revolusi Oktober, tetapi sebagian kaum intelektuil revolusioner jang sudah muak melihat praktek demokrasi Barat dan jang mempunjai tjukup keberanian untuk terang-terangan memihak proletariat, djuga menerima pandangandunia proletar. Kaum intelektuil revolusioner ini mempeladjari dari buku² dan guru² orang² Barat tentang perdjuangan untuk kemerdekaan nasional didunia Barat dan tentang revolusi² didunia Barat. Tetapi mereka bukan hanja dirintangi untuk mempraktekkan apa jang mereka peladjari, djuga berbitjara dan menulis tentang ini dalam hubungan dengan revolusi dan perdjuangan kemerdekaan nasional negerinja, mereka tidak diperbolehkan. Pengalaman jang pahit dengan kaum imperialis Barat mengadjar sebagian intelektuil revolusioner dinegeri-negeri

Timur untuk mengambil djalan jang sudah ditempuh oleh proletariat dan kaum tani Rusia, jaitu djalan menggulingkan kekuasaan kaum penindas dan penghisap setjara radikal.

Oleh karena itulah pada umumnja dinegeri-negeri Timur kaum intelektuil revolusioner tidak hanja pedjuang jang militan melawan kolonialisme dan keterbelakangan feodal, tetapi tidak sedikit diantara mereka jang mendjadi pelopor penjebar Marxisme-Leninisme dan menduduki tempat² jang memimpin didalam Partai² Komunis seperti misalnja di Tiongkok, India, Indonesia, Djepang, Vietnam, dan lain². Ini bukanlah sesuatu jang kebetulan. Marxisme-Leninisme adalah ilmu, dan tiap² ilmu harus dipeladjari, oleh karena itu kaum intelektuil revolusionerlah jang lebih dulu mempunjai sjarat² untuk dapat mempeladjari ilmu revolusioner jang baru ini, sedangkan proletariat beladjar ilmu ini pada permulaannja dengan perantaraan mereka.

Sebagai hasil sintese dari gerakan buruh di-negeri² Timur dengan Marxisme-Leninisme lahirlah dinegeri-negeri Timur Partai² Komunis. Partai² Komunis dinegeri-negeri Timur adalah hasil perpaduan keadaan². objektif negeri² Timur itu sendiri dengan pandangandunia jang baru dan sudah terudji kebenarannja, dengan Marxisme-Leninisme. Oleh karena itu tidaklah mengherankan djika Partai² Komunis jang didirikan di-negeri² Timur mendapat sambutan jang antusias dari massa Rakjat pekerdja.

Dapatnja kekuasaan Sovjet menghantjurkan tentara intervensi dari 14 negara imperialis jang dipimpin oleh Winston Churchill, sangat menaikkan prestise Partai² Komunis. Watak Partai² Komunis jang konsekwen membela kaum tertindas menjebabkan Partai² Komunis dinegeri-negeri Timur dalam waktu singkat dapat menghimpun massa jang luas disekitarnja. Disebagian negeri² Timur jang paling terbelakang, dimana exploitasi lebih tidak kenal malu dan penindasan lebih tidak berperikemanusiaan lagi, Partai Komunis dilarang berdiri.

Dibawah pimpinan atau dibawah pengaruh Partai² Komunis gerakan kemerdekaan nasional dinegeri-negeri Timur madju dengan langkah² jang lebih sedar dan lebih tegap. Kaum Komunis adalah inspirator dan organisator jang sedjati dari Rakjat² Timur jang tertindas dan terhisap. Dimana-mana dibentuk serikatburuh², serikat-

dimposmanalu@yahoo.com

tani², organisasi² pemuda dan peladjar dan organisasi² lain jang revolusioner dan ditudjukan untuk melawan kolonialisme dan exploitasi. Bendera² merah jang bersimbulkan palu-arit ditantjapkan ditengah-tengah benteng² kaum imperialis jang dengan tidak tahu malu dan tidak mengenal perikemanusiaan sedang melakukan pemerasan dan penindasan terhadap beratus-ratus djuta manusia jang mendiami koloni² jang luas dan negeri² jang tergantung. Kebesaran Marx dan Lenin, keperwiraan proletariat dan kaum tani Rusia ditjeritakan dari tempat² ditepi pantai sampai kegunung-gunung, kepabrik-pabrik dan pelabuhan², masuk kegubuk-gubuk jang buruk dan gelap dari kaum tani, kaum buruh agrikultur, buruh tambang, buruh pabrik dan lain².

Dalam menjadari akan keunggulan Marxisme-Leninisme, kaum Komunis dinegeri-negeri Timur tidaklah terus tepat dalam membawakannja dinegeri masing-masing, dalam memadukannja dengan kenjataan objektif ditiap-tiap negeri. Boleh dikatakan semua Partai Komunis dinegeri-negeri Timur, terutama disebabkan oleh karena belum adanja unsur proletariat jang kuat didalam pimpinan Partai² itu, pada permulaannja membikin kesalahan jang pada pokoknja sama, jaitu mendjalankan penjelewengan kekiri jang berakibat mengisolasi Partai dari massa dan mengubah Partai mendjadi sekte. Partai Komunis Indonesia telah sangat dirugikan oleh penjakit „Komunisme 'Sajap Kiri' " ini. Kesalahan ini telah sangat menghambat perkembangan PKI. Tidak hanja perkembangan Partai mendjadi terhalang, tetapi pintu mendjadi terbuka lebar untuk provokasi² kaum imperialis jang kemudian dengan ganas menghantjurkan PKI dan organisasi² massa revolusioner dalam tahun 1926. Djadi PKI hanja mengalami legalitetnja selama 6 tahun, jaitu sedjak didirikannja tahun 1920 sampai tahun 1926. Sedjak tahun 1926 PKI terpaksa bekerdja dibawah tanah dalam situasi jang sangat berat, dan baru dapat kembali kedudukan legalnja ketika meletus Revolusi Nasional bulan Agustus tahun 1945.

Berkat pimpinan jang tepat dari Kawan Mau Tje-tung dan pemimpin² Partai Komunis Tiongkok lainnja, serta berkat bantuan dari Partai Komunis Uni Sovjet jang kaja dengan pengalaman², perdjuangan terhadap segala matjam penjakit jang timbul dalam masa kanak² Partai Komunis Tiongkok dapat berlangsung dengan

sistimatis. Dalam keadaan jang sulit bagaimanapun Partai Komunis Tiongkok dapat mengembangkan Marxisme-Leninisme, memperkaja Marxisme-Leninisme dengan pengalaman² Revolusi Tiongkok sendiri.

Kawan² Tiongkok telah dengan tepat melaksanakan nasehat Lenin dalam seruannja kepada kaum Komunis dari nasion² Timur pada bulan November 1919, jaitu bahwa kaum Komunis ini dengan bersandar pada teori dan praktek umum dari Komunisme harus menjesuaikan diri dengan keadaan² istimewa jang tidak terdapat dinegeri-negeri Eropa dan hendaknja tjakap mengenakan teori dan praktek ini pada keadaan² dimana massa jang pokok adalah tani, dan masalah perdjuangan jang perlu dipetjahkan jalah masalah jang bukan melawan kapital, melainkan melawan sisa² dari Zaman Tengah. Kemenangan Revolusi Tiongkok tidak hanja sangat menguntungkan proletariat dan Rakjat Tiongkok, tetapi djuga menguntungkan proletariat dan Rakjat diseluruh dunia, terutama proletariat dan Rakjat negeri² Timur. Adanja Partai Komunis Tiongkok jang mempunjai pengalaman² jang kaja dalam usaha mengalahkan imperialisme dan feodalisme, telah membantu Partai² Komunis negeri² Timur untuk menggunakan pengalaman² itu buat menganalisa keadaan dirinja masing², mengatasi kelemahan²nja masing², dan dengan demikian mengedjar ketinggalan² jang disebabkan oleh masasilamnja jang gelap.

Kemenangan revolusi² dinegeri-negeri Eropa dan Asia sesudah perang dunia kedua, muntjulnja kekuasaan² demokrasi Rakjat dari revolusi² ini, menundjukkan bahwa salvo Revolusi Oktober telah disambut oleh salvo² revolusi² baru di Barat dan di Timur. Salvo² ini bukan lagi berfungsi menjedarkan orang² progresif akan Marxisme-Leninisme, tetapi telah menundjukkan dengan kongkrit bagaimana Marxisme-Leninisme dipraktekkan, bagaimana memadukan kebenaran umum Marxisme-Leninisme dengan praktek kongkrit dari revolusi di-tiap² negeri, tidak hanja di Eropa tetapi djuga di Timur.

Revolusi Tiongkok adalah tjontoh jang paling terang dari pelaksanaan dalam praktek dalil² Marx dan Lenin mengenai politik, strategi dan taktik dari Partai² Komunis dalam revolusi nasional anti-imperialisme dan revolusi demokratis anti-feodalisme di-negeri²

Dimpos Manalu
dimposmanalu@yahoo.com

djadjahan dan tergantung, dan bagaimana selandjutnja melaksanakan Sosialisme. Kemenangan Rakjat Tiongkok tidak hanja sudah mengubah wadjah Asia, tidak hanja sudah mengubah imbangan kekuatan di Asia setjara radikal, tetapi djuga sudah mengubah wadjah dan imbangan kekuatan diseluruh dunia setjara besar-besaran, menundjukkan kekalahan jang sangat berat bagi kapitalisme internasional.

Perang dunia kedua tidak hanja sudah berachir dengan menambahkan negara² demokrasi Rakjat kedalam kubu sosialis, tetapi djuga dengan berdirinja negara² baru jang merdeka dilapangan politik seperti India, Indonesia, Mesir, Birma, Siria, Libanon, Sudan, Gana, Tunisia dan beberapa negeri bekas djadjahan atau bekas negeri tergantung lainnja. Negeri² ini walaupun tidak masuk dalam sistim dunia sosialis, tetapi mereka dapat menarik keuntungan jang sebesar-besarnja dilapangan politik, ekonomi dan kebudajaan dari adanja negeri² sosialis dalam menghadapi pertjobaan² djahat dari bekas pendjadjah mereka atau dari negeri² pendjadjah lainnja. Djika mau, mereka dapat membangun ekonomi nasionalnja dengan bantuan negeri² kubu sosialis, tanpa meminta-minta kepada negara² imperialis.

Kemenangan² Rakjat Asia dalam mengalahkan musuh²nja tidak bisa dipisahkan dari pukulan jang sangat keras jang sudah diberikan oleh proletariat Rusia dengan bantuan kaum tani Rusia dalam Revolusi Sosialis Oktober Besar. Dibawah pengaruh Revolusi Oktober perdjuangan pembebasan nasional dari bangsa² terdjadjah berkembang dengan istimewa tjepatnja. Tentang ini diakui oleh Presiden Republik Indonesia, Dr. Ir Soekarno jang antara lain mengatakan sebagai berikut: „..... *didjiwai oleh kemenangan² Revolusi Oktober 1917 di Rusia, Rakjat² Asia makin teguh lagi bersatu dalam perdjuangan melawan kekuasaan kolonial. Kesempatan jang baik ditimbulkan oleh berachirnja Perang Dunia II, ketika kekuasaan imperialis mendjadi sangat lemah. Sesudah berachirnja perang tersebut negara² merdeka muntjul di Asia. dilahirkan oleh aksi² politik dan bersendjata*" (1). Ini adalah pengakuan jang djudjur dari seorang ahli negara jang bukan-Komunis mengenai peranan jang objektif dari Revolusi Sosialis Oktober Besar.

Adalah sangat penting bagi semua negeri jang baru merdeka

arti kemenangan Uni Sovjet dalam perang dunia kedua. Tanpa kemenangan Uni Sovjet ini keadaan dunia akan lain sekali daripada jang ada sekarang. Tetapi dengan adanja kemenangan ini sistim imperialisme mendjadi lebih lemah, kedudukan² kaum imperialis di-negeri² djadjahannja mendjadi lebih merosot, kekuatan demokrasi dan kemerdekaan diseluruh dunia, termasuk disemua negeri djadjahan dan negeri² tergantung, mendjadi bertambah hebat. Bagaimanakah kalau tidak ada Uni Sovjet, atau, bagaimanakah kalau tidak ada Revolusi Oktober jang melahirkan Uni Sovjet? Djika tidak ada Revolusi Oktober, artinja tidak ada Uni Sovjet, dan djika Uni Sovjet tidak menang dalam perang dunia kedua jang lalu, maka kaum reaksioner internasional berada dalam kedudukan jang lebih kuat daripada sekarang dan tekanan² jang mereka adakan terhadap perdjuangan untuk kemerdekaan dan demokrasi tentu djuga akan lebih keras daripada sekarang. Djika demikian, kemenangan seperti jang sekarang sudah ditjapai oleh Rakjat negeri² Timur tidaklah mungkin. Djika demikian kita tidak mengenal kubu sosialis jang takterkalahkan seperti sekarang, jang meliputi lebih dari 900 djuta manusia. Kita djuga tidak mengenal negeri² jang sudah dibebaskan dari pendjadjahan kolonial dan setengah kolonial jang Rakjatnja berdjumlah lebih dari 1.200 djuta atau separoh dari penduduk dunia.

Hukum perkembangan masjarakat telah membikin Revolusi Sosialis Oktober Besar satu sukses, telah membikin Uni Sovjet menang dalam perang dunia kedua jang lalu, telah membikin kubu sosialis jang takterkalahkan mendjadi satu kenjataan, demikian pula telah mendjadikan kenjataan bahwa negeri² jang baru merdeka terus mengkonsolidasi diri dilapangan politik dan ekonomi dan mendjadikan dirinja kekuatan perdamaian jang penting.

Kongres ke-XX Partai Komunis Uni Sovjet antara lain menjatakan bahwa: „*Kubu Sosialisme jang perkasa dengan penduduknja jang lebih dari 900 djuta sedang bertambah besar dan semakin mendjadi kuat. Kekuatan² internnja jang mahabesar, kebaikan-kebaikannja jang menentukan atas kapitalisme, dari hari kesehari semakin menampakkan diri. Sosialisme mempunjai dajatarik jang besar bagi kaum buruh, parapetani dan kaum intelektuil dari semua negeri. Ide² Sosialisme memang sedang semakin menguasai hati*

seluruh umatmanusia pekerdja" (2). Pernjataan ini sepenuhnja sesuai dengan realitet. Dan ini memang tidak bisa lain. Kalau Revolusi Sosialis Oktober Besar dan tjita2 jang dinjatakannja sudah mempunjai dajatarik jang begitu hebat bagi umatmanusia, dapatlah kita bajangkan bahwa dajatarik itu mendjadi ber-puluh2 atau beratus-ratus kali lebih kuat sesudah ada kelandjutan dari Revolusi Oktober jang berupa Uni Sovjet jang modern dan progresif, jang berupa sukses2 jang ditjapai oleh Uni Sovjet dilapangan ilmu, kebudajaan dan teknik, jang berupa kubu sosialis jang besar dan kuat, jang berupa Tiongkok Rakjat serta Republik2 Demokrasi Rakjat lainnja. Bagi orang2 jang progresif kenjataan2 ini lebih2 lagi menjedarkan mereka akan Marxisme-Leninisme.

Sekarang tidak hanja proletariat negeri2 Timur dan Partai2 Komunis jang mempropagandakan kebaikan Sosialisme, tetapi djuga pemimpin2 negeri2 Timur jang bukan-Komunis mempropagandakan keunggulan sistim sosialis. Adalah bukan kebetulan, tetapi memang sesuai dengan kenjataan sedjarah dimana Sosialisme sudah menambat hati beratus djuta Rakjat negeri2 Timur jang djudjur, bahwa orang2 terkemuka Asia seperti Nehru dari India, Soekarno dari Indonesia, U Nu dari Birma, dan lain2, berbitjara tentang keunggulan Sosialisme dan berusaha dengan tjaranja sendiri merealisasi Sosialisme dinegerinja masing2. Dipropagandakannja Sosialisme oleh orang2 terkemuka ini membantu proletariat untuk membikin tjita2 Sosialisme mendjadi tjita2 seluruh Rakjat pekerdja dan semua orang jang progresif. Ja, ada djuga orang2 jang anti-Sovjet, anti-sistim demokrasi Rakjat dan „anti-diktatur", tetapi orang2 ini tidak dapat membantah bahwa apa jang sudah dilaksanakan di Uni Sovjet dan sedang dilaksanakan di-negeri2 demokrasi Rakjat adalah bukan kapitalisme, tetapi Sosialisme, sistim jang sudah menambat hati beratus djuta Rakjat negeri2 Timur dan sebagian jang sangat terbesar dari Rakjat diseluruh dunia.

Dalam Laporan CC PKUS kepada Kongres Ke-XX antara lain djuga dinjatakan bahwa: *„Perebutan majoritet parlementer jang stabil jang didukung oleh gerakan revolusioner dari proletariat dan dari gerakan seluruh Rakjat pekerdja dapatlah mentjiptakan sjarat2 jang dibutuhkan untuk mendjamin perubahan sosial jang fondamentil bagi klas buruh dibeberapa negeri2 kapitalis dan negeri2 bekas djadjahan*" (3). Tentang kemungkinan mentjapai perubahan sosial jang fondamentil bagi klas buruh di-negeri2 bekas djadjahan sudah dengan sendirinja mendapat perhatian jang sangat besar dari klas proletar dan Partai politiknja di-negeri2 jang bersangkutan. Ini adalah satu djalan baru dalam merealisasi ide Sosialisme di-negeri2 Timur, djalan baru jang dimungkinkan oleh keadaan perimbangan kekuatan dunia jang baru. Semua Partai Komunis di-negeri2 Timur mendiskusikan setjara mendalam pernjataan penting ini.

Mengenai kemungkinan mentjapai perubahan sosial jang fondamentil setjara damai bagi klas buruh Indonesia, Sidang Pleno Ke-IV CC PKI dalam bulan Djuli 1956 antara lain menjimpulkan, bahwa *„itu adalah satu kemungkinan, dan kemungkinan jang dengan sekuat tenaga harus kita djadikan kenjataan. Djadi, kalau tergantung kepada kaum Komunis, maka bentuk jang se-baik2nja, bentuk jang ideal dari peralihan kesistim kekuasaan Rakjat jang demokratis, jaitu tingkat persiapan kesistim sosialis, jalah bentuk jang damai, bentuk jang parlementer. Djadi, djika tergantung pada kaum Komunis, djalan damailah jang dipilih, karena kaum Komunis memang bukan pembunuh*" (4). Kiranja tidak hanja bagi kaum Komunis Indonesia, tetapi djuga bagi kaum Komunis di-negeri2 Timur lainnja dan dimana sadja, djika tergantung pada mereka, djalan damailah jang dipilih.

Pengalaman perdjuangan Rakjat negeri2 Timur menundjukkan bahwa bukanlah kaum Komunis dan Rakjat pekerdja jang tidak mau mentjapai tudjuan politiknja dengan djalan damai, dengan djalan parlementer, tetapi adalah kaum imperialis, tuantanah dan burdjuasi besar dalamnegeri jang membikin tidak mungkin kaum Komunis mentjapai tudjuan politiknja menurut djalan2 demokrasi jang tenang. Bagaimana akan mungkin kaum Komunis menempuh djalan parlementer dalam mentjapai tudjuan2 politiknja, djika sistim parlemen jang sedikit demokratis dimana kaum Komunis bisa mengambil bagian dalam pemilihan umum samasekali tidak ada, seperti misalnja sekarang di Birma, Filipina, Malaja, Siam, disebagian besar negeri2 Arab, dan negeri2 Afrika dsb.?

Tanda2 jang njata sudah ada bahwa di-negeri2 jang berparlemen dan kaum Komunis dapat mengambil bagian dalam pemilihan

umum, kaum Komunis mungkin mentjapai tudjuan² politiknja setjara parlementer, djadi tanpa perdjuangan revolusioner jang tadjam. Tanda² ini dapat dilihat misalnja di India dan Indonesia. Dalam pemilihan umum jang paling belakangan di India, Partai Komunis India mendapat tambahan pemilih jang tidak sedikit, jaitu mendjadi duakali lipat dalam waktu 5 tahun, dan lewat pemilihan umum itu kaum Komunis India sudah dapat memimpin sebuah pemerintah di Kerala, salahsatu negarabagian India (5).

Di Indonesia, dalam waktu hanja satusetengah tahun pemilih² Komunis meningkat dengan lebih dari dua djuta diseluruh negeri, meningkat dari djumlah 6,1 djuta (angka pemilihan Konstituante pada achir tahun 1955) mendjadi 8,5 djuta (7,5 djuta pemilihan DPRD di Djawa pada pertengahan 1957 dan 1 djuta angka Konstituante diluar Djawa, dimana belum diadakan pemilihan untuk DPRD). Dalam waktu satusetengah tahun PKI dari Partai besar nomor 4 melompat mendjadi Partai besar no. 1 untuk seluruh negeri. Demikianlah antara lain tentang adanja tanda² jang menundjukkan, bahwa djalan parlementer memang satu kemungkinan, dan kemungkinan jang harus diperdjuangkan dengan sekuat tenaga sehingga mendjadi kenjataan.

Sidang Pleno Ke-IV CC PKI dalam bulan Djuli 1956 antara lain djuga menjatakan, bahwa kaum reaksionerlah jang ketakutan *„parlemen dan badan² negara lainnja dapat diberi isi jang benar² demokratis serta disusun sesuai dengan keinginan Rakjat. Karena kuatir pada kekuatan Rakjat maka mereka mendjadi nekad, mereka melemparkan pandji² demokrasi parlementer dan bertindak dengan 'tangan besi'* " (6). Oleh karena itulah kaum Komunis harus senantiasa mempersiapkan diri dan mempersiapkan Rakjat disegala lapangan agar kaum reaksioner tidak bisa menghalangi keinginan Rakjat untuk mentjapai perubahan² sosial jang fondamentil setjara damai, setjara parlementer.

Di-negeri² Timur dimana kaum Komunis sekarang tidak mendapatkan kemungkinan untuk memperdjuangkan tudjuan² politiknja setjara parlementer karena watak reaksioner dari pemerintah negeri² jang bersangkutan, terbentang dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Partai² Komunis di-negeri² jang bersangkutan, karena desakan jang kuat dan terus-menerus dari kekuatan demokratis, pada waktunja akan mendapatkan hak² politiknja sehingga bisa ikut dalam pemilihan² umum untuk parlemen; kedua, pada waktunja akan timbul perubahan sosial jang fondamentil di-negeri² jang bersangkutan dibawah pimpinan kaum Komunis dan dibarengi dengan perdjuangan klas revolusioner jang tadjam. Kita tidak tahu djalan mana jang mau dipilih oleh burdjuasi di-negeri² jang bersangkutan, tetapi kalau tergantung pada kaum Komunis dan kaum progresif lainnja di-negeri² jang bersangkutan, djalan damailah jang harus ditempuh.

Djadi, Partai Komunis Indonesia sekarang, dan demikian djuga kiranja Partai² Komunis negeri² Timur lainnja, harus tjakap mengenakan teori dan praktek umum Komunisme pada keadaan dimana massa jang pokok adalah tani dan masalah perdjuangan jalah melawan sisa² dari Zaman Tengah. Untuk ini Partai Komunis di-negeri² Timur harus banjak beladjar dari pengalaman² Revolusi Tiongkok. Tetapi, dalam hubungan bahwa kaum Komunis Indonesia harus dengan sekuat tenaga berdjuang agar tudjuan² politiknja dapat ditempuh dengan djalan parlementer, maka kaum Komunis Indonesia harus banjak beladjar dari pengalaman perdjuangan parlementer Partai² Komunis di Eropa, terutama Partai Komunis Perantjis dan Italia. Kombinasi dua pengalaman, pengalaman revolusioner Tiongkok dan pengalaman parlementer Perantjis dan Italia merupakan bantuan jang sangat penting bagi proletariat dan Rakjat pekerdja Indonesia. Tetapi jang paling penting bagi kaum Komunis Indonesia jalah soal mengenakan kebenaran² umum Marxisme-Leninisme dengan praktek kongkrit revolusi Indonesia sendiri, terutama jang berhubungan dengan keadaan chusus Indonesia sebagai negeri jang terdiri dari ribuan pulau dan bahwa di Indonesia belum ada tradisi perdjuangan parlementer.

Didunia sekarang orang sedang sibuk melaksanakan tjita² Sosialisme dan Komunisme jang dikumandangkan oleh Revolusi Sosialis Oktober Besar tahun 1917. Kaum Komunis di-tiap² negeri melakukan itu dengan kesedaran Marxis-Leninis jang terus-menerus makin meninggi, berpedoman pada kesimpulan² jang terbaharu dari pengalaman² kaum Komunis sedunia, dengan berpokokpangkal pada keadaan negeri dan Rakjatnja masing². Mereka sedang dan masih akan mengalami kesukaran jang tidak ketjil, tetapi di-

banding dengan zaman Lenin, djalan ke Sosialisme sekarang djauh lebih kurang rintangannja. Oleh karena itulah, pelaksanaan Sosialisme dan Komunisme buat seluruh dunia bukanlah lagi merupakan persoalan bisa atau tidak, tetapi persoalan kapan. Dan masa itu bukanlah masa jang sangat djauh lagi!

Tulisan ini adalah pidato Kawan D.N. Aidit pada malam resepsi ulangtahun ke-12 organisasi Pemuda Rakjat jang berisikan pesan penting kepada seluruh anggota Pemuda Rakjat. Kongres Nasional ke-V Pemuda Rakjat pada bulan Djuli 1956 telah mensahkan Peraturan Dasarnja jang menjatakan Pemuda Rakjat mendjadi pembantu jang setia dan tepertjaja dari Partai Komunis Indonesia. *Empat pesan penting* Kawan Aidit dalam pidato ulangtahun ini merupakan pegangan untuk melaksanakan keputusan tersebut. Jaitu supaja Pemuda Rakjat setia melaksanakan tugas2 revolusi Indonesia, organisasi jang besar dan terkonsolidasi, radjin beladjar Marxisme-Leninisme, giat dilapangan kesenian dan olahraga.

PEMUDA RAKJAT HARUS TETAP SETIA KEPADA REVOLUSI AGUSTUS 1945

B e b a s !

Atasnama Comite Central Partai Komunis Indonesia dengan ini saja mengutjapkan selamat kepada Pimpinan Pusat dan semua anggota Pemuda Rakjat berhubung dengan ulangtahun ke-12 organisasi Pemuda Rakjat. Pemuda Rakjat adalah salahsatu organisasi pemuda jang tertua jang lahir sesudah Revolusi Agustus 1945. Lahirnja Pemuda Rakjat, jang mula² dengan nama PESINDO (Pemuda Sosialis Indonesia) pada 10 November duabelas tahun jang lalu, djadi bersamaan dengan Hari Pahlawan, adalah membuktikan bahwa Pemuda Rakjat lahir di-tengah² hangatnja api Revolusi Agustus 1945.

Pemuda Rakjat adalah anak kandung dari Revolusi Agustus jang heroik, jang anti-imperialisme dan anti-feodalisme, dan jang bertudjuan membentuk masjarakat jang adil dan makmur. Oleh karena itu, sebagai anak jang setia kepada Ibunja, Pemuda Rakjat harus setia kepada Revolusi Agustus dan harus terus berdjuang agar tugas² daripada Revolusi ini terlaksana dengan baik sampai ke-akar²nja.

Comite Central Partai Komunis Indonesia mengikuti dengan baik perkembangan organisasi Pemuda Rakjat, terutama pada waktu² belakangan ini. Kami tahu benar apa jang mendjadi suka dan duka Pemuda Rakjat. Suka dan duka Pemuda Rakjat adalah suka dan duka massa pemuda pada umumnja, massa pemuda buruh dan tani pada chususnja.

Pemuda Rakjat pada waktu² belakangan ini, dalam rangka merealisasi putusan² Kongres Nasionalnja jang ke-V, mendapat kemadjuan² jang penting, terutama dalam usaha menggalang persatuan pemuda Indonesia, dalam peluasan organisasi, dalam kegiatan kesenian dan olahraga.

Sebagaimana sudah dinjatakan oleh Kongres Nasional ke-V

Pemuda Rakjat, tiap² anggota Pemuda Rakjat ingin mendjadi pembantu jang setia dan tepertjaja dari Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia sudah tentu dengan gembira menjambut pernjataan ini, dan merasa dirinja sangat diperkuat.

Tetapi untuk mendjadi pembantu jang setia dan tepertjaja dari PKI ada beberapa ketentuan jang harus dipegang dan dilaksanakan oleh anggota² Pemuda Rakjat.

P e r t a m a , Pemuda Rakjat harus tahu benar tentang tugas² politiknja. Dilapangan politik Pemuda Rakjat harus berdjuang dengan tekun dan militan guna pelaksanaan tugas² Revolusi Agustus 1945, jaitu pelaksanaan tugas² anti-imperialisme dan anti-feodalisme sampai ke-akar²nja sebagai sjarat jang tidak boleh tidak untuk mentjiptakan masjarakat jang adil dan makmur. Masjarakat jang adil dan makmur tidak mungkin dibentuk selama di Indonesia masih ada imperialisme dan feodalisme. Oleh karena itu Partai Komunis Indonesia menjambut dengan gembira kegiatan Pemuda Rakjat dalam perdjuangan untuk membebaskan Irian Barat dari imperialisme Belanda, dalam melawan exploitasi kapitalisme asing dan sisa² feodalisme melalui organisasi² Pemuda Rakjat jang ada di-pabrik², di-kebun², di-pelabuhan², di-kampung² dan di-desa².

Hanja dengan setia melaksanakan tugas² Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja, Pemuda Rakjat dapat mendjadi pembantu jang setia dan tepertjaja daripada Partai Komunis Indonesia.

K e d u a, Pemuda Rakjat harus tahu benar tentang tugas² pokoknja dilapangan organisasi. Dilapangan organisasi Pemuda Rakjat harus meluaskan diri kesegala pendjuru dan kesemua plosok tanahair, harus meluaskan keanggotaannja sehingga benar² mendjadi organisasi jang massal, harus mentjiptakan hubungan jang erat antara pimpinan dengan massa anggota, harus mengkonsolidasi badan² pimpinan dan organisasi² basis, dan harus menggalang persatuan jang luas antara Pemuda Rakjat dengan organisasi² pemuda lainnja tanpa memandang perbedaan agama, kejakinan politik, kedudukan dalam masjarakat dan perbedaan suku.

Hanja dengan organisasinja jang besar dan terkonsolidasi, Pemuda Rakjat dapat mendjadi pembantu jang setia dan tepertjaja dari Partai Komunis Indonesia.

K e t i g a, Pemuda Rakjat harus radjin beladjar, baik beladjar

disekolah maupun beladjar diluar sekolah, baik beladjar dengan bantuan guru maupun beladjar sendiri, baik beladjar pengetahuan umum maupun beladjar pengetahuan vak. Adalah bukan anggota Pemuda Rakjat jang baik djika tidak beladjar atau malas beladjar.

Pemuda Rakjat adalah organisasi pemuda revolusioner. Oleh karena itu Pemuda Rakjat harus mempeladjari teori revolusioner, mempeladjari prinsip² fondamentil Marxisme-Leninisme dan dengan bantuan Marxisme-Leninisme mempeladjari soal² pokok dan segala soal dari Revolusi Indonesia. Tanpa teori revolusioner tidak mungkin ada aksi revolusioner. Aksi tanpa teori adalah buta.

Dalam beladjar Pemuda Rakjat harus senantiasa menghubungkan apa jang dipeladjarinja dengan kehidupan praktis. Peladjaran tidak boleh memisahkan Pemuda Rakjat dari kehidupan praktis, dari kenjataan² se-hari², dari massa Rakjat.

Hanja dengan radjin beladjar, Pemuda Rakjat dapat mendjadi pembantu jang setia dan tepertjaja dari Partai Komunis Indonesia.

K e e m p a t, Pemuda Rakjat haruslah gembira dan sehat. Oleh karena itu Pemuda Rakjat harus memperlipatgandakan kegiatannja dilapangan kesenian Rakjat dan olahraga. Apa jang sekarang sudah ditjapai oleh Pemuda Rakjat dilapangan kesenian dan olahraga adalah menggembirakan, tetapi ini belum seberapa artinja djika dibandingkan dengan kegiatan² jang dibutuhkan untuk memenuhi hasrat massa pemuda di-kampung², di-kebun², di-bengkel², di-kantor², di-sekolah², di-pabrik² akan kesenian dan olahraga. Djadikanlah kegiatan kesenian dan olahraga sebagai kegiatan se-hari² jang merata dari Pemuda Rakjat, dan djadikanlah dengan ini massa pemuda Indonesia manusia² jang gembira dan sehat.

Hanja dengan kegiatan jang luarbiasa dilapangan kesenian dan olahraga, artinja dengan mendjadikan dirinja manusia² jang gembira dan sehat, Pemuda Rakjat dapat mendjadi pembantu jang setia dan tepertjaja dari Partai Komunis Indonesia.

Demikianlah pesan² jang perlu saja sampaikan atasnama Comite Central PKI kepada semua anggota Pemuda Rakjat pada hari ulangtahun organisasinja jang ke-12, jang bertepatan dengan Hari Pahlawan kita jang ke-12. Saja jakin, bahwa Pemuda Rakjat mempunjai kemampuan moril dan fisik, dan mempunjai dajadjuang jang besar, untuk dapat menunaikan pesan² tersebut, sebagai pelaksanaan salahsatu putusan jang terpenting dari Kongres Nasionalnja jang ke-V.

Hidup Pemuda Rakjat, organisasi pemuda jang militan dan heroik, jang dilahirkan dan senantiasa didjiwai oleh Revolusi Agustus dan tetap setia kepada tjita² Revolusi Agustus!

Hidup pemuda Indonesia jang djaja, pengawal kemerdekaan nasional Indonesia, pembawa pandji² demokrasi, kemadjuan dan perdamaian, dan pemilik jang tepertjaja dari haridepan Indonesia jang gemilang!

B e b a s !

Djakarta, 10 November 1957

Mari membangun dengan rentjana! adalah djudul pidato Kawan D.N. Aidit didalam Musjawarah Nasional Pembangunan pada tanggal 27 November 1957 di Djakarta.

Diuraikannja bahwa dengan Munas Pembangunan berarti telah dikoreksinja sikap atjuh-tak-atjuh dari pemimpin2 kita diwaktu lampau terhadap masalah2 ekonomi negeri dan mulainja pemeladjaran setjara serius tentang soal kehidupan Republik dan Rakjat.

Selandjutnja setjara kongkrit dan menjeluruh Kawan Aidit mengadjukan pokok2 pikiran tentang pembangunan ekonomi negeri dengan menandaskan bahwa sekedjappun tidak boleh lupa melikwidasi ekonomi kolonial dan ekonomi feodal sebagai perintang utama pembangunan dan supaja pembangunan itu pada prinsipnja mendasarkan diri kepada alam negeri kita jang kajaraja dan Rakjat kita jang radjin bekerdja.

MARI MEMBANGUN DENGAN RENTJANA!

Sdr. Ketua dan para hadirin jang mulia.

Per-tama2 izinkanlah saja terlebih dulu menjatakan rasa terimakasih atasnama Comite Central Partai Komunis Indonesia kepada Pemerintah jang sudah mengundang kami untuk ikut hadir sebagai peserta didalam Musjawarah Nasional Pembangunan jang pertama kali ini, jang sangat penting.

Saja berpendapat, bahwa walaupun ada kekurangan2 jang sukar dihindari didalam mempersiapkan Musjawarah ini, dan bagi para peserta tanpa waktu jang tjukup untuk mempeladjari segala bahan jang disediakan oleh Pemerintah, Munas Pembangunan sekarang adalah sangat penting artinja bagi kehidupan ekonomi dan politik negeri kita. Ini kesempatan untuk pertama kali dimana kita dari seluruh Indonesia dan dari semua golongan serta aliran setjara demokratis dan setjara kekeluargaan berusaha bersama untuk merumuskan politik pembangunan tanahair kita.

Dengan berlangsungnja Munas Pembangunan ini saja mengharap dan saja jakin, bahwa kita akan mendapat banjak fakta tentang keadaan ekonomi negeri kita sekarang. Berkenaan dengan fakta2 ekonomi negeri kita, akan membikin kita lebih realis dan lebih serius dalam memetjahkan berbagai masalah jang kita hadapi, baik masalah ekonomi sendiri, maupun masalah politik, masalah sosial dan masalah2 lain. Kenjataan2 ini akan membikin kita mendjadi orang2 jang lebih bertanggungdjawab.

Dengan berlangsungnja Munas Pembangunan ini perhatian Rakjat, dan terutama pemimpin2 Rakjat, akan lebih besar kepada persoalan ekonomi negeri, persoalan jang paling penting jang kita hadapi sekarang. Dimasa lampau memang sudah ada segolongan dari bangsa kita jang sudah besar perhatiannja kepada soal2 ekonomi, tetapi perhatian mereka sangat terbatas. Jang saja maksudkan jalah golongan pengusaha nasional. Perhatian golongan ini pada umumnja hanja terbatas pada kepentingan ekonomi sendiri atau

golongan sendiri.

Adalah satu kekurangan jang sangat serius, bahwa Rakjat Indonesia, walaupun sudah 12 tahun bernegara merdeka, sampai sekarang masih mempunjai pemimpin² jang pada umumnja kurang serius memperhatikan persoalan ekonomi negeri, artinja kurang memperhatikan soal kehidupan Republik dan Rakjat. Ketika perdjuangan bersendjata sedang berkobar adalah tepat sekali, bahwa perhatian kita sebagian besar ditudjukan kepada memenangkan perdjuangan bersendjata. Sesudah selesai perdjuangan bersendjata, maka perhatian kita pada umumnja berat sebelah, terlalu besar kepada persoalan² politik dalam dan luarnegeri — jang sudah tentu memang harus mendapat perhatian — tetapi terlalu sedikit kepada persoalan² ekonomi. Djika kita melihat keluarnegeri, maka akan nampaklah bahwa di-negeri² jang baru merdeka, dan di-negeri² jang mana sadja jang menginginkan supaja Rakjat menikmati kehidupan materiil dan spirituil, sebagian besar dari perhatian pemerintah dan para pemimpin Rakjat ditudjukan kepada soal² ekonomi, mula² kepada soal² merehabilitasi keadaan ekonomi jang rusak akibat masalampau dan membikin bangunan² baru jang paling urgen, untuk kemudian ber-angsur² meluaskan pembangunan sampai pembangunan projek² raksasa. Dengan tidak lebih dulu mengadakan penekanan pada pembangunan² rehabilitasi dan pembangunan² baru jang paling urgen, jang misalnja memakan waktu 3 tahun, maka pembangunan² raksasa hanja akan ada didalam impian belaka.

Saja berpendapat, bahwa dalam usaha kita membangun negeri kita sekarang sekedjappun tidak boleh kita lupakan, bahwa adalah kewadjiban kita jang terpenting untuk melemparkan halangan² strategis terhadap pembangunan. Dengan halangan² strategis saja maksudkan jalah ekonomi kolonial dan ekonomi feodal jang sekarang masih bertjokol dan jang masih mendjadi tjiri utama ekonomi negeri kita. Tanpa melikwidasi ekonomi kolonial dan ekonomi feodal, akan sia²lah usaha kita meletakkan dasar² untuk mewudjudkan pembangunan ekonomi negeri jang sesuai dengan djiwa Revolusi Agustus 1945, jang sesuai dengan tuntutan fasal 38 Undang² Dasar Sementara Republik kita.

Demikianlah beberapa diantara penilaian saja setjara umum

mengenai Munas Pembangunan kita sekarang. Djadi, pada saja tidak ada pesimisme dan tidak ada kekuatiran bahwa dengan Munas Pembangunan ini hanja Kabinet Karyalah jang diuntungkan.

Sekarang tibalah bagi saja untuk menjatakan pendapat mengenai amanat Presiden/Panglima Tertinggi dan mengenai prasaran² Sdr. Dr. Hatta dan Sdr. Perdana Menteri Djuanda.

Amanat Presiden/Panglima Tertinggi Sukarno pada hari pembukaan Munas Pembangunan ini antara lain mengharap dari kita supaja fasal 38 UUD Sementara Republik kita didjadikan „bintang pimpinan" dalam merentjanakan dan melaksanakan pembangunan nasional kita. Saja sepenuhnja setudju dengan ini. Memang tidak ada djalan lain bagi kita ketjuali tetap setia kepada Revolusi Agustus 1945, ketjuali membangun masjarakat jang adil dan makmur, masjarakat jang berkeadilan sosial, diatas tumpukan pengorbanan dan diatas timbunan kekuatan jang dihasilkan oleh perdjuangan Rakjat Indonesia.

Saja djuga sependapat, bahwa dalam hubungan dengan pelaksanaan fasal 38 UUD Sementara kita, dalam Munas Pembangunan sekarang paling banjak kita hanja dapat merumuskan garis² besar dari politik pembangunan kita. Perumusan jang lebih detail tidaklah dalam Munas Pembangunan ini tempatnja. Oleh karena itu saja setudju dengan usul supaja dibentuk Dewan Perantjang Nasional. Saja hanja hendak menjarankan supaja Dewan Perantjang Nasional itu nanti dalam bekerdja tidak berpisah dari massa Rakjat jang akan melaksanakan rantjangan jang akan dibuat. Rantjangan tidak akan mungkin objektif dan realis, kalau dalam merentjanakannja tidak diikutsertakan ber-djuta² massa Rakjat pekerdja dengan melewati pemimpin² mereka. Saja mengusulkan supaja para pelaksana ini, dengan diwakili oleh pemimpin² mereka duduk sedjadjar dengan para ahli kita jang patriotik. Hanja dengan demikian hasil Dewan Perantjang Nasional nanti akan realis dan oleh karena itu ada kemungkinan untuk dapat dilaksanakan. Dengan demikian kaum birokrat tidak akan bisa lagi memaksakan rentjana²-nja kepada Rakjat, dengan demikian rentjana² pembangunan kita tidak lagi digantungkan pada kepentingan orang asing jang membutuhkan tempat penanaman modal dinegeri kita, dengan demikian kita mengubah orientasi para perentjana dan kita mendasarkan diri

kita pada dajakreasi Rakjat kita sendiri. Demikian pendapat dan saran saja mengenai Dewan Perantjang Nasional jang diusulkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi.

Mengenai prasaran Sdr. Hatta, pada pokoknja saja sangat menjambut. Sdr. Hatta bertanja: siapakah jang harus memegang peranan jang terutama dalam pembangunan perekonomian. Sdr. Hatta mendjawabnja sendiri, bahwa pemerintahlah jang harus memegang peranan. Kesimpulan bahwa Pemerintah jang harus memegang peranan bukan hanja didasarkan pada teori, tetapi djuga dan terutama didasarkan pada pengalaman pahit selama Indonesia merdeka.

„Kaum kapitalis kita terlambat lahirnja, ia sudah ketinggalan kereta", kaum kapitalis kita „se-kurang²nja satu setengah abad ketinggalan dari perdjalanan masa", demikian kata Sdr. Hatta. Saja tidak membutuhkan kata² lain lagi untuk menerangkan kedudukan kaum kapitalis nasional kita.

Tetapi, saja masih melihat peranan positif jang dapat dimainkan oleh kaum pengusaha nasional kita, jaitu peranan sebagai pembantu Pemerintah dalam membangun ekonomi nasional. Hal ini djuga diakui oleh Sdr. Hatta. Selama ini istilah „ekonomi nasional" sering disalahartikan, se-olah² „ekonomi nasional" sama dengan „ekonomi pengusaha² nasional" atau „ekonomi kapitalis² nasional". Se-olah² kepentingan ekonomi dari kaum buruh, kaum tani, kaum nelajan, kaum tukang ketjil, dsb. tidak termasuk dalam rangka ekonomi nasional.

Saja setudju dengan pendapat Sdr. Hatta jang mengatakan, bahwa tudjuan ekonomi nasional kita mestilah menimbulkan dajabeli Rakjat jang se-besar²nja. Saja tambahkan, bahwa ekonomi nasional kita jalah potensi nasional kita jang terpenting. Djadi, samasekali bukan hanja untuk memperkaja beberapa ratus orang, walaupun saja tidak berkeberatan apa² bahwa orang² itu mendjadi kaja, asal tidak dengan melemahkan potensi ekonomi Republik kita.

Djadi, saja setudju supaja kedudukan pengusaha² nasional kita, semua atau sebagian jang terpenting, diubah kedudukannja. Supaja pengusaha² nasional atau kapitalis² nasional kita jang selama ini kelihatannja berdiri sendiri, tetapi pada hakekatnja tidak lebih daripada „kamerplant" („tanaman dalam kamar") jang hanja bisa

hidup djika disirami terus-menerus dengan uang negara, diubah kedudukannja mendjadi pembantu² jang terhormat dari Pemerintah.

Mungkin ada pengusaha kita jang merasa kurang mentereng karena „hanja" mendjadi pembantu Pemerintah. Tetapi kedudukan mereka adalah terhormat karena membantu pembangunan nasional, dan dengan bersatu dengan Pemerintah potensi para kapitalis nasional kita mendjadi lebih kuat dan tidak mudah dikunjah oleh kaum kapitalis asing seperti jang banjak kita lihat selama ini.

Sebagaimana tiap² „kamerplant", kaum kapitalis nasional kita sekarang tumbuhnja tidak wadjar. Begitu tidak wadjarnja, sehingga bukan tidak mungkin bahwa „kamerplant" ini akan mati semua karena kehabisan air-penjiramnja, karena kas negara kosong.

Dalam prasarannja Sdr. Hatta djuga mengemukakan tentang faktor jang menguntungkan bagi India dan RRT, jalah bahwa ke-dua²nja dapat membangun diatas dasar keuangan negara jang telah stabil. Tidaklah sukar untuk dimengerti, bahwa tidak ada satu Plan, baik djangka pendek atau djangka pandjang, jang dapat berdjalan dengan baik djika keuangan negara labil, apalagi djika kemerosotan nilai uang itu meluntjur deras.

Djadi, dalam hubungan dengan membikin rentjana dan pelaksanaan Plan pembangunan kita harus bergulat untuk menstabilisasi keuangan kita. Stabilisasi keuangan negara harus sudah dapat kita tjapai dalam rangka pembangunan djangka pendek atau rangka pembangunan dasar kita. Pembangunan djangka pendek jang saja maksudkan ini adalah sjarat mutlak untuk pembangunan djangka pandjang jang diatur dengan Plan² 5 tahun, karena pembangunan djangka pendek inilah jang harus mentjiptakan sjarat² ekonomi dan sosial untuk pembangunan djangka pandjang.

Saja memahami sepenuhnja pernjataan Perdana Menteri Djuanda dalam prasarannja tentang pembangunan kedaerahan, jang katanja memperlihatkan tendens² jang membahajakan untuk pembangunan nasional Republik Indonesia sebagai satu kesatuan dan satu „economic unit" (kesatuan ekonomi).

Perdana Menteri selandjutnja mengatakan, bahwa „soal kedaerahan ini terang merugikan ichtiar² jang amat penting untuk Negara sebagai keseluruhan, misalnja dilapangan industrialisasi terutama

industri berat, oleh karena dengan menekankan aksen pada pembangunan daerah sadja dengan melupakan rangka keseluruhan, kapasitet investasi kita — jang njata terbatas itu — akan hantjur dalam berbagai pekerdjaan² jang setjara lokal tidak dapat disangkal pentingnja akan tetapi, dalam prioritet keseluruhannja, diharuskan ada batas²nja untuk memungkinkan pemberian prioritet kepada objek² nasional". Disinilah berlakunja prinsip ketundukan kepentingan suku atau daerah kepada kepentingan nasion, sebagaimana halnja ketundukan kepentingan perseorangan kepada kepentingan umum. Saja berpendapat, bahwa djika tidak berpegang pada prinsip jang sederhana ini, bukan hanja „economic unit" (kesatuan ekonomi) jang dibahajakan, tetapi djuga kesatuan nasion bisa dihantjurkan.

Karena kesatuan ekonomi adalah sjarat jang terpenting dari adanja satu nasion, maka dimanakah lagi tempat nasion kita berpidjak djika kesatuan ekonominja sudah dibikin remuk? Djadi, mempertahankan kesatuan ekonomi Indonesia berarti mempertahankan tetap tegaknja satu nasion Indonesia.

Kepada Pemerintah Pusat saja harap supaja tetap teguh mempertahankan kesatuan ekonomi Republik kita, sebagai sjarat terpenting untuk mempertahankan kesatuan nasion Indonesia. Tetapi bersamaan dengan itu supaja Pemerintah Pusat dengan sungguh² mengikis birokrasi jang tebal melekat pada aparat² Pemerintah Pusat. Djika birokrasi dapat banjak dikurangi, dan Pemerintah Pusat sungguh² mengkordinasi pembangunan jang dilakukan oleh berbagai kementerian dan mengkordinasi pembangunan semua daerah, maka terbukalah pintu untuk pembangunan nasional negeri kita setjara teratur.

Sekarang sampailah saja pada soal jang terpenting bagi usaha² pembangunan, jaitu: dari mana modal harus didapat?

Dalam prasaran Perdana Menteri Djuanda di-singgung² tentang kemungkinan menempuh djalan penanaman modal asing. Dalam hal ini saja berpendapat, bahwa modal kita jang terpenting jalah alam negeri kita jang kaja dan Rakjat kita jang radjin bekerdja. Kita harus mendasarkan pembangunan ekonomi negeri kita pada kekuatan kita sendiri. Pembangunan ekonomi kita tidak boleh menggantungkan diri pada luarnegeri, dan samasekali tidak boleh mengikatkan diri pada luarnegeri.

Sasaran penting jang harus kita djadikan modal pembangunan kita jalah perusahaan² kaum kapitalis Belanda jang sudah tjukup lama menghisap Rakjat Indonesia dan sampai sekarang masih terus menghisap dan membelandjai angkatan perang Belanda di Irian Barat, angkatan perang jang ditudjukan untuk menjerang dan membunuh kita. Sesuai dengan putusan² rapat raksasa Pembebasan Irian Barat pada tanggal 18 November jang lalu dilapangan Banteng, saja mendesak kepada Kabinet Karya, djika Belanda di PBB tetap tidak mau berunding untuk menjerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada Republik Indonesia, supaja segera melaksanakan putusan rapat tersebut, antara lain: agar segera merealisasi penuh pembatalan KMB, agar menasionalisasi perusahaan² vital Belanda. Melaksanakan putusan tersebut berarti pemerintah setia pada programnja sendiri, jaitu program mengenai pembatalan KMB.

Dalam soal menolak penanaman modal asing sebagai sumber modal pembangunan, saja sependapat dengan fikiran jang pernah dinjatakan oleh Dr. Hatta dalam bukunja *„Beberapa Fasal Ekonomi"*. Dalam bukunja ini, dihalaman 141 tjetakan 1954, Dr. Hatta antara lain mengatakan bahwa:

„Kalau industrialisasi mau berarti sebagai djalan untuk mentjapai *kemakmuran rakjat,* mestinja kapitalnja datang dari fihak rakjat atau dari fihak pemerintah. Karena kalau kapital harus didatangkan dari luar, tampuk produksi terpegang oleh orang luaran. Pedoman bagi mereka untuk melekatkan kapital mereka di Indonesia ialah keuntungan. Keuntungan jang diharapkannja mestilah lebih daripada jang biasa, barulah berani mereka melekatkan kapitalnja itu. Supaja keuntungan itu dapat tertanggung, maka dikehendakinja supaja dipilih matjam industri jang bakal diadakan, dan djumlahnja tidak boleh banjak. Berhubung dengan keadaan, industri agraria dan tambang jang paling menarik hati kaum kapitalis asing itu. Dan dengan djalan itu tidak tertjapai industrialisasi bagi Indonesia, melainkan hanja mengadakan pabrik² baru menurut keperluan kapitalis luarnegeri itu sadja. Sebab itu, industrialisasi Indonesia dengan kapital asing tidak dapat diharapkan."

Selandjutnja dalam bukunja itu djuga Sdr. Hatta menundjukkan djalan lain, jaitu djalan dimana negara memindjam dari luar-

negeri untuk membeajai pembangunan industri jang dilaksanakan oleh Pemerintah. Saja setudju, bahwa djika kita membutuhkan bantuan modal luarnegeri supaja tidak berbentuk penanaman modal asing, tetapi berbentuk pindjaman. Soalnja jalah mentjari pindjaman jang paling menguntungkan, jang paling rendah rentenja, jang paling mudah sjarat²nja, dan jang terpenting jang tidak mengandung ikatan politik dan militer.

Sumber modal jang penting lainnja jalah dengan mewadjibkan kaum kapitalis asing, kaum pengusaha nasional, kaum tuantanah dan para hartawan lainnja supaja membeli sedjumlah obligasi negara untuk pembangunan sesuai dengan kemampuan para hartawan itu.

Dengan singkat, kesimpulan pandangan umum saja jalah sbb.:

1. Saja menjambut baik Munas Pembangunan jang akan menetapkan dan merumuskan politik pembangunan kita.
2. Saja menjetudjui adanja Dewan Perantjang Nasional jang bertugas membikin plan pembangunan jang sedjiwa dengan Undang² Dasar Sementara fasal 38, untuk mentjiptakan masjarakat Indonesia jang adil dan makmur, masjarakat jang berkeadilan sosial.
3. Saja mengusulkan adanja Plan Pembangunan Djangka Pendek atau Plan Pembangunan Dasar (misalnja Plan 3 tahun) untuk mentjiptakan sjarat² ekonomi dan sosial jang diperlukan untuk pelaksaan Plan 5 Tahun Pertama.
4. Saja menjetudjui supaja para pengusaha nasional kita ditempatkan pada tempat jang terhormat, jaitu sebagai pembantu Pemerintah dalam membangun ekonomi dengan djalan mengadakan perusahaan² tjampuran Pemerintah-Pengusaha Nasional dengan saham terbesar ditangan pemerintah.
5. Saja menjedari bahwa pembangunan ekonomi negeri kita memerlukan bantuan modal dari luarnegeri, tidak dalam bentuk investasi kapital asing, tetapi sebagai pindjaman negara kita dari negara mana sadja, baik dari negara Barat maupun Timur, dengan sjarat menguntungkan dan tanpa ikatan politik dan militer.
6. Saja mengusulkan supaja ada kordinasi lebih baik, kordinasi antara kementerian, antara pemerintah² daerah dengan pemerintah pusat, dan supaja birokrasi diberantas.

7. Mendesak supaja Kabinet Karya melaksanakan putusan² rapat umum Pembebasan Irian Barat dilapangan Banteng tanggal 18 November jang lalu, terutama supaja mengambil tindakan² terhadap kaum kapitalis besar Belanda sebagai langkah jang penting untuk memodali pembangunan Indonesia.

Sebagai jang terachir izinkanlah saja menjatakan sikap saja terhadap saran supaja Bung Karno dan Bung Hatta merealisasi pernjataan bersama tentang kerdjasama mereka. Dalam hal ini, saja tidak mempunjai kepentingan lain ketjuali menginginkan direalisasinja kerdjasama tersebut sebagaimana djuga saja ingin direalisasinja kerdjasama antara semua tokoh nasional kita.

Soal kerdjasama Sukarno-Hatta adalah penting, sebagaimana djuga pentingnja kerdjasama antara semua tokoh nasional kita. Tetapi djangan kita lupakan, bahwa pada 17 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta bekerdjasama karena ada jang mendorongnja, jaitu persatuan Rakjat jang kuat pada waktu itu.

Djadi, soal kerdjasama Sukarno-Hatta menurut pendapat saja adalah soal persatuan Rakjat Indonesia. Kerdjasama Sukarno-Hatta haruslah merupakan refleksi dari persatuan Rakjat Indonesia, dan bukan sebaliknja. Oleh karena itu adalah djanggal sekali, bahwa ada orang jang disatu fihak mengandjurkan supaja Sukarno-Hatta bekerdjasama, tetapi bersamaan dengan itu mereka djuga menimbulkan perpetjahan dikalangan Rakjat. Mereka mengatakan supaja diantara Sukarno-Hatta tidak ada sikap a-priori, tetapi difihak lain mereka sendiri bersikap a-priori terhadap orang atau golongan lain. Mengapa hanja Sukarno-Hatta sadja jang dituntut supaja bersatu, supaja bekerdjasama, dan kenapa tidak kita semua mewadjibkan diri sendiri supaja bersatu, supaja bekerdjasama.

Saja kuatir kalau andjuran persatuan Sukarno-Hatta jang tidak disertai dengan mewadjibkan diri-sendiri untuk menggalang persatuan jang luas berakibat tidak membaikkan persatuan Sukarno-Hatta dan persatuan Rakjat, sebab lamakelamaan bisa terdjadi, bahwa tiap² kegagalan dan kematjetan ditumpahkan kesalahannja kepada Sukarno-Hatta dan kepada Rakjat.

Djadi sekali lagi, saja tidak mempunjai kepentingan lain ketjuali supaja direalisasi kerdjasama Sukarno-Hatta dalam bentuk seperti diinginkan oleh kedua tokoh ini dan atas dasar pelaksanaan tjita²

Revolusi Agustus 1945. Saja djuga tidak mempunjai keinginan lain supaja semua tokoh nasional kita bersatu dan bekerdjasama sebagai pentjerminan dari persatuan Rakjat jang besar, dan sebagai pendorong untuk persatuan Rakjat jang lebih besar lagi.

Sekian.

27 November 1957

Berikut ini adalah pendapat Kawan D.N. Aidit jang diberikan pada tgl. 4 November 1957 atas permintaan Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat mengenai masalah Irian Barat dan tentang djalan jang sebaiknja harus ditempuh djika perdjuangan merebut Irian Barat gagal di PBB.

Kawan Aidit menegaskan bahwa djika djalan lewat PBB gagal, ketjuali dengan mengirimkan Angkatan Perang Republik Indonesia untuk merebut Irian Barat djika sjarat2nja sudah matang dan Belanda tidak mau djalan damai, djalan lain jalah dengan langsung *memukul sumber2 kekajaan keradjaan Belanda jang ada didaerah Republik Indonesia,* jaitu perusahaan2 dan kebun2 kaum monopolis Belanda.

Pada tgl. 27 November Panitia Politik Madjelis Umum PBB menerima usul resolusi Indonesia jang mengadjak fihak Belanda berunding tentang penjelesaian masalah Irian Barat. Tetapi resolusi ini ditolak pada achir bulan November 1957 oleh Madjelis Umum PBB karena tidak mendapat sokongan 2/3 suara. Penolakan ini menimbulkan gelombang pasang perdjuangan anti-kolonialisme. Disemua perusahaan dan perkebunan Belanda diadakan pemogokan selama 24 djam dan kemudian sedjak tgl. 3 Desember 1957 kaum buruh mengambilalih perusahaan2 Belanda.

Dengan demikian Rakjat Indonesia mulai melaksanakan djalan lain sebagaimana ditundjukkan oleh PKI dan memasuki taraf baru perdjuangan anti-kolonialisme.

DJIKA IRIAN BARAT GAGAL DI PBB, „DJALAN LAIN" ADALAH DJALAN KEMENANGAN

Hiduplah dizaman sekarang dengan fikiran zaman sekarang !

Irian Barat merupakan lebihkurang 20% daripada wilajah Republik Indonesia jang sekarang sedang diduduki oleh tentara pendudukan Belanda. Se-mata² dan hanja atas dasar kekuatan tentara inilah Belanda dapat membangun kekuasaan politiknja di Irian Barat.

Kaum kolonialis Belanda hanja mungkin mempertahankan kekuasaan politiknja di Irian Barat selama keradjaan Belanda masih dapat mengongkosi tentaranja disana. Apakah negeri Belanda begitu kaja sehingga dapat memelihara kekuatan tentara jang besar di Irian Barat? Tidak, negeri Belanda bukan negeri jang kaja. Sebagian besar uang untuk mengongkosi tentara Belanda di Irian Barat didapat dari keuntungan kaum kapitalis Belanda di Indonesia. Djadi, kekajaan alam Indonesia dan hasil keringat serta bakat Rakjat Indonesia digunakan oleh kaum kolonialis Belanda untuk memperkuat tentaranja di Irian Barat, tentara jang digunakannja untuk menindas Rakjat dan gerakan kemerdekaan di Irian Barat, dan djika Belanda menganggap sudah tiba waktunja djuga untuk memerangi Republik Indonesia. Ini kelihatannja seperti lelutjon, tetapi ini benar!

Rakjat Indonesia sudah tjukup menundjukkan kemauan baik untuk mengachiri pendudukan Belanda di Irian Barat, jaitu dengan menempuh djalan berunding, a.l. dengan melalui PBB. Ini adalah satu djalan. Tetapi, sebagaimana pernah dikatakan oleh Menteri Luarnegeri Dr. Subandrio, masih ada djalan lain. Apakah djalan lain itu?

Djika kita sudah tahu bahwa kekuasaan Belanda di Irian Barat se-mata² dibangun atas dasar kekuatan militer, maka djalan lain itu jalah: bagaimana melemahkan kekuatan militer Belanda di

Irian Barat?

Jang pertama, jalah mengirim sebagian dari Angkatan Perang Republik Indonesia ke Irian Barat untuk memerangi tentara Belanda disana, djika memang sudah matang untuk ini dan djika Belanda tetap berkeraskepala tidak mau menjerahkan Irian Barat setjara damai kepada Republik Indonesia.

Jang kedua, jalah memukul sumber² kekajaan keradjaan Belanda agar keradjaan Belanda mendjadi tidak mampu lagi mengongkosi angkatan bersendjatanja di Irian Barat. Untuk ini pemuda² dan Angkatan Perang Republik Indonesia tidak perlu ke Irian Barat atau ke Nederland, karena sumber² kekajaan keradjaan Belanda ada didaerah Republik Indonesia, berupa tambang², perkebunan², bank², perusahaan² impor-expor, perusahaan² transpor, pabrik², dsb. Djika pemerintah dan Rakjat Indonesia bertindak terhadap sumber² kekajaan keradjaan Belanda ini, maka ini berarti langsung berdjuang untuk Irian Barat. Perdjuangan ini dapat dilakukan oleh seluruh Rakjat Indonesia, terutama oleh kaum buruh, kaum tani, kaum pengusaha nasional, para pemuda, dengan bantuan Angkatan Perang Republik Indonesia jang patriotik serta dengan persetudjuan dan pimpinan Pemerintah.

Saja berpendapat bahwa aksi pembebasan Irian Barat jang mulai dihangatkan kembali tepat pada hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober jang lalu sudah mentjapai hasil² sementara, jaitu sampai batas² tertentu sudah berhasil mempersatukan kekuatan² patriotik dan menggelorakan semangat untuk merebut Irian Barat. Kaum pengchianat dan musuh² Indonesia terlalu mem-besar²kan ekses² jang timbul selama gerakan ini berlangsung. Beberapa tjoretan-tembok jang kebetulan keliru, atau sengadja dibikin keliru oleh pengatjau², telah mereka gunakan untuk mensahkan pendjadjahan Belanda di Irian Barat, atau se-kurang²nja untuk melemahkan aksi pembebasan Irian Barat. Mereka katakan bahwa aksi pembebasan Irian Barat „Tidak berachlak", dan dengan ini mau mereka katakan, bahwa pendjadjahan Belanda di Irian Barat dan pembunuhan² oleh tentara Belanda di Irian Barat terhadap patriot² Indonesia adalah sesuai dengan achlak mereka. Kalau pendjadjahan dan pembunuhan terhadap kaum patriot jang dimaksudkan dengan achlak, lebih baik Rakjat dan pemuda Indonesia tidak

memiliki achlak sematjam itu! Rakjat dan pemuda Indonesia lebih baik mempertahankan achlaknja sendiri, jaitu achlak tjinta merdeka, tjinta tanahair dan bersedia berkorban untuk kemerdekaan manusia Indonesia jang ada di Irian Barat.

Partai Komunis Indonesia menjokong sepenuhnja aksi² pembebasan Irian Barat jang sudah dilakukan selama ini. PKI mengharap dan jakin, bahwa seluruh Rakjat diseluruh Indonesia akan senantiasa siapsedia untuk mengambil bagian dalam aksi-aksi, baik tingkat sekarang, maupun nanti djika aksi² sudah sampai pada taraf jang lebih tinggi. Bagi Rakjat Indonesia, mengenai Irian Barat sudah tidak ada djalan mundur lagi, satu²nja djalan jalah madju terus sampai Irian Barat masuk kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia.

Pada tingkat sekarang kekuatan harus kita kerahkan untuk menempatkan kaum kolonialis Belanda dalam situasi jang mengharuskan mereka menerima tuntutan adil Rakjat Indonesia lewat medja perundingan PBB. Djika lewat PBB ini gagal, maka tidak ada djalan lain bagi Rakjat Indonesia, bagi pemuda² dan patriot² jang ada dalam Angkatan Perang Republik Indonesia, jalah mengambil tindakan jang setimpal sesuai dengan sikap kepalabatu dan kebiadaban Belanda. Dan tindakan itu jalah tindakan terhadap sumber² kekajaan keradjaan Belanda jang banjak diwilajah Republik Indonesia. Tindakan ini sangat adil, dan malahan belum tjukup djika kita mengingat kebiadaban kolonialisme Belanda di Irian Barat. Djalan ini pasti didukung oleh seluruh Rakjat Indonesia. Hanja kaum pengchianat dan musuh² Indonesia jang menentang djalan ini. Djalan ini pasti akan disokong oleh sebagian besar bangsa² didunia. Oleh karena itu, djalan jang lain daripada djalan berunding ini jang terpaksa ditempuh karena Belanda berkeras kepala, adalah djalan kemenangan bagi Rakjat Indonesia untuk pembebasan Irian Barat.

Dalam hubungan dengan menempuh „djalan lain" ini ada orang jang ketakutan setengah mati pada negara² imperialis, dan saking takutnja mereka tidak berani berbuat apa² untuk kemerdekaan tanahairnja dan untuk haridepan jang lebih baik bagi anaktjutjunja. Orang² ini memang hidup sesudah perang dunia kedua, tetapi jang hidup bersama zaman ini hanja tubuhnja, fikirannja

masih fikiran orang² sebelum perang dunia. Ja, malahan ada jang djasmaninja hidup dizaman sputnik, tetapi fikirannja masih fikiran orang² zaman bedilsundut. Maka mereka buta dan otak mereka beku, dan oleh karena itu mereka mengira bahwa dunia sekarang dan Asia sekarang sama dengan dunia dan Asia sebelum perang, mereka mengira imbangan kekuatan internasional sekarang masih sama seperti sebelum perang. Padahal lihatlah tjontoh: Mesir. Djika kaum nasionalis Mesir sebelum perang seberani sekarang maka mereka akan dilalap oleh Inggeris, Perantjis dll. Tetapi sekarang, karena jakin akan kekuatan Rakjat dan pandai menggunakan imbangan kekuatan dunia jang baru, kaum nasionalis Mesir dapat mengalahkan penjerang² Inggeris-Perantjis dan djuga Israel jang mendapat perlengkapan sendjata dari Amerika Serikat.

Bagi Indonesia, Asia sekarang adalah Asia dari bangsa² jang sudah merdeka, jang tidak akan sudi melihat Republik Indonesia jang muda di-indjak² imperialisme asing karena ini berarti antjaman buat semua bangsa² Asia. Tiap² serangan terhadap Indonesia tidak hanja akan dilawan mati²an oleh Rakjat Indonesia, tetapi sipenjerangnja djuga akan dikrojok oleh semua bangsa di Asia, demi kepentingan Asia sendiri.

Hiduplah dizaman sekarang dengan fikiran zaman sekarang!

Djakarta, 4 November 1957

Berikut ini adalah wawantjara lengkap Kawan D.N. Aidit dengan harian Partai Komunis Italia *l'Unitá* jang telah mengadjukan empat buah pertanjaan. Pertanjaan2 itu mengenai latarbelakang dan sikap PKI terhadap perdjuangan Irian Barat, tentang apakah perdjuangan itu didukung oleh front nasional, tentang keadaan ekonomi Indonesia sesudah pengoperan perusahaan2 dan kebun2 Belanda, dan jang terachir menanjakan apa jang mendjadi harapan2 kaum Komunis Indonesia kepada kaum buruh dan Rakjat Italia.

PERDJUANGAN IRIAN BARAT DIDUKUNG OLEH FRONT NASIONAL JANG TJUKUP LUAS

Pertanjaan: Harap saudara suka menerangkan sedikit latarbelakang dari perdjuangan Irian Barat? Bagaimana sikap PKI terhadap perdjuangan Irian Barat?

Djawab: Pada tanggal 2 November 1949 oleh pemerintah Hatta (Indonesia) dan pemerintah Belanda ditandatangani Persetudjuan Konferensi Medja Bundar (KMB) jang menetapkan Indonesia sebagai negeri setengah-djadjahan, jaitu negeri jang mempunjai kemerdekaan politik, tetapi kekuasaan ekonomi masih ditangan kaum imperialis, terutama kaum imperialis Belanda.

Sesuai dengan persetudjuan KMB tersebut pada tanggal 27 Desember 1949 Keradjaan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, ketjuali di Irian Barat jang merupakan 20% dari wilajah Indonesia. Djadi, diplomasi bangkrut pemerintah Hatta tidak hanja telah menempatkan Indonesia sebagai negeri setengah-djadjahan, tetapi djuga membiarkan Irian Barat sepenuhnja didjadjah.

Dengan adanja persetudjuan KMB kaum monopolis Belanda, dengan modal mereka sebanjak 5 a 6 miljard gulden (rupiah Belanda), tetap mempunjai keleluasaan untuk mengexploitasi kekajaan alam dan Rakjat Indonesia dengan keuntungan saban tahun lebih dari 1 miljard gulden. Sebagai djaminan untuk keselamatan exploitasinja ini, Irian Barat merupakan pistol jang terus-menerus ditudjukan kepada Republik Indonesia, jang se-waktu² siap untuk ditembakkan djika kepentingan Belanda didaerah kekuasaan Republik Indonesia terganggu. Irian Barat djuga merupakan pangkalan militer jang penting bagi negara² imperialis jang dipelopori oleh Amerika Serikat.

Sudah sedjak persetudjuan KMB ditandatangani, PKI menentang persetudjuan jang hina ini. Dikuasainja Irian Barat oleh kaum kolonialis Belanda berarti adanja bahaja latent dari serangan militer Belanda terhadap Republik Indonesia. Sampai sekarang soal

Irian Barat sudah 4 kali dibawa kesidang PBB, sedangkan bulan Djuni 1954 pemerintah Ali Sastroamidjojo telah mengirimkan sebuah delegasi tingkat menteri kenegeri Belanda, antara lain untuk mentjari penjelesaian setjara damai mengenai Irian Barat. Perundingan Indonesia-Belanda ini tidak mentjapai hasil apa² karena fihak Belanda tidak sedikitpun memperlihatkan kemauan baik.

Tiap kali Irian Barat akan dibitjarakan dalam Sidang Umum PBB, dan djuga ketika delegasi tingkat menteri akan berangkat kenegeri Belanda untuk berunding, Rakjat Indonesia menjatakan sokongan jang penuh, rapat² diorganisasi dibanjak tempat, resolusi² dari organisasi² massa membandjir dan Parlemen memberikan dukungannja jang penuh kepada delegasi Indonesia. Partai² dan pemimpin² Indonesia bisa tidak bersesuaian faham mengenai banjak hal, tetapi mengenai Irian Barat mereka adalah satu. Terutama Presiden Sukarno adalah pedjuang jang gigih untuk memasukkan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia.

Memenuhi tuntutan jang kuat dari Rakjat Indonesia jang sudah ber-tahun² dan sebagai protes keras terhadap sikap kepalabatu kaum kolonialis Belanda jang tidak mau menjerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia, pada tanggal 21 April 1956 Parlemen Indonesia dengan suara bulat menerima Undang² Pembatalan Persetudjuan KMB. Sedjak itu Rakjat dan Pemerintah Indonesia tidak terikat lagi oleh persetudjuan jang tidak adil ini. Sebagai kelandjutannja, dalam bulan Agustus 1956 pemerintah Indonesia, berdasarkan Undang² jang diterima dengan suara bulat dalam Parlemen, membentuk provinsi otonom Irian Barat, jang untuk sementara pemerintah dan ibukota provinsi ini berkedudukan didaerah provinsi Maluku, jaitu provinsi jang berbatasan dengan Irian Barat.

Walaupun Pemerintah dan Rakjat Indonesia sudah dengan berbagai djalan memperingatkan kaum kolonialis Belanda supaja tidak berkepalabatu, tetapi fihak Belanda tidak mengindahkannja. Demikian djuga ketika untuk keempatkalinja soal Irian Barat dibitjarakan di PBB pada achir 1957, fihak Belanda dengan dibantu oleh negara² imperialis lainnja tetap menolak adjakan Indonesia untuk menjelesaikan soal Irian Barat setjara berunding. Tetapi kali ini lain daripada waktu² jang sudah. Rakjat dan pemerintah Indonesia sudah bertekad bulat, bahwa djika fihak Belanda tetap tidak mau

berunding dengan pengawasan PBB, maka djalan diluar PBB dan diluar perundingan akan ditempuh.

Menghadapi akan dipungutnja suara di PBB, diseluruh negeri diadakan rapat² dan bentuk² lain dari pernjataan perasaan, fikiran dan hasrat Rakjat Indonesia supaja usul penjelesaian setjara damai dari fihak Indonesia diterima oleh PBB. Tetapi kemauan baik Pemerintah dan Rakjat Indonesia ini ditolak oleh fihak Belanda, Inggeris, Perantjis dan negara² imperialis lainnja serta pengikut² mereka di PBB. Amerika Serikat jang sepenuhnja berdiri dibelakang penolakan ini pura² bersikap abstain, karena kuatir akan menimbulkan kemarahan Rakjat Indonesia dan dengan demikian merugikan kepentingan Amerika di Indonesia.

Djawaban jang pertama dari Rakjat Indonesia sesudah usul berundingnja ditolak oleh PBB, jalah mengadakan pemogokan selama 24 djam disemua perusahaan dan kebun² Belanda. Kemudian disusul dengan tindakan² kaum buruh mengoper KPM, perusahaan pelajaran jang terpenting di Indonesia kepunjaan Belanda, jang kemudian disahkan oleh pemerintah serta diluaskan oleh pemerintah dengan mengoper semua perusahaan dan kebun² kepunjaan kaum monopolis Belanda. Dibanjak tempat wakil² kaum buruh mengambil bagian dalam Dewan Pimpinan dan Dewan Pengawas perusahaan² dan kebun² jang sudah dioper.

Atas putusan pemerintah konsulat² Belanda diseluruh Indonesia ditutup, karena lewat konsulat² ini fihak Belanda mengadakan kegiatan² subversif. Orang² Belanda jang tidak tentu pekerdjaannja dan hidup dari bantuan pemerintah Belanda, jang banjak diantara mereka mengambil bagian dalam gerakan² subversif, diharuskan meninggalkan Indonesia. Selandjutnja „ahli²" Belanda jang ditempatkan sebagai „penasehat²" diberbagai Kementerian dikeluarkan. Tindakan² ini disambut hangat oleh Rakjat Indonesia, karena memang sudah lama Rakjat Indonesia menuntut supaja orang² Belanda jang mendjalankan kegiatan² subversif dan jang memberi „nasehat²" jang destruktif dikeluarkan dari Indonesia.

Dalam hubungan dengan perdjuangan Irian Barat, PKI tidak henti²nja dan tidak djemu²nja mengorganisasi dan memobilisasi kaum buruh dan Rakjat Indonesia untuk dengan teguh menjokong politik pemerintah. PKI dan Rakjat Indonesia jakin, bahwa meng-

usir kekuasaan ekonomi kaum monopolis Belanda dari Indonesia berarti melemahkan politik dan militer Belanda, dan ini djuga berarti melemahkan kedudukan politik dan militer Belanda di Irian Barat.

Perusahaan² dan kebun² Belanda jang sekarang dikuasai oleh Republik Indonesia mempunjai dua alternatif. Jang pertama, djika fihak Belanda bersedia berunding untuk menjerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia, perusahaan² dan kebun² Belanda jang vital akan dinasionalisasi, artinja perusahaan² dan kebun² itu akan mendjadi milik negara dan kaum monopolis Belanda mendapat bajaran menurut kemampuan keuangan Republik Indonesia. Djika fihak Belanda tidak bersedia berunding, maka perusahaan² dan kebun² Belanda jang vital akan disita dan didjadikan milik negara.

Sekarang terserah pada fihak Belanda djalan mana jang mau mereka tempuh. Kalau tergantung pada Rakjat Indonesia berundinglah djalan jang se-baik²nja, tetapi inisiatif untuk ini harus diambil oleh fihak Belanda, karena giliran Indonesia mengambil inisiatif untuk berunding sudah lewat.

Pertanjaan: Apakah perdjuangan Irian Barat sekarang didukung oleh suatu front nasional?

Djawab: Ja, tanpa front persatuan nasional Rakjat Indonesia tidak mungkin mengadakan tindakan² jang berarti terhadap kolonialisme Belanda. Sekarang seluruh kekuatan nasional tanpa membeda²kan kejakinan politik, ideologi dan agama, bersatu menghadapi apa sadja jang akan terdjadi berhubung dengan tindakan² jang mungkin diambil oleh pemerintah kolonial Belanda. Kaum buruh, kaum tani, para pemuda, inteligensia, patriot² dalam Angkatan Perang dll. bahu-membahu berdjuang untuk memperkuat kedudukan Republik Indonesia dilapangan politik, ekonomi dan militer.

Serikatburuh², organisasi² tani, organisasi² pemuda, organisasi² wanita dan organisasi² massa lainnja, baik jang dibawah pimpinan Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia maupun Partai² Islam, semuanja bersatu dalam Badan² Kerdjasama antara organisasi² massa dengan fihak militer. Hanja sebagian ketjil dari pemimpin² Partai Islam Masjumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI, sosialis kanan) jang menentang perdjuangan Irian Barat jang

dilakukan oleh Rakjat dibawah pimpinan pemerintah sekarang. Terang²an menentang mereka tidak berani, mereka kuatir terisolasi samasekali dari massa. Mereka tutupi penentangan mereka mengenai perdjuangan Irian Barat dan pembelaan mereka pada kepentingan² kaum kolonialis Belanda di Indonesia dengan misalnja mengatakan, bahwa pemerintah dalam perdjuangan Irian Barat „tidak berentjana" sehingga berakibat Rakjat harus menderita, dan bahwa perdjuangan Irian Barat hanja bisa berhasil djika pemerintah sekarang diganti dengan „pemerintah jang kuat", dan dengan ini dimaksudkannja pemerintah dimana duduk pemimpin² Masjumi dan PSI.

Djadi, perdjuangan Irian Barat didukung oleh persatuan nasional jang tjukup luas. Jang diperlukan sekarang jalah bentuk organisasi front nasional jang se-tepat²nja. Untuk mengkordinasi semua kegiatan Rakjat dalam perdjuangan Irian Barat oleh Kabinet Djuanda sudah dibentuk organisasi Front Nasional Pembebasan Irian Barat jang diketuai oleh KSAD Djenderal Major A.H. Nasution, sedangkan anggota² pimpinan lainnja diambilkan dari organisasi² massa. Ini adalah satu langkah untuk mendapatkan bentuk organisasi front nasional jang se-tepat²nja dalam keadaan Indonesia sekarang.

Pertanjaan: Pers imperialis me-njiar²kan kabar bahwa ekonomi Indonesia sekarang sudah mendjadi buruk sebagai akibat diopernja perusahaan² dan kebun² Belanda oleh pemerintah Indonesia. Hal ini tentu tidak benar, tetapi bagaimana keadaan ekonomi Indonesia sebenarnja?

Djawab: Perlu diketahui, terutama oleh orang² diluar Indonesia, bahwa ekonomi Indonesia belum pernah baik bagi Rakjat dan pemerintah Indonesia. Rakjat Indonesia belum pernah tidak menderita selama ekonomi Indonesia dikuasai oleh kaum monopolis Belanda dan kaum imperialis lainnja. Dengan diopernja perusahaan² dan kebun² oleh pemerintah Indonesia bukanlah ekonomi Rakjat Indonesia jang mendjadi buruk, tetapi keuntungan kaum monopolis Belanda jang terantjam. Pengoperan perusahaan² dan kebun² membukakan harapan² baru bagi kaum buruh dan Rakjat Indonesia, apalagi setelah ternjata bahwa mereka sendiri sanggup mengurus perusahaan² dan kebun² itu.

Saja tidak membantah, bahwa untuk sementara waktu jang singkat Pemerintah dan Rakjat Indonesia mengalami kesulitan² berhubung dengan ke-ragu²an sementara orang² Indonesia sendiri dan berhubung dengan sabotase² fihak Belanda dan kakitangan²-nja. Tetapi semuanja pasti akan dapat diatasi, karena Rakjat Indonesia sudah bertekad untuk mengatasi segala kesukaran dan Rakjat Indonesia mempunjai segala ketjakapan jang diperlukan untuk mengatur kehidupan nasionalnja sendiri.

Tentang tenaga² ahli dilapangan tehnik dan administrasi memang Indonesia masih kekurangan, tetapi adalah satu kenjataan bahwa barisan tenaga ahli Indonesia sudah ada, dan dalam praktek kebanjakan diantara mereka sudah biasa mengerdjakan pekerdjaan² ahli² Belanda. Tenaga² ahli Indonesia dimasa jang lalu tidak bisa menempati kedudukan memimpin didalam perusahaan² dan kebun² Belanda, bukanlah karena mereka tidak tjakap, tetapi karena kedudukan² memimpin itu adalah dimonopoli oleh orang² Belanda. Dengan diopernja perusahaan² dan kebun² Belanda terbukalah kesempatan bagi tenaga² ahli Indonesia untuk mengembangkan diri tanpa ada halangan. Jang mereka butuhkan sekarang jalah kepertjajaan jang lebih besar dari pemerintah, pimpinan jang tepat dan penghargaan jang sewadjarnja atas pekerdjaan mereka.

Tentu sadja hubungan ekonomi jang lebih erat antara Indonesia dengan negara² sahabat lebih² lagi dibutuhkan untuk mengatasi kesukaran² ekonomi Indonesia dan untuk mengembangkannja lebih landjut.

Pertanjaan: Apakah harapan² saudara kepada kaum buruh dan Rakjat Italia dalam hubungan dengan perdjuangan Irian Barat?

Djawab: Saja jakin bahwa kaum buruh dan Rakjat Italia jang bertradisi revolusioner, jang militan dan terorganisasi baik itu, apalagi jang dipimpin oleh Partai Komunis Italia, memandang perdjuangan Irian Barat sebagai perdjuangannja sendiri. Mereka tentu menjadari se-dalam²nja bahwa perdjuangan Irian Barat per-tama² memang kewadjiban Rakjat Indonesia, tetapi bersamaan dengan itu perdjuangan ini adalah djuga perdjuangan untuk perdamaian dunia.

Dengan membandelnja kaum kolonialis Belanda menduduki Irian Barat, mendjadi djelaslah bahwa Nederland bukanlah hanja negeri bunga² tulp jang indah, tetapi djuga negeri kaum imperialis jang djahat².

Djika Irian Barat tetap dikuasai kaum kolonialis Belanda, maka pulau jang besar ini pasti akan tumbuh mendjadi pangkalan perang jang penting dari Amerika Serikat dan negara² imperialis lainnja jang pasti akan membahajakan perdamaian di Asia dan didunia.

Banjak jang dapat dilakukan oleh kaum buruh dan Rakjat Italia djika Belanda berani menjerang Republik Indonesia. Saja jakin bahwa djika kaum kolonialis Belanda sampai melakukan avontur ini, kaum buruh di-pelabuhan² Italia akan menolak mengangkat barang² dari dan ke-kapal² Belanda. Peperangan kolonial, djika Belanda berani melantjarkannja, pasti akan diprotes keras oleh kaum buruh dan Rakjat Italia. Rakjat Italia dan Rakjat Indonesia adalah Rakjat² jang sama² pernah merasakan pahitnja tindasan fasisme, mereka adalah sama² pedjuang anti-fasis jang gigih, dan oleh karena itu hubungan semangat antara kedua Rakjat ini adalah erat.

Italia adalah negeri jang industrinja djauh lebih madju daripada Indonesia. Oleh karena itu, dimasa datang banjaklah jang dapat disumbangkan oleh kaum buruh dan Rakjat Italia, baik jang berupa mesin² maupun jang berupa ahli², dalam membangun Indonesia Baru dimana Rakjat Indonesia mendjadi tuan dirumahnja sendiri.

Tidak lama lagi akan datang di Indonesia kapal² perang jang dipesan oleh pemerintah Indonesia kepada Italia. Karena Indonesia adalah negeri jang terdiri dari ribuan pulau, kapal² ini adalah sangat penting untuk mendjaga keamanan Indonesia. Rakjat Indonesia tahu, bahwa pemesanan kapal² ini telah menguntungkan sedjumlah kapitalis Italia, tetapi Rakjat Indonesia tidak akan melupakan bahwa jang membikin kapal² ini adalah kaum buruh Italia. Dengan ber-debar² Rakjat Indonesia menunggu kedatangan kapal² ini, dan fikiran mereka tertudju pada kaum buruh Italia jang revolusioner, radjin dan militan.

Saja mengutjapkan selamat kepada kaum buruh dan Rakjat Italia dan mengharapkan sukses lebih besar bagi perdjuangan mereka jang adil. Kekallah dan bertambah eratlah persahabatan Rakjat Indonesia dengan Rakjat Italia!

Djakarta, 20 Djanuari 1958

Berikut ini adalah pidato sambutan Kawan D.N. Aidit pada ulangtahun ke-VII *Harian Rakjat* pada tanggal 31 Djanuari 1958. Ulangtahun ini diadakan dalam keadaan perdjuangan anti-kolonialisme dari Rakjat Indonesia telah memasuki taraf baru jang menjebabkan situasi berkembang dengan sangat tjepatnja. Maka Kawan Aidit mengemukakan perlunja HR disesuaikan dengan situasi baru ini jang turut ditjiptakan oleh HR sendiri. Dalam hal ini ditekankan terutama pentingnja pendidikan dan penggemblengan ideologi terus-menerus bagi semua pekerdja HR, agar bisa tetap berdiri dibarisan paling depan dalam melawan tekanan2 ideologis dari musuh2 Rakjat dan dalam mempertinggi tingkat ideologi kaum Komunis dan Rakjat.

SESUAIKAN „HARIAN RAKJAT" DENGAN PERKEMBANGAN SITUASI JANG TJEPAT

Sekarang kita memperingati ulangtahun ke-VII „Harian Rakjat". Saptawarsa HR ini kita peringati dalam situasi dimana proses perkembangan politik dinegeri kita berdjalan tjepat, dimana disatu fihak gelombang gerakan revolusioner anti-kolonialisme sedang menaik, sedangkan difihak lain kaum reaksioner dalamnegeri sedang sibuk2nja dengan pengchianatan2nja jang baru.

Djika dalam bulan Djanuari tahun ini sangat santar kedengaran suara tentang usaha2 sementara orang jang sedang kalap dan kehilangan perspektif untuk mendirikan apa jang dinamakan „negara Sumatera" atau „negara Indonesia" jang baru di Sumatera, maka ini samasekali bukan bukti bahwa kaum imperialis dan kakitangannja dinegeri kita bertambah kuat. Ditariknja John Allison, dutabesar Amerika Serikat, dari Djakarta adalah perlambang kegagalan politik imperialis di Indonesia. Tetapi, digantinja Allison dengan Howard Jones, adalah djuga perlambang, bahwa kegagalan imperialis di Indonesia belumlah definitif. Dutabesar2nja bisa datang dan pergi, tetapi politik imperialis Amerika Serikat tetap tidak mengalami perubahan dasar.

Usaha2 mendirikan „negara Sumatera" atau „negara Indonesia" jang baru di Sumatera menundjukkan kekalapan dan kegelapan kaum reaksioner dalamnegeri dan kaum imperialis asing. Adalah satu kedunguan untuk berfikir buat bertindak demikian, djika kaum imperialis dan kakitangannja masih melihat kemungkinan untuk merebut kekuasaan sentral setjara parlementer, ataupun setjara extra-parlementer.

Sudah sedjak diumumkannja Konsepsi Presiden Sukarno dalam bulan Februari 1957, konsepsi jang adil dan oleh karena itu mendapat sambutan Rakjat jang luarbiasa hangatnja, dan terutama sekali sesudah terbentuknja Kabinet Karya dan Dewan Nasional, kaum reaksioner Indonesia berada dalam keadaan jang sangat sukar

untuk merebut kekuasaan sentral setjara demokratis parlementer. Lebih² lagi menjulitkan mereka sesudah mereka menelandjangi diri di Konstituante, dimana mereka dengan tandas menjatakan penolakannja terhadap dasar negara jang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, jaitu dasar Pantjasila. Dengan ketjaman mereka jang keterlaluan terhadap Pantjasila ini, timbullah pertanjaan: *apakah masih mungkin mereka mengangkat sumpah atau djandji sebagai menteri atau pedjabat resmi lainnja dari Republik Indonesia jang berdasarkan Pantjasila? Apakah bukan perbuatan mereka jang keterlaluan ini jang djuga ikut mendorong mereka untuk mendirikan „negara baru"?*

Sebelum kedjadian „teror Tjikini" (1) tanggal 30 November 1957 masih ada kemungkinan bagi kaum reaksioner untuk menguasai pemerintah sentral dengan tjara² jang *kelihatannja* parlementer. Pada waktu itu mereka masih dapat menggunakan posisi mereka jang agak kuat didalam „Panitia 7" dan „Panitia 9" Parlemen (2) dan mengkombinasikan kegiatan² dalam kedua Panitia ini dengan pembunuhan atas diri Presiden Sukarno. Djika seandainja mereka berhasil membunuh Presiden Sukarno, maka terbukalah djalan lebar bagi mereka untuk dengan perantaraan „Panitia 9" menundjuk Presiden baru jang tjotjok dengan kepentingan politik mereka. Disamping itu akan leluasa pulalah mereka, dengan melewati „Panitia 7", merehabilitasi perwira² jang mendjadi benggol² gerakan subversif.

Tetapi latjur bagi mereka! Rentjana jang sudah diperhitungkan begitu teliti gagal, Presiden Sukarno tidak mati karena „teror Tjikini". Kemarahan Rakjat meluap kepada kaum reaksioner. Perwira jang tadinja mau direhabilitasi ternjata adalah biangkeladi „teror Tjikini". Prestise kaum reaksioner mendjadi sangat merosot, sebaliknja prestise Presiden Sukarno dan semua kaum revolusioner dan demokrat, prestise partai² revolusioner dan demokratis, menaik tinggi. Dalam rangka tindakan alat² negara terhadap pelaku² „teror Tjikini", organisasi kaum subversif diobrak-abrik dan dalang² mereka jang belum tertangkap pada bertebaran ke-mana², melandjutkan petualangan mereka dalam situasi jang djauh lebih sukar bagi mereka.

Perkembangan situasi sesudah kegagalan „teror Tjikini" mendjadi lebih memihak Rakjat dengan naiknja gelombang revolusioner untuk membebaskan Irian Barat dengan dilakukannja pengoperan² perusahaan² Belanda oleh kaum buruh dan Pemerintah. Ini pelaksanaan politik „djalan lain" atau djalan revolusioner, sebagai djawaban tepat Pemerintah dan Rakjat Indonesia kepada kaum kolonialis Belanda jang berkepalabatu.

Kegagalan perbuatan chianat mereka dalam soal „teror Tjikini" dan sikap mereka jang menentang djalan revolusioner jang ditempuh oleh Kabinet Karya dalam perdjuangan untuk Irian Barat membikin kaum reaksioner mendjadi sangat diskredit, tidak hanja dimata Rakjat, tetapi djuga dimata alat² negara jang setia pada revolusi nasional Indonesia.

Djadi, tjiri dari situasi sesudah „teror Tjikini" jang gagal dan sesudah Rakjat Indonesia menempuh djalan revolusioner dalam perdjuangan pembebasan Irian Barat jalah, bahwa kaum reaksioner bukan hanja tidak mampu merebut kekuasaan sentral setjara parlementer, tetapi djuga setjara extra-parlementer sudah tidak mungkin. Satu²nja djalan bagi kaum reaksioner untuk memegang kekuasaan jalah dengan merebut kekuasaan lokal jang dikombinasikan dengan pembunuhan² politik terhadap pemimpin² politik sentral jang mendapat kepertjajaan Rakjat. Ini adalah satu²nja djalan bagi mereka.

Apakah satu²nja djalan, jaitu djalan perebutan kekuasaan lokal, djalan jang mudah bagi mereka?

Untuk mendirikan „negara Sumatera" atau mendirikan „negara Indonesia" jang baru di Sumatera mereka harus berhadapan dengan banjak rintangan², seperti sikap tegas Pemerintah Pusat serta Angkatan Perangnja jang tidak menjetudjui pengchianatan mereka, perlawanan massa Komunis, Nasionalis dan massa Islam patriotik di Sumatera sendiri, perlawanan dari alat² negara sipil jang setia pada sumpah mereka dan perlawanan kaum militer jang setia pada Sapta Marga. Mereka djuga tertumbuk pada kontradiksi² jang ada didalam tubuh mereka sendiri jang disebabkan oleh perbedaan² politik, kepentingan ekonomi, agama, suku, dll.

Djadi, bagi kaum reaksioner sekarang masih terbuka satu kemungkinan, jaitu perebutan kekuasaan lokal, tetapi kemungkinan ini bukanlah jang mudah didjadikan kenjataan. Dari sini djelaslah.

dimposmanali@yahoo.com

bahwa situasi politik dalamnegeri, sekarang adalah djauh lebih menguntungkan Rakjat daripada situasi sebelum Konsepsi Presiden Sukarno diumumkan.

Dalam membawa situasi berkembang kearah jang lebih menguntungkan perdjuangan Rakjat dan dalam menggiring kaum reaksioner dan kaum imperialis kepodjok atas dasar perbuatan² mereka jang memusuhi Rakjat Indonesia, adalah sangat besar rol harian² revolusioner.

Harian revolusioner dan progresif seperti HR menempati tempat jang chusus dalam menunaikan tugas jang mulia ini. Pada waktu sekarang, HR tidak berdiri sendiri seperti beberapa tahun jang lalu dalam menjebarkan dan membela politik revolusioner.

Bersamaan dengan meningkatnja perdjuangan revolusioner Rakjat, meningkat pulalah djumlah harian² revolusioner. Jang tadinja harian agak kanan, sesuai dengan perkembangan situasi, mendjadi koran jang agak kiri, dan jang tadinja ragu² sekarang mendjadi koran jang tegas dalam menempuh djalan revolusioner.

Kesedaran politik Rakjat meningkat dengan tjepat. Hal ini nampak djuga dari kenjataan bahwa koran² kepalabatu mengalami kemerosotan jang deras dan kehilangan banjak simpati umum, sedangkan koran² revolusioner dan progresif laku sebagai pisang-goreng dan prestisenja makin menaik.

HR jang merupakan sendjata ditangan Rakjat dan Partai Komunis Indonesia mengambil bagian penting dalam ikut mengembangkan situasi ini. Jang mendjadi soal sekarang jalah, apakah keadaan HR sekarang sudah sesuai dengan situasi baru jang ikut ditjiptakan oleh HR sendiri? Bagaimana penjesuaian HR dibidang redaksi, tipografi, distribusi dll. berhubung dengan perkembangan tjepat ini?

Situasi baru menuntut aparat² revolusioner jang diperbaharui, agar aparat² ini dapat memenuhi tugas² barunja dalam memimpin perkembangan. Seluruh aparat perdjuangan revolusioner, termasuk segala matjam organisasi perdjuangannja, dan termasuk djuga harian²nja, harus menjesuaikan diri dengan perkembangan madju jang tjepat ini. Ja, malahan tiap² kader revolusioner harus menindjau diri dan bertanja, apakah dirinja sudah sesuai dengan perkembangan situasi jang tjepat ini? Taraf baru perdjuangan anti-

kolonialisme sekarang tidak mungkin dilajani dengan baik, tidak mungkin dipimpin dengan baik, djika aparat tetap tidak mengalami perubahan, djika manusia² pelaksananja tidak mempertinggi kemampuan dan ketjakapannja.

Soal pimpinan kolektif, soal penempatan kader pada tempat jang lebih efektif, soal pembagian pekerdjaan jang lebih rasionil, soal perbaikan dalam sistim organisasi, soal pengertian teori revolusioner dan soal kedjernihan ideologi para kader adalah hal² jang harus diperhatikan dalam penjesuaian semua aparat perdjuangan revolusioner Rakjat dengan perkembangan situasi jang berlangsung tjepat. Pimpinan HR dan semua pekerdja HR harus memperhatikan semuanja ini, agar HR tetap mendjadi sendjata ampuh ditangan Rakjat dan Partai, agar HR tetap berdiri dibarisan paling depan dalam melawan tekanan² ideologis dari musuh² Rakjat dan dalam mempertinggi taraf ideologis dari kaum Komunis dan Rakjat.

Pendidikan ideologi bagi para redaktur, koresponden dan semua pekerdja HR harus lebih diperhebat dan dilakukan terus-menerus. Tugas melawan tekanan ideologis dari musuh² Rakjat dan tugas mempertinggi taraf ideologis kaum Komunis dan massa Rakjat tidak mungkin dipenuhi, djika HR tidak mempunjai staf redaksi dan barisan koresponden jang ideologinja terus-menerus digembleng.

HR bukanlah organ jang dapat dipisahkan dari perdjuangan Rakjat dan Partai Komunis Indonesia. HR lahir didalam perdjuangan heroik Rakjat Indonesia dan penerus jang sedjati dari koran progresif jang militan seperti „Njala", organ Partai Komunis Indonesia dalam tahun 1925. HR adalah satu dan tak terpisahkan dari perdjuangan Rakjat dan PKI. Djalan jang paling tepat bagi HR untuk mengabdikan diri kepada Rakjat terletak dalam kesetiaannja berpegang dan berpedoman pada politik Partai Komunis Indonesia. Ketjintaan jang hangat kepada Rakjat pekerdja dan kepada Partai Komunis Indonesia adalah sjarat pertama bagi semua pekerdja HR, mulai dari para redaktur, koresponden, zetter, pekerdja teknik, sampai kepada para agen dan loper. Ketjintaan jang hangat ini pasti akan dibalas kembali oleh Rakjat pekerdja dan kaum Komunis Indonesia dengan ketjintaan hangat pula kepada HR dan semua pekerdjanja.

Dalam pesan ulangtahun ke-V, jang djuga saja ulangi dalam

pesan ulangtahun ke-VI, antara lain saja katakan, bahwa *„tidak boleh ada konferensi Partai dari tingkat paling atas sampai paling bawah jang tidak membitjarakan HR"*. Harapan ini pada umumnja sudah dipenuhi. Dan ini tidak hanja penting artinja untuk perkembangan HR, tetapi djuga besar artinja bagi perkembangan Partai sendiri. Dengan demikian sudah tidak diragukan lagi, bahwa soal HR sekarang sudah mendjadi soal seluruh Partai.

Lebih djauh lagi, soal HR seharusnja bukan hanja soal seluruh Partai, tetapi harus mendjadi soal massa Rakjat pekerdja. Dalam pesan ulangtahun ke-VI antara lain saja katakan, bahwa *„kritik² dari orang² bukan Komunis tidak kurang pentingnja daripada kritik² pembatja Komunis"*. Ini kita pegang teguh. Seminar HR, jang diadakan di Djakarta, Semarang, Medan, Surabaja, Djokjakarta dan tempat² lain dalam rangka memperingati ulangtahun ke-VII HR, jang ditudjukan untuk memperbaiki HR guna memperbesar sumbangannja kepada perdjuangan Rakjat, adalah bukti bahwa soal HR adalah benar² mendjadi soal massa. Ini sekali lagi menundjukkan kesungguhan HR memperhatikan kepentingan massa, menundjukkan bahwa HR tidak mempunjai kepentingan lain ketjuali kepentingan massa.

Dalam ulangtahun ke-VI HR antara lain saja katakan, bahwa *„Harus disedari benar², bahwa soal rol HR banjak tergantung pada oplahnja"*. Oplah ketjil membikin rol HR ketjil, oplah besar membikin rol HR besar. Hanja dengan oplah jang besar HR dapat melaksanakan tugas menjelamatkan massa dari ratjun² koran reaksioner. Djadi, kelirulah fikiran sementara kawan² jang mengira bahwa soal distribusi HR adalah soal ketjil atau hanja soal untuk mendapat uang belaka.

Soal distribusi HR adalah soal ideologi, soal menjebarkan ideologi proletar dan melawan ideologi kaum burdjuis dan tuantanah. Besarnja djumlah HR jang disebarkan berarti luasnja penjebaran ideologi proletar, dan ini hanja mungkin djika aparat distribusi HR baik.

Djadi, djuga aparat distribusi HR harus disesuaikan dengan perkembangan situasi jang tjepat, disesuaikan dengan taraf baru dari perdjuangan anti-kolonialisme kita.

Saja jakin, bahwa dengan pimpinan dan bantuan Partai Komunis Indonesia dari semua tingkat organisasi, HR akan dapat menjesuaikan diri dengan perkembangan situasi jang tjepat dan akan mampu ikut memberikan sumbangan² jang penting dalam memimpin perkembangan situasi lebih madju.

Saja mengutjapkan selamat kepada semua pekerdja HR, mulai dari para redaktur, koresponden, pegawai administrasi, karikaturis, zetter, pekerdja teknik sampai kepada para agen dan loper HR. Saja mengharap sukses² baru bagi semua kawan dan saudara² ini.

Djundjunglah tinggi kepertjajaan dan kehormatan jang diberikan oleh Rakjat pekerdja dan PKI kepada HR untuk mengambil bagian penting dalam melaksanakan tugas² urgen PKI, jaitu penggalangan front persatuan nasional jang luas dan pembangunan Partai Komunis Indonesia.

Ambillah bagian jang se-besar²nja dalam melaksanakan tugas² politik dalam tahun 1958, tugas² dalam rangka perdjuangan pembebasan Irian Barat, jaitu menggulung komplotan² subversif dan mengusir kekuasaan ekonomi Belanda dari bumi Indonesia.

Berdjuanglah terus dibarisan depan untuk kemerdekaan nasional jang penuh, untuk peluasan hak² demokratis dan untuk perdamaian di Asia dan didunia!

Kibarkan tinggi pandji² solidaritet Asia-Afrika, solidaritet Rakjat² tertindas diseluruh dunia, dan kibarkan tinggi pandji² internasionalisme proletar!

Hidup Harian Rakjat!

Tulisan ini adalah keterangan pers Kawan D.N. Aidit mengenai sikap PKI terhadap proklamasi „PRRI" jang dilakukan pada tgl. 15 Februari 1958 di Padang oleh kaum pemberontak Sjafrudin-Husein cs.

PERLU TINDAKAN TEGAS UNTUK MENTJEGAH KORBAN RAKJAT JANG BANJAK

Berhubung dengan pertanjaan² jang ditudjukan kepada Comite Central PKI dan kepada saja sendiri mengenai sikap PKI terhadap proklamasi daripada apa jang dinamakan „Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia" oleh kaum pemberontak Sjafrudin-Husein cs., dengan ini saja djelaskan, bahwa perbuatan chianat ini adalah puntjak dari pengchianatan jang waktu² belakangan sudah biasa dilakukan oleh kaum reaksioner dalamnegeri dengan bantuan kaum imperialis asing.

Tindakan chianat kaum pemberontak ini tidak hanja sangat melemahkan Republik Indonesia kedalam, tetapi djuga mendjatuhkan martabat Republik Indonesia diluarnegeri. Dan daerah jang dikuasai oleh kaum pemberontak, sudah dan akan digunakan oleh kekuatan luarnegeri sebagai basis untuk mengobrak-abrik Republik Indonesia. Djadi, dari perbuatan pemberontak Sjafrudin-Husein cs. bukan hanja sebagian dari wilajah Republik Indonesia terantjam, tetapi seluruh wilajah Republik Indonesia berada dalam bahaja serangan musuh jang kongkrit.

Tindakan mereka jang tidak tahu malu supaja semua kedutaan dan konsulat Republik Indonesia diluarnegeri berhubungan dengan „pemerintah" pemberontak, dan supaja semua saldo uang Republik Indonesia diluarnegeri dibekukan, dan tindakan mereka melutjuti peleton AURI dilapangterbang Tabing, adalah bukti bahwa tindakan merusak mereka sudah tidak mengenal batas.

Dalam situasi seperti sekarang tidak ada djalan lain bagi tiap² Republiken 17 Agustus 1945 ketjuali bersikap dan bertindak jang tegas menjelamatkan Republik Proklamasi. Untuk menghindari korban jang lebih banjak dari Rakjat jang tidak bersalah, maka ketjuali tegas, tindakan djuga harus tjepat. Tindakan jang lambat dan ragu² bisa membikin keadaan berlarut-larut, memberi waktu kepada kaum pemberontak untuk mengkonsolidasi diri, membuka

kemungkinan kepada kekuatan asing untuk lebih banjak lagi memberi bantuan kepada kaum pemberontak, dan untuk menimbulkan perpetjahan dan kekatjauan didalamnegeri. Semuanja ini sangat menguntungkan kaum kolonialis Belanda jang sekarang sedang mentjari djalan untuk memukul Republik Indonesia.

Tindakan lambat dan ragu2 bisa mendjurus kearah perang saudara jang berlarut-larut dan memakan korban Rakjat jang banjak. Tindakan tegas dan tjepat memang memakan korban, tetapi jang mendjadi korban jalah kaum pengchianat, dan korban Rakjat bisa dibikin sangat minim.

Dalam situasi seperti sekarang, sikap ragu dan „netral" adalah menguntungkan dan membela kaum pemberontak, karena sikap demikian ini melemahkan sikap Pemerintah jang tepat dan tegas. Sikap ragu dan „netral" adalah menggerogoti kekuatan Pemerintah Pusat dan kekuatan revolusioner Rakjat, termasuk putera2 Minangkabau jang tjinta persatuan bangsa dan Republik Proklamasi 1945.

Terhadap penjokong2 pemberontak supaja diambil tindakan jang djuga tjepat dan tegas. Sebaliknja, semua kekuatan diseluruh negeri jang menjokong sikap Pemerintah Pusat, djadi termasuk kekuatan Rakjat di Sumatera Barat, harus lebih erat dipersatukan dan dimobilisasi untuk menghantjurkan kaum pemberontak.

Tidak ada djalan tengah dalam mengatasi mereka jang sudah memberontak dan mendirikan „pemerintah sentral" tersendiri. Tidak ada politik hidup berdampingan antara Republik Indonesia dengan „pemerintah revolusioner" Sjafrudin jang korup dan chianat.

Djakarta, 17 Februari 1958

Fase Baru Dan Penjesuaian Organisasi Dengan Situasi adalah laporan umum Kawan D.N. Aidit kepada Sidang Pleno ke-VI CC PKI jang dilangsungkan dari tgl. 31 Maret sampai 3 April 1958 di Djakarta. Laporan umum ini memberikan analisa terhadap fase baru perdjuangan anti-kolonialisme Rakjat Indonesia jang ditandai oleh meningkatnja situasi revolusioner dengan sangat tjepatnja berhubung dengan pelaksanaan penghantjuran pemberontakan „PRRI-Permesta", kelandjutan pengambilalihan perusahaan2 Belanda dalam rangka perdjuangan pembebasan Irian Barat dan penggulungan komplotan subversif Kuomintang.

Kawan Aidit menegaskan bahwa dalam fase baru ini pekerdjaan Partai jang terpenting adalah tetap membangkitkan, mengorganisasi dan memobilisasi massa sebagai sjarat kuatnja front persatuan nasional. Tetapi agar dapat ditjiptakan tulangpunggung pimpinan jang bulat, militan dan berdisiplin atas gerakan massa, haruslah organisasi Partai disemua tingkat dan tiap2 Komunis menjesuaikan diri dengan situasi. Ini pada hakekatnja berarti mempererat lebih landjut hubungan Partai dengan massa sebagai djaminan untuk dapatnja Partai mengatasi segala persoalan jang dihadapi massa.

FASE BARU DAN PENJESUAIAN ORGANISASI DENGAN SITUASI

Kawan²! Masa jang kita tindjau dalam Sidang Pleno CC ini adalah masa jang diisi oleh banjak kedjadian² penting, kedjadian² internasional dan kedjadian² dalamnegeri.

Sidang ke-VI CC ini kita langsungkan dalam situasi jang kritik, situasi jang bersifat menentukan bagi perkembangan politik selandjutnja ditanahair kita. Pembasmian kaum pemberontak di Sumatera Barat dan di Minahasa, jang berpusat di Padang dibawah pimpinan pengchianat² Husein-Sjafrudin dkk, djika berhasil dalam waktu jang tjepat akan sangat mendorong perkembangan lebih madju dari situasi revolusioner dinegeri kita. Djika pembasmian kaum pemberontak dapat dilakukan dalam waktu singkat, maka berartilah bahwa kaum reaksioner dan imperialis akan kehilangan basis mereka jang penting, dan tertjiptalah sjarat² jang lebih baik bagi Rakjat Indonesia untuk melaksanakan Konsepsi Presiden Sukarno 100% dan untuk menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja.

Tetapi sebaliknja, djika penjelesaian tidak dalam waktu jang singkat, keadaan kritik ini akan berachir dengan tambahnja penjakit kronis jang baru pada tubuh Republik Indonesia, jang dalam masapandjang baru dapat disembuhkan, sebagaimana sudah kita alami dengan gerombolan² DI-TII selama ini.

Kedjadian² jang mempunjai aspek² nasional dan internasional, disamping pemberontakan pengchianat² Husein-Sjafrudin-Sumitro dkk, jalah pengambilalihan perusahaan² kapitalis² besar Belanda oleh Republik Indonesia dalam rangka perdjuangan pembebasan Irian Barat dan pertjobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno pada tanggal 30 November malam tahun jang lalu. Mengingat sangat pentingnja peristiwa² ini, pada achir Desember tahun jang lalu telah dilangsungkan Sidang Politbiro jang diperluas dengan

anggota² CC jang bertempattinggal di Djakarta untuk membahas situasi politik ketika itu. Sidang ini telah mengeluarkan sebuah pernjataan politik jang penting jang dituangkan dalam bentuk *„Pesan Tahun Baru Politbiro CC"*.

Sidang Pleno Comite Central kita kali ini dilangsungkan ditengah² kemarahan Rakjat kepada pakt perang SEATO, kepada bandit² Kuomintang dan kaum imperialis Amerika Serikat jang oleh banjak bukti sudah ternjata aktif tjampurtangan dalam soal² dalamnegeri Indonesia dengan memberi bantuan sendjata kepada kaum pemberontak kontra-revolusioner Husein-Sjafrudin-Sumitro dkk. Demonstrasi dan rapat umum besar Rakjat di Djakarta pada tanggal 16 Maret dan demonstrasi mahasiswa tanggal 25 Maret baru² ini adalah manifestasi dari semangat baru Rakjat Indonesia dalam perdjuangan anti-imperialisme.

I

Situasi Politik Umum

Selama periode jang ditindjau, jaitu dari pertengahan tahun jang lalu sampai sekarang, nampak djelas kelandjutan proses dua djurusan dalam perkembangan situasi internasional, jaitu disatu fihak konsolidasi dan perluasan terus-menerus dari kubu sosialis, kemerdekaan dan perdamaian, dan difihak lain perpetjahan dan desintegrasi lebih landjut dari kubu imperialis, kolonialis dan peperangan. Keadaan objektif didunia dewasa ini memungkinkan landjutnja proses dua djurusan ini.

Politik perang jang agresif dari negara² Barat tak henti²nja mem-besar²kan perang dingin dan ketegangan² internasional jang sangat mengganggu keamanan dan ketentraman hidup umatmanusia dan sangat mengganggu perhubungan persahabatan dan kerdjasama jang konstruktif antara bangsa².

Jang mendjadi biangkeladi utama dari politik perang jang agresif adalah kaum monopolis jang menguasai industri² perang raksasa di Amerika dan Eropa. Untuk kepentingan keuntungannja, kaum monopolis dengan melalui pemerintah negara² imperialis jang dikuasainja, sekarang sedang mendjalankan politik perlombaan per-

sendjataan nuklir. Ini didjalankan disatu fihak dengan setjara menakut-nakuti dunia dengan „momok Komunis" dan difihak lain dengan terus berusaha mengesankan se-olah² Amerika Serikat tetap tidak kalah unggul dilapangan ilmu dan dilapangan persendjataan nuklir, sekalipun hal ini sudah dibantah oleh kenjataan.

Dengan dalih „bahaja Komunis" ini kaum monopolis Amerika Serikat melakukan diktatur imperialis atas seluruh dunia kapitalis, baik atas negara² imperialis lainnja di Eropa Barat, jaitu negara² sekutu AS sendiri, maupun atas negara² lainnja di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Tindjauan kita di-sidang² CC jang lalu sudah mendjelaskan, bahwa dalam keadaan demikian perlawanan dan pemberontakan terhadap diktatur kaum monopolis AS terus dilakukan di-mana². Hal ini mendjelaskan mengapa persekutuan² imperialis nampaknja sadja kuat tetapi sesungguhnja lemah dan labil.

Bukti jang menondjol dari hal ini adalah sidang puntjak Dewan NATO dalam bulan Desember 1957 di Paris. Kepentingan perang kaum monopolis AS, jang dalam NATO telah dapat berhasil memaksakan disetudjuinja penempatan peluru² terkendali di-negeri² anggota NATO di Eropa, ternjata tidak dapat menekan dan membendung hasrat damai dari Rakjat² Eropa dan kepentingan kelandjutan hidup negara² imperialis di Eropa sendiri dalam menghadapi diktatur imperialis AS, dengan menerima baik tawaran² damai dari Uni Sovjet. Maksud kaum monopolis untuk melalui Pemerintah AS mendjadikan benua Eropa suatu medan perang atom adalah bertentangan dengan kepentingan hidup dari Eropa sendiri.

Perlawanan² didalam kubu imperialis ini terutama dilakukan oleh imperialis Inggeris jang tidak ingin melepaskan dominasinja di-Eropa Barat. Perlawanan jang sedikit atau banjak berhasil dari Inggeris terhadap AS dan jang dilakukannja melalui diplomasi sendjata nuklir sesudah pertjobaan dipulau Christmas, ternjata dari komunike bersama Eisenhower-MacMillan pada tanggal 25 Oktober 1957. Dalam komunike ini, jang merupakan sematjam doktrin Eisenhower-MacMillan, dikemukakan suatu teori tentang saling tergantungnja negara² anggota NATO satu sama lain dibawah pimpinan kedua negara atom Inggeris dan Amerika. Doktrin jang berisi dominasi dua negara atom ini telah lebih memperuntjing ketegangan² jang memang sudah ada diantara negara² NATO;

terutama Perantjis sengit menentang doktrin ini.

Politik nuklir kaum monopolis berakibat sangat memberatkan ekonomi negeri dan kehidupan Rakjat pekerdja. Selama setengah tahun belakangan ini ekonomi AS kembali berada dalam suatu resesi, jaitu jang ketiga kalinja sesudah perang dan jang terburuk sampai kini, jang oleh pers Barat sendiri dikatakan sebagai menghadapi masa jang menguatirkan. Betapa artinja resesi kali ini bagi massa Rakjat Amerika dapat kita lihat dari angka² resmi mengenai pengangguran sbb.: Dalam bulan Oktober 1957 pengangguran berdjumlah 2,55 djuta atau 3,7% dari seluruh tenagakerdja jang djumlahnja 68,2 djuta. Dalam bulan Djanuari 1958 mendjadi 4 djuta atau 6%, dan pada achir Februari 1958 mendjadi 5,18 djuta atau 7,4%. Ini berarti angka pengangguran naik dengan 100% dalam waktu 4 bulan. Produksi nasional diperkirakan akan turun dengan 4 a 5 miljard dollar. Produksi badja jang sudah turun terus, pada achir Februari 1958 sudah merosot mendjadi 53% dari kapasitet. Politik agresif kaum monopolis telah merombak samasekali ekonomi AS mendjadi suatu ekonomi perang. Oleh karenanja, usaha untuk mengatasi resesi ekonomi jang sekarang sedang timbul, primer akan tergantung sekali dari ada atau tidaknja pengeluaran negara jang lebih besar lagi, terutama sekali untuk keperluan pembeajaan „pertahanan" AS, dan baru sekunder dari memperbesar kegiatan pengusaha² sivil. Keadaan ini berlainan sekali dengan ketika krisis besar tahun 1929-30, jang di AS dapat diatasi dengan memperbesar kegiatan pengusaha² sivil. Ini berarti bahwa resesi sekarang akan mendorong kaum monopolis AS untuk lebih agresif lagi dalam politik perangnja.

Jang penting mendapat perhatian Pemerintah dan Rakjat Indonesia adalah, bahwa djuga negeri kita dan seluruh dunia kapitalis sudah dan akan terkena oleh resesi ini. Akibatnja bagi negeri kita jalah penurunan jang tidak sedikit dalam perdagangan luarnegeri. Kesulitan ini akan paling terasa oleh negeri² jang masih terlalu banjak tergantung pada perdagangan dengan AS, termasuk Indonesia jang menurut Menteri Luarnegeri Dr. Subandrio 40% dari seluruh ekspornja ditudjukan kepada AS.

Akibat² resesi AS djuga harus diderita negeri² kapitalis lain, terutama di Eropa Barat. Di Djerman Barat pesanan² ekspor mero-

sot sehingga beberapa perusahaan badja sudah terpaksa mengurangi produksinja. Djepang jang sangat mudah terpengaruh oleh keadaan ekonomi di AS terpaksa mendjalankan politik membatasi impor. India sudah mengalami bertambah buruknja sjarat² perdagangan jang mengakibatkan kemerosotan harga hasil² India dipasar dunia. Djuga Republik² Amerika Latin mengalami kemerosotan dalam harga dan djumlah ekspor hasil² perkebunan dan pertambangan sebagai akibat dari resesi di AS. Mengingat bahwa menurut Menteri Luarnegeri Dr. Subandrio djuga 40% dari ekspor Indonesia ditudjukan kepada Eropa Barat, maka resesi tersebut akan sangat mempengaruhi keadaan ekonomi Indonesia.

Sebaliknja, Uni Sovjet dan negeri² kubu sosialis lainnja tidaklah mengenal resesi dan krisis ekonomi. Karena tidak mengenal resesi dan krisis ekonomi, perkembangan ekonomi di-negeri² sosialis adalah sangat tjepat. Di Uni Sovjet misalnja, seperti jang dikatakan oleh Kawan Chrusjtjov dalam pidatonja *„Empatpuluh Tahun Revolusi Sosialis Oktober Besar"* pada tanggal 6 November 1957, produksi industri Sovjet setjara kasar telah meningkat 33 kali dalam tahun 1957 djika dibanding dengan tahun 1913, sedangkan alat² produksi menurut perbandingan tersebut meningkat dengan 74 kali. Bagi Amerika, Inggeris dan Djerman dibutuhkan 80 tahun sampai 150 tahun untuk mentjapai kenaikan produksi industri setjara kasar sebanjak 30 kali. Uni Sovjet mentjapai 33 kali kenaikan kasar produksi industri hanja dalam waktu 20 dan 22 tahun, karena hampir 20 tahun dari 40 tahun kekuasaan Sovjet itu dipergunakan untuk peperangan² jang dipaksakan kepada Sovjet dan dipergunakan untuk melakukan pekerdjaan² pemulihan ekonomi dari akibat² peperangan. Berkat penemuan² dilapangan ilmu dan teknik, berkat pemakaian mesin dan berkat keadaan kerdja jang lebih baik, produktivitet kerdja di Uni Sovjet meningkat dengan tjepat. Djika dibanding dengan tahun 1913 produktivitet kerdja dalam industri² Sovjet telah meningkat setjara kasar 9,5 kali, sedangkan di Amerika Serikat produktivitet kerdja itu meningkat hanja 2,3 kali. Produktivitet kerdja di Uni Sovjet akan terus meningkat dengan makin meningkatnja ilmu dan teknologi. Tingginja tingkat ilmu dan teknik Sovjet djuga dibuktikan oleh kenjataan, bahwa Uni Sovjet adalah negeri jang per-tama² berhasil membikin a.l. bom H, stasiun kekuatan atom, peluru balistik dan sputnik.

Kemadjuan ilmu dan teknologi, dan dengan ini berarti djuga perkembangan ekonomi, tidak hanja terdapat di Uni Sovjet, tetapi djuga di-negeri² kubu² sosialis lainnja. Perkembangan ekonomi di-negeri² ini berarti kenaikan kemakmuran setjara ber-angsur² dan terus-menerus bagi Rakjatnja. Ini menjebabkan negeri² ini merupakan suatu pasaran dunia jang stabil dan kaja dan jang sekarang mampu menampung akibat² resesi jang diderita oleh dunia kapitalis. Ini berarti bahwa objektif, resesi AS sekarang akan mengakibatkan makin naiknja perdagangan antara Timur dan Barat, antara Uni Sovjet dan negeri² sosialis lainnja dengan negeri² dari dunia kapitalis. Baik kiranja apabila satu²nja alternatif internasional ini disadari betul² oleh Pemerintah dan pemuka² Rakjat Indonesia.

Pemerintah Indonesia akan bidjaksana dan berdjasa kepada Rakjat Indonesia, djika dalam menghadapi situasi ini tidak ragu² mengambil tindakan² njata dan aktif guna menjelamatkan Indonesia dari bahaja akibat resesi ini. Disamping mengubah hubungan dengan AS dan negara² jang didiktenja mendjadi hubungan dagang dan kerdjasama ekonomi jang saling menguntungkan serta tanpa ikatan politik maupun militer, Pemerintah Indonesia perlu menjelenggarakan hubungan dagang dan kerdjasama ekonomi dengan pasaran dunia sosialis serta menerima baik dan mempergunakan tawaran² bantuan ekonomi dan teknik dari negara² sosialis. Tindakan² ini akan membuka kemungkinan untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia jang sudah pajah sekarang dan sekaligus memungkinkan Indonesia untuk menghindarkan diri dari bahaja penanaman modal Amerika Serikat, Djerman Barat dan Djepang jang sudah ber-siap² untuk menggantikan kedudukan jang berkuasa dari modal Belanda jang sekarang sedang dilikwidasi oleh perdjuangan kemerdekaan Rakjat Indonesia. Adalah sangat naif dan merugikan Rakjat Indonesia politik menolak modal Belanda, tetapi menerima investasi modal Amerika, Djerman Barat, Djepang atau modal asing lainnja. Politik ini sama dengan mengusir matjan dari pintu muka, tetapi memasukkan singa dari pintu belakang. Politik ini adalah politik makelar² modal asing, jang mengedjar keuntungan pribadi atas kerugian Rakjat Indonesia. Hanjalah orang² pandir

jang tidak mau beladjar dari pengalaman jang pahit sekarang, jaitu bahwa fihak imperialis AS menjokong kaum pemberontak „PRRI" dan ber-siap² dengan tenteranja untuk menduduki bagian² dari Sumatera dengan alasan untuk menjelamatkan milik dan warganegaranja di Sumatera, sebagai akibat penanaman modal Amerika Serikat di Indonesia. Hanja manusia² keledai jang sesudah pengalaman pahit ini masih djuga mau menerima investasi modal asing di Indonesia.

Di-tengah² kampanje perang dingin dan hasutan „anti-komunis" jang terus-menerus dilakukan oleh kaum monopolis melalui pemerintah negara² imperialis jang dikuasainja, orang tak dapat menjangkal satu kenjataan internasional jang penting, jaitu bahwa Uni Sovjet tak henti²nja berusaha untuk menggagalkan komplotan² perang dan untuk menjelamatkan dunia dari bentjana perang nuklir jang mengantjam. Usul² dan inisiatif² damai jang tak ada henti²-nja diadjukan oleh Uni Sovjet seperti usul jang termaktub dalam surat Perdana Menteri URSS, Bulganin, tanggal 10 Desember 1957 kepada berbagai kepala pemerintah negara² besar, termasuk Presiden Eisenhower, tentang mengadakan setjepat mungkin Konferensi Tingkat Tertinggi (KTT) antara Timur dan Barat. Politik damai Uni Sovjet jang terus-menerus ditolak oleh AS makin lama makin mejakinkan dunia, bahwa kaum monopolis merupakan bahaja jang sesungguhnja jang mengantjam keselamatan dan keamanan hidup manusia. Usul² dan inisiatif² damai Uni Sovjet selalu menghalangi rentjana² agresif kaum monopolis. Putusan Uni Sovjet untuk menghentikan setjara unilateral pertjobaan² sendjata atom dan hidrogen merupakan sumbangan jang sangat besar bagi usaha meredakan ketegangan internasional.

Jang paling mendjadi perintang bagi komplotan perang kaum monopolis dalam situasi jang sudah demikian sulitnja bagi mereka adalah kemadjuan dan hasil² gemilang Sovjet dilapangan ilmu ruangangkasa seperti jang sudah didemonstrasikan oleh peluntjuran Sputnik I dan Sputnik II masing² pada tanggal 4 Oktober dan tanggal 5 November 1957, dan berhasilnja pembuatan peluru terkendali antar-benua oleh Uni Sovjet. Kedjadian bersedjarah ini, disamping ber-kali² kegagalan² peluntjuran roket² ruangangkasa oleh AS, sekaligus melenjapkan dongengan tentang keunggulan AS

dilapangan ilmu dan persendjataan nuklir. Hal ini disatu fihak tidak sedikit mengurangi ketaatan dan kepertjajaan sekutu²nja, dan difihak lain mempertinggi martabat Uni Sovjet dimata negeri² lain dan membuktikan keunggulan sistim sosialis. Dikalangan jang berkuasa di AS sendiri, hal ini menjebabkan timbulnja pertentangan² baru, disamping mengurangi kesombongan dan kese-wenang²an militer dari AS terhadap negeri² lain. Sekarang AS terpaksa harus djuga menjadari, bahwa dalam keadaan ada perang dunia, ia tidak bisa lagi hanja menjuruh bangsa² lain melakukan peperangan dan bunuh-membunuh, sedangkan AS bertindak sebagai leveransir sendjata, sebagaimana halnja diwaktu jang sudah², tetapi ia djuga harus memperhitungkan kemungkinan kehantjurannja sendiri karena serangan² balasan dari fihak lawannja.

Djawaban jang tidak langsung pada usul KTT Uni Sovjet jang diberikan oleh Eisenhower dalam „Pesan Tahun Barunja" adalah permulaan dari rentetan usaha untuk menggagalkan terwudjudnja usul KTT tersebut. Dalam „Pesan Tahun Barunja" Eisenhower menjatakan bahwa dari djumlah anggaran belandja Djuli 1958 — Djuli 1959, sebesar 74.000 djuta dollar (jang terbesar jang pernah dikeluarkan sebagai anggaran belandja AS dimasa damai), tidak kurang dari 67% akan dipergunakan untuk keperluan militer. Dari jang 67% ini, sebanjak 39.779 djuta dollar akan digunakan untuk keperluan² militer langsung (918 djuta dollar lebih banjak dari tahun jl.), katanja untuk menghadapi „bahaja jang makin besar dari Rusia dalam abad permulaan perebutan ruangangkasa".

Radja² sendjata Amerika jang sesungguhnja menguasai pemerintah Eisenhower sangat berkepentingan untuk menghidupkan terus perang dingin dan djika dapat mentjetuskan perang-panas, teristimewa pada saat sekarang dimana ekonomi Amerika sedang mengalami kemunduran. Dalam keadaan dimana Rakjat diseluruh dunia, termasuk Rakjat Amerika sendiri, mendesak agar suasana saling mengerti antara negara² didunia kembali dipulihkan, maka usul Uni Sovjet jang sesuai dengan tjita² Rakjat sedunia itu sangat mereka takuti. Perasaan takut ini lahir dalam bentuk djawaban resmi Presiden Eisenhower kepada surat P.M. Bulganin jang menolak usul Uni Sovjet dengan mengadjukan usul² lain jang sama-sekali tidak mengenai hakekat dari usaha meredakan ketegang-

an internasional, jaitu supaja Uni Sovjet dan AS menghapuskan hak veto dalam PBB, hak mana merupakan sendi jang utama dari badan internasional ini. Tanpa hak veto, badan internasional ini berhenti mendjadi badan internasional, karena sepenuhnja akan dikuasai oleh satu atau beberapa negara besar jang dapat mengumpulkan suara paling banjak dalam PBB. Dalam suratnja jang lain Eisenhower menulis bahwa „AS menolak tawaran Uni Sovjet mengenai suatu daerah jang bebas dari sendjata² nuklir dibenua Eropa".

Sikap kepalabatu pemerintah Eisenhower seperti diatas telah menimbulkan kegusaran serta tentangan jang hebat, tidak sadja dari mereka jang memang selalu berusaha untuk mentjapai perdamaian, tetapi djuga dari negara² jang tadinja menolak setiap usul damai jang datang dari fihak Uni Sovjet.

Kegusaran serta tentangan² jang paling keras terdapat di Inggeris, dimana Rakjat hidup dalam ketakutan jang terus-menerus karena kapalterbang² AS sering terbang membawa bom² atom diatas wilajah negeri Inggeris dan berpangkalan di Inggeris. Dari Sir Robert Boothy, anggota Parlemen Inggeris dari Partai Konservatif sampai ke Bevan, pemimpin oposisi, semuanja mendesak supaja pemerintah Inggeris mempeladjari usul Uni Sovjet dengan sungguh² dan supaja diterima.

Di Perantjis, bekas P.M. Edgar Faure menambahkan suaranja pada suara ber-djuta² Rakjat Perantjis jang menghendaki diadakannja KTT.

Simpati Rakjat sedunia jang makin besar terhadap usul Uni Sovjet serta desakan jang kuat dari fihak negara² sekutunja sendiri memaksa pemerintah Eisenhower mengubah pendiriannja. Djika tadinja AS mentah² menolak usul Uni Sovjet, sekarang AS „dalam prinsip" setudju asal KTT itu didahului oleh konferensi tingkat Menteri Luarnegeri. Siapa sadja jang mengenal Menlu AS, jang tidak lain daripada Foster Dulles, biangkeladi politik perang serta musuh utama dari usaha meredakan ketegangan internasional, tentulah akan mengerti bahwa konferensi Menlu² diusulkan hanja untuk menggagalkan diadakannja KTT.

Desakan² achir² ini mendjadi demikian hebatnja sehingga P.M. Inggeris, MacMillan, pun terpaksa mengakui bahwa tidaklah perlu

KTT ini didahului oleh sebuah Konferensi tingkat Menlu.

Sekalipun demikian belakangan ini Uni Sovjet telah menundjukkan kemauan baiknja, menundjukkan ke-sungguh²an jang dalam untuk menghindarkan djalan buntu dalam usaha meredakan ketegangan internasional, dengan menjetudjui usul agar diadakan konferensi tingkat Menlu, asal konferensi ini tidak menjimpang dari tudjuan mengadakan KTT dan karenanja harus hanja membitjarakan komposisi, atjara KTT, tempat dan waktu KTT.

Disaat dimana perlombaan sendjata nuklir sudah mentjapai tingkat jang tinggi, maka diadakannja KTT akan berarti tertjiptanja suasana anti-persendjataan nuklir jang bisa menudju ketertjapainja penghentian perlombaan sendjata.

Persoalan KTT bagi Rakjat Indonesia bukan merupakan persoalan jang djauh dari persoalan jang harus dihadapi Indonesia sekarang, sebagaimana fikiran sementara orang. Kepentingan Indonesia langsung tersangkut, teristimewa pada saat SEATO sekarang mau mendjadikan negeri² Asia sebagai pangkalan² bagi roket² dan sendjata nuklirnja.

Salahsatu atjara terpenting jang diusulkan untuk dibitjarakan oleh KTT jalah persetudjuan tidak saling menjerang antara negara² pakt NATO dan negara² persetudjuan Warsawa. Tidak sukar untuk dimengerti bahwa andaikata persetudjuan saling tak menjerang ini dapat diwudjudkan, maka NATO, dan sebagai konsekwensinja djuga Persetudjuan Warsawa, tidak mempunjai hak hidup lagi. Dan apa jang berlaku untuk NATO akan berlaku pulalah untuk semua pakt² militer jang dibangun model NATO seperti Pakt Bagdad, SEATO dll. Dengan demikian KTT dapat memberi sumbangan jang besar dalam merintis djalan penghapusan segala matjam pakt militer. Segi ini kurang dimengerti oleh banjak orang dinegeri kita, negeri jang notabene langsung terantjam oleh subversif SEATO. KTT mempunjai 2 segi diantara segi²nja jang lain, jang penting untuk Indonesia. Jang *pertama* jalah bahwa keredaan ketegangan internasional setjara umum akan memungkinkan Indonesia untuk lebih baik melaksanakan politik luarnegerinja jang bebas dan aktif anti-kolonialisme dan untuk perdamaian. *Kedua*, dengan berhasilnja KTT dalam melikwidasi NATO dan Persetudjuan Warsawa akan merintis djalan untuk tertjapainja hal jang serupa dibagian

dunia kita ini, jaitu akan memungkinkan tertjapainja suatu perdjandjian kolektif di Asia sesuai dengan „Prinsip² Bandung", sehingga dengan demikian akan dapat mengachiri SEATO jang terkutuk itu. Adalah sesuai dengan kedudukan Indonesia sebagai salahsatu negeri pengambil inisiatif Konferensi Asia-Afrika di Bandung dan sesuai dengan perasaan Rakjat Indonesia, bahwa dalam Pernjataan Bersama dengan P.M. Siroky dari Tjekoslowakia dalam bulan Djanuari jl., P.M. Djuanda menjokong ide diadakannja KTT.

Kemadjuan² pesat Uni Sovjet seperti jang sudah diketahui oleh seluruh dunia merupakan suatu konsolidasi jang sangat kuat dari kedudukan dan politik internasional Uni Sovjet. Tanpa Uni Sovjet jang ternjata unggul ini, Amerika Serikat dapat mengadakan intervensi dinegeri lain sekehendak hatinja. Tapi untunglah, sekarang bukan zamannja lagi, seperti sudah terbukti dengan pengalaman Siria. Hal ini baiklah diperhatikan oleh Pemerintah dan Rakjat Indonesia jang sekarang sedang menghadapi bahaja intervensi AS.

Sesuai dengan perkembangan dunia pada umumnja, di Asia-Afrika tertjapai konsolidasi jang lebih riil dari kekuatan anti-perang dan anti-kolonial. Berdirinja negara² merdeka Ghana dan Malaja dan terbentuknja Kabinet baru di Laos, dimana Patet Lao turut serta dalam Pemerintahan sehingga memperkokoh persatuan nasional Laos, adalah merupakan langkah² madju dari perdjuangan pembebasan bangsa² di Asia dan Afrika.

Perkundjungan Presiden Sukarno ke India, Mesir, Siria, Jugoslavia dll. lebih memperkuat lagi konsolidasi kekuatan² positif anti-kolonial.

Negara² jang berpolitik bebas dalam arti kata tegas² menentang imperialisme mulai mengambil langkah² jang djelas dan tegas membela kepentingan nasionalnja dan melawan intervensi imperialis. Mereka bertindak bebas dari paksaan kemauan atau intimidasi imperialis. Mereka semakin sadar bahwa berdasarkan pengalaman mereka sendiri, kawan kuat jang paling tepertjaja dalam perdjuangan melawan kolonialisme dan dalam membangun ekonomi negerinja adalah Uni Sovjet dan negeri² kubu sosialis. Dalam politik internasional hal ini merupakan suatu faktor jang amat penting dan jang sangat menguntungkan perdamaian dan kemerdekaan.

Semuanja ini membuktikan makin rontoknja sendjata hasutan imperialis tentang „momok Komunis" dan tentang superioritet teknik Barat.

Dalam keadaan internasional seperti demikian, adalah wadjar sekali timbulnja perpetjahan jang makin tadjam dikalangan jang berkuasa didunia kapitalis. Menteri Luarnegeri Amerika Serikat, John Foster Dulles, sekarang sudah makin mendjadi sasaran utama dari ketjaman² dan kebentjian umum di Amerika dan Eropa. Badan NATO terpetjah antara golongan jang berkepalabatu jang hendak melantjarkan perang nuklir di Eropa dan golongan jang menganggap lebih untung menempuh djalan berunding dan hidup damai antara Timur dan Barat.

Di-tengah² perpetjahan dan desintegrasi lebih djauh dari kubu imperialis, dan sedjalan dengan konsolidasi lebih landjut dari kubu sosialis, kemerdekaan, demokrasi dan perdamaian, dilangsungkanlah dalam bulan November tahun jang lalu perajaan ulangtahun ke-40 dari Revolusi Sosialis Oktober di Moskow. Sebagaimana dikatakan oleh Kawan Chrusjtjov, perajaan ini telah berkembang mendjadi suatu demonstrasi internasional tentang djajanja ide² perdamaian dan Sosialisme.

Pada waktu berlangsungnja perajaan Revolusi Oktober tersebut, di Moskow diadakan pertemuan antara para wakil Partai² Komunis dan Partai² Buruh dari 12 negeri sosialis dan antara para wakil Partai² Komunis dan Partai² Buruh dari 64 negeri. Pertemuan pertama telah menerima baik sebuah dokumen bersedjarah, jaitu *Deklarasi*, sedangkan pertemuan kedua telah menerima dokumen jang tidak kalah pentingnja, jaitu *Manifes Perdamaian*. Dalam pertemuan jang mensahkan *Manifes Perdamaian* delegasi Partai kita ikut mengambil bagian menjumbangkan fikiran dan ikut menjatakan persetudjuannja. Kedua pertemuan ini mempunjai arti sedjarah, karena ia merupakan kemenangan ideologi dan politik jang besar bagi gerakan Komunis dan klas buruh sedunia, ia merupakan kemenangan bagi prinsip² internasionalisme proletar. Ia djuga telah merumuskan tugas² pokok kaum Komunis dalam perdjuangan untuk perdamaian, kemerdekaan, demokrasi dan Sosialisme dewasa ini. Dengan telah dilangsungkannja pertemuan² ini keadaan akan berdjalan lebih baik!

Dalam keadaan internasional seperti demikian adalah wadjar sekali tumbuhnja kepribadian bangsa² merdeka dari negara² netral di Asia-Afrika jang mendjalankan politik bebas dan aktif anti-kolonial dan anti-perang. Konferensi Solidaritet Rakjat Asia-Afrika (KSRAA) pada achir Desember tahun jang lalu di Kairo beserta putusan²nja jang tegas dan madju, adalah manifestasi jang amat penting dari pertumbuhan semangat Bandung jang semakin kuat, dari kekuatan anti-kolonial dan anti-perang di Asia-Afrika. Konferensi Wanita Asia-Afrika (KWAA) di Kolombo dalam bulan Februari tahun ini merupakan sumbangan dalam memperkuat solidaritet Rakjat² Asia-Afrika dan memperkuat perdamaian dunia.

Kuatir akan perkembangan lebih djauh dari gerakan pembebasan Rakjat² di Asia, Amerika Serikat mengadakan kampanje „anti-Komunis" setjara besar²an dan lebih meluaskan aktivitet subversifnja. Terutama perkembangan di Indonesia pada waktu² belakangan ini, jang memang ditandai oleh perkembangan tjepat gerakan pembebasan nasional dan oleh makin terisolasinja kekuatan kepalabatu jang mendjadi sandaran kaum imperialis, sangat mengkuatirkan negara² imperialis jang dipelopori oleh Amerika Serikat.

Dalam kekuatirannja terhadap perkembangan di Indonesia, negara-negara imperialis sudah tidak segan², baik dalam utjapan maupun dalam perbuatan, mengadakan intervensi jang kurangadjar dalam urusan dalamnegeri Indonesia. Mereka memberikan sokongan moril jang tidak terbatas dan menjelundupkan perlengkapan² militer kepada kaum pemberontak Husein-Sjafrudin-Sumitro dkk. Mereka mendalangi perbuatan² teror dan sabotase² ekonomi jang terdjadi diberbagai tempat di Indonesia. Intimidasi² jang kasar dilakukan oleh negara² imperialis dengan mengadakan latihan² angkatan perang SEATO setjara besar²an, dimana djuga diikutsertakan Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat dan Armada Angkatan Laut Inggeris jang berpangkalan di Singapura. Dalam rangka kekuatiran ini djuga, dari tanggal 11 sampai 13 Maret telah dilangsungkan sidang Dewan Tertinggi SEATO di Manila dengan dihadiri oleh wakil² 8 negara SEATO, jaitu Amerika Serikat, Inggeris, Perantjis, Australia, Pakistan, Muangthai, Filipina dan Selandia-Baru. Dalam pertemuan ini Amerika Serikat dan negara² Barat anggota SEATO lainnja berusaha untuk membikin mesin peperangan baru, jaitu penggabungan persekutuan² perang NATO, Pakt Bagdad dan SEATO. Mereka mau mendjadikan negeri² Asia anggota SEATO sebagai tempat memperluas djaringan pangkalan militernja dan sebagai pangkalan roket dan nuklir, sebagaimana halnja sudah terdjadi dengan Korea Selatan dan Taiwan. Soal Indonesia mendapat perhatian chusus mereka, dan jang terpenting bagi mereka jalah bagaimana mendjatuhkan sebuah pemerintah jang sah di Indonesia dan menggantikannja dengan pemerintah jang disokong kaum pemberontak.

Perbuatan² djahat jang melanggar kedaulatan negara² lain ini dan jang akan menumpaskan djutaan djiwa orang² Asia, mereka lakukan dengan dalih „untuk membendung bahaja Komunisme". Dan dalih ini pulalah jang dipakai oleh kakitangan mereka, terutama pemimpin² Masjumi-PSI dan pemberontak Husein-Sjafrudin-Sumitro dkk. untuk menjerang Presiden Sukarno, mendjatuhkan kabinet Djuanda dan menentang demokrasi jang sedang tumbuh di Indonesia. Dalam hubungan dengan perbuatan² djahat ini djuga, perlu mendapat perhatian sepenuhnja, bahwa kaum imperialis Amerika menggunakan bandit² Kuomintang sebagai salahsatu mesin intervensinja atas Indonesia, dan bahwa achir² ini AS sudah memberi bantuan sendjata kepada pemberontak² kontra-revolusioner di Sumatera Barat dan di Sulawesi Utara.

Tetapi sekarang sudah tidak mungkin lagi untuk menaklukkan Rakjat Indonesia dan Rakjat² Asia-Afrika jang sudah bangun dan sadar. Pada waktu sekarang sudah tidak mungkin terdjadi satu tindakan intervensi atau agresi jang tidak mendapat perlawanan setimpal. Rakjat Indonesia dan Rakjat² di-tiap² negeri Asia-Afrika tidak berdiri sendiri. Asia-Afrika merupakan satu kekuatan kemerdekaan dan perdamaian jang besar. Dalam soal kemerdekaan dan perdamaian Asia-Afrika jang militan ini mendapat bantuan dan pembelaan sepenuhnja dari kubu sosialis, dimana RRT adalah peserta jang besar dan kuat, dan jang dipelopori oleh Uni Sovjet jang keunggulannja tidak ada lagi orang jang menjangsikannja. Kekuatan imperialisme sudah diudji di Korea, Vietnam, Mesir, Siria dll., maka ternjata bahwa kekuatan ini adalah terbatas.

Tiap² intervensi bersendjata terhadap negeri Asia-Afrika pada dewasa ini akan mendjadi soal dunia. Dan djika sudah mendjadi

soal dunia, Asia mesti menang dan agresor² mesti lari lintang-pukang dengan luka² parah. Inilah kejakinan tiap² patriot Asia-Afrika sekarang. Kejakinan inilah jang mendjiwai pedjuang² pembebasan bangsa² Asia-Afrika dan jang membikin kaum agresor berfikir pandjang sebelum berbuat.

Dalam keadaan internasional seperti demikian, imperialis Belanda berada dalam kedudukan jang amat sulit dan lemah didalam menghadapi ketegasan politik dan tindakan jang tepat dan patriotik dari Rakjat dan Pemerintah Indonesia sekarang. Ini djelas dibuktikan oleh satu kenjataan bahwasanja Pemerintah Belanda sampai sekarang tidak mengeluarkan protes atau tindakan jang berarti terhadap tindakan² Indonesia.

Sebaliknja, seperti halnja dengan AS dan Inggeris, djuga di Nederland timbul perpetjahan² dan pertentangan² jang makin tadjam didalam kalangan jang berkuasa, sehingga mulai membahajakan kedudukan dan kelangsungan hidup Kabinet Drees jang berkepalabatu.

Demikianlah situasi internasional dewasa ini. Sungguh pitjik dan berbahaja anggapan dan sikap sementara orang di Indonesia jang dalam situasi perdjuangan sengit seperti sekarang, disatu fihak tidak menjadari kedudukan internasional jang kuat dari Indonesia serta mengetjilkan kekuatan dan kesanggupan perdjuangan dari Rakjat Indonesia sendiri, dan difihak lain mem-besar²kan kekuatan dan kesanggupan imperialis Belanda jang kerdil, musuh pokok dari bangsa Indonesia sekarang ini. Padahal boleh dikatakan sudah pasti, bahwa dalam keadaan internasional dan dalamnegeri Indonesia sekarang, kaum imperialis Belanda, tanpa bantuan bersendjata Amerika Serikat, tidak akan berani menjerang Indonesia. Dan djika AS memberi bantuan bersendjata kepada Belanda untuk melakukan agresinja, maka persoalannja akan mendjadi persoalan dunia, dan AS akan kehilangan se-gala²nja di Indonesia, karena dalam keadaan demikian, tidak bisa tidak Rakjat Indonesia djuga harus bertindak terhadap kepentingan² ekonomi Amerika di Indonesia.

Kaum Komunis Indonesia menjambut baik sikap dan politik luarnegeri Pemerintah Djuanda jang menundjukkan kesungguhan dalam melawan intervensi dan subversi imperialis dan jang menundjukkan inisiatif² jang bebas dan patriotik dalam mempertahankan

kedaulatan negara dan dalam menjempurnakan kemerdekaan nasional Indonesia, chususnja dalam perdjuangan membebaskan Irian Barat.

Adalah mendjadi tugas Partai kita untuk menjokong kebidjaksanaan politik luarnegeri dari Pemerintah Djuanda dan selandjutnja untuk terus mendorong madju politik luarnegerinja agar dalam teori dan praktek sungguh² aktif untuk perdamaian dan bebas dari pengaruh dan kepentingan asing.

Dalam hubungan dengan menjempurnakan kebidjaksanaan politik luarnegeri Indonesia, adalah kewadjiban kaum Komunis dan kewadjiban semua orang Indonesia jang berkemauan baik terhadap Rakjat Indonesia dan perdamaian dunia, untuk senantiasa waspada agar politik luarnegeri jang bebas dan aktif untuk perdamaian didjalankan dengan sungguh², njata dan djudjur. Bersahabat dan berhubungan setjara normal dengan negara² sosialis hanja sesudah mengalami kegagalan dengan Barat, bukanlah pelaksanaan jang sungguh², njata dan djudjur dari politik luarnegeri Indonesia jang sudah digariskan oleh Revolusi Agustus 1945. Tradisi politik luarnegeri Indonesia bukanlah berorientasi ke Barat, tetapi ke Timur. Dalam masa² Revolusi 1945-1948 adalah negara² Asia-Afrika dan negara² sosialis jang kuat menjokong Republik Indonesia, sedangkan hubungan diplomatik Indonesia jang pertama tingkat duta adalah dengan Tjekoslowakia. Ketjenderungan berat-sebelah ke Barat agak kuat dikalangan sementara pembesar² Indonesia.

Rakjat Indonesia sangat membutuhkan pelaksanaan jang sungguh², njata dan djudjur dari politik luarnegeri Indonesia, karena jakin bahwa berbagai aspek persoalan dalamnegeri Indonesia, seperti misalnja soal pembangunan ekonomi dan kemadjuan ilmiah, hanja mungkin dapat ditjapai djika ada ke-sungguh²an dan kedjudjuran dalam mendjalankan politik luarnegeri jang bebas dan aktif anti-kolonialisme dan untuk perdamaian.

*

Dalam menindjau perkembangan politik didalam negeri, Sidang Pleno ke-V CC pada pertengahan tahun jang lalu menekankan tentang pentingnja arti pendemokrasian sistim pemerintahan dinegeri

kita, jang ditandai oleh pembentukan Parlemen baru, Dewan Konstituante dan Dewan² Legislatif dan Exekutif di-daerah², serta tentang meningkatnja semangat anti-kolonialisme. *„Kuatir akan meluasnja kemadjuan demokratis dan terus naiknja semangat anti-kolonialisme dan semangat patriotisme, maka kaum reaksioner jang dipelopori oleh Hatta, pemimpin² Masjumi klik Natsir dan pemimpin² PSI berusaha untuk membendung semua kemadjuan ini"*, demikian antara lain kita simpulkan dalam sidang tersebut. Perkembangan situasi sesudah Sidang Pleno CC tersebut sepenuhnja sesuai dengan kesimpulan kita ini.

Pendemokrasian sistim pemerintahan makin didjalankan dibawah Kabinet Djuanda dengan sudah dilangsungkannja pemilihan² DPRD² tingkat I dan II di Djawa dan dibeberapa Provinsi diluar Djawa. Kesedaran massa Rakjat makin meningkat. Disemua Provinsi dan Kabupaten jang sudah melakukan pemilihan DPRD, PKI mendapat tambahan suara, dan umumnja tambahan suara jang tidak ketjil. Analisa tentang hasil pemilihan DPRD di Djakarta, jang menundjukkan bahwa Rakjat Indonesia sedang bergeser kekiri, memberi inspirasi kepada kaum Komunis dan Rakjat pekerdja jang paling sedar diseluruh negeri untuk memenangkan Partai Komunis Indonesia dalam pemilihan DPRD diluar Djakarta.

Pekerdjaan Parlemen dalam masa jang ditindjau, dimana Fraksi Partai mengambil bagian jang penting, mendapat kemadjuan² dengan disahkannja Undang² jang agak madju seperti: (1) Persetudjuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 mengenai upah jang sama bagi buruh laki² dan wanita untuk pekerdjaan jang sama nilainja, (2) Undang² Penghapusan tanah² partikelir, (3) Undang² Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia, (4) Undang² Keadaan Bahaja, (5) Undang² tentang persetudjuan Perdjandjian Dwikewarganegaraan dengan RRT dan (6) Undang² Perubahan Canon dan Cijns, dengan mana penghasilan Negara bertambah dengan Rp. 80 djuta setiap tahun dan tambahan penghasilan Negara ini diambil dari modal besar jang umumnja asing. Parlemen djuga telah meratifikasi Pindjaman R.I. dari URSS sebesar US $ 100 djuta dan meratifikasi Persetudjuan Perdjandjian Perdamaian dan Persetudjuan Pampasan antara R.I. dan Djepang. Selain daripada itu Parlemen dengan suara bulat mengutuk kekedjaman kaum kolonialis Perantjis dan menuntut supaja gadis pahlawan Aldjazair, Djamila, dibebaskan dari hukuman mati. (1) Dengan disetudjuinja mosi Abulhajat jang menjetudjui kebidjaksanaan Pemerintah Djuanda mengenai perdjuangan pembebasan Irian Barat, maka makin terpentjil kedudukan Masjumi-PSI jang tidak menjetudjui mosi ini. Fraksi PKI dalam Parlemen sudah menjiapkan sebuah rantjangan Undang² Perkawinan jang demokratis, jang akan sangat berguna pada waktu membitjarakan Undang² tersebut dalam Parlemen. Dalam Konstituante fikiran² sehat mulai mentjapai kemenangan² untuk mengambil keputusan² jang memperkuat Republik Indonesia dan untuk memperbaiki tjarakerdja Dewan jang penting ini.

Hasil pemilihan DPRD² diseluruh Djawa dan dibeberapa provinsi diluar Djawa telah membawa perbaikan² pada komposisi DPRD² dan DPD². Pemilihan Kepala² Daerah oleh DPRD² telah memungkinkan orang² jang dipertjajai oleh Rakjat, djadi djuga orang² Komunis, terpilih sebagai Kepala Daerah menggantikan Gubernur², Bupati² dan Walikota² jang ditundjuk oleh aparat² birokrasi dari atas. Di Djawa, tidak sedikit orang Komunis atau orang² jang disokong oleh Komunis terpilih mendjadi Kepala Daerah tingkat II. Pendemokrasian sistim pemerintahan ini merupakan langkah penting dalam mengurangi kekuasaan birokrasi sebagai peninggalan zaman kolonial jang oleh kaum reaksioner masih mau dipertahankan terus.

Kemenangan PKI di Kabupaten kepulauan Riau dengan kenaikan suara 66% dibanding dengan pemilihan untuk Parlemen, dan kemenangan PKI di Provinsi Sumatera Selatan dengan kenaikan 26%, djuga dibanding dengan pemilihan untuk Parlemen, adalah djawaban kepada kaum reaksi jang suka mengatakan bahwa PKI adalah „Partai Djawa". Apalagi kalau diingat, bahwa pemilihan DPRD di Sumatera Selatan ini dilangsungkan dalam keadaan dimana pemimpin² PKI di-kedjar² dan kampanje pemilihan oleh PKI sangat dibatasi. Kemenangan² PKI di Kalimantan Selatan dan Timur lebih menegaskan lagi, bahwa bukan hanja di Djawa, tetapi diseluruh Indonesia PKI mendapat kepertjajaan lebih besar dari Rakjat dan bahwa Rakjat Indonesia sedang bergeser kekiri.

Perdjuangan untuk melaksanakan Undang² No. 1 tahun 1957,

jaitu undang² jang mengatur pendemokrasian sistim pemerintahan daerah, mengalami berbagai rintangan dari kekuatan² reaksioner jang masih bertjokol dalam pemerintahan daerah dan terutama dalam Kementerian Dalamnegeri. Dengan dalih mementingkan „keahlian" mereka mempertahankan institut pamongpradja jang birokratis dan sudah bangkrut itu, dan dengan berbuat demikian mereka mentjoba membendung arus demokrasi. Tetapi kekuatan demokratis tidak akan berhenti ditengah djalan. Dengan tanpa bermaksud membikin pengangguran dikalangan pamongpradja, kekuatan demokratis akan terus madju agar institut pamongpradja dilikwidasi dan Undang² No. 1 tahun 1957 dengan konsekwen dan sepenuhnja didjalankan, agar demokrasi dapat berkembang diseluruh negeri. Bekas² pamongpradja jang masih mau bekerdja semuanja dapat ditampung didalam pemerintah daerah, apalagi djika kepada pemerintahan daerah sudah diberikan wewenang sepenuhnja.

Kekuatiran terhadap perkembangan demokrasi dari kaum reaksioner, dan sampai batas² tertentu djuga kekuatiran golongan tengah, nampak dari penolakan mereka, walaupun tidak berani terang²an, terhadap tuntutan jang makin keras dari massa supaja tjepat dibentuk pemerintah daerah tingkat III, sebagai basis dari organisasi pemerintahan. Mereka kuatir bahwa djika ini dilaksanakan akan „terlalu banjak demokrasi" djatuh ketangan Rakjat. Keberatan² mereka ini diselimuti dengan alasan „karena sukar mengubah adat² desa jang kolot dalam waktu singkat" dan „karena pembiajaan terlalu besar", padahal selama ratusan tahun bukan tidak ada basis organisasi pemerintahan, jaitu pemerintahan² desa jang feodal dan birokratis, jang biajanja dipikul oleh desa sendiri. Dengan membentuk pemerintahan daerah tingkat III berdasarkan penggabungan beberapa desa, jang kuranglebih meliputi satu ketjamatan, maka biajanjapun sebagian besar akan bisa dipikul oleh desa² sendiri. Bahwa Pemerintah Daerah Tingkat III bisa dibentuk dan berdjalan sudah sedjak beberapa lama dibuktikan di Provinsi Sumatera Selatan jang dengan Peraturan Daerah telah menggabungkan marga² mendjadi „Negeri" dan jang telah memilih DPR Negeri dan Kepala Negeri setjara langsung serta mengatur anggaran belandjanja sendiri.

Musuh² Rakjat sangat kuatir bahwa dengan kemadjuan demokrasi ini mereka akan kehilangan kans buat se-lama²nja untuk menguasai pemerintahan sentral. Mereka kehilangan perspektif, tidak pertjaja lagi pada sistim parlementer, dan menggantungkan harapan mereka pada tjara² extra-parlementer, tjara² fasis.

Oleh karena itu, disamping masih duduk dalam Parlemen, kaum reaksioner menitikberatkan kegiatan² mereka diluar Parlemen, mereka menjiapkan pemberontakan² kontra-revolusioner dengan djalan mengintensifkan pengatjauan lewat dewan² partikelir seperti „Dewan Banteng", „Dewan Garuda" dan „Dewan Permesta", dimana sementara orang² militer dipakai sebagai kekuatan pokok mereka. Bersamaan dengan itu mereka mengintensifkan organisasi² teror dan mendiktekan tindakan² se-wenang² seperti penangkapan² dan penjiksaan² terhadap orang² Komunis dan orang² demokratis lainnja. Sabotase² dilapangan ekonomi dan keuangan dengan melakukan barter-liar serta penjelundupan² mereka pergiat. Dengan semua ini mereka berharap akan dapat dengan mudah menekan Pemerintah Pusat dan Presiden Sukarno supaja tunduk pada keinginan mereka, dan djika tidak berhasil maka mereka sudah mempunjai uang dan sendjata untuk memberontak.

Sebagai hasil pekerdjaan teror mereka pada tanggal 4 Djuli 1957 malam terdjadilah pelemparan granat kegedung CC PKI dan kegedung Dewan Daerah SOBSI Djakarta. Berhubung dengan pelemparan granat didua tempat ini, Pleno Comite Central PKI, jang kebetulan sedang bersidang pada hari² itu, mengeluarkan sebuah resolusi dimana antara lain dinjatakan, bahwa ledakan granat digedung CC PKI merupakan tjanang bagi semua demokrat dan patriot untuk lebih waspada, lebih militan dan lebih bersatu. Tidak berapa lama kemudian, terdjadi lagi penggranatan dibeberapa tempat, antara lain dikantor sebuah suratkabar dan rumah perwira TNI. Djuga Gedung CC PKI kemudian digranat untuk keduakalinja. Dalam menggulung komplotan teroris jang beraksi ini tertangkaplah antara lain Letnan Kolonel Nasuhi, seorang jang ada hubungannja dengan Masjumi dan DI-TII, dan kemudian ternjata bahwa ia adalah djuga kakitangan teroris dan pemberontak Zulkifli Lubis.

Sikap mereka jang anti-demokrasi djuga nampak dari serangan²

mereka jang tidak kenal ampun dan dengan kata² jang kotor terhadap Pantja Sila, jang sedjak Republik Indonesia berdiri sudah ditjantumkan dalam Mukaddimah Undang² Dasar Sementara, jang tadinja ikut mereka propagandakan kebaikannja karena salahsatu azasnja jalah „Ketuhanan jang Maha Esa". Pantja Sila ini kemudian mereka serang karena salahsatu azasnja jang lain, jaitu „Kedaulatan Rakjat" ternjata mendjadi perintang jang besar bagi kegiatan politik mereka. Mereka tahu, bahwa dengan adanja azas Kedaulatan Rakjat berarti tidak ada alasan bagi mereka untuk menuntut supaja PKI dan organisasi² revolusioner lainnja dinjatakan diluar Undang². Dan mereka tahu pula, bahwa massa luas mulai mempersoalkan kedudukan legal Masjumi-PSI, berhubung dengan banjaknja tokoh² partai² ini ikutserta dalam perbuatan² jang bertentangan dengan undang², seperti misalnja kerdjasama tokoh² partai² ini dengan DI-TII, dengan perwira² jang sudah tersangkut dalam gerakan perebutan kekuasaan setjara kekerasan dan dalam pertjobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno, dan belakangan ini berhubung duduknja tokoh² partai² ini didalam apa jang dinamakan „Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia" jang dikepalai oleh Sjafrudin (Masjumi).

Karena Pemerintah² jang lalu, termasuk Pemerintah jang dipimpin oleh Hatta dan jang dikuasai oleh Masjumi-PSI tidak mendemokrasikan Pemerintah² Daerah, membiarkan birokrasi dan korupsi meradjalela, maka bukanlah pekerdjaan jang sukar bagi kaum oposisi reaksioner untuk menunggangi ketidak-puasan Rakjat buat maksud² djahat mereka dengan berdemagogi tentang „pembangunan daerah", „dwitunggal" dan sebagainja. Mereka berdemagogi tentang „pembangunan daerah", padahal mereka menguras kekajaan Rakjat di-daerah² dan uang negara untuk kantong perseorangan dan untuk fonds pemberontakan mereka. Mereka berdemagogi tentang „dwitunggal Sukarno-Hatta", padahal mereka dan Hatta sendiri menentang konsepsi Presiden Sukarno jang bertudjuan mempersatukan seluruh Rakjat, sedangkan Presiden Sukarno sendiri tetap mempertahankan konsepsi persatuan ini. Dengan demikian mereka dengan sengadja, untuk kepentingan politik separatis dan subversif, mempertegang hubungan daerah² jang mereka kuasai dengan Pemerintah Pusat, dan berusaha untuk menarik daerah² lain supaja djuga

menentang Pemerintah Pusat.

Untuk menormalisasi keadaan Republik, sesuai dengan program kabinet Djuanda dan atas nasehat Dewan Nasional berlangsunglah dari tanggal 10 sampai 16 September 1957 Musjawarah Nasional (Munas) di Djakarta dibawah pimpinan Perdana Menteri Djuanda. Berdasarkan pendirian jang sudah kita setudjui dalam Sidang Pleno ke-V CC, supaja dimana mungkin ketegangan² antara daerah² tertentu dengan Pemerintah Pusat diselesaikan dengan djalan berunding, karena mengingat bahwa diantara mereka jang tidak puas terhadap Pemerintah Pusat termasuk djuga orang² jang setjara tidak sedar terseret oleh demagogi kaum separatis dan subversif, maka kita menjetudjui dilangsungkannja Munas.

Tetapi maksud baik dari Pemerintah Djuanda mengadakan Munas ternjata disalahgunakan oleh kaum reaksioner separatis dan subversif. Utusan² reaksi datang ke Munas bukan untuk bermusjawarah buat mentjari djalan keluar agar dapat menormalisasi keadaan Republik, tetapi mereka datang dengan rentjana agar Munas memutuskan melarang PKI, mengganti Dewan Nasional dengan Pre-Senat, membubarkan Kabinet Karya, mengganti pimpinan Angkatan Darat dan rentjana² reaksioner mereka gagal.

Demagogi mereka tentang „dwitunggal Sukarno-Hatta" didalam Munas berhasil dengan mendjerat batang leher mereka sendiri, dengan ditandatanganinja Pernjataan Bersama Sukarno-Hatta atas desakan Munas. Pernjataan Sukarno-Hatta antara lain berbunji *„bahwa sesungguhnja Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hakmilik seluruh Rakjat Indonesia", „bahwa Pantja Sila ..... adalah djaminan hakiki bagi seluruh Rakjat Indonesia untuk tetap berkehidupan bebas dan merdeka, adil dan makmur"*, dan bahwa Sukarno-Hatta berkewadjiban *„untuk tetap turut serta dengan seluruh Rakjat Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia serta segenap alat kekuasaan Negara, membina dan membela dasar² Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus dalam keadaan apapun djuga"*.

Negara kesatuan seperti jang disebut dalam pernjataan ini sudah terang bertentangan dengan politik separatis dan barter liar mereka. Pernjataan Sukarno-Hatta bahwa Republik Indonesia „adalah hakmilik seluruh Rakjat Indonesia", dan pernjataan „bahwa Pantja Sila ..... adalah djaminan hakiki bagi seluruh Rakjat Indonesia

untuk berkehidupan bebas dan merdeka, adil dan makmur", sepenuhnja bertentangan dengan kampanje mereka untuk melarang Partai Komunis Indonesia. Dan pernjataan bahwa Sukarno-Hatta berkewadjiban „turut serta dengan ..... Pemerintah Republik Indonesia ..... membina dan membela dasar² Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam keadaan apapun", adalah bertentangan dengan politik mereka jang merong-rong Pemerintah Djuanda, dan jang belakangan ini memproklamasikan apa jang dinamakan „Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia". Dan ..... Hatta berdiri difihak pemberontak jang terang²an meng-indjak² Pernjataan Bersama Sukarno-Hatta serta putusan² lain dari Munas.

Munas jang tadinja mereka harapkan dapat didjadikan saluran untuk memukul PKI, memukul Kabinet Djuanda dan memukul Sukarno, berachir dengan pukulan ber-tubi² pada politik reaksioner mereka, berachir dengan kekalahan total mereka. Kalau ada jang dapat dinamakan hasil bagi mereka jalah pembentukan „Panitia 7", jang komposisinja sangat labil sehingga mungkin digunakan oleh kaum teroris dan pemberontak kontra-revolusioner untuk memaksakan keinginan² mereka. „Panitia 7" mereka desakkan dengan maksud untuk mengadakan „musjawarah", jang sebetulnja tidak lain daripada musjawarah dengan perwira² teroris dan pemberontak, seperti Zulkifli Lubis, Nasuhi, Simbolon, Ahmad Husein, Sumual dll. Tudjuan maksimal mereka dengan „Panitia 7" jang memberi amnesti kepada semua perwira teroris dan pemberontak ini dan mengganti pimpinan Angkatan Perang dengan mereka.

Sebagai tantangan terhadap demagogi kaum separatis dan kaum subversif mengenai „pembangunan daerah", sesuai dengan program Kabinet Djuanda dan atas nasehat Dewan Nasional, dilangsungkan Musjawarah Nasional Pembangunan (Munap) di Djakarta dari tanggal 25 November sampai 4 Desember tahun jl. Partai kita menjetudjui diadakan Musjawarah ini, karena dengan ini kita melihat kemungkinan untuk menggugah pemimpin² Rakjat dan terutama kaum Komunis supaja lebih banjak perhatiannja ditudjukan kepada soal² ekonomi negeri, sebagai sjarat jang tidak boleh tidak untuk memetjahkan berbagai persoalan jang pelik jang dihadapi oleh negeri kita sekarang.

Partai kita dan organisasi² massa revolusioner diwakili didalam

Munap ini. Kita datang ke Musjawarah ini dengan konsepsi jang djelas. Dengan tegas kita kemukakan dalam Munap, bahwa pembangunan jang sungguh² tidak mungkin kita lakukan, selama rintangan² strategis belum dilenjapkan, jaitu imperialisme dan feodalisme. Walaupun demikian kita bersedia bermusjawarah untuk mentjari djalan buat mengatasi berbagai kesukaran ekonomi jang urgen, untuk merehabilitasi kerusakan² sumber² ekonomi sebagai akibat perangdunia dan perang² kolonial jang lampau, dan dalam batas² kemungkinan jang ada mengadakan pembangunan sumber² ekonomi jang baru. Selama Musjawarah, kita dipimpin oleh dua fikiran pokok, jaitu (1) membendung liberalisme jang masih dianut berbagai fihak didalam menjusun konsep pembangunan ekonomi, dan (2) menetapkan dasar² jang positif dan riil untuk pembangunan dengan menekankan kepada realisasi pembatalan KMB dan menggrowoti kekuasaan kapitalis² besar asing pada umumnja.

Munap dilangsungkan dalam suasana semangat anti-kolonialisme jang menaik berhubung dengan sedang dibitjarakannja soal Irian Barat didalam PBB. Rakjat Indonesia dan Kabinet Djuanda sudah berkebulatan tekad, bahwa djika soal Irian Barat gagal di PBB, maka Pemerintah akan „menempuh djalan lain", djalan diluar PBB. Dalam suasana jang demikian ini, dengan tidak tahu malu kaum reaksioner dengan melewati Gubernur Aflus (Masjumi) dari Kalimantan Barat, mengadjukan sebuah resolusi jang isinja supaja Musjawarah menuntut djatuhnja Kabinet Djuanda dan digantikan dengan Kabinet Hatta. Resolusi reaksioner ini ditolak oleh Musjawarah, dianggap sangat tidak simpatik karena ditudjukan untuk mendjatuhkan Kabinet jang menjelenggarakan Munap dan jang sedang sengit melawan kolonialisme Belanda dalam hubungan dengan perdjuangan Irian Barat.

Suasana anti-kolonialisme jang memenuhi ruangan Musjawarah telah sangat membantu diterimanja fikiran² jang madju didalam Munap. Rentjana kaum reaksioner supaja dengan bulat² menjetudjui penanaman modal asing dapat ditjegah, sehingga jang diterima jalah perusahaan tjampuran antara kapital Indonesia dan kapital asing. Tetapi putusan ini djuga masih membahajakan perkembangan ekonomi nasional Indonesia, karena, bagi kaum kapitalis besar asing tidaklah sukar untuk mendapatkan komprador Indonesia jang

dapat dipindjam namanja. Selain daripada itu putusan² jang penting dari Munap antara lain jalah:

Menjetudjui pembentukan Dewan Perantjang Nasional dengan komposisi dimana golongan fungsionil ikut didalamnja; Menetapkan sektor² ekonomi jang dikuasai Pemerintah sebagai dasar pembangunan selandjutnja; Pemerintah perlu menguasai persediaan barang² kebutuhan Rakjat jang pokok dan mengadakan distribusi barang² tersebut, terutama beras kepada pegawai² negeri, alat-alat negara dan kaum buruh disektor produksi, sebagai salahsatu bentuk pengendalian harga; Menjetudjui rentjana selfsupporting beras dan bahan makanan lainnja; Menjetudjui sepenuhnja Konsepsi Munas Pelajaran di Tugu dimana didalamnja sudah termasuk usul² kaum buruh untuk mengatasi kesulitan pelajaran sekarang; Perluasan perdagangan internasional dengan tidak memandang negeri Barat atau negeri Timur; Ekspor barang² penting, seperti karet, dikuasai Pemerintah sebagai salahsatu usaha untuk mengatasi kesulitan² akibat BE (BE umumnja ditolak, tetapi karena alasan „kesulitan teknis dalam penampungan" tidak diadakan perumusan penghapusan BE); Impor barang mewah supaja dihentikan dan politik-impor disesuaikan dengan rentjana produksi dan pembangunan kongkrit didalamnegeri (djadi, misalnja, tidak melaksanakan impor bebas model Dr. Sumitro jang tidak sesuai dengan rentjana pembangunan dalamnegeri); Pembeajaan pembangunan tidak dititikberatkan atas investasi modal asing, tetapi atas dasar penggalian kekajaan alam, sedang investasi tjampuran dengan asing dengan sjarat² berat buat modal asing, dengan mengeluarkan obligasi dan pindjaman wadjib; Kredit² atas dasar perhitungan bedrijfsekonomis dan tidak se-mata² bank-teknis; Koordinasi perlu diadakan dalam merentjanakan dan melaksanakan pembangunan daerah dalam kesatuan ekonomi Republik Indonesia; Usaha menambah djam kerdja mendjadi 8 djam sehari dapat digagalkan dan sjarat² djaminan sosial, perbaikan alat² produksi dan mentjiptakan kegembiraan bekerdja mendjadi dasar produktivitet kerdja. Pembentukan Dewan Buruh di-perusahaan² belum diterima, tetapi dapat diterima adanja musjawarah antara pimpinan perusahaan dan golongan buruh.

Disamping putusan² penting ini, jang sesuai dengan usul kita

mengenai politik perekonomian dan program pembangunan urgen, terdapat pula banjak putusan² lain jang umumnja bersifat penambahan dan perintjian jang tidak membawa akibat² jang akan merugikan.

Sangat diperlukan kewaspadaan dalam menghadapi tafsiran² jang keliru atau penjelewengan² dalam melaksanakan putusan², terutama tentang perusahaan² tjampuran dengan modal asing, soal warganegara asli dan tidak asli, soal mengatasi defisit Anggaran Belandja negara melalui apa jang dinamakan penghematan, mengenai pembeajaan plan pembangunan dengan mengadakan obligasi dan pindjaman atau simpanan wadjib.

Djadi, tidaklah pada tempatnja untuk terlalu puas dengan hasil² jang telah ditjapai dalam Munap. Kita masih harus tetap memegang inisiatif dalam mempersoalkan pelaksanaan putusan² jang madju dari Munap Pembangunan.

Dengan singkat, djuga didalam Munap Pembangunan kaum separatis dan subversif tidak berhasil memaksakan program politiknja dan program ekonominja jang reaksioner.

Kegagalan mereka memaksakan resolusi Aflus untuk mendjatuhkan Kabinet Djuanda dalam Munap Pembangunan, ditjoba oleh mereka untuk ditebus dengan membentuk sebuah Panitia jang dinamakan „Panitia 9" dalam Parlemen. Dalam fikiran mereka Panitia ini bertugas mentjarikan kedudukan jang berkuasa bagi Dr. Hatta, maksudnja sudah tentu kedudukan berkuasa jang sesuai dengan selera politik mereka. Maksud mereka tidak akan begitu kelihatan djika mereka tidak terang²an mengadakan monster-verbond untuk mengisolasi PKI, padahal PKI adalah salahsatu fraksi besar dalam Parlemen.

Dalam bulan November tahun jang lalu soal Irian Barat dibitjarakan untuk ke-empatkalinja dalam PBB. Mendjelang pembitjaraan soal Irian Barat di PBB, Rakjat diseluruh negeri diliputi oleh semangat anti-kolonialisme Belanda jang tinggi. Di-mana² diorganisasi rapat² umum dan demonstrasi² menuntut supaja Irian Barat dimasukkan kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia. Rakjat dan pemerintah sudah bertekad-bulat, bahwa djika pendirian Indonesia tidak diterima di PBB, maka „djalan lain" atau djalan revolusioner akan ditempuh, jang terutama berarti akan diam-

bilnja tindakan terhadap perusahaan² kapitalis² besar Belanda. Setelah ada kabar bahwa pendirian Indonesia tidak diterima oleh PBB, karena intrik² imperialis Belanda dan Amerika, pada tanggal 3 Desember tahun jang lalu kaum buruh mulai mengambilalih perusahaan² besar Belanda, dimulai dengan KPM, jaitu maskapai jang sudah hampir 70 tahun menguasai pelajaran di Indonesia. KPM jang diambilalih oleh kaum buruh kemudian setjara resmi diambilalih oleh Pemerintah. Dalam waktu jang tidak lama perusahaan² kapitalis² besar Belanda hampir semuanja dioper oleh kaum buruh dan fihak tentara dengan persetudjuan Pemerintah.

Di-tengah² kesibukan Musjawarah Nasional Pembangunan jang menolak resolusi Aflus, di-tengah² kesibukan pengambilalihan perusahaan² kapitalis² besar Belanda, sesudah selesai pembentukan „Panitia 9", dan djangan dilupakan sesudah ada usul² kongkrit dari sementara anggota „Panitia 7" untuk merehabilitasi Zulkifli Lubis-Simbolon cs jang ketika itu masih sebagai perwira, pada tanggal 30 November 1957 terdjadilah pertjobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno, terdjadilah apa jang sekarang terkenal dengan nama „teror Tjikini". Adalah kemenangan besar bagi Rakjat Indonesia, bahwa pembunuhan terhadap Presiden Sukarno ini gagal.

Seandainja „teror Tjikini" berhasil alangkah lengkapnja dan djitunja pelaksanaan rentjana mereka. Djika Presiden Sukarno meninggal karena „teror Tjikini", „Panitia 9" sudah siap untuk menempatkan Dr. Hatta pada tempat Presiden Sukarno, karena dalam keadaan jang demikian bukanlah suatu pekerdjaan jang sukar untuk mendapatkan dukungan majoritet dalam Parlemen dengan intimidasi² terhadap kaum tengah jang bimbang dan sedang panik. Disamping itu, „Panitia 7" sudah siap untuk merehabilitasi perwira² teroris dan subversif dan untuk mengganti pimpinan Angkatan Darat dengan perwira² teroris dan subversif ini. Semuania ini mereka lakukan dalam „suasana sedih jang tidak terhingga", karena Presiden Sukarno meninggal dunia. Pada lahirnja mereka akan kelihatan bersedih bukan kepalang, tetapi dalam hatinja mereka berpesta-ria. Airmata buaja akan membasahi bumi Indonesia. Bendera setengahtiang akan mereka perintahkan untuk dikibarkan berminggu² lamanja, sedangkan pidato² jang mengharukan akan me-

menuhi ruang angkasa, karena Presiden Sukarno meninggal dunia. Tetapi bersamaan dengan itu, apa jang mendjadi tudjuan pokok dari pembunuhan terhadap Presiden Sukarno pasti akan lekas² didjalankan. Presiden baru tentunja segera mengganti Kabinet Djuanda dengan kabinet „jang sesuai dengan tuntutan daerah", dan kaum Komunis, kaum Nasionalis revolusioner dan kaum ulama jang patriotik akan dirazzia dengan dalih jang mereka bikin² jaitu sebagai „pembunuh² Presiden Sukarno", sebagai „koruptor² jang menghabiskan uang Negara" dan sebagai „pensabot² pembangunan".

Tetapi ternjata sedjarah tidak bersama mereka. Pun seandainja berhasil membunuh Presiden Sukarno, Rakjat Indonesia pasti tidak akan membiarkan segala sesuatu berdjalan menurut kemauan mereka. Apalagi setelah rentjana djahat jang sudah diperhitungkan sangat teliti itu mengalami kegagalan.

Presiden Sukarno tidak meninggal karena „teror Tjikini". Kemarahan Rakjat meluap kepada kaum reaksioner. Perwira² jang tadinja mau direhabilitasi lewat „Panitia 7" ternjata adalah biang-keladi „teror Tjikini".

Prestise kaum reaksioner mendjadi sangat merosot. Sebaliknja prestise Presiden Sukarno dan semua kaum revolusioner dan demokrat, prestise Pemerintah dan pimpinan Angkatan Perang, prestise partai² revolusioner dan demokratis, menaik tinggi.

Dalam rangka tindakan alat² negara terhadap pelaku² „teror Tjikini", organisasi kaum subversif diobrak-abrik dan dalang² mereka jang belum tertangkap pada bertebaran ke-mana² untuk melandjutkan petualangan mereka dalam situasi jang djauh lebih sukar bagi mereka. Takut akan ditangkap, satu demi satu tokoh² Masjumi seperti Moh. Natsir, Burhanuddin Harahap, Sjafrudin Prawiranegara dll. meninggalkan Djakarta dan menudju kepusat persiapan pemberontakan, jaitu Padang. Dr. Sumitro dari PSI sudah lebih lama meninggalkan Djakarta karena takut ditangkap oleh alat² negara berhubung ia terlibat dalam perbuatan korupsi besar²an.

Perkembangan situasi sesudah kegagalan „teror Tjikini" mendjadi lebih memihak Rakjat dengan naiknja gelombang gerakan revolusioner untuk membebaskan Irian Barat dengan dilakukannja pengoperan² perusahaan² Belanda oleh kaum buruh, tentara dan

Pemerintah. Ini pelaksanaan politik „djalan lain" atau djalan revolusioner sebagai djawaban jang tepat dari Pemerintah dan Rakjat Indonesia kepada kaum kolonialis Belanda jang terus mau mendjadjah Irian Barat.

Kegagalan perbuatan chianat mereka dalam soal „teror Tjikini" dan sikap mereka jang menentang djalan revolusioner jang ditempuh oleh Kabinet Karya dalam perdjuangan untuk Irian Barat membikin kaum reaksioner mendjadi sangat diskredit. Partai² reaksioner Masjumi-PSI belum pernah mengalami kedjatuhan prestise seperti sesudah kegagalan „teror Tjikini". Massa anggotanja mendjadi gontjang, sebagian meninggalkan partai² reaksioner ini, sedangkan sebagian lagi menuntut penindjauan kembali politik atau menuntut penggantian pimpinan. Anggota² alat² negara jang patriotik makin terbuka matanja, dan tidak mempunjai illusi lagi terhadap dua partai kepalabatu ini.

Karena tidak berhasil dalam pekerdjaannja, maka pada tanggal 14 Maret jbl. „Panitia 9" telah dibubarkan oleh Parlemen setjara aklamasi. Sedangkan „Panitia 7" sudah tidak mempunjai dasar lagi untuk meneruskan pekerdjaannja, karena perwira² jang dimaksudkan mau diadjak berunding sudah dipetjat oleh Pemerintah berhubung dengan terlibatnja mereka dalam pemberontakan PRRI (Z. Lubis, A. Husein, D. Djambek, M. Simbolon, V. Sumual, J. Somba, Saleh Lahade dll.).

Djadi tjiri dari situasi sesudah kegagalan „teror Tjikini" dan sesudah Rakjat Indonesia menempuh djalan revolusioner dalam perdjuangan pembebasan Irian Barat jalah, bahwa kaum reaksioner sekarang bukan hanja tidak mampu merebut kekuasaan sentral setjara parlementer, tetapi djuga setjara extra-parlementer sudah tidak mungkin. Setjara parlementer tidak mungkin, selama partai² tengah tetap anti-kolonialisme dan menentang intervensi asing seperti sekarang. Setjara extra-parlementer djuga tidak mungkin, selama Angkatan Perang pada umumnja tetap patriotik dan melawan intervensi asing.

Satu²nja djalan bagi kaum reaksioner untuk merebut kekuasaan sentral pada waktu sekarang jalah dengan lebih dulu merebut kekuasaan lokal, dan mengkombinasikan kekuasaan lokal ini dengan pembunuhan² politik terhadap pemimpin² politik sentral jang mendapat kepertjajaan Rakjat. Djadi, walaupun „teror Tjikini" telah gagal, kaum kontra-revolusioner tidak akan menghentikan usaha² mereka untuk membunuh Presiden Sukarno seperti ternjata dari interviu M. Natsir, Ketua Umum Masjumi, kepada koresponden „De Volkskrant", dimana antara lain dikatakannja bahwa ia „Tidak akan kembali ke Djakarta sebelum Sukarno lenjap". Djuga hal ini ternjata dari usaha² kaum kontra-revolusioner untuk membunuh Presiden Sukarno ketika beliau bertetirah di Pakistan dan Djepang. Disamping usaha² membunuh pemimpin² Rakjat, kaum kontra-revolusioner djuga mengkombinasikan kekuasaan lokalnja dengan intimidasi², dengan intervensi² imperialis dan dengan sabotase² ekonomi. Ini adalah satu²nja djalan bagi mereka.

Apakah djalan satu²nja itu, jaitu djalan perebutan kekuasaan lokal, djalan jang mudah bagi mereka?

Untuk mendirikan dan mempertahankan „negara Sumatera" atau „pemerintah pusat" di Sumatera Barat mereka harus berhadapan dengan banjak rintangan², seperti dengan sikap tegas Pemerintah Pusat serta Angkatan Perangnja jang menentang pengchianatan mereka, perlawanan massa Komunis, Nasionalis dan massa Islam patriotik di Sumatera Barat sendiri, perlawanan dari alat² negara sivil, termasuk polisi dan mobrig, jang setia pada sumpah mereka, dan perlawanan anggota² Angkatan Perang jang setia pada sumpah pradjurit dan pada tjita² Revolusi Agustus 1945. Mereka djuga akan terbentur pada kontradiksi² jang ada didalam tubuh mereka sendiri jang disebabkan oleh perbedaan² politik, pembagian redjeki, agama, suku, dll.

Djadi, sesudah kegagalan „teror Tjikini" bagi kaum reaksioner masih terbuka satu kemungkinan, jaitu perebutan kekuasaan lokal, dengan tudjuan mendjatuhkan pemerintah sentral, tetapi kemungkinan ini tidaklah mudah untuk didjadikan kenjataan. Dari sini djelaslah, bahwa situasi politik dalamnegeri sesudah kegagalan „teror Tjikini" dan sesudah Rakjat dan Pemerintah Indonesia menempuh djalan revolusioner dalam perdjuangan Irian Barat adalah djauh lebih menguntungkan Rakjat daripada situasi sebelumnja.

Sebagai puntjak kegiatan² kaum separatis dan subversif, pada tanggal 10 Februari 1958, Ahmad Husein jang ketika itu masih Letnan Kolonel, mengeluarkan ultimatum, jang pada pokoknja

menuntut supaja Kabinet Djuanda bubar dalam waktu 5 × 24 djam. Sebelum ultimatum ini, Perdana Menteri Djuanda telah memberi keterangan dalam rapat pleno Parlemen, jaitu pada tanggal 3 Februari tentang kegiatan² disekitar pembentukan „negara Sumatera" dan pembentukan „Pemerintah Pusat Baru Republik Indonesia" jang kedudukannja di Sumatera. Dalam hubungan dengan ini P.M. Djuanda djuga menerangkan tentang adanja rapat rahasia di Sungai Dareh, kota ketjil diperbatasan antara Sumatera Barat dan Djambi, jang dihadiri oleh Z. Lubis, M. Simbolon, Dahlan Djambek, Ahmad Husein, Moh. Natsir (Masjumi), Sumitro Djojohadikusumo (PSI), dll.

Ultimatum jang keras dari Ahmad Husein tersebut sebenarnja menundjukkan kelemahan mereka, dan membuktikan bahwa mereka sudah tidak berdaja mendjatuhkan pemerintah setjara sentral dengan djalan parlementer dan extra-parlementer. Selain daripada itu bukanlah rahasia, bahwa kekuasaan komplotan Ahmad Husein makin hari makin keras mendapat tentangan dari massa Rakjat dalam bentuk perlawanan tertutup dan terbuka, dalam bentuk sabotase² dan demonstrasi². Diberbagai tempat di Sumatera Barat telah diadakan demonstrasi² menentang kekuasaan „Dewan Banteng" dari klik Ahmad Husein. Adalah sangat mengharukan bahwa demonstrasi² massa ini diikuti oleh banjak wanita, dan disementara tempat malahan dipelopori oleh wanita². Para wanita jang gagah-berani ini kemudian ditangkap oleh kenpetai² Ahmad Husein. Keteguhan hati dan keberanian wanita² Minangkabau ini telah mendjadikan mereka teladan bagi wanita Indonesia dan bagi Rakjat Indonesia umumnja, bagaimana seharusnja bersikap, bertindak dan berlawan terhadap kekuasaan fasis.

Ultimatum Ahmad Husein dikeluarkan sesudah dia mendapat djaminan dari fihak SEATO, bahwa akan segera ada pengakuan terhadap pemerintah jang akan diproklamasikan dan akan diberi bantuan² sendjata untuk melawan Pemerintah Pusat. Ahmad Husein dkk. tahu, bahwa sebagian besar perwira, bintara dan bawahan jang ada didalam resimennja tidak menjetudjui perbuatannja.

Djadi, djelaslah, bahwa tindakan nekad kaum kontra-revolusioner tidak terutama didasarkan pada kekuatan dalamnegeri jang memihak mereka, tetapi terutama pada bantuan² luarnegeri. Dari

sini sadja sangat djelas kelihatan watak dari gerakan Husein-Sjafrudin dkk.

Lima hari kemudian, ultimatum ini diikuti oleh pembentukan apa jang dinamakan „Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia" (PRRI) dengan dikepalai oleh Sjafrudin (Masjumi), dan dimana djuga duduk a.l. Burhanudin Harahap (Masjumi), M. Simbolon („Dewan Gadjah"), Dr. Sumitro (PSI), dan Saleh Lahade („Dewan Permesta").

Mereka menempuh djalan satu²nja jang masih terbuka bagi mereka, jaitu merebut kekuasaan setjara lokal, dengan beromongkosong se-olah² mereka adalah pemerintah pusat jang berwenang diseluruh Indonesia. Mereka mengangkat wakil² diluarnegeri, memerintahkan bank² diluarnegeri untuk membekukan devisen pemerintah Republik Indonesia, memerintahkan pada perusahaan² asing supaja membajar padjak pada mereka dan tidak pada Pemerintah Pusat, memerintahkan kedjaksaan² diseluruh Indonesia supaja membebaskan semua tahanan SOB ketjuali kaum Komunis, djadi supaja membebaskan orang DI-TII jang ditahan, dan tindakan² lain lagi.

Tindakan kaum pemberontak ini, disatu fihak disambut dengan kegembiraan jang besar oleh kaum imperialis Amerika, Belanda, Inggeris, dll. Kaum imperialis mengira bahwa tindakan kaum pemberontak akan dapat membendung arus gerakan kemerdekaan nasional jang sedang madju di Indonesia, akan menghantjurkan Republik Indonesia dengan didahului oleh djatuhnja kabinet Djuanda. Mereka mengira bahwa bagian terbesar dari Provinsi² diluar Djawa akan memihak pemberontak, sebagian dari Djawa se-kurang²nja bersikap „netral".

Difihak lain, tindakan kaum pemberontak memproklamasikan „pemerintah pusat" sendiri telah menimbulkan kemarahan jang sangat besar dikalangan Rakjat. Dengan pengchianatan tingkat tingginja ini Husein-Sjafrudin dkk. telah menelandjangi diri sendiri, sehingga orang² jang tadinja tidak mengerti atau ragu terhadap perbuatan² chianat mereka mendjadi terbuka matanja dan menentang mereka.

Persatuan dwitunggal, jaitu Rakjat dengan Tentara, dalam bentuk² Badan² Kerdjasama Pemuda-Militer, Buruh-Militer, Tani-Militer, Wanita-Militer dll., dan kemudian dalam bentuk „Front

Nasional Pembebasan Irian Barat" jang diketuai oleh KSAD, Djenderal Major A.H. Nasution, makin bertambah erat dan makin penting artinja. Perbuatan Husein-Sjafrudin dkk., disamping menguntungkan imperialis² Amerika, Inggeris dll., langsung membantu kaum kolonialis Belanda jang berada dalam sengketa dengan Republik Indonesia mengenai Irian Barat.

Perlu diingatkan, bahwa sebelum apa jang dinamakan „PRRI" diproklamasikan, jaitu ketika Presiden Sukarno akan berangkat tetirah keluarnegeri, Ketua Umum PSI Sutan Sjahrir menjiarkan kabar bohong dengan mengatakan bahwa selama Presiden Sukarno diluarnegeri PKI akan merebut kekuasaan. Dengan diproklamasikannja „PRRI" terbuktilah, bahwa utjapan Sjahrir ini se-mata² ditudjukan untuk menutupi maksud kaum kontra-revolusioner merebut kekuasaan setjara tidak sah.

Sikap Pemerintah Djuanda jang tegas menghadapi kaum pemberontak, jang dibenarkan dan disokong penuh oleh Presiden Sukarno, mendapat dukungan massa luas jang belum pernah didapat oleh pemerintah jang mana sadja sesudah kedaulatan Republik Indonesia diakui oleh dunia. Gerakan revolusioner dari kaum buruh, tani, pemuda, mahasiswa, wanita dan veteran mengalami perkembangan² baru, baik dilapangan organisasi, dalam kesedaran politik, maupun dalam militansi. Dari kalangan kaum intelektuil hanja sebagian ketjil jang bersikap pasif terhadap kaum pemberontak, sedang bagian jang terbesar mengutuk kaum kontra-revolusioner. Jang terang²an menjatakan berdiri difihak pemberontak kontra-revolusioner hanja beberapa gelintir orang.

Sikap Pemerintah Djuanda jang realis dan tegas, adalah bukti bahwa Pemerintah bukan hanja bisa berunding, tetapi djuga tahu batas dalam menempuh djalan berunding djika djalan ini ternjata disalahgunakan dan tidak diinginkan oleh fihak lain.

Ketegasan sikap Pemerintah jang didukung sepenuhnja oleh Angkatan Perang dan oleh gerakan massa Rakjat jang sangat luas serta tinggi semangat dan dajadjuangnja, dengan dibantu oleh situasi internasional sekarang jang sangat menguntungkan Indonesia, adalah djaminan bahwa kaum pemberontak dapat dibasmi dalam waktu jang tidak lama.

Hasil² gemilang dari operasi Angkatan Perang di Sumatera

Tengah pada pertengahan bulan Maret baru² ini adalah berkat ketegasan sikap Pemerintah, jang menimbulkan dajadjuang jang tinggi pada para pradjurit dan sambutan jang hangat dari massa Rakjat. Inilah pula sebabnja maka pemberontakan kontra-revolusioner dibawah pimpinan W.F. Nainggolan di Medan pada tanggal 16 Maret jl. dapat disapu bersih dan dihalau dari kota Medan pada tanggal 17 Maret.

Selama Pemerintah bersikap realis dan tegas, Pemerintah akan dapat menguasai keadaan, disintegrasi Republik akan dapat ditjegah, dan inilah sjarat utama untuk menutup pintu buat intervensi. Situasi politik dan militer di Atjeh, di Sumatera Selatan dan di Sulawesi Selatan harus terus-menerus diikuti dengan kewaspadaan dan dengan kesiap-sediaan untuk melikwidasi kaum pemberontak kontra-revolusioner djika sampai kedjadian seperti di Medan pada tanggal 16 Maret baru² ini. Perhatian chusus djuga harus ditudjukan pada usaha² kakitangan Zulkifli Lubis jang sedang dengan kuat berusaha untuk mengubah imbangan kekuatan dalam militer di Djawa Barat dan Djakarta, dengan maksud mentjiptakan sjarat² baru untuk perebutan kekuasaan sentral setjara langsung. Kegiatan² DI-TII di Djawa pada waktu² belakangan ini, baik jang berupa kegiatan bersendjata maupun kegiatan politik dan organisasi merupakan satu rentetan dengan kegiatan kaum pemberontak „PRRI" dan ditudjukan langsung kepada Pemerintah Pusat. Untuk mendjamin kedudukan Pemerintah Pusat semua kegiatan ini harus dihantjurkan.

Untuk lengkapnja, sikap jang realis dan tegas dari Pemerintah djuga harus ada dilapangan perekonomian, terutama jang mengenai beras dan kebutuhan hidup se-hari² lainnja dari Rakjat, karena musuh² Republik djuga giat menimbulkan kekatjauan dilapangan ini. Sabotase² dilapangan ekonomi dilakukan oleh orang² reaksioner dalamnegeri, jang terutama bekerdjasama dengan bandit² Kuomintang dan menggunakan alat² negara jang makan suap.

Dalam situasi seperti jang kita alami sekarang, untuk tetap mempertahankan Republik Indonesia jang mendjundjung azas² demokrasi, adalah kewadjiban Partai kita untuk dengan ulet, dengan kegiatan jang berlipatganda dan dengan menempuh seribu-satu djalan terus mengembangkan kekuatan progresif dan memper-

luas serta mengkonsolidasi persatuan nasional, mempertinggi dajadjuang dan kewaspadaan Rakjat diseluruh negeri.

II

Bukan Komunis Dan Anti-Komunis, Tetapi Demokrasi Dan Anti-Demokrasi, Nasional Dan Anti-Nasional

Dalam Sidang Pleno Ke-IV Comite Central pada pertengahan 1956 kita telah menganalisa kekuatan klas² dan telah menjimpulkan, bahwa dinegeri kita pada tingkat sedjarah sekarang ada tiga matjam kekuatan politik jang masing² mempunjai konsepsinja sendiri². Kekuatan kepalabatu, jaitu kaum komprador dan feodal, bertudjuan untuk membikin Indonesia mendjadi satu negara jang hanja bentuknja sadja merdeka, tetapi pada hakekatnja tunduk pada imperialisme, membela kepentingan² kapitalis² besar asing dan tuantanah². Kekuatan progresif, jaitu proletariat dan Rakjat pekerdja lainnja, bertudjuan untuk menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja. Kekuatan tengah, jaitu burdjuasi nasional, djuga bertudjuan untuk menjelesaikan tuntutan² Revolusi, tetapi dengan maksud agar terbuka kesempatan untuk perkembangan kapitalisme nasional.

Kekuatan progresif dan kekuatan tengah merupakan kekuatan nasional dan demokratis, anti-imperialisme dan anti-feodalisme, djadi merupakan kekuatan revolusioner. Sedangkan kekuatan kepalabatu adalah kekuatan anti-nasional dan anti-demokrasi, bersekutu dengan imperialisme dan feodalisme, djadi kekuatan reaksioner.

Garis politik Partai dalam menghadapi tiga kekuatan ini jalah, mengembangkan kekuatan progresif, bersatu dengan kekuatan tengah, dan mementjilkan kekuatan kepalabatu. Dengan garis politik ini Partai mengembangkan kekuatannja sendiri, mempersatukan kekuatan nasional dan demokratis, serta melawan kekuatan anti-nasional dan anti-demokrasi. Sedjak pertengahan tahun 1956 garis politik ini telah mendjiwai dan memimpin kegiatan² politik Partai kita. Hasilnja sekarang jalah, bahwa kekuatan progresif makin berkembang, persatuan nasional makin teguh dan kekuatan kepalabatu makin terpentjil.

Dalam hubungan dengan garis politik tersebut, Partai kita sudah berpengalaman, bahwa pelaksanaannja sangat tergantung pada luas atau sempitnja kemerdekaan politik jang dimiliki proletariat dan Rakjat pekerdja lainnja. Oleh karena itulah kita berkesimpulan bahwa adalah tugas umum Partai untuk *mempertahankan, mengkonsolidasi dan memperluas kemerdekaan politik atau demokrasi politik.*

Mengembangkan kekuatan progresif dan menggalang persatuan antara kekuatan progresif dan kekuatan tengah, atau menggalang front persatuan nasional atau front demokrasi, hanja dapat leluasa djika proletariat dan Rakjat pekerdja lainnja memiliki kemerdekaan politik, djika demokrasi politik dapat dipertahankan, dikonsolidasi dan diperluas. Ini berarti terbukanja kesempatan bagi Partai untuk melakukan propaganda dan agitasi, untuk mengadakan tjeramah² dan rapatumum² massa, untuk melakukan penjebaran² pamflet², brosur² dan buku², untuk membantu kaum buruh dan kaum tani, pemuda dan peladjar serta golongan² Rakjat lainnja dalam menuntut kepentingan² ekonomi, politik dan kulturil mereka, ini berarti bahwa kita mendapat keleluasaan untuk mengorganisasi dan mendidik proletariat serta Rakjat pekerdja lainnja, untuk menarik perhatian djutaan massa kepada tuntutan² Partai dan program Partai, kepada politik „melaksanakan Konsepsi Presiden Sukarno 100%", dan selandjutnja politik „menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja".

Djadi, perdjuangan disekitar kemerdekaan politik adalah perdjuangan terpenting dan tersengit antara tiga kekuatan diatas didalam masjarakat kita sekarang.

Kekuatan kepalabatu berusaha dengan sekuat tenaga supaja kemerdekaan politik bagi Rakjat pekerdja, terutama bagi proletariat dan PKI dihapuskan. Mereka berusaha supaja „demokrasi" hanja berlaku untuk mereka, sedangkan Rakjat pekerdja, terutama proletariat dan PKI, menurut mereka tidak sepantasnja diberi demokrasi. Inilah keterangannja mengapa mereka giat membentuk organisasi² anti-Komunis a.l. „Front Anti-Komunis" (FAK), „Gerakan Bersama Anti-Komunis" (GEBAK) dan „Lembaga Anti-Komunis Republik Indonesia" (LAKRI) jang menuntut supaja

PKI dan organisasi² massa jang progresif dilarang. Inilah keterangannja mengapa kaum reaksioner mengorganisasi Muktamar Alim Ulama di Palembang dalam bulan September tahun 1957, jang putusannja a.l. mengadjukan tuntutan jang sama dengan tuntutan FAK dan GEBAK. Dan inilah pula keterangannja mengapa orang² Komunis dan pemimpin² progresif lainnja ditangkapi, dimasukkan kedalam pendjara dan disiksa di-daerah² jang dikuasai oleh „Dewan Banteng", „Dewan Permesta" dan „Dewan Garuda", jaitu di Sumatera Barat, Minahasa dan Sumatera Selatan. Dibelakang perbuatan² fasis ini berdirilah pemimpin² Masjumi-PSI, baik setjara terang²an maupun setjara sembunji². Pemimpin² Masjumi-PSI dengan bantuan petualang² politik lainnja dan petualang² militer berusaha keras untuk menghapuskan kemerdekaan politik bagi Rakjat pekerdja, terutama bagi proletariat dan pelopornja jang militan, jaitu PKI.

Doctor Hatta dalam pidatonja baru² ini di Djokjakarta mengatakan, bahwa kaum Komunis tidak boleh duduk dalam pemerintah karena kaum Komunis tidak ber-Tuhan. Dr. Hatta tidak mengatakan supaja hak² politik kaum Komunis harus dirampas, tetapi baginja tjukuplah untuk setjara *a-priori* menempatkan kaum Komunis sebagai oposisi. Ini adalah bentuk lain dari pernjataan anti-demokrasi dan anti-nasional. Walaupun tidak terang²an dikatakan supaja hak² politik kaum Komunis dirampas, tetapi konsekwensi dari pendirian *a-priori* ini jalah menolak duduknja Komunis dalam kabinet, walaupun seandainja kaum Komunis mendapat kepertjajaan majoritet dari nasion, artinja mendapat lebih dari separoh kursi didalam Parlemen. Djadi, hakekat dari pendirian Dr. Hatta jalah *a-priori* menentang majoritet dari nasion, dan ini berarti anti-Kedaulatan Rakjat, anti-demokrasi, anti-nasional. Menentang majoritet nasion tidak bisa lain daripada anti-nasional. Mereka selalu menggunakan propaganda murah „tidak ber-Tuhan" karena mereka tidak mampu membantah kebenaran politik PKI setjara politik dan pengetahuan. Mereka sengadja tidak mau mengerti, bahwa soal ber-Tuhan atau tidak ber-Tuhan adalah soal pribadi, sedangkan soal Kedaulatan Rakjat adalah soal seluruh Rakjat ber-sama², soal nasional.

Dengan sembojan „berdjuang melawan Komunisme", sembojan jang sepenuhnja mereka oper dari kaum imperialis, kaum kepalabatu djuga giat berusaha menarik elemen² nasionalis kanan untuk ikut bersama mereka memasuki arus „Anti-Komunisme", tentu tanpa mengatakan bahwa dengan ini mereka meng-indjak² azas Kedaulatan Rakjat. Sebaliknja mereka katakan, bahwa dengan „melawan Komunisme" mereka djuga berdjuang untuk „Kedaulatan Rakjat", untuk „demokrasi" dan untuk „kebebasan umat-manusia".

Sebagian dari kaum nasionalis, jaitu elemen kanan dari kekuatan tengah ini, ikut terseret oleh sembojan „anti-Komunisme" dari pemimpin² Masjumi-PSI jang diilhami oleh politik luarnegeri negara² imperialis jang dipelopori oleh Amerika Serikat.

Tentang watak burdjuasi nasional jang tidak konsekwen dalam mendorong kemadjuan demokratis dalam tingkat revolusi burdjuis-demokratis, mengingatkan kita kepada apa jang ditulis oleh Lenin dalam tahun 1905, a.l. sbb.: *„Kedudukan jang ditempati burdjuasi sebagai klas didalam masjarakat kapitalis tidak boleh tidak menjebabkannja tidak konsekwen didalam revolusi demokratis. Kedudukan jang ditempati proletariat sebagai klas memaksanja mendjadi konsekwen demokratis. Burdjuasi menoleh kebelakang, takut pada kemadjuan demokratis, jang mengantjam akan memperkuat proletariat. Proletariat tidak kehilangan sesuatupun ketjuali belenggunja, tetapi dengan bantuan demokrasi mereka akan memperoleh seluruh dunia"* (2).

Djuga pengalaman kita menundjukkan, bahwa burdjuasi nasional Indonesia sangat kuatir kalau² „terlalu banjak demokrasi" djatuh ketangan proletariat dan ketangan Rakjat pekerdja pada umumnja. Inilah latarbelakang dari persetudjuan² tukang kelontong jang suka dilakukan oleh elemen² nasionalis kanan dengan kekuatan² kepalabatu dibelakang lajar pembentukan kabinet, dibelakang lajar Undang² dan Peraturan² Pemerintah jang reaksioner, dibelakang lajar pemilihan Kepala Daerah, pimpinan DPRD, dsb. Inilah pula latarbelakang dari kerdjasama elemen² nasionalis kanan dengan kaum reaksioner di Sumatera Utara dalam mentjetuskan „Peristiwa Siantar" bulan September 1957 (3). Dengan perbuatan ini mereka harap dapat menghalangi perkembangan kekuatan progresif, dapat mentjegah agar demokrasi djangan „terlalu banjak" djatuh di-

tangan Rakjat pekerdja. Akibat dari persetudjuan tukang kelontong ini telah sangat melemahkan kekuatan demokratis dalam Angkatan Darat di Sumatera Utara, dan inilah sebabnja mengapa sampai bisa terdjadi perebutan kekuasaan di Medan oleh kakitangan „PRRI" jang dikepalai oleh W.F. Nainggolan pada tanggal 16 Maret jl.

Kedudukan burdjuasi nasional sebagai klas didalam masjarakat kapitalis membikin mereka berdansa diantara kekuatan progresif dan kekuatan reaksioner, diantara kekuatan revolusioner dan kontra-revolusioner.

Diberbagai tempat, setjara terbuka atau tertutup diadakan persetudjuan² tukang kelontong antara kaum burdjuis kepalabatu dengan elemen² nasionalis kanan untuk „membendung Komunisme", untuk „menjelamatkan pulau Djawa dari bahaja merah" dan untuk „keselamatan dunia bebas". Dengan melewati persetudjuan² rendah ini, disedari atau tidak disedari, elemen² nasionalis kanan meninggalkan garis politik umum dari kaum nasionalis pada umumnja. Mereka meninggalkan garis anti-imperialisme dan demokrasi, dan ikutlah mereka hanjut dalam arus imperialisme dan anti-demokrasi, arus anti-pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%, anti-pelaksanaan jang njata dari tjita² Revolusi Agustus 1945. Ja, sebagai kelandjutannja mereka menentang Pantja Sila jang salahsatu azasnja jalah Kedaulatan Rakjat (Souverenitet ada pada Rakjat) *Singkatnja, sembojan „anti-Komunisme" pada tingkat sedjarah negeri kita sekarang tidak lain daripada sembojan untuk memetjah-belah persatuan nasional, sembojan untuk melemahkan perdjuangan anti-kolonialisme jang sedang meningkat dan sembojan untuk menghantjurkan demokrasi.*

Djadi, dengan ikutnja elemen² nasionalis kanan dalam arus „anti-Komunisme" pada hakekatnja mereka mengchianati kepentingan kaum nasionalis sendiri. Karena, bukankah kaum nasionalis jang sedjati djuga membutuhkan tergalangnja front persatuan nasional untuk mengalahkan imperialisme, dan bukankah kaum nasionalis jang sedjati membutuhkan demokrasi untuk menggalang persatuan nasional dan melawan feodalisme? Bukan untuk Sosialisme jang menghapuskan hakmilik mereka atas alat² produksi, tetapi untuk perkembangan kapitalisme nasional jang mendjadi idam²an terbuka atau terpendam dari mereka. Kapitalisme nasional tidak

mungkin berkembang selama di Indonesia masih bertjokol kapitalis² besar asing dan sisa² feodalisme. Djadi, politik mengundang modal asing masuk kedalamnegeri bukanlah politik nasionalis, tetapi politik komprador.

Dengan mengadakan persetudjuan² tukang kelontong dengan burdjuasi reaksioner, orang² nasionalis kanan bukannja mendorong madju kekuatan revolusioner, tetapi menariknja mundur, orang² nasionalis kanan bukannja revolusioner, tetapi reaksioner.

Djadi, walau bagaimanapun ditutup-tutupi, politik „anti-Komunisme" pada tingkat sedjarah sekarang pada hakekatnja adalah politik anti-demokrasi dan anti-nasional. Dan politik ini samasekali bertentangan dengan ketjenderungan umum Rakjat Indonesia sekarang, dengan perasaan dan fikiran Rakjat Indonesia sekarang. Rakjat Indonesia samasekali tidak tjenderung pada anti-Komunisme, tidak tjenderung pada anti-demokrasi dan anti-nasional.

Bentuk lain dari politik anti-demokrasi, jalah politik burdjuasi jang sudah kehilangan akal, jaitu politik pembubaran partai². Politik ini diametral bertentangan dengan Konsepsi Presiden Sukarno jang demokratis, bertentangan dengan tudjuan Revolusi Agustus 1945 dan bertentangan dengan ketjenderungan umum Rakjat Indonesia dan dari Rakjat diseluruh dunia sekarang. Burdjuasi jang kehilangan akal dan berkepala panas ini berdjual kojok, se-olah² kalau semua Partai sudah dibubarkan segala sesuatu akan berdjalan beres karena pemerintah tidak bisa diganggugugat oleh Rakjat lewat partai². Menurut mereka, politik mereka didasarkan atas „peladjaran dari keadaan di Mesir". Dalam „beladjar dari Mesir" mereka hanja mengambil jang sedap buat mereka, jaitu pembubaran partai², tidak perduli enak atau tidak buat Rakjat jang akan ditempatkan dibawah suatu kekuasaan jang tidak bisa diganggugugat setjara demokratis. Dalam „beladjar dari Mesir" mereka tidak mengambil jang baik buat Rakjat, misalnja politik luarnegeri Mesir jang tegas anti-imperialisme. Mereka buta atau pura² buta tentang perbedaan perkembangan keadaan ekonomi dan politik di Mesir dan di Indonesia. Tiap usaha mengimitasi Mesir setjara tidak kritis akan dirasakan oleh Rakjat Indonesia, jang sudah sedjak awal abad ini mendapat pendidikan demokrasi, sebagai perkosaan terhadap hak² azasi Rakjat, dan oleh karena itu pasti akan mendapat ten-

tangan Rakjat.

Politik pembubaran partai² tidak bisa diartikan lain daripada meratakan djalan untuk suatu kekuasaan se-wenang², suatu kekuasaan fasis, jang kalau ini terdjadi akan lebih memupuk perbuatan² birokrasi, korupsi dan perbuatan² anti-Rakjat lainnja oleh segelintir petualang. PKI bersama dengan Rakjat Indonesia akan menentang dengan sekuat tenaga politik orang² jang pendek fikiran dan berkepala panas ini, politik jang membuka kemungkinan lebih besar untuk kegiatan² extra-parlementer dan kup, ja, politik jang mengundurkan djam sedjarah perdjuangan kemerdekaan Rakjat Indonesia dengan setengah abad. Kaum Komunis dan Rakjat Indonesia tetap pada kejakinannja, bahwa se-djelek² demokrasi dalam pelaksanaannja, demokrasi tetap lebih baik daripada fasisme.

Dalam Sidang Pleno ke-V CC kita telah memberi penilaian jang tepat tentang perkembangan demokrasi dinegeri kita sesudah terbentuknja Parlemen pilihan Rakjat, Konstituante, dan terbentuknja DPRD² Peralihan serta DPD² Peralihan jang dibentuk berdasarkan perwakilan berimbang. Kita katakan, bahwa berkat adanja semua ini Rakjat Indonesia mendapat sendjata² baru untuk memperkuat persatuannja dan untuk memperdjuangkan kepentingan²nja se-hari².

Dalam Sidang Pleno CC tersebut antara lain kita simpulkan, bahwa *„Pembentukan DPD² Peralihan jang berdasarkan perwakilan berimbang telah mendobrak politik isolasi kaum reaksioner jang dipelopori oleh Masjumi terhadap PKI didalam pemerintahan² daerah. Terbentuknja pemerintahan² sematjam ini telah memperkuat kejakinan Rakjat tentang mungkinnja Kabinet Gotongrojong sebagai jang diinginkan oleh Konsepsi Presiden Sukarno. Semuanja ini membikin Rakjat lebih antusias dalam menghadapi pemilihan DPRD² jang akan datang"*. Ini berarti peluasan kemerdekaan politik Rakjat, ini berarti peluasan demokrasi politik.

Kesimpulan Sidang Pleno ke-V CC jang dikutip diatas sepenuhnja sesuai dengan kenjataan sekarang. Dalam pemilihan² DPRD² tingkat I dan II memang Rakjat antusias, ini dibuktikan oleh kenaikan² besar jang ditjapai oleh PKI, baik di Djawa maupun diluar Djawa. Di-tengah² kegiatan² subverstif dan kegiatan² extra-parlementer lainnja jang reaksioner, dimana pemimpin² Masjumi-

PSI banjak tersangkut, PKI dan partai² demokratis lainnja tetap setia pada djalan demokrasi parlementer.

Hasil suara sementara PKI untuk DPRD² tingkat II di-daerah² jang sudah mengadakan pemilihan (Djawa, Sumatera Selatan dan Riau) berdjumlah kira² 7.760.000. Hasil suara untuk Parlemen di-daerah² jang belum mengadakan pemilihan DPRD tingkat II berdjumlah 504.300. Djadi, andaikata pemilih PKI di-daerah² jang belum melangsungkan pemilihan DPRD tidak bertambah, dan ini satu hal jang tidak mungkin, pemilih PKI diseluruh negeri sekarang sudah berdjumlah 7.760.000 tambah 504.300, atau 8.264.300. Mengingat bahwa suara untuk partai² besar lainnja turun, maka berartilah bahwa PKI dalam waktu kira² dua tahun dari partai No. 4 sudah mendjadi partai No. 1 untuk seluruh negeri. Ini berarti, bahwa dibanding dengan suara PKI dalam pemilihan umum untuk Parlemen jang berdjumlah 6.176.900, PKI mengalami kenaikan paling sedikit 8.264.300 minus 6.176.900, atau 2.087.400, atau kenaikan dengan 34% untuk seluruh negeri. Kenaikan ini adalah bukti bahwa politik Partai Komunis Indonesia sudah makin diterima oleh massa Rakjat jang makin luas. Ini berarti bahwa kaum Komunis berdjuang untuk tudjuan jang baik. Hasil pemilihan DPRD² di Djawa, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur lebih memperkuat kedudukan PKI dan kekuatan demokratis didalam dan diluar DPRD².

Kenaikan² suara PKI pada umumnja sesuai dengan rentjana Comite² PKI setempat dan rentjana Comite Central. Ini adalah bukti, bahwa Partai kita sampai batas² tertentu sudah mempunjai pimpinan jang objektif dan realis. Pimpinan jang demikian ini adalah djaminan penting bagi perkembangan PKI jang lebih baik.

Kenaikan² suara PKI dalam pemilihan DPRD², baik di Djawa maupun diluar Djawa, adalah bukti hidup bahwa Rakjat Indonesia tidak sedjalan dengan keinginan kaum imperialis jang dipelopori oleh Amerika Serikat, tidak sedjalan dengan keinginan pemimpin² Masjumi-PSI, tidak sedjalan dengan keinginan kaum pemberontak separatis Husein-Sjafrudin dkk., tidak sedjalan dengan keinginan Dr. Hatta dan dengan keinginan kaum nasionalis kanan. Rakjat Indonesia sedjalan dengan PKI, dengan kaum nasionalis revolusioner, dengan Konsepsi Presiden Sukarno, dengan Revolusi Agus-

tus 1945, dengan demokrasi dan dengan kepentingan nasional Indonesia. Rakjat Indonesia sekarang sedang bergeser kekiri, menjesuaikan diri dengan perkembangan diseluruh dunia sekarang jang djuga sedang bergeser kekiri.

Oleh karena itu, tugas mempertahankan, mengkonsolidasi dan memperluas kemerdekaan politik bagi Rakjat Indonesia adalah tugas jang harus diamalkan dengan sungguh² oleh tiap² orang jang mengutamakan kepentingan nasional, jang mengabdi Rakjat dan mengabdi pada demokrasi. Terutama proletariat Indonesia harus memberikan sepenuh hatinja pada pekerdjaan memperluas demokrasi, karena sebagaimana dikatakan Lenin „dengan bantuan demokrasi mereka akan memperoleh seluruh dunia".

Perdjuangan untuk meluaskan kemerdekaan politik atau meluaskan demokrasi berarti mentjiptakan sjarat untuk setjara baik menghubungkan kegiatan parlementer dengan aktivitet massa, untuk setjara ber-angsur² mentjapai kemerdekaan ekonomi. Perdjuangan untuk meluaskan kemerdekaan politik berarti mentjiptakan sjarat² untuk mendemokrasikan seluruh kehidupan Rakjat, untuk setjara damai melaksanakan Konsepsi Presiden Sukarno 100% dan selandjutnja setjara damai pula melaksanakan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja. Demikianlah kalau tergantung pada kaum Komunis.

III

Dengan Bertindak Radikal Terhadap Kekuatan Ekonomi Belanda Rakjat Indonesia Memasuki Taraf Baru Perdjuangan Anti-Kolonialisme

Perdjuangan untuk memasukkan Irian Barat kedalam kekuasaan Republik Indonesia adalah perdjuangan jang mendapat dukungan massa jang sangat luas, karena ia adalah perdjuangan untuk menjelamatkan dan mengutuhkan wilajah negara Republik Indonesia. Selama Irian Barat, jaitu lebih dari 20% dari wilajah Republik Indonesia, masih dikuasai oleh kaum kolonialis Belanda, selama itu keamanan Republik Indonesia terantjam terus-menerus, wilajah Republik tidak utuh, dan tidak ada seorang Indonesiapun jang berfikiran sehat senang dengan keadaan ini.

Ada dua aliran dikalangan orang² Indonesia mengenai perdjuangan memasukkan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan R.I., jaitu aliran reaksioner dan aliran revolusioner.

Kaum reaksioner, jang djumlahnja sangat ketjil, berpendirian bahwa djika bangsa Indonesia menginginkan supaja Irian Barat masuk kedalam wilajah kekuasaan R.I., maka, mengingat bahwa Indonesia berada didalam „daerah pengaruh AS", Indonesia harus masuk lebih dulu kedalam blok Amerika, dan kemudian dengan sendirinja Amerika akan mengambil Irian Barat dari tangan Belanda dan menjerahkannja kepada Republik Indonesia. Dari sini djelaslah, bahwa orang² reaksioner ini ingin memperluas dan memperkuat pendjadjahan atas Indonesia, tidak hanja di Irian Barat tetapi diseluruh Indonesia, tidak hanja didjadjah oleh imperialisme Belanda, tetapi oleh imperialisme Amerika dan Belanda ber-sama². Karena kepentingannja di Eropa, berhubung dengan NATO dan lain² kepentingan militer dan politiknja, Amerika tidak akan begitu sadja menjingkirkan Belanda dari Indonesia, walau di-sembah² bagaimanapun oleh pemimpin² Masjumi. Lagi pula, bagi orang² Indonesia jang berfikiran waras soalnja bukanlah pergantian pendjadjah, tetapi penghapusan pendjadjahan diseluruh wilajah Indonesia.

Ada lagi orang² reaksioner jang mau menipu Rakjat dengan mengatakan, bahwa perdjuangan memerdekakan Irian Barat sekarang tidak penting, karena di Irian Barat hanja ada hutan², rawa² dan sarang² malaria. Apa gunanja kita mempunjai Irian Barat, kata mereka, toh kita tidak bisa memakmurkan Rakjat daerah itu, karena kita sendiri belum makmur. Nanti, katanja, kalau di-daerah² jang sudah dikuasai Republik Indonesia Rakjatnja sudah makmur, barulah kita berdjuang untuk membebaskan Irian Barat. Diantara orang² jang mempropagandakan fikiran sematjam ini termasuk Dr. Hatta. Orang² ini bukan hanja tidak mempunjai perasaan patriotisme, lebih daripada itu, mereka memberi kesempatan kepada Belanda untuk memperkuat diri supaja lebih mampu menjerang Republik Indonesia. Dengan perkataan lain orang² reaksioner ini bukan berada difihak Rakjat Indonesia, tetapi difihak kolonialisme Belanda. Mereka adalah pengchianat! Kalau benar di Irian Barat hanja

ada hutan², rawa² dan sarang² malaria, mengapa kaum imperialis Belanda, dengan dibantu oleh kaum imperialis Amerika, begitu ngotot mempertahankan pendjadjahannja di Irian Barat? Anak sekolah sekalipun tahu bahwa Irian Barat kaja dengan pelikan, bahwa Irian Barat penting buat pertahanan seluruh Indonesia, dan ..... bahwa di Irian Barat hidup sebagian dari Rakjat Indonesia jang ditindas oleh kolonialisme Belanda.

Kaum revolusioner, jang djumlahnja sangat besar, menganggap djalan lewat PBB dan djalan² perundingan lainnja adalah djalan² jang perlu ditempuh untuk mendapatkan penjokong se-banjak²nja, dan menumbuhkan kekuatan jang se-besar²nja, baik didalam maupun diluarnegeri, agar fihak Belanda pada suatu waktu dapat dipaksa tunduk kepada tuntutan² Rakjat Indonesia jang adil. Kaum revolusioner tidak akan menempuh djalan berunding djika djalan berunding akan mendjauhkan Irian Barat dari kekuasaan Republik Indonesia, atau djika djalan berunding jang ber-larut² akan melemahkan potensi nasional Republik Indonesia. Menempuh djalan berunding harus ada batasnja. Kalau tidak tahu batas dalam menempuh djalan berunding, maka inisiatif akan pindah ketangan lawan.

Dikalangan kaum revolusioner terdapat dua golongan, jang konsekwen dan jang bimbang. Jang konsekwen menginginkan supaja diambil tindakan radikal terhadap kekuasaan ekonomi Belanda jang ada didaerah R.I., djika fihak Belanda tidak mau berunding atas dasar penjerahan Irian Barat kepada R.I. Jang bimbang kuatir akan tindakan radikal, karena takut, bahwa bersamaan dengan tindakan radikal akan timbul kebangkitan jang radikal pula dari kekuatan massa Rakjat pekerdja jang dipelopori oleh proletariat.

Sebelum soal Irian Barat dibitjarakan dalam PBB dalam bulan November tahun jl., sudah tiga kali soal ini dibitjarakan dalam PBB, dan dalam tahun 1954 Pemerintah Ali Sastroamidjojo djuga sudah mengirimkan delegasi dibawah pimpinan Menteri Luarnegeri Sunarjo ke Nederland untuk antara lain mendapatkan penjelesaian soal Irian Barat setjara damai. Saban kali wakil Indonesia akan berangkat ke PBB, demikian djuga ketika delegasi Sunarjo akan berangkat ke Nederland, Rakjat Indonesia memberikan dukungannja, baik didalam maupun diluar Parlemen. Tetapi perundingan

di PBB selalu berachir dengan keketjewaan Rakjat, karena senantiasa tidak tertjapai suara jang tjukup untuk menjuruh Belanda berunding dengan fihak Indonesia, djadi samasekali belum sampai pada soal status apa jang harus diberikan kepada Irian Barat sebagai hasil perundingan. Djuga delegasi Sunarjo tidak mentjapai hasil apa².

Kegagalan² dalam usaha membawa Belanda kemedja perundingan, disatu fihak mendjengkelkan Rakjat Indonesia, tetapi difihak lain telah memperkuat persatuan Rakjat anti-kolonialisme Belanda. Irian Barat jang dikuasai oleh kaum kolonialis Belanda dengan maksud untuk melemahkan kekuatan Rakjat Indonesia, ber-angsur² telah berbalik mendjadi sesuatu jang mempersatukan dan jang memperkuat persatuan Rakjat Indonesia. Menghadapi kenjataan ini, kakitangan kolonialis Belanda dan imperialis Amerika didalamnegeri tidak tinggal diam. Saban kali soal Irian Barat mau dibawa keforum PBB, selalu terdjadi peristiwa dalamnegeri jang bersifat pukulan terhadap pemerintah jang akan membawa soal Irian Barat kedalam PBB, seperti misalnja mosi tidak pertjaja, keonaran² dalamnegeri, dsb.

Dalam bulan November tahun jl. soal Irian Barat dibawa untuk ke-empat kalinja keforum PBB. Kali ini oleh Pemerintah Djuanda. Lain dari biasa, kali ini Pemerintah sudah siap menempuh „djalan lain" djika disidang PBB mengalami kegagalan lagi. Sikap Pemerintah ini sesuai dengan sikap revolusioner Rakjat Indonesia. „Djalan lain" bagi Rakjat Indonesia tidak lain daripada djalan Rakjat, djalan revolusioner.

Rakjat Indonesia jang revolusioner adalah realis. Kaum kolonialis Belanda hanja mungkin menguasai Irian Barat selama mereka dapat mengongkosi tentaranja disana, membiajai gerombolan² bersendjata dan gerakan² subversif lainnja. Negeri Belanda dapat mengongkosi tentaranja di Irian Barat karena negeri Belanda mendapat keuntungan dari penanaman modal, terutama penanaman modal kapitalis² besar Belanda di Indonesia. Dengan perkataan lain, kekajaan alam dan keringat Rakjat Indonesia selama ini telah digunakan untuk memperkuat kedudukan tentara Belanda di Irian Barat, untuk menindas gerakan kemerdekaan Rakjat di Irian Barat, untuk membiajai gerombolan² bersendjata dan gerakan² subversif

lainnja didaerah Republik Indonesia, dan semuanja ini sebagai persiapan untuk menjerang Republik Indonesia.

Djadi, langkah jang kongkrit dan efektif jang dapat dilakukan oleh Rakjat dan Pemerintah Indonesia, djika Belanda tidak mau berunding untuk menjerahkan Irian Barat kepada Indonesia, jalah bertindak radikal terhadap kekuasaan ekonomi kaum kapitalis besar Belanda, bertindak terhadap kekuasaan Belanda diberbagai tjabang transpor, di-pertambangan², perkebunan², bank², perusahaan² impor-ekspor, pabrik², dsb.

Mendjelang pembitjaraan di PBB, pada Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1957 Badan Kerdjasama Pemuda-Militer (BKSPM) mulai menghangatkan aksi pembebasan Irian Barat. Dengan ini mulailah gelombang naik perdjuangan anti-kolonialisme Belanda jang lebih tinggi daripada ketika menghadapi pembitjaraan Irian Barat di PBB pada tahun jang sudah². Kaum pengchianat dan kaum reaksioner menentang gerakan pembebasan Irian Barat jang makin hari makin menggelora ini. Aksi pemuda² menulisi gedung² milik Belanda mereka tjela, misalnja oleh Ketua Umum Masjumi, Moh. Natsir, dikatakan sebagai perbuatan orang jang „tidak berachlak". Padahal mereka samasekali tidak berkata sesuatu, apalagi mentjela „achlak" kaum kolonialis Belanda jang mengangkangi Irian Barat. Aksi menulisi gedung² milik Belanda bukanlah aksi anak ketjil, tetapi aksi jang sangat berguna untuk mentjapai kesatuan fikiran dan tindakan dikalangan kaum buruh, pemuda dan militer, supaja tidak keliru sasaran dalam aksi² jang lebih tinggi selandjutnja, seperti aksi mogok 24 djam disemua perusahaan Belanda pada tanggal 2 Desember 1957 dan pengambilalihan perusahaan² Belanda jang dimulai pada tanggal 3 Desember dengan pengoperan KPM.

Kaum reaksioner djuga mengintimidasi dengan kemungkinan intervensi asing. Mereka katakan bahwa negeri Belanda dengan dibantu oleh sahabat²nja Amerika, Inggeris dll. akan menjerang Indonesia djika perusahaan² Belanda diambilalih. Dengan intimidasi² ini, Rakjat Indonesia bukannja mendjadi takut, malahan makin berteguh hati dan makin mengenal musuh² kemerdekaan negerinja, jaitu bahwa disamping kaum imperialis Belanda, djuga kaum imperialis Amerika dan Inggeris adalah musuh kemerdekaan Indonesia.

Sesudah KPM diambilalih, maka menjusullah pengambilalihan perusahaan² Belanda lainnja: perusahaan² perdagangan, pabrik², kebun², bank², perusahaan² transpor, dll.

Dengan pengambilalihan perusahaan² Belanda oleh kaum buruh, sekali lagi proletariat Indonesia menundjukkan rol pelopornja jang gagahberani dalam perdjuangan nasional untuk kemerdekaan tanah-air dan kepentingan seluruh nasion. Kaum buruh mengambilalih perusahaan² imperialis bukan untuk kepentingannja sendiri, tetapi untuk diserahkan kepada Republik Indonesia jang pemerintahnja belum pemerintah klas buruh. Semuanja ini dilakukan oleh proletariat Indonesia dengan resiko² jang besar, resiko dibunuh, dipetjat dari pekerdjaan, dihukum dsb. Untuk kepentingan nasional proletariat melakukan semuanja ini tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri.

Kaum reaksioner mentjela tindakan radikal proletariat sebagai tindakan „anarki", karena tindakan ini, katanja, akan „melumpuhkan ekonomi Indonesia". Dalam suasana revolusioner omongkosong demikian ini tentu tidak laku. Djuga dalam keadaan biasa fikiran reaksioner demikian ini tidak luas pasarannja dikalangan Rakjat Indonesia jang patriotik. Anak ketjil sekalipun dapat menimbang, bahwa djika kekuasaan ekonomi Belanda diserang oleh Rakjat Indonesia, dan serangan itu kena sasarannja, tidak mungkin „ekonomi Indonesia jang mendjadi lumpuh". Mereka jang memutarbalikkan kenjataan ini adalah orang² jang hidup dalam alam fikiran, bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi Belanda, karena Indonesia kepunjaan Belanda, dan mereka adalah pembela²nja. Kalau tidak demikian, mengapa kaum kapitalis Belanda jang diserang, tetapi mereka jang berteriak kesakitan?

Dalam kesibukan kaum buruh „mendaulat" madjikan² Belanda, kaum tengah, jaitu golongan jang bimbang dalam barisan revolusioner, mulai menampakkan kekuatirannja terhadap kebangkitan gerakan revolusioner kaum buruh jang menurut mereka bisa menimbulkan „hal² jang tidak diinginkan", dan menampakkan watak mereka jang individualis, jang mau mengambil keuntungan bagi diri sendiri dari hasil keringat dan hasil perdjuangan kaum buruh dan seluruh Rakjat, sebagaimana sudah biasa mereka lakukan. Kekuatiran dan watak individualis dari kaum tengah ini merupa-

kan sasaran bagi kaum reaksioner untuk didorong kekanan sampai memusuhi tindakan² revolusioner dari kaum buruh.

Kaum bimbang dalam barisan revolusioner, jaitu kaum tengah, berada dalam situasi jang sulit menghadapi massa kaum buruh dan Rakjat jang sedang bertindak revolusioner. Membiarkan keadaan sebagaimana adanja tidak mungkin, karena ini berarti membiarkan kekuatan progresif berkembang tanpa rintangan. Terang²an menjalahkan tindakan kaum buruh dan Rakjat akan menempatkan mereka sendiri pada kedudukan jang sama dengan kaum reaksioner, dan ini berarti akan ditinggalkan oleh massa mereka sendiri. Oleh karena itu, satu²nja jang masih dapat mereka lakukan, jalah sedapat mungkin membatasi tindakan² radikal kaum buruh supaja prestise klas buruh tidak meningkat tinggi dan supaja tidak „terlalu banjak" tjampurtangan kaum buruh dalam urusan² perusahaan² jang sudah diambilalih. Ikut tjampurtangan kaum buruh jang „terlalu banjak", seperti misalnja dengan pembentukan Dewan² Buruh setjara demokratis, berarti akan mengurangi arti alat kekuasaan birokrasi dan akan merintangi kese-wenang²an dalam menempatkan dari atas pimpinan² perusahaan² jang sudah dioper.

Disamping itu, kaum bimbang dalam barisan revolusioner djuga sudah mulai me-lihat² perusahaan² jang sudah diambilalih jang dapat didjadikan milik perseorangan mereka. Oleh karena itu sebenarnja mereka membentji sembojan „milik Republik" jang berkumandang selama aksi² pengambilalihan perusahaan² Belanda. Bagi kaum buruh sembojan „milik Republik" berarti bukan milik Belanda, dan pemindahan milik ini adalah penting. Sedangkan bagi kaum tengah jang individualis „milik Republik" berarti bukan milik mereka pribadi, dan ini berarti tidak menguntungkan mereka. Politik kaum tengah membatasi langkah² kaum buruh ini sudah tentu disambut oleh kaum reaksioner dan didorong supaja mendjadi politik memusuhi kepentingan klas buruh.

Dalam situasi meruntjingnja pertentangan dengan kolonialisme Belanda, kaum bimbang tidak dimungkinkan untuk berhubungan langsung dengan madjikan² Belanda dalam rangka membatasi langkah² kaum buruh dan dalam rangka mengambil keuntungan² pribadi. Satu²nja jang dapat mereka lakukan jalah dengan menggunakan Pemerintah jang mereka kuasai, dan sesudah semua djatuh ditangan Pemerintah soalnja akan mendjadi mudah bagi mereka.

Djadi, pengambilalihan perusahaan² setjara resmi oleh Pemerintah mempunjai dua segi. Pertama, dengan tindakan ini kaum tengah bermaksud untuk membatasi langkah² kaum buruh, agar kaum buruh tidak „terlalu banjak" tjampurtangan dalam penguasaan perusahaan², sehingga dikemudian hari masih ada harapan, dengan menggunakan kekuasaan Pemerintah, untuk mengoper perusahaan² ketangan perseorangan. Dengan be-rebut² untuk memiliki perusahaan² ini kaum tengah tidak memperkuat sektor ekonomi negara, tetapi mengutamakan kepentingan pribadi, dan disini bertemu kepentingan kaum tengah dengan kepentingan kaum reaksioner, dan pertemuan kepentingan ini bisa mendjadi landasan dari politik reaksioner bersama. Segi lain, jaitu segi baiknja, pengambilalihan setjara resmi oleh Pemerintah berarti melegalisasi tindakan² radikal kaum buruh. Oleh karena pengambilalihan perusahaan oleh Pemerintah mempunjai segi jang positif, jaitu melegalisasi tindakan² radikal kaum buruh, maka tindakan Pemerintah ini harus disambut baik. Ini adalah tindakan patriotik, walaupun dibalik itu ada maksud² untuk membatasi langkah² madju kaum buruh. Oleh karena itu pula kita menjambut baik instruksi KSAD, Djenderal Major A.H. Nasution, tanggal 13 Desember 1957 supaja semua Penguasa Militer di Indonesia mengambiloper dan mengadakan pengawasan penuh setjara langsung atasnama Pemerintah R.I. terhadap semua perusahaan Belanda.

Politik madju Pemerintah mengambilalih perusahaan² kapitalis² besar Belanda belum sepenuhnja didjalankan oleh pendjabat² di-beberapa daerah, sehingga di-daerah² tersebut perusahaan² Belanda belum diambilalih. Sikap pendjabat² sivil dan militer jang demikian ini berarti sabotase terhadap politik Pemerintah Pusat dan terhadap instruksi KSAD.

Dari analise diatas djelaslah, bahwa adalah wadjar timbul perdjuangan antara kaum revolusioner jang sedjati dengan kaum bimbang dan individualis. Kaum revolusioner sedjati menuntut supaja perusahaan² jang sudah diambilalih tetap mendjadi milik Republik dimana kaum buruh mengambil bagian dalam pengawasan dan pimpinan perusahaan² dengan maksud agar produksi berdjalan lan-

tjar dan digunakan untuk kepentingan umum dengan diatur oleh Pemerintah. Sedangkan kaum bimbang dan individualis dalam barisan revolusioner akan berusaha agar perusahaan² jang mereka ingini djatuh ketangan perseorangan mereka, dan kaum buruh kembali sebagaimana sebelum pengambilalihan, dan jang berubah hanja madjikannja sadja, dulu kapitalis² besar Belanda nanti burdjuasi Indonesia.

Singkatnja, burdjuasi nasional sudah dan akan berusaha membatasi langkah² madju kaum buruh, tetapi adalah tergantung pada kaum buruh bisa atau tidaknja langkah² madjunja itu dibatasi. Kaum buruh tidak pernah dan tidak akan menggantungkan nasibnja pada burdjuasi. Dirintangi atau tidak dirintangi oleh burdjuasi, kaum buruh dengan pimpinan Partainja akan terus berdjuang menghalaukan segala rintangan dalam pengabdiannja kepada seluruh nasion.

Pada tanggal 3 Desember 1957 Politbiro CC PKI telah mengeluarkan sebuah pernjataan jang pada pokoknja menjambut tindakan² kaum buruh jang gagahberani dan sikap pemerintah jang tepat mengoper perusahaan² Belanda dalam rangka perdjuangan pembebasan Irian Barat. Dalam pernjataan ini diterangkan bahwa kita pasti akan menang dalam menghadapi Belanda dan kawan²nja djika Rakjat Indonesia lebih bersatu, lebih berani, lebih waspada dan lebih berdisiplin.

Bagaimanakah selandjutnja dengan perusahaan Belanda jang sudah dioper? Menurut pendirian kaum revolusioner bagi kaum imperialis Belanda sekarang terbuka dua kemungkinan: perusahaan² jang sudah dioper akan *dinasionalisasi*, djika fihak Belanda mau berunding dan menjetudjui Irian Barat diserahkan kepada Republik Indonesia, atau akan *disita*, djika fihak Belanda tetap berkeras-kepala tidak mau berunding untuk menjerahkan Irian Barat.

Djadi, apapun jang akan terdjadi, mau atau tidak mau Belanda berunding, kaum imperialis Belanda tidak lagi akan mendapat kedudukan istimewa dilapangan ekonomi seperti masa² lampau.

Sikap PKI tentang berachirnja untuk se-lama²nja kedudukan istimewa modal Belanda ini sesuai dengan pendirian Pemerintah seperti jang diterangkan oleh P.M. Djuanda ketika beliau pada achir Desember tahun jang lalu mendjawab tulisan Dr. Hatta jang

pada pokoknja menjalahkan tindakan Pemerintah mengambilalih perusahaan² Belanda. Satu kali Rakjat Indonesia mengajunkan langkah menjerang kedudukan ekonomi Belanda, sebagai usaha untuk melemahkan kedudukan politik dan militer Belanda, maka berachirlah untuk se-lama²nja hak² istimewa Belanda dilapangan ekonomi dibumi Indonesia.

Pendirian kaum reaksioner terhadap sikap kaum revolusioner tersebut adalah terang, jaitu mereka „mengharamkan" sikap itu, karena menurut anggapan mereka „merampas milik orang lain" jang „dilarang oleh semua hukum". Dikalangan kaum tengah terdapat djuga fikiran supaja perusahaan² Belanda dikembalikan djika Belanda mau berunding, djuga djika tidak atas dasar penjerahan Irian Barat kepada R.I. Fikiran ini melemahkan posisi Republik Indonesia.

Tindakan² kaum buruh dan Rakjat Indonesia serta sikap Pemerintah Indonesia adalah sangat adil, sepenuhnja sesuai dengan hasrat Rakjat Indonesia untuk membebaskan diri dari kekuasaan ekonomi asing dan membangun perekonomian nasionalnja sendiri, dan ini sesuai pula dengan taktik melemahkan potensi ekonomi dan militer Belanda untuk memaksanja menjerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Ini sepenuhnja sesuai dengan program Kabinet Karya, terutama jang mengenai pelandjutan pelaksanaan pembatalan persetudjuan KMB dan penerusan perdjuangan merebut Irian Barat.

Tindakan mengambilalih perusahaan² kapitalis² besar Belanda oleh Pemerintah didukung sepenuhnja oleh massa kaum tani jang luas. Penguasaan perusahaan² perkebunan dan pertanian oleh Pemerintah memberikan kemungkinan kepada Pemerintah untuk melaksanakan plan memperbesar produksi bahan² ekspor sebagai sumber devisen negara dengan mengikutsertakan tenaga² ahli, kaum buruh dan kaum tani dalam perentjanaan dan pelaksanaan sesuai dengan putusan² Munap. Disamping itu terbukalah kemungkinan lebih besar bagi Pemerintah untuk memenuhi tuntutan² kaum tani seperti misalnja, mensahkan tanah² bekas perkebunan² Belanda jang sudah dikerdjakan kaum tani sebagai milik kaum tani, membagikan tanah² perkebunan jang terlantar dan tanah² perkebunan jang tidak diperlukan untuk perkebunan modern kepada kaum tani, merun-

dingkan dengan kaum tani mengenai besarnja sewatanah kaum tani untuk tanaman tebu atas dasar saling menguntungkan, dsb. Dipenuhinja tuntutan² kaum tani ini akan membawa perbaikan bagi nasib kaum tanimiskin dan tani tak-bertanah serta merupakan tindakan penting dalam rangka program Pemerintah untuk memperbesar produksi bahan makanan.

Apakah arti dari pengoperan perusahaan² imperialis Belanda oleh kaum buruh jang kemudian diresmikan oleh Pemerintah? Mengenai ini dalam Pesan Tahun Baru Politbiro CC diterangkan sbb.:

„*Pertama,* bahwa kaum buruh dan Rakjat Indonesia menemukan kembali kekuatannja sendiri jang pernah dimilikinja selama Revolusi Agustus 1945. Kaum buruh dan Rakjat Indonesia djuga mendjadi mengenal kekuatan jang tidak terbatas dari Rakjat diseluruh dunia, sampai² Rakjat pekerdja Nederland, dan terutama Rakjat² Asia-Afrika serta Rakjat² kubu sosialis, solider dengan Rakjat Indonesia. Djika Belanda berani menjerang dengan kekuatan militernja, Rakjat² ini akan tampil untuk berbuat sesuatu guna memenangkan Rakjat Indonesia dan mengalahkan kaum kolonialis Belanda.

Kedua, bahwa Rakjat Indonesia mendjadi mengenal kekuatan jang terbatas dari musuhnja. Ini telah lebih mejakinkan Rakjat Indonesia bahwa kekuatan kaum imperialis Belanda dkk. bukanlah sesuatu jang tidak bisa dikalahkan".

Tindakan² penting jang diandjurkan oleh PKI supaja segera dilakukan oleh Pemerintah mengenai perusahaan² Belanda jang sudah dioper adalah: (1) segera melantjarkan djalannja produksi dan memberantas tiap bentuk sabotase dari manapun datangnja; (2) untuk mengatasi kesulitan impor-ekspor, perdagangan luarnegeri harus diluaskan dengan negeri mana sadja, tanpa memandang perbedaan sistim politik dan ekonomi, dan tanpa ada sjarat² politik dan militer; (3) pemerintah harus betul² waspada terhadap manipulasi peredaran barang, terutama beras, jang digunakan oleh kaum imperialis dan kakitangannja didalamnegeri untuk mendjatuhkan Pemerintah dan menggagalkan perdjuangan Irian Barat dan perdjuangan mengusir kekuasaan ekonomi Belanda.

Untuk mentjegah sabotase, untuk memperbesar produksi dan

meningkatkan kwalitet produksi, adalah bidjaksana sekali menurut pandangan Partai kita, djika Pemerintah berpegang teguh pada prinsip mengikutsertakan kaum buruh dalam dewan² pimpinan dan dewan² pengawasan dari perusahaan² dan dari semua pekerdjaan produksi. Lebih bidjaksana lagi, djika untuk ini Pemerintah djuga menjetudjui pembentukan Dewan² Buruh untuk tiap² perusahaan, dan menjelesaikan tuntutan² sosial-ekonomi kaum buruh setjara lebih baik daripada sebelum terdjadinja pengambilalihan. Pelaksanaan prinsip² ini merupakan djaminan utama bagi keselamatan dan kemadjuan produksi nasional jang kita kehendaki.

Tindakan² mengambilalih perusahaan² kapitalis² besar Belanda oleh kaum buruh tidak hanja telah meningkatkan martabat kaum buruh sebagai klas dimata nasion Indonesia, tetapi djuga telah mengangkat setingkat lebih tinggi perdjuangan nasional Rakjat Indonesia. Mengenai jang belakangan ini dinjatakan dalam Pesan Tahun Baru Politbiro CC PKI sbb.:

„*Taraf perdjuangan anti-kolonialisme dimana Rakjat Indonesia menemukan kembali kekuatannja sendiri, mengetahui terbatasnja kekuatan imperialisme Belanda dan kawan²nja, sedangkan sasaran perdjuangan langsung mengenai kepentingan ekonomi imperialis Belanda, menundjukkan adanja peningkatan penting dari kesedaran Rakjat Indonesia, dan semuanja ini berarti bahwa Rakjat Indonesia sudah memasuki taraf baru dari perdjuangan anti-kolonialisme. Taraf ini sangat penting artinja dalam perdjuangan Rakjat Indonesia menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945*".

Tindakan mengambilalih perusahaan² kapitalis² besar Belanda untuk diserahkan kepada Republik Indonesia, adalah tindakan jang sangat penting dalam perdjuangan klas buruh Indonesia untuk merebut peranan pelopor dalam perdjuangan nasional pada tingkat sekarang.

Dalam meneruskan perdjuangan menjerang kedudukan ekonomi Belanda dalam rangka perdjuangan pembebasan Irian Barat dan meneruskan pelaksanaan pembatalan persetudjuan KMB, sementara orang terus-menerus diganggu oleh pertanjaan: apakah mungkin Belanda menjerang setjara militer? Tidak seorangpun jang dapat mendjawab pertanjaan ini dengan „tidak mungkin", karena apa gunanja Belanda menempatkan tentaranja di Irian Barat, apa

gunanja kapal² perang dan meriam² dikirim dari negeri Belanda ke Irian Barat, apa gunanja kapalselam² Belanda mondar-mandir dilautan teritorial Indonesia, apa gunanja Pemerintah Inggeris membiarkan pangkalan Singapura digunakan oleh kapal perang Belanda, dan apa gunanja pemberontakan kontra-revolusioner dilakukan oleh orang² Indonesia jang terang tidak menjetudjui politik pemerintah melikwidasi kekuasaan ekonomi Belanda dalam rangka perdjuangan Irian Barat?

Djadi, kemungkinan fihak Belanda mengadakan serangan setjara militer tetap ada, oleh karena itu kerdjasama Rakjat dengan Tentara harus terus dipererat, dan kewaspadaan nasional harus terus dipertinggi. Tetapi, kemungkinan serangan militer tidak besar selama keadaan dalamnegeri pada pokoknja dapat dikuasai oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, untuk mendapat „alasan" buat intervensi bersendjata, maka kaum imperialis akan terus memperhebat gerakan subversifnja dengan menimbulkan dan memperkuat gerakan² separatis, mengadakan sabotase² dilapangan ekonomi, mengorganisasi gerombolan² teror, dsb.

Dalam perdjuangan untuk memasukkan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia adalah sangat penting rol Badan² Kerdjasama antara berbagai golongan Rakjat dengan fihak militer, dan rol Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Tepat sekali apa jang dikatakan oleh KSAD, Djenderal Major A.H. Nasution waktu pelantikan Front ini, bahwa tugas Front ini jalah untuk mengusir kolonialis Belanda dan kakitangannja dari bumi Indonesia, baik jang berbentuk potensi ekonomi maupun gerombolan. Selandjutnja, dikatakan, bahwa tugas utama front ini jalah untuk menindas gerakan musuh jang berselimut disegala golongan kita, menindas gerakan subversif, membasmi gerombolan sampai ke-akar²nja dan mempertahankan serta mempertegak negara Indonesia jang berbentuk kesatuan.

Dengan demikian djelaslah, bahwa pada tingkat sekarang perdjuangan untuk memasukkan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia berarti perdjuangan untuk melikwidasi kekuasaan ekonomi kapitalis² besar Belanda, menggulung gerakan subversif dan ber-djaga² untuk menghadapi kemungkinan serangan bersendjata militer Belanda. Sjarat utama untuk suksesnja perdjuangan ini jalah, adanja persatuan nasional jang luas dan kuat, dan adanja kerdjasama jang erat antara dwitunggal, jaitu Rakjat dan Tentara. Dajadjuang dan semangat berlawan Rakjat harus terus ditingkatkan, dan peningkatan akan tjepat djika kepada Rakjat, didjamin kebebasan demokratis jang se-luas²nja.

IV

A. Menjesuaikan Badan Pimpinan Partai Dengan Perkembangan Situasi Revolusioner Jang Tjepat

Dalam Sidang Politbiro Comite Central jang diperluas dengan anggota² CC jang bertempat tinggal di Djakarta pada achir tahun jang lalu, dalam menganalisa situasi ketika itu, antara lain dikatakan bahwa Rakjat Indonesia sudah memasuki taraf baru dari perdjuangan anti-kolonialisme.

Situasi negeri kita sesudah „teror Tjikini" jang gagal dan sesudah Rakjat Indonesia menempuh djalan revolusioner dalam perdjuangan pembebasan Irian Barat jalah, bahwa kaum reaksioner bukan hanja tidak mampu merebut kekuasaan sentral setjara parlementer, tetapi djuga setjara extra-parlementer. Pertjobaan mereka untuk berkuasa dengan memproklamasikan apa jang dinamakan „PRRI" dengan menjeret kekuasaan asing masuk setjara tidak sah kedalam wilajah Republik Indonesia, sedjak sekarang sudah dapat dipastikan djuga akan mengalami kegagalan. Ini berarti bahwa kaum kepalabatu sudah berada dalam kedudukan jang lebih terpentjil.

Untuk perkembangan jang lebih menguntungkan bagi Rakjat Indonesia, pekerdjaan Partai jang terpenting adalah tetap, jaitu membangkitkan, mengorganisasi dan memobilisasi massa sebagai sjarat untuk kuatnja front persatuan nasional. Ini berarti bahwa kita tidak boleh henti²nja memperbaiki pekerdjaan Partai dikalangan massa kaum buruh, kaum tani, massa pemuda dan peladjar, kaum wanita, kaum inteligensia, kaum veteran, kaum miskin kota dan kaum nelajan. Pekerdjaan front persatuan jang tidak dengan pekerdjaan massa ini, apalagi djika tidak dengan penggalangan front persatuan buruh dan tani, bukan pekerdjaan front

persatuan jang sedjati.

Tetapi kawan², gerakan massa jang luas tidak akan tahan lama, tidak dapat ditudjukan kepada sasarannja jang tepat dan tidak dapat ditingkatkan ketaraf jang lebih tinggi, djika gerakan massa jang luas itu tidak mempunjai tulangpunggung, tidak mempunjai pimpinan jang kompak, militan dan berdisiplin. Adalah kewadjiban kita untuk mentjiptakan pimpinan gerakan massa jang demikian ini.

Singkatnja, kita harus menjesuaikan Partai kita dengan fase baru perdjuangan anti-kolonialisme, dengan situasi revolusioner jang berkembang tjepat. Terutama menjesuaikan Badan² Pimpinan Partai, sebagai langkah permulaan untuk menjesuaikan seluruh Partai kita dengan situasi baru. Ini wadjib kita lakukan djika kita mau mendjadikan Partai kita mampu memimpin perkembangan situasi lebih madju, djika kita tidak mau membuntut dibelakang perkembangan.

Hakekat dari penjesuaian Partai kita dengan situasi revolusioner jang berkembang tjepat, jalah lebih mengeratkan hubungan Partai kita dengan massa. Eratnja hubungan Partai dengan massa, mampunja Partai memetjahkan segala persoalan jang dihadapi oleh massa, adalah sjarat bagi kita untuk dapat mengatasi segala persoalan.

Kita menjesuaikan Partai dengan perkembangan situasi dengan maksud supaja tidak ada persoalan massa jang tidak terdjawab atau terpetjahkan oleh Partai. Oleh karena itu penjesuaian diri sudah tentu tidak terbatas pada Badan² Pimpinan sadja, tetapi seluruh Partai kita, ja, seluruh organisasi revolusioner, harus menjesuaikan diri. Tetapi jang per-tama² harus menjesuaikan diri jalah Badan² Pimpinan dan kader² tinggi dari Partai. Inilah jang memberi teladan dalam seluruh kehidupan Partai kita, dan inilah sjarat supaja seluruh Partai kita dan seluruh organisasi revolusioner Rakjat menjesuaikan diri dengan perkembangan situasi revolusioner jang tjepat.

Penjesuaian Badan² Pimpinan dengan situasi baru harus kita lakukan mulai dari CC sampai kepada Comite² jang paling bawah. Kita harus senantiasa bertanja dan harus memberikan djawaban jang djudjur tentang apakah Comite² kita sudah dalam keadaan

mampu memimpin perkembangan situasi. Ja, kita masing² harus bertanja dan mendjawab sendiri pertanjaan, apakah diri kita masing² sudah menjesuaikan diri dengan situasi baru, apakah diri kita masing² sudah mendjadi anggota Comite, anggota Departemen, anggota Biro, anggota Bagian, anggota fraksi Partai dalam Parlemen dan Konstituante serta DPRD, anggota redaksi Harian dan madjalah Partai, anggota fraksi organisasi massa jang se-baik²nja? Ataukah masih ada kekurangan² dan kesalahan² jang harus kita atasi dan perbaiki? Bagaimanakah dengan pekerdjaan politik dan organisasi kita, dan bagaimanakah dengan peladjaran teori dan peningkatan ideologi kita? Apakah kita sudah dengan sungguh² memetjahkan kesulitan² ekonomi dan sosial jang diderita oleh massa dewasa ini, terutama jang diderita oleh massa kaum buruh, kaum tani dan kaum miskin kota? Sampai kemana kita sudah memperteguh persatuan nasional dengan tetap bersandar pada persekutuan buruh dan tani? Apakah kita masing² sudah melakukan apa jang diwadjibkan oleh Konstitusi Partai kepada kita? Apa jang diwadjibkan oleh Plan III Tahun Partai pada kita? Apa jang ditugaskan se-hari² oleh Partai kepada kita?

Kita mulai dengan memeriksa pimpinan central Partai kita. Diantara dua Kongres, Partai kita dipimpin oleh CC. Sekarang, sesudah Partai kita mendjadi Partai jang besar dan pekerdjaan Partai sudah mulai sangat banjak, maka terasa sekali bahwa djumlah anggota CC terlalu sedikit. Tetapi tentang penambahan djumlah anggota CC baru dapat kita petjahkan dalam Kongres Nasional Partai jang akan datang.

Menurut Konstitusi Partai, selama masa antara dua rapat Pleno CC, Politbiro merupakan Badan Pimpinan Pusat dari Partai dan memimpin semua pekerdjaan Partai. Sedangkan Sekretariat CC melakukan pekerdjaan harian CC. Ini adalah tepat dalam keadaan dimana pekerdjaan Partai belum sangat banjak dan perkembangan situasi tidak begitu tjepat. Tetapi berhubung dengan pekerdjaan Partai sudah mulai sangat banjak dan perkembangan situasi adalah tjepat, sedangkan Politbiro tidak bisa sering² mengadakan rapat, maka tidak djarang bahwa Sekretariat CC tidak hanja harus mengerdjakan pekerdjaan harian dari CC, tetapi djuga dipaksa oleh keadaan untuk mengambil oper rol Badan Pimpinan Pusat Partai.

Akibatnja jalah, bahwa djika pekerdjaan harian berdjalan dengan baik, maka pekerdjaan pimpinan mendjadi terlantar. Atau sebaliknja, djika pekerdjaan pimpinan berdjalan dengan baik, maka pekerdjaan harian mendjadi terlantar. Kesimpulannja, ke-dua²nja, jaitu pekerdjaan pimpinan dan pekerdjaan harian, tidak berdjalan sebagaimana mestinja. Ini artinja, bahwa pimpinan central Partai, djika tidak segera ada perbaikan, akan tidak mampu mendjawab persoalan massa jang makin bertambah banjak dan makin kompleks.

Untuk mengatasi kepintjangan dalam pimpinan central seperti tersebut diatas, maka perlulah dipertimbangkan oleh Sidang Pleno CC sekarang ini untuk memilih Dewan Harian Politbiro, badan jang melakukan pimpinan selama masa antara dua sidang Politbiro berdasarkan garis² jang sudah ditetapkan oleh CC dan Politbiro. Dengan demikian Sekretariat CC, sesuai dengan Konstitusi Partai, benar² hanja mengerdjakan pekerdjaan harian CC dengan dibantu oleh Departemen², Biro², Staf Sekretariat CC dan lain² Badan pembantu jang dibutuhkan. Dewan Harian Politbiro diketuai oleh Ketua Politbiro, jaitu Sekretaris Djenderal CC. Sekretariat CC dipimpin oleh seorang Kepala dengan satu atau dua orang wakil Kepala.

Selain daripada itu, untuk menjempurnakan djalannja pimpinan, baik oleh CC maupun oleh Comite² Daerah Besar, perlu pula dipertimbangkan soal mengurangi rangkapan pekerdjaan anggota² CC, anggota² Dewan Harian CDB² dan kader² lainnja dari Partai jang sudah *terlalu banjak* pekerdjaannja. Pengurangan rangkapan ini berarti pula, bahwa promosi kader harus dilakukan setjara integral. Tidak merangkap samasekali tentu tidak mungkin, dan tidak baik untuk perkembangan kader jang bersangkutan sendiri. Untuk dapat melakukan promosi² setjara tepat Comite² jang bersangkutan harus benar² mengenal kader² jang berada dibawah pimpinannja.

Soal promosi kader tentu akan membawa Comite² jang bersangkutan terbentur pada soal keuangan. Djika organisasi Partai tidak berdjalan dan politik Partai tidak meresap dikalangan massa sebagaimana mestinja, soal keuangan tidak akan terpetjahkan, djuga walaupun tidak ada promosi kader. Djadi, masalah keuangan, jang memang timbul dalam hubungan dengan promosi² kader, tidak bisa dipetjahkan tanpa ditindjau dari sudut politik dan organisasi. Djika

sesuatu belum berdjalan beres, dan oleh karena itu tidak diadakan promosi², dan tidak dipetjahkan soal keuangan dari sudut politik dan organisasi, maka ini alamat bahwa Comite jang bersangkutan bukan hanja tidak akan madju, tetapi akan terus merosot, karena uang untuk ongkos hidup kader jang bekerdja penuh untuk Partai tidak akan datang dari langit.

Sikap sementara CDB² jang terlalu takut mempromosi kader, dalam situasi sekarang sangat merugikan. Ini bisa menimbulkan ketidakpuasan sementara kader dan berakibat bahwa makin banjak pekerdjaan jang tidak mampu diselesaikan oleh CDB² jang bersangkutan. Kelandjutannja jalah, bahwa CDB² jang bersangkutan akan tidak mampu mendjawab segala persoalan massa. Didalam Partai kita sekarang terdapat banjak kader muda, jang kurang berpengalaman tetapi umumnja mempunjai kesetiaan besar pada Partai dan Rakjat pekerdja, umumnja gesit bekerdja dan tanpa mementingkan diri sendiri. Dengan pimpinan jang baik dari Comite², promosi kader² muda ini tidak mempunjai arti lain ketjuali arti baik, menguntungkan Partai dan gerakan massa.

Soal lain jalah soal mengeratkan hubungan antara CC dengan Comite² jang langsung dibawahnja. Untuk ini, atas usul Departemen Organisasi dan diputuskan oleh Politbiro sudah dibentuk berbagai Biro Kepulauan sebagai badan pembantu Sekretariat CC, dan sudah dibentuk Comite² Pulau jang tidak lagi berhubungan dengan salahsatu CDB, tetapi langsung berhubungan dengan CC lewat Biro² Kepulauan. Dengan pembentukan Biro² Kepulauan dan pembentukan Comite² Pulau jang langsung dibawah CC, pimpinan CC dapat dirasakan lebih njata oleh CDB² dan Comite² Pulau jang bersangkutan.

Tetapi pembentukan Biro Kepulauan dan Comite² Pulau sadja belum tjukup untuk mengeratkan hubungan CC dengan Comite² jang langsung dibawahnja. Mengirim wakil CC se-waktu² atau mendetasir petugas² dari CC untuk membantu setjara langsung pekerdjaan Comite jang langsung dibawahnja, dan memanggil wakil² Comite² bawahan untuk melaporkan situasi dan pekerdjaan Partai didaerah jang bersangkutan kepada CC, adalah sangat dibutuhkan untuk mengeratkan hubungan antara CC dengan Comite² jang langsung dibawahnja. Kader² jang membawa laporan dari

bawah ke Comite atasannja, baik pada tingkat CC maupun pada tingkat Comite bawahan, harus dibiasakan diterima oleh badan pimpinan setjara kolektif, djadi tidak oleh perseorangan.

Hubungan „dari atas turun kebawah, dan dari bawah naik keatas" ini harus kita lakukan dengan tekanannja pada hubungan „dari atas turun kebawah". „Turun kebawah" bukan hanja sekedar menindjau atau sambil lalu berhubung dengan ada rapat umum dimana wakil Comite atasan berbitjara, tetapi harus berarti menjertai untuk beberapa waktu dalam memetjahkan kesulitan² jang dihadapi oleh Comite jang bersangkutan dan dengan tjermat mendengarkan kritik² dari bawah untuk disaring dan ditimbang mana jang tepat dan mana jang tidak tepat agar dapat mengambil langkah² perbaikan. Dengan demikian ini dapatlah dihindari, bahwa CC mengidealisasi Comite² jang langsung dibawahnja, mengira bahwa semuanja sudah berdjalan menurut petundjuk² jang sudah diberikan oleh CC, mengira bahwa keadaan intern Comite jang bersangkutan kompak dan mampu bertindak keluar dalam mendjalankan politik Partai, padahal djauh panggang daripada api. Dengan memberikan bantuan langsung jang dibutuhkan itu, pimpinan CC kepada Comite² bawahannja akan lebih terasa dan lebih njata.

Lebih² lagi pentingnja soal mengeratkan hubungan antara CDB² dan Comite² Pulau dengan CS², antara CS dengan CSS², antara CSS² dengan CR². Wakil² atau petugas² CDB dan Comite Pulau untuk Comite² bawahannja, terutama Comite² bawahan jang lemah, adalah sangat vital untuk meratakan perkembangan Partai, sebagai sjarat untuk meratakan kekuatan dan militansi Partai. Perhatian besar harus ditjurahkan pada pekerdjaan membantu Grup² dan Resort² Partai agar setjara ber-angsur² organisasi² basis Partai dapat mengambil bagian jang aktif dalam aksi² massa setempat dan selandjutnja mengambil inisiatif² untuk menggerakkan massa dilingkungannja. Program pemilihan umum Partai setempat supaja benar² didjadikan program aksi Rakjat se-hari² dan djangan hanja dikeluarkan dalam kampanje pemilihan sadja.

Dengan eratnja hubungan antara Comite² atasan dengan Comite² bawahan maka akan lebih terdjaminlah kebulatan fikiran dan kesatuan tindakan Partai kita, akan terdjaminlah djalannja disiplin

didalam Partai, akan terdjaminlah djalannja pimpinan dan djalannja pekerdjaan harian Partai.

Dalam hubungan dengan menjesuaikan diri dengan perkembangan situasi revolusioner jang tjepat, djuga penting soal menormalisasi kehidupan dan pekerdjaan Comite², Departemen², Biro², Bagian², Staf² Sekretariat dll. organisasi Partai. Terutama jang dimaksudkan jalah supaja rapat² periodik berdjalan, pembagian pekerdjaan lebih rasionil, pelaksanaan putusan² dikontrol, pengalaman² disimpulkan dan pengalaman jang baik tjepat dikembangkan.

Dengan mendjalankan semuanja ini kita memperkuat Badan² Pimpinan Partai, baik pimpinan central, maupun pimpinan² bawahan. Ini berarti kita menjesuaikan diri dengan fase baru perdjuangan anti-kolonialisme, dengan perkembangan situasi revolusioner jang tjepat. Ini berarti kita menjediakan tulangpunggung jang kuat bagi gerakan massa jang luas jang sekarang sedang bangkit. Dengan demikian ini dapat dilaksanakan metode memimpin jang lebih tepat, jaitu pemaduan seruan umum Partai dengan tuntunan kongkrit dan pemaduan pimpinan dengan massa.

Kita harus mejakini se-dalam²nja, bahwa tanpa memperkuat badan² pimpinan Partai, berarti tidak menjesuaikan diri dengan perkembangan situasi, berarti membiarkan gerakan massa jang luas tanpa tulangpunggung, dan dengan demikian berarti bahwa gerakan massa jang luas dan jang sedang bangkit sekarang tidak akan tahan lama, tidak dapat ditudjukan kepada sasarannja jang tepat dan tidak dapat ditingkatkan ketaraf jang lebih tinggi.

Kita harus mendjadikan Partai kita dan gerakan massa kita satu tubuh perkasa, jang berdiri tegak dan menatap kedepan, karena mempunjai tulangpunggung jang kuat. Untuk ini kita memperkuat seluruh badan pimpinan Partai dan memperkuat seluruh tubuh Partai kita.

B. Dengan Langkah² Jang Lebih Tegap Melaksanakan Plan III Tahun Pertama Partai

Pelaksanaan Plan III Tahun Pertama Mengenai Organisasi dan Pendidikan sudah berdjalan hampir dua tahun. Djadi, masih ada setahun lebih sedikit waktu untuk melaksanakan Plan ini.

Pada pokoknja selama hampir dua tahun jang sudah lewat, Plan ini berdjalan sebagaimana mestinja. Ketjuali dibeberapa tempat, seluruh Partai berada dalam kesibukan melaksanakan Plan ini. Belum pernah Partai kita dalam semangat jang tinggi dan merata dalam melaksanakan pekerdjaannja seperti dalam melaksanakan Plan III Tahun ini.

Terutama pelaksanaan Plan mengenai pendidikan menimbulkan antusiasme dan kegembiraan didalam Partai. Bagian pendidikan dari Plan III Tahun kita merupakan tranfusi darah segar didalam tubuh Partai kita. Ini dirasakan oleh seluruh kader dan anggota Partai jang aktif mengikuti kehidupan Partai.

Dalam hubungan dengan pendidikan, seminar² tentang berbagai masalah pada tingkat CC dan sementara CDB dalam tahun ke-2 Plan sudah berdjalan. Mengenai seminar ini perlu ditekankan tentang pentingnja seminar² tentang ekonomi berhubung sekarang banjaknja menondjol soal² ekonomi. Konferensi² teori, gerakan untuk mempeladjari buku² klasik, gerakan PBH, pendidikan untuk orang² progresif diluar Partai dan penerbitan madjalah² Partai oleh CDB² belum berdjalan dengan baik. Pembatjaan roman² revolusioner pada umumnja berdjalan, tetapi terbentur pada kekurangan buku.

Apakah kelemahan kita dalam pelaksanaan Plan III Tahun?

Dilihat dari pimpinan central jalah, bahwa ketika Plan III Tahun Pertama dibikin, kita tidak membentuk Biro Plan III Tahun jang bertugas untuk memimpin pelaksanaan Plan ini setjara central. Pimpinan central daripada pelaksanaan Plan praktis dikerdjakan oleh Departemen Organisasi (Bagian Penuntun). Dengan demikian tentu tidak mungkin berdjalan dengan baik. Pertama, karena Plan ini tidak hanja mengenai soal² organisasi, tetapi djuga mengenai soal² lain, terutama soal² pendidikan. Kedua, Departemen Organisasi sudah tjukup banjak pekerdjaan rutinenja, sehingga tidak mungkin mentjurahkan sebagian besar perhatiannja kepada pelaksanaan Plan, seperti misalnja mengontrol supaja laporan² tentang pelaksanaan Plan datang periodik kepada CC, membatja semua laporan, menganalisa laporan² dan dengan persetudjuan Politbiro memberi petundjuk² supaja Plan berdjalan lebih baik kepada Comite² jang memerlukan petundjuk atau kepada seluruh Comite

jang dibawah pimpinan CC. Mengingat ini semua adalah perlu sidang CC kita kali ini mempertimbangkan untuk membentuk Biro Plan III Tahun, agar pelaksanaan Plan selandjutnja berdjalan lebih lantjar.

Ada beberapa kekurangan penting lain jang perlu dikemukakan disini dalam hubungan dengan pelaksanaan Plan.

Pertama, belum semua Comite jang dibawah pimpinan CC setjara periodik melaporkan pelaksanaan Plan didaerahnja. Pada umumnja CC mengetahui tentang pelaksanaan Plan jang agak lengkap dari laporan Sekretaris CDB dalam rapat Pleno atau Konferensi CDB. Atau dari laporan² lisan, sebagai djawaban atas pertanjaan CC pada anggota pimpinan CDB.

Kedua, masih ada Comite² atau kader² Partai jang berpendapat bahwa Plan III Tahun Pertama dalam soal organisasi hanja mengenai pendaftaran kembali dan pengorganisasian anggota dalam Grup, sedangkan mengenai pendidikan hanja mengenai sekolah² dan kursus² Partai. Peningkatan dari tjalon mendjadi anggota masih banjak jang dilalaikan, demikian djuga perintjian tugas² jang harus dikerdjakan oleh fraksi² organisasi² massa dalam rangka pelaksanaan Plan III Tahun, peluasan anggota jang berentjana untuk daerah² jang memerlukannja, dan sampai sekarang umumnja belum merentjanakan peluasan anggota untuk mentjapai djatah jang sudah ditetapkan buat seluruh negeri dalam tahun terachir Plan. Akibat dari tidak diadakannja peluasan anggota untuk daerah jang memerlukan, maka terdjadilah dalam pemilihan DPRD jl. bahwa untuk banjak daerah djumlah pemilih tidak seimbang dengan djumlah anggota Partai. Ada kabupaten jang djumlah anggota Partai hanja 4.000 sedangkan pemilihnja 120.000. Kurangnja djumlah anggota Partai ini berarti bahwa stabilitet pemilih Partai tidak terdjamin.

Mengenai bagian pendidikan untuk selandjutnja, disamping meneruskan pelaksanaan sekolah² dan kursus², supaja ada perhatian pada pelaksanaan jang lebih merata dari seminar², PBH, konferensi² teori, gerakan mempeladjari buku² klasik, pendidikan untuk orang² progresif diluar Partai dan penerbitan² madjalah² Partai oleh CDB². Penerbitan roman² revolusioner harus diperbanjak. Mengenai pendidikan diminta perhatian chusus pendidikan untuk

anggota² Partai jang duduk didalam Dewan² Perwakilan dipusat dan didaerah, untuk jang mendjadi anggota² DPD² dan jang mendjadi Kepala² Daerah. Agar pekerdjaan mereka di Dewan² Perwakilan dan di-pemerintahan² daerah tidak mengetjewakan massa anggota dan pemilih, mereka harus benar² mendjadi teladan pedjuang revolusioner. Untuk ini mereka harus mendapat didikan teori dan ideologi jang terus-menerus dan chusus dari Partai. Lingkungan mereka mengharuskan Partai memperhatikan chusus pendidikan politik dan ideologi mereka.

Ketiga, bahwa Plan kita djuga mengenai soal keuangan, jaitu tentang pemasukan iuran, usaha² produktif dan donasi. Umumnja anggota² mau membajar iuran, tetapi masih banjak Comite² jang bersangkutan jang „ogah" menarik iuran, karena kurang telaten dalam mengumpulkan djumlah uang jang ketjil². Selain daripada itu masih ada djuga Comite jang tidak menjampaikan bagian dari Comite atasan, tentu dengan alasan banjak sekali.

Ke-empat, selain jang sudah dikemukakan diatas, Plan kita djuga meliputi soal peluasan CSS dan CR, meliputi soal mengatur konferensi², soal kantor Partai, soal pekerdja-penuh (fulltimer), soal inventaris Comite, dsb.

Berhubung masih ada bagian² dari Plan III Tahun jang belum berdjalan sebagaimana mestinja, maka adalah kewadjiban seluruh Comite untuk memeriksa kembali bagian² mana jang mendjadi bagiannja jang belum dilaksanakan atau belum dilaksanakan dengan baik, agar waktu jang masih ada dapat digunakan untuk mengedjar segala kekurangan dalam pelaksanaan Plan. Djangan dibuang waktu jang masih ada untuk memenangkan Plan III Tahun Pertama Partai!

Dalam rangka pelaksanaan Plan III Tahun kita, marilah kita tugaskan kepada diri kita masing² dan kita serukan kepada seluruh anggota Partai kita supaja menjambut hari ulangtahun Proklamasi RI pada tanggal 17 Agustus 1958 dengan pelaksanaan rentjana bahwa di Djawa semua CR sudah melaksanakan Sekolah² Politik untuk anggota² baru dan tjalonanggota² Partai. Untuk luar Djawa sambutlah tahun baru 1 Djanuari 1959 dengan semua CR sudah melaksanakan Sekolah² Politik. Untuk keperluan ini CC segera akan menerbitkan buku peladjaran untuk Sekolah Politik.

Djadikanlah tahun terachir Plan III Tahun Pertama sebagai tahun konsolidasi Grup², Resort dan semua Comite Partai.

Segeralah adakan keseimbangan antara djumlah anggota dan pemilih Partai. Luaskan organisasi² massa, terutama organisasi² buruh, tani, pemuda dan wanita sebagai sjarat terpenting untuk perluasan keanggotaan Partai.

Sambutlah Kongres ke-VI Partai jad. dengan melipatgandakan keanggotaan Partai setjara berentjana, dengan mengkonsolidasi organisasi² Partai, dan dengan kegiatan² jang besar dilapangan kebudajaan.

Kalahkan Konsepsi Politik Amerika merupakan ringkasan pidato Kawan D.N. Aidit pada peringatan Hari 1 Mei 1958 dikantor CC PKI. Dalam pidato ini ditjanangkan usaha2 keras kaum imperialis Amerika jang, setelah mengalami kegagalan dengan pemberontakan „PRRI-Permesta", berusaha untuk menggantikan kabinet Djuanda dengan kabinet menurut keinginan mereka, jaitu kabinet Masjumi-NU kontra PNI-PKI atau kabinet Masjumi-NU-PNI kontra PKI, jang maksudnja mengisolasi PKI. Ditekankan oleh Kawan Aidit bahwa konsepsi politik ini adalah konsepsi perpetjahan nasional dan pasti ditentang oleh Rakjat Indonesia.

Achirnja ditandaskan bahwa djika perlu perubahan kabinet, maka satu2nja djalan untuk keselamatan Indonesia pada tingkat sekarang jalah Kabinet Gotongrojong menurut Konsepsi Presiden Sukarno.

KALAHKAN KONSEPSI POLITIK AMERIKA SERIKAT

Pada penutup Manifesnja jang terkenal, jaitu Manifes Partai Komunis, jang untuk pertamakalinja diterbitkan di London dalam tahun 1848, Karl Marx dan Friedrich Engels menjerukan „Kaum buruh semua negeri, bersatulah!". Seruan singkat ini, telah memberi inspirasi kepada klas buruh diseluruh dunia, dimulai dengan klas buruh Eropa dan Amerika untuk mempersatukan diri dan memperhebat aksi2nja melawan kapitalisme.

Ketika Kongres Internasionale di Paris dalam tahun 1889 menetapkan hari 1 Mei 1890 sebagai hari menuntut turunnja djamkerdja dan menuntut adanja undang2 sosial, adalah djuga didjiwai oleh seruan bersatu dari Marx.

Sekarang hari 1 Mei sudah mendjadi hari kemenangan dan hari demonstrasi persatuan kaum buruh diseluruh dunia. Djuga kaum buruh Indonesia merajakan hari kemenangan ini, artinja ambil bagian dalam demonstrasi persatuan serta kekuatan klas buruh sedunia.

Dalam Marx menjerukan supaja kaum buruh semua negeri bersatu, Marx tidak mem-beda2kan kaum buruh, baik karena agamanja, kejakinan politiknja, kebangsaannja, kedudukan sosialnja maupun karena lain2nja. Semua kaum buruh harus bersatu! Semangat mempersatukan semua kaum buruh, inilah jang mendjiwai kita kaum Komunis Indonesia dalam mempersatukan kaum buruh Indonesia.

Otak Orang2 Jang Djudjur Sudah Tidak Menerima Kapitalisme Lagi

Dunia kita sekarang ditandai oleh berdirinja dan makin kuatnja kekuasaan2 negara jang dipimpin oleh klas buruh, dan ditandai oleh makin madju dan makin berkuasanja gerakan kemerdeka-

an nasional, dimana kaum buruh merupakan kekuatan penggerak jang utama.

Penduduk dunia jang sekarang berdjumlah kira² 2.700 djuta, 1000 djuta diantaranja terdapat dinegeri-negeri kubu sosialis, jaitu negeri² dimana klas buruh, jang bersatu dengan kaum pekerdja lainnja, sudah mendjadi tuan atas negerinja, sudah memegang kendali pemerintahan. 700 djuta adalah penduduk negeri² jang baru merdeka dan anti-imperialisme, dimana klas buruh berdiri dibarisan paling depan dalam mempertahankan dan mengkonsolidasi kemerdekaan nasional. Tinggal hanja 400 djuta penduduk negeri² kapitalis seperti Amerika, Inggeris, Perantjis, Italia dll., tetapi djuga dinegeri² ini kekuatan dan persatuan kaum buruh sudah membikin tidak enak tidur kaum kapitalis monopoli. Kubu sosialis, kemerdekaan nasional dan perdamaian makin hari makin bertambah kuat, sedangkan kubu imperialis dan peperangan makin merosot „martabatnja" dan makin bertambah lemah kekuatannja.

Sekarang tjita² Sosialisme djuga sudah masuk kedalam fikiran inteligensia jang djudjur dan patriot² diluar klas buruh dan Rakjat pekerdja lainnja. Kapitalisme sudah tidak mempunjai pasaran lagi didalam otak orang² jang djudjur didunia.

Sukses² Sosialisme didunia dibidang ekonomi, politik, sosial, ilmu, kebudajaan dan militer telah mengangkat martabat klas buruh dimana sadja mereka berada, sebaliknja telah membikin orang² jang djudjur dan berfikir sehat muak dan mengepalkan tindjunja melihat kapitalisme dengan akibat²nja.

Kaum imperialis sekarang bukan hanja sudah ter-kentjing² berhadapan dengan Sosialisme dan Rakjat² jang gigih berdjuang untuk kemerdekaan nasional, tetapi mereka sudah ter-kentjing² sebelum masuk kakus. Hanja orang² jang berfikir menurut norma² abad jang lalu jang tidak merasakan dan tidak mengerti tragedi imperialisme sekarang.

Kita Berada Didjalan Jang Benar

Perkembangan gerakan buruh dinegeri kita sekarang, ditandai oleh persatuan kaum buruh Indonesia jang makin luas, ditandai oleh makin berkembangnja serikatburuh² revolusioner, oleh Badan²

Kerdjasama SB² Pemerintah dan Badan² Kerdjasama SB² modal asing, oleh kerdjasama semua vaksentral, oleh kerdjasama SB² dengan organisasi² Rakjat lainnja, dan oleh kerdjasama kaum buruh dan golongan Rakjat lainnja dengan Angkatan Perang Republik Indonesia. Ini mengingatkan kita kembali kepada Revolusi Agustus. Ini adalah pendjelmaan kembali dari semangat Revolusi Agustus. Ini menundjukkan bahwa kita berada didjalan jang benar kembali, djalan Revolusi Agustus!

Hari 1 Mei tahun ini dirajakan bersama oleh panitia² dimana ikutserta semua vaksentral, tidak pandang apakah jang dipimpin oleh Nasionalis, Komunis, orang² dari partai² Islam atau partai² Agama lainnja. Demonstrasi persatuan kaum buruh ini merupakan teladan untuk partai² politik demokratis, untuk lebih memperkuat persatuan nasional kita. Saja menjerukan atasnama CC PKI, supaja teladan jang diberikan oleh kaum buruh Indonesia ini direnungkan oleh partai² politik demokratis agar persatuan nasional mendjadi lebih kuat.

Patriotisme Mendjadi Sempurna Karena Internasionalisme

Hari 1 Mei tahun ini dirajakan dimana Menteri Perburuhan dan Kabinet Karya mengandjurkan supaja kaum buruh terus berdjuang untuk mengkonsolidasi kemerdekaan nasional, supaja kaum buruh Indonesia lebih memperkuat persatuannja dan supaja kaum buruh Indonesia tidak hanja diliputi oleh semangat bersatu didalam negeri, tetapi djuga harus bersatu dengan kaum buruh negeri² Asia-Afrika dan dengan kaum buruh diseluruh dunia.

Andjuran² fihak resmi ini merupakan palu-godam jang dihentakkan diatas kepala kaum sovinis burdjuis atau kaum nasionalis sempit, jang dalam bagian kedua dari abad ke-20 ini, jang dalam zaman dimana Sosialisme sudah mendjadi sistim dunia, masih suka muntjul dengan politik rasial, anti-warna kulit atau anti lain²nja jang menundjukkan kesempitan fikiran. Klas buruh Indonesia sebagaimana djuga klas buruh di-negeri² lain akan berdjuang terus melawan sovinisme burdjuis ini, karena ini adalah basis ideologi fasisme, adalah anti-buruh, anti-Rakjat dan oleh karena itu ter-

kutuk.

Tetapi, peringatan 1 Mei kita tahun ini mempunjai segi jang lain dari internasionalisme, jaitu segi patriotisme. Hari 1 Mei tahun ini kita peringati dengan semangat jang tinggi untuk mengalahkan imperialisme, untuk merebut Irian Barat, untuk menumpas kaum pemberontak „PRRI", untuk menggulung kegiatan² subversif asing, menggulung komplotan bandit² Kuomintang, untuk memperbesar produksi di-perusahaan² milik negara, dsb. Ini membuktikan bahwa internasionalisme kita berdiri diatas bumi jang njata, jaitu bumi patriotisme. Ini membuktikan bahwa kita bukan kaum nihilis nasional atau kaum kosmopolitan, jang karena „internasionalismenja" mengingkari kepentingan nasional, mentjemoohkan tjinta tanahair. Kita menentang mereka, jang karena „ideologinja", atau karena „humanismenja", atau karena „agamanja" tidak berpidjak pada bumi jang njata, bumi patriotisme. Kita bukanlah warga-dunia jang tidak punja tanahair. Nihilisme nasional dan kosmopolitanisme adalah ideologi imperialis, untuk mengebiri perdjuangan nasional Rakjat² terdjadjah dan tergantung.

Internasionalisme kita adalah internasionalisme jang berpidjak pada bumi, bumi patriotisme. Patriotisme kita mendjadi sempurna karena internasionalisme kita. Patriotisme kita bukan sovinisme burdjuis atau nasionalisme sempit.

Perspektif Sesudah "PRRI" Ditindas

Awal Revolusi Agustus dan pengambilalihan perusahaan² Belanda dalam rangka perdjuangan Irian Barat penuh dengan bukti², bahwa kaum buruh adalah patriot² sedjati. Bukanlah pemilik² saham dan direktur² NV, dan bukanlah kaum burdjuis liberal jang mengambilalih perusahaan² itu, tetapi kaum buruh.

Hari 1 Mei tahun ini kita peringati dalam suasana dimana kekuatan nasional kita sebagian besar sedang dikerahkan untuk menghantjurkan kaum pemberontak „PRRI". Pada waktu sekarang sudah banjak orang jang memikirkan: apa sesudah „PRRI" dikalahkan. Kita sebenarnja kurang suka membitjarakan: apa sesudah „PRRI" dikalahkan. Kita lebih senang berfikir dan berbuat untuk setjepat mungkin mengalahkan „PRRI". Tetapi karena soal

perspektif sesudah „PRRI" dikalahkan sudah mendjadi pembitjaraan para politisi dinegeri kita, sudah mendjadi persoalan kementerian² luarnegeri negeri² imperialis, maka kita djuga harus memikirkan soal ini.

Djadi apakah perspektif keadaan sesudah pemberontak „PRRI" ditindas?

Sebelum saja mendjawab pertanjaan ini perlu saja mengulangi, bahwa sedjak „PRRI" diproklamirkan pada tanggal 15 Februari 1958 kaum Komunis Indonesia sudah berkejakinan, bahwa pemberontak kontra-revolusioner ini pasti dapat ditindas asal Pemerintah bertindak tegas, tjepat dan dengan kekuatan jang djauh lebih besar daripada kekuatan kaum pemberontak. Kejakinan ini timbul karena kepertjajaan kita akan kekuatan Rakjat dan kemampuan Angkatan Perang Republik Indonesia. Ternjata hal ini tidak meleset, kehantjuran kaum pemberontak hanja tinggal menunggu waktu sadja, asal kita terus berdjuang melawan pemberontak dan kewaspadaan terus ada pada kita.

Ada orang² bertanja kepada saja, bagaimana mengenai persatuan nasional sesudah „PRRI" dikalahkan?

Setjara objektif dan djika tergantung kepada Rakjat Indonesia, persatuan nasional sesudah „PRRI" ditindas akan bertambah kuat, martabat kabinet Djuanda akan lebih meningkat, keadaan dalam Angkatan Perang Indonesia akan bertambah baik sehingga terbukalah kemungkinan untuk mengkonsolidasi kemerdekaan nasional Indonesia, untuk pembangunan dilapangan ekonomi. Sebaliknja, politik petjahbelah akan lebih dibentji oleh Rakjat, „prestise" kaum imperialis, kaum reaksioner dalamnegeri dan semua partai jang menjokong „PRRI" akan sangat merosot.

Konsep Politik Kaum Imperialis Amerika Sesudah "PRRI" Hantjur

Tetapi, kita djuga mengetahui bahwa kaum imperialis luarnegeri dan kaum reaksioner dalamnegeri tidak akan berdiam diri. Sementara pers Amerika misalnja sudah berani menulis, bahwa setjara militer kaum pemberontak memang kalah, tetapi setjara politik mereka menang karena tuan Hatta akan mengganti keda-

dukan Perdana Menteri Djuanda.

Kita djuga mengetahui, bahwa kaum imperialis Amerika, disamping sudah tidak mempunjai harapan² terhadap kemampuan kaum pemberontak, sekarang sangat giat mengusahakan adanja perubahan politik di Indonesia sesudah „PRRI" dikalahkan, perubahan politik jang sudah tentu langsung bertentangan dengan keinginan Rakjat Indonesia.

Kaum imperialis Amerika Serikat mempunjai konsepsi untuk menggantikan kabinet Djuanda dengan kabinet Masjumi-NU dan menempatkan PNI-PKI sebagai oposisi. Djika ini tidak berhasil, maka diusahakan terbentuknja kabinet Masjumi-NU-PNI dengan menempatkan PKI sebagai oposisi. Dengan tindakan² ini kaum imperialis Amerika dan kakitangannja didalamnegeri mentjoba memetjahbelah kekuatan nasional Rakjat Indonesia. Dengan ini mereka harap akan dapat mengembalikan „prestise" Masjumi, jang berarti pula mengembalikan „prestise" PSI, sebagai sjarat untuk memperkuat kedudukan kaum imperialis sendiri.

Disamping itu kaum imperialis Amerika djuga akan mendekati golongan² militer, termasuk golongan jang sekarang menumpas pemberontak „PRRI", dan menggunakan golongan² militer untuk menekan Presiden Sukarno supaja menjetudjui kabinet jang mereka inginkan. Djika semuanja ini berhasil, maka tertjiptalah sjarat² untuk menekan perkembangan gerakan progresif dan nasionalis, untuk mengganti pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia dengan perwira² kepertjajaan mereka, untuk meluaskan gerombolan DI-TII dan untuk memperkuat kolonialisme di Irian Barat. Dengan demikian tertutuplah kemungkinan bagi Rakjat Indonesia untuk mengkonsolidasi kemerdekaan nasional Indonesia dan untuk membangun ekonomi negerinja.

Tetapi saja jakin, bahwa blauwdruk atau konsepsi politik kaum imperialis Amerika, baik jang pertama, jaitu kombinasi Masjumi-NU, maupun jang kedua, jaitu kombinasi Masjumi-NU-PNI akan mendapat tentangan sengit dari Rakjat Indonesia dan dari pemimpin² Indonesia jang realis. Konsepsi politik ini adalah konsepsi perpetjahan nasional, konsepsi politik ini tidak mungkin mentjiptakan perdamaian nasional jang diperlukan untuk menindas habis gerombolan DI-TII, untuk menggulung komplotan² subversif asing, untuk

mengusir djauh intervensi asing, untuk membebaskan Irian Barat dan untuk pembangunan ekonomi.

Dalam situasi sekarang tidak seorangpun patriot Indonesia sudi melihat pemimpin² Masjumi dan PSI jang sudah memimpin pemberontakan „PRRI" atau se-kurang²nja tidak menghukum pemberontakan „PRRI" duduk dalam putjuk pemerintahan. Djuga orang seperti Hatta jang menentang perdjuangan pembebasan Irian Barat dan jang sudah memberi sokongan moril jang sangat besar kepada kaum pemberontak „PRRI" bukan seorang jang dapat diterima oleh majoritet Rakjat Indonesia untuk memegang kemudi pemerintah Indonesia. Rakjat Indonesia tidak akan suka diperintah oleh orang² pro-Amerika, karena sebagaimana dikatakan dalam statemen Perdana Menteri Djuanda tanggal 30 April jl., Amerika telah terbukti membantu sendjata kepada kaum pemberontak „PRRI". Hanja orang gila, jang suka menerima konsepsi politik Amerika Serikat, baik jang pertama maupun jang kedua. Tetapi orang gila tidak banjak di Indonesia.

Sesudah "PRRI" Hantjur Persatuan Nasional Lebih2 Lagi Dibutuhkan

Kita tidak boleh menutup mata, bahwa dikalangan mereka jang sekarang melawan kaum pemberontak ada orang² naif, jang mengira bahwa djika „PRRI" sudah dikalahkan kaum reaksioner atau kaum kanan sudah dikalahkan samasekali, dan oleh karena itu persatuan nasional sudah tidak diperlukan lagi, dan persatuan dengan kaum kanan untuk menindas gerakan revolusioner sudah mendjadi urgen. Ini samasekali tidak sesuai dengan kenjataan.

Ketika belum ada pemberontakan „PRRI" kita sudah berdjuang untuk berbagai tudjuan jang sama, untuk membebaskan Irian Barat, untuk memusnahkan gerombolan DI-TII, untuk menggulung subversif asing, untuk pembangunan ekonomi negeri dsb. Semuanja ini masih harus kita lakukan, terutama sesudah „PRRI" dihantjurkan. Dalam situasi sekarang, semua persoalan ini hanja dapat dilaksanakan djika kaum Komunis mengambil bagian aktif ber-sama² kaum Nasionalis dan kaum Agama jang patriotik. Djika tidak demikian, Indonesia akan mendjadi makanan empuk bagi kaum impe-

rialis dan bagi kaum reaksioner dalamnegeri.

Pendeknja, sesudah „PRRI" dihantjurkan bukanlah harus diikuti oleh memetjahbelah potensi nasional, tetapi persatuan nasional lebih² lagi dibutuhkan oleh Rakjat Indonesia.

Produksi Perusahaan² Negara Harus Diperbesar, Selama Politik Pemerintah Anti-Imperialisme

Dalam perajaan 1 Mei tahun ini, Menteri Perburuhan Kabinet Karya djuga menekankan tentang pentingnja memperbesar produksi. Mengenai ini, sikap PKI sangat djelas. Sedjak diambilalihnja perusahaan² Belanda dalam rangka perdjuangan Irian Barat, PKI dengan suara jang lantang menjerukan kepada kaum buruh, terutama kaum Komunis jang bekerdja di-perusahaan² jang diambilalih itu, supaja mengambil bagian jang aktif dalam memperbesar produksi. Seruan ini tidak sia², kaum buruh memang berusaha untuk memperbesar produksi dan untuk mentjegah sabotase di-perusahaan².

Selama Republik Indonesia diperintah oleh pemerintah jang anti-imperialisme, jang mempunjai kemauan baik terhadap Rakjat Indonesia, adalah kewadjiban kaum Komunis dan kaum buruh untuk memperbesar produksi di-perusahaan² negara, karena ini berarti memperkuat pemerintah jang disokong oleh kaum Komunis dan kaum buruh.

PKI tidak pernah dan tidak akan menjerukan untuk memperbesar produksi perusahaan-negara, djika pemerintah Republik berada ditangan agen² imperialis, ditangan orang² jang tidak bersahabat dengan kaum buruh dan Rakjat Indonesia, karena memperbesar produksi dalam keadaan demikian berarti memperkuat pemerintah jang anti-Rakjat dan djika pemerintah jang demikian ini kuat maka pukulan jang dihantamkan kepada Rakjat Indonesia djuga akan kuat, dan penderitaan Rakjat akan lebih bertambah hebat.

Sikap PKI Terhadap Agresi Amerika Serikat

Statemen Perdana Menteri Djuanda dan pidato Presiden Sukarno di Bandung pada tanggal 3 Mei jl., menegaskan bahwa Rakjat Indonesia sekarang bukan lagi hanja menghadapi imperialisme Belanda sebagai musuh resmi, tetapi djuga menghadapi imperialisme Amerika Serikat. Tepat sekali, bahwa Presiden Sukarno tidak lagi berbitjara tentang intervensi, tetapi sudah tentang agresi. Kenjataannja memang agresi, baik oleh Amerika Serikat, maupun oleh begundalnja Kuomintang.

Saja sekali lagi menegaskan, bahwa Partai Komunis Indonesia tidak akan melantjarkan propaganda mensita atau menasionalisasi perusahaan² Amerika Serikat di Indonesia, selama negeri ini tidak memberikan bantuan sendjata kepada kaum kolonialis Belanda atau kepada kaum pemberontak untuk menjerang Republik Indonesia.

Djadi, kalau Amerika Serikat tidak segera menghentikan bantuan sendjatanja kepada kaum pemberontak „PRRI" maka PKI akan melantjarkan propaganda tentang mengambilalih perusahaan² Amerika Serikat di Indonesia. Dan djika ini terdjadi, pengalaman seperti jang sudah dialami oleh perusahaan² Belanda akan dialami djuga oleh Amerika Serikat.

Bahwa Amerika memberi bantuan politik kepada Belanda dan kepada kaum pemberontak, kaum Komunis Indonesia anggap biasa buat Amerika, dan bisa diladeni setjara biasa pula. Tetapi bantuan sendjata bukan soal biasa, dan obatnja hanja satu: ambilalih perusahaan² Amerika Serikat, djika tidak segera dihentikan. Diambilalih atau tidak diambilalih, toh Amerika Serikat sudah mengadakan agresi terhadap Republik Indonesia.

Pertahankan Terus Kabinet Djuanda, Atau Bentuk Kabinet Gotongrojong Menurut Konsepsi Presiden Sukarno

Achirnja saja menjampaikan salam kepada kaum buruh jang tidak dapat merajakan hari 1 Mei setjara meriah karena masih berada di-daerah² jang masih dikuasai oleh kaum pemberontak, baik di Sumatera Barat maupun di Minahasa. Saja djuga menjampaikan salam CC PKI kepada anak² kaum buruh dan anak² Rakjat dalam Angkatan Perang Republik Indonesia jang karena tugasnja membasmi pemberontak tidak dapat ikut merajakan hari 1 Mei.

Selandjutnja saja mengadjak seluruh Rakjat Indonesia, untuk dengan semangat hari 1 Mei tahun ini, jaitu semangat persatuan kaum buruh, persatuan kaum buruh dengan golongan² Rakjat lainnja, persatuan Rakjat dengan Angkatan Perang dan dengan Pemerintah, melaksanakan tugas² terdekat, jaitu tugas²:

1. Mengalahkan kaum pemberontak „PRRI" sampai ke-akar²-nja, artinja mengalahkan kaum pemberontak „PRRI" jang diikuti dengan menghantjurkan sumber² kekuatannja, jaitu gerombolan DI-TII, komplotan bandit² Kuomintang, kaum teroris kakitangan Lubis, gerakan subversif asing, dan kakitangan² imperialis lainnja.

2. Mengalahkan konsepsi politik Amerika Serikat, baik jang pertama, jaitu kabinet kombinasi Masjumi-NU kontra PNI-PKI, maupun jang kedua, jaitu kabinet kombinasi Masjumi-NU-PNI kontra PKI karena konsepsi ini ditudjukan untuk memetjahbelah kekuatan nasional Rakjat Indonesia. Demikian djuga harus dilawan tiap² pertjobaan Amerika Serikat menggunakan tokoh² dalam Angkatan Perang Republik Indonesia untuk menekan Presiden Sukarno.

Djika tergantung pada PKI, sesudah „PRRI" dihantjurkan, kabinet Djuanda sebaiknja terus dipertahankan, selama politiknja tetap ditudjukan untuk mengkonsolidasi kemerdekaan nasional dan untuk perdamaian dunia. Tetapi, djika toh mau dirongrong terus dan mau didjatuhkan, maka satu² gantinja jalah Kabinet Gotongrojong menurut Konsepsi Presiden Sukarno. Untuk keselamatan Indonesia pada tingkat sekarang djalan lain tidak ada.

Berikut ini adalah tanjadjawab lengkap antara Istvan Kende, wartawan luarnegeri suratkabar *Népszabadság* (harian Partai Buruh Sosialis Hongaria) dengan Kawan D.N. Aidit di Djakarta. Tanjadjawab ini telah dimuat dalam *Népszabadság* tanggal 8 Mei 1958.

SESUDAH PEMBERONTAKAN „PRRI" DIKALAHKAN PERSATUAN NASIONAL LEBIH2 LAGI DIPERLUKAN

Pertanjaan: Bagaimana perspektif keadaan sesudah pemberontakan „PRRI" ditindas? Apakah menurut pendapat Saudara persatuan nasional Rakjat Indonesia akan bertambah kuat sesudah itu?

Djawab: Sebelum saja menerangkan pendapat kami mengenai perspektif sesudah pemberontakan „PRRI" ditindas perlu saja njatakan, bahwa sedjak „PRRI" diproklamasikan pada tanggal 15 Februari 1958 kami sudah berkejakinan bahwa pemberontakan kontra-revolusioner ini pasti dapat ditindas, dan perang-saudara setjara besar2an dapat dihindari asal Pemerintah bertindak tegas, tjepat dan dengan kekuatan jang djauh lebih besar daripada kekuatan kaum pemberontak. Kami djuga berkejakinan bahwa intervensi bersendjata asing setjara terang2an dapat dihindari djika Pemerintah sentral dapat menguasai keadaan dalamnegeri. Ternjata bahwa perkiraan kami tidak meleset, dan sekarang kehantjuran kaum pemberontak hanja menunggu waktu sadja, walaupun untuk menghantjurkan seluruh kekuatan pemberontak masih menghendaki tjurahan perhatian jang besar, baik dari Pemerintah dan Angkatan Perang Republik Indonesia, maupun dari seluruh Rakjat.

Sesudah „PRRI" selesai ditindas, setjara objektif persatuan nasional seharusnja bertambah kuat, prestise kabinet Djuanda akan lebih meningkat, keadaan dalam Angkatan Perang akan bertambah baik sehingga terbukalah kemungkinan2 baru untuk mengkonsolidasi kemerdekaan nasional Indonesia dan untuk pembangunan dilapangan ekonomi. Sebaliknja „prestise" kaum imperialis dan kaum reaksioner dalamnegeri akan mendjadi lebih merosot lagi.

Tetapi kami mengetahui bahwa kaum imperialis luarnegeri dan kaum reaksioner dalamnegeri tidak akan berdiam diri. Sementara pers Amerika misalnja sudah berani menulis, bahwa setjara militer kaum pemberontak memang kalah, tetapi setjara politik mereka

akan menang, karena kata mereka tuan Hatta akan menggantikan kedudukan PM Djuanda. Kami djuga mengetahui bahwa kaum imperialis Amerika, disamping sudah tidak mempunjai harapan lagi terhadap kaum pemberontak, sekarang sangat giat mengusahakan perubahan politik di Indonesia jang langsung bertentangan dengan keinginan Rakjat Indonesia dan keinginan Presiden Sukarno. Konsepsi mereka jalah mengganti kabinet Djuanda dengan kabinet Masjumi-NU dan menempatkan PNI-PKI sebagai oposisi. Atau, djika ini tidak berhasil, membentuk kabinet Masjumi-NU-PNI jang ditudjukan untuk memukul PKI. Dengan tindakan2 ini mereka berharap akan dapat mengembalikan „prestise" Masjumi, jang berarti pula mengembalikan „prestise" PSI, sebagai sjarat untuk mengangkat kembali kedudukan kaum imperialis jang sudah sangat merosot di Indonesia.

Disamping itu kaum imperialis Amerika djuga mendekati golongan2 militer dan menggunakan golongan2 militer untuk menekan Presiden Sukarno supaja menjetudjui pembentukan kabinet sebagaimana mereka inginkan. Djika semuanja ini berhasil maka tertjiptalah sjarat2 untuk menekan perkembangan gerakan progresif dan nasionalis, untuk mengganti pimpinan Angkatan Perang dengan perwira2 kepertjajaan mereka, untuk meluaskan gerombolan2 DI-TII dan untuk memperkuat kolonialisme di Irian Barat. Dengan demikian tertutuplah kemungkinan bagi Rakjat Indonesia untuk mengkonsolidasi kemerdekaan nasional dan membangun ekonomi negerinja.

Tetapi saja jakin bahwa konsepsi politik kaum imperialis Amerika tersebut akan mendapat perlawanan2 sengit dari Rakjat Indonesia dan dari pemimpin2nja jang realis. Tidak seorangpun patriot Indonesia jang sudi melihat pemimpin2 Masjumi jang sudah terlibat dalam „Teror Tjikini" untuk membunuh Presiden Sukarno, jang sudah memberontak atau se-kurang2nja tidak menghukum pemberontak „PRRI" duduk didalam pemerintahan. Djuga orang seperti Hatta jang menentang perdjuangan pembebasan Irian Barat, jang setjara terang2an memberi sokongan moril kepada pemberontak dan jang sudah ditjalonkan oleh teroris untuk djadi Presiden djika Presiden Sukarno dapat mereka bunuh, bukanlah seorang jang dapat diterima oleh Rakjat Indonesia untuk memegang ke-

mudi Pemerintah Indonesia.

Saja memang tidak menutup mata, bahwa dikalangan sementara pemimpin² Indonesia sekarang ada orang² jang naif, jang mengira bahwa djika „PRRI" sudah dikalahkan berarti kaum reaksi sudah dikalahkan samasekali dan karena itu persatuan nasional sudah tidak diperlukan lagi. Ini adalah tidak sesuai dengan kenjataan, dan ini adalah sepenuhnja sedjalan dengan keinginan dan dengan konsepsi kaum imperialis AS.

Dengan kalahnja „PRRI" samasekali tidak berarti bahwa kaum reaksi sudah dikalahkan samasekali. Selama masih ada kaum imperialis, kaum reaksi masih mempunjai kekuatan dan se-waktu² masih dapat menimbulkan kerugian² besar bagi Rakjat Indonesia. Selain daripada itu perdjuangan untuk membebaskan Irian Barat, untuk menghantjurkan samasekali gerombolan² DI-TII, untuk pembangunan ekonomi negeri, untuk mengkonsolidasi kemerdekaan Indonesia dilapangan politik dan ekonomi, untuk semuanja ini persatuan nasional adalah sjarat mutlak.

Saja jakin, walaupun akan mengalami berbagai rintangan dan kesulitan, sesudah kaum pemberontak „PRRI" ditindas samasekali, persatuan nasional akan bertambah kuat dan segala konsepsi politik jang bukan konsepsi Rakjat Indonesia hanja akan tinggal diatas kertas sadja.

Pertanjaan: Apa jang mendjadi tjiri² chusus kerdjasama semua kekuatan nasional di Indonesia dan bagaimana keterangan Saudara mengenai dipasangnja gambar Presiden Sukarno di-kantor² organisasi² massa progresif?

Djawab: Kami tidak henti²nja berusaha menggalang kerdjasama antara Partai Komunis, partai² Nasionalis, partai² Islam dan partai² agama lainnja. Pada tingkat daerah kami mentjapai hasil jang lebih baik djika dibanding dengan kerdjasama pada tingkat nasional. Tapi, walaupun setjara formil kerdjasama nasional sangat sukar kami tjapai, tetapi djika ada soal² penting mengenai tanah-air, misalnja perdjuangan untuk membebaskan Irian Barat, melawan kegiatan² subversif asing, melawan pakt² militer jang mau menjeret Indonesia, melawan pertjobaan² bom A dan H, melawan pemberontakan „PRRI" dll., selamanja ada tindakan bersama antara partai², ketjuali Masjumi dan PSI, baik setjara nasional maupun

setjara daerah.

Dikalangan organisasi² massa jang dipimpin oleh orang² Komunis, orang² nasionalis, dan orang² dari partai² agama kerdjasama pada waktu² belakangan ini mendapat kemadjuan², dan jang chas jalah bahwa dalam kerdjasama² ini ikutserta setjara aktif fihak militer seperti misalnja dalam Badan Kerdjasama Buruh-Militer, Badan Kerdjasama Pemuda-Militer, Tani-Militer, Wanita-Militer dll. Badan² kerdjasama ini merupakan suatu kekuatan penggerak dalam perdjuangan anti-kolonialisme. Terutama sesudah terbentuknja Front Nasional Pembebasan Irian Barat jang praktis merupakan koordinator dari semua Badan² Kerdjasama ini. Didalam Badan² Kerdjasama ini orang² nasionalis, orang² dari partai² agama, orang² Komunis ber-sama² dengan perwira² Angkatan Perang Republik Indonesia bisa duduk bersama untuk memetjahkan soal² kongkrit.

Mengenai dipasangnja gambar Presiden Sukarno di-kantor² organisasi² massa progresif bagi Rakjat Indonesia bukanlah sesuatu jang aneh, karena Presiden Sukarno sekarang adalah tokoh nasional kami jang djuga berdiri dibarisan depan dalam mempersatukan semua partai dan golongan untuk melawan kolonialisme, dalam perdjuangan untuk ko-eksistensi setjara damai antara negara², dan untuk Indonesia jang demokratis, adil dan makmur.

Pertanjaan: Apakah ada kekuatan² luarnegeri jang mendalangi pemberontakan „PRRI"? Mengapa menurut pandangan Saudara Indonesia begitu penting bagi kaum imperialis?

Djawab: Djangankan kami orang² politik, anak² sekolah Indonesia mengetahui dan jakin bahwa dibelakang kaum pemberontak „PRRI" berdiri kekuatan asing. Bagi Rakjat Indonesia kegiatan Amerika Serikat dalam membantu kaum pemberontak „PRRI" sedjak persiapan pemberontakan ini sampai sekarang adalah terang seperti siang tanpa awan. Wartawan "London Chronicle" Arslan Humbaraci, lebih mendjelaskan hal ini dalam laporannja sesudah kembali dari daerah operasi di Sumatera Tengah, jang ditudjukan untuk menentang djurubitjara kementerian luarnegeri AS, Lincoln White, jang dimuat dalam harian „Merdeka" pada tanggal 30 April 1958. Dalam tantangan terbuka kepada tuan Lincoln White wartawan Arslan Humbaraci antara lain mengatakan:

„Dapatkah tuan Lincoln White menjangkal bahwa:

1. Tiga kapal AS:
   a. "Steel Executive" tanggal 16 November 1957,
   b. "Steel Fabricator" tanggal 23 Djanuari 1958, dan
   c. "Steel Director" tanggal 28 Djanuari 1958 telah membawa sendjata untuk pemberontak? Bahwa sendjata ini berasal langsung dari depot tentara AS di AS dan bahwa sendjata² itu dibongkar dipelabuhan Dumai dari Caltex, Sumatera, ber-sama² dengan muatan buat Bechtel Co, satu kongsi aannemer jang bekerdja buat Caltex? Saja dapat, seandainja diperlukan, untuk mengumumkan perintjian² dari sendjata² itu, dan dalam berbitjara atas nama sendiri, saja ingin menambahkan bahwa saja tidak se-naif itu untuk mempertjajai djawaban bahwa sendjata² itu dimaksudkan untuk Missi Militer Amerika di Bangkok dan bahwa (dalam masing² persoalan) sendjata² itu telah diambil dengan paksa oleh letnan pemberontak Sukur Wahid.

„Dapatkah tuan Lincoln White menjangkal bahwa:

2. Kaum pemberontak telah diberitahu tentang waktu dan tempat dropping sendjata oleh se-kurang²nja seorang, atau mungkin pula dua orang Amerika jang berhubungan dengan Caltex dan selalu mengadakan kontak dengan Simbolon sebagai jang belakangan ditandaskan kepada saja pribadi tanggal 24 April, di Sumatera Barat, oleh seorang jang malam itu datang dari golongan pemberontak? Dia sendiri menampung ke-empat² dropping dilapangan terbang Tabing dan dua dropping lain di Diambak, kira² 2 kilometer dari Lubukalung.

„Dapatkah tuan Lincoln White menjangkal bahwa:

3. Keenam pesawat udara — 4 bomber dan 2 pemburu Mustang jang dimiliki pemberontak sekarang di Sulawesi Utara adalah dilever oleh rezim Taipeh, bahwa pangkalan utama dari pesawat itu adalah Manila dan bahwa ia datang di Menado untuk membongkar muatannja (pesawat² pembom) dan melaksanakan misinja atas daerah Indonesia setelah mendarat di Davao dan bahwa baik Formosa maupun Philipina mau melakukan kegiatan² seperti itu kalau bertentangan dengan keinginan AS?"

Dalam pernjataan pada tanggal 30 April Perdana Menteri Djuanda dengan tegas mengatakan, bahwa fihak pemerintah mempunjai bukti² jang tjukup mengenai bantuan Amerika kepada kaum pemberontak.

Bantuan AS kepada kaum pemberontak „PRRI" bukan sesuatu jang mengherankan, karena sudah sedjak lama AS memasukkan Indonesia kedalam „garis pertahanannja". Dalam rangka persiapan perangnja, Indonesia adalah sangat penting bagi kaum imperialis baik dilihat dari sudut strategi militer maupun dilihat dari sudut hasil² Indonesia jang berupa minjak, karet, aluminium, bauxiet, timah dsb. Selain daripada itu kekuasaan imperialis atas Indonesia berarti melemahkan matarantai jang penting dalam kerdjasama negara² Asia-Afrika. Dengan demikian djelaslah bahwa Indonesia tidak hanja sadja penting bagi kaum imperialis, tapi lebih² bagi negara² Asia-Afrika jang berdjuang untuk kemerdekaan nasional dan bagi perdamaian di Asia dan didunia. Oleh karena itu, tiap pertjobaan kaum imperialis untuk menguasai Indonesia tidak hanja ditentang oleh Rakjat Indonesia, tetapi djuga oleh Rakjat² Asia-Afrika dan Rakjat jang tjintadamai diseluruh dunia.

Pertanjaan: Bagaimana kekuatan PKI sekarang ini dan bagaimana harapan² PKI untuk pemilihan Parlemen kedua? Andaikata PKI menang, pemerintah jang bagaimanakah jang dikehendaki oleh PKI?

Djawab: PKI sekarang merupakan faktor penting dalam mempertahankan dan mengkonsolidasi kemerdekaan nasional Indonesia. Hal ini sudah dibuktikan dalam ber-kali² Indonesia menghadapi serangan² dari luar maupun pertjobaan² kudeta dan pemberontakan² dalamnegeri. PKI jang sekarang beranggota lebih dari 1 djuta sudah dapat menghimpun 8.2 djuta pemilih. Faktor jang penting untuk mempertahankan dan mengkonsolidasi kemerdekaan nasional Indonesia ini dipergunakan oleh kaum imperialis untuk menakut-nakuti mereka jang lemah batin dengan apa jang mereka namakan „bahaja Komunis". Otjehan tentang „bahaja Komunis" ini dimamahbiak oleh kaum reaksi dalamnegeri dan ditelan oleh sementara nasionalis kanan. Dengan ini kaum imperialis Amerika berharap memetjahbelah persatuan nasional dalamnegeri dan membikin berantakan potensi nasional.

Kaum imperialis berbuat se-olah² kepentingannja adalah sama dengan kepentingan kaum nasionalis dan kepentingan pemimpin²

partai² agama di Indonesia dan mengadjak mereka membentuk front bersama untuk melawan Komunisme. Dengan demikian sekaligus kaum imperialis memerosotkan kedudukan kaum nasionalis dan pemimpin². partai² agama dimata Rakjat Indonesia.

Dalam ketakutannja pada demokrasi jang sedang tumbuh di Indonesia, kaum imperialis mengadjak kaum nasionalis dan pemimpin² partai agama untuk menunda pemilihan untuk Parlemen jang kedua dengan membajangkan bahwa pemilihan umum tersebut akan membikin PKI menguasai majoritet kursi dalam Parlemen. Padahal, pemilih² jang tadinja memberikan suaranja kepada Masjumi, sesudah partai ini mengalami kemerosotan „prestise" jang sangat karena pemimpin²nja ikut dan mendjadi pemimpin² pemberontakan, bukanlah akan berpindah per-tama² mendjadi pemilih PKI, tetapi sebagian besar akan berpindah mendjadi pemilih PNI atau NU selama kedua partai ini teguh dalam mempertahankan kemerdekaan nasional Indonesia dan dalam melawan pertjobaan² intervensi asing. PKI memang djuga akan mendapat tambahan suara dari pemilih² Masjumi karena PKI djuga berdiri dibarisan paling depan dalam mengalahkan kaum pemberontak „PRRI", disamping perdjuangannja jang terus-menerus untuk perbaikan nasib Rakjat pekerdja.

Tetapi, walaupun keadaan sangat menguntungkan bagi NU, PNI, PKI dalam pemilihan Parlemen kedua, suara pemilih bukanlah sesuatu jang dapat disunglap. Saja berpendapat bahwa djuga dalam pemilihan Parlemen nanti tidak akan ada satu partaipun jang dapat menguasai majoritet dalam Parlemen, djuga PKI tidak terketjuali. Berdasarkan inilah dan berdasarkan penjelidikan² jang mendalam mengenai pergeseran² imbangan kekuatan didalam masjarakat, maka kami tidak memperdjuangkan lebih daripada 25% dari suara pemilih.

Sebagai hasil pemilihan Parlemen jad. PKI tidak memperdjuangkan lebih dari apa jang diperdjuangkan sekarang, jaitu pembentukan Pemerintah Koalisi Nasional atau Pemerintah „Gotong-rojong" jang berdasarkan perwakilan berimbang sesuai dengan Konsepsi Presiden Sukarno jang tersohor itu. Saja berpendapat bahwa hanja Pemerintah jang demikianlah dapat menghimpun kekuatan nasional se-besar²nja untuk mempertahankan dan mengkon-

solidasi kemerdekaan nasional, untuk pembebasan Irian Barat, untuk penghantjuran total gerombolan² DI-TII, untuk perbaikan nasib Rakjat pekerdja dan untuk pembangunan ekonomi negeri. Dengan demikian Indonesia akan mendjadi faktor jang lebih penting dalam perdjuangan untuk perdamaian dunia, dan chususnja dalam kerdjasama antara negara² Asia-Afrika.

Pertanjaan: Apa jang mendjadi harapan Saudara bagi Rakjat Hongaria?

Djawab: Sebagaimana sudah diketahui, ketika di Hongaria terdjadi pemberontakan kontra-revolusioner jang didalangi kaum imperialis Amerika dalam bulan Oktober tahun 1956, kaum Komunis Indonesia tidak pernah sedikitpun ragu bahwa pemberontakan itu pasti dapat diatasi dan Hongaria tetap mendjadi anggota keluarga kubu sosialis jang penting.

Pemberontakan kontra-revolusioner di Indonesia sekarang didalangi oleh tangan jang sama, jang dalam tahun 1956 mendalangi pemberontakan kontra-revolusioner di Hongaria. Pada waktu sekarang kami djuga jakin, bahwa Rakjat Hongaria dibawah pimpinan Partai Buruh Sosialis akan terus madju dalam membangun Sosialisme dinegeri jang indah dan Rakjatnja jang berbakat itu. Kami jakin, bahwa Rakjat dan kaum Komunis Hongaria mengerti dan menjokong perdjuangan Rakjat Indonesia. Atas semua ini kami mengutjapkan terimakasih kami.

Ini adalah tanjadjawab lengkap antara Georg Krausz, wartawan *Neues Deutschland* (harian Partai Persatuan Sosialis Djerman) dengan Kawan D.N. Aidit di Djakarta dan dimuat dalam harian tersebut pada tgl. 22 Mei 1958.

PERBUATAN AGRESI AMERIKA SERIKAT AKAN SANGAT MERUGIKAN AMERIKA SERIKAT SENDIRI

* **Kaum Imperialis Sangat Berkepentingan Untuk Melemahkan Persatuan Nasional Rakjat Indonesia**

* **Kaum Buruh Indonesia Akan Terus Menjokong Kabinet Djuanda Selama Kabinet Ini Setia Pada Programnja**

* **Investasi Modal Asing Membuka Pintu Untuk Tjampurtangan Asing Lebih Banjak**

* **Terimakasih Kepada RDD Berhubung Bantuan Pabrik Gula Di Djokja**

Pertanjaan: Perkembangan politik apakah dapat diharapkan akan terdjadi di Indonesia sesudah kaum pemberontak di Sumatera ditumpas dan sesudah pengawasan negara atas milik Belanda direalisasi? Peranan apakah jang dipegang oleh klas buruh dalam mendjamin perkembangan kemerdekaan nasional Indonesia?

Djawab: Sesudah kaum pemberontak di Sumatera ditumpas, Pemerintah, Angkatan Perang dan Rakjat Indonesia masih mempunjai tugas² berat, misalnja menumpas kaum pemberontak di Sulawesi, menghantjurkan gerombolan DI-TII, menggulung gerakan subversif asing dan membebaskan Irian Barat. Semuanja ini hanja bisa dilakukan djika didalamnegeri ada persatuan nasional jang kuat. Adalah kewadjiban kaum Komunis dan kaum progresif lainnja untuk tidak henti²nja memperkuat front persatuan nasional.

Djuga untuk tetap dikuasainja perusahaan² milik Belanda oleh Negara dan untuk pembangunan ekonomi persatuan nasional dibutuhkan.

Oleh karena itu kaum imperialis, terutama kaum imperialis Belanda dan Amerika Serikat sangat berkepentingan untuk melemahkan persatuan nasional Rakjat Indonesia, teristimewa dengan

djalan mendjatuhkan kabinet Djuanda dan menggantikannja dengan kabinet kanan. Tetapi hal ini pasti akan ditentang keras oleh Rakjat Indonesia, dan kaum buruh Indonesia akan tetap berdiri dibarisan paling depan dalam menentang usaha² kaum imperialis dan kaum reaksioner dalamnegeri ini.

Kaum buruh Indonesia akan terus menjokong kabinet Djuanda selama kabinet ini setia pada programnja jang anti-imperialisme dan jang mendjamin perkembangan demokratis didalamnegeri. Selama pemerintah ini mendjalankan politik jang demikian, kaum buruh Indonesia akan membantu dengan sekuat tenaga untuk memperbesar produksi di-perusahaan² negara.

Pertanjaan: Bagaimana akibat² dari intervensi militer Amerika jang membantu kaum pemberontak seperti didjelaskan oleh Presiden Sukarno serta Pemerintah Indonesia, terhadap politik luarnegeri Indonesia, terhadap hubungan antara Indonesia dan AS, terutama dalam hubungan kapital minjak Amerika jang bekerdja di Indonesia? Kesimpulan² jang bagaimanakah ditarik oleh klas buruh Indonesia dan Partainja, Partai Komunis Indonesia dari intervensi Amerika?

Djawab: Sesuai dengan pendapat Presiden Sukarno saja lebih setudju dipergunakan perkataan agresi mengenai tindakan² orang² Amerika dan Kuomintang jang sudah membom berbagai tempat dibahagian Timur Indonesia. Saja berpendapat bahwa perbuatan agresi Amerika Serikat ini akan lebih mempersatukan Rakjat Indonesia, dan mempersatukan Rakjat dengan Pemerintah Indonesia, untuk membela politik luarnegeri Indonesia jang bebas dan aktif. Perbuatan agresi Amerika Serikat ini akan sangat merugikan Amerika Serikat sendiri, sebab dengan ini Amerika Serikat membangkitkan semangat anti Amerika dikalangan Rakjat Indonesia jang luas, dan sudah tentu akan merenggangkan hubungan antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat.

Djika agresi Amerika Serikat dan bantuan sendjatanja jang terang maupun tidak terang pada kaum pemberontak tidak dihentikan segera, maka kepentingan ekonomi Amerika Serikat di Indonesia, termasuk kepentingan minjaknja, akan dipersoalkan oleh Rakjat Indonesia.

Kami sampai pada kesimpulan bahwa agresi Amerika Serikat

terhadap Indonesia telah membikin Amerika Serikat mendjadi musuh kami dan musuh pokok Rakjat Indonesia, disamping kaum imperialis Belanda. Ini diluar kemauan kami dan kami tahu bahwa ini menambah berat perdjuangan kami. Tapi kami djuga jakin, bahwa dengan dibantu oleh Rakjat² progresif dan tjintadamai diseluruh dunia, kemenangan akan ada pada Rakjat Indonesia.

Pertanjaan: Bagaimana penilaian saudara mengenai pemilihan umum jang direntjanakan akan berlangsung pada bulan September 1959 dalam hubungan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia jang lebih landjut?

Djawab: Per-tama² kami harus melawan usaha² berbagai golongan jang bermaksud menunda pemilihan umum ini karena penundaan berarti perampasan hak² Rakjat jang sudah dimilikinja berdasarkan Undang² Pemilihan Umum Republik Indonesia. Menurut perkiraan kami pemilihan umum jang akan datang akan berachir dengan kemenangan partai² jang aktif dan sungguh² melawan kaum pemberontak „PRRI" dan melawan intervensi dan agresi asing. NU, PNI dan PKI pasti mendapat tambahan suara dan ini berarti kemenangan demokrasi atas partai² kanan seperti Masjumi dan PSI.

Tapi suara Rakjat bukanlah sesuatu jang dapat disunglap oleh salahsatu partai besar. Oleh karena itu adalah tidak benar bahwa dalam pemilihan umum jang akan datang akan ada Partai jang dapat menguasai majoritet dari kursi Parlemen. Untuk pemilihan jang akan datang PKI memperdjuangkan tidak lebih daripada 25% dari semua suara. Djika perkiraan ini mendjadi kenjataan, maka perkembangan demokrasi akan lebih baik di Indonesia, dan ini merupakan djaminan jang sangat penting untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia dan untuk pembangunan ekonomi negeri.

Sebagai hasil dari pemilihan umum jang akan datang PKI tidak memperdjuangkan lebih daripada apa jang sekarang sedang diperdjuangkan, jakni terbentuknja Pemerintah Koalisi Nasional atau pemerintah Gotongrojong seperti jang dimaksudkan oleh Konsepsi Presiden Sukarno.

Pertanjaan: Setelah saja mengundjungi beberapa negeri di Asia Tenggara saja mendapat kesan bahwa dalam hal kesadaran nasio-

nal, kegiatan² serta tekad massa Rakjat jang luas dalam melawan penghisapan serta penindasan kolonial dalam bentuk apapun dan merealisasi kemerdekaan nasional jang penuh, diantara negara² Asia Tenggara Indonesia adalah paling madju dan berada dibarisan terdepan dari perdjuangan tersebut karena Rakjat Indonesia telah mengambil langkah menentukan dalam melikwidasi kedudukan ekonomi tuan² kolonial Belanda. Menurut pendapat saja hal ini hanja dapat dimungkinkan karena klas buruh di Indonesia telah dengan sedar mengambil bagian aktif dalam perdjuangan kemerdekaan nasional. Apakah penilaian saja tepat menurut pendapat saudara?

Djawab: Saja tidak mengetahui setjara mendalam keadaan dinegeri² Asia Tenggara lainnja, oleh karena itu sukar untuk mengadakan perbandingan. Tetapi bahwa kesadaran nasional Rakjat Indonesia dan kegiatan² serta tekad massa Rakjat adalah tinggi dalam melawan penghisapan serta penindasan kolonial, memang satu kenjataan. Hal ini dapat dimengerti, karena Rakjat Indonesia mendapatkan kemerdekaan nasionalnja dengan djalan revolusi bersendjata jang sangat banjak memberikan didikan politik kepada Rakjat, dan ditambah lagi bahwa sekarang klas buruh Indonesia sudah mentjapai kemadjuan² tertentu dilapangan organisasi dan politik, dan Rakjat Indonesia mendapat pengaruh jang tidak ketjil artinja dari gerakan² Rakjat dan demokrasi di Asia-Afrika dan didunia.

Pertanjaan: Apakah tepat djika dikatakan bahwa politik PKI sekarang ini terutama ditudjukan untuk melakukan segala sesuatu, melalui penghimpunan segala kekuatan nasional jang sungguh² progresif kedalam Front Nasional Rakjat Indonesia untuk menjelesaikan Revolusi Nasional 1945 jang demokratis dan jang ditjetuskan untuk melikwidasi kekuasaan kolonial? Apakah melikwidasi sisa² feodalisme dilapangan ekonomi Indonesia djuga merupakan sebagian dari Revolusi Nasional jang demokratis itu? Bagaimana sikap kaum tani terhadap masalah tersebut?

Djawab: Kewadjiban kaum Komunis sekarang tidak hanja menghimpun segala kekuatan jang sungguh² progresif, tetapi djuga dengan sekuat tenaga berusaha menarik kekuatan tengah kedalam gerakan² revolusioner. Sukses Revolusi Indonesia banjak tergantung pada berhasil atau tidaknja menarik kaum tengah kedalam revolusi

untuk menjelesaikan Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja. Ini berarti menjelesaikan tugas² anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Kaum tani Indonesia sepenuhnja menjokong revolusi demokratis, tapi Partai kami belum tjukup bekerdja untuk membangunkan serta memobilisasi kaum tani. Hal ini akan diperbaiki di-masa² jang akan datang.

Pertanjaan: Bagaimana sikap dari kaum buruh Indonesia jang terorganisasi dalam serikatburuh dan terutama majoritetnja jang progresif dan jang dipimpin oleh Partai Komunis mengenai masalah pembangunan ekonomi Indonesia dewasa ini?

Djawab: Kaum buruh Indonesia jang terorganisasi dalam serikatburuh, terutama golongan² progresif jang dipimpin oleh PKI setjara dalam menjedari bahwa kaum buruh Indonesia tidak boleh bersikap pasif terhadap pembangunan ekonomi, walaupun kekuasaan politik sekarang belum ada didalam tangannja. Kaum buruh Indonesia memperdjuangkan adanja plan pembangunan ekonomi untuk merehabilitasi kerusakan² ekonomi jang disebabkan oleh perang dunia jang lalu dan oleh dua kali perang kolonial, serta untuk meletakkan dasar² buat mengindustrialisasi Indonesia.

Mengenai kekurangan modal kami berpendapat bahwa pemetjahannja tidak dengan djalan investasi modal asing, karena hal ini akan membikin Indonesia tetap tergantung dalam lapangan ekonomi dan membuka pintu untuk tjampurtangan asing lebih banjak dalam persoalan² dalamnegeri Indonesia, sebagaimana halnja sudah terbukti dengan desakan Amerika Serikat jang keras untuk mendaratkan tentaranja seperti baru² ini guna „menjelamatkan" minjaknja di Sumatera.

Kekurangan modal harus diatasi dengan memperbesar produksi bahan expor dari perusahaan² milik negara dan mendjual barang² expor ini ke-negeri² jang suka membelinja dengan harga jang paling tinggi, tanpa membedakan sistim sosial dan ekonomi. Dari hasil expor ini Indonesia dapat mengimpor, ketjuali bahan² konsumsi, djuga barang² modal untuk memulai industrialisasi Indonesia.

Djuga pindjaman dari luarnegeri tanpa ikatan² politik dan militer dapat berguna dalam usaha memulai industrialisasi Indonesia. Dalam soal mengatasi kekurangan tenaga² ahli Indonesia harus mendidik ahli²nja sendiri didalamnegeri maupun dengan mengirim

orang² Indonesia keluarnegeri, dan dengan menerima bantuan² tenaga² ahli dari negeri² mana sadja asal orang² itu benar² ahli dan berkemauan baik terhadap Rakjat Indonesia.

Pertanjaan: Apakah Partai Komunis Indonesia mempunjai perspektif, bahwa diharidepan jang dekat atau lebih djauh, revolusi anti-kolonial jang demokratis dari Rakjat Indonesia dapat setjara berangsur-angsur dan setjara damai beralih mendjadi revolusi sosialis?

Djawab: Kami berkejakinan bahwa perspektif Revolusi Indonesia jalah Sosialisme. Tetapi Sosialisme hanja bisa ditjapai djika kami berhasil dalam melaksanakan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja, jaitu melaksanakan revolusi nasional dan demokratis. Djika tergantung pada kaum Komunis Indonesia semuanja ini harus berlangsung dengan djalan damai dan setjara ber-angsur².

Pertanjaan: Sudilah Kawan Aidit menjampaikan kepada klas buruh Djerman, melalui "Neues Deutschland" apa jang masih dianggap penting untuk disampaikan?

Djawab: Pada dewasa ini kaum buruh dan Rakjat Indonesia mempunjai kepentingan² jang sama dengan kaum buruh dan Rakjat Djerman dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan nasional dari antjaman kaum imperialis jang dipelopori oleh Amerika Serikat. Djuga kita sama² berdjuang untuk mempersatukan seluruh negeri dibawah satu pemerintah jang progresif. Rakjat Indonesia berdjuang untuk memasukkan Irian Barat kedalam kekuasaan Republik Indonesia sedangkan kaum buruh serta Rakjat Djerman berdjuang untuk mempersatukan Djerman bagian Timur dengan Djerman bagian Barat. Saja jakin bahwa kedua Rakjat besar ini, Rakjat Indonesia dan Rakjat Djerman akan mentjapai maksud² ini, karena ini adalah kehendak Rakjat, dan dunia jang tjinta kemerdekaan dan tjintadamai menjokongnja.

Kami mengutjapkan banjak terimakasih kepada Pemerintah dan Rakjat Republik Demokrasi Djerman jang sudah membantu Indonesia dalam membangun pabrik gula di Djokjakarta, ibukota Indonesia ketika Revolusi Agustus 1945. Kami jakin bahwa di-masa² datang industri Republik Demokrasi Djerman jang tinggi beserta ahli²nja akan merupakan sumbangan jang besar bagi pembangunan Indonesia jang modern, disamping kekajaan alam Indonesia akan

merupakan sumbangan jang besar pula bagi perkembangan ekonomi RDD.

Dengan demikian kedua negeri kita ber-sama² dengan negeri² lain akan menunaikan tugas sedjarahnja, jaitu mentjiptakan dunia damai dimana kesedjahteraan dan keadilan mendjadi milik semua orang.

Djakarta, 22 Mei 1958

Wanita Komunis Pedjuang Untuk Masjarakat Baru adalah djudul pidato pembukaan Kawan D.N. Aidit pada Konferensi Nasional ke-I Wanita Komunis jang dilangsungkan di Djakarta dari tgl. 26 Mei sampai 31 Mei 1958. Pidato ini memberi analisa dan arah jang tepat bagi perdjuangan emansipasi wanita, menerangkan tugas2 wanita Komunis Indonesia sebagai anggota barisan pelopor dalam membangun masjarakat baru dan tak-terpisahkannja perdjuangan emansipasi jang sungguh2 dari perdjuangan seluruh Rakjat untuk kemerdekaan nasional jang penuh.

Tulisan ini mempunjai peranan penting bukan sadja bagi kader2 wanita tapi djuga bagi semua anggota Partai terutama kawan2 Comite Partai untuk memahami dan melaksanakan politik PKI jang memberikan perhatian chusus kepada masalah mengorganisasi dan meningkatkan kesedaran politik massa wanita.

WANITA KOMUNIS PEDJUANG UNTUK MASJARAKAT BARU

Izinkanlah saja pada kesempatan pembukaan Konferensi Nasional ke-I Wanita Komunis ini menjampaikan beberapa patah kata tentang Konferensi ini sendiri, tentang apa wanita Komunis itu dan tentang tugas2nja.

Per-tama2 penting diingat bahwa Konferensi ini bukan Konferensi organisasi massa wanita, ini adalah Konferensi Partai. Ini perlu saja ingatkan, karena banjak diantara kawan2 adalah aktivis organisasi massa wanita. Pengalaman masih banjak menundjukkan bahwa bagi kebanjakan kawan2 masih sukar menempatkan diri setjara tepat didalam rapat2 Partai dan didalam rapat2 organisasi massa wanita. Padahal djika penempatan ini tidak tepat, maka bisa merugikan ke-dua2nja, baik rapat2 Partai maupun rapat2 organisasi massa wanita. Djadi, sekali lagi, konferensi kita sekarang adalah konferensi Partai jang chusus membitjarakan tentang wanita Komunis dan tentang tugas2nja.

Konferensi Nasional Wanita Komunis ini adalah jang pertama kali diadakan oleh Partai kita. Konferensi ini dilangsungkan sesudah melalui persiapan2 jang boleh dikatakan lumajan. Sebagai persiapan konferensi ini dibanjak daerah telah diadakan konferensi2 wanita Komunis tingkat ketjamatan, kabupaten dan provinsi. Banjak hal2 jang sudah dibahas dalam konferensi2 ini, terutama jang berhubungan dengan atjara konferensi, jaitu tentang menghidupkan grup wanita dan meluaskan keanggotaan Partai dikalangan wanita, dan untuk memperbesar aktivitet gerakan wanita guna memenangkan Partai dalam pemilihan Parlemen ke-2. Berhubung dengan persiapan2 jang sudah dilakukan itu saja jakin, bahwa pembahasan kedua atjara ini selama konferensi akan berhasil dengan baik.

Tetapi dalam konferensi2 jang sudah dilangsungkan di-daerah2 saja kira belum dibahas soal2 jang sangat penting, jaitu tentang apakah sebenarnja wanita Komunis itu dan apakah tugas2nja.

Wanita Komunis Harus Memiliki Kepribadian Tipe Baru

Wanita Komunis Indonesia adalah anggota wanita dari Partai Komunis Indonesia. Mereka mempunjai hak2 dan tugas2 jang sama seperti kawan2 lelaki.

Oleh karena itu adalah tidak benar djika kegiatan wanita2 Komunis hanja terbatas pada kegiatan2 dikalangan massa wanita sadja. Konferensi2 Wanita Komunis harus membitjarakan tema2 umum dan problim2 umum jang berhubungan dengan kegiatan2 Partai kita keseluruhannja dan untuk menemukan alat dan bentuk pekerdjaan jang memungkinkan Partai kita, terutama wanita2 Komunis, agar lebih efektif dalam memberikan sumbangan untuk memetjahkan problim2 politik, jang bertalian dengan perkembangan politik negeri kita keseluruhannja.

Tetapi djika demikian, mengapa harus kita adakan Konferensi Partai jang chusus untuk wanita2 Komunis? Dinegeri seperti negeri kita sekarang, dimana massa wanita pada umumnja masih berada dibawah terompah kaum reaksioner, sehingga mereka djauh dari kehidupan politik, sehingga mereka takut dan mempunjai gambaran jang bukan2 tentang Komunisme dan oleh karena itu menerima sadja hubungan2 jang lama, hubungan2 perbudakan, maka soal meningkatkan kesedaran berorganisasi dan kesedaran politik massa wanita harus mendapat perhatian chusus dari Partai. Konferensi2 Wanita Komunis akan sangat membantu Partai kita dalam memberikan perhatian chusus kepada masalah mengorganisasi dan meningkatkan kesedaran politik massa wanita.

Bagi negeri kita, dimana massa wanita pada umumnja masih terbelakang seperti diterangkan diatas, adanja kira2 100.000 wanita Komunis sekarang, adanja puluhan ribu gadis2 anggota Pemuda Rakjat jang sepenuhnja berfihak pada Partai kita, dan adanja ratusan ribu anggota organisasi massa wanita jang bersahabat dengan Partai kita berkat kegiatan anggota2 Partai didalamnja, adalah gedjala2 jang tidak mungkin dianggap sepi lagi dan ini tidak bisa lain daripada telah membawa sekedar perubahan dalam struktur masjarakat kita. Ini berarti bahwa sudah ada kekuatan madju jang mulai besar dikalangan massa wanita Indonesia, kekuatan massa

wanita jang menolak hubungan2 perbudakan, dan jang sudah aktif berdjuang untuk adanja pembaruan dalam masjarakat Indonesia. Djadi, ada kwalitet baru di-tengah2 massa wanita Indonesia, kwalitet jang madju dan terus tumbuh meluas dan meninggi.

Wanita Komunis adalah wanita jang inteleknja, kemauan dan perasaannja berkembang se-luas2nja dan se-dalam2nja. Wanita jang demikian itu mentjurahkan inteleknja tidak hanja pada pembeberan kekurangan2 masjarakat sekarang, tidak hanja pada bagaimana masjarakat sekarang tersusun dan bagaimana ia berkembang, tetapi djuga pada persoalan bagaimana harus bekerdja untuk membangun masjarakat baru. Tentang masjarakat baru jang kita perdjuangkan pada tingkat revolusi Indonesia sekarang, dan tentang perspektif revolusi Indonesia, dengan djelas sudah diuraikan dalam Program Partai kita dan diadjarkan dalam Sekolah2 dan Kursus2 Partai kita. Demikian tentang intelek wanita Komunis.

Bagaimana mengenai kemauan jang harus dimiliki oleh wanita Komunis? Kemauan wanita Komunis haruslah begitu rupa sehingga dapat memberi dorongan untuk bersatu, untuk beraksi dan bekerdja guna melenjapkan sebab2 jang membikin manusia hidup tidak berbahagia di-negeri2 kapitalis.

Perasaan wanita Komunis adalah adil, suka mempertimbangkan segala sesuatu dengan se-baik2nja, solider dan ingin adanja persatuan semua manusia jang hidup dari bekerdja, dan dalam bekerdjasama serta berdjuang bersama ingin membangun dunia damai jang berdasarkan penghargaan terhadap sesama manusia dan terhadap kerdja.

Fikiran, kemauan dan perasaan ini harus saling mengisi, saling bantu dan merupakan kesatuan. Ini menimbulkan kepribadian tipe baru jang membedakan diri wanita Komunis dari wanita burdjuis pada umumnja. Wanita burdjuis mungkin luarbiasa dalam keberanian dan ketjakapan tetapi tidak memiliki kepribadian tipe baru.

Dengan kepribadian tipe baru, wanita Komunis akan mampu mendjelaskan kenapa keadaan seperti sekarang dan bagaimana keadaan dapat diubah; akan mampu membangun dan mendjiwai organisasi jang terdiri dari orang2 jang menuntut penghargaan atas hak2nja, jang membela kepentingan2nja, jang berdjuang untuk demokrasi dan untuk memperbaharui dunia; akan mampu mem-

bangunkan rasa solider dan persaudaraan, membangkitkan semangat dan kegairahan dalam perdjuangan jang luas jang madju kedepan menudju pembaruan masjarakat dan perdamaian dunia.

Kewadjiban Partai kita jalah mendidik wanita² jang berkepribadian tipe baru ini.

Wanita² jang berkepribadian tipe baru, jaitu wanita² Komunis, dalam mempersoalkan emansipasi wanita tidak seperti wanita² burdjuis, jang biasa hanja membikin penjesalan² kuno jang tidak ada isinja seperti misalnja „kaum pria tidak mempunjai perhatian pada pekerdjaan dikalangan wanita", atau „kaum pria tidak mau memberi kebebasan kepada kaum wanita". Se-olah² kaum pria jang mendjadi sasaran dari perdjuangan untuk emansipasi. Penjesalan ini bukan hanja tidak ada gunanja, tetapi membikin sasaran perdjuangan untuk emansipasi wanita, jaitu feodalisme, imperialisme dan kaum reaksioner, mendjadi terlepas dari serangan. Pendeknja, penjesalan² atau umpatan² demikian tidak pernah dan tidak akan mempunjai arti, selama hal ini tidak dirumuskan setjara kongkrit sebagai hasil pemikiran setjara matang, jang bersumber pada orientasi politik jang madju, jang disertai dengan kegiatan² organisasi dan pekerdjaan² jang kongkrit. Perdjuangan untuk emansipasi wanita tidak akan mentjapai tudjuannja dengan umpatan dan penjesalan, tetapi harus dengan kerdja. Tiap² problim, djadi djuga problim emansipasi wanita dengan aspek²nja jang banjak itu, harus disinari dari semua seginja agar mendapat pemetjahan jang tepat.

Adalah kewadjiban Partai kita, djadi djuga dan terutama kewadjiban wanita² Komunis untuk dapat menjinari semua problim perdjuangan wanita untuk emansipasi dan untuk Indonesia dan dunia baru dari semua segi, agar semua problim dapat dipetjahkan.

Untuk memiliki kemampuan ini, adalah mendjadi sjarat mutlak bagi tiap² wanita Komunis untuk ber-lomba² dengan kawan²nja jang lelaki beladjar teori Marxisme-Leninisme, sendjata kita jang ampuh, jang tidak ada soal takterpetjahkan olehnja. Mendjadi kewadjiban semua Comite Partai untuk memberi perhatian jang chusus mengenai pendidikan ideologi, politik dan teori bagi kawan² wanita. Pekerdjaan ini mungkin akan lebih berhasil dengan mengadakan Sekolah² Politik dan Kursus² Partai chusus untuk kawan² wanita.

Dengan adanja kira² 100.000 wanita Komunis, sudah dapat kita katakan bahwa sekarang kita sudah mulai mempunjai barisan pelopor gerakan wanita jang rapat barisannja didalam Partai kita, jang sudah dan sedang mengembangkan kepribadian tipe barunja, barisan pelopor jang diperlukan oleh siapa sadja jang berdjuang untuk emansipasi dari semua wanita dan untuk kemadjuan seluruh masjarakat.

Wanita Komunis Harus Berhubungan Erat Dengan Massa Wanita

Tetapi djangan lupa bahwa barisan pelopor berhenti mendjadi pelopor djika ia terlepas dari suatu pasukan, djika ia tidak berhubungan dengan bagian² lain dari pasukan. Pelopor hanjalah pelopor, djika ia merupakan bagian dari suatu pasukan, djika ia berhubungan dengan bagian² lain dari pasukan. Pelopor jang mengisolasi diri dari pasukan akan kehilangan hubungan dengan induk pasukan, dimana sipelopor merupakan bagian daripadanja, akan berhenti mendjadi pelopor karena ia kehilangan sjarat untuk itu. Pelopor harus senantiasa berhubungan dengan pasukan.

Djadi, wanita jang termasuk dalam barisan pelopor dari klas buruh dan semua pekerdja, djika ia mau dianggap sebagai pelopor, haruslah berhubungan erat dengan massa luas dari massa wanita buruh, tani dan burdjuasi ketjil, dan djuga dengan kaum wanita jang tidak termasuk pekerdja tetapi jang djuga berdjuang untuk emansipasi wanita dan pembaruan masjarakat.

Gerakan wanita Indonesia dapat kita katakan timbul bersamaan dengan kebangkitan nasional Rakjat Indonesia. Boleh dikatakan semua partai politik jang banjak berdiri sedjak awal abad ini mempunjai perhatian dan mendorong berdirinja organisasi² wanita. Djuga Partai kita sudah sedjak berdirinja mempunjai perhatian pada gerakan wanita dan mendorong berdirinja organisasi² wanita jang madju.

Tetapi, sebelum Revolusi Agustus 1945 perkembangan organisasi² wanita sangat terbatas, tuntutan²nja umumnja tidak djauh dan tidak mempunjai karakter massa jang luas. Sekarang kemadjuan besar sudah tertjapai dalam menjedarkan kaum wanita tentang

hak²nja dengan terbentuknja organisasi² wanita jang berdjuang untuk emansipasi dan untuk pembaruan masjarakat Indonesia. Ini berarti, bahwa massa wanita Indonesia sampai batas² tertentu sudah bangun.

Dengan adanja organisasi² wanita jang berdjuang untuk emansipasi dan pembaruan masjarakat dapatlah kita katakan bahwa kaum wanita Indonesia sudah mendjedjakkan kakinja kedalam kehidupan politik jang kolektif dan aktif, mereka sudah mendesakkan supaja suara mereka didengarkan dan supaja tuntutan² mereka dipenuhi, mereka mulai mempunjai pengaruh jang tertentu tentang djalannja perkembangan.

Menurut pendapat saja perdjuangan untuk emansipasi kaum wanita Indonesia sekarang adalah sungguh². Pada pokoknja perdjuangan untuk emansipasi jang sungguh² ini sekarang adalah sbb.: Disatu fihak perdjuangan untuk hak² wanita, artinja untuk mendapatkan persamaan hak setjara juridis dengan laki² dan untuk pelaksanaan jang njata dari persamaan hak ini dengan tertjiptanja tjara-hidup jang baru. Difihak lain perdjuangan melawan kesengsaraan, untuk tingkat hidup jang lebih baik, untuk pekerdjaan dan upah sama dengan tidak memandang perbedaan wanita atau laki², baik bagi massa luas dikota maupun didesa. Dua aspek dari perdjuangan ini merupakan kesatuan dan dengan demikian djelaslah bahwa gerakan untuk emansipasi wanita adalah bagian terpenting dari perdjuangan keseluruhannja untuk pembaruan jang demokratis dari masjarakat Indonesia. Dari sini djuga djelas, bahwa gerakan jang sungguh² untuk emansipasi wanita tidak bisa dipisahkan, dan merupakan bagian dari perdjuangan untuk demokrasi, kemerdekaan nasional jang penuh, untuk perdamaian dunia dan untuk melawan penindasan kapital.

Kita tidak boleh lupa, bahwa perdjuangan untuk emansipasi wanita mempunjai karakternja sendiri dan banjak aspek²nja, sehingga kegiatan organisasi² massa wanita walaupun mempunjai dasar jang sama dan umum, perlu mempunjai tendensi mem-bagi² dirinja dalam berbagai bentuk gerakan² jang kongkrit buat tudjuan² bagian dan tudjuan² spesifik. Wanita² dari berbagai lapisan masjarakat dan dari berbagai kategori sosial bisa mempunjai kepentingan² jang ber-beda² samasekali. Tetapi dari ragam jang banjak ini

kita senantiasa harus mengemukakan elemen jang terpenting, elemen jang dapat mempersatukan mereka dalam perdjuangan untuk emansipasi.

Oleh karena itu kita menganggap perlu adanja sebuah federasi dari organisasi² wanita Indonesia jang didirikan atas dasar tuntutan untuk emansipasi, dan kita djuga menganggap perlu adanja sebuah organisasi wanita Indonesia jang besar jang bersatu-padu, jang keanggotaannja tersebar diseluruh Indonesia dan jang melakukan banjak tindakan² untuk kepentingan massa wanita, untuk keluarganja dan anak²nja, dan jang bentuk-bentuk kegiatannja bermatjam ragam. Bentuk permulaan organisasi jang demikian ini sudah ada, kebanjakan wanita² Komunis termasuk didalamnja. Kita harus terus memberikan sumbangan kita pada kegiatan organisasi ini, terutama untuk memberikan karakter massa jang lebih luas kepadanja, dengan menghilangkan semua jang bisa membikin sempit organisasi massa ini dan agar keanggotaannja mendjadi ber-djuta².

Dengan segenap enersi kita, kita harus bekerdja didalam organisasi ini, agar ia terus tumbuh, agar ia mendapatkan bentuk² baru untuk pekerdjaannja, agar ia benar² mendjadi organisasi dari majoritet wanita Indonesia jang terorganisasi dan bersatu disekitar pandji² emansipasi wanita.

Apakah tjukup tersedia sjarat² untuk mentjiptakan organisasi wanita Indonesia jang besar sematjam itu? Sjaratnja tjukup, jaitu bahwa massa wanita Indonesia, oleh karena perdjuangannja untuk emansipasi, jaitu perdjuangan untuk hak² wanita dan tuntutan² ekonomi Rakjat pekerdja, tidak bisa lain daripada memberikan sumbangan baru jang penting pada perdjuangan untuk pembaruan demokratis dan politis dari masjarakat Indonesia.

Djika kita berhasil mentjiptakan sebuah organisasi massa wanita jang besar, jang anggotanja ber-djuta², maka kita akan lebih memperkuat gerakan keseluruhan dari massa pekerdja Indonesia, jaitu kekuatan jang akan mengadakan perubahan² jang mendalam dari pandangan politik Rakjat negeri kita.

Pada waktu sekarang Partai kita terus madju dengan tuntutan² untuk mengadakan perubahan jang mendalam dalam politik Indonesia, baik jang mengenai politik luarnegeri maupun politik dalamnegeri. Djika tergantung pada kita, kita ingin supaja semuanja ini

dapat berlangsung dalam ketenangan, baik ketenangan diluarnegeri maupun didalamnegeri. Sjarat untuk ini jalah adanja gerakan massa luas jang militan, terpimpin dan berdisiplin, sedar benar² akan perubahan politik jang ingin ditjapainja. Untuk ini besarlah arti dari gerakan wanita pada umumnja, organisasi massa wanita jang besar dan kaum wanita Komunis pada chususnja.

Dalam melaksanakan tugas Partai menarik lebih besar massa wanita kedalam Partai, jang memang harus sungguh² kita lakukan, adalah luar biasa pentingnja arti dari pekerdjaan jang harus dilakukan oleh wanita² Komunis dikalangan massa wanita pekerdja, dan djuga adalah luarbiasa pentingnja arti dari pekerdjaan wanita² Komunis dikalangan berbagai sektor massa wanita pekerdja seperti, misalnja, massa wanita dari berbagai aliran agama.

Jang mendjadi penghalang terbesar bagi pekerdjaan Partai dikalangan kaum wanita pekerdja jalah masih berkuasanja fikiran² kolot jang mengira bahwa keadaan jang buruk sekarang adalah sudah ditakdirkan dan tidak bisa diubah lagi. Fikiran kolot ini tidak hanja terdapat dikalangan kaum wanita, tapi djuga dikalangan kaum lelaki.

Kewadjiban Partai kita jalah tidak henti²nja menanamkan kejakinan pada massa Rakjat pekerdja, terutama kaum wanitanja, bahwa keadaan jang buruk sekarang adalah bikinan tangan² manusia, bikinan kaum tuantanah, kaum kapitalis dan penguasa² jang reaksioner; dan menanamkan kejakinan bahwa manusia, massa manusia, jang hidup dari kerdjanja, djika mereka mengorganisasi diri dan bertindak bersama akan mampu mentjiptakan situasi baru, situasi jang lain daripada sekarang, dan akan mampu membangun Indonesia baru dan dunia baru. Tentang dunia baru, dimana tidak ada lagi penghisapan oleh manusia atas manusia, dimana emansipasi wanita sudah ditjantumkan dalam undang² dan dilaksanakan dalam kenjataan, dimana masjarakat sudah diperbaharui samasekali, sekarang bukanlah impian lagi, tetapi sudah mendjadi kenjataan disebagian dari dunia kita dimana lebih dari sepertiga dari umatmanusia, jaitu seribu djuta orang sudah mendjadi penghuni dunia baru.

Kita kaum Komunis selamanja harus berkejakinan, bahwa pekerdjaan dikalangan wanita adalah satu diantara elemen² terpenting dari politik dan dari pekerdjaan Partai kita, dan bahwa pekerdjaan dikalangan wanita mempunjai karakter jang spesifik dan oleh karena itu harus dilakukan dengan tjara dan organisasi jang spesifik pula. Inilah sebabnja maka ada persoalan bekerdja dikalangan wanita, berpropaganda dikalangan wanita, persoalan petugas² chusus untuk gerakan wanita, persoalan kader² wanita dan grup-grup wanita.

Grup² wanita didalam Partai kita bukan hanja harus tetap dipertahankan, tetapi harus kita perbanjak dan kita tingkatkan kemampuannja. Pekerdjaan grup² wanita kita tidak boleh hanja terbatas sampai pada pekerdjaan dikalangan wanita. Ia harus mengambil bagian dalam semua kegiatan Partai, sebab ini adalah satu diantara sjarat² untuk memperbesar kemampuan kawan² wanita, untuk mempertinggi tingkat kesedarannja dan untuk memperbaiki aksi²nja. Mengambil bagian dalam semua kegiatan Partai adalah djuga berlaku bagi wanita² Komunis dalam badan² pimpinan dan dalam organisasi² Partai lainnja.

Sebelum saja mengachiri pidato sambutan saja ini ingin saja kemukakan bahwa di-masa² jang lalu kita kurang tjukup mempopulerkan aktivis² wanita kita dan kita belum tjukup baik meladeni mereka. Padahal mereka adalah pedjuang² kita jang berani, jang memberikan apa sadja jang ada padanja untuk pekerdjaan Partai di-desa², di-kebun², di-pabrik², di-kampung² dsb. Di-masa² datang kita harus berusaha supaja mereka lebih dikenal. Harus mendjadi djelas bagi semua orang, bahwa merekalah pekerdja² jang ulet untuk hak² kaum wanita dan untuk kepentingan ekonomi massa Rakjat pekerdja, bahwa mereka adalah pekerdja² untuk salahsatu tugas Partai jang terpenting.

Jang terachir, saja mintakan persetudjuan kawan² agar untuk waktu dekat jang akan datang kita melaksanakan penarikan puluhan ribu wanita lagi kedalam Partai kita. Selandjutnja saja mengharap bantuan kawan-kawan dalam memperkuat organisasi² massa wanita dan aksi²nja untuk emansipasi bagi wanita, untuk perubahan sosial dan politik dari masjarakat Indonesia dan untuk perdamaian dunia.

Saja jakin, bahwa Konferensi Nasional ke-I Wanita Komunis ini merupakan permulaan jang baik dalam usaha Partai mentjipta-

kan barisan pelopor jang mampu dari gerakan wanita Indonesia, dan dalam mentjiptakan organisasi massa wanita jang besar jang anggotanja ber-djuta2.

Hidup wanita Komunis!

Djakarta, 26 Mei 1958

Dua artikel berikut adalah pidato Kawan D.N. Aidit jang diutjapkan dihadapan Kongres ke-XI Partai Komunis Tjekoslowakia tanggal 20 Djuni 1958 dan pidato didepan para aktivis Partai Komunis Tjekoslowakia di Praha tanggal 26 Djuni 1958.

Selain menjampaikan salam Rakjat Indonesia, dikemukakan bahwa suksesnja pembangunan Sosialisme Rakjat Tjekoslowakia menundjukkan Sosialisme bisa dibangunkan baik dinegeri jang madju maupun jang terbelakang. Selandjutnja ditandaskan betapa merusaknja pendirian pemimpin2 Liga Komunis Jugoslavia bagi gerakan Komunis sedunia, kubu sosialis dan gerakan kemerdekaan nasional. Karena itu perdjuangan melawan revisionisme disamping melawan penjelewengan2 lain seperti dogmatisme dan sektarisme adalah perdjuangan jang terpenting bagi semua Komunis sekarang.

PIDATO SAMBUTAN DIHADAPAN KONGRES KE-XI PARTAI KOMUNIS TJEKOSLOWAKIA

Atasnama Comite Central Partai Komunis Indonesia, atasnama lebih dari 1.000.000 Komunis Indonesia dan atasnama 8.200.000 pemilih PKI, delegasi kami menjampaikan salam jang se-hangat²-nja kepada semua peserta Kongres ke-XI Partai Komunis Tjekoslowakia, dan lewat kawan² kepada semua Komunis dan Rakjat pekerdja Tjekoslowakia.

Delegasi PKI menjampaikan salut jang se-tinggi²nja atas sukses² Rakjat pekerdja Tjekoslowakia dalam membangun Sosialisme dibawah pimpinan jang bidjaksana dari Partai Komunis Tjekoslowakia. Selama beberapa hari sebelum Kongres ini dimulai delegasi kami sudah berkundjung ke Ostrawa, Bratislava dan Brno. Belum banjak jang kami lihat. Tetapi apa jang sudah kami lihat, seperti antusiasme Rakjat menjambut hasil² pembangunan sosialis, seperti pembangunan besar²an dilapangan perindustrian dan pengkoperasian pertanian jang didjalankan oleh Rakjat pekerdja Tjekoslowakia dengan semangat jang tinggi, mejakinkan kami bahwa djuga dalam penjempurnaan pembangunan sosialis Partai Komunis dan Rakjat pekerdja Tjekoslowakia pasti akan mendapat hasil jang gemilang.

Rakjat Indonesia langsung berkepentingan akan suksesnja pembangunan sosialis di Tjekoslowakia, sebagaimana djuga akan suksesnja pembangunan sosialis di-negeri² sosialis lainnja. Kebangkrutan sistim kapitalis, jang waktu² belakangan ini ditandai oleh depresi ekonomi, terutama di Amerika Serikat, telah membikin lebih sukar keadaan ekonomi Indonesia jang memang sudah sukar itu. Keadaan ini lebih mengharuskan Rakjat Indonesia untuk mentjari dan menemukan sahabat² jang bisa dipertjaja dalam mengatasi kesukaran² ekonomi negerinja, dan sahabat² itu tidak lain daripada negeri² sosialis.

Di-tengah² Rakjat pekerdja Tjekoslowakia membangun Sosialisme, Rakjat Indonesia dengan kesungguhan dan kegembiraan berdjuang untuk dapat mengikuti irama zaman, belum untuk membangun Sosialisme, tetapi buat mentjiptakan sjarat² politik untuk itu.

Kaum imperialis Amerika dengan budak²nja berusaha memaksa Rakjat Indonesia menjanjikan lagu jang sumbang, jang tidak seirama dengan zaman kita, zaman kemadjuan gerakan progresif disemua front. Untuk ini mereka mengorganisasi gerombolan² teroris buat membunuh pemimpin² PKI dan orang² revolusioner lainnja, sampai² kepada pertjobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno. Mereka mengorganisasi pemberontakan² diwilajah Republik Indonesia, memberi bantuan sedjumlah besar sendjata² modern dan mengirim instruktor² militer untuk membantu kaum pemberontak. Semuanja ini ditudjukan untuk mendjatuhkan pemerintah jang sah jang didukung oleh Rakjat pekerdja Indonesia, dan selandjutnja untuk mematahkan gerakan progresif di Indonesia.

Tetapi, sedjak 17 Agustus 1945 Rakjat Indonesia sudah memilih djalan kemerdekaan nasional dan tidak akan ada satu kekuatan didunia jang dapat memaksa Rakjat Indonesia memilih djalan lain. Sebaliknja, dengan kemerdekaan nasional jang sudah dimilikinja, Rakjat Indonesia mematahkan kekuatan pemberontakan kontrarevolusioner. Rakjat Indonesia berdjuang terus untuk dapat memegang nasib sepenuhnja dalam tangannja sendiri, sebagai sjarat untuk mengadakan perubahan fundamentil dalam masjarakat Indonesia. PKI dan Rakjat pekerdja Indonesia menjadari bahwa perdjuangan ini adalah berat, ber-liku² dan masih akan menghadapi banjak kesulitan.

Tetapi, dengan semangat patriotisme jang tinggi, dan dengan semangat internasionalisme proletar dan tjintadamai seperti dimuat dalam Deklarasi dan Manifes Perdamaian Partai² Komunis dan Partai² Buruh di Moskow bulan November tahun jang lalu, kaum Komunis dan Rakjat pekerdja Indonesia akan terus berdjalan dengan langkah² jang tegap, seirama dengan langkah² barisan front revolusioner dunia.

Kami mengharap Kongres Kawan² jang penting ini akan men-

dapat sukses jang se-besar²nja, sebagai djaminan untuk suksesnja penjempurnaan pembangunan sosialis di Tjekoslowakia, sebagai sumbangan bagi negeri² jang perkembangan ekonominja masih terbelakang dan untuk memperkuat kubu perdamaian dan Sosialisme.

Hidup Partai Komunis Tjekoslowakia, pemimpin jang sedjati dari Rakjat pekerdja Tjekoslowakia!

Hidup dan abadilah persahabatan Rakjat Indonesia dan Rakjat Tjekoslowakia!

Hidup perdamaian dan Sosialisme, hidup Marxisme-Leninisme jang djaja!

PIDATO DIDEPAN 8000 AKTIVIS PARTAI KOMUNIS TJEKOSLOWAKIA DI PRAHA

Per-tama² atasnama delegasi PKI kekongres ke-XI Partai Komunis Tjekoslowakia, saja mengutjapkan banjak terimakasih berhubung dengan kesempatan jang diberikan kepada saja untuk berbitjara dihadapan rapat umum ini.

Atasnama Comite Central, semua Komunis dan pentjinta Partai Komunis Indonesia saja menjampaikan salut dan mengutjapkan selamat berhubung dengan sukses Kongres ke-XI Partai Komunis Tjekoslowakia baru² ini.

Sudah terang, bahwa suksesnja Kongres ke-XI Partai Komunis Tjekoslowakia, per-tama² tentu mempunjai arti jang sangat penting dan menentukan bagi penjempurnaan pembangunan Sosialisme di Tjekoslowakia. Apa jang dinjatakan dalam laporan CC jang disampaikan oleh Sekretaris Pertama CC Partai Komunis Tjekoslowakia, Kawan Antonin Novotni, jang kemudian dimuat dalam putusan kongres, bahwa sukses² sudah ditjapai dalam pembangunan Sosialisme dan tugas sekarang adalah penjempurnaan pembangunan Sosialisme di Tjekoslowakia, adalah sepenuhnja benar.

Dengan antusiasme Rakjat pekerdja jang besar, dengan pimpinan Partai Komunis Tjekoslowakia jang mempunjai persatuan ideologi jang kuat, dengan kerdjasama jang erat antara negara² sosialis, dengan sokongan gerakan Komunis diseluruh dunia dan terutama dengan bantuan Uni Sovjet, kami jakin bahwa kesempurnaan pembangunan Sosialisme di Tjekoslowakia akan mendjadi kenjataan dalam waktu jang tidak lama.

Tjekoslowakia jang sekarang sudah merupakan salahsatu negeri jang termadju didunia, merupakan sendjata ditangan proletariat sedunia dalam melawan propaganda kaum reaksioner, jang mengatakan bahwa gerakan Komunis tidak bisa berkembang dinegeri jang industrinja sudah madju dan tingkat hidup Rakjatnja sudah tinggi.

Dengan sukses² pembangunan Sosialisme di Tjekoslowakia, maka terbuktilah bahwa Tjekoslowakia jang industrinja sudah madju dan tingkat hidup Rakjatnja sudah tinggi, merupakan salahsatu benteng Komunisme jang terkuat.

Djadi, gerakan Komunis sudah terbukti bisa berkembang dinegeri² jang industrinja belum madju dan tingkat hidup Rakjatnja masih rendah, dan djuga dinegeri jang industrinja sudah madju dan tingkat hidup Rakjatnja sudah tinggi. Djadi, gerakan Komunis bisa berkembang dimana sadja. Tergantung pada bagaimana mengembangkan gerakan ini!

Kongres ke-XI Partai Komunis Tjekoslowakia tidak hanja penting buat klas buruh dan Rakjat Tjekoslowakia. Sempurnanja pembangunan Sosialisme di Tjekoslowakia berarti bertambah kuatnja kubu Sosialisme dan perdamaian dunia, berarti bertambahnja sjarat² bagi negeri² sosialis untuk membantu memadjukan negeri² jang ekonominja masih terbelakang, dan jang sekarang lebih menderita lagi sebagai akibat depresi ekonomi Amerika Serikat.

Selain daripada itu Kongres ke-XI Partai Komunis Tjekoslowakia dihadiri oleh 54 Partai Komunis dari semua benua, jang menjatakan kejakinannja akan sukses jang lebih besar dan solidaritetnja pada Partai Komunis dan Rakjat pekerdja Tjekoslowakia, jang menjatakan kebulatan tekad dalam membela persatuan gerakan Komunis sedunia, jang dasar²nja sudah lebih diperkuat dengan adanja putusan² Kongres ke-XX Partai Komunis Uni Sovjet, dan kemudian dengan adanja Deklarasi dan Manifes Perdamaian sebagai hasil diskusi Partai² Komunis bulan November tahun 1957.

PKI menjetudjui sepenuhnja pokok² fikiran mengenai gerakan Komunis sedunia jang diputuskan oleh Kongres ke-XX PKUS, dan dalam Sidang Plenonja bulan April 1958 CC PKI menerima sepenuhnja Deklarasi dan Manifes Perdamaian. Ini berarti bahwa PKI tidak menjetudjui dan melawan revisionisme jang dipropagandakan oleh pemimpin² Liga Komunis Jugoslavia.

Dalam usahanja untuk memetjah gerakan Komunis sedunia, kaum imperialis menjebarkan kebohongan, se-olah² PKI mengambil sikap lain daripada sikap jang sudah diambil oleh Partai² Komunis seperti PKUS, PK Tiongkok, PK Tjekoslowakia dll. terhadap kongres Liga Komunis Jugoslavia bulan April jl. Dikatakan oleh

mereka se-olah² PKI mengirimkan delegasi kekongres Liga Komunis Jugoslavia tersebut.

Sebelum kami menerima Rentjana Program jang akan dibitjarakan dalam kongres Liga Komunis Jugoslavia tersebut memang kami bermaksud mengirimkan delegasi, karena kami tidak mengira bahwa pemimpin² Liga Komunis Jugoslavia sudah begitu djauh dari gerakan Komunis sedunia. Tetapi sesudah kami mendapat dan mempeladjari Rentjana Program Liga Komunis Jugoslavia, kami memutuskan tidak mengirim delegasi dan hanja mengirim penindjau, sebagaimana djuga jang dilakukan oleh Partai² Komunis lain. Setelah penindjau kami pulang dan memberikan laporan tentang apa jang dilihat didalam dan diluar kongres, maka kami mendjadi lebih jakin, bahwa memang tidak sepantasnja PKI mengirim delegasi kekongres Liga Komunis Jugoslavia.

Kaum Komunis Indonesia tidak mempunjai kepentingan untuk memusuhi pribadi pemimpin² LKJ, dan kami tidak bermaksud untuk mentjampuri soal² intern LKJ. Tetapi kaum Komunis Indonesia, ber-sama² dengan kaum Komunis negeri² lain, tidak hanja berhak, tetapi berkewadjiban melawan dengan sengit usaha siapa sadja, baik jang datangnja dari luar maupun dari dalam gerakan Komunis, jang hendak memetjahbelah gerakan Komunis sedunia.

Memetjahbelah gerakan Komunis sedunia seperti jang dilakukan oleh pemimpin² LKJ, baik dilapangan ideologi maupun politik, tidak hanja akan melemahkan gerakan Komunis sedunia dan kubu sosialis, tetapi djuga melemahkan seluruh gerakan progresif, seluruh gerakan untuk kemerdekaan nasional dan gerakan perdamaian dunia.

Dalam kesempatan ini saja tidak akan mengupas revisionisme pemimpin LKJ dari segi teori. Saja hanja hendak mengemukakan beberapa persamaan antara kaum reaksioner di Indonesia dengan kaum revisionis Jugoslavia.

Kaum sosialis kanan dan kaum reaksioner lainnja di Indonesia mempropagandakan, bahwa dengan makin banjaknja kontrol negara, maka kapitalisme sudah tidak berbahaja lagi, bahwa kapitalisme sekarang bukan monopoli lagi dan sudah mendjadi „kapitalisme rakjat" berhubung dengan saham² sudah dipegang oleh lebih banjak orang. Oleh karena itu, kata mereka, djangan melawan kapitalisme, djadikanlah kapitalisme sahabat, panggillah se-banjak²-

nja penanaman modal asing ke Indonesia.

Padahal turun-temurun Rakjat Indonesia sudah berpengalaman, bahwa kapitalismelah jang membikin mereka sengsara dan terdjadjah, bahwa karena ada penanaman modal asinglah maka Indonesia sekarang kurang bebas dalam mendjalankan politiknja, bahwa karena adanja kekuasaan kapitalisme monopolilah maka Indonesia terus-menerus terantjam oleh intervensi bersendjata, dan baru² ini bukan lagi antjaman, tetapi kongkrit kaum imperialis jang dipelopori oleh AS mengorganisasi pemberontakan didalam negeri Indonesia dan memperlengkapi kaum pemberontak kontra-revolusioner dengan sendjata² modern, dengan instruktor² militer, kapalterbang² beserta pilot²nja. Inikah kapitalisme jang ber-angsur² mau diubah mendjadi Sosialisme itu? Kenjataan di Indonesia jalah, bahwa kapitalisme monopoli, djika tidak dilawan dengan sengit, bisa mengubah Indonesia jang sekarang merdeka mendjadi djadjahan kembali dan mendjadi pangkalan perang bagi pakt militer SEATO.

Oleh karena itulah politik revisionis pemimpin² LKJ tidak hanja mengisolasi mereka dari gerakan Komunis sedunia, tetapi lambat-laun, djika tidak diubah, akan mengisolasi mereka djuga dari gerakan perdamaian dunia dan gerakan kemerdekaan nasional jang sekarang sedang bangkit dengan hebatnja di Asia-Afrika dan Amerika Latin.

Tidak perlu mendjadi Komunis, seorang patriot non-Komunis dinegeri jang baru merdeka atau negeri jang masih terdjadjahpun tahu bahwa kapitalisme monopoli adalah sumber bentjana dan tidak ada djalan ketjuali mengadakan perlawanan sengit terhadapnja.

Bertentangan dengan fikiran revisionis pemimpin² LKJ, jang memberi hati kepada kapitalisme monopoli, pada achir tahun jang lalu Rakjat dan pemerintah Indonesia telah mengambil oper perusahaan² kaum imperialis Belanda. Hanja kaum imperialis dan budak²nja orang Indonesia jang tidak setudju dengan tindakan ini. Tindakan Rakjat Indonesia dapat sokongan dari kaum Komunis dan Rakjat pekerdja sedunia.

Pemimpin² LKJ berfikiran bahwa dibeberapa negara, seperti misalnja di AS klas buruh dapat berkuasa dan sampai kepada Sosialisme tanpa partai klas buruh. Fikiran ini tidak hanja berakibat melutjuti sendjata klas buruh jang terpenting dinegeri-negeri

jang bersangkutan, tetapi djuga sedjalan benar dengan kehendak kaum kapitalis monopoli jang tidak mau melihat adanja Partai Marxis-Leninis. Dengan pernjataannja ini pemimpin LKJ telah berdjasa besar pada kaum kapitalis monopoli, dan telah mengambil bagian penting dalam menjambung umur kapitalisme jang sudah sekarat, dan dengan demikian ikut memperlemah gerakan Komunis dan gerakan kemerdekaan nasional sedunia.

Di Indonesia hanja elemen² fasis jang mau meniadakan rol PKI. Seorang non-Komunis jang djudjur, jang patriotik, seluruh Rakjat pekerdja jang berdjuang untuk hak² politiknja, mengakui pentingnja rol dan perlunja ada PKI, baik dalam perdjuangan melawan imperialisme dimasa lampau dan sekarang, maupun dalam mentjiptakan masjarakat baru di Indonesia. Tidak lain daripada Presiden Sukarno sendiri jang menjatakan dalam konsepsinja tentang perlunja PKI mengambil bagian dalam pemerintah djika Indonesia benar² mau membangun masjarakat baru.

Dengan demikian sekali lagi mendjadi djelas, bahwa fikiran revisionis pemimpin² LKJ tidak hanja mengisolasi mereka dari gerakan Komunis sedunia, tetapi djuga akan mengisolasi mereka dari gerakan kemerdekaan nasional jang sedang mendobrak dengan kerasnja restan² benteng kapitalisme dunia jang masih tinggal sekarang.

Jang lebih keterlaluan lagi jalah bahwa LKJ mempersamakan sadja politik luarnegeri kubu sosialis dengan politik luarnegeri negara² kapitalis. Mereka mempersamakan sadja politik luarnegeri Uni Sovjet, jang sedjak berdirinja sampai sekarang berdjuang untuk perdamaian dunia dan menjokong perdjuangan semua Rakjat untuk kemerdekaan nasional, dengan politik luarnegeri negara² imperialis jang dipelopori oleh Amerika Serikat, jang sedang aktif mempersiapkan perang dunia baru dan memusuhi perdjuangan kemerdekaan nasional.

Adalah sangat tragis djika seorang Komunis tidak bisa membedakan antara Sosialisme dan kapitalisme, dan karena itu tidak bisa melihat perbedaan antara politik luarnegeri kedua kubu ini. Saja kira tidak perlu seseorang mendjadi Komunis untuk dapat membedakan politik luarnegeri kedua kubu ini. Ketika Republik Indonesia jang merdeka baru² ini diantjam dengan serangan ber-

sendjata besar²an oleh kaum imperialis jang dipelopori oleh Amerika Serikat, adalah negara² sosialis dan terutama Uni Sovjet dan RRT jang tanpa ragu² menjatakan sikap sepenuhnja berdiri difihak Rakjat dan pemerintah Indonesia.

Selain daripada itu, saban orang mengerti, bahwa di-tengah² kaum imperialis jang dipelopori oleh AS mempersiapkan perang dunia baru, adalah Uni Sovjet dengan kerdjasama jang erat dengan negeri² sosialis lainnja, serta bahu-membahu dengan semua Rakjat jang tjintadamai, dengan sekuat tenaga berusaha untuk mentjegah perang dunia jang baru. Belum berapa lama ini Uni Sovjet setjara sefihak telah menghentikan pertjobaan sendjata atom dan hidrogin, dan telah menjerukan agar AS dan Inggeris mengikuti djedjak jang telah ditempuh oleh Uni Sovjet itu.

Sekali lagi saja katakan, bahwa revisionisme pemimpin² LKJ tidak hanja mengisolasi mereka dari gerakan Komunis sedunia, tetapi djuga djika tidak segera diubah, akan mengisolasi mereka dari gerakan perdamaian dan kemerdekaan nasional dari Rakjat sedunia.

Djelaslah bahwa perdjuangan melawan revisionisme, disamping melawan penjelewengan² lain seperti dogmatisme dan sektarisme, adalah perdjuangan jang terpenting bagi semua kaum Komunis sekarang. Perdjuangan melawan revisionisme sekarang tidak kalah pentingnja daripada perdjuangan Lenin melawan Internasionale ke-II. Gerakan Komunis mendjadi kuat sekarang karena Lenin berhasil mematahkan dalil² Internasionale ke-II dan Partai² Komunis diseluruh dunia melakukan perdjuangan praktis melawan pengchianatan terhadap Marxisme ini. Dan kita, kaum Komunis masa sekarang akan dibadjakan dalam perdjuangan melawan revisionisme. Ini adalah pasti, dan pernjataan Partai² Komunis didalam Kongres ke-XI Partai Komunis Tjekoslowakia baru² ini adalah satu dari banjak bukti akan kepastian ini.

Dengan mendapat inspirasi dari kaum revisionis, kaum reaksioner diberbagai negeri berusaha untuk mengalihkan perhatian dari perdjuangan melawan imperialisme kepada perdjuangan antara Rakjat dengan Rakjat dengan me-ngobar²kan sovinisme. Di Indonesia sovinisme sudah agak lama tidak ada pengaruhnja, tetapi belakangan ini dihidupkan kembali untuk menimbulkan pertentangan dikalangan Rakjat pekerdja Indonesia. Oleh karena itu segi jang terpenting dari perdjuangan ideologi klas buruh Indonesia sekarang jalah melawan sovinisme. Kaum revisionis sangat berdjasa dalam me-ngobar²kan sovinisme di Indonesia, jang berarti telah membikin lebih berat perdjuangan klas buruh Indonesia.

Indonesia tidaklah berbatasan dengan salahsatu negeri sosialis, dan masih dilingkungi oleh negeri imperialis seperti Australia, oleh tentara imperialis di Irian Barat, oleh negeri² djadjahan dan setengah-djadjahan jang merupakan benteng dari imperialisme. Indonesia adalah kira² 15.000 km dari Tjekoslowakia. Tetapi, walaupun demikian, dalam perdjuangan melawan imperialisme jang dikepalai oleh kaum monopolis AS, dan sekarang dapat bantuan penting dari kaum revisionis, klas buruh dan seluruh Rakjat Indonesia tidak pernah berketjil hati dan tetap penuh kejakinan bahwa kemenangan achir pasti difihak mereka. Optimisme dan kejakinan ini bukanlah tidak beralasan. Bukan hanja kebenaran hukum perkembangan masjarakat jang menjatakan bahwa semua bangsa akan merdeka, bahwa Sosialisme pasti datang diseluruh dunia, tetapi kenjataan kongkrit bahwa kekuatan progresif makin berkembang di Indonesia, bahwa sebagian besar bangsa² sudah merdeka atau tidak lama lagi akan mendapat kemerdekaannja, dan bahwa Sosialisme sudah mendjadi sistim dunia jang makin hari makin kuat dan makin unggul dibanjak lapangan, adalah sumber optimisme dan kejakinan Rakjat Indonesia akan kepastian kemenangannja.

Di Indonesia sekarang sudah ada Partai Komunis dan gerakan buruh jang tidak mungkin diabaikan lagi dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kebudajaan.

Pemerintah Indonesia sekarang bukan pemerintah jang dipimpin oleh klas buruh, tetapi bukan pemerintah jang reaksioner. PKI menjokong politik pemerintah sekarang, baik politik dalamnegerinja maupun politik luarnegerinja.

Rakjat Indonesia sedang dan masih akan banjak menghadapi kesulitan² dalam mempertahankan dan menjempurnakan kemerdekaan nasionalnja. 20% dari wilajah Republik Indonesia dimana berdiam lebih dari satu djuta Rakjat Indonesia, jaitu Irian Barat masih dikangkangi oleh kaum kolonialis Belanda jang disokong oleh AS. Kaum pemberontak kontra-revolusioner pada pokoknja memang

sudah dipatahkan kekuatannja, tetapi gerombolan² bandit masih terus melakukan operasinja, disedjumlah desa² Indonesia, jang berakibat terganggunja produksi pertanian, pembunuhan terhadap kaum tani dan pembakaran atas rumah² kaum tani. Selain daripada itu, masih banjak kesulitan dilapangan ekonomi berhubung masih berkuasanja modal monopoli asing di Indonesia, belum tjukupnja digali kekajaan dari dalam bumi Indonesia jang banjak itu, belum adanja pembangunan industri jang berarti dan berhubung dengan perdagangan luarnegeri Indonesia jang masih beratsebelah dengan negara² Barat.

Partai Komunis dan partai² demokratis lainnja beserta semua orang jang berhaluan madju di Indonesia tidak henti²nja mentjari djalan untuk mengatasi kesulitan² jang dihadapi oleh Rakjat Indonesia. Berbagai bentuk front persatuan kami tempuh untuk mempersatukan seluruh kekuatan Rakjat, dan untuk mengeratkan kerdjasama antara Rakjat, Angkatan Perang dan Pemerintah. Dalam menggalang kerdjasama antara bangsa², baik dilapangan politik, ekonomi maupun lainnja, Rakjat dan Pemerintah Indonesia sekarang tetap setia pada 5 prinsip koeksistensi dan 10 dasar (Dasasila) Konferensi Bandung.

Sebagaimana sudah saja katakan diatas, ada djarak jang djauh antara Indonesia dan Tjekoslowakia. Djuga Indonesia dengan banjak negeri lain adalah berdjauhan. Tetapi semua ini mendjadi dekat, baik karena kemadjuan tehnik maupun karena 5 prinsip koeksistensi dan Dasasila Konferensi Bandung jang tersohor itu, dan terutama sekali karena internasionalisme proletar kita. Sukses Rakjat disesuatu negeri adalah sukses Rakjat² negeri² lain. Sukses Rakjat Tjekoslowakia dalam pembangunan dan penjempurnaan Sosialisme, adalah djuga sukses Rakjat Indonesia. Djuga sukses kami adalah sukses para saudara dan kawan².

Hidup dan abadilah persahabatan Rakjat Indonesia dan Rakjat Tjekoslowakia!

Hidup Partai² Komunis dan Partai² Buruh diseluruh dunia, pembawa pandji² Marxisme-Leninisme jang kreatif dan djaja!

Hidup dan bertambah unggullah kubu Sosialisme jang dipelopori oleh Uni Sovjet!

Berikut ini dimuat wawantjara Kawan D.N. Aidit dengan harian *Népszabadság* pada tanggal 7 Djuli 1958 ketika ia dari tgl. 2 Djuli 1958 mengundjungi Republik Rakjat Hongaria selama enam hari.

KEGAGALAN KONTRA-REVOLUSI LEBIH MEMPERKUAT SOSIALISME DI HONGARIA

Pertanjaan: Apakah kesan² dan pendapat kawan selama kawan berada di Hongaria?

Djawab: Saja datang di Hongaria tidak dengan fikiran akan melihat tanda² keadaan jang masih katjau di Hongaria, karena saja tahu bahwa kekuatan kaum kontra-revolusioner sudah lama dipatahkan; bahwa di Hongaria ada pemerintah jang stabil dibawah pimpinan Partai klas buruh jang lebih kuat daripada sebelum kontra-revolusi bulan Oktober 1956. Satu minggu saja di Hongaria dan berkesempatan berbitjara baik dengan pemimpin² tertinggi Rakjat Hongaria, termasuk dengan Janos Kadar jang kebidjaksanaan pimpinannja sudah kami kenal dari tulisan²nja, maupun dengan kader² biasa dari Partai Buruh Sosialis Hongaria, dengan buruh² industri berat dan ringan, dengan anggota² koperasi pertanian dan dengan pemuda². Saja tidak hanja merasa bahagia karena tidak datang dengan fikiran akan melihat tanda² keadaan jang katjau, berhubung dengan tanda² itu memang tidak ada, tapi djuga diliputi kekaguman betapa tjepatnja kaum kontra-revolusioner dapat digulung dan kekuasaan Rakjat dapat dipulihkan kembali dan sekarang djauh lebih kuat daripada sebelum kontra-revolusi.

Walaupun keanggotaan Partai Buruh Sosialis Hongaria sekarang hanja kira² separoh daripada sebelum kontra-revolusi, tetapi djadjuangnja berlipatganda, karena anggota jang ada sekarang adalah saringan sehabis melakukan perdjuangan jang berat, bersatu dalam fikiran dan perbuatan membela kemurnian Marxisme-Leninisme dan diktatur proletariat.

Orang boleh berbitjara tentang kesalahan² kaum Komunis di Hongaria dan kaum Komunis tidak akan menjembunjikannja, tetapi Sosialisme madju terus di Hongaria. Penghasilan nasional jang didapat dari perindustrian sudah merupakan bagian jang terbesar dari penghasilan, hal jang tidak demikian sebelum pembebasan. Sistim

tuantanah sudah tidak mungkin kembali, karena kaum tani tidak akan mau menjerahkan sedjengkal dari tanahnja kepada tuantanah. Djaminan sosial bagi kaum buruh dan tingkat kebudajaan Rakjat bukanlah bandingan dengan sebelum pembebasan. Dengan demikian gagallah semua usaha kaum imperialis, jang dengan pemberontakan kontra-revolusi bulan Oktober 1956 jang gagal, masih mentjoba mengambil keuntungan dengan mengatakan bahwa peristiwa Oktober itu terbuktilah kesalahan dari sistim sosialis dan diktatur proletariat. Sebaliknjalah jang benar, jaitu bahwa kegagalan kontra-revolusi telah lebih memperkuat Sosialisme dan diktatur proletariat, telah lebih menenggelamkan diri mereka dalam kebangkrutan sistim kapitalisme dan diktatur burdjuisnja.

Sebagaimana umumnja orang datang ke Hongaria dengan fikiran akan melihat keindahan kota Budapest dan alam Hongaria, sajapun datang dengan fikiran demikian pula. Djuga dalam hal ini saja tidak diketjewakan. Dan alangkah bodohnja dan miskinnja djiwa pelarian² politik Hongaria, jang meninggalkan tanahairnja jang indah dengan tidak tentu nasibnja sekarang dan haridepannja. Sedangkan bagi mereka jang setia pada tanahair, harikini dan haridepannja sudah terdjamin, jaitu hidup bahagia dinegeri jang indah.

Pertanjaan: Soal² apakah menurut kawan jang dapat mempererat persahabatan antara Rakjat Hongaria dan Rakjat Indonesia?

Djawab: Perdjuangan revolusioner Rakjat Hongaria bukan tidak dikenal oleh Rakjat Indonesia. Berdirinja Republik Sovjet Hongaria tahun 1919 berpengaruh atas perkembangan revolusioner di Indonesia, pemimpin revolusioner Hongaria seperti Bela Kun terkenal di Indonesia, terutama dikalangan kaum revolusioner Indonesia angkatan tua.

Sekarang Rakjat Indonesia jang sudah mempunjai Republik jang merdeka memerlukan banjak sahabat didunia dalam mempertahankan kemerdekaan nasionalnja jang terus-menerus diantjam oleh pakt agresi SEATO jang dikendalikan oleh Amerika Serikat, dan dalam pembangunan ekonomi negerinja. Rakjat Indonesia dengan pemerintah Djuanda dan Presiden Sukarno sekarang dengan gigih berdjuang untuk perdamaian dunia, untuk keredaan ketegangan internasional, penghentian pertjobaan bom A dan H.

Menurut fikiran saja ada sjarat² jang baik untuk mempererat

hubungan politik, ekonomi dan kebudajaan antara Indonesia dan Hongaria. Tentu ada rintangan2 jang harus diatasi, tetapi sedjarah menuntut adanja hubungan jang makin erat antara kedua negeri itu.

Pertanjaan: Apakah menurut kawan pengaruh dari hukuman mati jang didjatuhkan pada Imre Nagy atas perkembangan politik di Indonesia?

Djawab: Kaum imperialis dengan lewat budak2nja tentu sudah mem-besar2kan hal ini, sudah memuat berita2 sensasi dengan huruf2 tebal dalam suratkabar2 kanan Indonesia sebagai „kekedjaman" diktatur proletariat. Tetapi tidak akan lebih daripada itu, Rakjat Indonesia jang baru sadja mengalami pemberontakan kontra-revolusioner jang diorganisasi dan dipersendjatai oleh kaum imperialis Amerika Serikat, tahu benar apa artinja kontra-revolusi djika tidak ditindas dengan kekerasan. Beladjar dari kaum kontra-revolusioner Hongaria baru2 ini kaum kontra-revolusioner Indonesia djuga telah membakar hidup2 ratusan patriot jang gigih berdjuang membela Republik Indonesia.

Tuntutan hukuman mati oleh penuntut umum pengadilan atas 3 orang teroris jang sudah mengadakan pertjobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno pada achir tahun jang lalu, membikin hukuman mati untuk pemimpin kontra-revolusi seperti Imre Nagy mendjadi tidak sukar untuk dimengerti atau se-kurang2nja tidak menimbulkan tentangan Rakjat Indonesia.

Tulisan ini adalah pidato Kawan D.N. Aidit dihadapan Kongres ke-V Partai Peratuan Sosialis Djerman tanggal 12 Djuli 1958.

HIDUP PPSD, PEMIMPIN SEDJATI RAKJAT REPUBLIK DEMOKRASI DJERMAN!

Izinkanlah saja atasnama Comite Central, atasnama lebih dari satu djuta Komunis Indonesia dan 8.200.000 pemilih Partai Komunis Indonesia menjampaikan salam persahabatan kepada semua peserta Kongres ke-V Partai Persatuan Sosialis Djerman (PPSD), dan lewat kawan² kepada seluruh Rakjat pekerdja Republik Demokrasi Djerman (RDD) jang tjintadamai, patriotik, progresif dan gagahberani.

Dari lubuk hati kami jang se-dalam²nja dan se-murni²nja kami menjatakan ikut bergembira dan mengutjapkan selamat berhubung sukses² jang sudah kawan² tjapai dalam menjelamatkan dan mengkonsolidasi kedaulatan RDD dan dalam pembangunan Sosialisme.

Di-tengah² antjaman² baru terhadap perdamaian dari imperialisme Djerman dengan tuan²nja kaum monopolis Amerika Serikat, RDD adalah salahsatu faktor perdamaian jang terpenting. Oleh karena itu, sudah seharusnja djika kaum Komunis dan seluruh kaum progresif didunia mengharapkan sukses² jang lebih besar bagi PPSD dalam memimpin Rakjat RDD membangun Sosialisme.

Permainan api jang dilakukan oleh pemerintah Adenauer jang lewat Perdjandjian Paris memasukkan Djerman Barat kedalam NATO dan kemudian menjetudjui tentara Djerman Barat dipersendjatai dengan sendjata² atom bukan hanja antjaman untuk RDD dan Eropa, tetapi adalah antjaman bagi seluruh umatmanusia. Rakjat Indonesia melihat dalam politik atom pemerintah Adenauer sekarang sebagai politik jang langsung mengantjam kepentingannja, karena pemerintah Adenauer adalah partner pemerintah Belanda dalam NATO, sedangkan pemerintah Belanda sekarang masih mendjadjah 20% dari wilajah sah Republik Indonesia, jaitu Irian Barat. Oleh karena itu adalah djuga pada tempatnja, djika Rakjat Indonesia menuntut supaja Djerman Barat menghentikan politik atomnja, meninggalkan NATO dan mentjiptakan hubungan normal antara dua negara jang ada di Djerman sekarang.

Benar sekali apa jang dikatakan oleh Kawan Walter Ulbricht dalam referatnja kepada kongres ini, jaitu bahwa makin kuatnja kubu sosialis dan politik perdamaiannja telah menguntungkan lebih landjut pergerakan² nasional anti-imperialis. Ini djuga dibuktikan oleh perkembangan² di Indonesia.

PKI sekarang adalah partai terbesar di Indonesia. Dibawah pimpinannja Rakjat pekerdja Indonesia berdjuang mati²an untuk mempertahankan kemerdekaan nasional, meluaskan hak² politik Rakjat, memperkuat gerakan perdamaian dan untuk perbaikan nasib Rakjat pekerdja.

Pemerintah Indonesia sekarang bukan pemerintah jang dipimpin oleh klas buruh, tetapi djuga bukan pemerintah reaksioner. PKI menjokong politik anti-imperialis dan demokratis pemerintah ini. Sebagai hasil kerdjasama kaum buruh dan Pemerintah, pada achir tahun jang lalu dan permulaan tahun ini perusahaan² kepunjaan kaum monopolis Belanda sudah diambilalih oleh Pemerintah Indonesia, karena pemerintah Belanda keras kepala tidak mau menjerahkan wilajah sah Republik Indonesia, Irian Barat, kepada Republik Indonesia. Djika pemerintah Belanda tetap tidak mengubah pendiriannja, maka semua perusahaan ini akan dikonfiskasi.

Kaum imperialis jang dipelopori Amerika Serikat tidak senang melihat perkembangan di Indonesia. Seluruh dunia sudah tahu bahwa dibelakang pemberontakan kontra-revolusioner bulan Februari jang lalu berdiri Amerika Serikat. Rakjat, Angkatan Perang dan Pemerintah Indonesia tidak mau tunduk pada keinginan Amerika Serikat dan mengadakan perlawanan jang tidak kenal takut. Berkat persatuan dan perlawanan Rakjat, dan berkat bantuan Rakjat² Asia-Afrika, bantuan klas buruh internasional dan negara² sosialis jang dipelopori oleh Uni Sovjet, kaum pemberontak kontra-revolusioner sekarang pada pokoknja sudah dapat dikalahkan. Ini berarti kekalahan besar bagi Amerika Serikat dan budak²nja.

Sesudah pemberontakan kontra-revolusioner berachir dengan malapetaka bagi kaum imperialis Amerika Serikat sendiri, Amerika Serikat berusaha untuk menjelamatkan kaum pemberontak dan untuk menjelamatkan mukanja sendiri dengan mengadakan intrik² politik untuk mengganti atau se-kurang²nja mengadakan perubahan dalam Pemerintah Indonesia. Tetapi apa jang terdjadi? Presiden

Sukarno dan pemimpin² Rakjat Indonesia setudju diadakan perubahan, dan achir bulan Djuni jl. sudah diadakan reshuffle dalam kabinet, tetapi jang samasekali bertentangan dengan keinginan Amerika Serikat dan kaum reaksioner dalamnegeri. Pemerintah Indonesia sekarang mendapat dukungan lebih kuat, baik didalam parlemen maupun dikalangan massa Rakjat.

Pengalaman sudah mengadjar Rakjat dan Partai Komunis Indonesia, bahwa kesukaran jang bagaimanapun besarnja pasti dapat diatasi djika didalam negeri ada persatuan nasional jang kuat, ada persatuan Rakjat pekerdja dan persatuan klas buruh jang kuat, dan ada persatuan dikalangan kaum Komunis sendiri.

Pengalaman lain jalah, bahwa intervensi imperialis hanja dapat dipatahkan djika ada koordinasi dari semua kekuatan anti-imperialis diseluruh dunia. Oleh karena itu kaum Komunis Indonesia harus setia pada internasionalisme proletar, harus mendjadi anggota keluarga jang baik dari keluarga Komunis sedunia jang sekarang berdjumlah 33 djuta.

Kami bisa mendjadi anggota jang baik dari keluarga Komunis sedunia djika kami adalah patriot² jang terbaik dari negeri kami. Patriotisme kami hanja bisa sempurna djika kami setia pada internasionalisme proletar. Kurang kesetiaan pada internasionalisme proletar bisa membikin kami mendjadi sovinis jang busuk. Oleh karena itu, revisionisme jang dipropagandakan oleh pemimpin² Liga Komunis Jugoslavia adalah berbahaja. Revisionisme tidak hanja bertentangan dengan internasionalisme proletar, tetapi djuga bertentangan dengan patriotisme sedjati. Revisionisme adalah sendjata ditangan kaum imperialis untuk memetjahbelah gerakan buruh dan selandjutnja untuk melemahkan gerakan kemerdekaan nasional.

Sebagai penutup sambutan singkat ini saja serukan:

Hidup solidaritet Rakjat² kubu sosialis dengan Rakjat² negeri² kapitalis, negeri² tergantung dan djadjahan!

Hidup gerakan Komunis sedunia jang dipimpin oleh adjaran² Marxisme-Leninisme jang djaja dan takterkalahkan!

Hidup PPSD, pemimpin jang sedjati daripada Rakjat RDD jang tjintadamai, demokratis dan progresif!

Hidup persahabatan Rakjat Indonesia dan Rakjat Djerman!

Hidup kubu sosialis jang dipelopori oleh Uni Sovjet!

Wawantjara jang berikut diberikan oleh Kawan D.N. Aidit kepada wakil Buletin Luarnegeri Partai Komunis Aldjazair pada tanggal 24 Djuli 1958 di Berlin.

SEMUA PARTAI DI INDONESIA BERSATU MENJOKONG PERDJUANGAN RAKJAT ALDJAZAIR

Pertanjaan: Sedjak hampir 4 tahun Rakjat Aldjazair melakukan perdjuangan bersendjata untuk kemerdekaan nasionalnja. Bagaimana Rakjat Indonesia mengikuti perdjuangan tersebut?

Djawab: Dalam menjokong perdjuangan kemerdekaan nasional Rakjat Aldjazair semua partai di Indonesia bersatu, mulai Partai Komunis Indonesia jang kiri sampai pada partai Masjumi jang paling kanan. Karena Rakjat Indonesia sendiri sedang berdjuang mempertahankan kemerdekaan nasionalnja dari intervensi asing, dan berdjuang untuk membebaskan 20% dari wilajah negerinja, jaitu Irian Barat, perdjuangan kemerdekaan nasional Rakjat Aldjazair mudah dimengerti oleh Rakjat Indonesia dan merasa ada persamaan nasib. Oleh karena itu Rakjat Indonesia mengikuti dari dekat perdjuangan kemerdekaan Rakjat Aldjazair.

Pertanjaan: Bagaimana Rakjat Indonesia membantu Rakjat Aldjazair dalam perdjuangannja?

Djawab: Bentuk jang paling sederhana jalah mempopulerkan perdjuangan Rakjat Aldjazair dengan tulisan² dalam suratkabar² dan dengan membandjiri kedutaan Perantjis dengan tuntutan² supaja menghentikan aksi² militernja dan mengakui kemerdekaan nasional Rakjat Aldjazair. Tuntutan² kepada kedutaan Perantjis ini dilakukan oleh pimpinan partai² dan organisasi² massa buruh, tani, pemuda dll., baik oleh pimpinan sentral maupun lokal, dan atas putusan rapat² umum.

Djuga demonstrasi dan rapat umum solidaritet dengan Rakjat Aldjazair pernah diadakan dibukota Republik, Djakarta. Parlemen Indonesia djuga mengambil bagian dalam menuntut kemerdekaan untuk Aldjazair.

Kegiatan jang besar dari Rakjat Indonesia dalam hubungan dengan menjokong perdjuangan kemerdekaan nasional Aldjazair

telah timbul dalam aksi menuntut pemerintah Perantjis supaja membatalkan hukuman mati bagi pahlawan Djamila dkk. Nama Djamila sangat terkenal di Indonesia, dan gambarnja diberi tempat jang terhormat di-rumah² buruh dan tani Indonesia.

Pertanjaan: Bagaimana sumbangan chusus PKI untuk membantu perdjuangan tersebut diatas?

Djawab: Kader² PKI terutama bertugas memberi pendjelasan tentang perdjuangan Rakjat Aldjazair kepada kaum buruh dan kaum tani Indonesia. Rol klas buruh dan Partai Komunis Aldjazair, sebagai kekuatan progresif jang konsekwen melawan imperialisme, dan jang penting adanja tidak boleh disangsikan untuk sekarang dan haridepan Rakjat Aldjazair, didjelaskan oleh Partai Komunis Indonesia kepada Rakjat pekerdja Indonesia.

Tanjadjawab ini adalah antara Kawan D.N. Aidit dengan madjalah *Deutsche Aussenpolitik* pada tanggal 26 Djuli 1958 di Berlin dalam rangka kundjungannja ke Republik Demokrasi Djerman dari tgl. 9 sampai 31 Djuli 1958 untuk menghadiri Kongres ke-V Partai Persatuan Sosialis Djerman. Tanjadjawab ini chusus berkisar pada masalah penting jang dihadapi oleh seluruh Rakjat Djerman, jaitu masalah mempersatukan kembali negerinja.

KONFEDERASI ADALAH SATU²NJA PEMETJAHAN POLITIK JANG OBJEKTIF BAGI DJERMAN

Pertanjaan: Apakah menurut pendapat Saudara suatu Konfederasi kedua negara Djerman adalah suatu pemetjahan politik jang memenuhi tuntutan perdamaian di Eropa?

Djawab: Kenjataan sekarang jalah bahwa Djerman terbagi dalam dua negara, jaitu Republik Demokrasi Djerman (RDD) dan Republik Federasi Djerman (RFD), masing² dengan sistim politik dan sosial jang sangat berbeda dan telah mengalami selama 12 tahun perkembangan jang berlainan samasekali. RDD dengan kekuasaan klas buruh dan tani dan dengan sistim Sosialismenja, sedangkan RFD dengan kekuasaan kaum kapitalis monopoli dan tuantanah² besar. RDD adalah anggota dari kubu sosialis, sedangkan RFD adalah anggota pakt militer NATO jang agresif. Kenjataan² ini tidak mungkin dibantah oleh siapapun.

Kenjataan lain jalah bahwa Djerman adalah satu nasion. Sebagai nasion Djerman mempunjai kebudajaan jang tinggi, mempunjai banjak tokoh² dilapangan politik, ilmu, kebudajaan dan kesenian jang diakui kebesarannja oleh seluruh dunia. Isi hati Rakjat Djerman tidak bisa lain, jalah ingin adanja Djerman jang bersatu, tidak terbagi dalam dua negara seperti sekarang. Djika sekarang Djerman belum bersatu, bukanlah karena keinginan Rakjat Djerman, dan bukanlah untuk se-lama²nja.

Djadi, bahwa Djerman akan mendjadi satu kembali bukan soal, karena biar bagaimanapun Rakjat Djermanlah jang pada achirnja akan menentukan dan akan menang, sesuai dengan perkembangan diseluruh dunia sekarang jang menudju kemenangan semua Rakjat atas imperialisme dan semua kaum penindas.

Soalnja sekarang jalah, djalan manakah jang se-baik²nja untuk membikin Djerman bersatu kembali?

Djika fikiran kaum kapitalis monopoli dan tuantanah² besar di

Djerman Barat untuk „mempersatukan" Djerman dengan mentjaplok RDD dengan kekuatan militer dilaksanakan, maka pasti akan menimbulkan kekatjauan diseluruh Djerman, dan akan ditentang keras oleh Rakjat Djerman sendiri, tidak hanja Rakjat Djerman di RDD, tetapi djuga jang di RFD. Perbuatan mentjaplok ini adalah perbuatan imperialis dan fasis, oleh karena itu tidak hanja akan ditentang oleh negara² sosialis, tetapi djuga oleh semua Rakjat dan negara jang tjintadamai dan demokratis. Kaum buruh dan kaum tani Djerman jang sekarang berkuasa atas nasibnja sendiri, jang sudah mendjadi tuan atas semua kekajaan negerinja dan atas semua hasil kerdjanja, pasti akan mengadakan perlawanan gigih atas pentjaplokan jang kurangadjar ini.

Djuga tjara lain untuk mempersatukan tanpa melalui proses jang dibutuhkan untuk itu, akan sia² dan akan berakibat sebaliknja. 12 tahun pendidikan sosialis di RDD dan 12 tahun kekuasaan kaum kapitalis monopoli dan tuantanah² besar di RFD tidak mungkin dianggap tidak ada selama ini.

Djadi, satu²nja djalan bagi mereka jang ingin melihat Djerman satu kembali, per-tama² harus mengakui adanja dua negara Djerman dan harus mengambil sikap politik jang sesuai dengan pengakuan ini. Penjatuan kedua negara ini harus melalui kerdjasama dulu dalam hal² jang dapat dikerdjakan bersama. Oleh karena itu, bentuk konfederasi antara RDD dan RFD adalah sutu²nja pemetjahan politik bagi Djerman, jang paling masuk akal dan lambat-laun akan mendjadi kejakinan politik bagian jang sangat besar dari Rakjat Djerman.

Konfederasi antara dua negara Djerman hanja dapat berarti mengabdi perdamaian di Eropa djika konfederasi ini adalah konfederasi jang demokratis dan tjintadamai. Djerman bersatu tidak otomatis mengabdi perdamaian! Zaman kekuasaan fasis Hitler, Djerman adalah satu, tetapi pada waktu itu Djerman adalah tenaga penggerak jang pokok dari perang dunia kedua. Oleh karena itu, usul supaja konfederasi dengan sjarat RFD keluar dari NATO, dan dengan sendirinja RDD djuga keluar dari Pakt Warsawa adalah sangat penting dan malahan merupakan inti dari konfederasi.

Berdasarkan kenjataan² diatas, adalah keliru sekali fikiran sementara pemuka² negara² netral, jang dalam kata²nja ingin melihat

Djerman bersatu, tetapi dalam prakteknja hanja mengadakan hubungan diplomatik dengan RFD sadja. Djuga keliru fikiran jang mengira, bahwa djika Djerman sudah bersatu perdamaian dengan sendirinja sudah terdjamin di Eropa.

Hanja mengadakan hubungan diplomatik dengan RFD, djadi tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan RDD, berarti menstimulasi semangat mentjaplok RDD dengan kekerasan sendjata jang memang ada dikalangan kaum kapitalis monopoli dan tuantanah² besar di Djerman Barat, berarti memperkuat kedudukan kaum fasis jang memegang pos² penting di Djerman Barat, seperti misalnja djenderal Speidel. Politik ini adalah bertentangan dengan politik anti-imperialis dan anti-fasis dari negara² netral.

Penjatuan Djerman akan sangat dibantu djika makin banjak negara², termasuk negara² netral, jang mengadakan hubungan diplomatik dengan RDD. Tindakan ini tidak hanja membantu penjatuan Djerman, tetapi djuga satu persiapan jang penting supaja konfederasi Djerman nanti mendjadi konfederasi jang demokratis dan tjintadamai, dan satu pukulan terhadap semangat mentjaplok dikalangan penguasa di Djerman Barat jang berbahaja itu.

Kekuatiran negara² netral, bahwa dengan mengadakan hubungan diplomatik dengan RDD akan menimbulkan kesukaran² ekonomi bagi dirinja sudah terbukti tidak beralasan. RFD memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Federasi Jugoslavia, tetapi hubungan dagang samasekali tidak berkurang. Walaupun RFD tidak mengakui RDD, tetapi ada perhubungan dagang jang ramai antara RFD dengan RDD, meliputi 400 djuta dolar. Dalam Pekan Raja Leipzig jang terachir RFD membuka pameran jang terbesar, walaupun RFD tidak mengakui RDD. Ini hanja beberapa bukti sadja, tetapi sudah tjukup untuk menerangkan, bahwa RFD haus pasar untuk hasil² industrinja.

Tetapi, jang terpenting bagi negara² netral jalah, bahwa mereka harus setia pada politik netralnja dan pada politik anti-imperialis dan anti-fasisnja jang djuga dianut oleh RDD.

Djadi, konfederasi antara kedua negara Djerman adalah suatu pemetjahan politik jang mengabdi perdamaian di Eropa dan didunia, hanja djika konfederasi ini demokratis dan tjintadamai. Rakjat Indonesia berkepentingan akan adanja konfederasi jang demi-

kian ini, agar tidak ada lagi orang seperti Speidel jang mengepalai tentara NATO, jang berarti djuga mengepalai tentara kolonial Belanda jang sebagian sekarang menduduki Irian Barat dan masih menjiapkan diri untuk mengadakan serangan terhadap Republik Indonesia. Djuga supaja tidak lagi terdjadi, bahwa Djerman Barat mendjadi pangkalan kekuatan angkatan perang Amerika Serikat untuk kepentingan agresinja, seperti jang terdjadi sekarang dengan agresi Amerika Serikat terhadap Libanon. Djuga supaja Djerman tidak untuk ketiga-kalinja mendjadi pentjetus perang dunia jang akibatnja sudah sama² kita ketahui.

Tulisan ini adalah pidato sambutan Kawan D.N. Aidit pada malam perkenalan dan peresmian berdirinja Jajasan „Universitas Rakjat" (UNRA) pada tanggal 25 September 1958 di Djakarta.

Dalam pidato ini dikemukakan bahwa beda dengan universitas serta sekolah tinggi lainnja, UNRA mengadjarkan ilmu2 dengan sasaran menjelesaikan Revolusi Agustus '45 sampai ke-akar2nja, disamping ia terbuka bagi pemimpin2 serikatburuh2, organisasi2 tani dan organisasi2 massa lainnja. Dengan demikian UNRA memenuhi kebutuhan urgen dari Revolusi Indonesia dan mengambil bagian penting untuk mengachiri pengertian jang simpang-siur tentang Revolusi Indonesia.

„UNIVERSITAS RAKJAT" SEBAGAI SUMBANGAN UNTUK MENJELESAIKAN REVOLUSI AGUSTUS SAMPAI KE-AKAR²NJA

Atasnama CC PKI saja menjampaikan utjapan selamat kepada para pengurus berhubung dengan berdirinja „Universitas-Rakjat".

Saja sudah membatja tudjuan dan rentjana² usaha „Universitas-Rakjat". Mengenai tudjuannja dikatakan: *„Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dikalangan Rakjat sebagai sjarat jang penting untuk meninggikan tingkat kebudajaan Rakjat dan untuk lebih mempertebal semangat patriotik dikalangan Rakjat"*.

Dari tudjuannja tersebut nampaklah, bahwa berusaha memadukan ilmu dengan patriotisme, mendjadikan ilmu mengabdi kepada politik membela tanahair, mendjadikan ilmu mengabdi kepada praktek² revolusioner. Tudjuan ini, djika dipegang teguh oleh para pengurus dan para pengikut, akan mendekatkan UNRA kepada Rakjat dan selandjutnja akan mendjadikan salahsatu kegiatan revolusioner dari Rakjat.

Revolusi Agustus (1945) kita adalah revolusi jang berhenti ditengah djalan, sedjak adanja kompromi antara pemerintah Hatta dengan kaum imperialis Belanda pada achir tahun 1949 dengan persetudjuan kaum imperialis Amerika Serikat. Maksud saja, Revolusi Agustus kita memang telah melahirkan Republik Indonesia dan sampai batas-batas tertentu telah memberikan kemerdekaan politik kepada Rakjat Indonesia, tetapi revolusi ini tidak sampai dapat menimbulkan perubahan² fondamentil didalam masjarakat kita. Dilapangan ekonomi, kekuasaan ekonomi imperialis dan sisa² ekonomi feodal pada pokoknja masih berkuasa. Malahan, belakangan ini kekuasaan ini mau diperkuat lagi dengan adanja Undang² Penanaman Modal Asing.

Kita masing² mengetahui, bahwa siapa jang berkuasa dilapangan ekonomi ia djuga berkuasa dilapangan politik dan kebudajaan. Ada sementara orang mentjoba membantah dan mengatakan, bahwa

Indonesia dilapangan politik dan kebudajaan sudah merdeka sepenuhnja. Tetapi ini dibantah oleh kenjataan se-hari². Kenjataan bahwa Anggaran Belandja Republik kita masih tergantung dari padjak² jang didapat dari adanja modal asing di Indonesia membikin pemerintah mendjalankan segala usaha supaja modal asing tidak pergi dari Indonesia, dan malahan supaja modal asing lebih banjak datang ke Indonesia. Dan kelandjutan lebih djauh ialah, bahwa walaupun sudah diketahui pasti bahwa Amerika Serikat berdiri sepenuhnja dibelakang kaum pemberontak PRRI-Permesta, dan bahwa maskapai² minjak Amerika Serikat berada difihak kaum pemberontak kontra-revolusioner, tetapi tidak ada tindakan politik jang diambil oleh pemerintah Indonesia terhadap mereka jang memihak kaum pemberontak kontra-revolusioner ini. Malahan ada orang² jang merasa harus lebih banjak mendjual senjum pada Duta-besar Amerika Serikat, Jones, dan kapitalis² minjak, lebih banjak berbitjara tentang „anti-Komunisme" jang memang sangat sesuai dengan selera kaum imperialis Amerika Serikat, agar kaum imperialis Amerika Serikat setjara sukarela tidak meneruskan sokongannja kepada PRRI-Permesta dan suka menanam modal lebih banjak di Indonesia.

Kalau sekarang masih laku „Hollands-denken", seperti fikiran anti-Komunisme dan rasialisme, bukanlah sesuatu jang kebetulan, tetapi memang masih mempunjai dasar ekonomi jang masih kuat, jaitu ekonomi jang pada hakekatnja masih sama sadja seperti dizaman kolonialisme Belanda dulu.

Presiden Sukarno, dengan segala kemauan baiknja terhadap Rakjat Indonesia dan terhadap umatmanusia sering mengemukakan tjita²nja tentang penghapusan penghisapan atas manusia oleh manusia, tentang penghapusan *„exploitation de l'homme par l'homme"*. Tetapi, apakah realisasi dari politik Presiden Sukarno jang madju ini? Belum lama berselang, penerimaan Undang² Penanaman Modal Asing. Ini sama artinja dengan melandjutkan *„exploitation de l'homme par l'homme"* di Indonesia!

Demikianlah beberapa tjontoh, sekedar untuk membuktikan bahwa adanja kekuasaan ekonomi asing dinegeri kita membikin Rakjat Indonesia terikat dilapangan politik, dan membikin Indonesia negeri jang belum merdeka penuh. Kita sekarang mempunjai

Presiden dan Perdana Menteri, jang sedjarah perdjuangannja membuktikan bahwa mereka mempunjai kemauan baik terhadap Rakjat Indonesia, jaitu Presiden Sukarno dan Perdana Menteri Djuanda. Tetapi kekuasaan ekonomi asing lebih kuat daripada kemauan baik putera² Indonesia jang baik hati ini.

Tentang keterikatan dilapangan kebudajaan tidak kalah menjoloknja. Boleh dikatakan semua orang mengakui tentang buruknja akibat film², buku² dan madjalah² tertentu dari negeri² kapitalis, terutama dari Amerika Serikat. Tetapi, kalau sudah diingat bahwa dari impor barang² ini sekian uang padjak bisa masuk kas negara, dan negara memang butuh uang, maka tidak semua orang berani mengatakan bahwa impor film², buku² dan madjalah² tertentu itu harus distop. Djadi, pembitjaraan tentang memelihara moral anak² kita, seperti mentjegah pergaulan pemuda-pemudi sekolah jang diluar batas, tentang membasmi crossboys, dsb., mendjadi kurang artinja, karena dikalahkan oleh kebutuhan negara akan uang² padjak. Djuga pembitjaraan² dan perdebatan² dalam konferensi² tentang meningkatkan kebudajaan nasional mendjadi kurang artinja, karena putusan²nja banjak jang tidak bisa dilaksanakan.

Kita berbitjara tentang memadjukan pendidikan teknik, tetapi berapa banjak sudah pemuda² tamatan sekolah teknik jang menganggur karena tidak ada tempat bekerdja berhubung tidak adanja pembangunan industri setjara besar²an. Dan karena ini djuga, sekarang mulai ada dikalangan insinjur² muda kita jang ber-tjita² bekerdja di-pabrik² berat, tambang² dan stasion² hidro-elektrik kepunjaan negara, jang mendjadi kesal karena sesudah mereka lulus udjian insinjur mereka ditempatkan dibelakang medja tulis, dididik mendjadi orang² birokrat!

Berapa banjak pula guru² jang sudah tamat sekolah guru terpaksa mendjadi penganggur, dan ini terdjadi di-tengah² butahuruf jang masih banjak, ditengah puluhan ribu anak² Indonesia jang tidak kebagian tempat di-sekolah² rendah dan menengah.

Pendeknja dengan tidak adanja perubahan fondamentil dilapangan ekonomi dan politik, kita tidak bisa berbitjara tentang revolusi kebudajaan. Kita bisa berbitjara tentang revolusi kebudajaan hanja sebagai kelandjutan dari revolusi dilapangan ekonomi dan politik. Tetapi, seperti sudah diterangkan diatas, djustru revolusi

dilapangan ekonomi dan politik ini belum terdjadi, perubahan fondamentil dikedua lapangan ini tidak sampai dilahirkan oleh Revolusi Agustus.

Saja tidak menutup mata, bahwa Revolusi Agustus sudah mengadakan beberapa perubahan jang madju, tetapi perubahan² ini tidak mengubah dasar² masjarakat kita. Ekonomi imperialis dan restan² dari ekonomi feodal masih bertjokol. Politik resmi dari pemerintah² Indonesia jang ada sampai sekarang bukanlah menghapuskan kedua peninggalan zaman lampau ini sampai ke-akar²nja. Padahal penghapusan dari dua hal ini sampai ke-akar²nja adalah tuntutan Revolusi Agustus 1945.

Sebagaimana sudah saja kutip tadi, tudjuan UNRA ialah *mengembangkan ilmu pengetahuan dikalangan Rakjat ..... untuk lebih mempertebal semangat patriotik dari Rakjat.* Djadi, ingin menjebarkan ilmu dan mengadjak Rakjat mempeladjari ilmu dengan bersasaran, dan sasarannja ialah pengabdian kepada tanahair.

Kalau kita berbitjara tentang pengabdian kepada tanahair, tentang patriotisme, maka seharusnjalah kita berbitjara tentang sesuatu jang riil dan kongkrit. Saja berpendapat, kalau kita tjinta kepada tanahair, tjinta patria, tjinta Indonesia, maka jang kita tjintai bukanlah hanja pohon² njiurnja jang melambai ditepi pantai, atau panorama ketika matahari sedang naik atau hendak turun diantara bukit², atau gunung², tetapi jang kita tjintai adalah semuanja, dan diatas segala-galanja Rakjatnja, terutama Rakjat pekerdjanja. Apakah artinja Indonesia tanpa Rakjat, terutama tanpa Rakjat pekerdja? Tanpa Rakjat pekerdja Indonesia tidak ada!

Bagi saja, Indonesia adalah tanahair jang indah. Tapi keindahan ini mendjadi tidak komplit, karena Rakjat Indonesia, jaitu isi Indonesia jang paling terhormat, masih tertindas, karena masih ada imperialisme dan feodalisme. Ja, keindahan ini baru komplit, kalau samasekali sudah tidak ada lagi penghisapan, sudah tidak ada lagi „exploitation de l'homme par l'homme", dimana sudah terdapat manusia² Indonesia jang sehat², jang gembira dan mempunjai rasa persahabatan jang dalam dengan umatmanusia sedunia.

Kalau kita berpokokpangkal pada Rakjat, maka patriotisme kita tidak bisa lain harus terutama mengabdikan diri kepada Rakjat.

Pada waktu sekarang, mengabdikan diri kepada Rakjat berarti bersama² Rakjat menghapuskan kekuasaan musuh² Rakjat dari Indonesia, dan musuh² Rakjat itu jalah imperialisme dan agen²nja serta tuantanah². Ini berarti kita menjelesaikan Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja.

Mempertebal semangat patriotik dikalangan Rakjat berarti mempertebal semangat untuk menjelesaikan Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja.

Saja jakin, djika UNRA bekerdja dengan sasaran Revolusi Indonesia, dengan sasaran penjelesaian Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja, maka UNRA akan bermanfaat bagi Rakjat dan revolusi.

Sekarang ini banjak pengabdi² Revolusi, baik didalam Partai², dalam Pimpinan organisasi² massa, dikalangan para pemuda dan peladjar, dan dikalangan alat² negara jang ingin mengabdikan diri lebih baik kepada revolusi. Tetapi mereka terhalang dalam kemauan baiknja ini, karena mereka tidak bekerdja dengan ilmu² revolusioner jang dibutuhkan. Mereka akan dapat melipatgandakan hasil pekerdjaan revolusioner mereka, djika mereka dibekali dengan ilmu² revolusioner. Adalah kewadjiban UNRA untuk membekali mereka dengan jang mereka butuhkan ini.

Tentu ada orang jang bertanja: mengapa masih diperlukan UNRA, bukankah sekarang sudah banjak Universitas, Sekolah Tinggi, Akademi dsb.? Kepada orang² jang bertanja ini saja bertanja kembali: apakah diantara Universitas², Sekolah² Tinggi, Akademi² dsb. ada jang mengadjarkan ilmu² dengan sasaran menjelesaikan Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja? Tidak bukan?

Lagi pula apakah Universitas², Sekolah² Tinggi, Akademi² dsb. itu terbuka bagi pemimpin² serikatburuh², organisasi² tani dan organisasi² massa lainnja, jang bukan karena kesalahannja tidak mampu dimasa mudanja menduduki bangku sekolah menengah dan sekarang tidak mampu mengeluarkan banjak uang? Djuga tidak, bukan?

Oleh karena itu, UNRA ini sangat diperlukan, tidak hanja diibukota Republik, tetapi djuga disemua ibukota Provinsi, dan kota² penting lainnja, dimana sudah ada sjarat²nja, seperti guru, tempat dsb.

Kepada para pengurus UNRA saja sarankan supaja dalam

menjusun matapeladjaran tidak lupa mentjantumkan matapeladjaran² tentang *Sedjarah Perkembangan Masjarakat, tentang Sedjarah Indonesia, tentang Sosial-Ekonomi Indonesia, tentang Revolusi Indonesia dan bahasa Indonesia.* Tentu djuga diperlukan matapeladjaran² lain, sesuai dengan kebutuhan dari perdjuangan Rakjat untuk kebebasannja, tetapi mengenai jang saja sebutkan ini supaja benar² tidak dilupakan, karena sangat erat hubungannja dengan tugas² menjelesaikan Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja.

Djadi djelasnja, bahwa UNRA didirikan untuk memenuhi kebutuhan jang urgen dari Revolusi Indonesia. Saja mengharap agar UNRA mendjadi tempat bagi semua patriot Indonesia, disamping untuk mempeladjari ilmu² revolusioner, djuga mendjadi tempat dimana banjak dipersoalkan tentang revolusi Indonesia. Dengan demikian, UNRA mengambil bagian jang penting untuk mengachiri pengertian jang bersimpang-siur, atau sengadja dibikin bersimpang-siur, tentang Revolusi Indonesia. Pengertian jang tepat tentang Revolusi Indonesia merupakan persiapan ideologis jang penting untuk memenangkan Revolusi Indonesia sampai ke-akar²nja.

Pada waktu sekarang, menjelesaikan Revolusi Indonesia sampai ke-akar²nja berarti mengachiri samasekali kekuasaan imperialisme dan feodalisme, dan mendirikan kekuasaan Rakjat sebagai sjarat untuk mendjadikan Indonesia negeri jang merdeka penuh, demokratis, makmur dan madju.

Kepada seluruh Rakjat Indonesia saja serukan untuk membantu segala usaha UNRA dan untuk menuntut peladjaran di UNRA. Ini adalah Universitasmu! Kepada para sardjana patriotik saja mengharapkan bantuan fikiran dan tenaganja sebagai guru, penasehat atau apa sadja bagi UNRA. Dalam UNRA Rakjat menuntut peladjaran dari para sardjana dan intelektuil mereka, dan Rakjat akan sangat berterimakasih kepada mereka.

Hidup UNRA, tempat menggembleng kader² jang dengan tulus hati dan penuh gairah mengabdikan diri kepada tugas² patriotik, jang terpenting, jaitu penjelesaian tugas² Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja.

Jang berikut adalah pernjataan Kawan D.N. Aidit jang mendjelaskan sikap PKI jang mendukung ide Demokrasi Terpimpin sebagai satu2-nja djalan pada saat ini menudju pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%.

MENDUKUNG DEMOKRASI TERPIMPIN ADALAH POLITIK JANG PALING REVOLUSIONER!

Waktu belakangan ini banjak pertanjaan diadjukan kepada PKI apa sebabnja maka PKI menjokong ide Demokrasi Terpimpin.

Per-tama2 perlu saja terangkan, bahwa sokongan PKI terhadap ide Demokrasi Terpimpin bukan hanja sekedar sokongan formalitet karena ide ini datangnja dari Presiden Sukarno, tetapi sokongan PKI timbul dari kejakinan politik jang sudah difikirkan setjara matang.

Kemampuan demokrasi liberal sudah diudji dalam praktek kehidupan politik Indonesia, dan ternjata bahwa sistim jang setjara sedjarah dan setjara dunia sudah bangkrut ini, djuga di Indonesia tidak mampu memetjahkan berbagai masalah penting jang dihadapi oleh Rakjat Indonesia. Rakjat Indonesia sudah melihat bahwa sistim ini adalah inherent atau satu dengan korupsi dan birokrasi jang samasekali tidak disukai dan ditentang oleh Rakjat Indonesia.

Kaum kanan jang paling reaksioner, setelah melihat gelagat bahwa mereka tidak dapat lagi memperalat demokrasi liberal, sudah sedjak djauh hari berusaha menutupi ketidak-mampuan sistim ini dengan pertjobaan merebut kekuasaan politik dengan djalan extra-parlementer untuk mentjiptakan sistim pemerintah fasis jang berbentuk junta-militer. Gagal pertjobaan ini dipusat, mereka tjoba dengan mendjagokan tokoh2 militer dibeberapa daerah untuk merebut kekuasaan politik setjara lokal sebagai alat untuk menekan Pemerintah Pusat supaja bertekuk-lutut. Dengan pemberontakan kontra-revolusioner „PRRI-Permesta" pada awal tahun 1958 tokoh2 Masjumi-PSI dapat mendjadikan dirinja „radja2 sehari" di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara, berkat bajonet2 orang2 militer jang sepaham dengan mereka dan berkat dorongan dan bantuan negara2 imperialis jang dikepalai oleh Amerika Serikat.

Tetapi, meskipun tokoh² reaksioner dan petualang dari „PRRI-Permesta" telah mengalami kegagalan, kaum reaksioner dan petualang politik masih tjukup banjak dinegeri kita, dan masih ada tuan Hatta untuk didjadikan alat guna pertjobaan menundukkan Rakjat Indonesia, baik dengan djalan membentuk kabinet reaksioner seperti jang sudah dinjatakan oleh Dr. Sukiman (Masjumi) maupun dengan mendirikan diktatur-militer atau diktatur-perseorangan.

Kebangkrutan sistim demokrasi liberal dimata Rakjat Indonesia tidak terdjadi dalam keadaan dimana imbangan kekuatan antara Rakjat Indonesia dengan imperialis dan tuantanah sudah memungkinkan Rakjat Indonesia mengatasi krisis politik ini dengan mentjiptakan kekuasaan Rakjat, jaitu kekuasaan politik dimana kedaulatan sepenuhnja berada ditangan Rakjat, dan dimana musuh² Rakjat ditjabut samasekali hak² politiknja.

Dalam situasi jang demikian ini sangat penting artinja ide Demokrasi Terpimpin dari Presiden Sukarno. PKI menerima Demokrasi Terpimpin dengan pengertian bahwa jang diterimanja adalah demokrasi, dan demokrasi jang tidak liberal. Segi positif dari Demokrasi Terpimpin jalah, disatu pihak anti-diktatur-militer dan diktatur-perseorangan, dan dipihak lain anti-liberalisme. Anti-liberalisme dilapangan politik, tidak bisa diartikan lain ketjuali pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%, jaitu pembentukan kabinet Gotong-rojong berdasarkan perwakilan berimbang dan tanpa „dagang sapi". Anti-liberalisme dilapangan ekonomi tidak bisa diartikan lain ketjuali anti "free fight liberalism" dilapangan ekonomi, dan ini berarti mengutamakan sektor negara untuk memimpin sektor partikelir. Segi² positif dari Demokrasi Terpimpin harus dikembangkan dan ditudjukan untuk pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%. Demokrasi Terpimpin dan Konsepsi Presiden Sukarno adalah satu kesatuan, jang pertama adalah djalan untuk mentjapai jang kedua.

Mengenai pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno lewat Demokrasi Terpimpin, baik diingat pengalaman jang lampau, jaitu bahwa pelaksanaan tjita² jang baik tidak mungkin digantungkan pada partai², golongan² dan orang² jang memang tidak berkemauan baik. Djika mau sukses, tidak ada djalan lain, bahwa Konsepsi Presiden Sukarno harus dilaksanakan diantara partai², golongan² fungsionil dan orang² jang menjetudjuinja. Mereka jang menolak Konsepsi Presiden Sukarno dan menolak Demokrasi Terpimpin adalah anti-persatuan nasional, pro-liberalisme atau pro-diktatur-militer dan diktatur-perseorangan. Adalah tidak masuk akal samasekali djika tjita² jang baik, jang terkandung didalam Konsepsi Presiden Sukarno dan dalam Demokrasi Terpimpin digantungkan pelaksanaannja pada mereka jang menolaknja.

Tentu ada orang bertanja: siapakah jang memimpin Demokrasi Terpimpin? Menurut fikiran saja, jang memimpinnja jalah Presiden Sukarno (Bung Karno), tidak sebagai diktator, tetapi sebagai demokrat, jang tetap mengindahkan sistim kepartaian dan hak² Parlemen, tetapi jang setjara konsekwen melikwidasi sifat² liberal dari sistim demokrasi parlementer ini. Hak² tertentu harus diberikan kepada Presiden Sukarno sebagai pemimpin pelaksanaan Demokrasi Terpimpin sehingga Demokrasi Terpimpin dapat dilaksanakan, djika tidak demikian maka Demokrasi Terpimpin akan mendjadi omongkosong belaka.

Sementara orang bertanja, apakah kedjadian² di Pakistan dan Mungthai tidak ada pengaruhnja terhadap perkembangan di Indonesia. Pengaruhnja tentu ada, terutama dikalangan orang² jang tidak berpikiran pandjang, dikalangan petualang² dan dikalangan orang² jang suka meng-indjak² hak² azasi Rakjat. Tetapi baiklah diketahui, bahwa ini bukan keinginan Rakjat Indonesia dan pemimpin² Rakjat Indonesia. Kesedaran politik Rakjat Indonesia sudah tjukup tinggi untuk tidak menerima Pakistan dan Muangthai sekarang sebagai model. Usaha² kaum petualang untuk mendiskreditkan kehidupan politik jang demokratis dan mendiskreditkan partai² politik setjara integral tidak akan mungkin berhasil, selama Rakjat Indonesia masih ingat, bahwa lama sebelum ada petualang² ini partai² sudah berdjuang dan menderita untuk kemerdekaan nasional Indonesia. Selain daripada itu, tiga tahun setengah diktatur-militer Djepang sudah tjukup bagi Rakjat Indonesia untuk menolak pertjobaan kearah itu sekali lagi, tidak perduli dari pihak manapun datangnja.

Satu²nja djalan untuk mengalahkan diktatur-militer atau diktatur-perseorangan disatu pihak, dan mengalahkan liberalisme dilain pihak, jalah pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno, dan satu²nja djalan kearah ini jalah Demokrasi Terpimpin.

Dengan gembira saja menjerukan kepada kaum buruh, seluruh Rakjat pekerdja Indonesia dan semua orang jang berkemauan baik, baik sivil maupun militer, supaja mendukung djalan jang sudah ditundjukkan oleh Presiden Sukarno, jaitu djalan Demokrasi Terpimpin untuk menudju kepelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno. Buat saat ini djalan lain untuk Indonesia tidak ada. Buat sekarang inilah politik jang paling revolusioner.

Djakarta, 24 Oktober 1958

Tulisan berikut adalah pernjataan Kawan D.N. Aidit pada Ulangtahun ke-30 Hari Sumpah Pemuda pada tgl. 28 Oktober 1958.

SEMANGAT SUMPAH PEMUDA HARUSLAH SEMANGAT UNTUK MELAKSANAKAN DEMOKRASI TERPIMPIN DAN KONSEPSI PRESIDEN

Hari Sumpah Pemuda 30 tahun jl. merupakan tonggak sedjarah jang penting dalam usaha membentuk nasion Indonesia jang modern dan besar. Pekerdjaan membentuk satu nasion Indonesia jang sudah dimulai pada awal abad ke-20 adalah satu pekerdjaan raksasa, mengingat bahwa negeri kita adalah seluas djarak antara negeri Inggeris dan pegunungan Kaukasus, terdiri dari ribuan pulau dan lebih dari seratus sukubangsa.

Dalam pekerdjaan raksasa membentuk nasion Indonesia jang besar dan modern, Sumpah Pemuda mempunjai rol jang sangat besar, karena sumpah ini telah memakukan apa jang mendjadi sjarat² satu nasion, seperti wilajah, bahasa, tjiri² persamaan kebudajaan untuk seluruh Indonesia. Semuanja dinjatakan setjara sukarela, dengan semangat jang tinggi melawan imperialisme Belanda dan ketjintaan jang hangat pada tanahair. Ini adalah deklarasi patriotik jang bermutu tinggi.

Sekarang dimulai dengan hari Kebangunan Nasional dalam tahun 1908, dan setelah melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia sudah mendjadi satu nasion jang modern dan besar, dan sudah duduk sedjadjar dengan nasion² merdeka lainnja. Djadi, hikmat jang dapat kita petik dalam memperingati Sumpah Pemuda jalah, bahwa dalam keadaan bagaimanapun dan diatas se-gala²nja kita adalah satu nasion, tidak perduli apa agama, kejakinan politik dan golongannja. Nasion kita adalah nasion jang berdjuang, anti-imperialisme, patriotik dan demokratis.

Hari Sumpah Pemuda dapat kita djadikan landasan untuk memperkuat dan mengisi kemerdekaan kita, asal kita tetap setia, pada semangat dan djiwa Sumpah Pemuda, jaitu tjinta persatuan nasional, anti-imperialisme, patriotik dan demokratis. Berdasarkan semangat inilah saja berpendapat, bahwa ulangtahun ke-30 Sumpah Pemuda akan besar manfaatnja djika kita peringati dengan membulatkan tekad buat melaksanakan Demokrasi Terpimpin dibawah pimpinan Presiden Sukarno (Bung Karno) sebagai sjarat untuk pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%. Ini berarti bahwa kita sungguh tetap setia pada tjita² jang terkandung dalam Sumpah Pemuda, jaitu persatuan nasional anti-imperialisme, patriotisme dan demokrasi.

Tulisan ini adalah Laporan Politik Kawan D.N. Aidit didepan sidang Pleno ke-VII CC PKI jang diperluas dengan Sekretaris2 CDB jang bukan anggota CC. Sidang Pleno jang terachir sebelum Kongres ini berlangsung dari tgl. 19 sampai tgl. 21 November 1958 dan merupakan persiapan politik jang terpenting untuk suksesnja Kongres Nasional ke-VI PKI.

Laporan menganalisa sebab2 kebangkrutan demokrasi liberal di Indonesia dan dengan tegas menjimpulkan bahwa sekalipun ide Demokrasi Terpimpin jang ditjetuskan oleh Presiden Sukarno bukan Demokrasi Rakjat, tapi ia adalah Demokrasi jang anti-liberalisme dan djuga anti-diktatur militer atau diktatur perseorangan. Oleh karena itu seharusnja ia lebih mendjamin hak2 demokrasi bagi Rakjat dan sedjauh mungkin membatasi kebebasan musuh2 Rakjat, untuk menudju pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%.

Achirnja dalam pelaksanaannja serta guna perkembangan situasi lebih landjut, diserukan agar kaum Komunis lebih waspada, lebih memperkuat persatuannja sendiri, lebih mempererat persatuan dengan massa Rakjat, lebih berdisiplin dan lebih giat beladjar ilmu Marxisme-Leninisme.

BERSATU MENEMPUH DJALAN DEMOKRASI TERPIMPIN MENUDJU PELAKSANAAN KONSEPSI PRESIDEN SUKARNO 100%

Sidang Pleno ke-VII Comite Central jang diperluas dengan Sekretaris2 Comite2 Daerah Besar jang bukan anggota CC ini kita langsungkan untuk mendiskusikan dan mensahkan bahan2 jang akan diadjukan kepada Kongres Nasional ke-VI Partai pada pertengahan tahun jang akan datang. Bahan2 itu disiapkan oleh Politbiro untuk kita diskusikan berupa *„Rentjana Tesis Daripada Laporan Umum CC PKI Jang akan Diadjukan Kepada Kongres Nasional ke-VI Partai"*, *„Rentjana Perubahan Program PKI"* dan *„Rentjana Perubahan Konstitusi PKI"*. Sidang CC kali ini merupakan persiapan politik jang terpenting dari Kongres Nasional ke-VI kita.

Walaupun untuk mendiskusikan dokumen2 tersebut sudah meminta banjak waktu dan fikiran kita, tetapi Politbiro masih merasa perlu mengadjak kawan2 untuk mendiskusikan dan menentukan sikap terhadap berbagai persoalan politik luar dan dalamnegeri jang penting2 jang kita hadapi sekarang.

*

Sidang Pleno ke-VI CC telah menjimpulkan bahwa perkembangan situasi internasional menundjukkan semakin kokohnja kubu Sosialisme, semakin kuatnja gerakan untuk kemerdekaan dan perdamaian, dan sebaliknja semakin retak dan lemahnja kubu imperialisme, kolonialisme dan perang. Kedjadian2 dunia dalam masa sesudah Sidang Pleno ke-VI Comite Central hingga sekarang ini masih tetap membenarkan konstatasi diatas. Peristiwa2 internasional memperlihatkan kepada kita kebangkrutan imperialisme jang hendak ditjoba diatasi oleh kaum kapitalis monopoli dengan mendja-

lankan politik kekuatan dan dengan lebih memperkeras diktatur jang telah mereka djalankan baik dinegerinja sendiri maupun dinegeri² lain jang mereka kuasai.

Sifat jang semakin agresif dari politik luarnegeri negeri² imperialis, terutama sekali AS, jang didasarkan atas politik kekuatan dan perang dingin dibuktikan oleh intervensi² bersendjata jang mereka lakukan di Timur Tengah, di Asia Timur dan di-bagian² lain dari dunia serta kudeta² dan pertjobaan² kudeta dibeberapa negeri Asia pada waktu² belakangan ini. Politik agresif imperialis ini, disatu fihak telah membawa dunia ketepi djurang peperangan dunia dan difihak lain telah menimbulkan pertentangan² jang semakin tadjam antara Rakjat dan pemerintah AS sendiri, antara AS dengan teman-temannja sendiri dalam persekutuan² militer mereka, terutama dengan Inggeris dan Perantjis, antara negeri² imperialis dengan negeri² djadjahan dan dengan negeri² netral jang tidak masuk dalam „blok" apapun.

Memang, antara kepentingan² serta harapan² bagian terbesar umatmanusia dan rentjana² sekelompok ketjil kaum monopolis beserta kakitangannja terdapat djurang jang lebar dan dalam.

Rakjat sedunia menghendaki lenjapnja kolonialisme, lenjapnja ketegangan² internasional dan terpeliharanja perdamaian dunia. Sesuai dengan hasrat² umatmanusia ini, negeri² kubu sosialis dengan dipelopori oleh Uni Sovjet mendjalankan politik ko-existensi setjara damai dengan penuh inisiatif. Lain daripada itu negeri² kubu sosialis tidak mengalami keretakan, sebaliknja persatuan dan kebulatan mereka semakin kokoh dan teguh. Achir² ini dunia dikedjutkan oleh perkembangan madju melompat di Tiongkok Rakjat, baik dalam industri, pertanian, kebudajaan maupun pertahanan. Lebih² lagi dunia dikedjutkan oleh angka² djatah Partai Komunis Uni Sovjet tentang perkembangan perekonomian Rakjat, jang mendjamin bahwa dalam waktu 15 tahun Uni Sovjet sudah akan melampaui AS dalam segala lapangan. Persatuan negeri² sosialis adalah persatuan jang monolit karena bersemenkan internasionalisme proletar. Dua pertemuan penting antara negeri² ini jang diadakan di Moskow dalam bulan Mei tahun ini (1958) sekali lagi membuktikan kebulatan persatuan tersebut.

Pertemuan jang pertama diadakan pada tanggal 20-23 Mei

adalah pertemuan antara wakil² Partai² Komunis dan Partai² Buruh dari negara² jang mendjadi anggota Dewan Salingbantu Ekonomi, jang telah menjusun dan mensahkan saran² serta langkah² mengenai kerdjasama ekonomi jang lebih madju dan lebih baik diantara negeri² kubu sosialis. Pertemuan ini selandjutnja memberikan perhatian istimewa pada soal memadjukan sumber² bahan mentah dan tenaga listrik serta pada soal mempergunakan segala apa jang paling baru ditjapai dilapangan teknologi. Perhatian chusus diberikan pada kebutuhan kordinasi jang lebih besar dan pada spesialisasi dilapangan permesinan jang akan memungkinkan pelaksanaan massa-produksi setjara besar²an serta modern dan jang akan sangat mengurangi biaja produksi.

Pertemuan lain adalah Sidang Komite Politik Konsultatif dari Perdjandjian Warsawa jang diadakan pada tanggal 24 Mei dimana Uni Sovjet dan negeri² kubu sosialis lainnja a.l. memutuskan untuk mengurangi kekuatan² bersendjata mereka dengan 419.000 orang. Pasukan² Uni Sovjet jang berada di Hongaria berdasarkan Perdjandjian Warsawa itu akan dikurangi dengan 1 divisi lagi selama tahun 1958 dan jang berada di Rumania djuga akan ditarik mundur dalam tahun² ini. Selandjutnja pertemuan ini memutuskan untuk mengadjukan usul perdjandjian tidak saling menjerang dengan NATO. Djelaslah bahwa putusan² jang diambil oleh Perdjandjian Warsawa ini adalah sesuai dengan hakekat dari persekutuan itu, jalah bahwa Perdjandjian Warsawa bukanlah suatu persekutuan militer jang didasarkan atas kepentingan untuk agresi seperti NATO, Pakt Bagdad, SEATO dan persekutuan² militer imperialis lainnja, tetapi adalah persekutuan dari negeri² jang tjinta-damai, jang bertudjuan se-mata² defensif dan untuk ber-sama² berdjuang memelihara perdamaian dunia dan keamanan internasional.

Pertemuan² di Moskow ini mempunjai arti sedjarah jang penting sekali bagi usaha untuk memperteguh persatuan negeri² kubu sosialis jang dengan tetap mendjalankan politik Leninis memelihara perdamaian dunia dan hidup berdampingan setjara damai antara negeri² jang mempunjai sistim politik dan ekonomi jang ber-beda². Pertemuan² ini menundjukkan sekali lagi bahwa Sosialisme adalah sistim sosial jang paling mampu bertindak sebagai kampiun dalam membela kepentingan² fondamentil dari djutaan Rakjat dan jang

sanggup memetjahkan problim² jang mendesak dan jang mengenai haridepan umatmanusia.

Sebagaimana diterangkan diatas proses makin meruntjingnja pertentangan² dikalangan kaum imperialis sendiri terus berlangsung dengan hebatnja. Hal ini dibuktikan oleh pertentangan² jang tadjam antara Amerika-Inggeris disatu fihak dengan Perantjis dan Djerman Barat difihak lain jang merasa sangat dirugikan oleh kedudukan memimpin dari AS-Inggeris dalam NATO. De Gaulle malahan sampai menulis surat terbuka jang menuntut dibentuknja „tritunggal" dalam pimpinan NATO, sesuatu jang sangat ditentang, baik oleh AS-Inggeris maupun oleh negara² NATO lainnja, termasuk Djerman Barat sendiri dan djuga Italia. Disamping itu persekutuan NATO ini sangat digontjangkan oleh pertentangan jang fondamentil antara Inggeris dan Eslandia dan antara Inggeris dan Junani. Teranglah bahwa persatuan NATO jang di-agung²kan oleh kaum imperialis hanjalah persatuan jang retak dan penuh dengan pertentangan².

Di-negeri² Amerika Latin semangat anti-AS makin meluas sebagai akibat dari politik imperialis jang didjalankan oleh AS di-negeri² ini. „Diplomasi dolar" mereka jang hakekatnja jalah merebut dan mengexploitasi se-maximal²nja sumber² ekonomi negeri² tetangga AS jang di Selatan, menimbulkan perdjuangan jang kuat untuk kemerdekaan ekonomi. Ini djelas bisa kita lihat di Argentinia, Brazilia, Chili, Mexiko, dll. Kenjataan menundjukkan bahwa perdjuangan untuk kemerdekaan ekonomi ini terdjalin erat dengan perdjuangan Rakjat menggulingkan rezim² diktatur dari djenderal² jang mewakili kepentingan² kaum komprador-feodal serta kaum monopolis AS.

Kaum imperialis djuga mendapat pukulan keras oleh revolusi jang meletus di Irak pada tanggal 14 Djuli tahun ini, revolusi jang telah menutup suatu zaman jang penuh dengan kegelapan dan penindasan serta membuka suatu kehidupan baru bagi Rakjat Irak. Revolusi jang gagahberani ini telah membikin Pakt Bagdad mendjadi tanpa Bagdad. Revolusi ini merupakan gelombang pasang baru dari revolusi² nasional di Timur.

Takut akan kebangkitan bangsa² Arab di Timur Tengah lebih landjut, kuatir akan terganggunja kepentingan mereka akan minjak

dan dengan maksud mempertahankan kolonialisme serta mendjamin Timur Tengah sebagai perbentengan mereka untuk mengadakan serangan² agresif terhadap Uni Sovjet dan negeri² kubu sosialis lainnja, maka imperialis AS dan Inggeris dengan menggunakan berbagai dalih jang mentertawakan melakukan agresi jang kasar dan kotor terhadap Libanon dan Jordania segera sesudah Rakjat Irak berhasil menggulingkan monarki dari radja Faisal dan bekas Perdana Menteri Nuri Es Said.

Perkembangan terachir di Afrika, dimana telah diproklamasikan berdirinja Pemerintah Sementara Republik Aldjazair di Afrika Utara dan Republik Guinea di Afrika Barat — ke-dua²nja bekas djadjahan Perantjis — menundjukkan lagi makin kokohnja ketetapan hati Rakjat² Afrika dalam perdjuangan menghantjurkan kolonialisme dan untuk pelaksanaan sepenuhnja semangat dan putusan² Konferensi Bandung. Tidak ada satu kekuatanpun jang dapat melemahkan ketetapan hati Rakjat² ini !

Ketetapan jang kokoh dan tak tergojahkan dari Uni Sovjet, RRT dan negeri² kubu sosialis lainnja untuk dengan peringatan² keras serta tindakan² lain membendung agresi dan mempertahankan perdamaian dunia, dan kemarahan serta protes² umatmanusia sedunia jang mengutuk agresi imperialis, semua inilah jang telah meruntuhkan rentjana² imperialis untuk mengadakan perang kilat di Timur Tengah dan jang memaksa mereka melepaskan sementara rentjana² agresif mereka di Timur Tengah jang akan membawa akibat² djauh itu. Ini merupakan suatu kemenangan besar dari kekuatan² perdamaian.

Komunike Bersama Chrusjtjov-Mau Tje-tung jang dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 1958, tidak sadja mendemonstrasikan bahwa dalam masalah² intervensi dan agresi terhadap negeri² Asia-Afrika Uni Sovjet bersatuhati dengan RRT, tetapi lebih dari itu, jalah bahwa seluruh kubu sosialis tetap erat bersatu pada tiap saat dunia langsung dihadapkan pada bahaja perang baru oleh agresi² dan intervensi² imperialis. Komunike Bersama Chrusjtjov-Mau Tje-tung membikin Rakjat sedunia lebih siap dan waspada dan bersamaan dengan itu merupakan peringatan keras pada alamat mereka jang berkuasa di Barat, teristimewa AS, betapa besar, kokoh dan kuatnja kubu sosialis jang bersatu ini, dengan sumber material dan

tenaga manusia jang tak terbatas, dengan ekonomi jang paling madju serta ilmu dan teknologi jang sangat tinggi.

Kaum imperialis AS mentjoba mengalihkan perhatian dunia dari pelaksanaan resolusi Sidang Istimewa Madjelis Umum PBB agar pasukan² AS segera ditarik mundur dari Libanon. Melalui petualangannja disekitar masalah Selat Taiwan AS mempertegang kembali situasi dunia di Asia bagian Timur. Dengan membantu klik Tjiang Kai-sjek jang mentjoba menahan putaran roda sedjarah untuk mentjegah pembebasan jang wadjar dari kepulauan Kuimoi, Matju, Penghu dan pulau² lainnja di Selat Taiwan termasuk Taiwan sendiri oleh RRT, kaum imperialis AS mendjalankan agresi terhadap RRT. Tetapi tak pernah kedudukan kaum imperialis AS begitu terpentjil sendirian seperti dalam masalah Selat Taiwan ini. Sifat kepalabatu mereka jang mengingkari rol RRT sebagai negara besar, tanpamana masalah² dunia tidak bisa dipetjahkan sebagaimana mestinja, dan sifat mereka jang tidak mau melihat kenjataan bahwa RRT adalah salahsatu kekuatan raksasa jang mampu menghadapi dan melawan perang agresi, perang nuklir dan roket sekalipun pasti akan membawa akibat² jang merugikan dan mentjelakakan mereka sendiri.

Peringatan² seperti diatas, kutukan² dari bagian terbesar umatmanusia jang tidak menjukai kolonialisme, intervensi dan agresi imperialis, ditinggalkannja AS sendirian oleh negara² Barat lainnja dalam petualangannja sekitar Selat Taiwan ini, merupakan faktor² jang menjebabkan AS sampai kini tidak berani mentjiptakan perang baru di Asia ini. Sekarang, berkat tuntutan dunia jang kuat dan perlawanan² Rakjat setempat, tentara pendudukan Amerika Serikat dan Inggeris sudah terpaksa angkatkaki masing² dari Libanon dan Jordania. Sedangkan masalah Selat Taiwan sekarang tidak lagi berfungsi mengalihkan perhatian dunia dari Timur Tengah ke Asia bagian Timur seperti jang diinginkan AS, tetapi sudah berfungsi menambat kekuatan² militer AS jang berarti mengurangi tekanan AS terhadap negeri² anti-imperialis di Asia-Afrika, dan berfungsi memobilisasi Rakjat RRT dalam memperkuat pertahanan negerinja dan dalam memperbesar produksi.

Belakangan ini mendjadi makin djelaslah maksud politik kaum imperialis AS mengenai masalah Taiwan ini. Taiwan hendak mereka

djadikan djadjahannja jang permanen sebagaimana tampak dalam Komunike Bersama Dulles-Tjiang Kai-sjek. Dulles sekarang harus mengakui bahwa menjerbu daratan RRT tidaklah mungkin. Karenanja ditjiptakannjalah teori „Dua Tiongkok", jaitu bahwa disamping RRT ada Taiwan jang „sah". Hendak kemana dibawa oleh teori ini tidaklah sukar untuk difahami kalau kita tahu akibat² dari adanja „Dua Korea", „Dua Vietnam" dan „Dua Djerman". Kita sendiri sudah mengalami akibat² dari usaha² AS untuk mengadakan „Dua Indonesia". Provokasi² menudju peperangan baru jang dilakukan oleh boneka² imperialis seperti Syngman Rhee, Ngo Din Diem dan Adenauer merupakan sumber² jang permanen dari peperangan² baru.

Kaum imperialis bukanlah kaum imperialis djika mereka tidak penuh dengan segala matjam akal busuk untuk melakukan tipuan². Dalam melakukan politik memusuhi kubu sosialis dan mengintimidasi negara² Asia non-sosialis seperti Republik Indonesia, kaum imperialis AS telah memperoleh teman setia dalam diri perdana menteri Djepang Kishi, Josidanja AS jang kedua. Dengan tidak menghiraukan samasekali kepentingan Rakjat Djepang, dengan mentjiderai keputusan² Bandung, Kishi tanpa malu² bersedia untuk dipergunakan AS guna memelopori pembentukan pakt militer baru, jakni NEATO (North East Asia Treaty Organisation), persekutuan militer dari negeri² boneka imperialis AS, jaitu Korea Selatan, Djepang dan Taiwan.

Disamping NEATO sebagai alat untuk membendung hasrat² kemerdekaan nasional serta perdamaian dunia dari Rakjat² negeri Asia Timurlaut ini, kaum imperialis djuga membentuk apa jang mereka namakan Armada ke-V di Samudera Hindia, sekalipun seluruh dunia sudah tahu akan kedjahatan Armada ke-VI dan ke-VII AS, jang lebih djahat dari segala badjaklaut disepandjang zaman didjumlah mendjadi satu. Armada jang berpangkalan ribuan mil djauhnja dari AS ini terang tidak ditudjukan untuk membela perbatasan wilajah AS. Maksud sesungguhnja dari Armada ke-V ini semakin djelas kalau kita lihat dalam hubungan SEATO dan NEATO, jaitu untuk dipakai sebagai kekuatan tekanan dan intervensi, terutama sekali terhadap Indonesia dan Birma.

Kishi selandjutnja dalam mendjalankan politik militerisasi Dje-

pang telah berusaha mengubah undang² kepolisian Djepang dengan maksud menindas kaum buruh dan gerakan demokratis di Djepang, merampas hak² azasi Rakjat Djepang dan mengubah Djepang mendjadi suatu negara polisi. Bahaja tumbuhnja militerisme dan tekanan² politik atas Rakjat Djepang ini semakin terasa seriusnja karena djustru politik ini ditempuh pada saat berlakunja penindasan nasional Djepang oleh AS.

Berdasarkan kenjataan² diatas, kaum Komunis Indonesia sepenuhnja berdiri dibelakang seruan Partai Komunis Djepang kepada semua Partai Komunis dan Partai Buruh sekawan untuk menjokong perdjuangan Rakjat Djepang menggagalkan rentjana² pemerintah Kishi jang merupakan antjaman bagi perdamaian di Asia dan diseluruh dunia, merupakan rintangan bagi hubungan persahabatan Djepang dengan negeri² tetangganja, termasuk negeri kita, dan jang akan menjeret Djepang kedalam petualangan jang djahat. Satu kali dibawah telapakkaki militerisme Djepang sudah tjukup bagi Rakjat Indonesia dan Rakjat² Asia lainnja.

Sebaliknja RRT menundjukkan kegiatan jang serius untuk meredakan ketegangan internasional. Ini dibuktikan oleh tindakan penarikan mundur tentara sukarela Tiongkok dari seluruh wilajah Republik Rakjat Demokratis Korea sekalipun keamanan di Asia masih terantjam oleh kegiatan² imperialis seperti diatas.

Politik perang jang diwudjudkan dalam kegiatan² NATO, SEATO, NEATO dan persekutuan² militer lainnja, jang dinamakan oleh Dulles „politik tepi perang" ternjata telah dihukum oleh Rakjat Amerika sendiri sebagaimana terbukti dari hasil pemilihan umum untuk Kongres dan Senat dimana partainja Dulles, Partai Republiken, mengalami kekalahan jang besar. Walaupun tanpa ada harapan bahwa dengan memberikan suara kepada Partai Demokrat nasib dan kehidupan mereka akan lebih baik daripada sekarang, tetapi Rakjat AS telah menjatakan bahwa mereka tidak menjukai politik Eisenhower-Dulles jang menimbulkan kebentjian sangat besar dari Rakjat diseluruh dunia.

Masalah penghentian pertjobaan² sendjata² nuklir setjara universil adalah masalah jang dewasa ini menarik perhatian jang serius diseluruh dunia. Tindakan unilateral Uni Sovjet menjetop pertjobaan² nuklirnja telah mendapat sambutan gembira serta rasa puas

dan lega dari Rakjat sedunia. Rakjat disemua benua mengharap dan mendesak agar kedua negara atom lainnja, jaitu AS dan Inggeris, mengikuti tjontoh jang sudah diberikan oleh Uni Sovjet itu. Tetapi harapan Rakjat diseluruh dunia telah sangat diketjewakan oleh AS dan Inggeris. Dengan tak menghiraukan seruan umatmanusia sedunia agar udara tidak terus-menerus diratjuni oleh debu radioaktif, mereka tetap melangsungkan pertjobaan² nuklir mereka. Dapatlah dimengerti dan adalah dengan sendirinja masukakal kalau Uni Sovjet setelah 6 bulan lamanja menghentikan pertjobaan² nuklirnja itu terpaksa memulai kembali pertjobaan² nuklirnja, djustru untuk memaksa negeri² imperialis supaja mau ber-sama² menghentikan pertjobaan² nuklir setjara total. Penghentian pertjobaan² nuklir tidak hanja untuk kepentingan keamanan Uni Sovjet dan negeri² kubu sosialis, tetapi djuga untuk kepentingan negeri² ketjil dan negeri² lainnja jang bukan negeri-atom.

Dari uraian singkat diatas djelaslah, bahwa tanpa Uni Sovjet jang bisa menandingi negara² atom AS dan Inggeris, kaum imperialis akan bertindak sesukahatinja terhadap negeri² Asia-Afrika jang berdjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan jang penuh, dan terhadap negeri² lain jang lebih lemah daripada mereka. Sedjarah sudah membuktikan bahwa berkat adanja Uni Sovjet jang kuat maka tindakan² dan rentjana² agresif kaum imperialis bisa digagalkan, dibendung ataupun dihambat pelaksanaannja, seperti misalnja agresi terhadap Mesir, Libanon, Jordania dan rentjana agresi terhadap Siria dll. Tindakan Uni Sovjet itu menguntungkan keamanan, perdamaian dan kehidupan manusia diseluruh dunia. Ini adalah kenjataan, suka atau tidak suka pada Uni Sovjet. Untuk dapat melihat kenjataan ini orang tidak perlu mendjadi Komunis, jang diperlukan hanja kedjudjuran dan keberanian mengakui kebenaran.

Uni Sovjet kini terus berdajaupaja dengan gigih untuk mendesak AS dan Inggeris menjetop pertjobaan² nuklir mereka, tidak untuk setahun atau untuk waktu tertentu sadja, tetapi untuk selama²nja. Kesungguhan serta kedjudjuran Uni Sovjet dalam usaha ini dinjatakan dengan djelas dalam sidang Komite Politik Pertama Madjelis Umm PBB jang selama minggu² belakangan ini telah mengadakan perdebatan mengenai masalah perlutjutan sendjata,

termasuk dihentikannja pertjobaan² nuklir dengan segera dan tanpa sjarat. Dihadapan bagian jang terbesar dari umatmanusia sedunia, AS dan Inggeris telah ditelandjangi sebagai musuh perdamaian dan sebagai komplotan jang tidak menjukai perlutjutan sendjata. Achirnja, karena tekanan² jang keras dari AS terhadap delegasi² negara² tergantung kepadanja, termasuk negara² sekutu AS jang tergabung dalam pakt² militer agresif dan negeri² Amerika Latin, maka sidang Komite Politik Pertama MU-PBB menjetudjui dengan 49 pro, 9 kontra dan 23 abstain, sebuah resolusi jang membatasi dirinja dengan usul menangguhkan pertjobaan² nuklir selama Konferensi Djenewa jang diadakan pada tanggal 31 Oktober.

Dengan kenjataan diatas, djelaslah bahwa bahaja radiasi tetap diperbesar oleh ketidaksediaan negara² atom AS dan Inggeris untuk menghentikan pertjobaan² nuklir. Maka sudah semestinjalah apabila seluruh Rakjat Indonesia ber-sama² dengan Rakjat negeri² lain jang tjinta perdamaian, kemadjuan dan kehidupan, melangsungkan dengan lebih intensif gerakan perdamaian dunia dan gerakan menentang pertjobaan² nuklir. Suksesnja „Bulan Perdamaian" baru² ini jang ditudjukan untuk mempopulerkan putusan² Kongres Stockholm dan Konferensi Dunia ke-IV anti bom A dan H di Tokio, merupakan sumbangan jang penting dari Rakjat Indonesia dalam perdjuangan umatmanusia untuk perdamaian. Simpati dan sokongan² jang diberikan Presiden dan Pemerintah Indonesia selama „Bulan Perdamaian" merupakan demonstrasi kebulatan tekad Rakjat dan Pemerintah Indonesia dalam memelihara perdamaian dan melawan imperialisme. Kegiatan² sematjam ini masih harus lebih banjak dan lebih luas dilakukan dinegeri kita. Soal perdamaian harus mendjadi soal seluruh Rakjat kita, gerakan perdamaian harus tumbuh mendjadi gerakan massa jang sangat luas. Dengan memperkuat gerakan perdamaian berarti kita memperkuat kemerdekaan nasional kita. Kaum Komunis Indonesia harus berdiri dibarisan paling depan dalam gerakan perdamaian, karena ini berarti memelopori perdjuangan untuk kemanusiaan dan kemerdekaan tanahair.

*

Peristiwa² internasional lainnja jang mendjadi perhatian dunia adalah peristiwa bertjokolnja diktatur militer de Gaulle di Perantjis dan kudeta² militer kontra-revolusioner di Pakistan dan Muangthai.

Di Perantjis de Gaulle berhasil berkuasa sebagai kelandjutan dari kudeta militer di Aldjazair jang direntjanakan oleh burdjuasi Perantjis jang paling reaksioner dengan bantuan beberapa komandan militer. Ini bukan tanda kekuatan, melainkan tanda kelemahan burdjuasi Perantjis. Mereka sudah terpaksa menempuh djalan extraordiner (se-wenang²) untuk berkuasa.

Adalah karena semakin tjepatnja pertumbuhan kekuatan² perdamaian dan kemadjuan, maka kaum imperialis mentjoba „memperkuat" kedudukannja jang sudah gojah itu dengan mengekang kebebasan² demokratis, me-niup² sovinisme dan mempertjepat persiapan² perang² agresifnja.

Karena krisis² hebat jang dialami oleh burdjuasi maka mereka tidak sanggup lagi untuk berkuasa melalui djalan demokrasi jang di-masa² silam merupakan dasar dari prestise mereka. Dalam saat krisis ekonomi dan politik dimana kekuasaan dan kepentingan mereka terantjam maka burdjuasi menempatkan orang² fasis de Gaulle di Perantjis.

Burdjuasi Perantjis telah menundjukkan ketidakmampuan mereka mengatasi krisis² jang mereka hadapi a.l. mengenai perang Aldjazair jang sedjak 1 November 1954 berketjamuk, jang tidak memungkinkan Perantjis untuk mentjapai kemenangan. Rakjat Perantjis sendiri semakin lama semakin kuat menentang perang kolonial Perantjis di Aldjazair ini.

Dengan tudjuan mentjegah adanja perdamaian di Aldjazair melalui perundingan² dan untuk melangsungkan terus perang kolonial ini, kaum extremis kolonial dengan djenderal² pemberontak fasis jang duduk dalam apa jang dinamakan „Komite Keamanan Umum" mentjiptakan kudeta militer di Aldjazair. Mereka selandjutnja memaksakan suatu diktatur fasis di Perantjis untuk menekan Rakjat. Untuk ini mereka paksakan berdirinja pemerintahan de Gaulle.

Pemerintah de Gaulle jang merupakan hasil dari kekerasan, intimidasi serta intrik² politik lainnja itu bekerdja tanpa supervisi parlemen. UUD jang ada diganti dengan jang baru jang dalam sedjarah Republik Perantjis merupakan UDD jang paling reaksio-

ner, UUD jang berwatak monarkis. Dengan djalan ini kaum reaksioner hendak menindas kebebasan² demokratis, memiliterisasi semua lapangan kehidupan dengan maksud mentjegah Rakjat Perantjis menghimpun diri dalam perdjuangan untuk mentjapai tuntutan² ekonomi dan politik mereka dan untuk dihentikannja perang Aldjazair.

Rezim de Gaulle telah berusaha membekukan demokrasi di Perantjis dan membuka djalan bagi fasisme, bagi diktatur dan teror setjara terbuka dari kapital monopoli.

Sebagaimana halnja di-negeri² lain djuga di Perantjis, pekerdjaan kaum soska adalah mengatjau dan mengchianat. Dalam menaikkan diktatur de Gaulle kesinggasana kekuasaan kita harus sekali lagi melihat peranan mengchianati demokrasi dari kaum soska Perantjis. Sekretaris Djenderal Partai Sosialis Perantjis Guy Mollet, karena pengabdiannja kepada kaum kapitalis monopoli telah dianugerahi kedudukan menteri dalam pemerintahan de Gaulle.

Pengchianatan pemimpin² soska Perantjis telah membuka mata massa anggota dan massa pengikut Partai Sosialis Perantjis akan kepalsuan pemimpin² mereka, dan telah lebih mengeratkan hubungan mereka dengan kaum Komunis dan seluruh kekuatan progresif dalam perdjuangan melawan de Gaulle.

Peranan sangat reaksioner dan mengatjau dari kaum soska ini kita lihat djuga di Birma, dimana mereka dibawah pimpinan U Kyaw Nyein, U Ba Shwe merongrong pemerintah U Nu jang akan madju itu dan dengan melalui gerombolan² teror, jang di Birma terkenal dengan nama „Pyusawthi²", mereka hendak mentjegah perkembangan dalamnegeri kearah tertjapainja perdamaian nasional antara semua kekuatan demokratis dan revolusioner, sebagai sjarat utama bagi Birma untuk melakukan pembangunan ekonominja. Keadaan jang demikian ini akan berarti hilangnja kesempatan untuk mendapat keuntungan jang se-banjak²nja bagi diri mereka sendiri. Itulah sebabnja mereka berusaha untuk menimbulkan kudeta pada tanggal 23 September jang lalu, tetapi dapat digagalkan karena kewaspadaan Rakjat dan pemerintah Birma jang dipimpin oleh Perdana Menteri U Nu.

Di Pakistan dan Muangthai dengan beruntun telah terdjadi pula kudeta² militer. Tudjuan dari kudeta² militer ini samasekali

tidak untuk melenjapkan kekalutan dalamnegeri jang diakibatkan oleh politik ekonomi jang bangkrut dari mereka jang berkuasa sebelum kudeta terdjadi. Ayub Khan jang telah mendesak Iskandar Mirza, demikian pula Sarit Thanarat jang masing² dengan tjara² sangat kasar telah meng-indjak² hak² azasi Rakjat Pakistan dan Muangthai jang masih tinggal sedikit itu serta menindas setjara kedjam gerakan patriotik dari Rakjat jang rindu akan kebebasan dan kesedjahteraan. Keterangan² politik jang mereka berikan menundjukkan bahwa dengan diktatur itu mereka bertudjuan untuk mendjamin tetap terpeliharanja dengan baik kepentingan ekonomi dan militer imperialis, tetap selamatnja pakt² militer jang semakin kuat ditentang oleh massa Rakjat jang luas dikedua negeri itu.

Timbulnja diktatur² militer di Pakistan dan Muangthai menundjukkan bahwa dikedua negeri ini sedang tumbuh gerakan revolusioner Rakjat. Hal ini menimbulkan kekuatiran golongan² jang paling reaksioner sehingga mereka terpaksa bertindak lebih extraordiner. Sekarang kekuatan Rakjat di-negeri² ini belum tjukup besar untuk mentjegah diktatur militer. Tetapi Rakjat dikedua negeri ini tidak akan dapat dikalahkan untuk se-lama²nja. Revolusi Irak adalah bintang pimpinan bagi mereka.

Betapapun kuasanja diktator² itu sekarang, tetapi situasi internasional dewasa ini tidaklah sama dengan situasi diwaktu sebelum perang, disaat diktator² Hitler dan Mussolini berkuasa di Djerman dan Italia. Imbangan kekuatan dunia dewasa ini menguntungkan fihak demokrasi dan merugikan kaum reaksioner dan fasis. Oleh karena itu sedjak sekarangpun sudah dapat dibajangkan bahwa demokrasi pasti akan menang, djuga di Perantjis, di Pakistan dan Muangthai, dan dimana sadja.

*

Rakjat Indonesia jang tidak mengenal tradisi fasisme dan militerisme, tetapi pernah mengalami kekedjaman diktatur militer Djepang, tidak mungkin memberikan dukungannja pada diktatur² sematjam ini. Simpati dan solidaritet jang se-dalam²nja dari klas buruh dan seluruh Rakjat Indonesia jang demokratis tertudju pada klas buruh Perantjis, pewaris sedjati dari Komune Paris, serta pada

seluruh Rakjat Perantjis jang berdjiwa demokratis, berdjiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan. Simpati dan solidaritet sedalam²nja dari Rakjat Indonesia tertudju pada Rakjat Pakistan dan Muangthai jang dengan segala derita dan pengorbanannja pasti akan berhasil menggulingkan kekuasaan diktatur² ini untuk kemerdekaan, demokrasi dan perdamaian. Revolusi Irak adalah tjontoh jang sangat baik bagi semua Rakjat jang hidup dibawah diktatur burdjuasi jang sangat reaksioner dan kurangadjar.

Demikianlah dengan singkat situasi internasional dewasa ini. Tugas Partai dalam menghadapi situasi dunia jang sedemikian ini jalah mentjiptakan kerdjasama jang lebih intensif antara semua kekuatan patriotik guna mendorong Pemerintah untuk lebih memperkuat front internasional anti-kolonial dan anti-perang. Kita menginginkan dan memperdjuangkan agar Pemerintah Indonesia terus konsekwen membantu perdjuangan kemerdekaan bangsa², mengadakan langkah² didalam dan diluar PBB supaja tertjipta persetudjuan internasional antara AS, Inggeris dan Uni Sovjet tentang penghentian pertjobaan² sendjata nuklir dengan segera, tanpa sjarat dan untuk se-lama²nja. Djuga supaja Pemerintah Indonesia melawan setiap intervensi dan subversi asing, melawan pengkonsolidasian serta perluasan pakt² militer agresif, dan selandjutnja menuntut pembubarannja. Semuanja ini untuk keselamatan demokrasi dan kemerdekaan Republik kita, untuk keamanan Asia, untuk persahabatan antara bangsa² dan untuk perdamaian dunia.

*

Djika dibandingkan dengan keadaan ketika kita melangsungkan Sidang Pleno ke-VI CC pada bulan Maret tahun ini dan dengan keadaan ketika kita melangsungkan Konferensi Nasional ke-III Partai dalam bulan Djuni tahun ini djuga, situasi dalamnegeri sudah ber-angsur² mendjadi baik. Kaum pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta" pada pokoknja sudah dapat dihantjurkan berkat sikap Presiden Sukarno, Pemerintah, partai² demokratis, Angkatan Perang dan seluruh Rakjat Indonesia jang gagahberani. Tetapi dengan ini tidak berarti bahwa pada pokoknja kekuatan imperialis sudah dikalahkan. Imperialisme masih tetap merintangi kemadjuan

Rakjat Indonesia dan masih tetap mengantjam keutuhan, kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia.

Sebagaimana sudah kita njatakan dalam berbagai dokumen Partai, kewadjiban kaum Komunis dan Rakjat Indonesia jang terpenting pada waktu sekarang jalah menjelesaikan dua kontradiksi pokok, jaitu kontradiksi antara nasion Indonesia dengan imperialisme dan kontradiksi antara kaum tani dengan tuantanah. Kontradiksi jang terpokok dewasa ini jalah jang pertama, jaitu antara nasion Indonesia dengan imperialisme.

Dibawah ini kita akan mengupas kontradiksi jang terpokok, jang pada waktu sekarang berbentuk kontradiksi antara Rakjat Indonesia dengan sisa² kolonialisme Belanda, dengan intervensi dan subversi Amerika Serikat dan dengan subversi Kuomintang. Bentuk² kongkritnja antara lain berupa kontradiksi antara Rakjat Indonesia dengan pendudukan kolonialis Belanda di Irian Barat, dengan kekuasaan ekonomi Belanda, dengan „PRRI-Permesta", dengan DI-TII, dengan gerakan illegal Zulkifli Lubis, dengan gerakan subversif KMT dan dengan sabotase² imperialis dan kakitangannja dilapangan ekonomi dan kebudajaan. Inilah kontradiksi² jang kongkrit jang meminta penjelesaian pada waktu sekarang. Kegiatan² ini adalah bentuk² jang paling menondjol pada waktu sekarang jang dilakukan oleh musuh² Rakjat Indonesia, jaitu imperialisme. Kekuatan² jang paling reaksioner ini merupakan satu kesatuan dalam merongrong keutuhan, kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia, dalam usaha menundukkan Rakjat Indonesia kebawah telapakkaki imperialis. Oleh karena itu seluruh Rakjat Indonesia, jaitu semua orang Indonesia jang menentang kegiatan² imperialis dalam bentuk²nja jang kongkrit ini, harus dipersatukan.

Rakjat Indonesia sudah mengambil langkah² untuk menjelesaikan kontradiksinja dengan imperialisme Belanda di Irian Barat dengan djalan memperkuat perdjuangan pembebasan Irian Barat; kontradiksi dengan kekuasaan ekonomi Belanda dengan djalan mengambilalih dan kemudian menasionalisasi perusahaan² kolonial Belanda; kontradiksi dengan „PRRI-Permesta" dan dengan DI-TII dengan mengadakan operasi² militer dengan bantuan Rakjat; kontradiksi dengan gerakan Lubis dengan djalan lebih mempertinggi kewaspadaan nasional; kontradiksi dengan KMT dengan djalan

membubarkan organisasi illegal ini dan mengambilalih perusahaan² serta menghentikan kegiatan² mereka. Demikian antara lain langkah² jang sudah diambil, tetapi masih lebih banjak lagi langkah² jang harus diambil, diperbaiki dan dibikin lebih intensif, sehingga penjelesaian dapat ditjapai sepenuhnja.

Disamping itu kita djuga mengetahui bahwa masih ada kegiatan² kongkrit lain dari kaum imperialis, misalnja usaha² fihak AS untuk mempengaruhi golongan² dalam masjarakat kita supaja mau mengadakan junta militer, dan dengan ini berarti mendjatuhkan kabinet Djuanda jang patriotik. Sedjalan dengan keputusan Seksi Asia Tenggara dari Kementerian Luarnegeri (State Departement) Amerika Serikat, maka pada waktu² belakangan ini pemimpin² Masjumi sangat giat melantjarkan kampanje untuk membubarkan kabinet Djuanda. Dengan djatuhnja kabinet Djuanda dan digantikannja dengan kabinet dimana mereka duduk, mereka mengharap akan dapat merehabilitasi kaum pemberontak „PRRI-Permesta" dan dengan demikian berarti men-sia²kan samasekali korban jang banjak jang sudah diberikan oleh APRI dan Rakjat dalam membasmi kaum pemberontak. Djuga fihak imperialis Inggeris tidak berdiam diri, dan dimana mungkin mereka djuga berusaha mendapat keuntungan² dari pertentangan² jang ada di Indonesia. Kegiatan² jang berbahaja dari kaum imperialis ini harus kita hadapi dengan sungguh² dan dengan kewaspadaan jang se-tinggi²nja.

Tetapi, bagaimanapun djuga banjaknja dan ruwetnja kontradiksi jang ada, baik kontradiksi² jang sudah terbuka maupun jang masih tertutup, pada hakekatnja semuanja adalah tjermin dari kontradiksi antara Rakjat Indonesia dengan imperialisme. Karena imperialisme adalah musuh terpokok Rakjat Indonesia, maka kontradiksi² ini harus diselesaikan dengan perdjuangan jang sengit dan tidak mengenal ampun. Untuk melakukan ini seluruh Rakjat Indonesia harus dipersatukan dalam persatuan anti-kegiatan² imperialis jang kongkrit seperti sudah disebutkan diatas. Djadi, hakekat dari kontradiksi² jang disebutkan diatas adalah kontradiksi antara Rakjat dengan musuh² Rakjat, dan bukan antara Rakjat dengan Rakjat.

Kontradiksi antara Rakjat dengan imperialis, artinja dengan musuh terpokok dari Rakjat, harus diselesaikan dengan kekerasan,

dan dimana perlu dengan kekerasan sendjata. Penjelesaian dengan kekerasan sendjata sudah dilakukan oleh Rakjat Indonesia terhadap „PRRI-Permesta" dan terhadap DI-TII. Ini adalah tepat, djika tidak maka kontradiksi² ini tidak akan selesai².

Dalam masjarakat kita tidak hanja ada kontradiksi antara Rakjat dengan musuh² Rakjat, tetapi djuga ada kontradiksi² dikalangan Rakjat sendiri, misalnja antara kaum buruh dengan kapitalis nasional, antara kaum tani dengan tuantanah jang anti „PRRI-Permesta" dan anti DI-TII, antara kekuatan progresif dengan kekuatan tengah, antara Partai Komunis dengan partai² anti-imperialis lainnja, antara Rakjat pekerdja dengan penguasa² sipil dan militer, antara Rakjat pekerdja dengan Pemerintah, dan kontradiksi² lain. Kontradiksi² ini adalah kontradiksi² jang tidak pokok, kontradiksi² jang terdapat dikalangan Rakjat jang harus dipersatukan melawan musuh terpokok, jaitu imperialisme. Oleh karena itu penjelesaiannja tidak harus dengan kekerasan, tetapi harus setjara damai, dengan perundingan jang demokratis, saling mejakinkan dan saling menguntungkan. Kontradiksi² ini terdapat diluar maupun didalam Parlemen. Kontradiksi² dikalangan Rakjat ini harus dapat diselesaikan setjara tepat agar tidak merugikan kepentingan Rakjat, dan tidak menguntungkan musuh Rakjat.

Adalah kewadjiban kaum Komunis untuk dapat membedakan antara pertentangan jang pokok dengan jang tidak pokok. Kaum imperialis dan kaum kepalabatu dalamnegeri, dengan melewati koran²nja, intrik²nja, hasutan²nja, fitnahan²nja dan dengan djalan² lain, berusaha untuk mentjampuradukkan kedua pertentangan ini supaja fikiran Rakjat mendjadi katjau, supaja Rakjat bertentangan dengan Rakjat dan supaja sebagian dari Rakjat menganggap musuh Rakjat sebagai kawan. Dengan demikian mereka berharap akan dapat memetjah front Rakjat melawan imperialisme dan dapat memperkuat front musuh Rakjat, front imperialis.

Untuk memperkuat front imperialis mereka berusaha untuk menarik bagian² tertentu dari Rakjat kefihak mereka. Mereka menakut-nakuti dengan „momok Komunis" agar sebagian dari Rakjat, terutama pemimpin² dari kekuatan tengah, menganggap kaum Komunis atau kaum kiri pada umumnja sebagai musuh. Bersamaan dengan itu Nasionalis² jang tidak mau tunduk pada keinginannja,

seperti misalnja Presiden Sukarno, mereka nobatkan mendjadi „Komunis" supaja djuga dianggap sebagai „momok". Mereka pertentangkan antara kaum Nasionalis dengan kaum Agama jang patriotik, dan antara kedua golongan ini dengan kaum Komunis. Djuga mereka pertentangkan antara Rakjat pekerdja dengan Angkatan Perang jang patriotik. Ja, mereka djuga berusaha mempertentangkan Presiden Sukarno dengan pimpinan Angkatan Perang dan kekuatan² patriotik lainnja. Mereka timbulkan suasana saling tjurigamentjurigai dikalangan Rakjat, agar dengan demikian, menurut harapan mereka, sebagian dari Rakjat dapat melupakan ketjurigaannja pada kaum imperialis dan kaum reaksioner dalamnegeri.

Dalam hubungan dengan luarnegeri kaum reaksioner djuga berusaha mengatjaukan fikiran Rakjat. Mereka usahakan agar sebagian dari Rakjat Indonesia memandang negeri² sosialis terutama pelopornja, jaitu Uni Sovjet, sebagai musuh, padahal semua negeri sosialis, tanpa perketjualian, sepenuhnja berada difihak Rakjat Indonesia dalam soal perdjuangan membebaskan Irian Barat, dalam melawan kegiatan² intervensionis asing dan dalam usaha mengatasi kesulitan² Indonesia dilapangan ekonomi. Sebaliknja, mereka mentjoba mejakinkan sebagian dari Rakjat Indonesia supaja suka menganggap negara² Barat sebagai sahabat, padahal semua negara Barat jang penting², tanpa perketjualian, memihak Belanda dalam soal Irian Barat dan memihak AS ketika negara ini mengadakan intervensi dalam urusan dalamnegeri Indonesia.

Dalam keadaan jang sudah ruwet dan dibikin lebih ruwet lagi oleh kaum kepalabatu ini, kaum Komunis tidak boleh sampai diruwetkan. Adalah kewadjiban orang² Komunis untuk senantiasa membikin terang bagi dirinja sendiri dan terang bagi Rakjat, bahwa kontradiksi jang terpokok pada waktu sekarang adalah pertentangan antara Rakjat Indonesia dengan imperialisme, antara nasion Indonesia dengan kekuatan reaksioner asing. Hanja dengan teguh berpegang pada pendirian ini, dan pandai menghubungkan tiap² bentuk kongkrit dari kontradiksi² dengan pendirian pokok ini, kita dapat mulai melangkah setjara benar dalam menjusun seluas mungkin persatuan Rakjat Indonesia. Dengan demikian tertjiptalah sjarat untuk menjelesaikan setjara baik kontradiksi dikalangan Rakjat dan menjelesaikan kontradiksi antara Rakjat dengan imperialis, apapun

bentuknja, dengan menguntungkan fihak Rakjat. Sjarat jang paling penting untuk dapat menjelesaikan kontradiksi² ini setjara tepat terletak dalam kemampuan Partai kita sendiri, dalam kebesaran dan kekuatannja, dalam ketepatan politik dan langgamkerdjanja.

*

Soal politik dalamnegeri lainnja jang penting jalah soal krisis demokrasi liberal.

Adalah logis bahwa sebagai reaksi terhadap kolonialisme Belanda dan terhadap militerisme Djepang dulu, Rakjat Indonesia menuntut adanja demokrasi, jang maksudnja tidak lain jalah demokrasi liberal. Ini antara lain dinjatakan oleh tuntutan „*Indonesia Berparlemen*" dizaman pemerintah Hindia Belanda dekat sebelum perang dunia ke-II. Djuga logis, bahwa sesudah Republik Indonesia diproklamasikan, demokrasi ini jang ditjoba untuk dilaksanakan. Bagi kita kaum Komunis, tidak meragukan lagi bahwa demokrasi, walaupun demokrasi liberal, adalah lebih baik daripada kolonialisme atau fasisme. Oleh karena itu sebelum perang dunia ke-II kita menjokong dengan gigih tuntutan „*Indonesia Berparlemen*" dan sekarang kita bekerdja dengan sungguh² dan se-baik²nja didalam Parlemen dan DPRD².

Pada saat² pandji² demokrasi parlementer sudah dilemparkan oleh sebagian burdjuasi jang paling reaksioner, seperti misalnja ketika terdjadi Razzia Agustus Sukiman tahun 1951, Partai kita memungut pandji² demokrasi ini dan mengibarkannja tinggi². Djuga ketika kaum sosialis kanan (PSI) mentjoba mengadakan perebutan kekuasaan setjara militer pada tanggal 17 Oktober 1952, dan kemudian ditjoba lagi oleh Zulkifli Lubis dengan sokongan Masjumi-PSI, Partai berdiri dibarisan paling depan melawan usaha² untuk memfasiskan sistim pemerintahan ini dan mengibarkan tinggi² pandji² demokrasi parlementer. Dengan demikian Partai kita dan partai² demokratis lainnja beserta seluruh Rakjat Indonesia berhasil mentjegah keruntuhan Republik proklamasi. Dalam hal ini besarlah djasa Presiden Sukarno sebagai seorang demokrat jang revolusioner.

Tetapi, adalah sudah sedjak semula kita berpendirian bahwa demokrasi liberal bukanlah sistim jang dapat memetjahkan persoal-

an² pokok Rakjat Indonesia, baik dibidang politik, ekonomi maupun kebudajaan. Demokrasi liberal setjara dunia dan setjara sedjarah memang sudah bangkrut. Sekarang Rakjat Indonesia sendiri langsung mengalami, bahwa djuga setjara Indonesia demokrasi liberal tidak dapat memetjahkan persoalan² dan tuntutan² pokoknja. Sistim ini sudah terbukti tidak dapat memetjahkan tuntutan² urgen Rakjat Indonesia untuk mempersatukan seluruh kekuatan nasional, untuk mengusir kekuasaan ekonomi asing, untuk membangun ekonomi nasional dan untuk mengembangkan kebudajaan nasional.

Tetapi, ini tidak membantah bahwa demokrasi burdjuis, demokrasi parlementer atau demokrasi liberal tetap lebih baik daripada fasisme, daripada diktatur militer atau diktatur perseorangan. Diktatur² sematjam ini adalah lebih terbelakang, dan hakekatnja sudah dihukum oleh Revolusi Perantjis tahun 1789. Diktatur² ini pada hakekatnja sama dengan sistim politik dizaman perbudakan dan feodal, dimana Rakjat tidak mendapat djaminan samasekali atas hak² azasi dan hak² demokrasinja, walaupun hanja dalam Undang². Oleh kaum burdjuis jang sudah tidak mampu lagi menjelimuti kediktatorannja dengan demokrasi liberal, sistim kekuasaan seseorang atau satu klik ketjil orang biasa digali kembali dari zaman jang usang, seperti jang sudah dilakukan oleh Hitler di Djerman, oleh Mussolini di Italia, dll. sebelum perang dunia ke-II. Seluruh dunia sudah mendjadi saksi dari kehantjuran sistim usang jang diberi badju baru ini. Sekarang kenjataan sematjam ini atau mirip dengan ini kita lihat lagi di Perantjis de Gaulle, di Pakistan Ayub Khan dan di Muangthai Sarit Thanarat. Untuk membela kepentingannja, kaum burdjuis jang paling reaksioner berusaha mengundurkan djam sedjarah.

Adalah tidak mengherankan, bahwa soal mengundurkan djam sedjarah ini djuga ada pengaruhnja dikalangan sementara petualang² politik, pentjari² kedudukan dan dikalangan kaum reaksioner dinegeri kita. Dengan tidak malu² mereka ngomong tentang „keterbelakangan" Indonesia karena sudah didahului oleh de Gaulle di Perantjis, oleh Ayub Khan di Pakistan dan oleh Sarit Thanarat di Muangthai. Mereka bernafsu untuk „mendjawab" krisis demokrasi liberal dinegeri kita dengan fasisme, dengan diktatur militer atau diktatur perseorangan. Mereka mau berdiri dibarisan depan dalam

keterbelakangan! Mereka mau „mengatasi" ketidak-mampuan demokrasi liberal dengan ketidak-mampuan jang lebih tidak mampu lagi, dengan fasisme. Djadi, mau kemana orang² ini? Mau hidup sebentar se-puas²nja, sesudah itu mati buat se-lama²nja! Mereka tidak mau beladjar dari pengalaman Faisal dan Nuri Es Said dari Irak!

Tjepatnja kebangkrutan demokrasi liberal di Indonesia disebabkan oleh dua proses. *Pertama,* proses kesedaran Rakjat Indonesia sendiri, jang berdasarkan pengalamannja sendiri melihat bahwa demokrasi liberal identik dengan korupsi, birokrasi dan ketidakmampuan dalam memetjahkan persoalan² pokok Rakjat Indonesia. *Kedua,* karena agitasi dari promotor² junta militer dan elemen² fasis lainnja.

Kesedaran Rakjat Indonesia akan ketidak-mampuan demokrasi liberal, seperti jang sering ditjerminkan oleh Presiden Sukarno, terdjadi dalam keadaan dimana krisis politik ini belum dapat diatasi dengan Demokrasi Baru atau Demokrasi Rakjat, jang sudah terudji dapat memetjahkan persoalan² pokok jang dihadapi oleh Rakjat, baik di Eropa maupun di Asia. Djadi, situasinja sekarang jalah, bahwa demokrasi liberal sudah diskredit dan Demokrasi Rakjat belum ada sjarat²nja, bahwa kaum fasis ber-siap² dengan konsep diktaturnja, sedangkan Rakjat dengan gigih mempertahankan hak² politiknja.

Dalam situasi jang demikian ini, jang tidak ada ketentuan ini, sangat penting arti dari ide Presiden Sukarno mengenai Demokrasi Terpimpin, jang isi pokoknja jalah anti-liberalisme dan anti-diktatur militer atau diktatur perseorangan. Pokoknja jalah demokrasi, meskipun bukan Demokrasi Baru, tetapi demokrasi jang anti-liberalisme. Presiden Sukarno menamakannja „Demokrasi Indonesia". Demokrasi Terpimpin, sebagai hasil perdjuangan Rakjat, harus mendjamin demokrasi lebih luas bagi Rakjat dan harus mampu membatasi hak² politik dari musuh² Rakjat. Djika dilaksanakan sesuai dengan pernjataan² Presiden Sukarno, Demokrasi Terpimpin akan dapat memetjahkan persoalan² urgen jang dihadapi oleh Rakjat Indonesia, jaitu persatuan nasional dan sampai batas² tertentu pembangunan ekonomi dan perbaikan nasib Rakjat. Oleh karena itu Partai menjokong ide Demokrasi Terpimpin dari Presiden Sukarno

dengan penuh kesedaran dan berdjuang dengan gigih untuk mewudjudkannja.

Ada hal² jang dapat melemahkan ide Demokrasi Terpimpin jang dengan sungguh² harus dihindari oleh semua pentjinta Demokrasi Terpimpin. Antara lain jalah, bahwa ide ini mungkin ditunggangi oleh petualang² dan spekulan² politik, oleh partai², golongan² atau orang² jang dalam pemilihan² umum tidak mendapat kepertjajaan Rakjat. Jang demikian ini dapat menimbulkan kesan, se-olah² Demokrasi Terpimpin diadakan untuk mereka jang tidak mungkin menang menurut tjara² demokratis. Djadi, Demokrasi Terpimpin bukan untuk direalisasi menurut keinginan Presiden Sukarno, tetapi sekedar untuk memenuhi ambisi sementara orang jang politis sudah bangkrut. Kesan demikian ini harus dihindari.

Nilai dari ide Demokrasi Terpimpin akan djatuh djika dengan ide Demokrasi Terpimpin ada orang bermaksud untuk mengguna-kannja sebagai saluran atau batu lontjatan buat membubarkan partai² dan membunuh kehidupan politik Rakjat jang mulai berkembang sedjak tahun 1908. Dengan demikian bisa menimbulkan kesan se-olah² Demokrasi Terpimpin hanja sekedar sebagai persiapan untuk suatu diktatur militer atau diktatur perseorangan. Kesan ini djuga harus dihindari.

Agar ide Demokrasi Terpimpin tetap kuat dan tidak menimbulkan sedikitpun ke-ragu²an Rakjat Indonesia, maka ada sjarat² jang perlu dipenuhi, jaitu sbb.:

Pertama, Demokrasi Terpimpin harus ditudjukan untuk mendjamin kehidupan politik jang demokratis dan sehat bagi Rakjat Indonesia, dan untuk mempersatukan seluas mungkin Rakjat Indonesia. Dengan perkataan lain, Demokrasi Terpimpin setjara politik berarti merealisasi Konsepsi Presiden Sukarno 100%, chususnja untuk membentuk Kabinet Gotongrojong berdasarkan perwakilan berimbang, sebagai pentjerminan utama dari persatuan seluruh kekuatan anti-imperialisme dinegeri kita. Dilapangan ekonomi Demokrasi Terpimpin harus berarti pengutamaan ekonomi sektor negara, sebagai sjarat untuk dapat memimpin perkembangan seluruh ekonomi negeri dan untuk menggerowoti kekuasaan modal monopoli asing.

Kedua, pimpinan pelaksanaan ide Demokrasi Terpimpin harus

ada pada diri Presiden Sukarno, sebagai pentjetus ide Demokrasi Terpimpin dan Konsepsi Presiden, dan sebagai seorang demokrat jang sudah diudji keberaniannja dalam menolak pengangkatannja mendjadi diktator oleh kaum militeris ketika peristiwa 17 Oktober 1952. Sebagai konsekwensi pendirian ini, maka kepada Presiden Sukarno harus diberikan hak istimewa untuk menurut tjara-tjara jang demokratis dan berdasarkan Undang² mengisi sebagian dari keanggotaan Parlemen dengan patriot² jang mendapat kepertjajaan Rakjat.

Demokrasi Terpimpin dan Konsepsi Presiden Sukarno adalah sendjata Rakjat Indonesia untuk memperkuat persatuannja dalam melawan imperialisme. Untuk memperkuat persatuan nasional, demokrasi bagi Rakjat harus lebih diperluas dan bagi musuh² Rakjat harus dipersempit. Djika ini terlaksana maka lompatan penting akan terdjadi dalam usaha Rakjat Indonesia menjelesaikan samasekali kontradiksinja dengan imperialisme.

Pada kesempatan ini adalah pada tempatnja djika Partai sekali lagi menjatakan sikapnja terhadap kabinet Djuanda. Sampai sekarang tidak ada alasan untuk mengubah sikap Partai menjokong kabinet ini. Sokongan PKI terhadap kabinet Djuanda adalah sokongan jang ichlas dan kritis, jaitu: *menjokong politiknja jang madju tanpa reserve, mengkritik politiknja jang ragu² supaja mendjadi madju, dan menentang politiknja jang merugikan Rakjat.* Politik menjokong kabinet Djuanda samasekali tidak bertentangan deugan tuntutan PKI supaja Kabinet Gotongrojong dilaksanakan, karena pelaksanaan Kabinet Gotongrojong tidak harus melalui krisis kabinet Djuanda, tetapi bisa dengan mereshuffle dan menambah beberapa menteri dalam kabinet ini.

Kabinet Djuanda sesudah direshuffle berprogram : membentuk Dewan Perantjang Nasional, menormalisasi keadaan Republik Indonesia, melandjutkan pelaksanaan pembatalan KMB, perdjuangan Irian Barat dan mempergiat pembangunan. Kelima program ini kita sokong dan dengan sekuat tenaga kita bantu untuk melaksanakannja.

Mengenai pembentukan Dewan Perantjang Nasional (DPN), undang²nja sudah disahkan oleh Parlemen. Sekarang tarafnja adalah pembentukan Dewan ini. Mengenai ini kita harus ingat, bahwa

Rakjat mempunjai harapan² terhadap Dewan ini, terutama karena Presiden Sukarno menaruh harapan jang besar pada kemampuan Dewan ini. Oleh karena itu, kita harus berusaha supaja Rakjat tidak diketjewakan, dan dalam hal ini jang terutama harus diperhatikan jalah komposisi keanggotaan dan pimpinan dari Dewan ini. Tentang ini sering ditekankan hanja pada soal keahlian, sedangkan keahlian masih sering disamakan sadja dengan titel kesardjanaan atau lamanja bekerdja dalam birokrasi² pemerintahan. Penekanan pada sjarat² jang demikian ini tentu sadja tidak tepat. Seseorang jang bertitel atau jang sudah lama duduk dalam birokrasi pemerintahan belum tentu ahli, dan djika memang ahli apakah ia ahli dalam bekerdja untuk kepentingan Rakjat Indonesia? Maka itu, kita mengusulkan supaja setiap anggota Dewan ini adalah *„ahli dan patriot"*. Kita menuntut supaja sebanjak mungkin diangkat orang² ahli jang diusulkan oleh organisasi² massa, terutama organisasi² kaum buruh dan kaum tani. Soal pembentukan DPN supaja disatu fihak tidak didjadikan gelanggang „dagang sapi" diantara partai² Pemerintah, tetapi difihak lain djuga tidak didjadikan tempat permainan kaum intrigan, petualang politik dan tukang² tjari kedudukan. Jang tidak kalah pentingnja jalah, bahwa DPN diadakan untuk membuat bagan ("blue print") masjarakat jang adil dan makmur, seperti jang sudah sering dinjatakan oleh Presiden Sukarno.

Mengenai program menormalisasi keadaan Republik Indonesia, kabinet Djuanda pada umumnja menundjukkan ke-sungguh²annja. Keadaan RI ber-angsur² mulai mendjadi normal, walaupun masih banjak kesukaran² jang harus diatasi. Berkat dilaksanakannja garis *„dwitunggal Rakjat dan Tentara"*, jaitu garis *„Rakjat bantu Tentara dan Tentara bantu Rakjat"* atau *„Salingbantu Rakjat dan Tentara"*, dibidang operasi militer telah ditjapai hasil² jang menggembirakan. Tetapi, difihak lain, sesudah kaum pemberontak kontra-revolusioner dikalahkan kebebasan politik Rakjat tidak tjepat dipulihkan. Dalam menjelesaikan kontradiksi dengan kaum pemberontak biasanja tidak dibikin selesai samasekali karena para pendjabat sering dikendalikan oleh maksud² politik membendung perkembangan kekuatan progresif jang sebenarnja merupakan motor penggerak Rakjat dalam gerakan penghantjuran kaum pemberontak. Disebabkan maksud² jang demikian itu, maka pemerintah tidak

tjukup teguh melaksanakan prinsip memobilisasi Rakjat dalam usaha menghantjurkan kaum pemberontak kontra-revolusioner. Ini nampak dengan djelas pada kenjataan, bahwa sistim jang dipakai oleh pemerintah sekarang pada umumnja jalah sistim perang sefihak, jaitu perang jang pada pokoknja hanja dilaksanakan oleh pemerintah dengan Angkatan Perangnja tanpa tjukup mengikutsertakan Rakjat. Sedangkan difihak lain, kaum pemberontak mengerahkan setjara maximal Rakjat jang dapat ditipu oleh mereka. Sebagai akibatnja maka operasi² militer dari fihak pemerintah belum sepenuhnja mentjapai hasil² sebagaimana jang diharapkan, bahkan ada tanda² jang menundjukkan bahwa keadaan ini, djika sistim ini tidak dirubah segera, bisa berakibat kaum pemberontak kembali dalam kedudukan berinisiatif, halmana nampak pada penjerangan² jang dilakukan oleh kaum pemberontak terhadap beberapa kota di Sumatera Barat jang telah dibebaskan. Djuga disebabkan maksud² untuk membendung kekuatan progresif, pemerintah tidak tjukup memberikan perhatian bagaimana membangkitkan perlawanan Rakjat di-daerah² jang masih dikuasai oleh kaum pemberontak, sehingga usaha² mereka untuk mengkonsolidasi diri kembali tidak dapat digagalkan. Djadi, politik membendung kekuatan progresif sama sadja dengan politik melemahkan dajadjuang Rakjat dan memperpandjang nafas kaum pemberontak. Perdjuangan membasmi kaum pemberontak adalah usaha jang tidak ketjil jang se-kali² tak mungkin hanja disandarkan kepada kekuatan bersendjata sadja dan tak mungkin hanja dilaksanakan oleh sedjumlah ketjil orang sadja. Djika sedjumlah ketjil orang itu memaksakan diri untuk melaksanakannja, maka mereka tentu akan mengalami kegagalan. Pemerintah jang benar² bertekad bulat untuk membasmi pemberontak sampai ke-akar²nja harus bersandar kepada massa Rakjat. Dan ini hanja mungkin dengan memobilisasi Rakjat dan dengan memberikan kebebasan² demokratis kepada Rakjat, disamping tidak memberikan kebebasan demokratis kepada musuh² Rakjat.

Dilapangan ekonomi tindakan menormalisasi keadaan RI menghendaki perhatian jang lebih serius lagi. Kita mengusulkan supaja pemerintah tidak ragu² memegang dalam tangannja sendiri expor dan impor bahan² penting, supaja pemerintah menguasai seluruh bahan² keperluan se-hari² dari Rakjat agar bahan² ini tidak didjadi-

kan alat spekulasi dan agar kebutuhan Rakjat jang urgen dapat terdjamin. Sedapat mungkin harus diusahakan supaja harga bahan² kebutuhan se-hari² Rakjat ber-angsur² turun, atau se-kurang²nja tidak makin naik. Tindakan terhadap kaum spekulan, koruptor, penjelundup dan tukang sabot ekonomi supaja diintensifkan. Menormalisasi keadaan RI harus diartikan menumpas sisa² „PRRI-Permesta" dan DI-TII sampai ke-akar²nja, menjapu bersih sel² KMT, memulihkan hak² politik Rakjat, memperbaiki keadaan ekonomi negeri dan memperbaiki penghidupan Rakjat.

Mengenai program melandjutkan pelaksanaan pembatalan KMB dan perdjuangan Irian Barat sebenarnja adalah satu, karena masih didjadjahnja Irian Barat oleh kolonialisme Belanda adalah djuga akibat politik kapitulasi jang didjalankan oleh Dr. Hatta berdasarkan persetudjuan KMB. Pelaksanaan program² ini mendapat bentuk² jang njata setelah dilakukan pengambilalihan perusahaan² kolonialis Belanda jang akan dinasionalisasi. Tindakan menasionalisasi perusahaan² Belanda ini adalah tindakan jang madju, dan tidak diragukan mendapat sokongan jang kuat dari Partai. Dalam hubungan dengan ini Partai kita berpendirian, bahwa kemungkinan penggantian kerugian hanja dapat dibitjarakan sesudah Irian Barat dengan djalan perundingan masuk kedalam kekuasaan RI, sedangkan pembajaran kerugian harus menurut kemampuan keuangan RI dan dalam djangka waktu jang dianggap baik oleh RI. Djika Irian Barat terpaksa direbut dengan kekerasan, berhubung kepalabatunja Belanda, maka soal penggantian kerugian tidak mendjadi persoalan, dan perusahaan² tersebut berstatus perusahaan² jang disita dan dinasionalisasi. Tetapi dengan tindakan menasionalisasi perusahaan² kolonialis Belanda belumlah berarti bahwa kontradiksi antara Rakjat Indonesia dengan kepentingan imperialis Belanda di Indonesia sudah diselesaikan. Hal ini antara lain dinjatakan oleh Menteri Luarnegeri Subandrio di Washington baru² ini, dimana fihak Belanda masih dapat mengadjukan tuntutan²nja sampai djuga membawa persoalannja kepengadilan. Tetapi, walaupun kedudukan perusahaan² ini masih menggantung, dan baru akan ada kepastian sesudah Irian Barat dibebaskan, kita berpendapat bahwa selama perusahaan² ini dikuasai oleh pemerintah seharusnjalah benar² digunakan untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia berdasarkan

sembojan *„pimpinan patriotik, pertinggi produksi, tjegah sabotase, perbaiki nasib buruh"*. Untuk suksesnja kegiatan produktif ini, kaum buruh harus sungguh² diikutsertakan dalam perentjanaan produksi dan pengawasan pelaksanaannja.

Selandjutnja kita berpendapat bahwa untuk membebaskan Irian Barat semua djalan harus ditempuh, baik lewat PBB maupun luar PBB. Tapi jang terpenting jalah, bahwa Republik Indonesia harus terus memperbesar kekuatan pertahanannja dan terus mempersatukan serta memobilisasi Rakjat, terutama di-daerah² jang berdekatan dengan Irian Barat.

Mengenai pelaksanaan program menggiatkan pembangunan, Rakjat telah dibikin sangsi dan ketjewa oleh Undang² Penanaman Modal Asing. Undang² ini membukakan pintu Indonesia untuk masuknja dan diperkuatnja pengaruh politik, ekonomi dan kebudajaan negeri² imperialis.

Imperialisme jang tidak mungkin menjukai pembangunan Indonesia telah diundang masuk kedalam negeri kita untuk meneruskan peranannja dalam merusak ekonomi, mengatjaukan politik dan membendung perkembangan kebudajaan Indonesia. Undang² Penanaman Modal Asing adalah saluran legal bagi kaum imperialis untuk mendapatkan agen² dan untuk memupuk agen²nja. Oleh karena itu, untuk melantjarkan pembangunan ekonomi dan dalam rangka menentang subversi asing dilapangan politik dan kebudajaan, PKI menuntut supaja Undang² Penanaman Modal Asing ini dibatalkan oleh pemerintah.

Dalam hubungan dengan pembangunan ekonomi kita ingin menjarankan kepada pemerintah Djuanda supaja hubungan dagang luarnegeri Indonesia harus diperluas atas dasar saling menguntungkan dan terutama ditudjukan kepada negeri² jang memang ingin melihat pembangunan ekonomi Indonesia dan mampu memberikan bantuannja. Negeri² ini tidak lain jalah negeri² sosialis, jang ekonominja sudah madju dan kemampuannja sudah terbukti. Hanja dengan menempuh djalan ini kita dapat mendatangkan barang² modal untuk kepentingan industri kita, terutama industri guna mengolah sendiri bahan² mentah jang dihasilkan oleh Indonesia. Pemerintah supaja djuga mendatangkan bahan² baku guna keperluan industri dalamnegeri. Devisen jang dihasilkan oleh maskapai² minjak

asing supaja dikuasai oleh pemerintah dan digunakan untuk melantjarkan pembangunan ekonomi dan untuk menjehatkan keuangan negara.

Dalam hubungan dengan sikap Partai terhadap kabinet Djuanda perlu dianalisa setjara chusus kemungkinan² tentang perkembangan² kabinet Djuanda sesudah memperoleh hasil² tertentu dalam perdjuangan mengembalikan Irian Barat dan dalam menindas sisa² pemberontakan kontra-revolusioner „PRRI-Permesta".

*

Keadaan chusus jang harus kita perhatikan sekitar pemerintah Djuanda adalah masih tetap berlakunja kekuasaan militer berdasarkan Undang² Keadaan Bahaja. Selama hampir setahun, kekuasaan militer telah memperlihatkan segi² positifnja, terutama di-daerah² bergolak. Akan tetapi ada djuga segi² negatifnja, jang djika tidak segera diachiri bisa ber-larut² dan bisa menutupi segi² jang positif dari kekuasaan militer itu. Mengenai segi negatif ini jang sangat serius jalah mengenai pengekangan hak² demokrasi bagi Rakjat, seperti larangan untuk melangsungkan rapat² politik, termasuk rapat² partai² jang melawan pemberontakan kontra-revolusioner; larangan mogok, termasuk mogok di-perusahaan² kaum imperialis jang menjokong pemberontak; tindakan² jang merugikan kaum tani dalam perdjuangan perbaikan nasib dan dalam memperbesar produksi bahan makanan; dan larangan² lain jang sangat mengekang perkembangan gerakan demokratis dan progresif.

Segi jang lain dari kekuasaan militer jang djuga tjukup serius jalah soal mentjegah tjampurtangan sementara perwira dalam persoalan perekonomian, keuangan dan politik pemerintahan. Djika bekas² perwira Ahmad Husein, M. Simbolon, V. Sumual dan perwira² pemberontak lainnja memulai dengan mengadakan petualangan dilapangan ekonomi dan politik jang bukan bidangnja, dan mengachiri petualangannja dengan pemberontakan kontra-revolusioner, maka adalah tidak tepat djika perbuatan mereka jang sudah bersalah ini ditiru oleh perwira² lain, padahal mereka menentang kaum pemberontak kontra-revolusioner.

Pada waktu² jang diperlukan Rakjat dengan segala senang hati

bersedia memberikan kekuasaan sampai batas² tertentu kepada Angkatan Perang, selama kekuasaan ini tidak disalahgunakan. Dengan sekuat tenaga harus kita tjegah timbulnja kontradiksi jang tidak perlu atau kontradiksi jang tadjam antara Rakjat dan Angkatan Perang, dan hal² jang mungkin menudju kearah pertadjaman kontradiksi itu harus didjauhi. Tjampurtangan jang makin mendalam dari sementara perwira dilapangan perekonomian dan keuangan memudahkan orang jang bersangkutan mendjadi kapitalis nasional, jang umumnja bergerak dilapangan perdagangan sehingga sangat tergantung hidup-matinja pada kaum kapitalis monopoli asing jang sampai sekarang menguasai perdagangan dinegeri kita. Tergantung dalam soal ekonomi membikin seseorang djuga tergantung dilapangan politik. Pendeknja, tjampurtangan sementara perwira jang makin mendalam dilapangan perekonomian dan keuangan dapat menimbulkan demoralisasi, dapat melahirkan „warlord²" dan merupakan antjaman terhadap kemurnian Angkatan Perang RI jang patriotik.

Dengan sukses² jang sudah ditjapainja, prestise kabinet Djuanda meningkat, baik dimata Rakjat Indonesia maupun dimata negara² sahabat diluarnegeri. Prestise ini akan terus meningkat selama kabinet ini tetap menempuh djalan kemerdekaan nasional, demokrasi dan kemadjuan bagi Indonesia, selama kabinet ini mampu mendjalankan politik jang sesuai dengan keinginan Rakjat banjak, mampu mengendalikan semua aparatnja guna pelaksanaan programnja dan mampu sampai batas² tertentu mengadakan perbaikan nasib Rakjat.

PKI tetap akan menjokong dan mempertahankan dengan sekuat tenaga kabinet Djuanda selama kabinet ini tidak menghalang-halangi kegiatan gerakan kemerdekaan nasional dan gerakan demokratis.

Dengan tidak menghalang-halangi, dan malahan membantu kegiatan gerakan kemerdekaan nasional dan gerakan demokratis, berarti bahwa kabinet Djuanda memperkuat kedudukannja sendiri dan berdjasa pada perdjuangan Rakjat menudju Indonesia jang merdeka penuh dan demokratis, menudju pelaksanaan tugas² pembebasan nasional dan perubahan² demokratis.

Sekianlah dengan singkat situasi luar dan dalamnegeri jang perlu mendapat perhatian kita. Pada pokoknja dilapangan politik luarnegeri kita harus lebih sungguh² lagi melandjutkan politik perdamai-

an dan anti-kolonialisme, memperkuat front internasional anti-perang dan anti-kolonial. Dilapangan politik dalamnegeri kewadjiban kita jalah menjelesaikan semua bentuk kontradiksi antara Rakjat Indonesia dengan imperialisme dan kontradiksi2 dikalangan Rakjat Indonesia sendiri setjara tepat, memperdjuangkan peluasan hak2 politik bagi Rakjat dan perbaikan tingkathidup Rakjat.

Perkembangan selandjutnja dari situasi sangat tergantung pada kegiatan orang2 Komunis dan semua orang progresif dan demokratis. Untuk perkembangan lebih landjut dari situasi, kaum Komunis harus lebih memperkuat persatuannja sendiri, terus-menerus menjesuaikan organisasinja dengan perkembangan situasi, lebih mempererat persatuannja dengan massa Rakjat jang luas, terutama dengan massa kaum buruh dan kaum tani, lebih berdisiplin dan lebih mendidik diri dalam ilmu Marxisme-Leninisme. Dengan Partai jang demikian ini kita akan lebih mampu menggalang front persatuan nasional, mementjilkan lebih landjut kekuatan kepalabatu. Dengan demikian Partai dapat terus memegang pandji2 pelopor dalam perdjuangan untuk kemerdekaan nasional jang penuh dan untuk demokrasi, untuk persahabatan antara bangsa2 dan perdamaian abadi.

Mari kita berdjuang terus, mempersatukan seluas mungkin Rakjat Indonesia, menempuh djalan Demokrasi Terpimpin menudju pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%!

Mari kita berdjuang terus membela hak2 ekonomi dan hak2 politik Rakjat!

Mari kita berdjuang terus memperkuat front internasional anti-perang dan anti-kolonial!

Berikut ini adalah djawaban lengkap Kawan D.N. Aidit atas pertanjaan2 jang diadjukan oleh koresponden „HR" mendjelang peringatan ulangtahun ke-30 Pergerakan Wanita Indonesia pada tgl. 22 Desember 1958. Pertanjaan2 itu menanjakan tentang penilaian Kawan Aidit mengenai gerakan wanita Indonesia dewasa ini serta pendapatnja tentang didjadikannja hari 22 Desember Hari Ibu jang resmi; tentang apakah ia mempunjai kekuatiran akan meluasnja gerakan feminis di Indonesia dan apa harapannja berkenaan dengan Hari Ibu itu.

MADJULAH TERUS GERAKAN WANITA INDONESIA UNTUK EMANSIPASI DAN MASJARAKAT BARU

22 Desember Memang Hari Ibu Dan Harus Diresmikan

Gerakan wanita Indonesia sudah sedjak 30 tahun jang lalu telah berada didjalan jang benar, dan djalan jang benar ini sampai sekarang tetap ditempuh oleh gerakan wanita kita. Apa sebab saja katakan demikian?

Sedjak Kongres Wanita Indonesia tanggal 22 Desember 1928 di Djokjakarta, gerakan wanita Indonesia telah merupakan bagian jang takterpisahkan dan tidak ingin memisahkan diri dari gerakan kemerdekaan nasional jang revolusioner dan umum. Sedjak itu suka dan duka gerakan kemerdekaan nasional djuga mendjadi suka dan duka gerakan wanita Indonesia. Sedjak itu sudah nampak, bahwa gerakan wanita Indonesia tidak dipimpin oleh fikiran jang pitjik, jang ingin supaja gerakan wanita mendjadi gerakan wanita semata², terpisah dari gerakan nasional jang umum.

Kenjataan bahwa gerakan wanita Indonesia mendjadi bagian jang takterpisahkan dari gerakan nasional jang umum bukanlah sesuatu jang sukar difahamkan. Negeri kita sebagai negeri jang ditindas oleh imperialisme, dan dimana gerakan revolusioner adalah kuat dan mempunjai tradisi jang lama dan dalam, bukan hanja tidak subur untuk aliran sosial-demokrasi dalam gerakan buruh, tetapi djuga merupakan tanah jang kering bagi gerakan feminis, jaitu gerakan wanita jang mau memisahkan diri dari gerakan nasional jang umum.

Oleh karena itu saja berpendapat bahwa hari 22 Desember memang Hari Ibu dan sudah sepantasnja Pemerintah Indonesia meresmikannja.

Walaupun memang ada usaha² sedjak lama untuk memisahkan gerakan wanita Indonesia dari gerakan kemerdekaan nasional jang

umum, saja tidak mempunjai kekuatiran, karena usaha² ini pasti akan gagal.

Apalagi sekarang, dengan adanja organisasi² wanita jang berdjuang untuk emansipasi dan pembaruan masjarakat Indonesia, dapatlah kita katakan bahwa kaum wanita Indonesia sudah mendjedjakkan kakinja kedalam kehidupan politik jang kolektif dan aktif. Walaupun banjak organisasi wanita dinegeri kita, baik jang dipengaruhi oleh aliran agama maupun politik, tetapi setjara bersama² dan aktif gerakan wanita kita sudah dan sedang mendesakkan supaja suara mereka didengarkan dan supaja tuntutan² mereka dipenuhi. Suara mereka dan desakan mereka mulai mempunjai pengaruh jang tertentu mengenai djalannja perkembangan masjarakat.

Saja berpendapat bahwa perdjuangan wanita Indonesia untuk emansipasi sekarang adalah perdjuangan jang serius, ini ditandai oleh hal² sbb.: Disatu fihak gerakan wanita kita berdjuang untuk hak² wanita, artinja untuk mendapatkan persamaan hak setjara juridis dengan laki² dan untuk pelaksanaan jang njata dari persamaan hak ini dengan tertjiptanja tjarahidup baru jang anti-feodal dan anti-penindasan. Difihak lain gerakan wanita Indonesia melawan kemelaratan, melawan teror kenaikan harga, berdjuang untuk tingkathidup jang lebih baik, untuk pekerdjaan dan upah sama dengan tidak memandang perbedaan wanita atau pria.

Dua aspek dari gerakan wanita Indonesia ini merupakan kesatuan, dan dengan demikian djelaslah bahwa gerakan wanita Indonesia untuk emansipasi merupakan bagian jang terpenting dari perdjuangan keseluruhannja untuk pembaruan jang demokratis dari masjarakat Indonesia.

Saja berharap supaja gerakan wanita Indonesia tetap setia pada tradisinja jang gemilang, jaitu, dengan bersatu disekitar pandji² emansipasi wanita berdjuang terus untuk Indonesia Baru jang demokratis dan perdamaian dunia jang abadi.

KETERANGAN - KETERANGAN

KONGRES KE-XX PKUS

1. N.S. Chrusjtjov, *Laporan Comite Central Partai Komunis Uni Sovjet kepada Kongres ke-XX Partai,* Penerbitan Jajasan „Pembaruan" th. 1956, hlm. 8.
2. *Idem,* hlm. 32.
3. Brosur *Lagi Tentang Pengalaman Sedjarah Diktatur Proletariat,* Penerbitan Jajasan „Pembaruan" Djakarta th. 1957, hlm. 19.

SAMBUTAN TERHADAP KONGRES KE-III PARTAI BURUH KOREA

1. Setelah kembali ketanahair, Kawan Aidit memberikan laporan dari perlawatannja keluarnegeri dalam tjeramah umum pada tgl. 27 Djuni 1956. Mengenai kebiadaban dan kebuasan tentara Amerika di Korea ditjeritakan a.l.:

„Sepandjang djalan kereta-api Antung-Pjongjang, jang pandjangnja lebih-kurang 400 km kita melihat kiri dan kanan banjak lobang2 bekas djatuhan bom (bomkraters), terkadang kita melihat 10 sampai 15 lobang dalam satu menit disebelah kiri dan kanan djalan kereta-api. Terkadang kita melihat penduduk desa sedang beramai2 menimbun lobang2 bekas djatuhan bom untuk memperluas tanah pertanian mereka, dan terkadang lagi kita melihat anak2 sedang memantjing dipinggir lobang bekas djatuhan bom jang penuh air sehingga merupakan telaga ketjil. Dari banjaknja bekas2 djatuhan bom ini sadja sudah dapat kita bajangkan betapa biadab dan buasnja tentara Amerika dalam memerangi Rakjat Korea jang tidak bersalah.

„Kebiadaban dan kebuasan Amerika mendjadi lebih terang lagi setelah kita melihat sendiri bekas2 bombardemen atas kota Pjongjang dan setelah kita mendengar keterangan bahwa dikota Pjongjang sebelum dihantjurkan oleh Amerika terdapat kira2 500.000 penduduk jang bertempat tinggal di-kira2 100.000 rumah besar dan ketjil. Sesudah bombardemen jang dilakukan siang dan malam oleh Amerika terhadap Pjongjang maka menurut tjatatan, sesudah gentjatan sendjata di Pjongjang tinggal puluhan buah rumah jang utuh. Sesudah gentjatan sendjata pada bulan Djuli tahun 1953 Rakjat Korea membangun kembali kota Pjongjang, kota pahlawan mereka. Sekarang, 3 tahun sesudah gentjatatan sendjata, kota Pjongjang hampir pulih kembali, rumah2 baru banjak didirikan dan gedung2 jang indah dan besar nampak disana-sini. Djuga sudah dibangun stadion baru jang besar. Bukit Moran Bong, bukit kesajangan Rakjat Korea, terutama penduduk Pjongjang, jang letaknja dikota Pjongjang, jang selama perang digundul oleh bom2 napalm Amerika sekarang sudah dihidjaukan kembali dan didjadikan tempat bertamasja penduduk ibukota sementara Republik Rakjat Demokratis Korea....."

Selandjutnja Kawan Aidit mentjeritakan bahwa oleh tentara Rakjat Korea telah didirikan suatu Museum Peringatan Perang jang halamannja seluas 4.200 m2, terdiri dari 9 buah bangunan, mempunjai lebih dari 50 buah ruangan dan terdiri dari 20 seksi. Seluruh bangunan untuk museum ini didirikan hanja dalam waktu kira2 100 hari. Dalam seksi IV museum ini dipamerkan sedjarah perang pembebasan melawan agresi Amerika. Tentang ini Kawan Aidit mengemukakan beberapa tjatatan sebagai berikut.

„Dalam seksi Pahlawan dari museum ini kita melihat lebih-kurang 800 foto pahlawan2 Korea dan ber-puluh2 foto pahlawan Pasukan Sukarela Rakjat Tiongkok, jang pada tanggal 25 Oktober 1950 menjeberangi sungai Jalu untuk memberi bantuan kepada Rakjat Korea, untuk melaksanakan sembojan 'Lawan Amerika, bantu Korea', sembojan PKT jang sangat populer dikalangan Rakjat Tiongkok dan Rakjat Korea. Disamping foto2 dipamerkan djuga pakaian, sendjata, buku2 dsb. jang dipakai oleh para pahlawan tersebut ketika mereka djatuh dalam menunaikan kewadjibannja. Pameran demikian ini, memberikan kesan jang dalam bagi tiap2 jang melihatnja, ia menanamkan rasa tjinta kepada pahlawan tanahair, rasa tjinta kepada tentara Rakjat dan menanamkan semangat pengorbanan jang besar.

„Dalam museum ini djuga dipertundjukkan bagaimana pelaksanaan sistim pertahanan dibawah tanah selama perang melawan agresi Amerika. Kita dapat melihat tjontoh2 terowongan jang dibikin didalam gunung seperti aslinja, demikian djuga tjontoh2 rumahsakit, asrama tentara dan ruangan rapat dalam asrama jang dibikin didalam gunung dengan penerangan dan ventilasi jang tjukup. Adalah karena sistim pertahanan dibawah tanah ini maka bom2 kuman, napalm dan bom2 lainnja jang dahsjat tidak berdaja dalam menundukkan tentara dan Rakjat Korea. Tidak hanja tentara Rakjat Korea, tetapi djuga ber-djuta2 Rakjat Korea hidup didalam gua2 untuk menghindarkan diri dari pemboman Amerika jang tidak habis2nja. Soal mempertahankan dan merebut bukit atau gunung adalah soal jang menentukan dalam peperangan di Korea. Menguasai bukit berarti menguasai tempat jang penting untuk bertahan dan untuk menjerang. Bulan Agustus tahun 1951 saban hari 30.000 sampai 40.000 bom didjatuhkan oleh pesawat udara Amerika. Sampai sekarang djika kita berkeliling dengan mobil di Korea Utara kebanjakan bukit2 dan gunung2 masih pada gundul karena bombardemen, dan terdapat banjak lobang2 bekas djatuhan bom. Sebuah bukit jang tadinja bernama 'Bukit 1.211' sehabis pemboman mendjadi 11 meter lebih pendek. Sekarang bukit itu dinamakan 'Bukit 1.200'. Bajangkan bagaimana bisa bertahan djikalau tentara Rakjat tidak menguasai bukit2 dan mendjalankan sistim pertahanan dibawah tanah.

„Sebuah tjontoh lagi: pertempuran di 'Bukit 351', sebuah bukit dekat laut. Bukit tersebut selama 2 tahun dibangun oleh musuh se-

bagai benteng, tetapi kemudian dapat direbut oleh tentara Rakjat Korea. Sesudah direbut bukit jang merupakan benteng itu dibedili dari laut oleh armada Amerika. 20.000 shell (peluru2 meriam) ditembakkan pada bukit tersebut dari laut, tetapi musuh tidak berhasil menduduki kembali 'Bukit 351'."

Kepahlawanan Rakjat Korea bukan hanja nampak dari museum tapi djuga dari kenjataan2 diluar museum. Kawan Aidit mendjelaskan bahwa:

„Selama peperangan kemerdekaan melawan agresi Amerika seluruh Rakjat mengambil bagian jang aktif. Djika serangan sedang dahsjat ada kalanja mereka tidak bisa turun kesawah disiang hari, maka merekapun menanami sawahnja dimalam hari. Dalam keadaan demikian, siang mendjadi malam dan malam mendjadi siang. Rakjat Korea terutama wanita2 Korea sangat senang berpakaian putih, djuga diwaktu mereka bekerdja disawah. Kebiasaan memakai pakaian putih di-tengah2 sawah tentu tidak baik dimasa perang. Oleh karena itu dalam waktu perang kemerdekaan melawan Amerika pemerintah mengeluarkan larangan memakai pakaian putih dilapangan terbuka. Di-lapangan2 terbuka tidak hanja manusia harus mengkamuflase dirinja dengan daun2an dan ranting2 tetapi djuga sapi dan kuda harus dikamuflase.

„Jang sangat menarik perhatian jalah bahwa dibagian Utara daripada Korea banjak terdapat pabrik2 dibawah tanah, bukan hanja pabrik2 ringan, tetapi pabrik2 jang menghasilkan mesin2 besar, seperti mesin2 untuk membor, membubut dan mengetam badja. Pabrik2 demikian didirikan dalam gunung2 batu. Dalam ruangan didalam gunung batu jang lebarnja 10 m dan pandjangnja 40-50 m, dengan penerangan dan ventilasi jang baik, kita tidak merasa berada dalam gunung, apalagi ketika saja berkundjung kesana masih dalam suasana perajaan 1 Mei, sehingga didalam pabrik didalam gunung itu banjak kelihatan karangan2 bunga Tjindali, bunga ketjintaan Rakjat Korea, disamping karangan2 bunga Sakura, bunga jang djuga banjak terdapat di Korea. Banjak diantara mesin2 berat jang terdapat dalam pabrik tersebut penuh dengan lobang2 bekas tembakan jang dilakukan oleh musuh ketika mesin2 tersebut dalam transportasi ke-pabrik2 dibawah gunung. Jang djuga menarik perhatian jalah bahwa dihampir tiap2 mesin terdapat bangku2 tempat berdiri buruh Korea ketika mengendalikan mesin tersebut. Bangku2 tersebut diperlukan karena mesin2 tersebut dibikin untuk orang2 Eropa oleh pabrik2 Uni Sovjet atau negeri2 Demokrasi Rakjat di Eropa. Orang2 Eropa lebih tinggi ukuran badannja djika dibanding dengan orang2 Korea.

„Saja menganggap perlu untuk mentjeritakan suatu hal lagi. Dinegeri kita atau djuga di-negeri2 lain, djika kita bitjara tentang djembatan, maka tidak bisa lain djembatan itu adanja diatas air. Selama perang melawan agresi Amerika tentara dan Rakjat Korea membikin djembatan jang lain, jaitu djembatan dibawah air. Mereka lakukan ini setelah mendapat banjak pengalaman bahwa djembatan2, disamping djalan kereta-api, adalah paling diintjer oleh pesawat2 pembom Amerika. Dengan membikin djembatan jang sedikit dibawah air maka dari kapal udara djembatan2 itu tidak dapat dilihat, tetapi tjukup baik untuk dipakai buat menjeberang tentara dan segala alat2 perangnja, termasuk alat2 jang berat."

Kawan Aidit seterusnja mentjeritakan bagaimana Rakjat Korea tidak henti2nja membangun negerinja dan mengembangkan kehidupan kulturil. „..... Dalam peperangan jang dahsjat mereka terus membangun negerinja dengan mendirikan industri2 berat dan ringan. Didalam soal pembangunan ini adalah sangat penting bantuan jang berupa mesin2 dan ahli2 dari Uni Sovjet dan negeri2 Demokrasi Rakjat di Eropa, bantuan jang diberikan dengan tidak mengharapkan keuntungan jang berupa apapun. Dalam hal memberikan bantuan kepada Rakjat Korea, RRT tidak hanja memberi bantuan materiil, tetapi djuga memberikan darah dan djiwa putra2nja jang terbaik, anggota dari Pasukan Sukarela Rakjat Tiongkok jang berdjuang bahu-membahu dengan Rakjat Korea.

„Selama peperangan melawan agresi Amerika kehidupan kulturil berdjalan terus. Mereka membikin teater2 dibawah tanah, didalam gunung atau bukit. Mereka menjanji dan menari didalam teater2 dibawah tanah, sedangkan diatasnja berdentuman bom2 jang didjatuhkan oleh Amerika. Rombongan2 sandiwara, musik dan balet nasional tetap setia mengundjungi front2, walaupun dihudjani oleh pelor dan bom. Buku2 politik dan buku2 kesusasteraan terus menemani pradjurit2, djika tidak ditjetak diatas kertas biasa, maka buku2 tersebut ditulis diatas kulit2 kaju. Para pradjurit membikin alat2 musik dari logam bekas petjahan bom atau dari pipa2 jang didapat dari rontokan kapal terbang musuh. Sadjak2 dan lagu2 pemudjaan terhadap tanahair ditulis diatas kertas atau kulit kaju dan ditempatkan didinding asrama dibawah tanah."

Achirnja, sebagai kesan singkat tentang Rakjat Korea, Kawan Aidit menjatakan: *„Korea adalah negeri pahlawan, tetapi adalah sukar untuk menemukan pahlawan perseorangan di Korea, karena semua Rakjat adalah pahlawan, tua-muda, lelaki dan wanita. Djika ada orang Korea jang mendapat gelar pahlawan, maka ia adalah dwitya-pahlawan (double hero), djika ada orang Korea mendapat gelar dwitya-pahlawan, maka ia adalah tritya-pahlawan."*

TIDAK ADA AGRESI SOVJET DI HONGARIA

1. Segera setelah kemenangan Rakjat Hongaria dibawah pimpinan Partai Buruh Hongaria atas pemberontakan kontra-revolusioner, Kawan D.N. Aidit atasnama kaum Komunis Indonesia mengirimkan kawat utjapan selamat pada tgl. 6 November 1956 kepada Kawan Janos Kadar, Sekretaris Pertama Partai Buruh Hongaria, jang ketika itu merangkap Perdana Menteri Pemerintah Buruh dan Tani Revolusioner Hongaria jang dibentuk pada tgl. 4 November 1956.

Bunji kawat tersebut lengkapnja jalah :

„Kaum Komunis Indonesia mengutjapkan selamat kepada Rakjat Hongaria jang telah dapat menindas kontrarevolusioner jang terang2an mau mengembalikan kapitalisme di Hongaria. Dengan kemenangan Rakjat Hongaria atas komplotan Nagy jang dikendalikan oleh kaum imperialis Amerika, maka terdjaminlah kembali

usaha2 Sosialisme, kemerdekaan nasional dan demokrasi bagi Rakjat Hongaria dan berantakanlah usaha kaum imperialis membikin front peperangan kedua disamping front Mesir. Kemenangan Rakjat Hongaria memperkuat perdjuangan menggagalkan agresi Inggeris-Perantjis di-negeri2 Arab. Untuk kemenangan Rakjat Hongaria ini kami sepenuhnja menjokong politik pemerintah Hongaria jang meminta bantuan angkatan perang Uni Sovjet. Dengan ini untuk kedua kalinja tentara Uni Sovjet membantu Rakjat Hongaria membebaskan diri, pertama dari kekuasaan kaum fasis dan kedua dari komplotan Nagy jang diorganisasi kaum imperialis Amerika."

KONFRONTASI PERISTIWA MADIUN (1948) — PERISTIWA SUMATRA (1956)

1. *BPKNIP* — singkatan dari Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Pusat, suatu badan jang mengerdjakan pekerdjaan se-hari2 Komite Nasional Indonesia Pusat jang berfungsi melaksanakan wewenang per-undang2an dan ikut menetapkan garis besar haluan negara ber-sama2 Presiden. Didirikan pada tgl. 22 Agustus 1945 dan beranggota 25 orang. Pada tgl. 15 Februari 1950 semua anggota badan ini mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat.
2. Laporan jang dilampirkan jalah :
   I. Verslag Proses Verbaal pembunuhan Sidik Aslan dkk. serta Letnan Kolonel Dachlan dan Major Mustofa dkk. dari TNI Bataljon 38/Divisi I.
   II. Pengakuan Major Zainul Sabarudin, komandan Bataljon 38 TNI mengenai pembunuhan terhadap Sidik Aslan dkk.
   III. Pendjelasan mengenai II.

LAMPIRAN I

Tentara Nasional Indonesia Divisi I
Bataljon 38.

No. : C.S. 1948.
Hal : verslag proses verbaal.
Sifat : rahasia.

Sekedar laporan/riwajat

I. Pada tanggal 5 Mei 1948 kami selaku komandant CPM (Corp Pulisi Militer) Pusat Djokjakarta, gedetacheerd Djawa Timur termasuk dalam formatie Regimen TJOKROBIROWO Divisi I, pimpinan langsung dibawah P.T. Majoor Sabarudin.
II. Pada bulan Agustus 1948, kami mendjabat sebagai commandant I.S. Divisi I. NAROTOMO, langsung dibawah pimpinan Plm. Div. I. (G.M.D.T.) dengan mandaat no. 176/Plm. Sec. 48 dan merangkap sebagai kepulisian didetachement CPM 206 mandaat no. 70/Pol. 49 dan cdt. C.I.S. dari Bataljon 38 (Sabarudin).
III. Madiun affair tg. 19-9-1948, maka kami mendapat tugas sebagai kepulisian disjahkan/diketahui oleh Cdt. CPM det. 602/Let. Kol. Surachmad, sehingga pentjabutan kembali mandaat tersebut dalam bulan November tahun 1948.

Kediri/Madiun affaire :

Pada tanggal 19-9-'48 kami menerima tugas kewadjiban dari P.T. Cdt. bat. 38 jalah sebagai C.I.S., dan kepulisian : agar seluruh anggauta F.D.R. dan Pesindo Brigade 29, menerima tugas langsung dari Det. CPM. 602/Let. Kol. Surachmad.

a. menangkap seluruh anggauta F.D.R./Pesindo brig. 29 dan wanita Kowani.
b. seluruh anggauta P.K.I. dan Kaum Buruh Gula.

Ketegasan :

I. Mengingat kami selaku perintah jang patuh dari pimpinan maka kami mau tidak mau harus mendjalankan sebagai semestinja, sehingga mulai perintah tsb. melakukan penangkapan orang2 tsb. diatas dengan beleid kami sendiri jalah sebagai pelindung.
II. Djumlah penangkapan l.k. ada dua puluh orang jang terdiri dari kaum buruh gula Pesantren jaitu : sdr. Sukarno, sdr. Subandijono, sdr. Suminar dan Let. II Sunarjo dari Brigade 29 serta beberapa orang pegawai dari pabrik Pesantren.
III. Dalam tempo dua puluh empat djam (sehari semalam) semua anggauta tsb. jang kami tahankan di Dandangan kami lepaskan kembali setjara teratur serta mendapat surat pengesjahan *bebas*.
IV. Sedangkan disalah seorang diantaranja ialah sdr. Sukarno kami beri surat mandaat/kuasa untuk kembali kepabrik gula mendjabat sebagai kepala dari Buruh sebagai sediakala.

Keadaan dalam tahanan CPM Det. 602
Majoor Sujatmo :

Pada tanggal 29 bulan 9-1948, kapten Sugito dan Let. I Sampurno mengirim surat kepada kami, agar kawan2 dari Pesindo/B. 29 (F.D.R. P.K.I.) lebih kurang 7 orang supaja diambil oleh kepulisian Bat. 38 supaja :

a. Segera mengadakan pembunuhan terhadap dirinja alm. Sidik Aslan cs.
b. Bertanggung djawab penuh kepada C.P.M. (kapten Sugito dan Letn. I Sampurno dan disjahkan oleh Let. Kol. Surachmad dalam melakukan pembunuhan tersebut).

Kesimpulan :

I. Sebenarnja P.T. Bat. Cdt. 38 dalam perintahnja kepada kami supaja meminta anggauta2 dari Pesindo/F.D.R. dan B. 29.
II. Guna mempersendjatai lebih landjut (sesuai dengan pengumuman jang disiarkan oleh Pangl. Div. I. Kol. Sungkono) dalam surat kabar *„dasar2 memperbaiki kembali."*

Ketegasan :

Ketegasan P.T. Kom. Bat. 38, sebagaimana tindakan dan suruhan dari CPM sama sekali tidak mau mendjalankan serta menolak akan melakukan pembunuhan tersebut.
Tindakan CPM det. 602 :
I. Lebih kurang pada tgl. 11-10-'48 alm. Sidik Aslan cs. diangkut ke Besuki (Kediri) oleh CPM dengan truk.
II. Mendengar berhubung alm. Sidik Aslan dibawa ke Besuki, maka Cdt. Bat. 38 ikut mempersaksikan „bagaimana kekedjaman CPM terhadap sdr.2 tsb.".
III. Pengikut2 dari Cdt. Bat. 38 adalah beberapa orang anggauta dari B. 29 sebagai chauffeur, sdr. Djamal dan sdr. Dul.

Pembunuhan :

a. Pembunuhan dilakukan oleh seorang sergeant CPM (jang lupa namanja) dengan setjara baris zonder berbadju.
b. Kuburan2 alm. Sidik Aslan adalah di Besuki.
c. Segala proses verbaal pembunuhan tsb. adalah ditangan Inspecteur Pul. kl. 2 sdr. Saimin dan Let. I Sampurno.
d. Pembunuhan2 tersebut sebagai saksi jang njata jalah anggauta bawahan alm. Sidik Aslan sendiri jang ikut mempersaksikannja (sdr. Djamal dan Dul) dari B. 29.
e. Selain dari pembunuhan tsb. menurut keterangan inspecteur pulisi kl. 2 sdr. Saimin, djuga pembunuhan terhadap dirinja P.T. Kol. Munadji dan beberapa orang lainnja (jang tidak diterangkan kepada kami lebih landjut).

Sekitar penahanan Pt. Let. Kol. Cdt. Ba. 29 Dachlan dan Majoor Mustoffa :

1. Oleh Pt. Majoor Sabarudin : mengingat kekedjaman2 CPM maka Let. Kol. Dachlan dan Majoor Mustoffa ditetapkan dirumah Let. Kol. Surachmad untuk sementara waktu.
2. Berhubung dari fihak CPM sangat menaruh sentiment kepada B. 29 (Dachlan cs) maka diserobot dirumah Let. Kol. Surachmad serta dianiaja meliwati dari batas kemanusiaan, sehingga kepala mereka berdua petjah dan keluar otaknja, dengan tidak sadar akan dirinja lagi. Setelah penganiajaan tsb. dilakukan maka ditempatkan dirumah sakit Semampir Kediri.
3. Beberapa waktu kemudian setelah Dachlan-Mustoffa dibawa kerumahsakit maka pada malamnja sekira djam 7 malam Pt. Let. Kol. Dachlan dan Mjr. Mustoffa kita bawa ke Ngantang ditempat jang dingin. Beberapa hari kemudian sdr. tersebut dirawat dirumah Pt. Mjr. Z. Sabaruddin Kediri Djl. Weringin 11 sehingga sehat kembali.
4. Setelah sehat maka Mjr. Mustoffa mendapat mandaat disjahkan oleh Komd. Bat. 38 serta berdjandji akan mengumpul seluruh anggauta B. 38 (Z. Sabaruddin).
5. Organisatoris — Administratif Technis jang bertanggung djawab Pt. Bat. Comd. Sabaruddin.

Anggauta Kowani :

1. Seluruh anggauta Kowani ditahan di Balai Pradjurit, lebih kurang sebanjak 60 orang. Didalam anggauta Kowani termasuk beberapa orang dari CC PKI Madiun jang kini berada Bat. 38 (sebagai saksi).
2. Berhubung dalam tawanan anggauta Kowani selalu terganggu oleh CPM pada waktu siang/malam, pula kesehatannja kurang sehat, maka semua anggauta Kowani kami lepaskan kembali dengan tidak disetudjui oleh CPM.
3. Sedang diantaranja seorang Kowani (Sulastri) bagian masjarakat mendapat mandaat sebagai anggauta pembantu Bat. 38.

Pengesjahan/pengangkatan Bat. 38 (Sabaruddin) pada tgl. 10 November '48 oleh Panglima Div. I. di Pesantren :

1. Pada tanggal 10 November '48 djam 10.00 pagi Bat. 38 Div. I. disjahkan oleh Panglima Div. I/Sup. Mil. Djawa Timur serta menjampaikan amanat2 kepada seluruh anggauta Bataljon, serta ikut pula Let. Kol. Surachmad.
2. Dalam amanat Panglima Div. I. tersebut adalah sebagai berikut :
   a. Bat. 38 Div. I. Pimpinan Mjr. Sabaruddin kami sjahkan. (Sesuai dengan perintah Panglima Tertinggi Presiden Rep. Indonesia) mulai ini hari tgl. 10 November 1948, serta segala kesalahan2 dihapuskan. Bat. Sabaruddin adalah sebagai plopor dari seluruh Bat. di Djawa Timur.
   b. berdjuang terus serta mengembalikan djiwa 17 Agustus 1945 serta memelihara semangat 10 Nov. '45 seterusnja.
   c. mendjaga/membersihkan segala sifat opportunis atau jang berkepala dua dalam kesatuan 38.
   d. Kami selaku Pangl. Div. I/G.M.D.T. mengesjahkan Bat. 38 sebagai plopor seluruh Djawa Timur serta terus berdjuang (sesuai dengan djiwa Agustus 1945).

Sentimen dari beberapa kesatuan CPM/Brg. Surachmad :

Setelah selesai beberapa minggu, pengesjahan Bat. 38 maka timbul ketjurigaan2 dari CPM dan Brg. „S" terhadap Bat. 38 (Sabaruddin) termasuk djuga dalam F.D.R. berhubung :
a. Melindungi/melepaskan anggauta2 FDR/PKI, Pesindo dan

B. 29.

b. Memperhebat/memperkuat mempersendjatai anggauta2 B. 29 dan FDR.

c. Tidak mau melakukan pembunuhan terhadap dirinja alm. Sidik Aslan cs.

Ajat diatas ini diperkuat pula oleh Let. Kol. Surachmad sehingga makin lama makin djauh diantara Let. Kol. Surachmad dan Bat. 38 sehingga djatuhnja Kediri dalam tempo sesingkat2nja. Kediri djatuh terlebih lagi tuduhan2 terhadap Bat. 38 bertambah hebat dsb; sehingga Blimbing affair selesai.

Demikian lapuran/verslag ini dengan sebenarnja.

Demi Rakjat, demi Negara Republik Indonesia, kami bersumpah dan membubuh tandatangan dengan saksi2 setjukupnja.

NB. Berhubung dengan Blimbing affair, maka segala proses verbaal kurang lengkap melainkan menurut peringatan kami dan kami perbuat hari ini tanggal 1 November 1949.

Tentara Nasional Indonesia
Bataljon 38/Div. I.
Commandant Contra Spionase.
ttd.
H. Maladi alias Idrus.

Maj. Z. Sabaruddin.
Pro. Jth. Btl. Kdt.

1. Untuk diketahui oleh segenap keluarga FDR/Pesindo enz.
2. Archif sebagai document.

Keterangan tambahan :

1. Untuk lebih djelas kami persilahkan kepada P.T. mjr. Z. Sabaruddin selaku Komd. Bat/38. Saksi2 :
   a. saksi2 dari anggauta B. 29 Sdr. Djamal dan Sdr. Dul.
   b. Inspecteur Polisi kl. II Sdr. Saimin.
   c. Anggauta CC PKI.
   d. Segenap anggauta Kepolisian C.I.S. Bat. 38.
   e. Komd. Brg. Bat. 29 Pt. Let. Kol. Dachlan dan Majoor Mustoffa bag. masjarakat.
   f. Wanita Kowani/sdr. Sulastri, Kemasan Gg. II/65 Kediri.
   g. Kepala Buruh Gula Sukarno dan sdr. Subandijono Pesantren.
   h. Anggauta pengawal mobil, Mochamad.

   Selesai.

Dengan sebenarnja dengan tiada mengurangi/melebihi menurut sumpah pada waktu menerima djabatan.

Noot : Keterangan lain2 dari jang bersangkutan.

RIS

Diturun tanggal 3 Djanuari 1950

Diturun Untuk ke II kalinja
tgl. 19-3-'55.

LAMPIRAN II

Tentara Nasional Indonesia Divisi I
Bataljon „38" (SABARUDDIN)

Tgl. 3 Djanuari 1950.

P E N G A K U A N

No. 325/Cdt/49/I.

Kami Commandant Bataljon 38 dari Tentara Nasional Indonesia Divisi I, Majoor *ZAINUL SABARUDDIN* :

dengan mengingat akan sumpah selaku :

a. Angkatan Perang Republik Indonesia ;
b. Anggota Central Commando Geurilla Pembela Proklamasi ;
c. Pemuda Republik Indonesia ;

„DEMI ALLAH, KEPENTINGAN NEGARA, PERDJUANGAN DAN PERSATUAN"

Bahwasanja pembunuhan (Snelrecht) jang didjatuhi terhadap sdr.2 :

1. alm. SIDIK ASLAN ;
2. „ MURSID ;
3. „ ANWARI ;
4. „ MUNADJI ;
5. „ ACHLIJAN ;
6. „ ISMANGIL.

No. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, telah mendjalani hukuman tembak (executie) pada tgl. 11 Nov. 1948 didesa Besuki (Modjo) pada djam 15.00 jang dilakukan/dikerdjakan oleh ;

a. Luitnan I. *SUDARMO*.
b. LUITNANT I. *HARIBOWO*.

ke-dua2nja dari Corps Polisi Militer Djawa di Kediri jang dipimpin oleh (atas perintah) *Majoor SUJATMO*, Commandant C.P.M. dan dikuati oleh Commandant Comando Militer Karesidenan Kediri *Luitnant Kolonel Raden SURACHMAD*.

Pengakuan ini kami lakukan dihadapan jang bersangkutan, untuk ditudjukan kepada :

a. Siaran chabar bohong jang dikeluarkan disekitar Wonosalam oleh *sdr. Gatot Sugyanto* ;
b. Memelihara persatuan jang consequent mentjapai Ke-

merdekaan sesuainja Prolamasi 17 Agustus 1945 ;

c. Mentjegah perpetjahan diantara sesama Patriotten jang tetap meneruskan perdjuangan, chusus dari Organisasi PESINDO ;

Dengan keterangan bahwa saksi jang pertama mengetahui dan melihat pembunuhan ini adalah *sdr. Djamal,* bekas chauffeur Cdt. Brigade 29 Luit. Kol. DACHLAN, sewaktu itu mendjabat chauffeur kami.

Pengakuan ini dibuat dengan sebenarnja dengan ta' melebihi atau mengurangi serta mengingat akan hak2 jang ada pada kami selaku Commandant Bataljon umumnja, warga negara chususnja.

S e l e s a i.

Dikeluar : Mosbat.
Pada tanggal : 4 November 1949
Djam : 10.00

Commandant
(MAJOOR ZAINUL SABARUDDIN)

LAMPIRAN III

TENTARA NASIONAL INDONESIA DIVISI I
BATALJON 38 (SABARUDIN)

Surat-Pengakuan
No. 326/Cdt/49/I.

Kami, Commandant Bataljon 38 Tentara Nasional Indonesia Divisi I, *Majoor Zainul Sabaruddin* dengan mengingat akan sumpah selaku Angkatan Perang Republik Indonesia, pada tanggal 4 November 1949 dihadapan jang bersangkutan memberikan/mengeluarkan sesuatu PENGAKUAN, *„DEMI ALLAH, KEPENTINGAN NEGARA, PERDJUANGAN DAN PERSATUAN"* atas PEMBUNUHAN (Snelrecht) dalam pembersihan Madiun-affaire terhadap pemuka2 dari Front Demokrasi Rakjat dan Commandanten dari Brigade 29 dengan tudjuan dan pengertian chusus untuk :

a. memelihara dan mendjaga perpetjahan antara sesama Patriot Bangsa dari segala aliran dan partai, untuk mentjiptakan sesuatu bolwerk kekuatan jang rieel dan compact menudju kearah Proklamasi 17-8-1945.

b. menjapu bersih infiltrators dari fihak reaksioneren jang menghendaki perpetjahan diantara sesama Patriot untuk kepentingan Belanda serta kaki tangannja jang telah bertachta dikalangan kita : sebagai tertera dibawah ini : *SIAPA PEMBUNUH ALM. SIDIK ASLAN, MURSID, MUNADJI, ACHJAN DLL.?*

Pada tgl. 11 November 1948 pada djam 15.00 hari itu, saja jang diikuti oleh chauffeur saja, bernama Djamal ialah bekas chauffeur dari Luit. Kol. Dachlan, berada di Besuki, oleh karena mengetahui akan adanja executie jang didjalankan oleh C.P.M. Kediri. Tertarik hati saja, oleh karena jakin, bahwa pembunuhan jang dilakukan itu tidak diadakan pengusutan jang teliti oleh fihak C.P.M. sesuainja Negara Hukum, apa lagi djika melihat sampai dimana pengertian Recht (hukum) sesuai Negara Demokrasi jang dimengerti oleh C.P.M. itu.

Setelah „diperiksa" menurut tjara jang diluar hukum, hampir tiada berpakaian, tangan dan leher diikat, patriot2 Rakjat ini digiring ketempat pembunuhan oleh Pemerintah Hatta.

Pada hari itulah tampak oleh saja 7 Pahlawan Revolusi pertama dari Surabaja, ialah alm. Sidik Aslan, Mursid, Achijan, Anwari, Ismangil dan dua pemuda jang tak saja kenal, diberdirikan masing2 dihadapan satu lobang jang akan mendjadi penutupan riwajat Pahlawan2 itu.

Pakaian2 dari mereka itu diperintahkan membuka, sehingga mereka hanja bertjelana pendek dan kutang sadja. Alm. Mursid jang pada waktu dalam keadaan berpuasa dengan sebuah botol berisi air ditangannja diperintahkan berdiri dimuka lobang jang ditetapkan mendjadi tempatnja.

Pembunuhan ini dilakukan oleh C.P.M. dibawah pimpinan *Luitenant I Sudarmo* (sekarang Commandant sector Tiron, Barat sungai Brantas Kediri) dan Luitenant I Haribowo, Cdt. mobil trup C.P.M. beserta anakbuahnja satu regu lengkap. Pembunuhan ini dilakukan eigenhandig oleh kedua opsir tersebut diatas. Kenjataan inilah membawa saja kearah protest terhadap Cdt. CMKKK Let. Kol. Surachmad dan Majoor Sujatmo Cdt. C.P.M. Djawa Timur, bahwa tindakan sematjam itu adalah tindakan meliwati hak2 selaku alat Negara dan Pemerintahan jang lahir dari revolusi ini.

Tuntutan saja, saja adjukan kepada Panglima Divisi dengan menuntut pembebasan semua anggota Pesindo dan brigade 29 jang ditawan di Kediri dan menjerahkan mereka ini pada Bataljon „S" untuk didjadikan anggota dan kedua, betrokken Officieren jang ternjata tersangkut paut dengan Peristiwa Madiun itulah jang seharusnja dituntut dan dihukum. Jang berhak mengadili mereka jang tersangkut paut itu jalah, sesuatu commisi jang ditetapkan oleh Panglima Divisi serta segala hukuman mati harus terlebih dahulu disetudjui dan diperintahkan oleh Panglima Divisi I selaku Gubernur Militer Djawa Timur. Perlu agaknja saja kemukakan disini beberapa keterangan jang dapat dimengerti sesama Patriot Bangsa dalam mengadakan kanalisasi lawan dan kawan, Reaksioneren dan Patriotten.

Betul bahwa Madiun-affaire itu menjeret Bataljon „S" dalam melakukan perang sesama saudara, akan tetapi sesuatu bukti mendjadi kenjataan dan sedjarahlah kelak dapat mengetahui nanti, bahwa dalam gerakan ini tidak ada SATU orang dari Bataljon „S" jang gugur. Malahan sendjata2 jang saja dapati di Dungus itu, tertera tulisan2 „Untuk kawan2 senasib dari Surabaja". Pula kembalinja Bataljon 38 dari Madiun itu adalah pada bulan September 1948 sebelum Madiun seluruhnja selesai, oleh karena tudjuan saja ke Madiun itu hanja SEN-

DJATA. Betul diantara kawan2 Patriot Pesindo dan ini hingga kini saja rasai, bahwa mungkin pada diri saja masih tersimpan benih SENTIMEN ATAU DENDAM, akan tetapi saja selaku Pemuda jang mengerti se-dalam2nja arti dari pada revolusi tetap mempunjai pendirian, bahwa soal tahun 1945 dan tahun 1946 jang menimpa organisasi PTKR tidak mendjadi ukuran bagi saja, oleh karena saja jakin dalam alam dan masa pantjaroba diwaktu itu, tiap2 Pemuda itu terdorong oleh perasaan HEROISME jang murni, jang pula berdasarkan ini, dapat dibelokkan kearah jang salah oleh Pemuda2 politik jang kenamaan jang dalam hakekatnja hanja seorang avonturier dan reaksioner belaka.

Saja kembali ketuntutan tersebut diatas : Tuntutan ini mendapat tamparan hebat dari Let. Kol. Surachmad dengan mengeluarkan penjelidikan terhadap organisasi Bat. saja dengan motto : Hubungan apa Sabarudin dengan F.D.R. ?

Almarhum Achjan. Kawan seperdjuangan saja dari Sidoardjo.

Saja kenal ia selaku pegawai S.S., sebagai kawan main bola, dan terutama saja mengetahui dasar dan tudjuan perdjuangannja. Djika saja ingat sesuatu siasat jang saja rentjanakan ber-sama2 dengan Let. Kol. Dachlan dan Achjan jang dengan disaksikan dengan sdr. Suroto selaku orang bekas kepala staf Brig. 29 pada bulan Djuni dan Djuli 1948 untuk menghantjurkan STC Kediri jang dipimpin oleh majoor SUHUD. Suatu bukti kelak dalam sedjarah nanti akan membukanja, bahwa sewaktu saja menggojangkan kota Kediri dengan penjerbuan terhadap CPM dan STC Kediri itu, Brig. 29 memberikan bantuan sepenuhnja pada Bat. 38 berupa moreel dan materieel. Ini suatu kenjataan.

Majoor Achjan, pada waktu dirawat dirumah sakit Kediri oleh karena siksaan jang dilakukan oleh CPM, telah saja datangi dan saja pesan padanja, sabarlah, satu kesempatan akan saja ambil untuk mengeluarkannja. Hari itu djuga ia diambil oleh majoor Banuredjo Kom. C.M.K.K.K. dan dipindahkan kemarkas C.M.K.K.K. Isteri Alm. Achjan mendatangi saja untuk meminta pertolongan. Setelah ini saja uruskan dengan majoor Banu, maka pada malam hari itu djuga sdr. Alm. Achjan dipindahkan ketempatnja jang tak saja ketahui.

Berkenaan dengan Let. Kol. Dachlan dan Majoor Mustoffa (Ex. Syodantyo).

Sepulang saja dari Madiun, maka terdapat oleh saja bahwa sdr. ini telah berada dirumah sakit, oleh karena pukulan jang diberikan oleh CPM dibawah perintah Sudarmo dengan karabijn, sehingga menjebabkan dua sdr. Ini mendapatkan lichte hersen-schudding dan otaknja keluar. Seketika itu djuga dua sdr. itu saja angkut keluar dari rumah sakit dan merawat ia sendiri dirumah saja di Ringinsirah 11, Kediri. Kebebasan untuk menemui keluarganja saja berikan malah rumah saja itu dapat diibaratkan rumah mereka sendiri. Jang berkepentingan dapatlah memadjukan pertanjaan2 terhadap isteri2 mereka sampai dimana kebenaran keterangan saja ini.

Sesuatu niatan jang timbul dari fihak saja ialah : untuk memerdekakan dan memperdjuangkan mereka kembali dikalangan2 bataljon 38. Perlu saja terangkan disini mengenai kedudukan Let. Kol. Dachlan.

Sewaktu saja dipanggil pemerintah Rep. Indonesia di Djokja dan djuga oleh Panglima Djawa Kol. Nasution, maka saja didesak oleh pemerintah untuk *menjerahkan Dachlan oleh karena ini jang melakukan pengchianatan* sesuainja decreet Presiden untuk memulai dengan pembersihan di Madiun. Oleh karena saja jakin, bahwa Djokja adalah pusat pemimpin2 jang birokratis dan haluannja agak kebarat, maka saja memadjukan suatu sangsi sanggup menjerahkan Dachlan djika PEMERINTAH MENJERAHKAN AMIR SJARIFUDDIN PADA KAMI ANAK2 DJAWA TIMUR. Berdasarkan pemerintah tidak dapat memenuhi sangsi saja itu, maka Dachlan tetaplah berada pada saja.

Pada tanggal 17 Desember 1948 djam 20.00 datanglah perintah dari Gub. Militer tertanda Let. Kol. Sungkono, untuk menjerahkan Let. Kol. Dachlan pada staf Gub. Mil. dengan antjaman : djika tidak mentaati perintah ini akan diambil tindakan pada diri saja. Sdr. Dachlan saja beritahukan dan diapun mengatakan : Sdr. Sabarudin, serahkanlah saja pada Sungkono, agar segala sesuatu dapat saja djelaskan duduknja perkara dengan setjara djudjur dan djantan.

Maka pada malam itu, berpisahlah kita dan saja jakin kemana Dachlan akan *dipergikan.*

Sdr. Mustoffa, sewaktu tgl. 19 Dec. 1948 mulai dengan peperangan, maka kesempatan ini jang tepat sekali bagi saja melepaskan ia dan memberikan mandaat pada Mustoffa selaku anggauta staf operatief dengan pangkat kapiten dari Batalion 38 dengan tugas tertentu ialah : Bertanggung djawab atas mengkonsolideer semua anggauta2 Brig 29 dan mewudjudkan satu kekuatan jang rieel. Memelihara tetapnja activitet gerilja didalam dan diluar kota Kediri. Sendjata2 dapat diperoleh dengan djalan melutjuti semua bersendjata jang ternjata melarikan atau mendjauhkan diri dari pertempuran. Mandaat ini sengadja saja berikan untuk dapat dimengerti oleh kawan sesama patriot bahwa bajangan peristiwa PTKR *tidak ada lagi pada saja* dan mentjegah kembali tangkapan dan perlutjutan2 jang pada waktu sudah hendak dilakukan kembali oleh Bataljon Hadji Machfud CPM MOB. BRG. Polisi, dan CMKKK diatas perintah Komd. Surachmad. Dengan tugas inilah sdr. Mustoffa dapat tetap in peil houden gerakan2 kita sehingga dapat menguasai posisi jang kuat disekitar Kediri. Mustoffa memimpin staf operatief Bat. 38 Sector Kediri, hingga tanggal 19-2-1949 sesuainja peristiwa Belimbing jang terkenal dan jang menimpai kedudukan dan organisasi Bat. 38 dan hantjurnja pertahanan kota Kediri, dan memasuki Bat. Munasir di Djombang hingga kini.

Pada sdr. Mustoffa lebihlah djelas lagi jang bersangkutan dapat keterangan untuk memeriksa sampai dimana kebenaran keterangan dan pengakuan saja ini.

Selandjutnja mengenai lain2 kawan jang masih ditahan oleh CPM dibui Kediri pada bulan December 1948, maka saja dapat memberi keterangan jang saja peroleh dari Let. I Sudarmo sendiri di Belimbing pada tanggal 9-2-1949 sbb. :

Pada waktu Belanda memulai doorstootnja pada tanggal 19 Dec. 1948, maka CPM melepaskan beberapa orang dari Kediri jang mereka anggap tak bersalah atau barangkali memang tiada waktu untuk memeriksa atau pula karena panik.

Sisa daripada mereka jang tetap ditawan, adalah sedjumlah 130. Pengakuan jang saja dapati dari Let. I Sudarmo tersebut, ialah diantara orang 130 itu terdapat kolonel Munadji, Komd. Alri kesatuan 8. Selandjutnja ia menerangkan, bahwa tgl. 20-21 Dec. '48 maka sedjumlah 130 orang ini dibasmi dengan executie, djuga didaerah Besuki (Modjo) jang turut mengerdjakan pembunuhan setjara besar2an ini terdapat seorang Djepang, anggota CPM bernama : Moh. Djaman.

Saja fikir dengan pengakuan ini dapatlah kepada kawan2 setudjui didjernihkan atau disapu segala infiltrator dari fihak jang memang menghendaki perpetjahan, agar tetap terpeliharanja perdjuangan kita seterusnja. Keterangan ini atau pengakuan ini saja berikan dengan tidak melebihi atau mengurangi, dengan mengingat sumpah2 selaku pemuda jang bertanggungdjawab atas Rep. Indonesia dalam perdjuangan revolusi kita pada umumnja.

Tetapi sebaliknja ini saja agak merasa menjesal dan ketjewa atas pelaporan2 jang disiarkan setjara langsung ataupun tidak langsung pada kawan2 seperdjuangan dari Pesindo didaerah Wonosalam dan sekitarnja, siaran provokasi mana konon kabarnja disiarkan oleh sdr. Gatot Subjanto, salah satu anggota staf I dari Pesindo jang berani mengakui bahwa pembunuhan Alm. Sidik Aslan cs. *saja jang melakukan dengan meminumi darah para korban itu.*

Kepada organisasi Pesindo dan terutama kepada keluarga mereka jang mendjadi korban itu, saja serukan : bahwa siaran ini adalah sesuatu siaran jang sangat berani disiarkan, sehingga meliwati batas2nja dan bahwa siaran ini mau tidak mau hendaknja dipertanggung djawabkan pula. Sesuatu sangsi jang hendak saja kemukakan, apakah siaran ini tidak dikeluarkan oleh seorang infiltrator dari fihak lawan jang menjelundup diorganisasi Pesindo ? Karena selama perang ini sebetulnja telah terbentuk dua blok jang kuat dalam pendirian dan perdjuanganja. Fihak reaksioner dan fihak konsekwen Radikalen. Masing2 blok ini mempunjai kekuatan jang agak seimbang. Untuk memetjahkan atau menghantjurkan blok Radikal, agar tertjapai tjita2 negara jang menjimpang dari proklamasi, maka djalan lain tidak ada lagi daripada djalan pemetjah-belahan blok itu dengan djalan memasuki infiltrator2nja. Sebab empat tahun sudah tjukup bagi tiap2 pemuda jang mengetahui dan mengetjapkan perdjuangan kita selama itu, bahwa perdjuangan atau revolusi kita ini telah dibawa kearah vaarwater imperialis kapitalis barat dan bangsa sendiri jang bertachta dipemerintah Republik dan berkedok Nasionalis asli. Ingat dan waspadalah sdr.2 Saja selaku anggota Central Komandan Gerillia Pembela Proklamasi (GPP) tjukup mengetahui sudah pait getir perdjuangan kita bersama. Dan pengorbanan jang sia2 itu tjukup sudah memperlemah kita setjara langsung maupun tidak langsung. Hendaknja pula diingat, bahwa konsekwensi saja dalam memperdjuangkan tjita2 bersama, saja tidak terikat pada tucht dari tentara jang ditetapkan dari atasan, tetapi terikat pada tucht proklamasi 17-8-'45. Belimbing affairs tjukup sudah membuka chalajak ramai jang berdjiwa asli Republiken, kemana hendak saja bawa perdjuangan Bat. 38, dan kemana pula hendak saja bawa rakjat pada umumnja.

Sdr. jang bertanggung djawab atas organisasi Pesindo !

Lihat dan peladjarilah se-dalam2nja peristiwa2 di Selatan (Lodojo) dan sekitar Ponorogo jang terdjadi pada bulan2 terachir ini sesudah gentjatan. Gentjatan ini membawa akibat menggentjet kita sendiri. Pembersihan didaerah selatan Blitar jang aktif dilakukan oleh Mobile Brigade Polisi dengan bantuan penuh dari Bataljon Sikatan jang menjebutkan sekarang namanja Bataljon S (harap awas) dan Bataljon Sobiran dari Tulungagung, jang kesemuanja ini perintah dari Let. Kol. Surachmad dan andjuran dari Cdt. SWK. III di Wonokerto daerah Malang, jalah Majoor Moechlas Rowi, terlihat bajangan2 bahwa jang dimaksudkan „pembersihan" ini adalah mempunjai backing party dan kepentingan Belanda dengan menuduh membersihkan „kaum Merah" (progressief-patriotten). Ketahuilah sdr.2 Patih Guhawan, Majoor Natak telah mendjadi korban pada bulan September 1949 jang baru lalu ini oleh kaum Si Pembersih ! Sesuatu figuur jang tjakap dan jang dibutuhkan oleh masjarakat dengan pendirian jang kokoh tegas.

Tjukup sudah/pengakuan saja tertera diatas, dan bermohon saja dengan sangat dan hormat terhadap organisasi Pesindo, untuk segera membersihkan suasana sekitar pengakuan saja ini. Suatu saksi untuk memperkuat pengakuan saja ini, dapat saja keluarkan setjara pampletten op roneo (surat edaran) dengan tandatangan saja, untuk membuktikan pembunuhja itu, jalah satu consequentie dari fihak bataljon 38 dengan pasti akan timbulnja persengketaan dan pertikaian kedalam jang tidak kita inginkan.

Sekian pengakuan saja dan siap sedia pula untuk satu saat menundjukkan kuburan2 dari pada mereka di Besuki itu.

Sekali Merdeka tetap Merdeka.
Vide et crede. Selesai !

Dikeluarkan : Mosbat
Pada tanggal : 4 November 1949
Djam : 10.00

Commandant
(Majoor Zainul Sabarudin)

UNTUK KONSTITUSI REPUBLIK PROKLAMASI 1945

1. Lihat brosur: *Susunlah Konstitusi jang benar2 Konstitusi Res Publica*, Penerbitan Kementerian Penerangan R.I. th. 1956.
Res Publica — kata-asal „Republik" jang berarti kepentingan umum. Seruan Bung Karno untuk menjusun Konstitusi Res Publica dimaksudkan guna menjusun Konstitusi jang benar2 mewakili kepentingan Rakjat baik dalam politik, ekonomi, sosial dan kebudajaan dan bukannja Konstitusi negara Islam atau negara federasi.
2. *Idem*, hlm. 160.
3. Lihat keterangan no. 2 pada tulisan *Bersatulah Untuk Menjelesaikan Tuntutan2 Revolusi Agustus 1945*.
4. Brosur *Susunlah Konstitusi jang benar2 Konstitusi Res Publica*, Penerbitan Kementerian Penerangan R.I. th. 1956, hlm. 13.
5. *Sumpah Pemuda tahun 1928* — Ikrar jang ditjetuskan oleh Kongres Pemuda pada tgl. 28 Oktober 1928 di Djakarta jang menegaskan bahwa Indonesia ber-tanahair, ber-bangsa dan ber-bahasa satu. Semua ini adalah peresmian dan pengakuan terhadap nasion Indonesia jang sudah lahir sedjak awal abad ke-XX.
6. Brosur *Susunlah Konstitusi jang benar2 Konstitusi Res Publica* Penerbitan Kementerian Penerangan R.I. th. 1956, hlm. 20.
7. *Idem*, hlm. 15.
8. *Idem*, hlm. 16.
9. Mr. A.K. Pringgodigdo, *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia* Penerbitan Pustaka Rakjat. hlm. 13.

SEKALI LAGI SEMBOJAN „TANAH UNTUK KAUM TANI"

1. W.I. Lenin, *Surat kepada kaum buruh Amerika*.

UBAH IMBANGAN KEKUATAN UNTUK MELAKSANAKAN KONSEPSI PRESIDEN SUKARNO 100% !

1. *Pakt Bagdad* — persetudjuan dan blok militer agresif jang dibikin oleh Amerika-Inggeris guna memetjahbelah negeri2 Arab dengan dalih „Anti Komunis". Didirikan di Bagdad (ibukota Irak) pada bulan November th. 1955 dengan anggota2nja: Inggeris, Turki, Iran, Pakistan dan Irak. Walaupun Amerika Serikat tidak resmi mendjadi anggota Pakt tersebut, tapi ia adalah pengandjurnja dan mempunjai pengaruh besar terhadap segala keputusannja. Setelah terdjadi revolusi 14 Djuli di Irak jang menggulingkan kekuasaan Radja Faisal II dan mendirikan Republik Irak merdeka, maka Irak keluar dari Pakt Bagdad sehingga membikin berantakan Pakt Bagdad.
2. *„Persetudjuan Warsawa"* — persetudjuan jang diadakan oleh negeri2 Uni Sovjet, Polandia, Republik Demokrasi Djerman, Tjekoslowakia, Rumania, Hongaria, Bulgaria, Albania pada tgl. 14 Mei 1955 di Warsawa dengan tudjuan untuk saling membela dan mendjaga keselamatan hasil2 sosialis jang telah ditjapai terhadap antjaman kontra-revolusioner kaum imperialis, lewat NATO dan pakt agresif militer imperialis lainnja.
3. *Pernjataan Bersama Indonesia-Uni Sovjet* — Sebagai pelaksanaan pernjataan bersama Indonesia-Uni Sovjet dalam lapangan kerdjasama perdagangan telah disetudjui pemberian kredit Uni Sovjet kepada Indonesia sebesar $ 100.000.000 dengan pembajaran dalam 12 tahun serta bunga 2½%. Kredit ini untuk membeajai 5 projek pertambangan a.l. di Ombilin, Towuti, Muara Tewe, Buton dan Malili.
4. *„Doktrin Eisenhower"* — jalah doktrin tentang agresi dan kolonialisme Amerika terhadap negeri2 Arab dengan dalih „bantuan ekonomi dan militer guna menjelamatkan kemerdekaan negeri2 Timur Tengah dari kegiatan subversif komunisme internasional", „teori kekosongan" karena kekalahan militer Inggeris-Perantjis di Mesir. Doktrin ini disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada tgl. 9 Maret 1957 dengan beaja sebesar 200 djuta dollar untuk tahun 1957. Doktrin ini sepenuhnja mentjerminkan kepentingan kaum monopolis minjak AS di Timur Tengah.
5. *Westerling di Sulawesi Selatan* — peristiwa pembunuhan massal oleh seorang Kapten tentara kolonial Belanda bernama Westerling terhadap Rakjat disekitar Makasar, Palopo, Bontain dll. pada tgl. 11 Desember 1946. Tudjuannja ialah untuk memudahkan pembentukan Negara Indonesia Timur a la Van Mook. Kuranglebih 40.000 orang telah mendjadi korban.
6. *Persetudjuan Pasaran Bersama Eropa dan Persetudjuan Euratom* — dua persetudjuan jang ditandatangani di Roma pada tgl. 25 Maret 1957 oleh enam negara Eropa Barat, anggota NATO, jaitu Djerman Barat, Perantjis, Italia, Nederland, Belgia dan Luxemburg.
Persetudjuan Pasaran Bersama Eropa — resminja bernama „Persetudjuan Pembentukan Masjarakat Ekonomi Eropa" („Treaty Establishing The European Economic Community") pada pokoknja berisi penentuan2 bahwa dalam periode peralihan selama 12 sampai 15 tahun semua rintangan perdagangan diantara negeri2 peserta sudah harus dihapuskan. Persetudjuan ini sesungguhnja adalah persetudjuan diantara monopoli2 masing2 negeri dan memungkinkan negeri jang paling kuat ekonominja (djadi, sebenarnja kaum monopolis negeri itu) untuk memaksakan kehendaknja pada peserta2 jang lebih lemah. Atas tekanan Amerika Serikat, persetudjuan ini merupakan kompromi jang terutama menguntungkan kaum monopolis Djerman Barat.
Persetudjuan Euratom — resminja „Persetudjuan Pembentukan Masjarakat Tenaga Atom Eropa" („Treaty Establishing The European Atomic Energy Community") untuk mengadakan organisasi terbatas jang bersifat monopoli-negara guna mengintensifkan pekerdjaan dalam lapangan tenaga nuklir. Setjara formil, maksud Euratom jalah untuk memusatkan penggunaan tenaga atom untuk tudjuan2 industri jang damai. Tetapi sesungguhnja pembentukannja ditudjukan untuk memusatkan usaha2 sekelompok negeri2 kapitalis Eropa Barat jang mendjadi anggota NATO pada penggunaan tenaga atom dalam lapangan militer. Pembentukan Euratom merupakan dasar ekonomi untuk memperlengkapi angkatan perang NATO dengan sendjata2

atom. Berkat persetudjuan ini monopoli2 Djerman Barat memperoleh kesempatan takterbatas untuk membuat sendjata2 atom.

7. *„Peristiwa 13 Agustus 1956"* — pertjobaan penahanan oleh klik militer Kol. Zulkifli Lubis atas diri Menteri Luarnegeri Ruslan Abdulgani dari kabinet Ali ke-II jang pada waktu itu hendak pergi ke London guna menghadiri konferensi tentang masalah Terusan Suez.
kudeta Lubis tgl. 16 November 1956 — pertjobaan perebutan kekuasaan di Djakarta oleh Kol. Zulkifli Lubis dengan djalan mengerahkan Pasukan RPKAD (Resimen Pendidikan Komando Angkatan Darat) dari Bandung ke Djakarta dengan maksud mengepung dan melutjuti APRI jang ada di Djakarta.
perebutan kekuasaan oleh „Dewan Banteng" — terdjadi pada tgl. 20 Desember 1956 dengan diopernja pimpinan pemerintah daerah Sumatera Tengah setjara sukarela dari tangan Gubernur Ruslan Muljohardjo (Masjumi) ketangan Let. Kol. Ahmad Husen sebagai ketua „Dewan Banteng" jang sekarang dikenal dengan „PRRI". „Dewan Banteng" ini diproklamasikan oleh anggota2 ex-divisi Banteng di Sumatera Tengah dalam reuninja tgl. 20-24 November 1956.
perebutan kekuasaan oleh komplotan Simbolon — terdjadi pada tgl. 22 Desember 1956 dengan pengumuman Panglima TT I Kol. M. Simbolon di Medan, jang membentuk „Dewan Gadjah" dengan beberapa opsir bekas divisi Gadjah dan menjatakan bahwa Pemerintah Sumatera Utara telah melepaskan hubungan dengan Pemerintah Pusat dan diopernja kekuasaan diwilajah TT I oleh M. Simbolon tsb.
„Dewan Garuda" — dibentuk oleh apa jang menamakan diri „Kongres kaum adat Sumatera Selatan tanggal 15-17 Djanuari 1957" di Palembang jang terdiri dari elemen2 feodal, federal dan sementara perwira aktif serta beberapa eksponen veteran jang a.l. menurut supaja Prof. Hazairin, seorang feodal federal, diangkat sebagai gubernur Sumatera Selatan. Dengan kedok „membela kepentingan daerah", Dewan ini melakukan kegiatan separatis.
peristiwa 2 Maret 1957 — pengoperan kekuasaan diwilajah Komando Daerah Pengamanan Sulawesi Selatan dan Tenggara (KDPSST) oleh Let. Kol. V. Sumual dan Saleh Lahade dan diumumkannja Propinsi Sulawesi Utara jang memisahkan diri dari Pusat dan jang sekarang dikenal dengan „Permesta".

8 *Krisis Kabinet Ali-Idham* — penjerahan mandat oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo (Kabinet ke-XVI) pada tgl. 14 Maret 1957 kepada Presiden Sukarno karena tidak dapat mengatasi peristiwa kudeta di-daerah2.
KDP — singkatan dari Keadaan Darurat Perang diseluruh wilajah Negara R.I. jang dinjatakan oleh Presiden Sukarno pada tgl. 14 Maret 1957.
Kabinet Djuanda — suatu Zaken Kabinet Darurat Extra Parlementer jang dibentuk oleh formator Dr. Ir. Sukarno pada tgl. 9 April 1957 dengan Ir. Djuanda sebagai Perdana Menterinja. Program Kabinet ini ialah :

1. Membentuk Dewan Nasional
2. Normalisasi keadaan Republik
3. Melandjutkan pelaksanaan pembatalan KMB
4. Perdjuangan Irian Barat
5. Mempergiat pembangunan.

9. *Radjamandala* — suatu tempat ketjil jang menghubungkan djalan raja Bogor — Bandung, dimana pada tgl. 10 Mei 1957 telah dipusatkan kl. satu bataljon gerombolan DI-TII untuk mentjoba menghadang rombongan Presiden Sukarno dan Presiden Worosilov dalam perdjalanannja ke Bandung. Dengan dihantjurkannja kl. satu kompi DI-TII oleh Angkatan Perang jang patriotik setelah pertempuran sengit maka usaha pembunuhan tersebut telah dapat digagalkan.

10. *RKS* — singkatan dari Rapat Kerdja Sama, suatu bentuk persatuan jang berhasil menjatukan buruh2 pegawai negeri dalam membela kepentingannja se-hari2. Atas inisiatif SOBSI, RKS dibentuk pada tanggal 22 Mei 1954 di Djakarta. Anggotanja mula2 32 organisasi dan sekarang kl. 75 organisasi terdiri dari SOBSI, GSBI dan banjak sekali SB2 non-vaksentral jang beranggota 100.000 orang lebih. Pada tgl. 2 Desember 1956 dikalangan SB2 modal asing kemudian dibentuk RKS SB modal asing. Bentuk kegiatan RKS jalah pengiriman delegasi2 jang dipimpin setjara bergiliran (menurut abdjad) berdasarkan tuntutan kongkrit jang ber-sama2 telah disetudjui sebelumnja kepada Pemerintah dan madjikan.
BKS — singkatan dari Badan Kerdja Sama, seperti diatas, terutama dikalangan serikatburuh dan serikatsekerdja pegawai negeri dibeberapa lingkungan kementerian jang biasa disebut BKS-sekementerian.

11. *PGRI* — singkatan Persatuan Guru Republik Indonesia dan didirikan pada tgl. 24 Nopember 1945, dengan anggota kl. 70.000 orang.
SSKDN — Sarekat Sekerdja Kementerian Dalamnegeri.
SB Kempen — Sarekat Buruh Kementerian Penerangan.
Persadja — Persatuan Djaksa.

12. *PP 19* — singkatan dari Peraturan Pemerintah no. 19 jang a.l. memuat fasal bahwa pensiun seorang suami pegawai jang meninggal boleh diambil oleh isterinja jang ke-berapa sadja, djika ia berpoligami. Dengan demikian sebenarnja peraturan tsb. telah melegalisasi poligami di Indonesia.

„peristiwa Maisuri" — peristiwa larinja seorang gadis bernama Maisuri disesuatu tempat di Sumatera Selatan, karena dipaksa kawin oleh orang tuanja dengan lelaki jang ia tidak sukai. Pengadilan telah mendjatuhkan hukuman enam bulan kepadanja.
Attamimi — seorang keturunan Arab jang ber-sama2 4 temannja telah memperkosa seorang gadis dibawah umur sampai mati seketika itu djuga. Peristiwa ini terdjadi pada th. 1957 di Lawang daerah Malang. Atas desakan massa Attamimi dihukum 14 tahun pendjara.

MASJARAKAT INDONESIA DAN REVOLUSI INDONESIA

1. Sedjak dibubarkannja VOC tahun 1800, Indonesia mulai didjadjah setjara langsung oleh pemerintah Belanda dan masjarakat Indonesia jang tadinja bersifat merdeka dan feodal mendjadi masjarakat kolonial dan feodal.
2. Lihat K. Marx, *Kapital*, djilid I, penerbitan Balai Penerbitan Bahasa Asing, bahasa Inggeris, th. 1958, halaman 752.
3. Sedjak berkuasanja imperialisme Belanda di Indonesia pada tahun

1895, dimana ekonomi kapitalis telah merusak ekonomi feodal, maka masjarakat Indonesia kemudian mendjadi masjarakat kolonial dan setengah-feodal.

4. Sebagai akibat pengambilalihan perusahaan2 Belanda tgl. 3 Desember 1957 oleh kaum buruh dan Rakjat Indonesia dalam rangka perdjuangan Irian Barat, perusahaan2 tsb. setjara resmi diambilalih oleh Pemerintah RI, tetapi statusnja sampai sekarang masih menggantung. Nama2nja telah di-Indonesianisasikan, tapi isinja hakekatnja masih tetap seperti dulu.

RAKJAT INDONESIA BERTEKAD BULAT UNTUK MENUNAIKAN TUGAS2 REVOLUSI AGUSTUS

1. *Dewan2 ilegal* — dewan2 separatis jang didirikan oleh klik2 militeris kontra-revolusioner dengan tudjuan menghantjurkan negara Republik Indonesia, seperti Dewan Gadjah, Dewan Banteng, Dewan Garuda. Lihat djuga keterangan no. 7 pada tulisan *Ubah Imbangan Kekuatan Untuk Melaksanakan Konsepsi Presiden Sukarno 100% !*
Warlord — jang dimaksud disini ialah „radjaperang2" Indonesia jang terdiri dari orang2 militer jang melakukan pemberontakan separatis kontrarevolusioner guna menghantjurkan Republik Proklamasi jang didahului dengan penjelundupan2 dan barter2 gelap untuk memperkaja diri sendiri.

REVOLUSI OKTOBER DAN RAKJAT2 TIMUR

1. Lihat brosur Dr. Ir. Sukarno, *Revolusi Oktober dan Kebangunan Rakjat Asia*, Penerbitan Jajasan „Pembaruan" tahun 1957, hlm. 10.
2. Lihat brosur N.S. Chrusjtjov, *Laporan Comite Central Partai Komunis Uni Sovjet kepada Kongres ke-XX Partai*, Penerbitan Jajasan „Pembaruan" th. 1956, hlm. 54.
3. *Idem*, hlm. 55.
4. Lihat buku ini hlm. 78.
5. *Kerala* — suatu negara-bagian India. Dalam pemilihan umum pada bulan Djanuari 1957, meskipun mendapat rintangan2 hebat dari Pemerintah Nehru (Partai Kongres), Partai Komunis telah keluar sebagai pemenang mutlak. Angka2nja sbb. :

Partai Komunis	33	kursi
„ Kongres	23	„
„ Sosialis praja	3	„
„ Liga Muslimin	3	„

Dengan hasil pemilihan umum ini, maka untuk pertama kalinja wakil PK India (EMS Namboodiripad) mendjadi Perdana Menteri Pemerintahan di Kerala. Pada achir tahun 1959, Pemerintah ini dibubarkan dengan kekerasan oleh Pemerintah Nehru, karena takut akan makin besarnja pengaruh PK India.
6. Lihat buku ini hlm. 79.

SESUAIKAN „HARIAN RAKJAT" DENGAN PERKEMBANGAN SITUASI JANG TJEPAT

1. *„teror Tjikini"* — peristiwa penggranatan oleh gerombolan teroris jang dipimpin oleh bekas Kol. Zulkifli Lubis, Nasuhi dll. terhadap diri Presiden Sukarno jang sedang menghadiri perajaan anak2 sekolah Rakjat Tjikini pada tgl. 30 November 1957. Sebelum ini telah terdjadi pelemparan granat djuga terhadap gedung CC PKI, Sobsi dll. dengan tudjuan guna membunuh pemimpin2 PKI dan organisasi progresif lainnja.
Usaha djahat ini telah gagal dan mengakibatkan 9 anak2 jang tak berdosa meninggal dan puluhan anak2 lainnja menderita tjatjad seumur hidup. Atas kedjahatannja itu Pengadilan Negeri mendjatuhkan hukuman mati kepada biangkeladi2 teror tersebut.
2. *„Panitia 7"* — panitia jang dibentuk oleh Musjawarah Nasional dengan tugas mengutuhkan Angkatan Perang jang terdiri dari 7 orang jaitu Presiden/Panglima Tertinggi Sukarno, Moh. Hatta, Menteri Pertahanan Djuanda, Wakil P.M. III Dr. J. Leimena, Menteri Kesehatan Dr. Azis Saleh, Sultan Hamengku Buwono dan KSAD Djen. Maj. A.H. Nasution. Tetapi dalam pelaksanaannja putusan ini telah disalahgunakan oleh sementara pedjabat militer untuk „bermusjawarah" dengan kaum pemberontak. Usaha ini tidak berhasil dan kemudian dibekukan karena diantara orang2 militer jang akan direhabilitasi tersangkut dalam „teror Tjikini".
„Panitia 9" — panitia ad hoc Parlemen jang diketuai Ahem Erningpradja jang dibentuk berdasarkan usul resolusi Mr. Memed Tarumihardja dkk jang diterima dengan aklamasi oleh Parlemen pada tgl. 29-11-1957. Tugasnja ialah untuk mentjarikan bentuk2 kerdjasama antara Sukarno dan Hatta jang sebagaimana diketahui telah gagal.

FASE BARU DAN PENJESUAIAN ORGANISASI DENGAN SITUASI

1. *Djamila* — nama lengkapnja Djamila Bourheid, seorang gadis pahlawan kemerdekaan Rakjat Aldjazair jang akan dihukum mati karena dituduh tersangkut dalam peristiwa peledakan bom bulan Djuli 1957. Atas protes Rakjat jang tjintadamai seluruh dunia, hukuman mati jang sedianja akan dilakukan pada tgl. 7 Maret 1958, terpaksa diubah mendjadi seumur hidup.
2. W.I. Lenin, *Dua Taktik Sosial-Demokrasi didalam Revolusi Demokratis*, Penerbitan Jajasan „Pembaruan" tahun 1957, hlm. 54.
3. *„Peristiwa Siantar"* — perlutjutan dan penangkapan terhadap OPD (Organisasi Pagar Desa) bulan September 1957 di Sumatera Timur dan pergeseran komandan dan kepala staf Res. II TT. I. Kekuatan Res. II dan OPD tersebut merupakan tulangpunggung kekuatan Saptamarga ketika menghantjurkan perebutan kekuasaan klik Simbolon. Kontradiksi2 jang terdapat di Sumatera Timur waktu itu adalah : kontradiksi antara kekuatan Saptamarga dan klik Simbolon ; kekuatan jang menghendaki Sumatera Utara tetap satu provinsi dan elemen2 jang hendak mendjadikan Sumatera Timur provinsi tersendiri lepas dari Sumatera Utara, dimana kekuatan feodal, burdjuasi

kanan dan AVROS (Algemene Vereniging van Rubber Cultuur Ondernemingen ter Ooskust van Sumatra) berdiri d belakangnja. Usaha2 reaksi jang hendak memperpolitikkan „Peristiwa Siantar" tersebut untuk memukul seluruh kekuatan progresif bisa digagalkan berkat kewaspadaan dan kokohnja kekuatan progresif di Sumatera Utara, hingga keutuhan kekuatan Saptamarga b sa d pertahankan.

DAFTAR PENGGOLONGAN ARTIKEL

Soal² Pokok Revolusi

hlm.

Bersatulah Untuk Menjelesaikan Tuntutan² Revolusi Agustus 1945 32
12 November Dan Perdjuangan Nasional Anti-Kolonialisme ... 104
Tentang Komposisi Pimpinan Konstituante 112
Konfrontasi Peristiwa Madiun (1948) — Peristiwa Sumatera (1956) 123
Hatta Biangkeladi Dalam Menggagalkan Konsepsi Bung Karno 143
Rakjat Dan Angkatan Perang Harus Bekerdjasama Dalam Mentjapai Tudjuan² Positif Dari Keadaan Darurat Perang 150
Bukan Krisis, Tapi Bandjir Besar Kekuatan Demokratis Dan Patriotik 154
Untuk Konstitusi Republik Proklamasi 1945 159
Beladjar Lebih Banjak Untuk Lebih Memperbaiki Praktek Revolusioner Kita! 176
Sekali Lagi Sembojan „Tanah Untuk Kaum Tani" 182
Rakjat Indonesia Sedang Bergeser Kekiri 186
Ubah Imbangan Kekuatan Untuk Melaksanakan Konsepsi Presiden Sukarno 100%! 192
Masjarakat Indonesia Dan Revolusi Indonesia 247
Mentjoblos Palu-Arit Berarti Mengalahkan Kaum Teroris 301
Rakjat Indonesia Bertekad Bulat Untuk Menunaikan Tugas² Revolusi Agustus 307
Melarang PKI Berarti Menentang 4 Sila Daripada Pantjasila 319
Revolusi Oktober Dan Rakjat² Timur 324
Pemuda Rakjat Harus Tetap Setia Kepada Revolusi Agustus 1945 337
Mari Membangun Dengan Rentjana! 342

Djika Irian Barat Gagal di PBB, „Djalan Lain" Adalah Djalan Kemenangan 353
Perdjuangan Irian Barat Didukung Oleh Front Nasional Jang Tjukup Luas 358
Perlu Tindakan Tegas Untuk Mentjegah Korban Rakjat Jang Banjak 374
Fase Baru Dan Penjesuaian Organisasi Dengan Situasi 377
Kalahkan Konsepsi Politik Amerika Serikat 444
Perbuatan Agresi Amerika Serikat Akan Sangat Merugikan Amerika Serikat Sendiri 464
Wanita Komunis Pedjuang Untuk Masjarakat Baru 472
„Universitas Rakjat" Sebagai Sumbangan Untuk Menjelesaikan Revolusi Agustus Sampai Ke-akar²nja 511
Mendukung Demokrasi Terpimpin Adalah Politik Jang Paling Revolusioner 518
Semangat Sumpah Pemuda Haruslah Semangat Untuk Melaksanakan Demokrasi Terpimpin Dan Konsepsi Presiden 523
Bersatu Menempuh Djalan Demokrasi Terpimpin Menudju Pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100% 526
Madjulah Terus Gerakan Wanita Indonesia Untuk Emansipasi Dan Masjarakat Baru 557

Pembangunan Partai

Djangan Henti²nja Memperbesar Pengaruh „Harian Rakjat" 8
Bersatulah Untuk Menjelesaikan Tuntutan² Revolusi Agustus 1945 32
12 November Dan Perdjuangan Nasional Anti-Kolonialisme ... 104
„Harian Rakjat" Sendjata Ditangan Rakjat Dan Partai 116
Bukan Krisis, Tapi Bandjir Besar Kekuatan Demokratis Dan Patriotik 154
Beladjar Lebih Banjak Untuk Lebih Memperbaiki Praktek Revolusioner Kita! 176
Ubah Imbangan Kekuatan Untuk Melaksanakan Konsepsi Presiden Sukarno 100%! 192
Masjarakat Indonesia Dan Revolusi Indonesia 247

Mentjoblos Palu-Arit Berarti Mengalahkan Kaum Teroris 301
Melarang PKI Berarti Menentang 4 Sila Daripada Pantjasila 319
Mari Membangun Dengan Rentjana! 342
Sesuaikan „Harian Rakjat" Dengan Perkembangan Situasi Jang Tjepat 366
Fase Baru Dan Penjesuaian Organisasi Dengan Situasi 377
Wanita Komunis Pedjuang Untuk Masjarakat Baru 472
Bersatu Menempuh Djalan Demokrasi Terpimpin Menudju Pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100% 526

Front Persatuan Nasional

Djangan Henti²nja Memperbesar Pengaruh „Harian Rakjat" ... 8
Bersatulah Untuk Menjelesaikan Tuntutan² Revolusi Agustus 1945 32
12 November Dan Perdjuangan Nasional Anti-Kolonialisme ... 104
Tentang Komposisi Pimpinan Konstituante 112
„Harian Rakjat" Sendjata Ditangan Rakjat Dan Partai 116
Hatta Biangkeladi Dalam Menggagalkan Konsepsi Bung Karno 143
Rakjat Dan Angkatan Perang Harus Bekerdjasama Dalam Mentjapai Tudjuan² Positif Dari Keadaan Darurat Perang 150
Bukan Krisis, Tapi Bandjir Besar Kekuatan Demokratis Dan Patriotik 154
Untuk Konstitusi Republik Proklamasi 1945 159
Beladjar Lebih Banjak Untuk Lebih Memperbaiki Praktek Revolusioner Kita! 176
Sekali Lagi Sembojan „Tanah Untuk Kaum Tani" 182
Rakjat Indonesia Sedang Bergeser Kekiri 186
Ubah Imbangan Kekuatan Untuk Melaksanakan Konsepsi Presiden Sukarno 100%! 192
Masjarakat Indonesia Dan Revolusi Indonesia 247
Mentjoblos Palu-Arit Berarti Mengalahkan Kaum Teroris 301
Sedikit Tentang Kerdjasama PNI-PKI 304
Rakjat Indonesia Bertekad Bulat Untuk Menunaikan Tugas² Revolusi Agustus 307
Musjawarah Nasional Berachir Dengan Kemenangan Nasional 316

Melarang PKI Berarti Menentang 4 Sila Daripada Pantjasila 319
Mari Membangun Dengan Rentjana! 342
Perdjuangan Irian Barat Didukung Oleh Front Nasional Jang Tjukup Luas 358
Sesuaikan „Harian Rakjat" Dengan Perkembangan Situasi Jang Tjepat 366
Perlu Tindakan Tegas Untuk Mentjegah Korban Rakjat Jang Banjak 374
Fase Baru Dan Penjesuaian Organisasi Dengan Situasi 377
Kalahkan Konsepsi Politik Amerika Serikat 444
Sesudah Pemberontakan „PRRI" Dikalahkan Persatuan Nasional Lebih² Lagi Diperlukan 455
„Universitas Rakjat" Sebagai Sumbangan Untuk Menjelesaikan Revolusi Agustus Sampai Ke-akar²nja 511
Mendukung Demokrasi Terpimpin Adalah Politik Jang Paling Revolusioner 518
Semangat Sumpah Pemuda Haruslah Semangat Untuk Melaksanakan Demokrasi Terpimpin Dan Konsepsi Presiden 523
Bersatu Menempuh Djalan Demokrasi Terpimpin Menudju Pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100% 526
Madjulah Terus Gerakan Wanita Indonesia Untuk Emansipasi Dan Masjarakat Baru 557

Gerakan Massa

Sekali Lagi Sembojan „Tanah Untuk Kaum Tani" 182
Pemuda Rakjat Harus Tetap Setia Kepada Revolusi Agustus 1945 337
Mari Membangun Dengan Rentjana! 342
„Universitas Rakjat" Sebagai Sumbangan Untuk Menjelesaikan Revolusi Agustus Sampai Ke-akar²nja 511
Semangat Sumpah Pemuda Haruslah Semangat Untuk Melaksanakan Demokrasi Terpimpin Dan Konsepsi Presiden 523
Madjulah Terus Gerakan Wanita Indonesia Untuk Emansipasi Dan Masjarakat Baru 557

Prinsip² Internasionalisme Proletar Dan Solidaritet Internasional

Hidup Kongres ke-XX PKUS! 12
Kongres ke-XX PKUS 17
Sambutan Terhadap Kongres ke-III Partai Buruh Korea 27
Tidak Ada Agresi Sovjet Di Hongaria 99
Revolusi Oktober Dan Rakjat² Timur 324
Pidato Sambutan Dihadapan Kongres Ke-XI Partai Komunis Tjekoslowakia 483
Pidato Didepan 8000 Aktivis Partai Komunis Tjekoslowakia Di Praha 487
Kegagalan Kontra-revolusi Lebih Memperkuat Sosialisme Di Hongaria 495
Hidup PPSD, Pemimpin Sedjati Rakjat Republik Demokrasi Djerman! 499
Semua Partai Di Indonesia Bersatu Menjokong Perdjuangan Rakjat Aldjazair 503
Konfederasi Adalah Satu²nja Pemetjahan Politik Jang Objektif Bagi Djerman 506

ISI

hlm.

Katapengantar 7
Djangan Henti²nja Memperbesar Pengaruh „Harian Rakjat" 8
Hidup Kongres ke-XX PKUS ! 12
Kongres ke-XX PKUS 17
Sambutan Terhadap Kongres ke-III Partai Buruh Korea 27
Bersatulah Untuk Menjelesaikan Tuntutan² Revolusi Agustus 1945 32
Tidak Ada Agresi Sovjet Di Hongaria 99
12 November Dan Perdjuangan Nasional Anti Kolonialisme ... 104
Tentang Komposisi Pimpinan Konstituante 112
„Harian Rakjat" Sendjata Ditangan Rakjat Dan Partai 116
Konfrontasi Peristiwa Madiun (1948) — Peristiwa Sumatera (1956) 123
Hatta Biangkeladi Dalam Menggagalkan Konsepsi Bung Karno 143
Rakjat Dan Angkatan Perang Harus Bekerdjasama Dalam Mentjapai Tudjuan² Positif Dari Keadaan Darurat Perang 150
Bukan Krisis, Tapi Bandjir Besar Kekuatan Demokratis Dan Patriotik 154
Untuk Konstitusi Republik Proklamasi 1945 159
Beladjar Lebih Banjak Untuk Lebih Memperbaiki Praktek Revolusioner Kita ! 176
Sekali Lagi Sembojan „Tanah Untuk Kaum Tani" 182
Rakjat Indonesia Sedang Bergeser Kekiri 186
Ubah Imbangan Kekuatan Untuk Melaksanakan Konsepsi Presiden Sukarno 100% ! 192
Masjarakat Indonesia Dan Revolusi Indonesia 247
Mentioblos Palu-Arit Berarti Mengalahkan Kaum Teroris 301
Sedikit Tentang Kerdjasama PNI-PKI 304

Rakjat Indonesia Bertekad Bulat Untuk Menunaikan Tugas² Revolusi Agustus 307
Musjawarah Nasional Berachir Dengan Kemenangan Nasional 316
Melarang PKI Berarti Menentang 4 Sila Daripada Pantjasila 319
Revolusi Oktober Dan Rakjat² Timur 324
Pemuda Rakjat Harus Tetap Setia Kepada Revolusi Agustus 1945 337
Mari Membangun Dengan Rentjana! 342
Djika Irian Barat Gagal Di PBB, „Djalan Lain" Adalah Djalan Kemenangan 353
Perdjuangan Irian Barat Didukung Oleh Front Nasional Jang Tjukup Luas 358
Sesuaikan „Harian Rakjat" Dengan Perkembangan Situasi Jang Tjepat 366
Perlu Tindakan Tegas Untuk Mentjegah Korban Rakjat Jang Banjak 374
Fase Baru Dan Penjesuaian Organisasi Dengan Situasi 377
Kalahkan Konsepsi Politik Amerika Serikat 444
Sesudah Pemberontakan „PRRI" Dikalahkan Persatuan Nasional Lebih² Lagi Diperlukan 455
Perbuatan Agresi Amerika Serikat Akan Sangat Merugikan Amerika Serikat Sendiri 464
Wanita Komunis Pedjuang Untuk Masjarakat Baru 472
Pidato Sambutan Dihadapan Kongres ke-XI Partai Komunis Tjekoslowakia 483
Pidato Didepan 8000 Aktivis Partai Komunis Tjekoslowakia Di Praha 487
Kegagalan Kontra-revolusi Lebih Memperkuat Sosialisme Di Hongaria 495
Hidup PPSD, Pemimpin Sedjati Rakjat Republik Demokrasi Djerman! 499
Semua Partai Di Indonesia Bersatu Menjokong Perdjuangan Rakjat Aldjazair 503
Konfederasi Adalah Satu²nja Pemetjahan Politik Jang Objektif Bagi Djerman 506

„Universitas Rakjat" Sebagai Sumbangan Untuk Menjelesaikan Revolusi Agustus Sampai Ke-akar²nja 511
Mendukung Demokrasi Terpimpin Adalah Politik Jang Paling Revolusioner 518
Semangat Sumpah Pemuda Haruslah Semangat Untuk Melaksanakan Demokrasi Terpimpin Dan Konsepsi Presiden 523
Bersatu Menempuh Djalan Demokrasi Terpimpin Menudju Pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100% 526
Madjulah Terus Gerakan Wanita Indonesia Untuk Emansipasi Dan Masjarakat Baru 557
Keterangan-keterangan 560
Daftar penggolongan artikel 583

R A L A T

Halaman 19, baris 14 dari bawah : .....negeri² itu (2). *semestinja :* ....negeri² itu." (2)

Halaman 35, baris 2 dari bawah : ....tututan²...., *semestinja :* ....tuntutan²....

Halaman 63, baris 17 dari atas : dll.) (3) untuk...., *semestinja :* dll. (3)) untuk....

Halaman 79, baris 23 dari atas : benar demokratis...., *semestinja :* benar² demokratis....

Halaman 186, baris 2 dari atas : ....tanggal 22 Djuli 1957, *semestinja :* ....tanggal 22 Djuni 1957....

Halaman 217, baris 3 dari bawah : ....sudah men-, *semestinja :* ....sudah mem-.

Rp. 65,—

Rp. 65,—